



**Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2023**

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

**Optimalisasi Potensi Daerah untuk
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**



**Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bulukumba 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Srikaya No. 2 Bulukumba Tlp.(0413) 81070

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERITAH KABUPATEN BULUKUMBA

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Substansi Informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bulukumba.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, apakah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sehingga RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan.

Bulukumba, 30 Juni 2023

An.Inspektur Daerah

Sekretaris

Muhammad Nurjalil, SH.,MH

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 19671104 199803 1 005



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah, program strategis provinsi dan nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. acuan dan/atau pedoman dalam penyelarasan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam wilayah Daerah untuk mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. dasar penyusunan KUA dan PPAS serta sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB VII PENUTUP

- (2) Rincian sistematika RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III tidak memproyeksikan alokasi Transfer Alokasi Dana Khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun 2024, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Dalam merumuskan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAB IV, tetap memperhatikan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAB V, memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

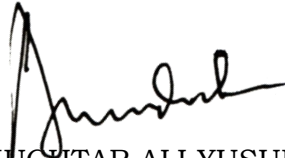
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 18

Daftar Isi

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Kuadran	xvii
Lampiran – lampiran.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-42
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-129
2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	II-132
2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-143
2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-145
2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Suistanable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	II-147
2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs).....	II-162
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-165
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-285
2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-285
2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)	II-285
2.6 Isu Strategis.....	II-291
2.6.1 Isu Strategis Global.....	II-292
2.6.2 Isu Straegis Nasional	II-297
2.6.3 Isu Strategis Daerah.....	II-299
2.7 Inovasi Daerah.....	II-303
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja III-18

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-23

3.3. Pendanaan Pembangunan Lainnya..... III-25

3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)..... III-25

3.3.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) III-25

3.3.3. Pembiayaan Utang Daerah..... III-26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan..... IV-1

4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-10

4.2.1. Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-10

4.2.2. Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-13

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 IV-14

4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 IV-33

4.3. Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional..... IV-35

4.3.1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 IV-35

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 IV-43

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba..... IV-55

4.4.1. Bidang Pemerintahan..... IV-55

4.4.2. Bidang Ekonomi dan Keuangan IV-55

4.4.3. Bidang Pembangunan IV-57

4.4.4. Bidang Kesejahteraan Rakyat IV-57

4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan RKPD Tahun 2024 IV-58

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024 V-1

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 V-1

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024..... V-15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1

6.1. Indikator Makro Pembangunan VI-1

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1

6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-2

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-18

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* VI-20

BAB VII PENUTUP VII-1

7.1. Kaidah Pelaksanaan VII-1

7.2. Kesimpulan VII-2

Daftar Tabel

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba.....	II-1
Tabel II-2 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-6
Tabel II-3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022	II-7
Tabel II-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2022.....	II-8
Tabel II-5 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022	II-8
Tabel II-6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II-9
Tabel II-7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-9
Tabel II-8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2018-2022	II-11
Tabel II-9 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-12
Tabel II-10 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022	II-13
Tabel II-11 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022	II-13
Tabel II-12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-14
Tabel II-13 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-16
Tabel II-14 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022	II-17
Tabel II-15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-17
Tabel II-16 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	II-18
Tabel II-17 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2022.....	II-19
Tabel II-18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-20
Tabel II-19 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-22
Tabel II-20 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba.....	II-24
Tabel II-21 Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022	II-26
Tabel II-22	II-28
Tabel II-23 Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022	II-30
Tabel II-24 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba	II-31
Tabel II-25 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022..	II-33
Tabel II-26 Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018-2022	II-35
Tabel II-27 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-2022	II-35
Tabel II-28 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-38

Tabel II-29 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-38
Tabel II-30 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-39
Tabel II-31 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-39
Tabel II-32 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-39
Tabel II-33 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-39
Tabel II-34 Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-40
Tabel II-35 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-40
Tabel II-36 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-40
Tabel II-37 Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-40
Tabel II-38 Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-41
Tabel II-39 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-41
Tabel II-40 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-41
Tabel II-41 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-41
Tabel II-42 Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-41
Tabel II-43 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2022	II-42
Tabel II-44 Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 2018- 2022	II-42
Tabel II-45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 - 2022	II-43
Tabel II-46 Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-43
Tabel II-47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-44
Tabel II-48 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022	II-44
Tabel II-49 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022	II-45
Tabel II-50 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022	II-45
Tabel II-51 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2018 - 2022	II-46
Tabel II-52 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-46
Tabel II-53 Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-46
Tabel II-54 Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-47
Tabel II-55 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-47
Tabel II-56 Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-48
Tabel II-57 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-48
Tabel II-58 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk	II-49
Tabel II-59 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk	II-49
Tabel II-60 Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-50
Tabel II-61 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-50
Tabel II-62 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-50

Tabel II-63 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-51
Tabel II-64 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-51
Tabel II-65 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-52
Tabel II-66 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	II-52
Tabel II-67 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-53
Tabel II-68 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	II-53
Tabel II-69 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-54
Tabel II-70 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-54
Tabel II-71 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-55
Tabel II-72 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..II-55	
Tabel II-73 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-56
Tabel II-74 Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-56
Tabel II-75 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-57
Tabel II-76 Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-57
Tabel II-77 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-58
Tabel II-78 Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-58
Tabel II-79 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-58
Tabel II-80 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-58
Tabel II-81 Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-59
Tabel II-82 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	II-59
Tabel II-83 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	II-59
Tabel II-84 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-60
Tabel II-85 Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-60
Tabel II-86 Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ...II-60	
Tabel II-87 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	II-61
Tabel II-88 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-61
Tabel II-89 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan	II-61
Tabel II-90 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	II-62
Tabel II-91 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2018 – 2022	II-62
Tabel II-92 Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 II-62	
Tabel II-93 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	II-63
Tabel II-94 Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	II-63
Tabel II-95 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di	II-64

Tabel II-96 Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-64
Tabel II-97 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratdi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022.....	II-65
Tabel II-98 Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-65
Tabel II-99 Angka sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-66
Tabel II-100 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-66
Tabel II-101 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-66
Tabel II-102 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-67
Tabel II-103 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-67
Tabel II-104 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-67
Tabel II-105 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022.....	II-68
Tabel II-106 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-68
Tabel II-107 Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-68
Tabel II-108 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-68
Tabel II-109 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat... ..	II-69
Tabel II-110 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-69
Tabel II-111 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-69
Tabel II-112 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022.....	II-70
Tabel II-113 Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-70
Tabel II-114 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-70
Tabel II-115 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022.....	II-70
Tabel II-116 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022.....	II-71
Tabel II-117 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	II-71
Tabel II-118 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-72
Tabel II-119 Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-72
Tabel II-120 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022	II-73
Tabel II-121 Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-73
Tabel II-122 Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-73

Tabel II-123 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-74
Tabel II-124 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-74
Tabel II-125 Hasil Pengukuran IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-74
Tabel II-126 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-75
Tabel II-127 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	II-75
Tabel II-128 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-75
Tabel II-129 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-130 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-131 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-132 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-133 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-77
Tabel II-134 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-77
Tabel II-135 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-77
Tabel II-136 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-78	
Tabel II-137 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-78
Tabel II-138 TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-79
Tabel II-139 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-79
Tabel II-140 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-79
Tabel II-141 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-80
Tabel II-142 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-80
Tabel II-143 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-80
Tabel II-144 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-83
Tabel II-145 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-83
Tabel II-146 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-84
Tabel II-147 Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-84
Tabel II-148 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-85

Tabel II-149 Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-86
Tabel II-150 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-86
Tabel II-151 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-87
Tabel II-152 Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-87
Tabel II-153 Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-88
Tabel II-154 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-88
Tabel II-155 Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-88
Tabel II-156 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-89
Tabel II-157 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-89
Tabel II-158 Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel II-159 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-90
Tabel II-160 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-90
Tabel II-161 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-91
Tabel II-162 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-91
Tabel II-163 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-91
Tabel II-164 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-92
Tabel II-165 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-92
Tabel II-166 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel II-167 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-93
Tabel II-168 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-93
Tabel II-169 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-93
Tabel II-170 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-94
Tabel II-171 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..	II-94

Tabel II-172 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..II-94	
Tabel II-173 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-95
Tabel II-174 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-95
Tabel II-175 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-95
Tabel II-176 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-96
Tabel II-177 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-96
Tabel II-178 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-96
Tabel II-179 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-96
Tabel II-180 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-97
Tabel II-181 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba.....	II-97
Tabel II-182 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022	II-97
Tabel II-183 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-98
Tabel II-184 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-98
Tabel II-185 Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-98
Tabel II-186 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-98
Tabel II-187 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-99
Tabel II-188 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-99
Tabel II-189 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-99
Tabel II-190 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-100
Tabel II-191 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-100
Tabel II-192 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-100
Tabel II-193 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....	II-101
Tabel II-194 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-101
Tabel II-195 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-101	
Tabel II-196 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-101
Tabel II-197 Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-102

Tabel II-198 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-102
Tabel II-199 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-103
Tabel II-200 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..	II-103
Tabel II-201 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-104
Tabel II-202 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-104
Tabel II-203 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022....	II-105
Tabel II-204 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-105
Tabel II-205 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-106
Tabel II-206 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ...	II-106
Tabel II-207 Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-106
Tabel II-208 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-107
Tabel II-209 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-107
Tabel II-210 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-108
Tabel II-211 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-108
Tabel II-212 Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-109
Tabel II-213 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-109
Tabel II-214 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-109
Tabel II-215 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-110
Tabel II-216 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-110
Tabel II-217 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-110
Tabel II-218 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-111
Tabel II-219 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-111
Tabel II-220 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-112
Tabel II-221 Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-112
Tabel II-222 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-112
Tabel II-223 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-112
Tabel II-224 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-113
Tabel II-225 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.	II-113
Tabel II-226 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-113
Tabel II-227 Jumlah Pelanggan listrik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-114
Tabel II-228 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-114
Tabel II-229 Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat Kabupaten Bulukumba tahun 2020.....	II-115

Tabel II-230 Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2018-2022.....	II-116
Tabel II-231 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-116
Tabel II-232 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-117
Tabel II-233 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-117
Tabel II-234 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-118
Tabel II-235 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-118
Tabel II-236 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-118
Tabel II-237 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-118
Tabel II-238 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-119
Tabel II-239 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..	II-119
Tabel II-240 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-120
Tabel II-241 Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-120
Tabel II-242 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-120
Tabel II-243 Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-121
Tabel II-244 Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-121
Tabel II-245 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-122
Tabel II-246 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-123
Tabel II-247 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-123
Tabel II-248 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-123
Tabel II-249 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-124
Tabel II-250 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-124
Tabel II-251 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ...	II-124
Tabel II-252 Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-125
Tabel II-253 Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-125
Tabel II-254 Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-125
Tabel II-255 Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-126
Tabel II-256 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-126

Tabel II-257 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-127
Tabel II-258 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bulukumba 2018-2022.....	II-127
Tabel II-259 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2018-2022	128
Tabel II-260 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-128
Tabel II-261 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022	II-128
Tabel II-262 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022	II-130
Tabel II-263 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022	II-131
Tabel II-264 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	II-132
Tabel II-265 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-143
Tabel II-266 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..	II-148
Tabel II-267 Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	II-162
Tabel II-268 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD	II-166
Tabel II-269 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD	II-168
Tabel II-270 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD	II-170
Tabel II-271 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	II-172
Tabel II-272 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-174
Tabel II-273 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD	II-174
Tabel II-274 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	II-177
Tabel II-275 Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba	II-304
Tabel III-1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	III-5
Tabel III-2 Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	III-6
Tabel III-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	III-6
Tabel III-4 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	III-6
Tabel III-5 Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	III-7
Tabel III-6 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)	III-10
Tabel III-7 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022	III-11
Tabel III-8 Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024	III-17
Tabel III-9 Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024	III-22
Tabel III-10 Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024	III-24
Tabel III-11 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022	III-25
Tabel IV-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026	IV-2

Tabel IV-2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	IV-2
Tabel IV-3 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	IV-4
Tabel IV-4 Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024	IV-7
Tabel IV-5 Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	IV-12
Tabel IV-6 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	IV-13
Tabel IV-7 Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-16
Tabel IV-8 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-19
Tabel IV-9 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024	IV-22
Tabel IV-10 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-24
Tabel IV-11 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2024	IV-31
Tabel IV-12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024	IV-33
Tabel IV-13 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024	IV-36
Tabel IV-14 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024	IV-44
Tabel IV-15 Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	IV-55
Tabel IV-16 Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	IV-60
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2024	V-1
Tabel V-2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	V-3
Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba	V-15
Tabel V-4 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	V-17
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024	VI-1
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba	VI-2
Tabel VI-3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba	VI-3
Tabel VI-4 Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba	VI-18
Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2024	VI-21

Daftar Gambar

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.....I-4

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba II-1

Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba II-2

Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba..... II-3

Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba..... II-4

Gambar IV-1 Tema RKP Tahun 2024 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 IV-11

Gambar IV-2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-12

Gambar IV-3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024..... IV-12

Daftar Grafik

Grafik II-1 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2022 II-3

Grafik II-2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2022 II-7

Grafik II-3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018-2022..... II-10

Grafik II-4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022 II-11

Grafik II-5 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022..... II-15

Grafik II-6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional..... II-16

Grafik II-7 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2018-2022 II-17

Grafik II-8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 II-19

Grafik II-9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 II-21

Grafik II-10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2022 II-22

Grafik II-11 Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba..... II-22

Grafik II-12 Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022 II-23

Grafik II-13 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022..... II-25

Grafik II-14 Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022 II-26

Grafik II-15 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022..... II-27

Grafik II-16 Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022..... II-28

Grafik II-17 Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021 II-29

Grafik II-18 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2018-2022 II-31

Grafik II-19 Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022 II-32

Grafik II-20 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2018-2022..... II-33

Grafik II-21 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022..... II-34

Grafik II-22 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-202..... II-36

Grafik II-23 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2022 II-37

Grafik II-24 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan II-38

Grafik II-25 Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 II-129

Grafik II-26 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Bulukumba 2018 – 2022 II-129

Grafik II-27 Angka Kriminalitas yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-131

Grafik II-28 Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-131

Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 III-9

Grafik III-2 PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024 III-11

Grafik III-3 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024.....III-12

Grafik III-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024.....III-12

Grafik III-5 Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan NasionalIII-13

Grafik III-6 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2018-2022 III-14

Daftar Kuadran

Kuadran II-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 (Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah)..... II-10

Kuadran II-2 Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022 II-15

Kuadran II-3 Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2018-2022) II-18

Kuadran II-4 Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022..... II-21

Kuadran II-5 Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022 II-23

Kuadran II-6 Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 II-25

Kuadran II-7 Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 II-27

Kuadran II-8 Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 II-29

Kuadran II-9 Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022..... II-32

Kuadran II-10 Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2022..... II-34

Kuadran II-11 Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2018-2022..... II-36

Lampiran – lampiran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 18 TAHUN 2023 TANGGAL 7 JULI 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 JULI 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Serta dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 juga berpedoman pada RKP Nasional 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pada Pasal 16 Ayat (1) ini mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembug warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,81 %, Tingkat Kemiskinan 7,39 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,26 %, Gini Ratio 0,361, Indeks Pembangunan Manusia 70,34 Angka/Nilai dan PDRB Perkapita (ADHB) 38,55 Juta/Rp.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

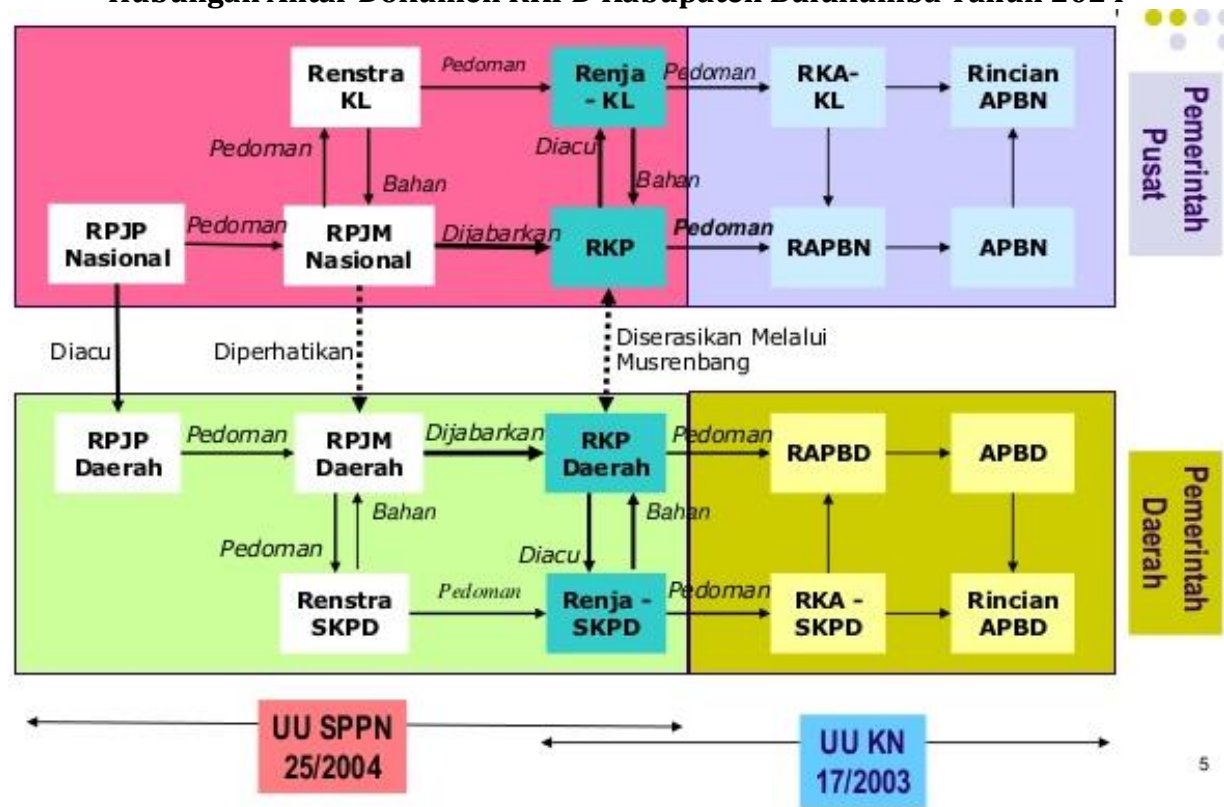
- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan, serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan, serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jangka panjang daerah Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar I-1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Wilayah Kabupaten Bulukumba yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,

sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Bulukumba dan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman dan merupakan penjabaran Tahun Ketiga dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 terkait perencanaan di tahun 2024. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yaitu:

1. Penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten; dan
4. Pedoman dalam memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
5. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
6. Pedoman untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
7. Sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yaitu:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi-Selatan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada BAB ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

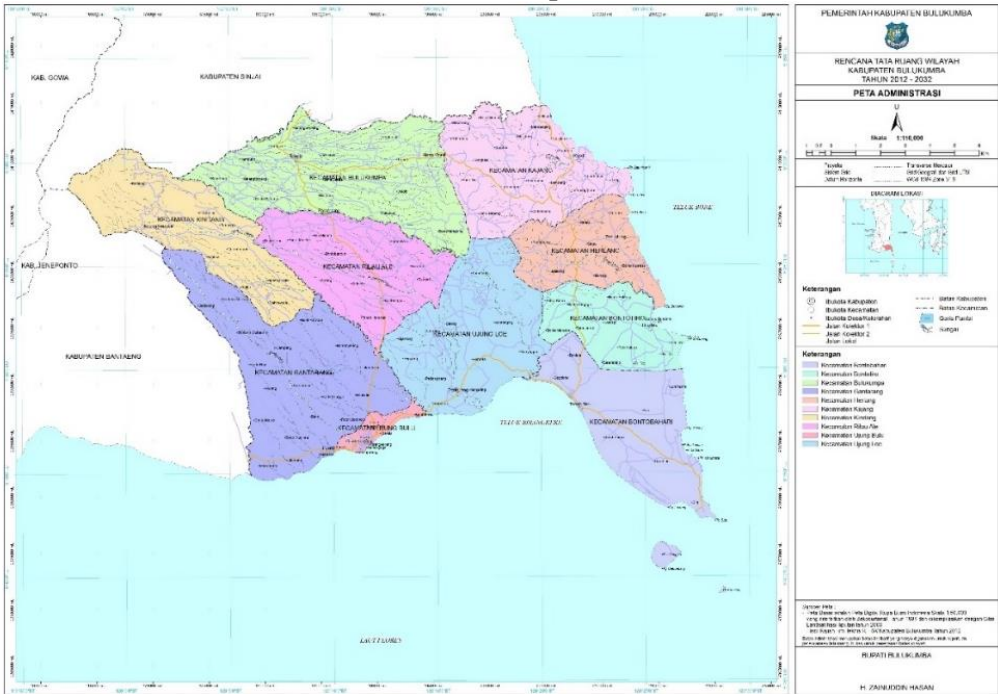
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km².

Adapun dengan batas -batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar II-1
Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 km² dan 171.33 km² . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km². Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

Tabel II-1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (km2)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
1.	Gantarang	3	18	8	82	173,51	15,03
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	14,44	1,25
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	144,31	12,50
4.	Bontobahari	4	4	13	13	108,6	9,41
5.	Bontotiro	1	12	5	45	78,34	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	68,79	5,96

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (km2)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
7.	Kajang	2	17	11	100	129,06	11,18
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	171,33	14,84
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	117,53	10,18
10.	Kindang	1	12	4	46	148,67	12,88
Kabupaten Bulukumba		27	109	98	489	1.154,58	100.00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1. Letak dan Kondisi Geografis

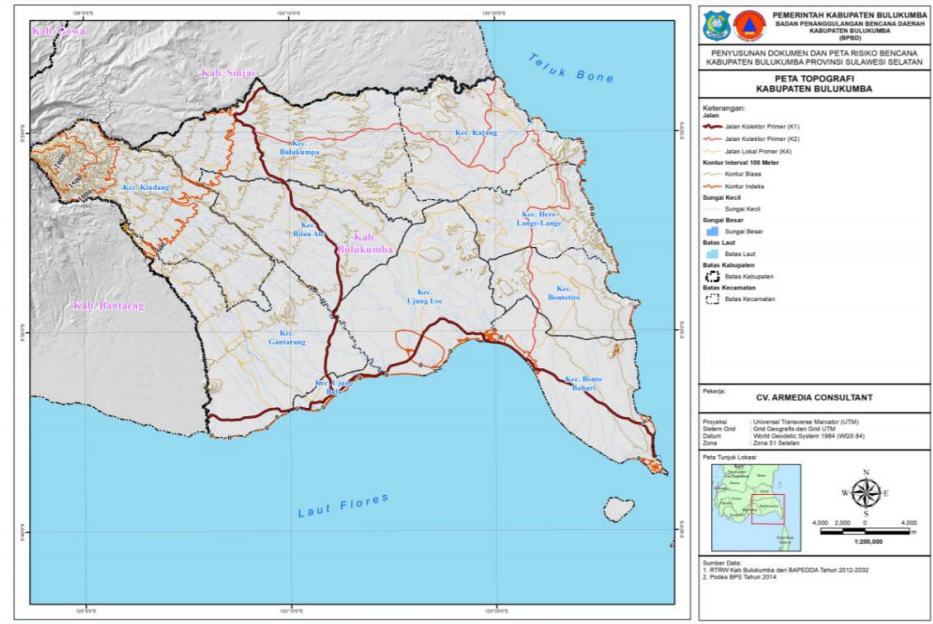
Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20’-05°40’ Lintang Selatan (LS) dan 119°58’-120°28’ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu. Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang. yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-1
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2022

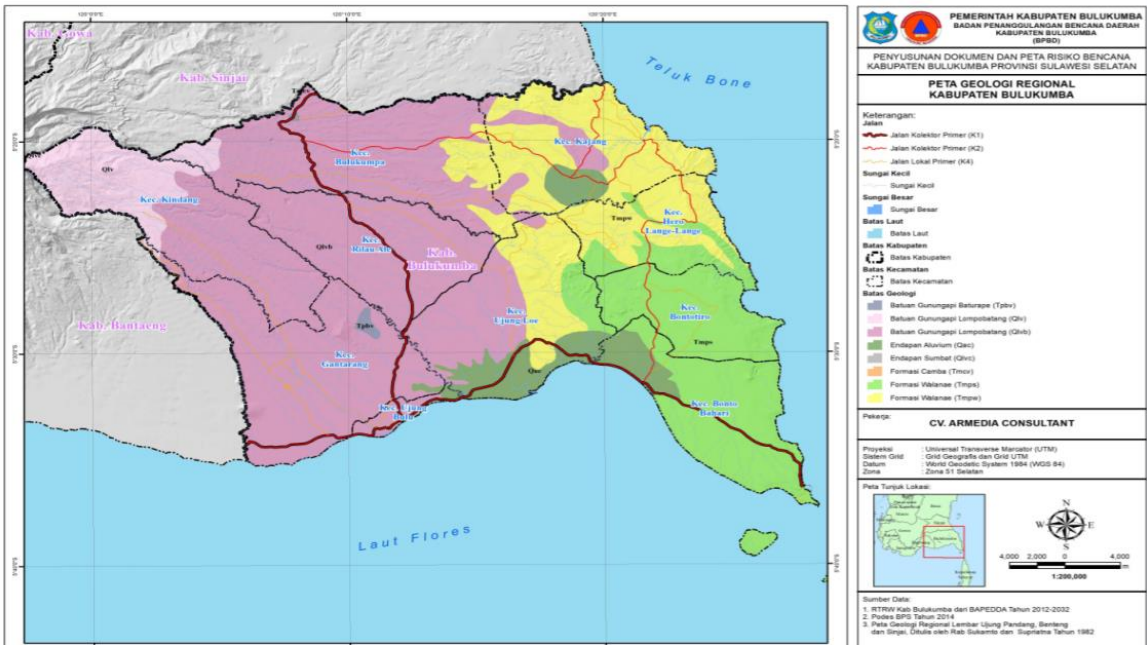
Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
Gantarang	25	5
Ujung Bulu	0	1
Ujung Loe	26	11
Bonto Bahari	26	27
Bontotiro	100	35
Herlang	80	42
Kajang	80	62
Bulukumpa	100	31
Rilau Ale	100	24
Kindang	500	33

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

3. Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-3
Peta Geologi Bulukumba



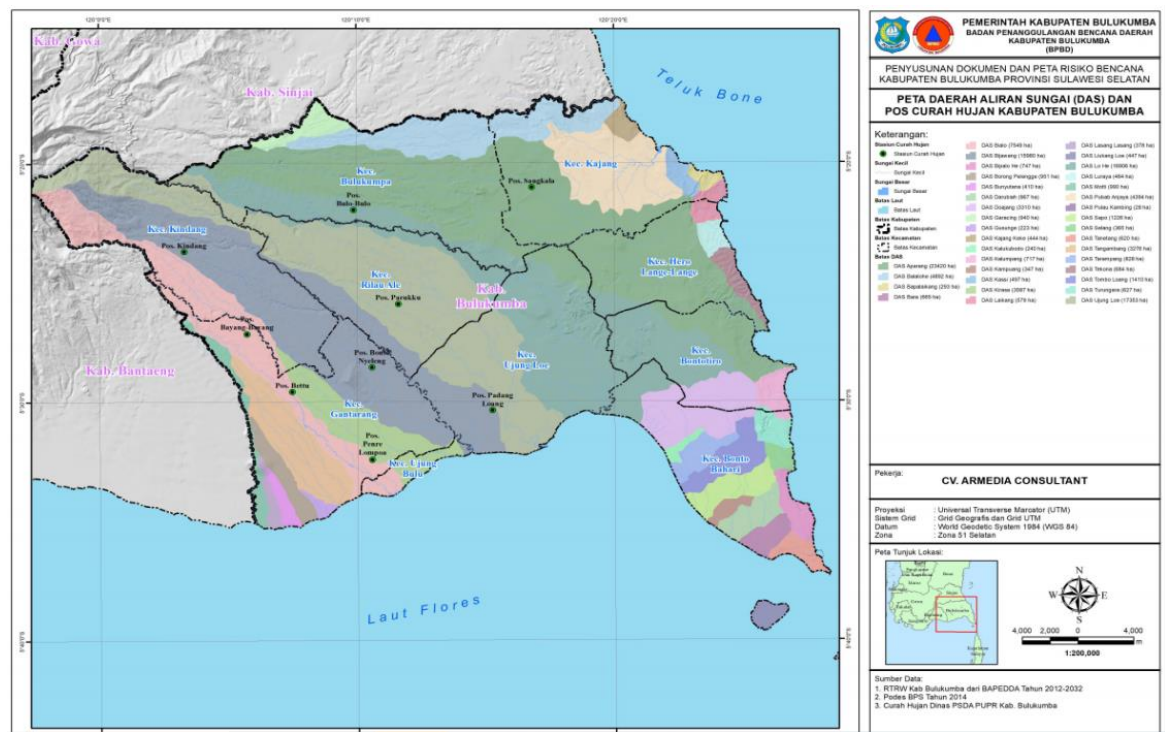
Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

4. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah

sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Balibo yakni 5 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar II-4 dan Tabel II-2 dibawah ini.

Gambar II-4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

5. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto bahari.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Letak wilayah Kabupaten Bulukumba yang berhadapan langsung dengan Laut Flores menjadikan wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki gelombang pasang yang cukup tinggi. Daerah rawan abrasi terdapat di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Herlang. Selain Abrasi,

Gempa Bumi juga kerap terjadi walaupun masih dalam magnitudo yang rendah, merupakan salah satu wilayah yang dilintasi oleh sesar aktif, yaitu Sesar Walanae membentang dari arah barat laut hingga tenggara di wilayah Sulawesi Selatan. Sesar ini memiliki panjang sekitar 130 Km dan tergolong jenis sesar strike-slip (sesar geser). Berdasarkan data seismisitas di wilayah Bulukumba dan sekitarnya 5 tahun terakhir (data 2016- 2020) telah terjadi sebanyak 82 kejadian dan sebanyak 9 kejadian gempa bumi dirasakan selama 10 tahun terakhir (2009-2020).

Gempa bumi di wilayah Bulukumba dan sekitarnya didominasi oleh Gempabumi dangkal ($H < 60$ km) dengan rentang magnitudo antara M 2.0 hingga M 5.0. peningkatan aktivitas terjadi pada tahun 2018 dimana jumlah gempa bumi menjadi 4-5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 pasca terjadinya Gempabumi Palu-Donggala.

Berdasarkan peta rawan tsunami, wilayah Bulukumba termasuk kedalam wilayah yang rawan terhadap tsunami. Hal ini dikarenakan secara historis Bulukumba pernah dilanda tsunami. Tsunami tersebut dibangkitkan oleh gempa bumi kuat yang terjadi di Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada tahun 1820 dan 1992. Kedua tsunami tersebut membangkitkan tsunami masing-masing setinggi 10 meter dan 25 meter. Tsunami tersebut melanda wilayah Bulukumba yaitu Kelurahan Terang Terang dan Desa Nipa- Nipa Kampong Nipa.

Potensi bencana berkaitan dengan tanah longsor, banjir dan angin puting beliung masih cukup besar dirasakan oleh masyarakat Bulukumba, mengingat letak Kabupaten Bulukumba yang tepat di Kaki Gunung Lompobattang dan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Bialo, DAS Bijawang, DAS Balantieng, DAS Bonto Mate'ne, DAS Annyorang dan DAS Sangkala. Kondisi tanah yang labil dan perbukitan sehingga kerap terjadinya tanah longsor disaat intensitas hujan yang cukup tinggi. Tanah longsor terjadi di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kindang, Gantarang, Rilau Ale dan Kajang. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kawasan lereng Gunung Lompobattang sudah mulai gundul dan berpotensi banjir bandang, karna aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar.

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering terjadi utamanya di musim kemarau. Untuk memadamkan kebakaran telah disediakan armada berjumlah 11 (sebelas) unit tetapi diantaranya 2 (dua) unit dalam kondisi rusak berat. Untuk mempercepat akses layanan ke titik lokasi kebakaran, maka sektor pemadam kebakaran ditempatkan disetiap kecamatan.

Jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khusus Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba berjumlah 117 orang. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran daerah/kota, disebutkan bahwa setiap 1 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dioperasikan oleh 6 personil dengan pembagian tugas : 1 orang sebagai komandan regu, 1 orang sebagai pengemudi sekaligus operator pompa dan 4 orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat pelindung diri aparatur.

Selama tahun 2018- 2022 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Bulukumba yang menimbulkan keprihatinan dan kerugian, baik berupa kerugian material dan non material. Sedangkan lokasi yang mengalami bencana tersebar di sepuluh kecamatan telah di rincikan berdasarkan data bencana lima tahun terakhir

Dari Keseluruhan bencana yang terjadi pada tahun 2018- 2022 telah ditempuh Tanggap Darurat korban bencana alam yang menyelenggarakan setelah terjadinya bencana alam (Pasca Bencana). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pemberian bantuan berupa

makanan dan pendirian shelter/hunian sementara bagi korban bencana serta rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan dan fasilitas umum.

Solusi yang di tempuh dalam mengatasi bencana terjadi yaitu telah dilayani dan diberikan bantuan berupa bantuan darurat yaitu :

- o Makanan siap saji
- o Tambahan gizi
- o Alat dapur
- o Peralatan makanan
- o Terpal (Tenda gulung)
- o Seragam sekolah
- o Kebutuhan makanan baku

Untuk status bencana yang terjadi selama 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Bulukumba hanya dikategorikan sebagai bencana lokal dan regional dan penanganannya bersumber dari APBD dan APBN.

Langkah pencegahan antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain :

1. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC), Tanggap Darurat Bencana (Tagana), Satgas Damkar, dll;
2. Melaksanakan Posko Siaga Bencana;
3. Mempersiapkan Logistik;
4. Mempersiapkan Shelter (Hunian sementara) untuk masyarakat yang terkena bencana;
5. Mengkordinasikan kepada SKPD yang terkait;

Tabel II-2
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah									
		Banjir	Tanah Longsor	Petir	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Puting Beliu	Abrasi	Kebakaran Lahan	Operasi Penyelamatan dan Pencarian
1	Ujung Bulu	5	-	-	-	20	32	-	4	4	7
2	Ujung Loe	3	-	-	-	2	12	2	-	-	-
3	Gantarang	5	1	-	-	6	29	-	-	1	2
4	Kindang	2	7	-	-	5	3	-	-	-	1
5	Bulukumpa	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Riluau Ale	3	1	-	-	-	5	1	-	-	-
7	Kajang	4	1	1	-	2	2	-	1	-	1
8	Herlang	-	3	-	-	1	9	3	-	-	1
9	Bonto Bahari	-	-	-	6	2	5	-	1	-	3
10	Bonto Tiro	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-

Sumber : BPBD Kab. Bulukumba, 2023

2.1.1.3 Kondisi Demografi

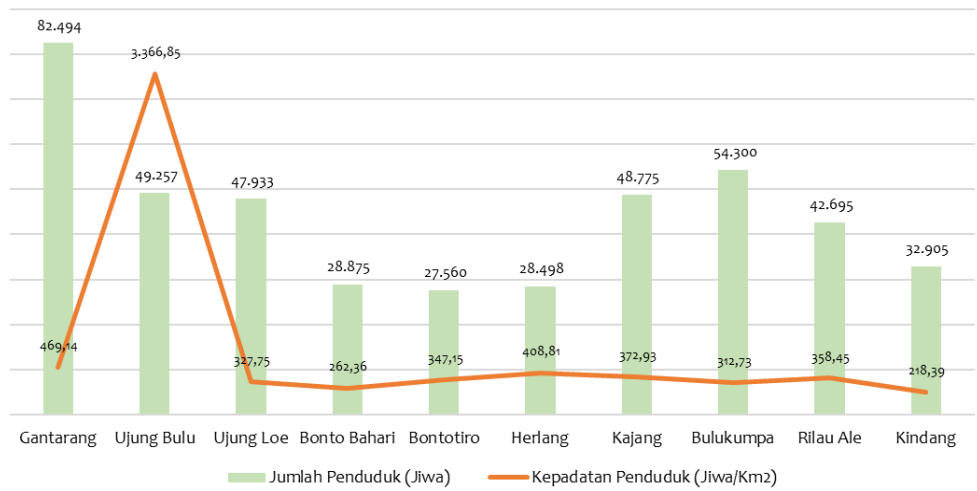
Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2022 adalah 443.292 jiwa, yang terdiri atas 216.265 jiwa penduduk laki-laki dan 227.027 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,74 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 96 persen, selengkapnya pada gambar berikut.

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mencapai 378,86 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk

tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.366,85 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 218,39 jiwa/Km².

Grafik II-2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Menurut Kecamatan Tahun 2022

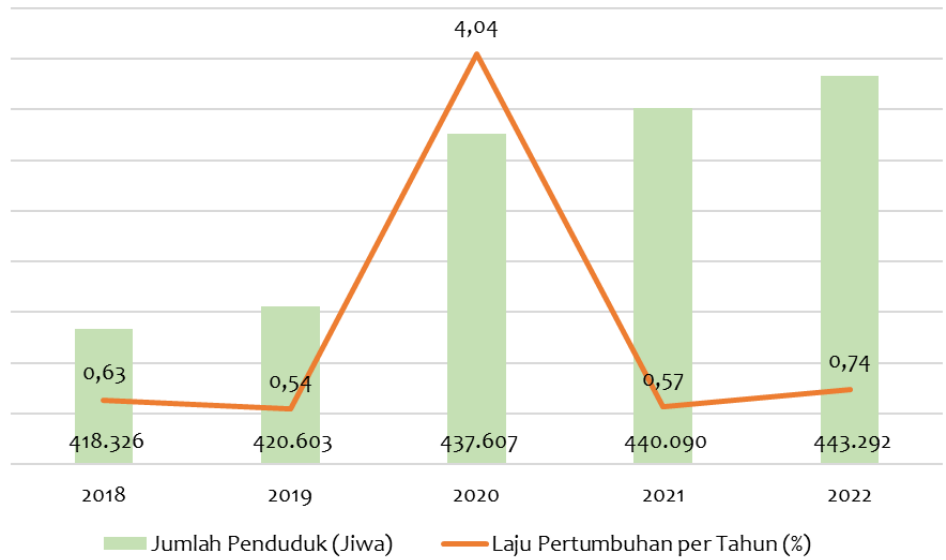


Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2023 (Diolah)

Sebagaimana Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah penduduk sebesar 82.494 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bontotiro dengan jumlah penduduk sebesar 27.560 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2022 jika dilihat dari diagram penduduk menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan dan pada tahun 2020 dilakukan Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel di bawah, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 418.326 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 443.292 jiwa. Artinya selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.966 jiwa atau 5,97 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-3
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2023 (Diolah)

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran, jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bulukumba, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.086	15.337	31.423
5-9	16.114	15.434	31.548
10-14	17.878	17.219	35.097
15-19	17.778	17.707	35.485
20-24	17.850	18.148	35.998
25-29	17.281	18.124	35.405
30-34	16.952	17.696	34.648
35-39	16.590	17.903	34.493
40-44	16.604	17.747	34.351
45-49	15.771	16.798	32.569
50-54	13.631	14.864	28.495
55-59	10.435	12.182	22.617
60-64	8.740	9.938	18.678
65-69	6.296	7.291	13.587
70-74	4.306	5.219	9.525
75+	3.953	5.420	9.373
Bulukumba	216.265	227.027	443.292

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel, Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 14	102,13	102,06	104,59	104,48	104,35
15 - 65	87,24	87,31	93,79	93,96	94,12
65 +	68,78	69,15	81,13	81,14	81,18
Total	89,55	89,54	95,22	95,24	95,26

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2023 (Diolah)

Pada tahun 2022, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 96 (dibulatkan). Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 96 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14

tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2022, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 104,35. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-16 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-65 tahun sebesar 94,12 pada tahun 2022. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 81,18.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga.

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Kumulatif, PDRB per kapita, Indeks Gini dan Kemiskinan.

1. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 3,81 persen mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yakni dari 4,65 persen menjadi 4,11 persen sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kenaikan yakni 3,69 persen menjadi 5,31 persen.. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel II-6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bulukumba	%	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81
2	Prov. Sulawesi Selatan	%	7,06	6,92	-0,70	4,65	4,11
3	Nasional	%	5,20	5,00	-2,10	3,69	5,31

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 mengalami tren yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami perlambatan pada periode tersebut, dimana dengan kondisi pandemi covid-19 serta adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberi kontribusi yang cukup besar akan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, pertumbuhan rata-ratanya masih relatif berimbang pada daerah setara, diantaranya Bulukumba, Jeneponto, Wajo, Sidrap dan Enrekang. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir terhadap daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

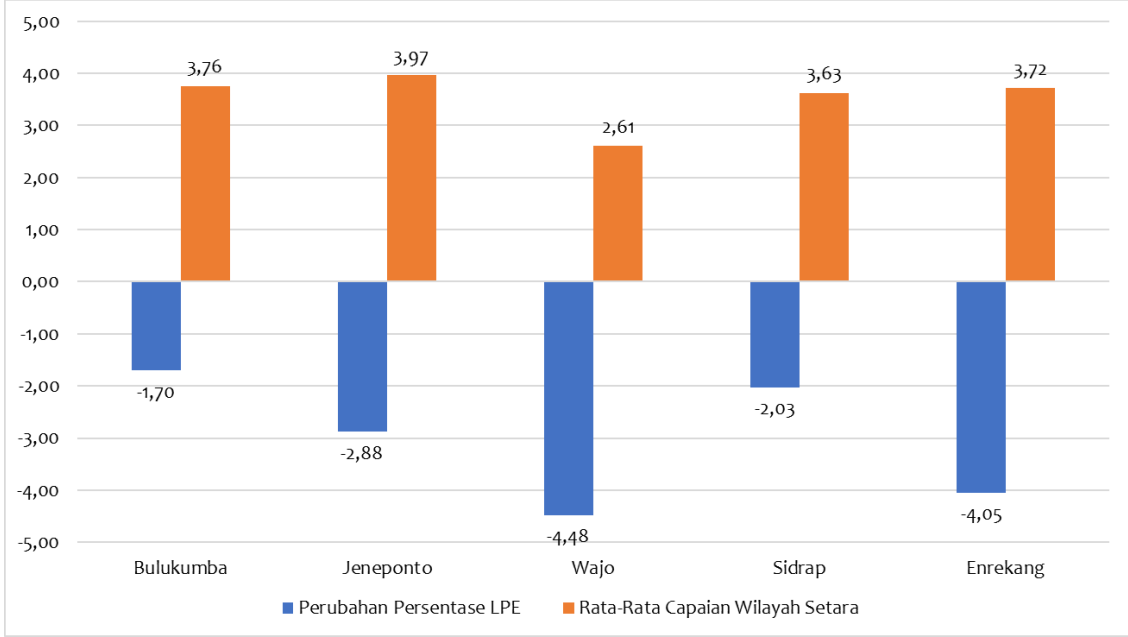
Tabel II-7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata capaian wilayah setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81	-0,95	3,91
Jeneponto	6,29	5,47	0,16	5,40	2,52	-2,88	3,97
Wajo	1,08	4,06	-1,17	6,77	2,29	-4,48	2,61
Sidrap	5,02	4,65	-0,59	5,54	3,51	-2,03	3,63
Enrekang	3,26	5,43	1,25	6,36	2,31	-4,05	3,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami perlambatan sebesar 3,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,76 persen. Adapun perbandingan Perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

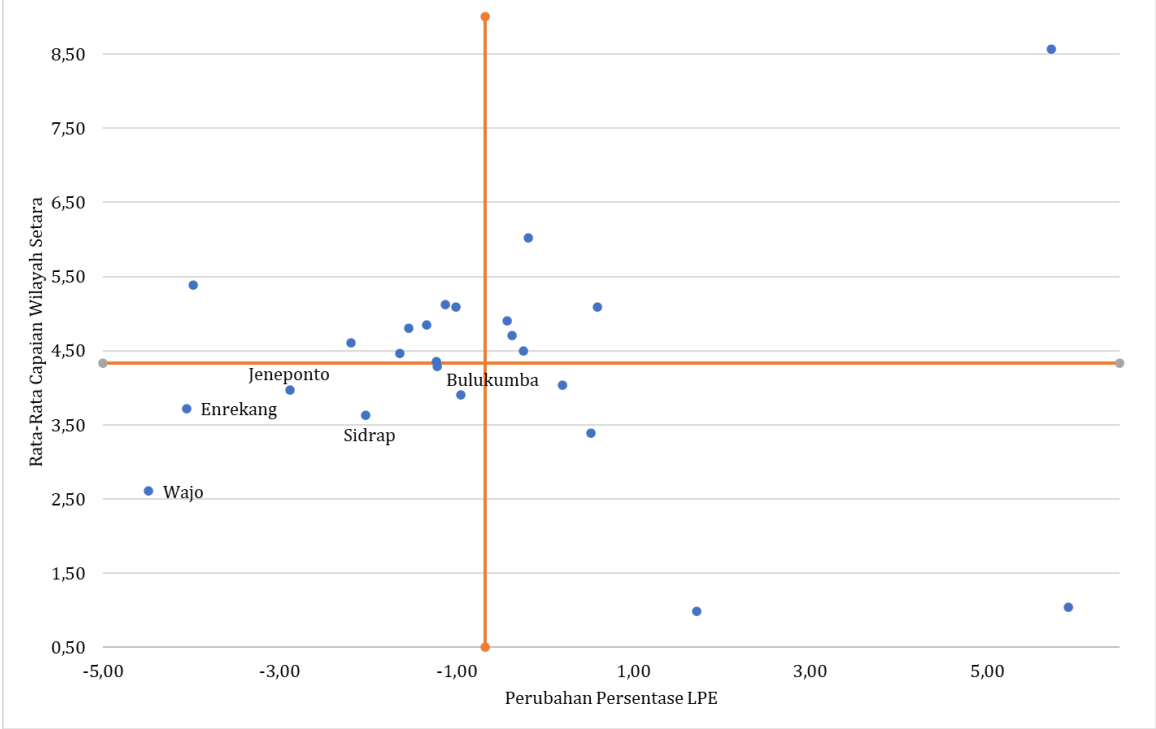
Grafik II-3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018-2022



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara Kuadran dapat dilihat pada gambar tabel berikut.

Kuadran II-1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022
(Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah)



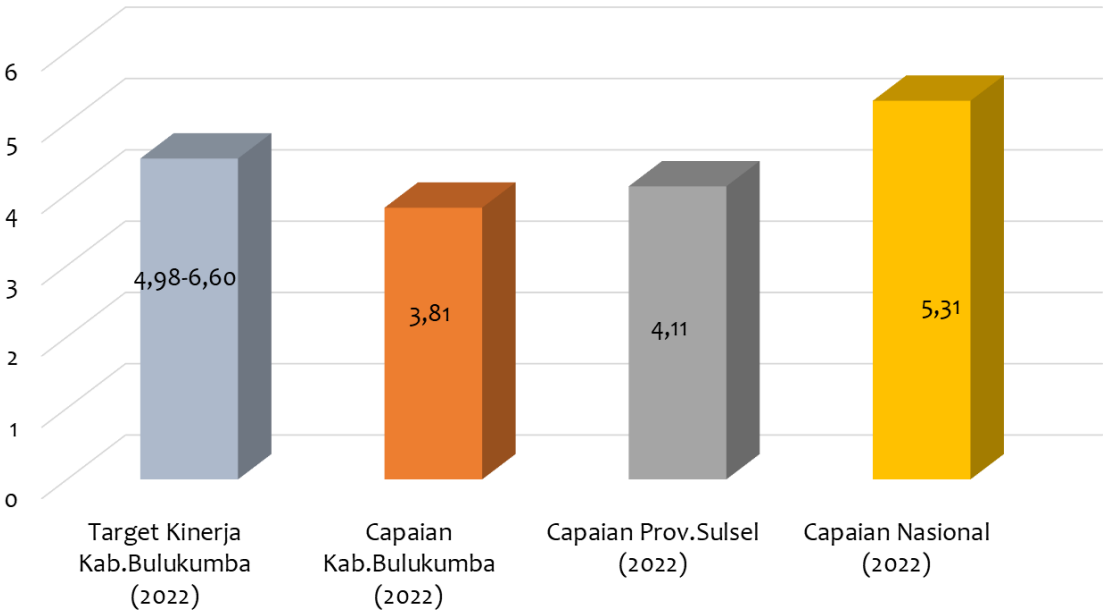
Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 belum mencapai target. Target Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu sebesar 4,98-6,60 persen dengan capaian yang sebesar 3,81 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,11 persen, dan Nasional sebesar 5,31 persen.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba dan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik II-4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan menurut lapangan usaha terdapat 11 kategori yang mengalami pertumbuhan positif dan yang paling terbesar yaitu pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) mengalami pertumbuhan sebesar 19,98 persen pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 5,88 persen sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi sebanyak 4 kategori dan yang mengalami kontraksi paling besar adalah kategori M,N Jasa Perusahaan dengan capaian tahun 2022 sebesar -3,26 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,98 persen..

Tabel II-8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	2,13	-1,12	3,65	0,61
B	Pertambangan dan Penggalian	12,85	3,14	2,09	3,06	-2,31
C	Industri Pengolahan	3,96	11,76	-3,59	5,72	8,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,95	7,24	3,76	8,90	12,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,34	1,52	5,11	0,01	9,71
F	Konstruksi	9,59	3,27	5,11	5,12	7,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,73	9,93	-1,25	6,51	5,37
H	Transportasi dan Pergudangan	9,46	9,67	-14,41	5,95	10,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,8	5,22	-1,99	5,88	19,98
J	Informasi dan Komunikasi	9,27	7,66	11,92	4,42	6,79

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,37	9,65	9,00	7,54	7,80
L	Real Estate	6,88	2,18	1,03	3,28	6,19
M,N	Jasa Perusahaan	9,88	10,43	-4,44	6,98	-3,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,4	10,35	-0,43	4,36	-0,41
P	Jasa Pendidikan	9,12	3,31	9,27	4,12	-0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,66	5,71	6,31	6,39	10,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,11	11,91	-1,20	8,81	17,63
	Produk Domestik Regional Bruto	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan di berbagai sektor lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 sebesar 9.357,11 triliun rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilainya sebesar 9.013,58 triliun rupiah. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-9
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.205,54	3.273,77	3.237,17	3.355,17	3.375,52
B	Pertambangan dan Penggalian	178,00	183,59	187,42	193,16	188,70
C	Industri Pengolahan	531,40	593,90	572,55	605,31	656,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,65	15,71	16,30	17,75	20,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,28	3,33	3,50	3,50	3,84
F	Konstruksi	736,06	760,12	798,97	839,87	899,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.313,97	1.444,43	1.426,38	1.519,22	1.600,79
H	Transportasi dan Pergudangan	181,50	199,06	170,37	180,51	198,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,91	58,83	57,66	61,05	73,25
J	Informasi dan Komunikasi	317,01	341,29	381,98	398,86	425,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	277,46	304,23	331,60	356,59	384,41
L	Real Estate	385,26	393,67	397,74	410,78	436,21
M,N	Jasa Perusahaan	1,63	1,80	1,72	1,84	1,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	508,42	561,04	558,61	582,95	580,57
P	Jasa Pendidikan	254,14	262,55	286,88	298,70	298,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,79	97,03	103,15	109,74	120,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	65,32	73,10	72,22	78,58	92,43
	Produk Domestik Regional Bruto	8.121,33	8.567,46	8.604,20	9.013,58	9.357,11

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Tahun 2022 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 17.233,31 trilyun rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 15.868,86 trilyun rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-10
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021 *	2022 *
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.108,85	5.277,24	5.369,18	5.932,13	6.394,12
B	Pertambangan dan Penggalian	372,53	384,75	401,04	418,58	421,46
C	Industri Pengolahan	858,20	973,45	950,30	1.027,68	1.150,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,92	15,94	16,32	17,55	19,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,11	4,33	4,57	4,87	5,40
F	Konstruksi	1.343,77	1.447,69	1.543,90	1.690,34	1.901,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.165,28	2.443,28	2.463,87	2.684,24	2.923,62
H	Transportasi dan Pergudangan	307,38	339,97	301,70	338,75	397,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98,28	108,36	106,66	114,06	138,59
J	Informasi dan Komunikasi	407,89	459,68	516,01	550,88	596,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	442,49	501,22	547,00	605,56	697,13
L	Real Estate	594,23	618,54	626,14	648,71	697,34
M,N	Jasa Perusahaan	4,31	4,84	4,76	5,17	5,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	802,42	907,92	919,62	969,45	971,48
P	Jasa Pendidikan	411,82	427,43	475,62	506,76	507,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,52	185,69	204,18	224,47	248,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	98,91	114,26	114,61	129,66	156,40
	Produk Domestik Regional Bruto	13.198,92	14.214,59	14.565,49	15.868,86	17.233,31

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,10 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,96 persen); Konstruksi (11,03 persen); Industri Pengolahan (6,68 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (5,64 persen).

Tabel II-11
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,71	37,13	36,86	37,38	37,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2,82	2,71	2,75	2,64	2,45
C	Industri Pengolahan	6,5	6,85	6,52	6,48	6,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,18	10,18	10,6	10,65	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,4	17,19	16,92	16,92	16,96
H	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,39	2,07	2,13	2,31

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022*
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,76	0,73	0,72	0,80
J	Informasi dan Komunikasi	3,09	3,23	3,54	3,47	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	3,53	3,76	3,82	4,05
L	Real Estate	4,5	4,35	4,3	4,09	4,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	6,39	6,31	6,11	5,64
P	Jasa Pendidikan	3,12	3,01	3,27	3,19	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,31	1,4	1,41	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,75	0,8	0,79	0,82	0,91
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Secara umum, pada periode tahun 2018-2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebesar 31.290 jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 31.310 Jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 7,39 persen, capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 7,43 persen. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan sebesar Rp. 390.040/kapita/bulan.

Tabel II-12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

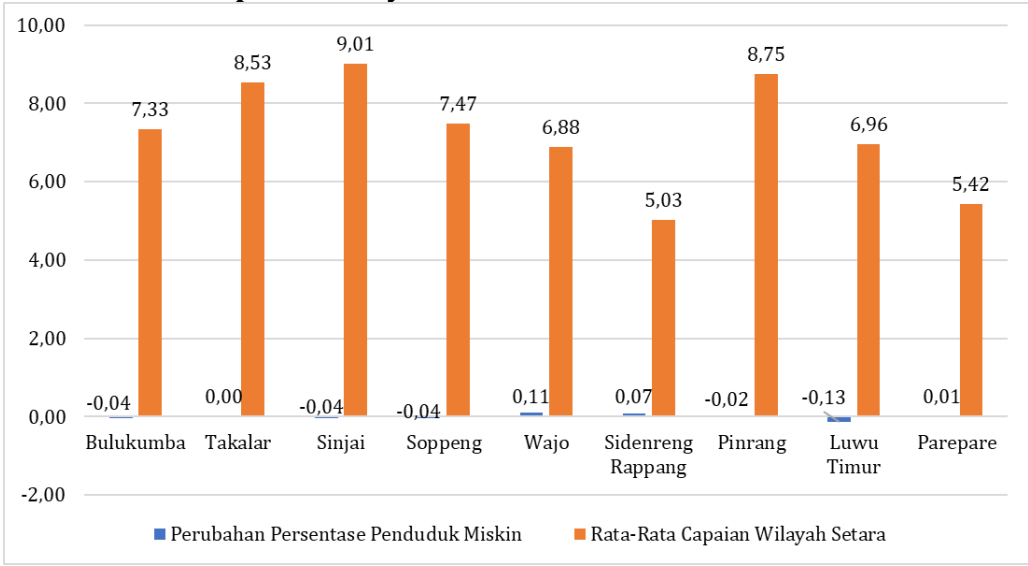
Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Persentase Penduduk Miskin	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	7,48	7,26	7,10	7,43	7,39	-0,04	7,33
Takalar	9,00	8,70	8,44	8,25	8,25	0,00	8,53
Sinjai	9,28	9,14	9,00	8,84	8,80	-0,04	9,01
Soppeng	7,50	7,25	7,59	7,53	7,49	-0,04	7,47
Wajo	7,50	6,91	6,95	6,46	6,57	0,11	6,88
Sidrap	5,16	4,79	5,05	5,04	5,11	0,07	5,03
Pinrang	8,81	8,46	8,86	8,81	8,79	-0,02	8,75
Luwu Timur	7,23	6,98	6,85	6,94	6,81	-0,13	6,96
Parepare	5,59	5,26	5,44	5,40	5,41	0,01	5,42

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Jika diperbandingkan persentase penduduk miskin secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sinjai dengan nilai rata-rata sebesar 9,01 persen dan disusul oleh Kabupaten Pinrang sebesar 8,75 persen. Adapun rata-rata persentase kemiskinan yang terendah adalah Sidrap yaitu 5,03

persen, demikian pula perubahan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dan daerah setaranya dapat dilihat pada grafik berikut.

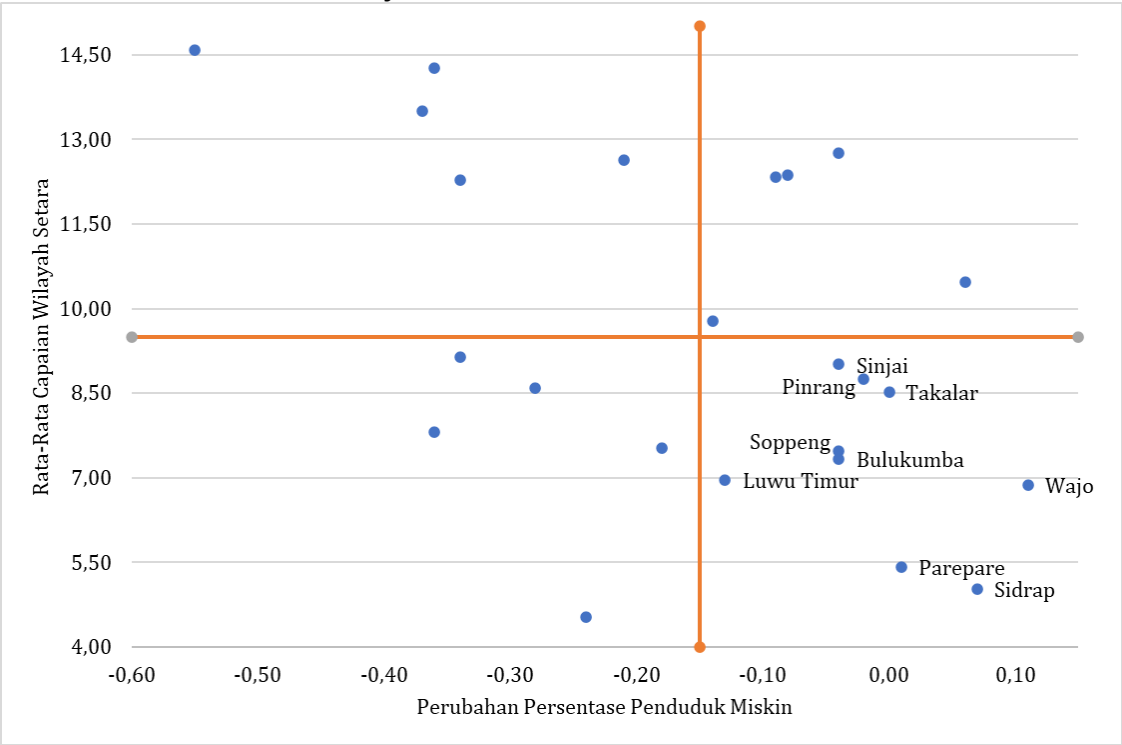
Grafik II-5
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskinnya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-2
Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022

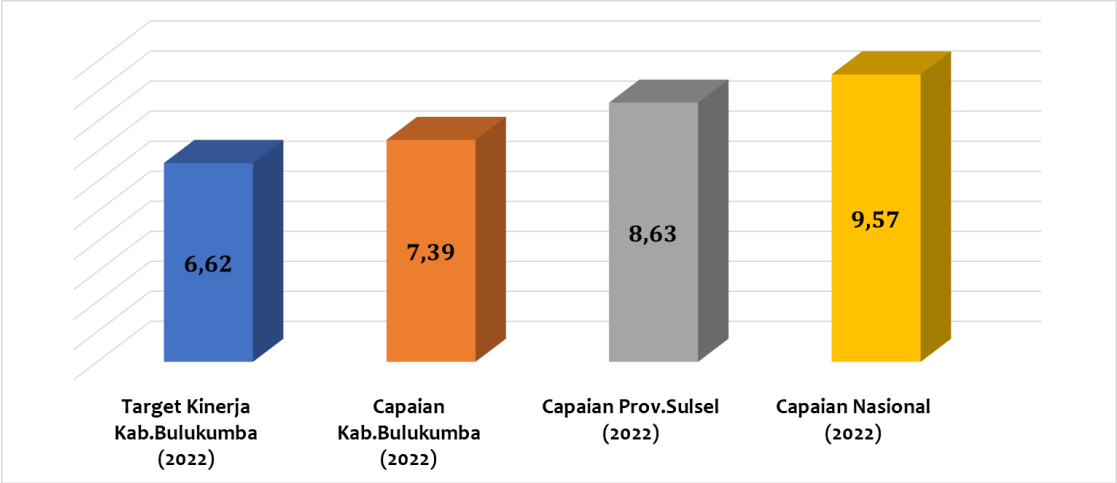


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 adalah 6,62 persen dengan capai diangka 7,39 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan

jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 9,57 persen dan 8,63 persen. Secara lengkap perbandingan antara target Kabupaten Bulukumba dengan capaian perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Periode tahun 2018-2022 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan mencapai Rp.369.022, kemudian meningkat menjadi Rp.390.040 atau meningkat sebesar Rp.21.018,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2018-2022. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-13
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022

Wilayah/Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba	Rp/Kapita/Bulan	310.753	330.161	351.180	369.022	390040
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan	Rp/Kapita/Bulan	315.738	341.555	362.031	384.455	399.755
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	408.962	423.231	338.699	486.168	505.469

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,52 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 90,94 persen dan Nasional 90,34 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2022, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,37 persen, dan Nasional yaitu 90,43 persen.

Tabel II-14
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk di Atas Garis Kemiskinan						
Kab. Bulukumba	%	92,52	92,74	92,90	92,57	92,61
Prov. Sulawesi Selatan	%	90,94	91,31	91,28	91,22	91,37
Nasional	%	90,34	90,59	90,22	90,29	90,43

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2022 Jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,99 nilai indeks, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar 1,00 nilai indeks. Selengkapnya pada tabel berikut.

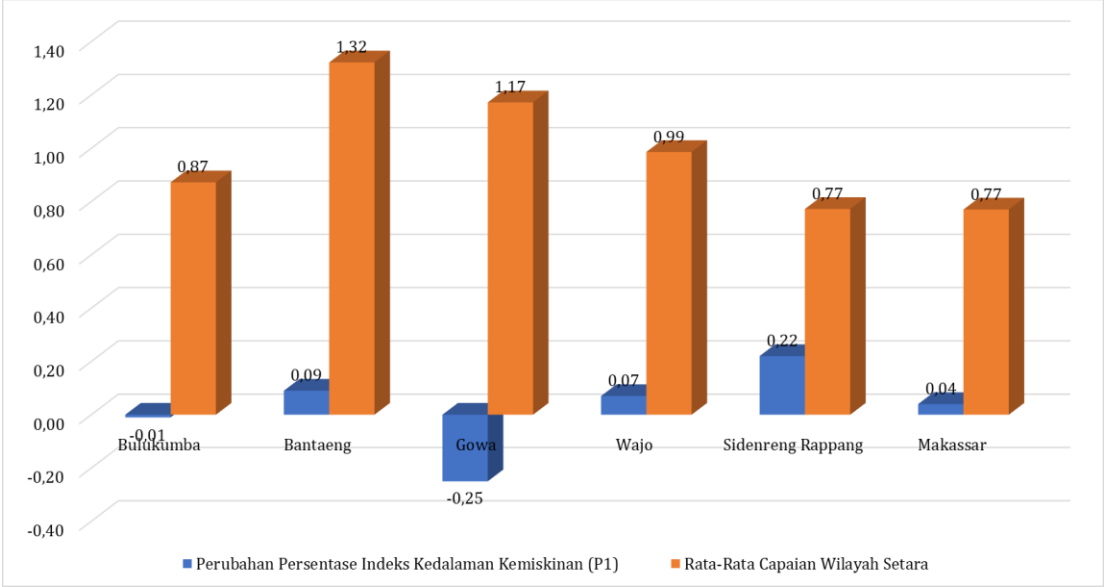
Tabel II-15
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	1,06	0,60	0,71	1,00	0,99	-0,01	0,87
Bantaeng	1,74	1,35	0,97	1,23	1,32	0,09	1,32
Gowa	1,25	0,92	1,18	1,38	1,13	-0,25	1,17
Wajo	1,24	1,06	0,98	0,79	0,86	0,07	0,99
Sidrap	0,94	0,6	0,82	0,64	0,86	0,22	0,77
Makassar	1,11	0,6	0,58	0,76	0,8	0,04	0,77

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Pada tahun 2021 perubahan tertinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan dialami oleh Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bantaeng sebesar 0,22 poin dan 0,09 poin, dan perubahan yang terendah adalah Kabupaten Gowa dengan nilai perubahan sebesar -0,25 poin, Adapun Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

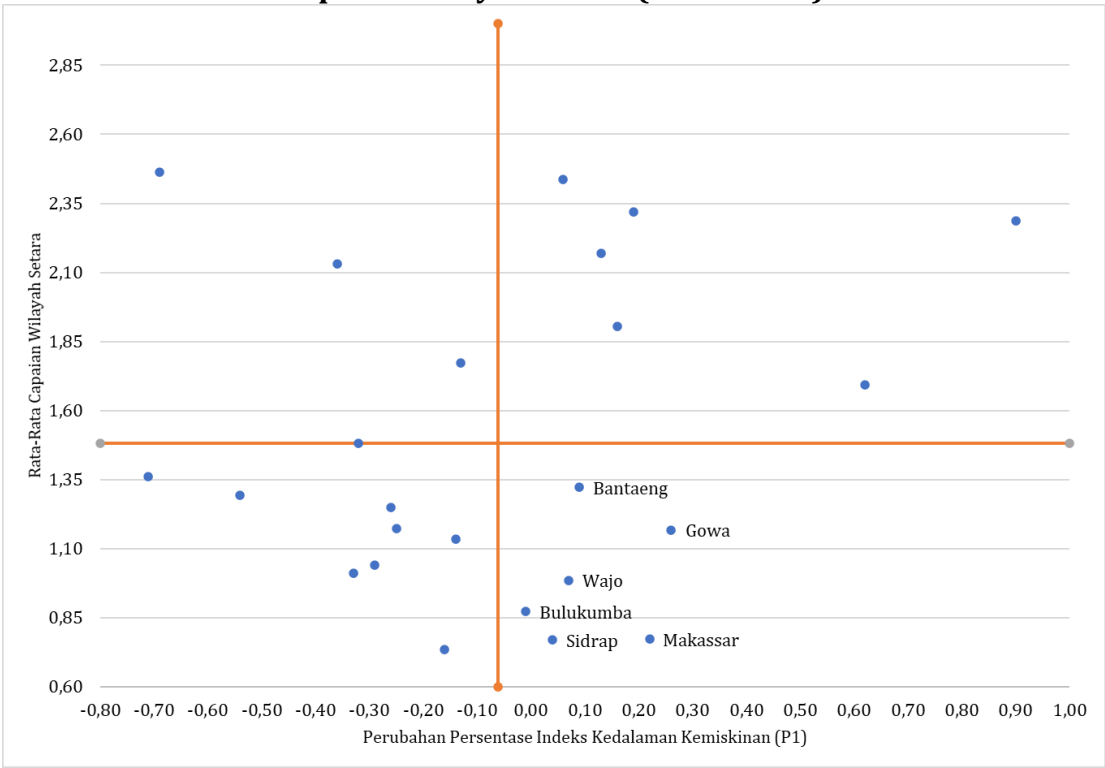
Grafik II-7
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan perubahan P1 dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut

Kuadran II-3
Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2018-2022)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 1,06 lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 1,68 dan capaian Nasional yaitu 1,63. Demikian pula halnya pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun sebesar 0,99 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 1,36, dan Nasional yaitu 1,58. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-16
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Bulukumba	1,06	0,60	0,71	1,00	0,99
Prov. Sulawesi Selatan	1.68	1.63	1.65	1,39	1,36
Nasional	1.63	1.50	1.75	1,67	1,58

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah sebesar 212.606 jiwa, yang terdiri dari 205.932 jiwa penduduk yang berkerja, dan 6.674 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 112.182 jiwa, dengan rincian 17.281 jiwa penduduk yang bersekolah, 76.483 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 18.418 jiwa lainnya. Untuk tahun 2021 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 3,24 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah

63,41 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

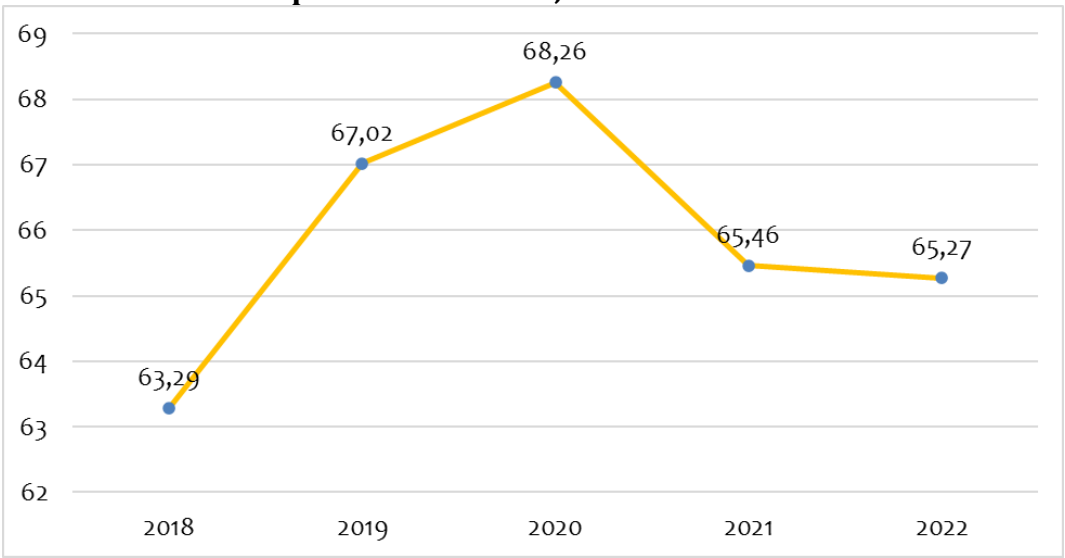
Tabel II-17
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	127.537	85.941	213.478
1. Bekerja	126.485	84.295	210.780
2. Pengangguran Terbuka	1.052	1.646	2.698
II. Bukan Angkatan Kerja	24.625	88.974	113.599
1. Sekolah	8.703	9.880	18.583
2. Mengurus Rumah Tangga	9.876	75.224	85.100
3. Lainnya	6.046	3.870	9.916
Jumlah	152.162	174.915	327.077

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebanyak 213.478 orang. Penduduk Usia Kerja terbagi atas 2 yaitu : 1) Bukan Angkatan Kerja sebanyak 113.599 orang. 2) Angkatan kerja mencapai 213.478 orang. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 210.780 orang dan pengangguran 2.698 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 65,46 persen. Indikator ini mengalami perlambatan -0,29 persen dibanding TPAK Agustus 2021. Penurunan TPAK disebabkan menurunnya angkatan kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka

yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 1,26 persen. Pada Agustus 2022, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 1,88 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 212.606 Orang, capaian ini mengalami peningkatan dengan capaian Angkatan Kerja tahun 2022 yaitu sebesar 213.478 orang. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,27 persen.

Tingkat pengangguran terbuka untuk daerah wilayah setara dengan kabupaten Bulukumba mengalami tren berfluktuatif. TPT tertinggi adalah Kabupaten Pinrang sebesar 2,79 persen dan terendah dialami oleh Kabupaten Toraja Utara hanya sebesar 0,58 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

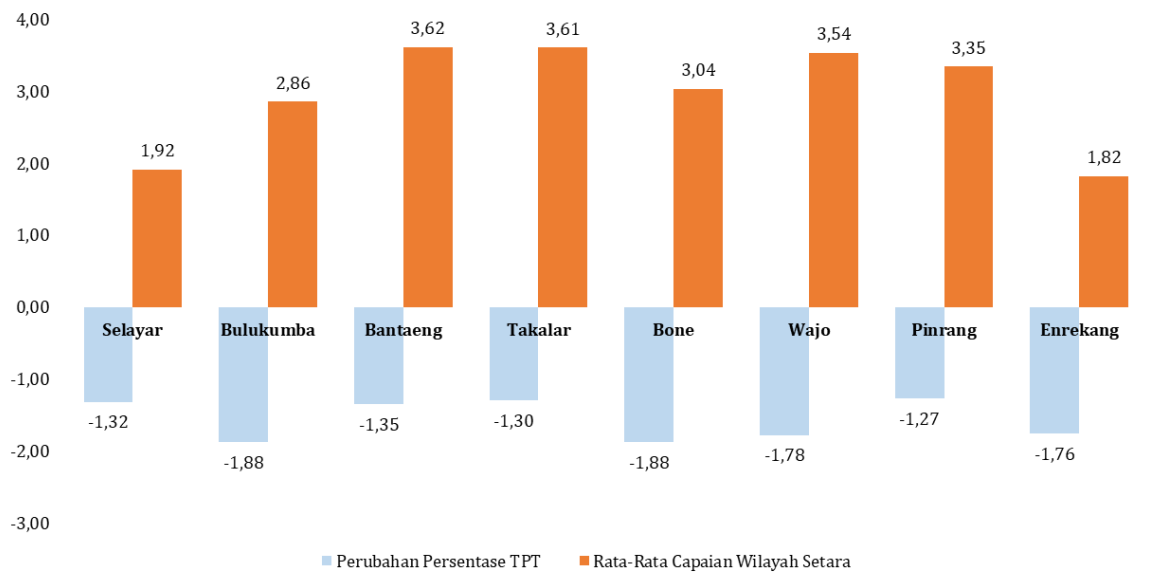
Tabel II-18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Selayar	1,74	1,10	2,44	2,81	1,49	1,92
Bulukumba	3,42	3,06	3,42	3,14	1,26	2,86
Bantaeng	3,39	3,65	4,27	4,07	2,72	3,62
Takalar	3,57	3,78	4,16	3,93	2,63	3,61
Bone	2,56	3,01	3,20	4,15	2,27	3,04
Wajo	3,51	3,00	4,33	4,32	2,54	3,54
Pinrang	2,80	2,91	4,19	4,06	2,79	3,35
Enrekang	1,61	2,15	2,44	2,34	0,58	1,82

Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2023

Dari data TPT untuk 24 Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar mengalami penurunan TPT dari tahun 2022. Capaian ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dengan adanya beberapa program untuk pemulihan ekonomi mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat dengan mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke beberapa sektor yang tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

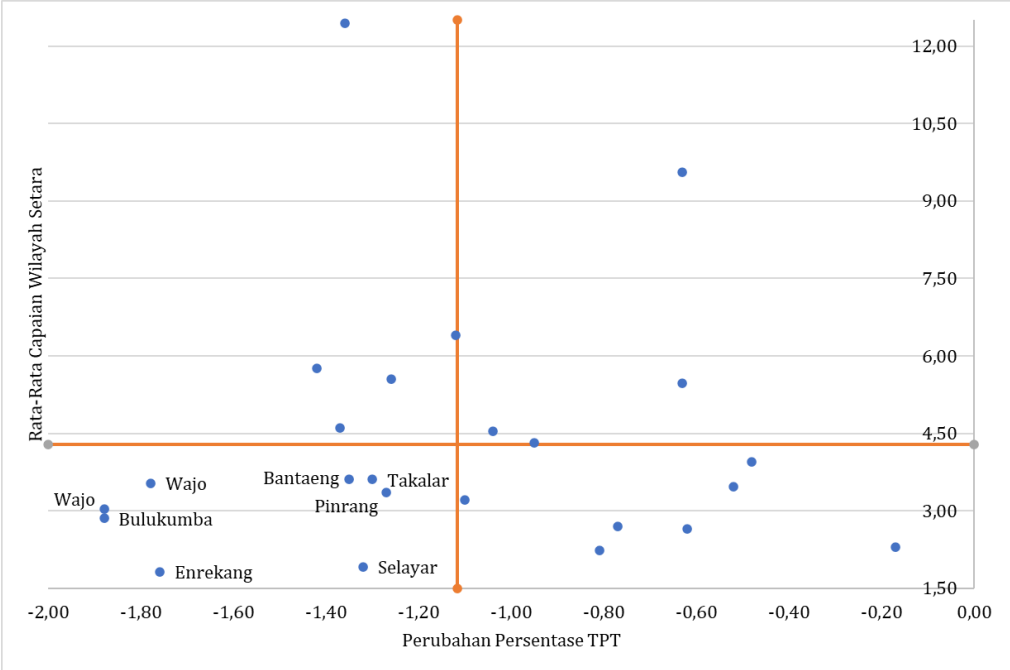
Grafik II-9
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022



Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2023

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

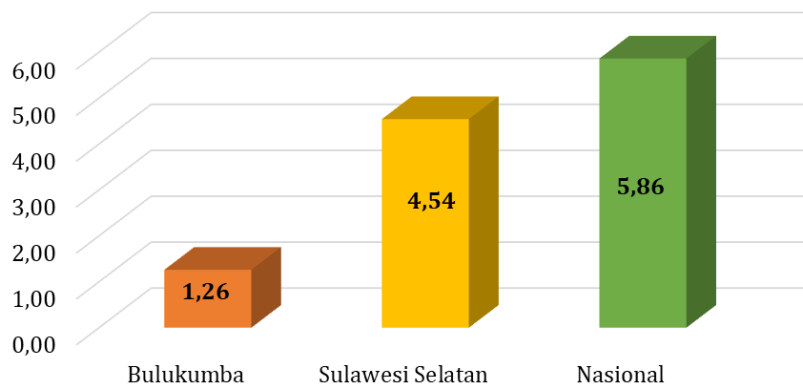
Kuadran II-4
Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 1,26 persen, ini menandakan bahwa Capaian Kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 4,54 persen dan 5,86 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

4. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Gini Ratio pada tahun 2018 menjadi 0,354 dan pada tahun 2022 nilai Gini Ratio di kabupaten Bulukumba naik hingga mencapai 0,361.

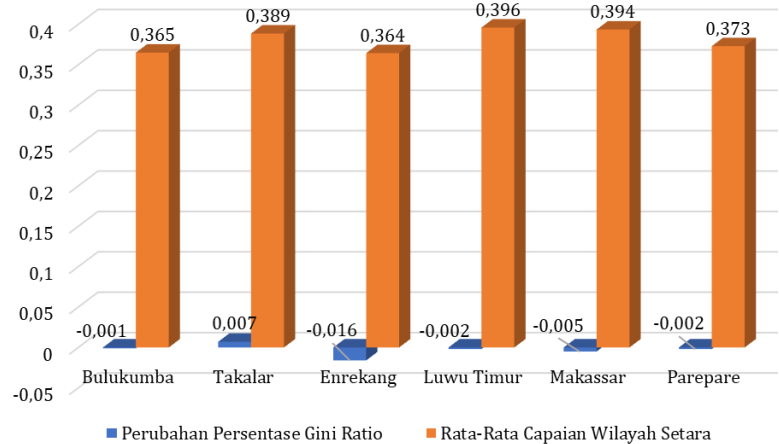
Tabel II-19
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Gini Ratio					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bulukumba	0,354	0,377	0,371	0,362	0,361	0,365
Takalar	0,358	0,482	0,360	0,368	0,375	0,389
Enrekang	0,389	0,359	0,366	0,362	0,346	0,364
Luwu Timur	0,398	0,387	0,405	0,396	0,394	0,396
Makassar	0,383	0,390	0,400	0,400	0,395	0,394
Parepare	0,382	0,350	0,373	0,381	0,379	0,373

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Adapun perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 0,365, dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Gini Ratio tahun 2021 yang nilainya mencapai 0,3268 atau mengalami peningkatan 0,001 poin. Adapun perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara secara lengkap rata-rata Capaian Wilayah Setara dapat dilihat pada grafik berikut.

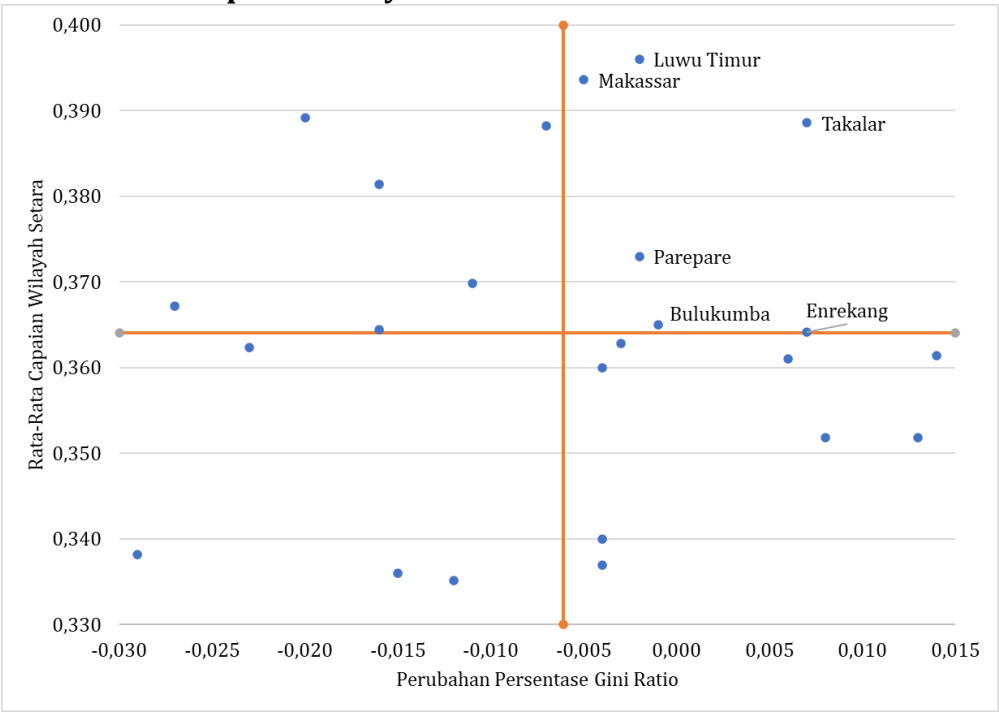
Grafik II-11
Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Gini Ratio, baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

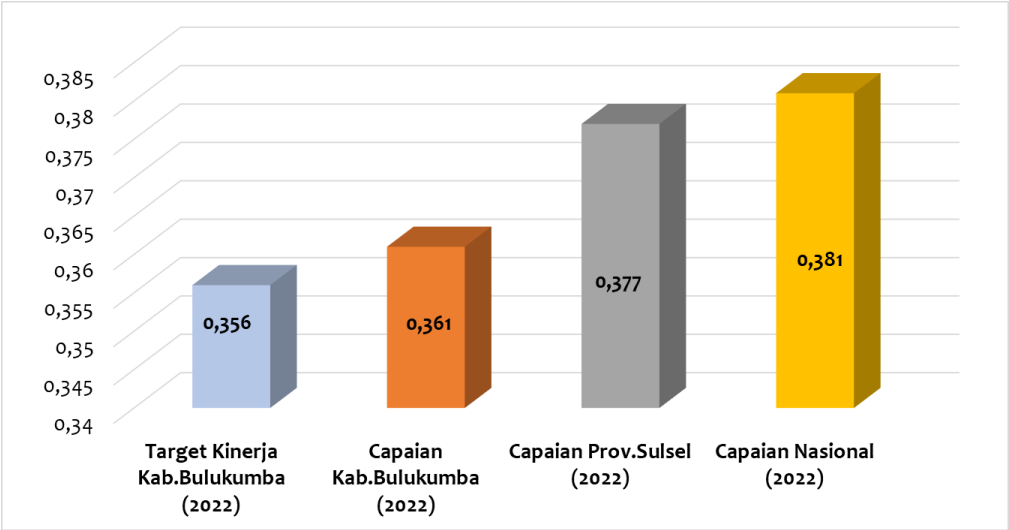
Kuadran II-5
Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat bahwa ketimpangan di Kabupaten Bulukumba lebih rendah. Meskipun secara nasional beberapa tahun terakhir angka *Gini Ratio* mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi *Covid-19*, Secara lengkap Perbandingan Capaian Gini Ratio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Capaian Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-12
Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum, Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,70 pada tahun 2018 menjadi 70,34 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen pada periode 2018 - 2022. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

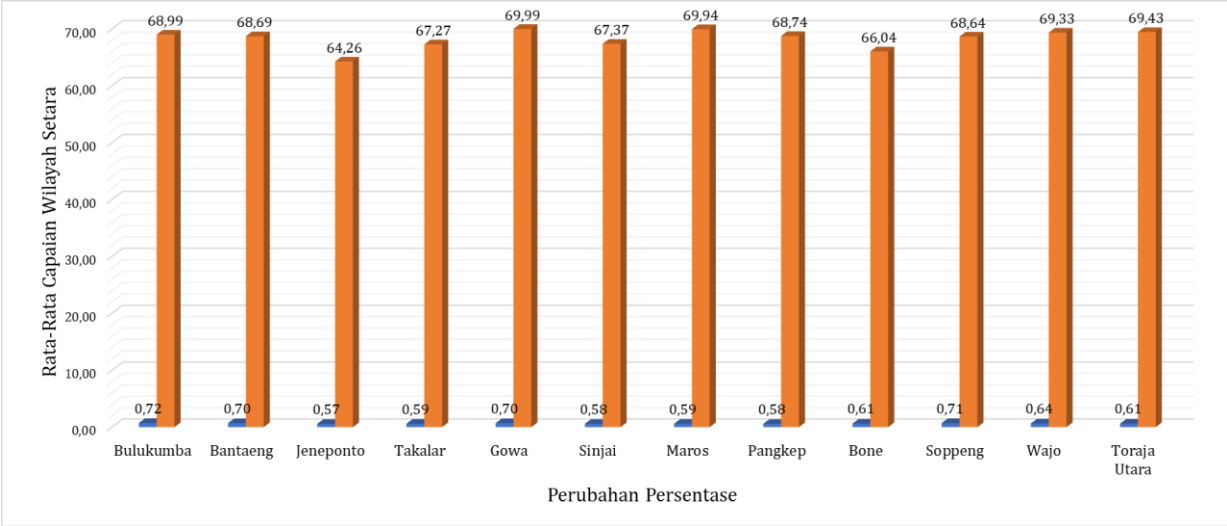
Tabel II-20
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Bulukumba	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34	68,99
Bantaeng	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69	68,69
Jeneponto	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13	64,26
Takalar	66,07	66,94	67,31	67,72	68,31	67,27
Gowa	68,87	69,66	70,14	70,29	70,99	69,99
Sinjai	66,24	67,05	67,50	67,75	68,33	67,37
Maros	68,94	69,50	69,86	70,41	71,00	69,94
Pangkep	67,71	68,29	68,72	69,21	69,79	68,74
Bone	65,04	65,67	66,06	66,40	67,01	66,04

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Soppeng	67,60	68,26	68,67	68,99	69,70	68,64
Wajo	68,57	69,05	69,15	69,62	70,26	69,33
Toraja Utara	68,49	69,23	69,33	69,75	70,36	69,43

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022 (diolah)

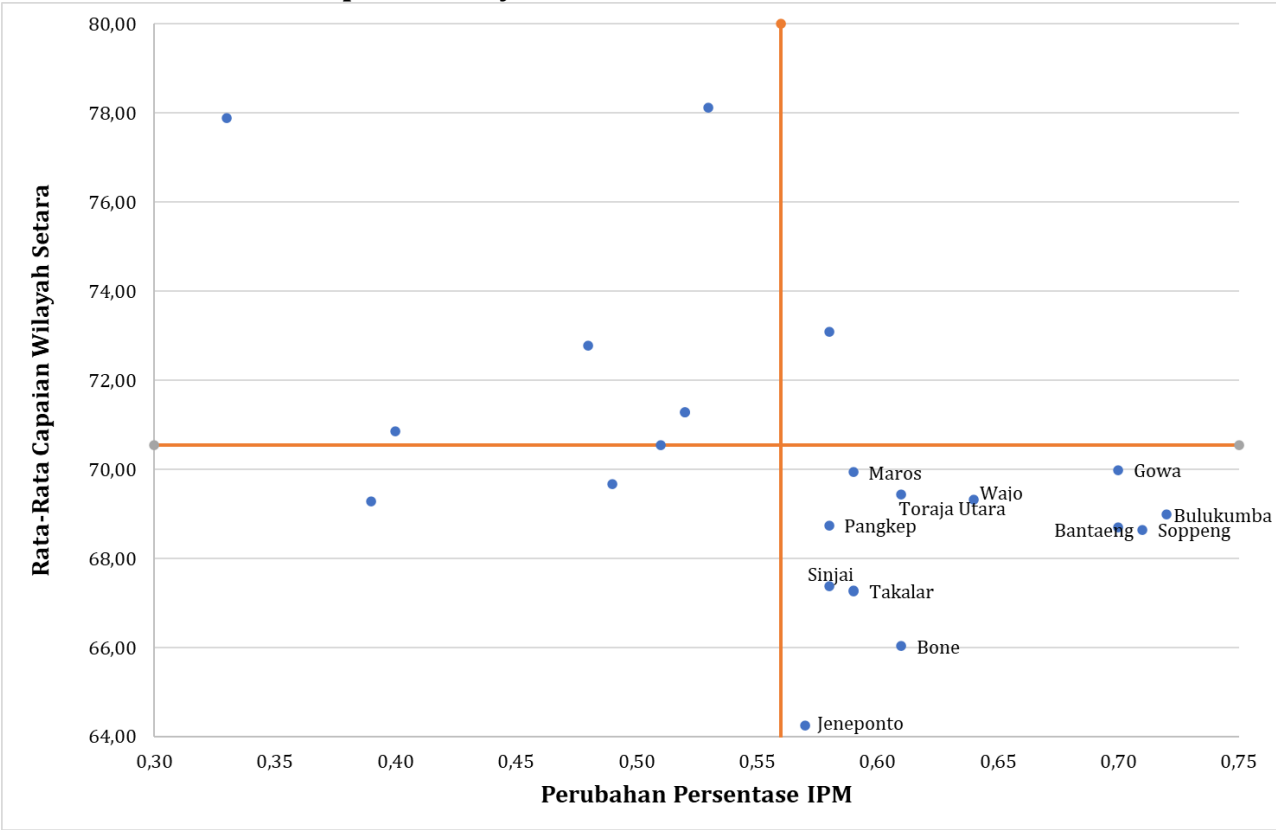
Grafik II-13
Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian IPM, baik itu berdasarkan nilai pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

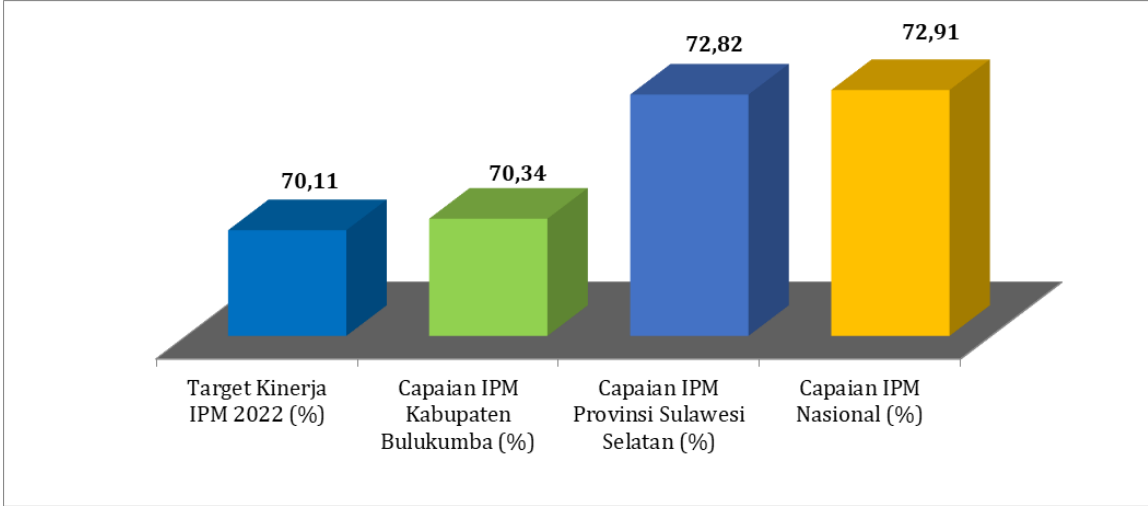
Kuadran II-6
Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)

Adapun target IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah 70,11 poin, dengan capaian 70,11 poin. Adapun capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,82 dan capaian IPM Nasional yaitu sebesar 72,91 poin. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-14
Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2023, (diolah)

6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu aspek dalam pengukuran IPM adalah rata-rata lama sekolah. Lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022. Rata-Rata Lama Sekolah di kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh 2,27 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulukumba usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 menempati urutan keenam dari 10 kabupaten rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,65 tahun, adapun urutan pertama diraih oleh Kabupaten Gowa dengan nilai RLS sebesar 8,10 tahun dan diikuti dengan Kabupaten Pinrang sebesar 7,89 tahun dan Kabupaten Sidrap sebesar 7,79 tahun. Tahun yang terendah lama sekolah adalah Kabupaten Jeneponto dengan capaian RLS sebesar 6,53 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel II-21
Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022

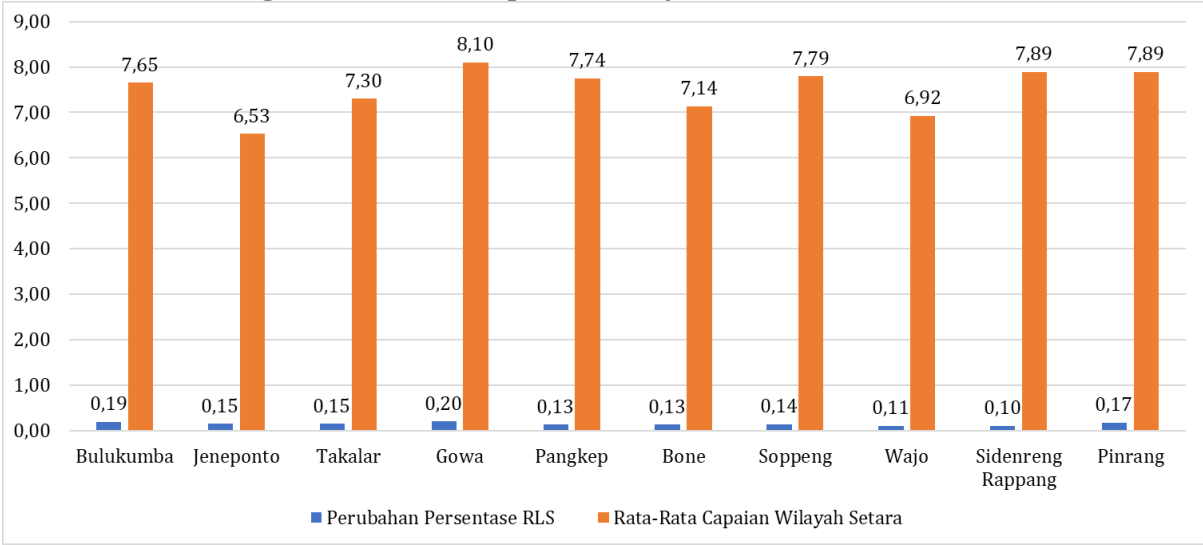
Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Bulukumba	7,34	7,43	7,67	7,82	8,01	7,65
Jeneponto	6,21	6,48	6,59	6,60	6,75	6,53
Takalar	6,91	7,18	7,29	7,49	7,64	7,30
Gowa	7,75	7,97	8,19	8,20	8,40	8,10
Pangkep	7,49	7,60	7,66	7,92	8,05	7,74
Bone	6,97	6,98	7,15	7,23	7,36	7,14

Soppeng	7,63	7,74	7,81	7,82	7,96	7,79
Wajo	6,79	6,80	6,81	7,05	7,16	6,92
Sidenreng Rappang	7,79	7,83	7,84	7,94	8,04	7,89
Pinrang	7,84	7,85	7,86	7,87	8,04	7,89

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)

Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2022 pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba untuk urutan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Gowa dengan pertumbuhan sebesar 0,20 poin dan Kabupaten Sidrap dengan posisi RLS terendah dengan nilai 0,10 poin. Secara lengkap perkembangan rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

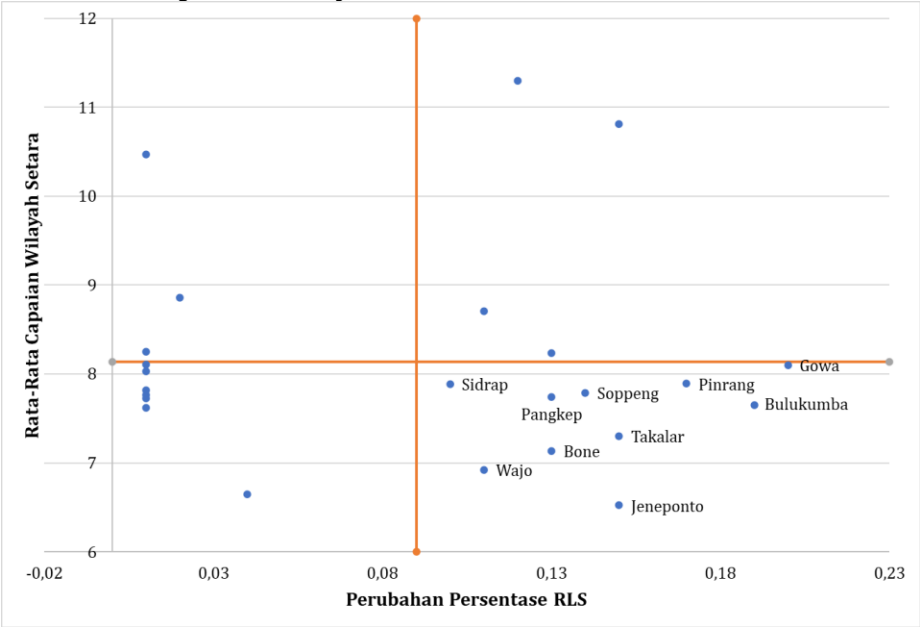
Grafik II-15
Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba
dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian RLS, baik itu berdasarkan nilai perubahan RLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

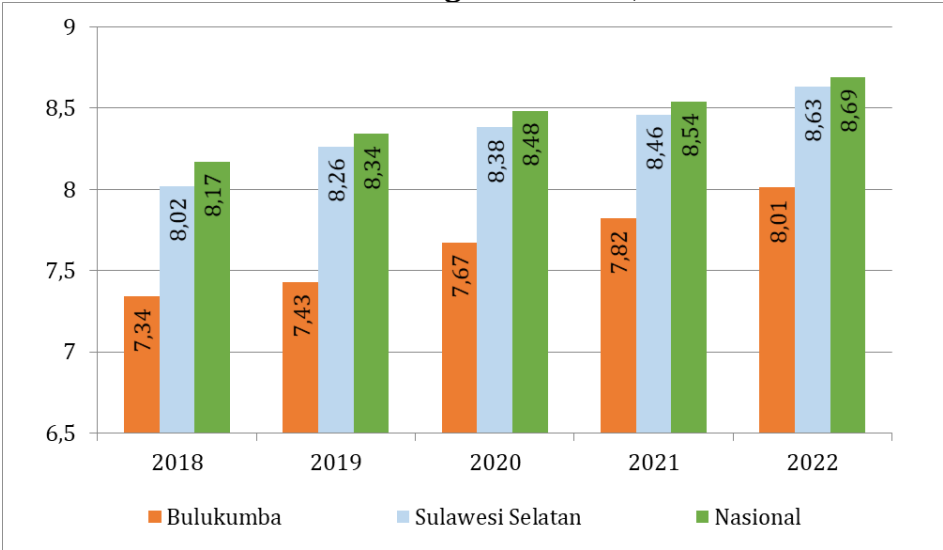
Kuadran II-7
Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata
Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2023, (diolah)

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional periode 2018-2022, menyajikan fakta bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara Nasional lebih tinggi daripada Capaian RLS Kabupaten Bulukumba. Peningkatan RLS baik di level Kabupaten, Nasional maupun Provisinsi Sulawesi Selatan mengalami peningktan setiap tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-16
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)

7. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022, Kabupaten Bulukumba telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,60 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,46 persen per tahun. Pada tahun 2018, UHH saat lahir di Kabupaten Bulukumba hanya sebesar 67,27 tahun dan pada tahun 2022 telah mencapai 68,51 tahun. Jika diperbandingkan dengan daerah setara Kabupaten Bulukumba, penduduk dengan capaian umur terpanjang tahun 2022 ada di Kabupaten Luwu Utara yaitu 69,03 tahun, sedangkan daerah yang penduduk dengan usia terpendek adalah Kabupaten Jeneponto yaitu 66,81 tahun. Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut

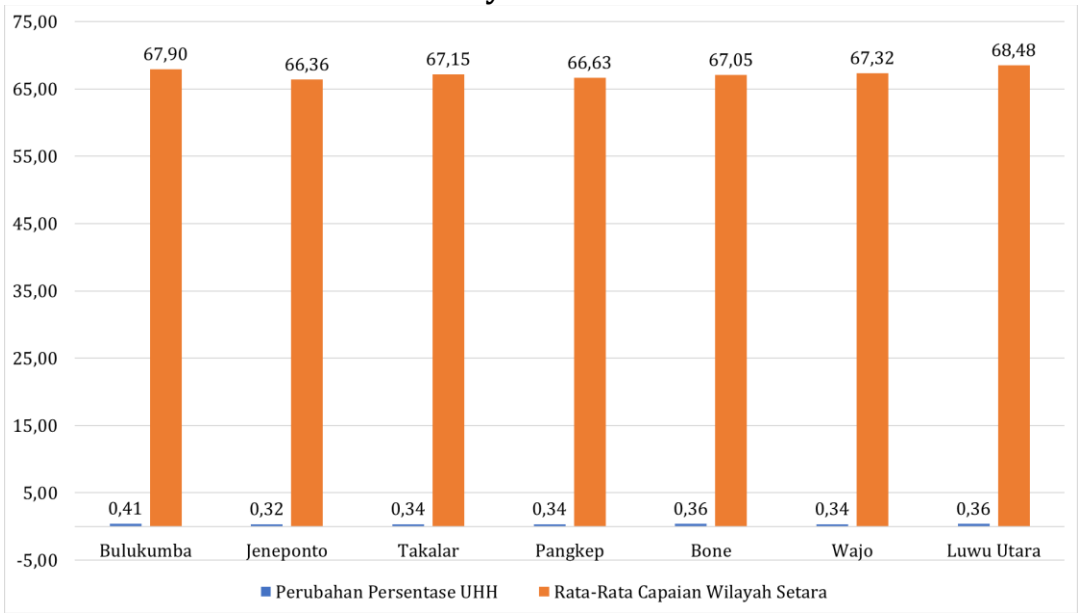
Tabel II-22
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba

Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup (Tahun)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Bulukumba	67,27	67,69	67,92	68,10	68,51	67,90
Jeneponto	65,89	66,24	66,39	66,49	66,81	66,36
Takalar	66,64	67,01	67,18	67,30	67,64	67,15
Pangkep	66,12	66,49	66,66	66,78	67,12	66,63
Bone	66,50	66,88	67,07	67,21	67,57	67,05
Wajo	66,79	67,17	67,35	67,48	67,82	67,32
Luwu Utara	67,90	68,31	68,51	68,67	69,03	68,48

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Jika memperhatikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 5 tahun terakhir (2018-2022), secara rata-rata UHH Kabupaten Bulukumba sebesar 67,90 tahun. Adapun untuk daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba, yang memiliki rata-rata UHH tertinggi dicapai oleh kabupaten Luwu Utara dengan nilai 68,48 Tahun dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yaitu 66,36 tahun. Adapun pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Kabupaten Bulukumba yaitu 0,41 tahun, pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dengan nilai 0,32 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

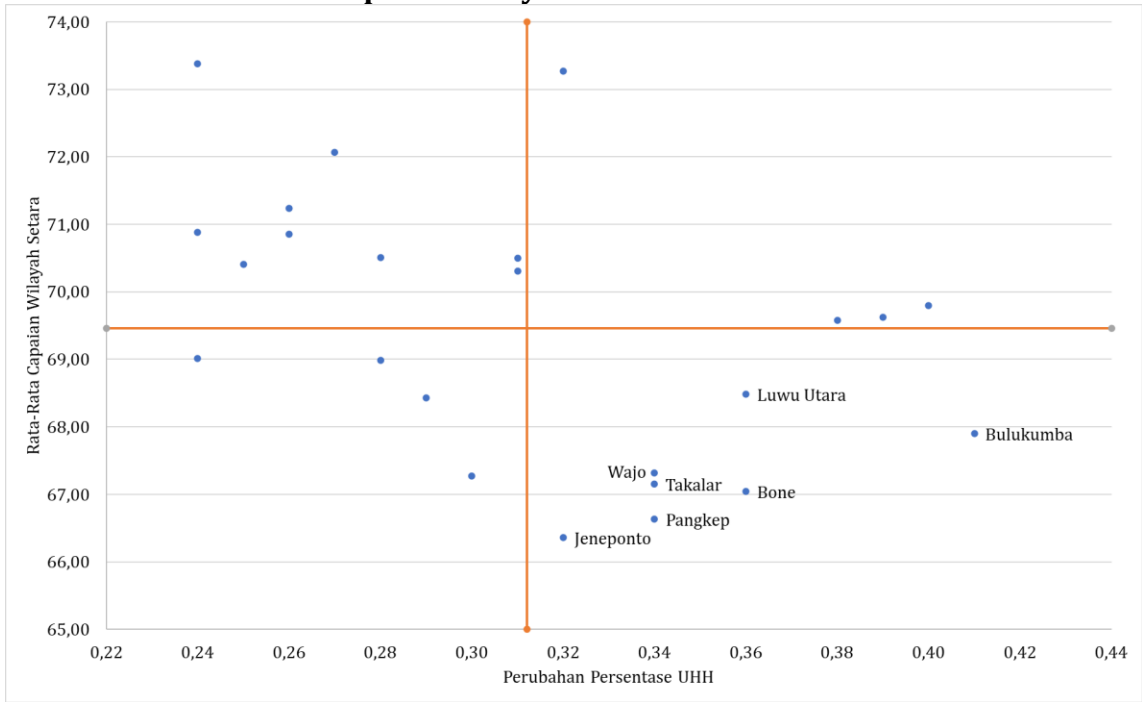
Grafik II-17
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian UHH baik itu berdasarkan nilai perubahan UHH, pertumbuhan UHH dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

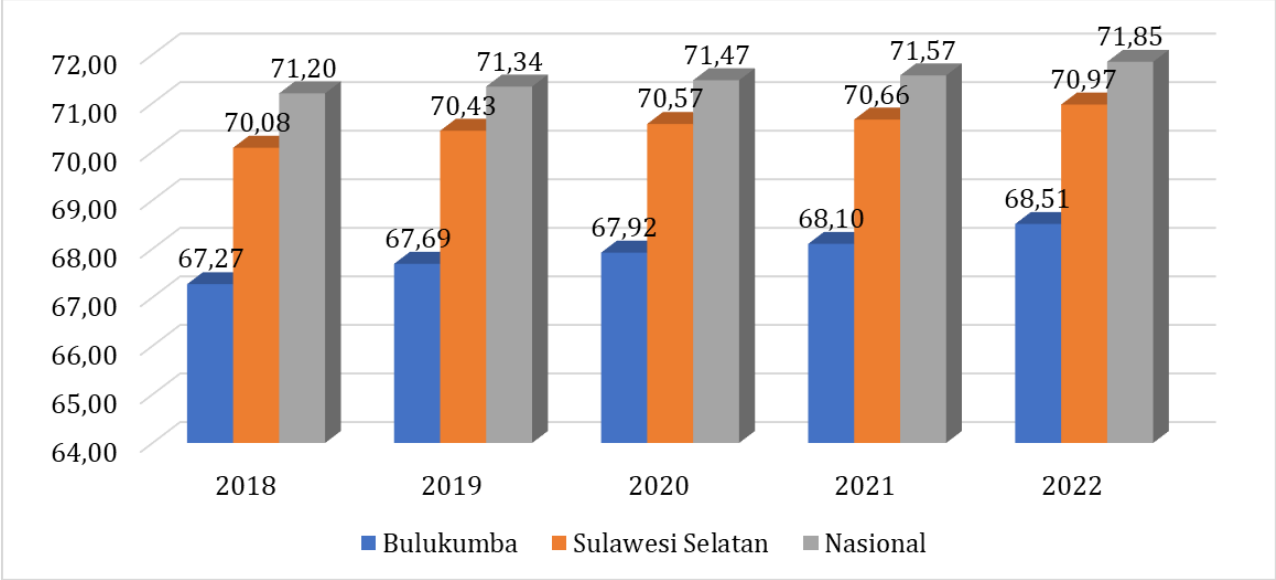
Kuadran II-8
Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Jika memperhatikan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) skala Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara nasional tahun 2018-2022. Maka capaian UHH Kabupaten Bulukumba masih berada jauh dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun demikian, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH - Tahun) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tahun 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel II-23
Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi penentu IPM. Harapan lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 di Kabupaten Bulukumba kedua indikator ini mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2018 HLS Kabupaten Bulukumba sebesar 12,79 tahun dan tahun 2022 nilai HLS sebesar 13,42 tahun. Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata peningkatan sebesar 0,51 persen setiap tahunnya.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 13,42 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022, rata-rata capaian wilayah setara HLS tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pinrang dengan nilai RLS sebesar 13,23 tahun, dan Kabupaten yang nilai capaian rata-rata HLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 12,02 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-24
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

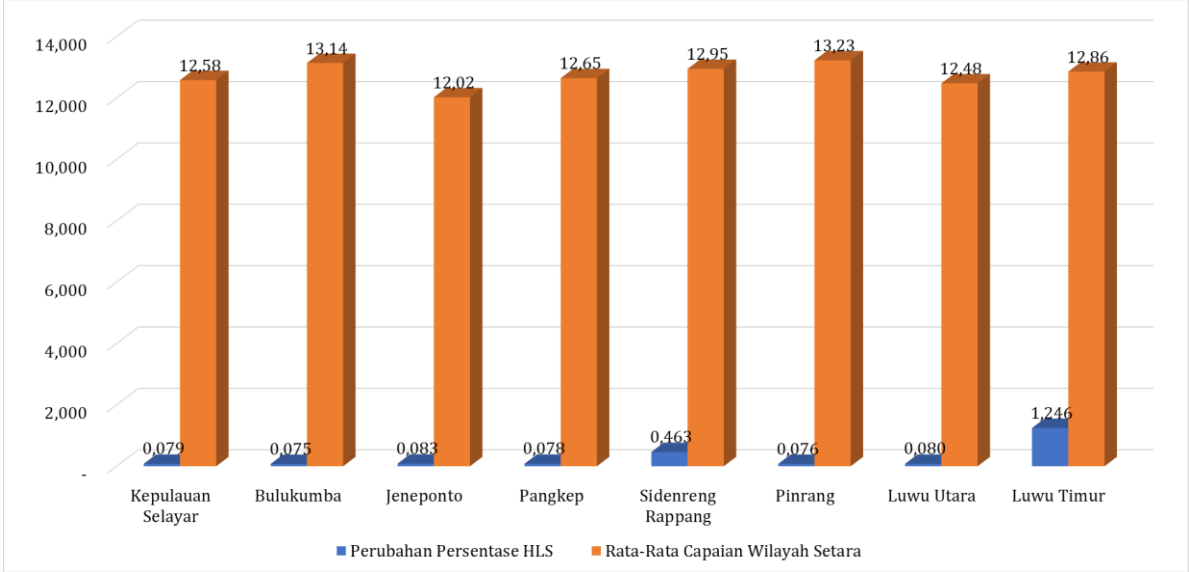
No.	Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kepulauan Selayar	12,46	12,48	12,65	12,66	12,67	12,58
2	Bulukumba	12,79	12,91	13,17	13,41	13,42	13,14
3	Jeneponto	11,95	11,97	11,98	12,10	12,11	12,02
4	Pangkep	12,41	12,51	12,76	12,77	12,78	12,65
5	Sidenreng Rappang	12,91	12,93	12,94	12,95	13,01	12,95
6	Pinrang	13,20	13,22	13,23	13,24	13,25	13,23
7	Luwu Utara	12,39	12,42	12,43	12,57	12,58	12,48
8	Luwu Timur	12,81	12,82	12,83	12,84	13,00	12,86

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Dari segi pertumbuhan, Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang tertinggi nilai pertumbuhannya di Tahun 2022, yaitu sebesar 1,246 persen, dan daerah setara yang menempati pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bulukumba dengan angka pertumbuhan sebesar 0,075 persen.

Perbandingan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata Capaian Wilayah Setara pada Tahun 2018-2022 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang menduduki posisi keempat sebesar 12,86 tahun setelah Kabupaten Pangkep sebesar 13,23, Sidrap sebesar 13,14 tahun dan Urutan Ketiga Kepulauan Selayar yakni 12,95. dan daerah setara yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan angka HLS sebesar 12,02 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

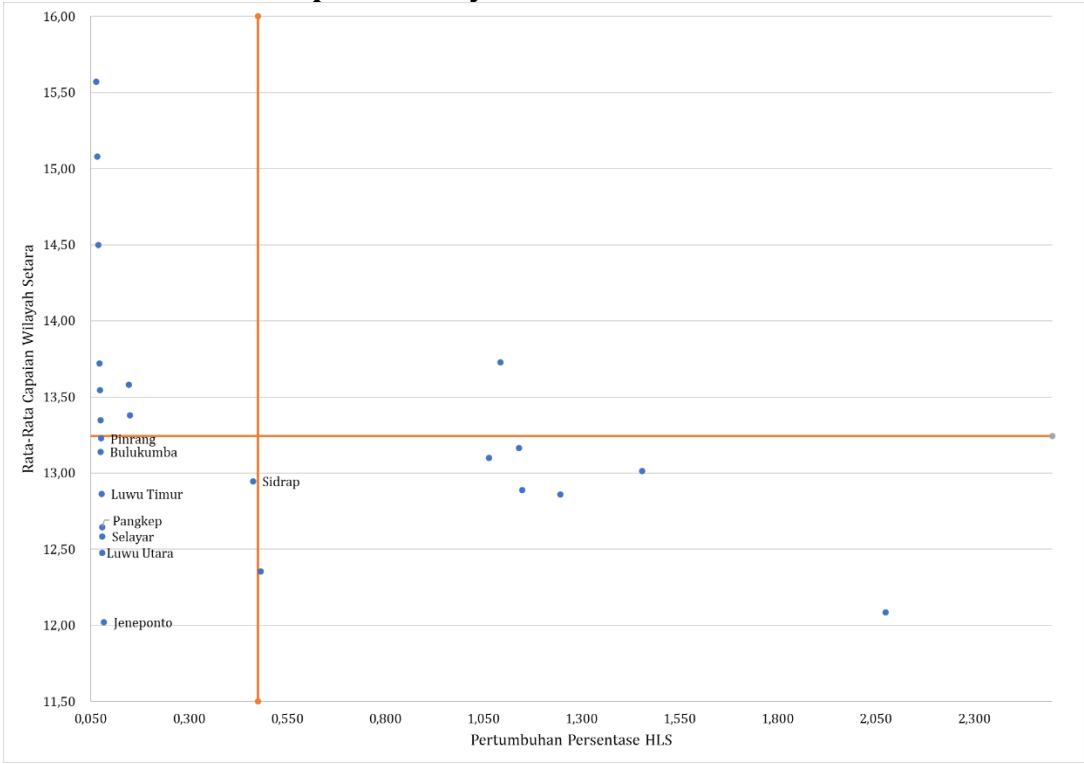
Grafik II-18
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten
Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian HLS baik itu berdasarkan nilai perubahan HLS, pertumbuhan HLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

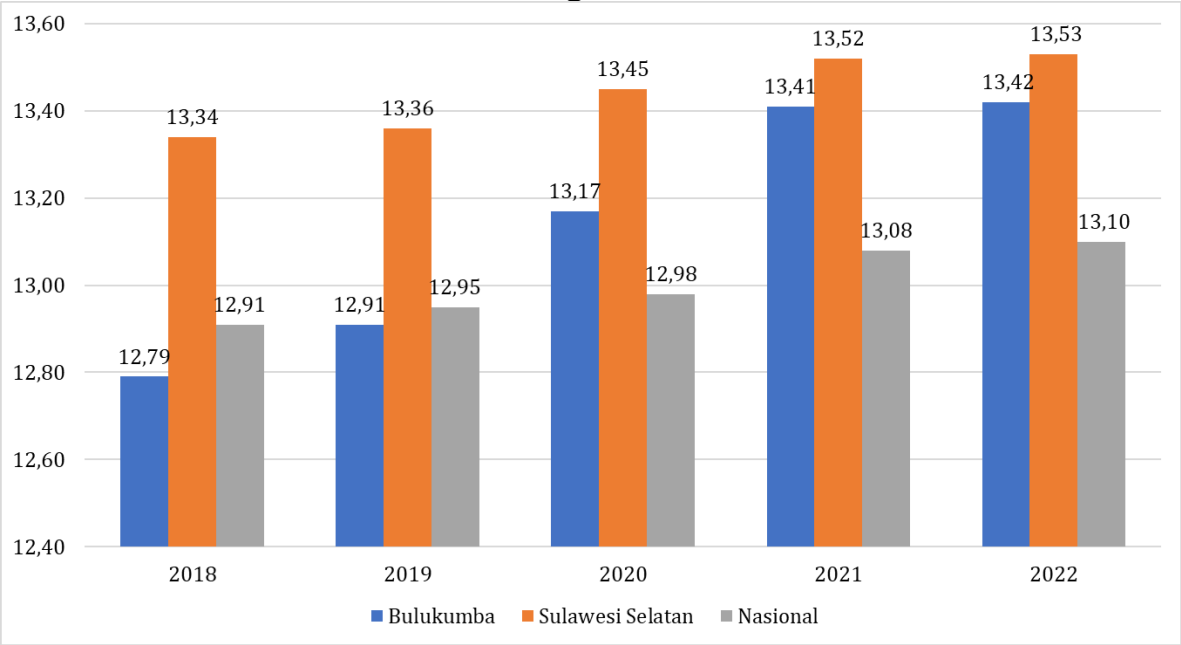
Kuadran II-9
Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap
Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Adapun Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dengan Nasional tahun 2018-2022. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan masih di atas capaian HLS Kabupaten Bulukumba dan Nasional pada kurun waktu tersebut. Sementara itu, jika capaian HLS Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan capaian HLS Nasional, pada kurun waktu 2018-2022, capaian HLS Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah capaian HLS Nasional. Namun, pada tahun 2022 capaian HLS Kabupaten Bulukumba 13,42 tahun sudah berada diatas capaian HLS Nasional 13,10 tahun. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-19
Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba
Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

9. Pengeluaran Perkapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp11,156 juta per tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,28 persen. Adapun pada tahun 2021 untuk semua wilayah setara dengan Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan, Hal ini tentunya menjadi anomali ditengah tekanan pertumbuhan ekonomi hingga kontraksi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bulukumba mencapai 10,632 juta rupiah per tahun, atau bertumbuh sebesar 1,13 persen dibanding tahun 2020 (10,513 juta per tahun). Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Pengeluaran perkapita wilayah setara tahun 2021, Kabupaten Bulukumba menempati posisi kedua dengan nilai Pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar 10,435 juta rupiah setelah Kabupaten Enrekang sebesar 10,732 juta rupiah, dan Pengeluaran perkapita terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 7,158 juta rupiah. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Wilayah Setara, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

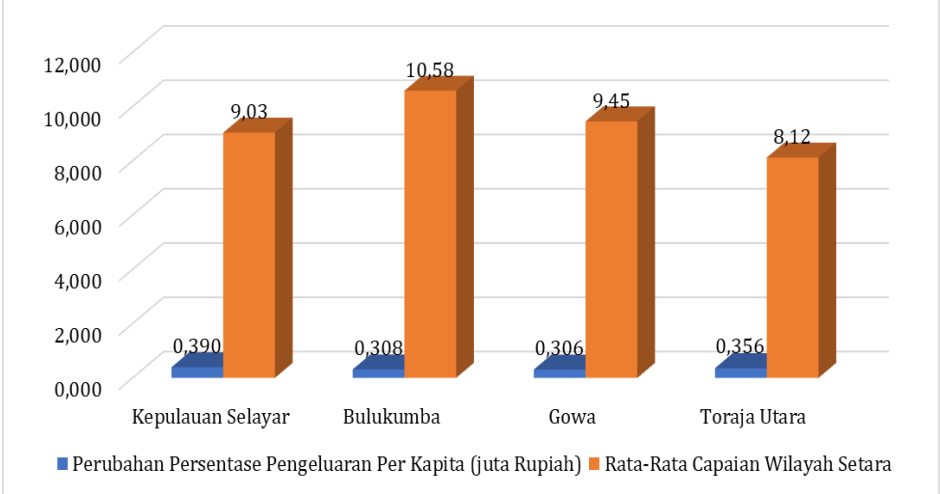
Tabel II-25
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kepulauan Selayar	8,67	9,03	8,97	9,06	9,45	9,03
Bulukumba	10,33	10,48	10,51	10,63	10,94	10,58
Gowa	9,18	9,37	9,39	9,50	9,81	9,45
Toraja Utara	7,78	8,08	8,10	8,13	8,49	8,12

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

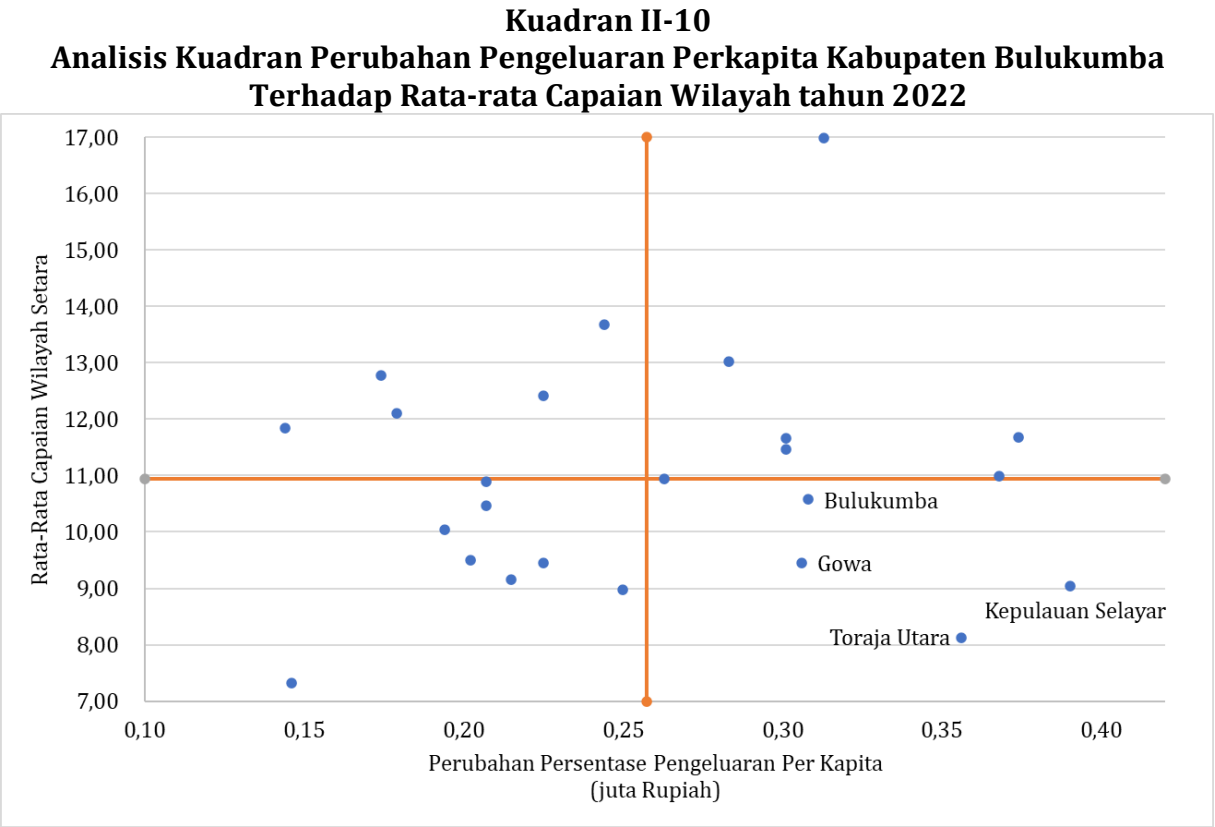
Adapun rata-rata capaian pengeluaran per kapita disesuaikan hingga pada tahun 2022 untuk kabupaten setara dengan Kabupaten Bulukumba, nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Enrekang angka Rp 10,58 Juta Rupiah dan terendah adalah Kabupaten Tojara Utara sebesar Rp 8,12 Juta Rupiah. Adapun perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Selayar sebesar 0,390 poin. dan perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah terjadi di Kabupaten Gowa dengan nilai 0,306 poin. Secara lengkap perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-20
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

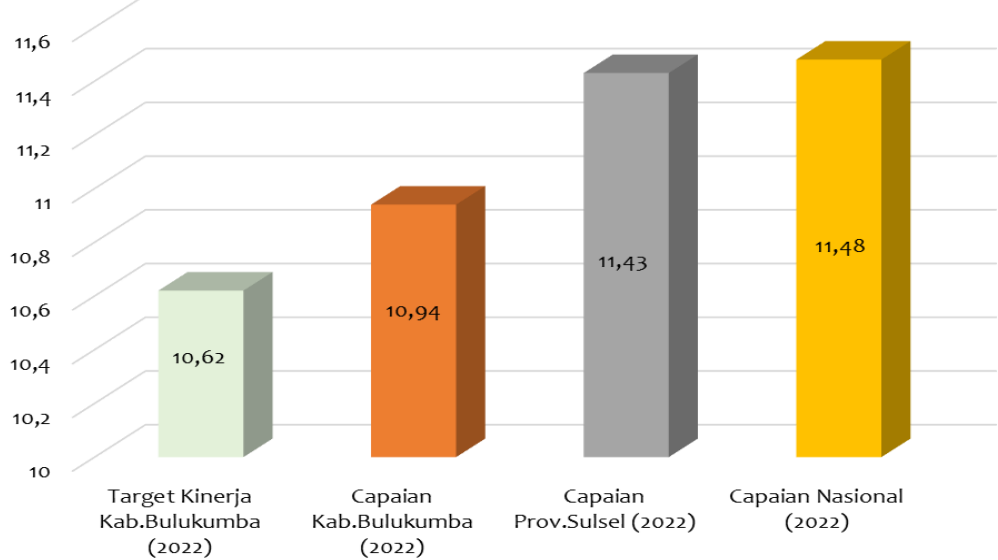
Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian pengeluaran per kapita disesuaikan baik itu berdasarkan nilai perubahan, pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2022 capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 10,58 juta rupiah, Provinsi Sulawesi selatan sebesar Rp.11,43 juta, dan Nasional Rp.11,48 juta. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sulawesi Selatan dengan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-21
Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

10. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2018-2022 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 31,55 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 38,55 juta rupiah. Jika capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 65,59 juta rupiah dan Nasional capaian Nasional sebesar 71,00 juta rupiah, maka nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba masih jauh tertinggal. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-26
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Bulukumba	Juta Rp	31,55	33,96	33,34	36,06	38,55
Sulawesi Selatan	Juta Rp	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59
Nasional	Juta Rp	55,99	59,07	56,90	62,20	71,00
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Bulukumba	Juta Rp	19,41	20,46	19,69	20,48	21,10
Sulawesi Selatan	Juta Rp	35,25	37,35	36,25	37,57	39,12
Nasional	Juta Rp	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Jika melihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah setara yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai PDRB ADHB sebesar 48,33 juta rupiah, dan daerah yang memiliki nilai PDRB ADHB terendah adalah Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 27,08 Juta Rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-27
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-2022

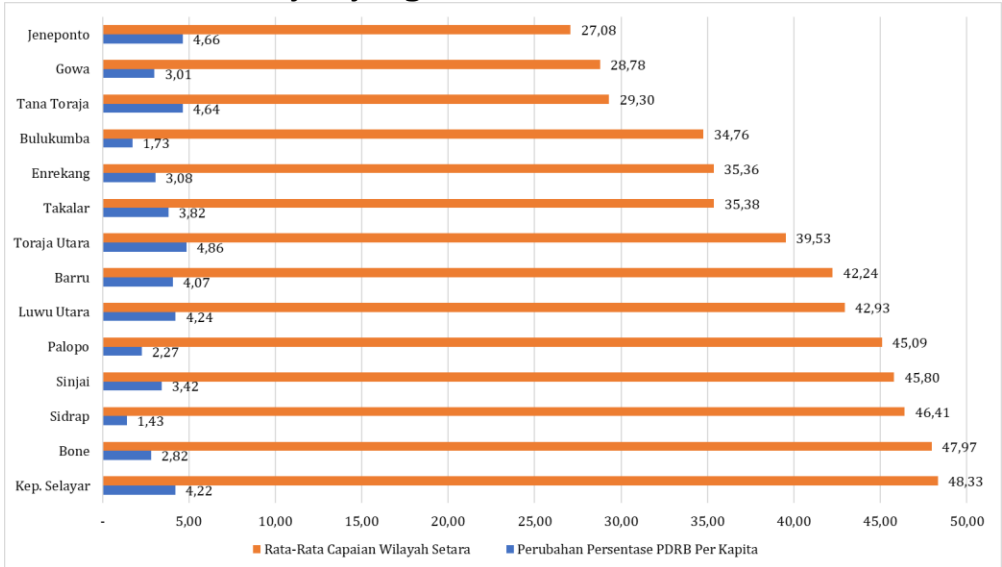
Kabupaten/ Kota	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kep. Selayar	43,62	47,99	46,73	49,54	53,76	48,33
Bulukumba	31,55	33,96	33,34	36,06	38,88	34,76
Jeneponto	26,03	27,74	25,70	27,26	28,69	27,08
Takalar	31,51	34,42	34,03	36,76	40,18	35,38
Gowa	25,08	27,50	28,20	30,44	32,70	28,78
Sinjai	41,88	45,05	43,74	47,05	51,29	45,80
Barru	38,10	41,80	40,36	43,43	47,50	42,24
Bone	43,87	47,81	45,68	48,80	53,67	47,97
Sidrap	43,25	46,49	44,12	47,19	51,00	46,41
Enrekang	32,81	35,28	33,55	36,06	39,14	35,36
Tana Toraja	29,31	31,66	27,10	28,36	30,09	29,30

Kabupaten/ Kota	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Luwu Utara	38,65	41,65	41,07	44,33	48,96	42,93
Toraja Utara	37,84	41,08	37,37	39,16	42,18	39,53
Palopo	40,32	43,79	43,66	46,52	51,18	45,09

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

Adapun perkembangan PDRB Per kapita ADHB pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Toraja Utara sebesar 4,86 poin, dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Sdirap sebesar 1,43 poin. Adapun pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba berada pada angka 1,73 poin. Untuk nilai rata-rata PDRB Perkapita pada daerah setara, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang tertinggi nilai capaiannya, yaitu sebesar 48,33 juta rupiah, dan Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 27,08 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 34,76 juta rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

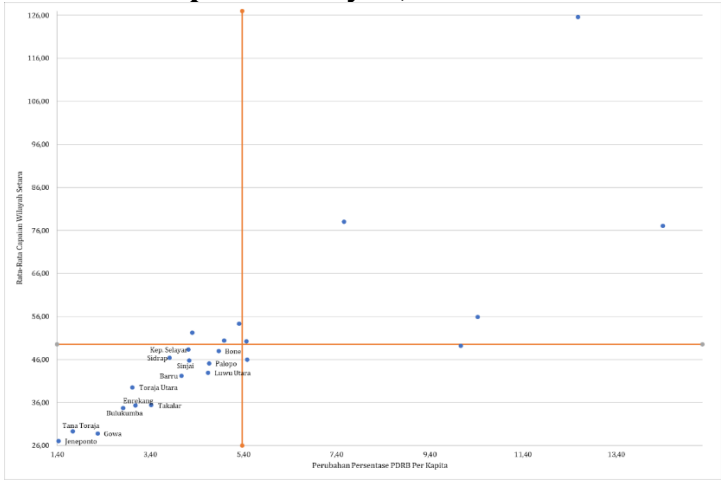
Grafik II-22
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Gambaran perkembangan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba dan daerah setara pada tahun 2022 secara kuadran dapat dilihat pada gambar berikut.

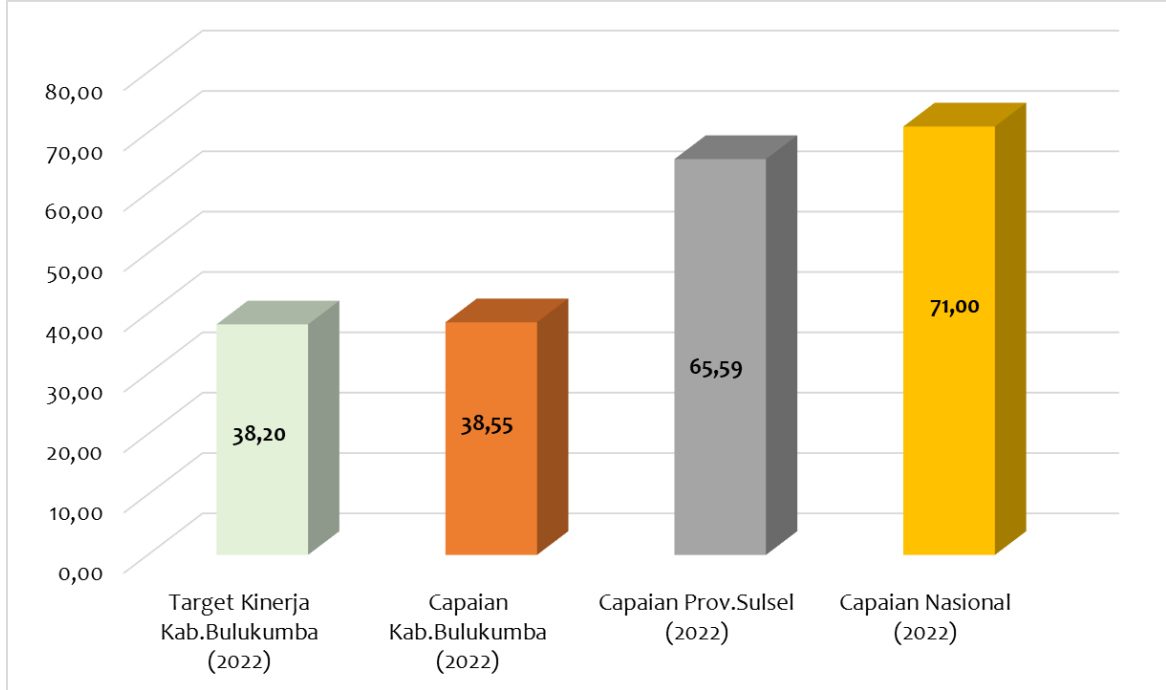
Kuadran II-11
Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Jika dibandingkan capaian Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9 dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan ADHB tahun 2021 sebesar 65,59 juta rupiah, capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba masih jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 38,55 juta rupiah dan mencapai nilai yang ditargetkan yaitu 38,20 persen dan kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) terjadi tren kenaikan setiap tahunnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-23
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2022



Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023 (diolah)

11.Inflasi

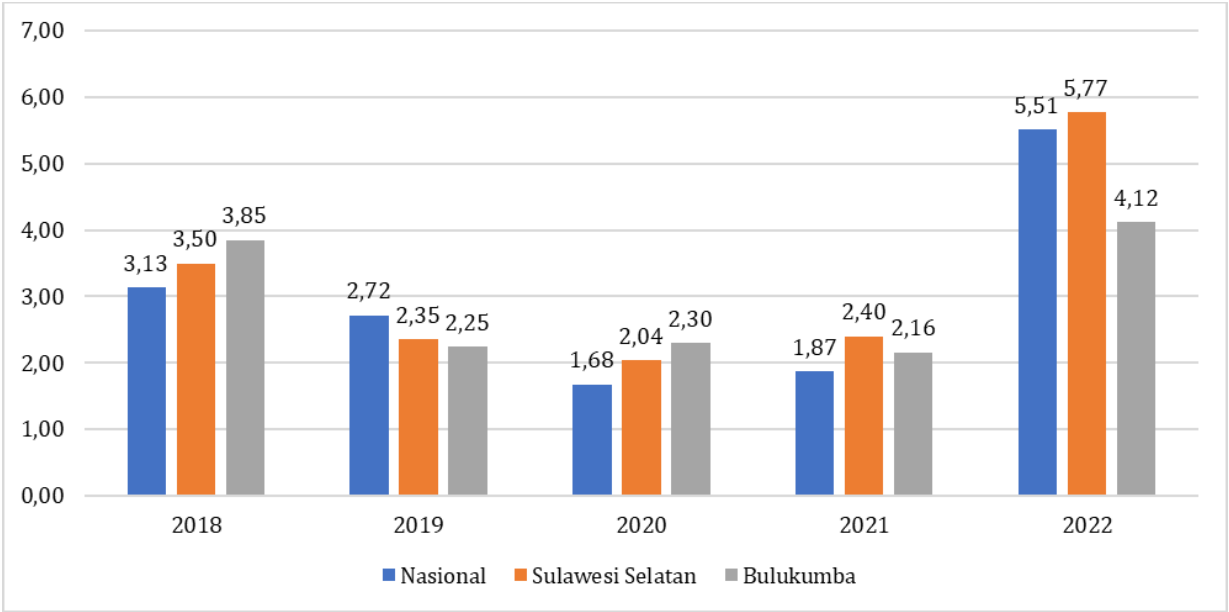
Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian. dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Inflasi IHK Nasional pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,66% (mtm) sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022, dan untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi sebesar 0,72% (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm). Peningkatan bulanan utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat pada momen HBKN Natal dan jelang akhir tahun serta adanya gangguan pasokan komoditas. Dengan perkembangan tersebut, keseluruhan tahun 2022 angka inflasi Sulsel tercatat sebesar 5,77% (yoy) sedangkan pada Desember 2022 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,51. Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar

6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 sedangkan untuk inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen dengan IHK sebesar 113,51.

Jika pada tahun 2022 nilai Inflasi Kabupaten Bulukumba diperbandingkan dengan nilai inflasi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba masih rendah dengan nilai 4,12 persen, dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 5,51 persen dan Provinsi Sulawesi Selata lebih tinggi yang mencapai sebesar 5,77 persen.

Grafik II-24
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

12. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Selama kurung waktu 2020-2022 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuatif (cenderung naik turun), dapat dilihat pada tabel kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II-28
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB		24,80	24,32	24,42

13. Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan tiap tahunnya, dilihat pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan pasca Covid-19 yang menghambat transaksi pertanian namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,81 persen.

Tabel II-29
Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian		-0,77	1,48	3,81

14. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB;

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB antara tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi.

Tabel II-30
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap
PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB		11,94	12,95	12,57

15. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi, salah satu penyebab sehingga terjadi penurunan pada tahun 2022 adalah kondisi perubahan cuaca.

Tabel II-31
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap
PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		-1,93	8,78	-0,31

16. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD;

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2020-2025. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Peningkatan jumlah tempat wisata sampai dengan tahun 2022 dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata sehingga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba ke depannya.

Tabel II-32
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD		2,6	3,41	4,47

17. Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan implikasi bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari faktor penilaian pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomidibambil salah satunya dari pendapatan asli daerah, sehingga semakin meningkatpendapatan asli daerah akan sangat membantu pembangunan dalam rangka menyukseskan pertumbuhan ekonomi. Pada Sektor Pariwiasata mengalami peningkatan fluktuasi dikarena minat wisatawan yang berpengaruh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan minat kunjungan berkurang namun tetapi pemerintah tetap melakukan dorongan kegiatan khususnya pada tahun 2021 setelah pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata meningkat menjadi 58,85 persen.

Tabel II-33
Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata		1,31	58,85	22,48

18.Indeks Daya saing infrastruktur;

Perkembangan Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan stangan.

Tabel II-34
Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Indeks Daya saing infrastruktur;		85	80	80

19. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB;

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel II-35
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap
PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB		23,44	23,39	24,12

20. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri;

Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri antara tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi.

Tabel II-36
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri
Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri		-4,85	12,23	6,68

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pendidikan

Dari angka RLS dan HLS akan diperoleh indeks pendidikan yang merupakan salah satu penyusun IPM. Pada tahun 2022 ,indeks pendidikan Kabupaten Bulukumba sebesar 63,98 Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 63,32.

Tabel II-37
Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Indeks Pendidikan		62,15	63,32	63,98

2. Indeks Kesehatan;

Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 74,00 menjadi 74,63 pada tahun 2022.

Tabel II-38
Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Indeks Kesehatan		73,72	74,00	74,63

3. **Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi**
Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi dikarenakan jumlah usia pemuda berbeda pada tiap tahunnya dan kegiatan pelaksanaan kepemudaan.

Tabel II-39
Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi
Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	Persen	18	41,67	10,71

4. **Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani**
Menjaga kerukunan agama harus meneladani tiga konsep kerukunan beragama yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Adapun Capaian Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-40
Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	Persen	100	100	100

5. **Indeks Reformasi Birokrasi**
Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Adapun Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 dengan Indeks 1,81 atau kategori Cukup, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-41
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	CC (59,46)

6. **Skor LPPD/Kategori**
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Tabel II-42
Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Skor LPPD/Kategori;		n/a	n/a*	3,5025

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Tabel II-43

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat		2,51-3,25	2,51-3,25	3,25

2.1.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang dapat meningkatkan jumlah kelompok seni dan budaya dan jumlah kelompok olahraga di Kabupaten Bulukumba. Hasil-hasil pembangunan seni dan budaya selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari segi volume pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatukan penyelenggaraan seni dan budaya kedalam kegiatan festival phinisi pada tahun 2018, dan kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan.

Untuk pembangunan di bidang keolahragaan, cakupan pembinaan olahraga secara umum mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2018 pembinaan yang dilakukan sebesar 50 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 25 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan pembinaan secara drastis menjadi 8,33 persen. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi peningkatan pembinaan olahraga, yaitu terjadi peningkatan 75 persen di tahun 2021 dan 85,71 persen di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tingkat Propinsi (PORPROV) tahun 2022 ditempatkan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai sebagai Tuan Rumah.

Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor utama belum optimalnya pembinaan kelompok olahraga dalam masyarakat, faktor lain adalah keterbatasan anggaran dalam pembinaan dan pelaksanaan event olah raga. akan tetapi pada tahun 2021 cakupan pembinaan oahraga meningkat sebesar 75,00 persen, Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Festival Phinisi. Adapun data perkembangan indikator seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-44

Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bulukumba 2018- 2022

Tahun	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	5	1	1	1
Cakupan pembinaan olahraga	%	50	25	8,33	75,00	85,71

Sumber:Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan. baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bulukumba. yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan fluktuasi dikarenakan SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	APK SD	%	108,09	113,1	112,49	106,38	113,27
2	APK SMP	%	87,9	87,75	90,74	81,88	86,46

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2018-2022. Pada tiap tahunnya terjadi peningkatan dilihat pada tahun 2022 untuk APM SD/MI sebesar 99,55 dan APM SMP/MTs sebesar 83,05.

Tabel II-46
Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APM SD/MI	%	98,75	98,48	98,32	98,06	99,55

2.	APM SMP/MTs	%	82,21	82,36	83,37	74,01	83,05

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 belum terlalu optimal, mengingat tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang penghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-47
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APS 7 -12 Tahun	%	98,93	98,77	98,80	99,06	99,55
2.	APS 13 - 15 Tahun	%	92,36	93,14	91,91	93,91	92,72
3.	APS 16 - 18 Tahun	%	74,43	74,04	74,37	73,92	74,39

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bulukumba 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2023

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Capaian Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs, di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-48
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APS SD/MI	%	0,28	0,5	0,03	0,8	0,57
2.	APS SMP/MTs	%	0,66	0,9	0,11	1,2	0,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Pada tahun 2021, Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 100 persen namun pada tahun 2022 terjadi penurunan kelulusan diakibatkan proses pembelajaran kurang efektif karena dipengaruhi pembatasan tatap muka (Pandemi Covid-19). Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-49
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	AL SD	%	100	100	100	100	95,76
2.	AL SMP	%	100	100	100	100	98,68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

6. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik, guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Olehnya itu, guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020, rata-rata capaian guru dengan kualifikasi lulusan S1/D-IV sebesar 88,91 persen. Pada tahun 2020 jumlah guru dengan status sarjana mengalami penurunan drastis sebesar 92,08 persen hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2021 jumlah guru lulusan S1 sebesar 70,59 persen dan tahun 2022 sebesar 85,15, Adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-50
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85,40	98,48	92,08	70,59	85,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

7. Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun pada kurun waktu tersebut, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:28 dan mengalami penurunan pada tahun 20201 menjadi 1:15,

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SMA mengalami penurunan di tahun 2018-2022, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:27 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1:9, Tren penurunan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah pada periode tahun 2018-2022 disebabkan oleh karena pada tahun 2017 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah hanya Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN diperbandingkan dengan jumlah siswa, sehingga nilainya berada di atas nilai rasio ideal (1:20), sementara pada tahun 2018-2021 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah Jumlah Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN dan Guru Honorer yang diperbandingkan dengan jumlah murid jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga capaiannya mengalami penurunan jauh lebih rendah kecuali Rasio guru/murid

sekolah pendidikan Dasar pada tahun 2021 meningkat dikarenakan adanya penetapan dan pengangkatan ASN pada tahun tersebut. Capaian Rasio Guru-Murid dan Sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-51 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2018 - 2022							
No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	Rasio	1 : 14	1 : 14	1 : 13	1 : 15	1 : 13
2.	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	Rasio	1 : 12	1 : 12	1 : 9	1 : 9	1 : 9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

8. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Pada Tahun 2021, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bulukumba sebesar 89,9 persen, nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang nilainya sebesar 90,3 persen. Pada tahun 2020 masih terdapat sebesar 9,7 persen Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, dan kelompok umur yang paling tinggi jumlah buta hurufnya adalah penduduk yang berusia 50 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-52 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022							
No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,5	92,9	90,3	89,9	93,31

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

B. Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, program - program kesehatan di Indonesia banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. jumlah kematian bayi menurut laporan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi pada 2017 - 2018 mengalami peningkatan sebesar (10,91 per 1000 KH),sedangkan tahun 2019-201 mengalami penurunan menjadi (0,29 per 1000 KH) begitupun pada tahun 2022 menjadi 0,009 per 1000 KH. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-53 Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022						
Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	69	64	51	20	34

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran HidupKelahiran Hidup	Angka	10,91	10,05	7,53	2,90	5,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2. Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2018-2022, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-54
Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Balita	Kasus	88	70	54	50	16
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	14,06	10,99	7,98	7,5	9,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

3. Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2018-2022, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup mengalami tren yang fluktuatif dan pada tahun 2022 tidak ditemukan Kematian Neonatal. Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tata laksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan. ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-55
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	72	51	45	50	0
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	11,51	8,01	6,65	7,29	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulukumba terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 - 2022 cenderung berfluktuasi, kematian ibu di tahun 2017 kematian ibu meningkat menjadi 92,91 kasus dan pada tahun 2018 kasus kematian ibu meningkat lagi menjadi 110,64 kasus, pada tahun 2019 turun menjadi 47,10 kasus kematian dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 59,08 kasus kematian dan menglmi peningktan angkat kematian ibu per 100.000 kelahiran sebesar 145,88 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 137,59 per 100.000. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa Kecamatan untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar pada semua Kecamatan sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-56
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas	Orang	7	3	4	10	9
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	6.327	6.370	6.770	6.855	6.522
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.00 kelahiran	110,64	47,10	59,08	145,88	137,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

5. Rasio Posyandu per satuan balita

Keberadaan Posyandu dinilai dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri sehingga indikator keberhasilan Posyandu diukur dengan strata purnama dan mandiri, dimana jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri terhadap per satuan balita, cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin meningkat. Disamping itu bertambahnya posyadu juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang dianggap baik. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-57
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	Unit	562	581	593	593	597
Jumlah Balita	Orang	42.409	29.886	25.192	25.371	26.358
Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 1.000 Balita	13.25	19,44	23,54	23.37	22,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

6. Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk

a. Rasio puskesmas per satuan penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2021 jumlah puskesmas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 Unit.

b. Rasio pustu per satuan penduduk

Puskesmas Pembantu (pustu) adalah sarana kesehatan yang terdepan di Masyarakat dan merupakan bagian jaringan pelayanan dari Puskesmas yang mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Promotif,

Preventif dan kuratif. Pada tahun 2021 terdapat 61 unit Pustu yang tersebar di 10 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan.

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya pada tahun 2021 sebanyak 60 Pustu pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi menjadi 61 Pustu hingga pada tahun 2021. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-58
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Jumlah Puskesmas	Unit	20	20	20	20	20
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	61	61	61	61	61
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu (Pustu)	Unit	81	81	81	81	81
Rasio Puskesmas dan Pustu	Per 1000 Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,19	0.17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan Rumah Sakit per Satuan penduduk menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk kondisi tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki 2 unit Rumah Sakit tipe B dan 17 klinik kesehatan, sehingga kedepannya diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit tipe C dan D di daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa dimaksimalkan. Angka Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik per Satuan Penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-59
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	2	2
Jumlah Poliklinik	Unit	15	15	16	17	17
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,002	0,002	0,002	0,005	0.004
Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017- 2021 mengalami tren yang meningkat pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2018-2022 jumlah dokter umum dan spesialis mengalami penurunan sebesar 0,099 mendi 0,14 per 1000 penduduk, Perkembangan Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-60
Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter Umum/Spesialis	Orang	40	40	34	64	118
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,096	0,095	0,078	0,14	0.25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

e. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017- 20201 mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah Dokter sebanyak 83 orang (0,188- 0,198), tahun 2019 meningkat menjadi 96 orang (0,198), tahun 2020 kembali menurun menjadi 88 orang (0,209), namun pada tahun 2021 jumlah dokter bertambah menjadi 114 orang (0,256). Perkembangan Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-61
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tenaga Medis	Orang	83	96	88	114	153
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Rasio Tenaga Medis/Penduduk	Angka Per 1000 Penduduk	0,198	0,228	0,209	0,256	0.33

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

f. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2017 sebesar 86,67 persen, tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan turun menjadi 85,45 persen, kemudian tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 79,51 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,35 persen hingga tahun 2021 meningkt sebesar 87,46. Ini diakibatkan karena adanya peran aktif tenaga medis/kesehatan melakukan sosialisasi terkait keselamatan ibu bersalin dan meningkatnya sarana dan prasarana pada seluruh layanan kesehatan. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-62
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatandi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6221	5788	6776	6855	6541
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7280	7280	7847	7847	7655
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85,45	79,51	86,35	87.46	85,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan *UCI (Universal Child Immunization)* yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap,Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak) Bentuk pelayanan kesehatan bayi berupa pemberian imunisasi rutin bagi bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB) yang dilakukan di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Selengkapnyapada tabel berikut.

Tabel II-63
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	136	136	45	87	123
Jumlah SeluruhDesa/Kelurahan	Desa/Kel	136	136	136	36	136
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	33,1	63,97	90.44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi di Kabupaten Bulukumba Periode 2018-2022 menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100 persen antara tahun 2017-2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 smpai tahun 2021 merupakan tahun merebaknya wabah pandemi *Covid-19*, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 87 desa/kelurahan atau hanya sebesar 63,97 persen.

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2017 sampai 2021, menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan cakupannya telah mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi, sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by addres Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik, selengkapnyadisajikan pada tabel berikut.

Tabel II-64
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	7	9	4	7	10
Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan	Balita	7	9	4	7	10
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak 52,0 persen, tahun 2018 sebanyak 58,4 persen dan tahun 2019 sebanyak 67,4 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 39,4 persen dan ditahun 2021 meningkat sebesar 71,3 persen . Hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan akibat gejala yang di timbulkan bagi penderita penyakit TBC hampir mirip dengan gejala bagi penderita Covid-19 dan adanya pembatasan layanan kesehatan masyarakat akibat pandemic. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-65
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa/ Orang	338	390	237	385	530
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa/ Orang	579	579	602	540	828
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	58,4	67,4	39,4	71,3	64.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

j. Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 637 orang, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan penderita sebanyak 651 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penderita TBC menurun menjadi 346 orang dan pad tahun 2021 kasusu penderita TBC meningkat sangat drastis sebesar 5400 orang. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC disebabkan dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak dilaporkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-66
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Penderita TBC	Orang	637	651	346	5400	767
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	152,27	154,78	79,07	121,16	165,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

k. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2017 sebanyak 6,0, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,7, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,4 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2021 kembali meningkatsebear 6,48 . Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-67 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022						
Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020		2022
Jumlah Kematian karena TB	Jiwa	24	31	14	35	39
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	5,7	7,4	3,2	6,48	8,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

I. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-202 menunjukkan tren yang fluktuatif secara jumlah, namun bersifat konstan dari segi capaian penanganan selama periode tersebut. Tahun 2017 turun menjadi 110 orang, tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 152 orang, tahun 2019 jumlahnya kembali naik menjadi 275 kasus, namun tahun 2020 jumlah penderita penyakit DBD turun menjadi 160 orang dan pada tahun 2021 jumlah penderita mengalami penuruan sbesar 112 orang. Dari segi penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 capaiannya sebesar 100%

Tabel II-68 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022						
Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah keseluruhan penderita DBD	Jiwa	152	275	160	112	141
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	152	275	160	112	141
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

m. Angka kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria. Angka kejadian malaria di kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni 10 kasus penderita malaria. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-69
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penderita Malaria	Orang/ kasus	43	23	5	10	23
Jumlah Penduduk	Jiwa	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	10,28	5,47	1,19	0,02	4,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai factor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria.

n. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi

Prevalensi HIV dari total populasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2017 terdapat 21 orang penderita HIV/AIDS dengan angka prevalensi sebesar 0,005, dan pada tahun 2021 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 34 orang atau 0,34 dari total populasi penduduk. Sesuai dengan tingkat epidemiologi, Kabupaten Bulukumba adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-70
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penderita HIV/AIDS	Orang	42	66	38	34	64
Jumlah Penduduk	Jiwa	418.326	420.603	437.607	445.699	463.981
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000	%	0,010	0,016	0,009	0,34	13.79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

o. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Bulukumba melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-71
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani (rujukan)	Jiwa	8.480	9.483	6.010	75,698	
Jumlah Penerima PBI KJN	Jiwa	208.227	187.225	118.100	214.079	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	4,07	5,06	5,09	35,36	8,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

p. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas padamasa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamillengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-72
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan Kandungan (K4)	Orang	5.943	5.262	6.026	4,497	5.771
Jumlah Ibu Hamil	Orang	7.625	7.265	8.220	8,220	8.220
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	77,94	72,43	73,3	92,42	70.21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya).

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bulukumba diantaranya, adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan dan perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Infomasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

q. **Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan keluarga miskin**

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-73
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	77,94	63,63	45,25	71,31	52,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

r. **Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2017 nilainya sebesar 68,21 persen, tahun 2019 mningkat menjadi 80,56 persen, dan tahun 2020 capaian tersebut turun lagi menjadi 52,37 persen da di tahun 2021 meningkat m jadi 60,4 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-74
Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	93.75	80,56	52,37	60,4	85,687

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Kabupaten Bulukumba sebagai pilar utama pembangunan di kawasan selatan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.510/X/2016 tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bulukumba, menurut statusnya panjang jalan Kabupaten Bulukumba meningkat dari 1.039,17 Km menjadi 1.211,516 Km. Perubahan Keputusan Bupati terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018-2019 panjang jalan dalam kondisi baik meningkat akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 persentase kondisi jalan baik kembali mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi penganggaran dan terpenuhinya target kondisi jalan yang baik di tahun 2020 dan 2021, Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-75
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	704,74	848,74	630,57	560,393	718,90
Panjang jalan kondisi sedang	Km	506,77	362,776	556,81	157,954	165,43
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.211,516	1.211,516	1.211,516	1.147,72	1.147,72
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,582	0,701	0,520	0,49	0,62

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2023

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan tren yang stagnan selama priode tersebut. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-76
Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Nasional	Km	87,452	87,452	87,452	87,452	87,452
Panjang Jalan Provinsi	Km	83,76	83,76	83,76	83,76	83,76
Panjang Jalan Kab/Kota	Km	1.211,52	1.211,52	1.211,52	1.147,72	1.211,516
Total Panjang Jalan	Km	1.382,728	1.382,728	1.382,728	1.318,932	1.318,932
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jml penduduk	0,0033	0,0033	0,0032	0,0052	0,0030

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023

3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan pada priode tersebut. Tahun 2018 capaiannya sebesar 82,84 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 98,97 persen namun pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran

karena terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, yang pada awal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menangani fisik pembangunan trotoar dan drainase/saluran pembuangan air untuk permukiman dan perumahan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tabel II-77
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Km	82,84	91,77	95,49	n/a	98,97

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023

4. Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik

Berdasarkan Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan keadaan bencana alam dan berubahnya luas keseluruhan irigasi pada tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba karena adanya perpindahan kewenangan.

Tabel II-78
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas Irigasi dalam kondisi baik	Km	15.065	15.658	16.408	17.226	8.246
Luas Keseluruhan irigasi	Km	20.777	20.777	20.777	20.777	10.160
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	72,51	75,36	78,97	82,91	81,16

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023

5. Rasio Jaringan Irigasi

Berdasarkan capaian Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan irigasi yang dikerjakan pada tahun sebelumnya mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam yang diantar longsor, hujan deras dan faktor usia pada bangunan tersebut.

Tabel II-79
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang saluran irigasi	Km	17.872	12.409	3.804	19.244	10.160
Luas lahan budidaya pertanian (Dipakai luas sawah kewenangan Kabupaten)	Ha	20.777	20.777	20.777	20.777	20.777
Rasio Jaringan Irigasi		0,86	0,60	0,18	0,93	0,49

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio rumah layak huni

Capaian Rasio Rumah Layak Huni di Bulukumba Tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah rumah layak huni pada tiap tahun meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-80
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Jumlah Rumah Layak Huni	RT	103.200	103.200	103.300	103.610	192.250
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	440.090	443292
Rasio Rumah Layak Huni		0,247	0,245	0,236	0,235	0,434

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

2. Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata dimana capaian dari tahun 2018-2022 mengalami capaian fluktuatif dikarenakan Luas Area Permukiman Tertata pada tiap tahunnya berbeda disebabkan bencana alam maupun kondisi permukiman yang mengalami perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-81
Persentase Permukiman yang Tertata
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas Area Permukiman Tertata	M ²	73.880	77.820	80.153	80.253	72.153
Luas Area Permukiman Keseluruhan	M ²	122.641	122.641	122.641	122.641	122.641
Persentase permukiman yang tertata	%	60,24	63,45	65,36	65,44	58,83

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

3. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan tiap tahun, ini dapat dilihat dari data capaian pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2021 sebesar 11,5 persen namun pada tahun 2022 menurun menjadi 9,41 persen dikarenakan Luas Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 seluas 13.666 M² turun menjadi 11.133 M² pada tahun 2022. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-82
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	M ²	8.576	11.296	13.476	13.666	11.133
Luas Wilayah	M ²	118.252	118.252	118.252	118.252	118.252
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	7,25	9,55	11,40	11,56	9,41

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Untuk indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2018-2022 dimana jumlah permukiman layak huni pada tahun 2018 sebesar 102.768 unit rumah selanjutnya terjadi peningkatan sampai tahun 2022 yaitu 103.498 unit. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-83
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	201	2022
Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau		102.768	103.029	103.290	103.368	103.498
Jumlah rumah tangga MBR		111.585	111.585	111.843	111.843	111.843

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,10	92,33	92,35	92,42	92,54

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan kembali pentingnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pedoman dan slstem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dalam lintas fungsiyang berelanjutan dan terpadu. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat baik yang berada diluar permukiman umum maupun di Kawasan kumuh meliputi air bersih, drainase lingkungan (sanitasi) dan jalan lingkungan yang merupakan prasrana permukiman menjadi tanggungjawab negara agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak huni. Saat ini masih banyak polemik terkait ketersediaan atau sengketa lahan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga perencanaan awal lokasi sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan. Adapun Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-84
Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi		91.270	90.970	90.020	90.289	76.391
Jumlah Rumah Tinggal		118.252	118.252	118.252	118.252	118.252
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	77,18	76,93	76,13	76,35	64,60

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

6. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berkases air minum dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 Persentase penduduk berkases air minum Sebesar 82.19. tahun 2018 Persentase penduduk berkases air minum mengalami peningkatan sebesar 87.77 persen, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84.4 persen dan pada tahun 2021 mngalami peingkatan sebesar 84,26 persen hingga pada tahun 2022 menjadi 85,48 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-85
Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk berakses air minum	%	87.77	83.52	84.4	84,26	85,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023

7. Persentase areal kawasan kumuh

Persentase areal kawasan kumuh dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-86
Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Luas Kawasan Kumuh	M ²	16.542	64.000	11.799	12.799	13.879
Luas Wilayah	M ²	122.641	115.467	115.467	115.467	115.467
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	13,49	55,43	10,22	11,08	12,02

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023

8. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dari tahun 2018-2022 pada dasarnya mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah bangunan ber-IMB tiap tahunnya dilakukan peningkatan jumlah terdaftar namun jumlah bangunan tiap tahunnya bertambah dan diantaranya terverifikasi belum memiliki IMB. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-87
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	5,58	2,15	2,97	6,02	0,42

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan Kab. Bulukumba, 2023

E. Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pada tahun 2018-2022, Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami penurunan dalam segi cakupan ataupun persentase ini didasarkan pada jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah Linmas tetap dan penyebab lainnya hal ini disebabkan karena berkurangnya Jumlah Petugas Linmas setelah diadakan peremajaan data Linmas dari 10 Kecamatan.

Tabel II-88
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Petugas Linmas		1.606	1.360	1.360	1.330	1.330
Jumlah Penduduk		418.326	420.603	437.607	440.090	443.292
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,38	0,32	0,31	0,30	0,30

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 , pada Tahun 2018 capaian sebesar 82.89%, tahun 2019 sebesar 71,11%, pada tahun 2020 sampai 2022 menjadi 100% ini menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 semakin baik.

Tabel II-89
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan		315	224	306	313	83
Jumlah Laporan Pelanggaran K3		380	315	306	313	83
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3		82,89	71,11	100	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Persentase tingkat capaian pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan dalam segi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran disebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sementara jumlah mobil pemadam kebakaran tetap yakni pada tahun 2018 sebanyak 13 unit namun pada tahun 2019-2022 menjadi 12 unit.

Tabel II-90
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	13	12	12	12	12
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	420.603	437.607	440.090	443.292
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	0,00311	0,00285	0,00274	0,00273	0,00271

Sumber: Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023

4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Presentase capaian pada tahun 2018 sebesar 83,33%, tahun 2019 sebesar 98,90% dan ditahun 2020 sampai 2022 meningkat menjadi 100% hal ini dikarenakan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran sudah semakin meningkat dengan adanya penempatan Posko Pemadam Kebakaran di 4 Sektor Kecamatan diantaranya : Sektor Dampang mencakup wilayah Gantarang-Kindang, Sektor Tanete mencakup wilayah Bulukumpa-Rilau Ale, Sektor Bonto Bahari mencakup wilayah Bonto Bahari-Bonto Tiro, Sektor Kajang mencakup Wilayah Kajang-Herlang.

Tabel II-91
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2018 – 2022

Keterangan (dalam persen)	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran kurang satu jam setelah pengaduan	Menit	90	180	80	80	73
Jumlah kejadian	Kasus	108	182	80	80	73
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK		83,33	98,9	100	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023

5. Presentase Penegakan Perda

Presentase tingkat capaian pada pada tahun 2018 yaitu 45,85% namun turun pada tahun 2019 menjadi 34.12% kemudian meningkat kembali menjadi 100% ditahun 2020 - 2022. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2018-2022.

Tabel II-92
Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelesaian Penegakan Perda yang memuat saksi		94	58	60	94	60
Jumlah Pelanggaran Perda		205	170	60	94	60

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penegakan Perda	%	45,85	34,12	100	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023

F. Urusan Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah dan jenis PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data capaian pada indikator RPJMD diperoleh berdasarkan dari jumlah PMKS dan data indikator lain diluar PMKS yang ditangani yang selanjutnya dihitung sesuai dengan formula atau rumus pada masing-masing indikator untuk memperoleh capaian baik dalam satuan Unit, Buah maupun persentase. Dalam penetapan jumlah data tersebut diperoleh dari masing-masing bidang teknis yang menangani sesuai indikator RPJMD yang telah ditentukan. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

1. Sarana Sosial seperti Panti Sosial

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi , dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2018 berjumlah 18 Buah, Tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 13 unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial.

Tabel II-93
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
diKabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	18	13	13	13	13

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga/panti sosial dalam pengajuan akreditasi dan keterangan terdaftar pada Dinas Sosial.
- Faktor penghambat capaian indikator, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial tidak secara rutin melengkapi dokumen pengajuan akreditasi lembaga.

2. Jumlah Korban Bencana yang Ditangani

Untuk Jumlah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun 2018 - 2022 mencapai 100% karena semua korban bencana dapat dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II-94
Jumlah Korban Bencana yang Ditangani
diKabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	147	483	365	60	26
Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	147	483	365	60	26
Persentase		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Sesuai dengan data yang disajikan secara umum berfluktuatif dimana pada Tahun 2018 mencapai 100% dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 Sebesar 98.6 mejadi 26.8 salah satu faktor penurunan capaian dari tahun 2018 diakibatkan karena jumlah PMKS yang memperoleh masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada namun pada tahun 2022 tercapai 100%.

Tabel II-95
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	38,358	38,773	42,592	48.503	25.463
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	38,358	42,149	43,179	180.686	25.463
Persentase		100,00	91,99	98,64	26,84	100,0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat

4. Perentase PMKS yang tertangani

Perentase PMKS yang tertangani dari tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2020 dan 2021 PMKS yang tertangani ada pada 73.57% dan 26.8% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 57,5% lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel II-96
Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	38.097	39.713	31.767	48.503	26.099
Jumlah PMKS yang ada	Orang	38.358	42.149	43.179	180.686	45.365
Persentase		99.3	94.2	73.6	26.8	57,5

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat.

5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

pada akhir capaian RPJMD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*refocusing* penanggulangan Covid-19) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalmi peningkatan sebesar 100%.

Tabel II-97
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	146	480	270	60	26
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	147	483	365	60	26
Persentase		99.3	99.4	74.0	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Pada tahun 2018-2022 capaian Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami nilai fluktuasi dikarenakan target untuk Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial berbeda pada tiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-98
Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	1,837	2,148	2,251	31	1.088
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	1,964	2,160	3,039	33	1.119
Persentase		93.5	99.4	74.1	93.9	97,23

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

A. Urusan Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebesar 4,98 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,09 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,93 persen, pada tahun 2021 sebesar 1,18 persen dan pada tahun 2022 menjadi 23,26 persen dimana jumlah sengketa pengusaha pekerja 4 kasus sedangkan jumlah perusahaan 172 unit, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-99
Angka sengketa pengusaha-pekerja
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	%	4,98	19,09	0,93	1,18	23,26

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya namun pada tahun 2022 kasus yang tercatat berjumlah 4 kasus dan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-100
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	66,0	62,0	38,0	38,0	100,0

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 sebesar 30 persen sampai dengan tahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 100 persen namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97,30 persen dimana jumlah pekerja/buruh sebesar 3.853 orang sedangkan yang memperoleh program jamsostek 3.749 orang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-101
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten
Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	30	94	100	100	97,30

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,25 persen, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen dan tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-102
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	%	25	138	100	100	25

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2017 - 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 0,31 persen, naik menjadi 0,64 persen pada tahun 2018, turun sebesar 0,60 persen di tahun 2019 dan t mengalami penigkatan pada tahun 2020 menjadi 32 persen dan menurun di thun 2021 sebesar 20 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-103
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,64	0,60	32	20	0,24

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2017 - 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 1 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,028 persen, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi0,826 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkat menjadi 3 persendan kembali mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 2,00 Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-104
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	0,028	0,826	3,00	2,00	0,06

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuatif, pada tahun pada tahun 2018 mengalami sebesar 68 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 80 dan pada tahun 2020 samapi 2021 mengalami penurunan menjadi 53 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,43 persen dikarenakan .Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-105
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	68,0	80,0	52,0	53,0	91,43

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

8. Rasio lulusan S1/S2/S3

Data lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berasal dari data statistik (Bulukumba dalam Angka) menunjukkan bahwa lulusan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 718,00 per 10.000 penduduk dan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah pada tahun 2018 sebesar 439,56 per 10.000 penduduk. Peningkatan terhadap perbandingan tersebut cukup signifikan yakni sekitar 47,92 persen, menunjukkan tingkat kemampuan secara finansial dalam pembiayaan kuliah anak dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin membaik di masyarakat. Selain itu banyaknya universitas di Kabupaten Bulukumba semakin membuka peluang kelanjutan pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-106
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio lulusan S1/S2/S3		439,56	739,36	758,83	718,00	741,80

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

9. Rasio daya serap tenaga kerja

Daya serap tenaga kerja dalam kurun waktu empat tahun paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 55,42 persen sedangkan daya serap tenaga kerja terendah pada tahun 2017 sebesar 0,477 persen. Banyaknya lowongan kerja pada sektor perdagangan, wirausaha, pertanian dan lainnya. Menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemic Covid-19.

Tabel II-107
Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio daya serap tenaga kerja	%	30,89	55,42	49,68	46,86	43,21

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2022 tenaga kerja yang dilatih 160 orang sesuai dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-108
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	100	75	100	100	100

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana, pada tahun 2017 sebesar 0,64 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 0,74 persen, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menurun menjadi 0,53 persen. Pelatihan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-109
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	0,74	0,53	0,53	0,53	0,47

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan turun menjadi 63.183 orang, namun untuk pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun yang sama berjumlah 3.677 orang (5,8%). Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan meningkat sebanyak 69.149 orang sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah berjumlah 3601 (5,2%). Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan berjumlah 83.583 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun menjadi 3592 (4,3%) orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 92.095 orang sementara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 3670 orang, secara keseluruhan jumlah pekerja perempuan naik dari tahun sebelumnya namun secara persentase menurun dari 4,3% menjadi 4,0%. dan di tahun 2021 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menurun sebesar 3,7 %

Tabel II-110
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	5.2	4.3	4,0	3,7	4,4

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018 - 2022 sejumlah 40 total kursi. Pada tahun 2018 perempuan yang menduduki kursi terdapat 7 orang dan pada tahun 2019 menjadi 8 orang yang terpilih pada pemilu DPRD periode 2019-2024 namun pada tahun 2020-2022 berkurang menjadi 7 orang dikarenakan 1 orang mengikuti pemilu pilkada pada tahun 2020.

Tabel II-111
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	17,50	20,00	17,50	17,50	17,50

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta.

Pada tahun 2018-2022 jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan meningkat pada tiap tahunnya dikarenakan penegakan kesetaraan gender telah diberlakukan dan melihat dari jumlah penduduk kabupaten didominasi oleh perempuan.

Tabel II-112
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	69,14	83,58	92,09	92,09	96

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2008-2022, mengalami penurunan ini berdasarkan kasus yang ditemukan dan dilaporkan..

Tabel II-113
Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KDRT		37	38	12	8	3
Rasio KDRT		0,027	0,027	0,136	0,091	0,034

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Tabel II-114
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,39	96,38	97,07	97,77	96,00

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih didalam unit pelayanan terpadu. Mulai Tahun 2018 sampai dengan 2022 semua kasus terlayani 100 % oleh pelayanan terpadu.

Tabel II-115
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	148	128	46	52	32

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	148	128	46	52	32
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2018-2022 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS dan Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS berbeda pada tiap tahunnya.

Tabel II-116

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS	Korban	16	12	10	3	15
Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS	Korban	148	128	46	150	186
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		10,81	9,38	21,74	2,00	8,06

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang disidangkan kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 148 perkara dan sebanyak 144 perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan sehingga persentase meningkat menjadi 97.30% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah perkara kekerasan yang disidangkan menurun (sebanyak 128 perkara) dan lebih banyak perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan (sebanyak 125 perkara) sehingga persentase meningkat menjadi 97.66. Sedangkan pada tahun 2020 - 2022 persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100% karena semua perkara yang disidangkan mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 1 perkara.

Tabel II-117

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	144	125	1	15	10
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	148	128	1	15	10
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		97,30	97,66	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023

C. Urusan Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Pangan utama berdasarkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah beras, berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator ketersediaan pangan utama, menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bulukumba masih surplus dengan kondisi pertahun rata-rata diatas 300 %. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama adalah keseimbangan antara tingkat produksi pangan dan jumlah penduduk, ini didasarkan pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sebesar 306,75 % dan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan 393,10 % dan pad tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 368,95%.Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-118
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan utama		381,58	393,10	389,13	368,95	100

Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein

Pada periode 2018-2022 rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi dan ketersediaan protein tiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan Covid 19 yang menyebabkan pasokan kebutuhan berkurang akan tetapi pada tahun 2022 meningkat signifikasi karena telah tidak diberlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein meningkat drastis.

Tabel II-119
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Energi	kkal/kap/hari	6.904,22	8.424,75	7.423,66	2.662,51	17.766,98
Ketersediaan Protein	gram/kap/hari	228,54	226,01	240,77	69,0	919,76

Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah komoditi yang dijadikan sampel pengawasan terhadap komoditi unggulan yang ditetapkan Kementerian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan sejak

terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan yaitu pada tahun 2017, kegiatan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan meningkat pada tahun 2022.Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-120
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		45,45	91	36	60	90

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

D. Urusan Pertanahan

1. Persentase luas lahan yang bersertifikat

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kepedulian dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah memfasilitasi program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap.

Tabel II-121
Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	m ²	256.978.093	270.937.227	278.530.635	297.190.635	297.222.607
Jumlah Luas Wilayah	m ²	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	22,26	23,47	24,12	25,74	25,74

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Penyelesaian kasus tanah negara

Persentase Penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami peningkatan sebesar 100 persen. namun pada tahun 2018 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami penurunan sebesar 40,00 persen, dan pada tahun 2019 Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun mengalami peningkatan sebesar 66,67 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,00 persen dan pada tahun 2021 mngalai peningkatan sebesar 75,00 persn . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-122
Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kasus	6	10	5	12	1
Jumlah Kasus yang terdaftar	Kasus	15	15	10	16	5
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	40,00	66,67	50,00	75,00	20,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2023

E. Urusan Lingkungan Hidup

1. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Pengukuran indeks kualitas air telah dilakukan / dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kondisi tercemar berat dengan indeks 1,19 tahun 2017 dan indeks 2,60 tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan kondisi baik (memenuhi baku mutu) dengan indeks 0,50 tahun 2019 serta 0,63 tahun 2020. Hasil ini tentu saja disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas air sungai cukup baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kualitas air sungai cukup baik yaitu sebesar 61,00 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 55,00.

Tabel II-123
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	%	2,60	81,90	78,23	61,00	55,00

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pengujian kualitas udara. Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

Tabel II-124
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	85,46	90,88	88,30	84,64	92,13

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 mencapai 23,64 persen. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 23,56 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 28,89 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-125
Hasil Pengukuran IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran IKTL	%	22,63	22,72	23,64	23,56	28,89

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

4. **Pembinaan dan Pengawasan**terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 95,93 persen dan pada tahun 2022 mencapai 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-126

**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	72,54	82,35	68,62	95,93	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

5. **Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA**

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA, sejak 2017 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Tabel II-127

**Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

6. **Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional**

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-128

**Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional

Terverifikasi hak kearifan lokal atauhak pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-129
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

8. Penetapan hak MHA

Penetapan hak MHA pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-130
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan hak MHA	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

9. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-131
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

10. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana

Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-132
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

11. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-133

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

12. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2017 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 9 Sekolah,Provinsi 1 Sekolah, Nasional 1 Sekolah 2018 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 13 sekolah ,Provinsi 8 Sekolah,Nasional 1 sekolah sedangkan 2019 hanya penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19 DAN DITAHUN 2021 sebanyak 2 sekolah

Tabel II-134

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-135

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

14. Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut, pada Tahun 2017 Jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 2.521,28 Ton dengan persenase 4,18 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton. Pada Tahun 2018 Jumlah timbulan Sampah yang tertangani sebesar 10.754,36 Ton dengan persentase 17,83 % dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada Tahun 2019 jumlah timbulan sampah tertangani sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Dan pada tahun 2022 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 26,03 persen.

Tabel II-136
Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan sampah yang ditangani	%	17,83	20,75	20,64	24,95	26,03

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

15. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut pada tahun 2017 Jumlah sampah yang tertangani sebesar 5.801,07 Ton dengan persenase 9,60 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton, pada tahun 2018 Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 28,329.11 Ton dengan persentase 46,96% dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada tahun 2019 jumlah sampah tertangani sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton.Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan serperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah.

Tabel II-137
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	46,96	80,07	73,56	86,63	73,13

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19 dan pada tahun 2022 Adipura keluar sebesar 74,00 persen.

Tabel II-138
TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	77,03	0	0	26,24	74,00

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

17. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3.Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No 81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

Tabel II-139
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)	Ton/ Kg	22,07	36,75	25,13	35	35,00

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

18. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-140
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

19. Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 29,86 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-141
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	%	22,63	22,72	23,64	29,86	29,86

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022

20. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhanpada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 25 Persen. Dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 32,36 persen .Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-142
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	25	25	25	32,36	32,36

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022

21. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tahun 2017 terdapat satu dokumen keaneka ragam hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-143
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satuidentitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yangtelah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwaorang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi diIndonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberidukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayananpublik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakatuntuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yangmasih menjadi kewenangan pemerintah

pusat sehingga ketersediaan blangkoKTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaanblangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri danpendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun ber KTP-el	Orang	318.331	317.864	317.477	326.380	357.885
Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Orang	318.331	317.864	317.497	326.701	326.701
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk		1,000	1,000	1,000	0,999	1,095

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Rasio bayi berakta kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiransangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya.Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudahtermasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namundalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadarandan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir. Terkait dengan bayi beraktekelahiran merupakan penduduk berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telahmemiliki akte kelahiran

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bayi berakte kelahiran	Orang	4.182	4.518	2.248	7.405	25.173
Jumlah bayi	Orang	6.258	6.370	5.649	8.174	26.504
Rasio bayi berakta kelahiran		0,668	0,709	0,398	0,906	0,950

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Rasio pasangan berakta nikah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkanbahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagimereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatandilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergamaKatolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannyadilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinansangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alatbukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakanpencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan aktakelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasanganberakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan bukunikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yangtelah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasidengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalamSIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslimsepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasilpelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnyaaterintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK)

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan nikah berakte nikah		3.100	11.885	11.885	177	179
Jumlah keseluruhan pasangan nikah		110.940	218.762	218.762	177	179
Rasio pasangan berakta nikah		0,028	0,054	0,054	1,000	1,000

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasilpendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sIstem informasiadministrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hakakses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses,menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipilmemberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yangtersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan melaluijaringan komunikasi data. Dalam implementasi pemanfaatan datakependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hakakses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hakakses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Penggunaskala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatandata Kependudukan.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Cakupan penerbitan KTP-el

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatansipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan penduduk. Akte kelahiran sangat penting peranannyauntuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayananterkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk denganadanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapahal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran danpemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjutnamun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan aktakelahiran penduduk 0-17 tahun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yangditerbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untukmenentukan persentase penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk 0-17tahun yang telah berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk 0-17tahun dikalikan 100 persen

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan		318.331	317.864	317.477	326.380	357.885
Jumlah penduduk wajib KTP		318.331	317.864	317.497	326.701	326.701
Cakupan penerbitan KTP-el	%	100,00	100,00	99,99	99,90	109,55

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Cakupan penerbitan akte kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan penduduk. Akte kelahiran sangat penting peranannyauntuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayananterkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk denganadanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapahal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran danpemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjutnamun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait

dengan penerbitan aktakelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran		4.182	199.647	2.248	7.405	138.243
Jumlah kelahiran		6.258	238.448	5.649	8.174	124.479
Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	66,83	83,73	39,79	90,59	111,06

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik

Jumlah Desa yang memiliki sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan positif ini dipengaruhi oleh beberapa hal pendukung diantaranya keseriusan pemerintah Desa dalam mengembangkan dan menata desanya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari ADD dan BDD serta tidak kalah pentingnya faktor pendukung yang sangat menentukan adalah pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terus memberikan pembinaan kepada seluruh aparat pemerintahan desa baik dari segi pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, perencanaan dan penganggaran di desa, penataan kelembagaan desa dan setiap tahunnya diadakan evaluasi perkembangan desa dan Lomba desa dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan desa. Pada tahun 2022 seluruh Desa dari 109 desa di kabupaten Bulukumba memiliki sarana dan prasana Kantor desa yang baik yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi masyarakat di desa dan jalannya pemerintahan di desa.

Tabel II-144

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik		66,97	67,89	68,81	73,39	73,39

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)

Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM) memiliki kontribusi dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, namun belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 109 desa yang ada dikabupaten Bulukumba, sehingga Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Pemerintah Desa agar desa yang belum optimal dan belum jalan lembaga pemberdayaannya agar kiranya di aktifkan kembali guna menunjang program pemerintah Desa.

Tabel II-145

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Kelompok Binaan PKK

Jumkah PKK yang ada dikabupaten Bulukumba dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdiri 146 kelompok yang terdiri dari 109 PKK ditingkat Desa, 27 kelompok PKK tingkat kelurahan dan 10 kelompok PKK di tingkat Kecamatan. Keberadaan PKK ditingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki peran yang sangat aktif, baik itu kegiatan yang ada didesa/Kelurahan, Kecamatan maupun kegiatan ditingkat Kabupaten. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam didesa/kelurahan maupun dikecamatan untuk dikelola semaksimal mungkin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat didesa terutama kalangan ibu rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai 2021 senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok Binaan PKK yang ada ditingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih aktif dan produktif mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan ibu ibu rumah tangga di Desa baik itu dalam hal sosialisasi terkait Pemanfaatan halaman rumah tangga yang produktif, manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Pencegahan Gizi buruk untuk anak balita serta kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam hal pembangunan ditingkat Desa/kelurahan.

Tabel II-146

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		146	146	146	146	146

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya 136 PKK dari Jumlah PKK di kabupaten Bulukumba atau setiap tahunnya mencapai target angka 100 %. Kegiatan PKK baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud peran aktif PKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kedepan dalam menunjang Kegiatan PKK ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dibutuhkan dukungan penganggaran yang cukup baik itu yang bersumber dari dana Desa dan APBD kabupaten, dalam hal sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kader dan pengurus PKK, kegiatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan penataan kelembagaan.

Tabel II-147

Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PKK aktif		100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2018 adalah (99,63%) 544 Posyandu dari jumlah Posyandu 546 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan dikabupaten Bulukumba, yang diklasifikasikan dalam empat tingkatan strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri, dan pada tahun 2015 samapai 2016 tingkatan posyandu di Bulukumba terdiri dari : Pratama 137 Posyandu, Madya 255 Posyandu, Purnama 151 Posyandu dan mandiri 3 Posyandu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk terus berusaha dalam peningkatan jumlah posyandu dan peningkatan strata posyandu setiap tahunnya, dan alhamdulillah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total jumlah Posyandu dikabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari sebelumnya 546 posyandu menjadi 577 Posyandu, ada penambahan 31 jumlah posyandu dan persentase posyandu aktif mencapai angka 100 %. Adapun klasifikasi tingkatan Posyandu di tahun 2019 sampai 2020 terdiri dari : Pratama 147 Posyandu, Madya 274 Posyandu, Purnama 153 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Untuk lebih meningkatkan strata posyandu diperlukan dukungan penganggaran dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kader posyandu yang ada ditingkat desa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, ini menjadi tugas dan target kinerja tahun berikutnya agar kiranya strata posyandu atau tingkatan posyandu strata mandiri dapat ditingkat jumlah posyandu yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-148
Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Posyandu aktif		99,63	99,63	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2018-2022 berjalan dengan baik dimana setiap tahunnya desa melakukan kegiatan baik itu sifatnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh potensi yang ada didesa tersebut dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian didesa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa, bahwa dana desa tersebut dikelola dan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut., Pengelolaan dana Desa diatur dalam beberapa peraturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa diantaranya : Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, PMK No.205/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perbub No.69 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Salah satu kegiatan peningkatan ekonomi di desa dengan dibentuknya Bumdes di 109 Desa dengan tujuan agar usaha ekonomi kecil menengah dan potensi unggulan didesa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui wadah Bumdes, namun kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, Perlunya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparat pemerintah desa serta pengelolah kegiatan termasuk didalamnya pengurus Bumdes, Perlunya penataan Kelembagaan di desa dengan baik agar menunjang program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melakukan bergabagai upaya pembinaan dan pendampingan termasuk didalamnya melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat didesa termasuk didalamnya pengelolah

Bumdes, namun kendala yang kami hadapi adalah kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan di 109 Desa di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-149
Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase LSM aktif		100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulukumba. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-150
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,63	0,54	0,57	1,04	0,63

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Selangkanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-151
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,309	2,320	2,318	2,309	2,130

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam membangun daerah melalui Kampung KB pada tahun 2018 - 2020 terbentuk 11 kampung KB dan 22 perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB namun pada tahun 2021-2022 jumlah perangkat daerah berkurang menjadi 27 Perangkat daerah yang sebelumnya 36 perangkat daerah sehingga mempengaruhi Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

Tabel II-152
Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	61,11	61,11	61,11	81,48	81,48

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk pada tahun 2021-2022 mengalami perubahan dikarenakan mengalami perubahan kelembagaan sehingga perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk berkurang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-153
Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk		15	15	15	3	3
Jumlah semua perangkat daerah		36	36	36	27	27
Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		41,67	41,67	41,67	11,11	11,11

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 masing-masing di tetapkan 1 dokumen adapun Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/386/DPPKB tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-154
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dok	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018-2022 ada enam organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data profil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-155
Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2. Bappelitbangda 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB,P3A

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2018-2022 ada tiga organisasi perangkat daerah yang melakukan pendidikan kependudukan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-156
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1.Disdikbud 2.IBI 3.Panti Asuhan Aisya	1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM	1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2018-2022 dengan adanya sosialisasi Kampung KB sehingga pengendalian penduduk untuk Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga mengalami penurunan pada tahun 2022. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-157
Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak		14.214	14.021	14.214	14.521	13.560
Jumlah keluarga		63.251	65.321	65.321	65.321	65.321
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga		22,47	21,46	21,76	22,23	20,76

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

9. Ratio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-158
Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Akseptor KB		7.453	8.574	9.619	6.170	9.619
Jumlah pasangan usia subur		68.984	70.501	71.429	61.163	71.429
Ratio Akseptor KB	%	10,80	12,16	13,47	10,09	13,47

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Bulukumba berfluktuatif.

Tabel II-159
Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta KB aktif		54.626	53.071	51.028	45.711	53.550
Jumlah pasangan usia subur		68.984	70.501	68.913	61.163	71.429
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	79,19	75,28	74,05	74,74	74,97

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

11. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Pada tabel berikutnya memperlihatkan terdapat kecenderungan bahwa suatu kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun tinggi, maka akan memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun rendah, maka akan memiliki kecenderungan prevalensi stunting yang juga rendah. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2018 nilai ASFR masih terlalu tinggi namun dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat diturunkan pada tahun 2022 menjadi 23,5.

Tabel II-160
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	89,79	89,79	67,18	23,5

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel II-161
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten
Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan usia subur dengan istri diumur kurang 20 th		2.898	3.018	3.020	3.057	2.912
Jumlah pasangan usia subur		68.984	70.501	71.429	68.913	61.163
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,20	4,28	4,23	4,44	4,76

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

13.Cakupan PUS Yang Ingin Ber- KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Bahwa selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasi PUS dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana. Berdasarkan persentase capaian unmet need pada tahun 2018 capaian sebesar 15,68 sampai pada tahun 2022 sebesar 11,62 persen belum ber KB selebihnya adalah hamil dan ingin anak segera, PUS yang hamil dan ingin anak segera secara normatif adalah bukanlah sasaran penyuluh agar mau Ber- KB sehingga PUS dalam kategori IKT dan IKD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB. Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik demografi sosial ekonomi, sikap dan kualitas pelayanan.

Tabel II-162
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten
Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani		11.057	11.057	8.387	8.342	7.110
Jumlah pasangan usia subur		70.501	70.501	71.429	68.913	61.163
Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	15,68	15,68	11,74	12,11	11,62

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

14.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang dapat lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun penyebab meningkatnya Persentase Punggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ber-KB dan menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menjarangkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran, juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yag terlalu dekat. Penyebab menurunnya persentase penggunaan MKJP yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP namun pada tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 18,51. disini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena pada bulan maret 2020 wabah Covid-19 melanda Indonesia sehingga pelayanan KB di seluruh Indonesia terbatas dan rata rata faskes tidak bisa melayani pemasangan Alokon MKJP akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami peningkatan sebesar yaitu 20,57 dan 20,77.

Tabel II-163
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP		1.984	2.164	9.408	10.496	6.641
Jumlah akseptor KB		4.077	6.484	50.836	51.028	31.981
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	48,66	33,37	18,51	20,57	20,77

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

15.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Tahun 2017 12,90%, Sedangkan persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 11,96 Penyebab menurunnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan persentase 35,05 dikarenakan Dropping Alokon dari BKKBN Pusat sudah stabil sehingga pemakaian kontrasepsi bisa meningkat.

Tabel II-164
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi		18.558	6.205	20.204	18.558	11.441
Jumlah akseptor KB		50.426	51.871	50.836	51.028	31.981
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	36,80	11,96	39,74	36,37	35,77

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

16.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2018 mencapai 52,32 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 80,95 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-165
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB		1.984	2.182	4.284	1.532	1.819
Jumlah anggota kelompok BKB		3.792	3.792	5.291	1.845	2.247
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	52,32	57,54	80,97	83,04	80,95

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

17.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB pada tahun 2018 mencapai 46,67 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 71,54 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-166
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB		1.235	1.475	2.488	2.488	2.488
Jumlah anggota kelompok BKL		2.646	2.646	3.478	3.478	3.478
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	46,67	55,74	71,54	71,54	71,54

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

18.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 23.11 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 75.31 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-167
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB		951	1.031	2.283	579	922
Jumlah anggota kelompok BKL		2.186	2.186	3.176	803	1.279
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber-KB	%	43,50	47,16	71,88	72,10	72,09

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

19.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) berjumlah 1 unit di Kabupaten Bulukumba sehingga capaian pada tahun 2018-2022 mencapai 10 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-168
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

20.Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-169
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PIK R/M		36	36	43	43	25
Jumlah kecamatan		10	10	10	10	10
Cakupan Remaja dalam PIK R/M	%	3,6	3,6	4,3	4,3	2,5

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

21.Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah terpenuhi berdasarkan Jumlah PKB/PLKB yaitu 74 unit dan semuanya didayagunakan.

Tabel II-170

Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

22.Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 19,35 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,00 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-171

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri	%	19,35	15,79	15,00	27,00	26,00

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

23.Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022 telah terpenuhi dikarenakan sudah ada Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD di Setiap Desa maupun kelurahan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-172

Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

24.Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2018-2022 sudah terpenuhi.Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-173

Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi
Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

25.Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengn BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan pada tahun 2018 mencapai 23,56 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 86,91 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-174

Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS		45	45	45	45	166
Jumlah Faskes dan jejaring		191	191	191	191	191
Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) yg Bekerja Sama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR yg Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	23,56	23,56	23,56	23,56	86,91

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

26.Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa

Penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa pada tahun 2018-2022 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-175

Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

27.Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2018-2022 yaitu 0 persen ini dikarenakan belum adanya laporan maupun kasus tentang Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-176
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

28.Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2018 mencapai 89,16 persen dan pada tahun 2022 terpenuhi menjadi 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut

Tabel II-177
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	89,16	89,16	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2023

29.Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun. selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-178
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	51,08	53,44	20,16	100,00	83,90

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2023

30.Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2018-2022 berkisaran diumur 22 tahun ke atas. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-179
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,00	22,14	22,00	22,00	22,00

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

31.Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Pada tahun 2017 0,0057 persen namun pada tahun 2018 capaian indikator

mengalami penurunan menjadi 0 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,0057 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0 persen, dan pada tahun 2021 sebesar Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-180
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0	0,0057	0	0,618	0,01

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023

I. Urusan Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan diakibatkan karena beberapa angkutan yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak apalagi di pengaruhi adanya angkutan seperti TAXI, Kurir dan sudah banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel II-181
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	23.500	20.500	14.500	17.500	9.125

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 3 unit di antanranya jumlah pelabuhan sebanyak 2 unit yaitu pelabuhan Leppe dan Pelabuhan Bira 1 Terminal Bulukumba.

Tabel II-182
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat tahun 2018 -2022 mengalami peningkatan fluktuasi diakibatkan kurangnya layanan sehingga kendaraan angkutan tidak beroperasi, peningkatan jumlah penumpang angkutan yang singnifikan terjadi pada tahun 2022 karena telah berakhir pandemi Covid-19 atau sudah tidak terlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tabel II-183
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkutan Darat	Unit	432	332	172	51	44.571
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Unit	23.500	20.500	14.500	14.448	3.865.350
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,84	1,62	1,19	0,35	1,15

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan posifif pada tiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 Pengujian Kendaraan tidak beroperasi dikarenakan Peralatan untuk uji KIR Kendaraan mengalami kerusakan

Tabel II-184
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah angkuatan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	874	2.003	6.734	0	4.3979
Jumlah angkutan umum	Unit	5.912	6.329	7.758	0	4.4571
Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	14,78	31,65	86,80	0,00	98,67

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

5. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan Rambu-rambu pada tahun 2018-2020 dilaksanakan pada tiap tahunnya namun untuk tahun 2021-2022 tidak laksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran setelah melewati masa Covid-19.

Tabel II-185
Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemasangan Rambu-rambu		3	3	17	0	0
Jumlah rambu -rambu yang seharusnya tersedia		5	3	35	0	0
Pemasangan Rambu-Rambu		60,00	100,00	48,57	0,00	0,00

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

6. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Peningkatan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan dikarenakan pada tahun 2018-2021 diukur/dihitung berdasarkan jumlah orang yang terangkut namun pada tahun 2022 diakumulasikan berdasarkan orang dan barang, untuk barang sejumlah 3.865.350 unit dan orang 129.575 jiwa.

Hal lain yang mendasari Ini Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum berbeda pada tiap tahunnya dikarenakan masyarakat dalam mengangkut orang/barang sudan menggunakan kendaraan pribadinya.

Tabel II-186
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	23.500	20.500	14.500	12.000	3.994.925

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

7. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 Rasio ijin trayek sebesar 0.002 Persen. Sampai pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 0.001 Persen. Ini diakibatkan karena jumlah ijin trayek karena semakin banyaknya angkutan yang beroperasi pada tahun 2020.

Tabel II-187

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio ijin trayek	%	0.001	0.008	0.005	0,001	0,0005

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi yang tersurvei dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu 60 % dan seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bulukumba dan untuk tahun berikutnya tidak dilakukan survei dikarenakan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-188

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	20211	2022
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	Tidak dilakukan survei	60	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan komunikasi dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami dengan pencapaian stagnan namun tidak dihitung pada tahun 2022 karena keterbatasan anggaran. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-189

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Telekomunikasi		1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58	n/a

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sedangkan pada

tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-190
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	82	82	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet. Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-191
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi rumah tangga dengan akses internet		39	0	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survei karena adanya covid19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-192
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi		0	60	Tdk dilakukan survei	Tdk dilakukan survei	Tdk dilakukan survei

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2018-2022 mencapai target. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-193
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023

K. Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2022 secara umum mengalami berfluktuasi ini disebabkan oleh pembinaan, pendampingan serta penyuluhan yang dilakukan serta kesadaran dari para pengurus dan anggota koperasi itu sendiri, dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-194
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi aktif		203	201	202	201	200
Jumlah Keseluruhan koperasi		284	286	286	286	295
Persentase koperasi aktif	%	71,48	70,28	70,63	70,28	67,80

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Perkembangan Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2018-2022 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM di Kabupaten Bulukumba cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-195
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah usaha mikro dan kecil		37.720	38.120	76.816	76.906	76.927
Jumlah seluruh UKM		39.262	39.662	78.392	78.482	78.503
Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	96,07	96,11	97,99	97,99	97,99

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2023

L. Urusan Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN pada tahun 2018-2022 mengalami perubahan pada tiap tahunnya namun pada tahun 2023 investor yang masuk berjumlah 35 Investor dikarenakan diperlukannya untuk pemulihan ekonomi setelah pasca pandemi Covid-19. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-196
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	51	51	58	117	35

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023

2. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN

Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN pada tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-197

Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN	Rp (juta)	599.891	50.200	1.225.838	244.255	54.322

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023

3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)pada tahun 2017 sebesar 99 persen, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 635 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -92 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.342 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -79 dan turun pada tahun 2022 menjadi -79,55 persen dikarenakan kurang investor asing yang masuk. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-198

Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	635	-92	243	-79	-79,55

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi berikut.

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja persentasi organisasi pemuda yang aktif diperoleh dengan membagi jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar. Organisasi pemuda yang aktif ini berdasarkan laporan dari komite nasional pemuda Indonesia dan organisasi pemuda lainnya yang mendapatkan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga. Dari data di bawah dapat di lihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah

Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-199
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi pemuda yg aktif		46	47	48	49	50
Jumlah seluruh organisasi pemuda		56	56	56	56	56
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	82,14	83,93	85,71	87,50	89,29

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Persentasi Wirausaha Muda Pemula

Kabupaten Bulukumba berdasarkan data Persentasi Wirausaha Muda Pemula pada tahun 2018 mencapai 2,29 persen dan pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yakni 2,59 persen dengan kondisi stagnan dengan jumlah wirausaha muda mencapai 259 orang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni 229 orang.

Tabel II-200
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase wirausaha muda	%	2,29	2,59	2,59	2,59	2,59

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 250%. Adapun cabang olahraga di maksud adalah atletik, taekwondo, pencak silat, bola volley, billiard dan karate. Jumlah cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun sama dari pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya even besar yang diselenggarakan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga mengalami kenaikan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, sepak takraw, billiard, bola volley, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan basket. Pada tahun 2020 jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga naik 2 kali lipat dari tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan pekan olahraga daerah (PORDA) yang dilaksanakan di kabupaten pinrang. Pada ajang 4 tahunan ini, kabupaten Bulukumba berhasil meloloskan 12 cabang olahraga yang selanjutnya dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Jumlah ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi defisit anggaran pada pemerintah kabupaten Bulukumba sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini

tentunya berdampak pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan cabang-cabang olahraga sedangkan pada tahun anggaran 2021, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran.

Tabel II-201
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah cabang olahraga yang dibina		12	6	2	18	24
Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar		24	24	24	24	28
Cakupan Pembinaan Olahraga		50,00	25,00	8,33	75,00	85,71

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar pada tahun 2018 jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 12 orang atau 20,69% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Penambahan ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, dinas pemuda dan olahraga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan wasit/pelatih olahraga berlisensi untuk 5 orang. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang. jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya *pandemic covid 19* yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya *pandemic covid 19* juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 29,31%

Tabel II-202
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelatih bersertifikat		12	15	15	17	17
Jumlah seluruh pelatih		58	58	58	58	58
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		20,69	25,86	25,86	29,31	29,31

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Cakupan Pembinaan Atlet Usia Dini

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *tallent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic covid 19 menyebabkan harus dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II-203
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet pelajar yang dibina		40	60	85	100	123
Jumlah seluruh atlet pelajar		167	167	167	167	167
Cakupan pembinaan atlet muda		23,95	35,93	50,90	59,88	73,65

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2017, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 13 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu. Dari 13 medali tersebut di peroleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan mencapai 100% dari target.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 26 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Dari 26 medali tersebut di peroleh pada 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan medali ini pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 173% dari target.

Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Perolehan medali ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2019 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 206% dari target. Hal ini tidak lepas dari fokus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Pada tahun 2020 dinas pemuda dan olahraga ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan hanya mencapai 23,07% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya, selain itu adanya pandemi covid 19 juga menyebabkan dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 medali dari 11 orang atlet.

Tabel II-204
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun

		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet berprestasi	%	26	31	3	11	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2018, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Peningkatan ini terjadi tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik.dan di tahun 2021 sebanyak 3 prestasi Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaannya dan pada tahun 2022 terdapat 2 prestasi yang diraih.

Tabel II-205
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah prestasi olahraga	%	6	5	1	3	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

N. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bulukumba dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bulukumba Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya..

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "kabupaten dalam angka". Buku "kabupaten dalam angka" dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia buku Kabupaten dalam Angka. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-206
Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Buku "PDRB"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "PDRB". Buku "PDRB" dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia Buku "PDRB". Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-207
Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

O. Urusan Persandian

Kabupaten Bulukumba telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2018-2022 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sudah mencapai 100 persen karena semua sistem komunikasi sudah berbasis digital.

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

P. Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2017 sebanyak 3 festival seni kebudayaan yang dilaksanakan dan tahun 2019 meningkat menjadi 5 jenis festival seni dan budaya yang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah: Festival Pinisi, Songkabala Bantilang, Gowes Hutan Karet, Jelajah Hutan Karet , dan Andingingi. Pada tahun 2021 menurun menjadi 1 kegiatan festival seni budaya yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 begitupun pada tahun 2022 festival yang diselenggarakan yakni Festival Phinisi. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-208
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Buah	3	5	1	1	1

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pendataan sistem informasi sejarah purbakala Kabupaten Bulukumba dan di data banyak sekali situs sejarah dan purbakala yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah pendataan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2018 sebanyak 50 benda situs cagar budaya yang dilestarikan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 58 cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel II-209
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar	50	57	58	58	58

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mulai tahun 2018-2022 sebanyak 2 jumlah cagar budaya yang dikelola yaitu Cagar Budaya Pasanggrahan Tanete di Kecamatan Bulukumpa dan Kompleks Makam Dato Tiro Di Kecamatan Bontotiro.

Tabel II-210
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu		2	2	2	2	2

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

Q. **Urusan Perpustakaan**

1. **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya dikarenakan Jumlah orang dalam populasi yang dilayani dengan yang berkunjung bervariasi, namun pada tahun 2020 menurun drastis dikarenakan dimulainya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kekhawatir untuk berkunjung ke Perpustakaan.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Tabel II-211
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		82,78	80,54	9,55	1,11	6,34

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. **Jumlah Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah dibagi dengan jumlah eksemplar buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Pada tahun 2018 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.503 judul dan 19.810 eksamplar atau 42,92%. Terdapat penambahan buku sebanyak 451 judul dan 2.292 eksamplar. Jumlah pengadaan buku mengalami penurunan sebesar 3.04% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.628 judul dan 20.150 eksamplar atau 42,82%. Terdapat penambahan buku sebanyak 125 judul dan 340 eksemplar. Jumlah pengadaan buku turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 10.684 judul dan 24.828 eksemplar atau 3.03%. Penambahan buku sebanyak 2.056 judul dan 4.678 eksemplar. Jumlah pengadaan buku meningkat sebanyak 0,21 % dari tahun sebelumnya.dan pada tahun 2021 jumlah buku yang tersedia sebanyak 42,96% dan pada tahun 2022 meningkat yakni 71,54 persen.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penambahan jumlah buku adalah Kondisi keuangan daerah /minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan

buku setiap tahunnya sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan.

Tabel II-212
Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku		8.503	8.628	10.684	10.727	15.933
Jumlah koleksi jumlah buku		19.810	20.150	24.828	24.969	22.272
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		42,92	42,82	43,03	42,96	71,54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah perpustakaan pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan terus bertambah hingga pada tahun 2022 sudah sebanyak 707 Unit.

Kendala yang dialami dalam penambahan jumlah perpustakaan adalah masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang belum membentuk perpustakaan umum di tengah tengah masyarakat.

Tabel II-213
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,72	0,71	0,95	1,07	1,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pelayanan akibat Covid-19. Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
- c. Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-214
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	290.784	294.447	35.925	3.107	27.884

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah judul koleksi judul buku perpustakaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal yang menjadi kendala adalah daya tampung gedung perpustakaan yang

terbatas untuk menampung buku dan sarana pendukung lainnya, sehingga buku yang ada kami layankan dalam bentuk layanan *book loan* (Peminjaman buku) ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Tabel II-215
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	8.503	8.628	10.684	10.727	15.933

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah: Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pustkawan di Kabupaten Bulukumba. Faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan , sehingga diharapkan tahun tahun selanjutnya alokasi anggaran pembinaan SDM dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan diklat dan pembinaan kepustakawanan.

Tabel II-216
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat		302	302	302	302	335
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai		629	629	629	629	629
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48,01	48,01	48,01	48,01	53,26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

R. Urusan Kearsipan

1. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dari tahun 2018-2022 sudah mencapai target dikarenakan Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina sudah sesuai dengan Jumlah pengelola arsip di Daerah.

Tabel II-217
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku untuk tahun 2022 adalah sebesar 5,56 persen atau 2 perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansipemerintah untuk

kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Atas dorongan inilah maka seluruh arsiparis yang diberikan tanggungjawab dalam pembinaan pengelolaan arsip terus menindaklanjuti agar tata kelola arsip di Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik dari tahun ketahun. Namun faktor penghambat pencapaian target adalah jumlah arsip yang harus dikelola atau diberikan pembinaan terikat oleh regulasi dalam pelaksanaan pembinaan.

Tabel II-218
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku		3	1	1	3	2
Jumlah Perangkat Daerah		46	46	46	36	36
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	6,52	2,17	2,17	8,33	5,56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu Pariwisata, Pertanian, Perdagangan. Perindustrian, serta Kelautan dan Perikanan.

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan secara umum mengalami fluktuasi Jumlah Produksi Ikan dalam produksi perikanan, ini dapat dilihat pada data capaian pada tahun 2018 sebanyak jumlah 239.380 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 222.951 ton. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang sering terjadi ditahun 2022. selengkapnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel II-219
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Ikan	ton	239.380	235.999	252.416	282.727	222.951
Perikanan tangkap	ton	53.456	52.652	53.860	53.830	54.911
Perikanan Budidaya	ton	185.924	183.345	198.556	228.897	168.040
Target Daerah	ton	180.842	189.062	197.282	238.359	240.743
Cakupan Produksi perikanan		132,37	124,83	127,95	118,61	92,61

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Cakupan Bina Kelompok Tani Mengalami Penurunan Sebesar

Kategori kelompok yang dibina adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan Bulukumba, bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya berupa bantuan fisik namun juga berupa bantuan non fisik seperti penyelenggaraan pelatihan teknis perikanan seperti Penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

Kesulitan dalam meningkatkan persentase binaan kelompok adalah semakin meningkatnya jumlah kelompok tiap tahun sehingga meskipun bantuan yang diberikan ke kelompok masyarakat juga bertambah namun laju penanmbahan jumlah kelompok perikanan juga cukup besar.Oleh karena itu, terjadi fluktuasi bahkan cenderung penurunan persentasi cakupan binaan kelompok karena anggaran Dinas dari tahun ke tahun semakin menurun yang berdampak pada semakin kurangnya bantuan yang diserahkan ke kelompok masyarakat sementara jumlah kelompok juga semakin meningkat.

Tabel II-220
Cakupan Bina Kelompok Tani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kelompok yang mendapat bantuan		376	458	539	620	702
Jumlah Kelompok		662	687	776	958	958
Cakupan Bina Kelompok Perikanan		56,80	66,67	69,46	64,72	73,28

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2023

B. Urusan Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2021. Total Angka kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 203.770 Orang Sedangkan Pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan sebanyak 266.296 sampai 366.176 Orang.

Tabel II-221
Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan wisata	Orang	266.296	280.590	301.507	366.176	373.095

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Lama Kunjungan Wisata

Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tetap yaitu 2-4 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur Panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di Kawasan wisata.

Tabel II-222
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

3. PAD sektor pariwisata

Tabel II-223
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PAD sektor pariwisata	Milyar	3,07	3,27	3,75	5,96	5,37

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023

C. **Urusan Pertanian**

1. **Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB**

Berdasarkan tabel diatas terlihat, terjadi penurunan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba secara terus menerus dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain; 1) semakin berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian khususnya subsektor tanaman pangan karena meningkatnya penggunaan alsintan, 2) semakin menurunnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani, 3) semakin berkembangnya sektor jasa lainnya, 4) terjadinya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menggagalkan panen serta, 5) kurangnya dana stimulan bagi petani misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel II-224
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	%	28.72	26.62	26.31	26.31	25,48*

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023

2. **Cakupan bina kelompok tani**

Capaian Bina Kelompok Tani selama tahun 2018 yaitu 61,20 persen dan pada tahun 2022 menjadi 53,35 persen dengan Jumlah Kelompok Tani memperoleh bantuan 1.496 kelompok sedangkan Jumlah keseluruhan kelompok Tani yakni 2.804 kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-225
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok tani	%	61,20	53,73	71,18	36,66	53,35

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023

Untuk komoditi peternakan, salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan jumlah populasi pada Ayam Ras Pedaging mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan untuk komoditas Sapi Potong dan Ayam Ras Petelur mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya. Untuk perkembangan populasi dari tiga jenis komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-226
Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	Ekor	75.993	76.434	76.797	77.658	71.801
Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.381.401	2.550.438	2.309.930	3.694.020	4.384.830
Ayam Ras Petelur	Ekor	452.158	463.793	638.724	1.176.858	839.001

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023

D. **Urusan Kehutanan**

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol

proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik

jumlah rumah tangga pengguna listrik tahun 2018-2022 pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PT. PLN Cabang Bulukumba. Melalui program tersebut terdapat KK yang berada di beberapa kecamatan, dan beberapa desa terpencil/pelosok desa seperti Desa Pattiroang, Kacibo, Parampakku, Bonto Nangka, Kampung Baru, Tokombeng, yang selama ini belum menikmati listrik sekarang ini sudah dapat menikmatinya. Selanjutnya di tahun 2020 ini Kabupaten Bulukumba masuk dalam 5 kabupaten yang mendapatkan program LISA (Listrik Desa) oleh PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselbar.

Tabel II-227
Jumlah Pelanggan listrik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggan listrik		108.402	113.994	119.221	125.204	129.572

Sumber : BPS & PLN Kabupaten Bulukumba, 2023

F. Urusan Perdagangan

1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2020 jumlah kelompok yang menerima bantuan Coolbox 0,85 persen dan jumlah kelompok yang menerima bantuan Tenda 0,51 Persen sehingga diperoleh capaian sebesar 0,68 persen dan pada tahun 2021 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan . Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-228
Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	0,68	0	0,72

Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Jumlah Pasar

Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-229
Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat
Kabupaten Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Tipe	Alamat
	UJUNG BULU		
1	Pasar Sentral	A	Caile
2	Pasar Kasuara	C	Tanah Kongkong
3	Pasar Cekkeng	B	Terang-terang
	GANTARANG		
1	Pasar Kalimassang	C	Mariorennu
2	Pasar Ponre	B	Matteko
3	Pasar Gunung Jati	B	Bontomacinna
4	Pasar Mannaungi	C	Gantarang
5	Pasar Dampang	C	Dampang
6	Pasar Bonto Nyeleng	C	Bonto Nyeleng
7	Pasar Borong Tellu	C	Bukit Tinggi
8	Pasar Bangkeng Buki	C	Bengkeng Buki
	KINDANG		
1	Pasar Borong Rappoa	B	Borong Rappoa
2	Pasar Pa'Baeng-Baeng	C	Anrihua
3	Pasar Cilibbo	C	Cilibbo
4	Pasar Tapolloe	C	Benteng Palioi
	UJUNG LOE		
1	Pasar Dannuang	B	Dannuang
2	Pasar Ulu Tedong	B	Gantarang
3	Pasar Allu/Tamatto	C	Tammatto
4	Pasar Seppang	C	Seppang
	HERLANG		
1	Pasar Batu Asang	B	Singa
2	Pasar Gunturu	C	Gunturu
3	Pasar Tanuntung	C	Tanuntung
4	Pasar Kupang	C	Kupang
	KAJANG		
1	Pasar Kassi	C	Kassi
2	Pasar Kalimporo	B	Kalimporo
3	Pasar Maleleng	C	Maleleng
	RILAU ALE		
1	Pasar Bontomanai	B	Bontomanai
2	Pasar Palampang	B	Palampang
3	Pasar Balimbing	C	Bonto Mate'ne
4	Pasar Swatani	C	Swatani
5	Pasar Sampeang	B	Desa Bonto Haru
	BULUKUMPA		
1	Pasar Tanete	B	Tanete
2	Pasar Balang Riri	C	Bajiminasa
3	Pasar Dinding	D	Jojjolo
4	Pasar Salassae	C	Salasae
	BONTO BAHARI		

No	Uraian	Tipe	Alamat
1	Pasar Tanah Beru	B	Sapolohe
2	Pasar Ara	C	Ara
3	Pasar Bira	C	Bira
	BONTO TIRO		
1	Pasar Batang	C	Batang
2	Pasar Hila-Hila	C	Ekatiro
3	Pasar Bonto Tangnga	B	Bonto Tangga
4	Pasar Basokeng	C	Dwitiro
5	Pasar Tamalanrea	B	Tamalanrea

Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023

G. Urusan Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan produktivitas sektor industri di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 sampai 2018cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0 persen dimana tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14 persen dahn ditahun 2021 sebsar 0,10 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-230
Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0	0,14	0,14	0,10	0,17

Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

A. Urusan Perencanaan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

Tabel II-231
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dan pada periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tabel II-232

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

Dengan berbedanya tahun perencanaan di Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Namun karna Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaiantarget ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dalam penyusunan dokumen RKPd Kabupaten Bulukumba dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien.

Tabel II-233

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

Tabel II-234
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2018-2022, konsistensi jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-235
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		117,31	114,62	105,38	120,38	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2018-2022, jumlah program RKPD dan jumlah program APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-236
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Tabel II-237
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

B. Urusan Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada kondisi awal tahun 2017 yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material , posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2021 dan 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel II-238

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-239

Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,32	1,86	3,83	4,23	6,77

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2018-2022
Persentase program/kegiatan yang masuk dalam APBD terlaksana 100 persen.

Tabel II-240

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN.

Tabel II-241

Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,69	30,54	32,00	21,10	18,44

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji.

Tabel II-242

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,59	19,31	18,84	22,10	18,44

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

6. Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

Adapun APBD yang telah di Perdakan pada tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

- Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018
- Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Perda APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020
- Perda APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2021
- Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 31 Desember 2022

Tabel II-243
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

7. Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tabel II-244
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa		0,11	0,32	0,23	0,22	0,54

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023

8. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan Kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 9.65 persen dikarenakan turunnya penerimaan BLUD, adanya salah satu potensi pajak yakni pajak Galian C yang tidak dapat dipungut lagi di Daerah, penerimaan Pajak bumi dan bangunan yang mengalami penurunan karena adanya beberapa obyek pajak yang dobel dan tidak diketahui keberadaannya serta retribusi pelayanan parkir karena tidak dipungutnya parkir pada pasar-pasar kecamatan. Periode 2018-2019 kembali mengalami kenaikan yang dapat memberikan kontribusi sebesar 11.63%. Pada Tahun ini semua kelompok pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun pada tahun 2018. Ini disebabkan karena telah digunakannya alat transaksi pajak (M-Pos) pada beberapa hotel, restoran dan rumah makan walaupun tidak semua pelaku usaha dapat dipasang. Sektor pariwisata juga mengalami kenaikan retribusi tempat rekreasi karena meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami Penurunan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 11.39 persen. Ini karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada maret 2020-2021. Tahun 2020-2022 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya aturan pemerintah pembatasan skala besar dimana semua orang dilarang bepergian dan berkerumum yang berdampak pada penutupan beberapa tempat rekreasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel yang berdampak pula pada penerimaan para pengusaha restoran dan rumah makan sehingga tidak mampu membayar pajak sesuai yang ditetapkan. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD

Tabel II-245
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	9,65	11,63	11,39	11,19	11,95

Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2022

C. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi berserta indikator pendukung lainnya. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih dari tiga bulan dan pemenuhan 20 jam pelajaran yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70 yang ditindak lanjuti dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 ayat A tentang Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan pejabat struktural (PKA,PKP,PKN) dan Juga pelatihan Dasar CPNS/Pelatihan Prajabatan CPNS yang dianggarkan oleh BKPSDM/difasilitasi oleh BKPSDM Kab Bulukumba. Pelatihan Fungsional yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak menjadi bagian dari kegiatan BKPSDM. Pada tahun 2018 – 2022 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan sebanyak 3 bulan.

Tabel II-246
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2022 mencapai 74,53 persen dari Jumlah total ASN yang ada pada Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-247
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	38,71	100	96,77	74,19	74,53

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2022 mencapai 37,73 jumlah total jabatan.

Tabel II-248
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	50,59	55,81	47,06	14,71	37,73

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2021 sebanyak 40 jabatan yang terdiri atas sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kasatpol PP dan Damkar, 6 (enam) Kepala Badan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Dinas namun pada tahun 2022 berubah menjadi 32 Jabatan dikarenakan terjadi perubahan kelembangan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Dalam Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan belum memenuhi empat elemen sistem MERIT yang terdiri dari Transparansi, Netralitas, Kemampuan Individu dan non Diskriminasi dengan menyeluruh. Namun dalam aspek transparansi terdapat salah satu alat ukur yang sudah terpenuhi oleh seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan disetiap Instansi yaitu menerbitkan Informasi tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dalam aspek non diskriminasi terdapat alat ukur yang sudah terpenuhi dalam seleksi jabatan tinggi pratama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan kemampuan individu melalui tes cat dan wawancara oleh panitia seleksi.

Tabel II-249
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	40	40	40	40	32

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023

5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 538 jabatan, penurunan ini terjadi dikarenakan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) telah resmi dialihkan ke jabatan fungsional.

Tabel II-250
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.613	2.425	2.297	2.093	538

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

D. Urusan Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator kinerja pertama untuk bidang urusan pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 tinjak lanjut temuan mulai berkurang sebesar 56,60 persen dari tahun sebelumnya.

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut antara lain disebabkan oleh komitmen dan penerapan tata kelola tindak lanjut yang rendah. OPD sebagai auditan banyak yang tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas. Selain itu mekanisme *reward and punishment* terhadap OPD yang cepat dan yang lambat menindaklanjuti temuan belum dilakukan. Secara umum persentase tindak lanjut temuan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel II-251
Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

Persentase tindak lanjut temuan	%	61.9	54.2	59.5	56,60	68,4

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dan dikalikan dengan 100%. Dalam rentang waktu lima tahun sejak tahun 2018 – 2022, jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami fluktuasi diana pada tahun 2017 ampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,106 menjadi 3,15 persen dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penuruna sebesar 0,273 hingg 0,13

Tabel II-252

Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pelanggaran Pegawai	%	0.26	0.315	0.273	0,13	0,246

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Jumlah Temuan BPK

Pada 2017 hingga pada Tahun 2020 terus mengalami penurunan. Di Tahun 2021 ada 14 temuan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Trend penurunan jumlah temuan BPK ini tentu saja suatu hal yang harus terus dipertahankan melalui sinergitas yang terjaga dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun trend penurunan jumlah temuan BPK sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II-253

Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah temuan BPK	Temuan	17	10	9	14	7

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023

E. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator. Untuk Indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan pada tahun 2018 jumlah kajian yang direncanakan mencapai 58.33% (Dari 24 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), pada tahun 2019, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 48.28% (Dari 29 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), dan pada tahun 2020, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 6.06% (Dari 33 kajian yang direncanakan terealisasi 2 kajian) dan pada tahun 2021 jumlah kajian mencapai sebesar 85,71 persen dan pada tahun 2022 dari 5 kajian yang direncanakan terealisasi 3 kajian.

Berdasarkan realisasi jumlah kajian setiap tahun dari tahun 2017-2017 berfluktuasi tergantung besarnya pagu anggaran. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-254

Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	58,33	48,28	6,06	85,71	60,00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2018, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 16.67% (Dari 24 kajian

yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2019, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 24.14% (Dari 29 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 7 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 7 kajian sedangkan pada tahun 2020, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 12.12% (Dari 33 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian) dan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai sebesar 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-255
Persentase pemanfaatan hasil KelitbanganKabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan		16.67	24.14	12.12	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah
Pada tahun 2018, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 42.85% (Dari 14 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi), pada tahun 2019, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 62.5% (Dari 16 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 10 SKPD terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 11.11% (Dari 18 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 2 SKPD terealisasi). Dan ditahun 2021 jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 70,00 persen dan pada tahun 2022 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mencapai 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-256
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		42.85	62.5	11.11	70.00	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah:
Pada tahun 2018, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 66.67% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada tahun 2019, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 83.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 25 kajian yang terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi) dan pada tahun 2021 julah kajian inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33,33 persen dan pada tahun 2022 Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah sudah mencapai 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-257
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		66.67	83.33	33.33	33,33	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023

F. Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator Sekretariat Dewan pada unsur penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bulukumba.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD untuk tahun 2017 sampai 2021 oleh sekretariat DPRD secara administrasi tidak di disusun dalam bentuk surat keputusan nanti setelah 2018 sejak berlakunya PP 12 tahun 2018 sekretariat DPRD mulai menyusun rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk surat keputusan. Untuk capaian 2018-2022 sudah tersedia/ada Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.

Tabel II-258
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 12 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, juga undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tiga fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Legislasi
- 2) Fungsi Anggaran
- 3) Fungsi Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 dan dipertegas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD. Yang meliputi penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

Tabel II-259

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023

3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas-tugas DPRD, Maka Sekretariat DPRD menyusun indikator kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan Visi yang di emban, Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II-260

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023

G. Sekretariat Daerah

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Bulukumba beragama Islam. Menurut catatan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 terdapat 270 protestan, 232 katolik, 9 Hindu dan 52 penganut budha di Bulukumba. Jumlah tempat peribadatan yaitu total 977 Masjid, 133 Mushola , dan 1 gereja.

Tabel II-261

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja)	Unit	1.118	1.118	1.118	1.280	1.154

Jumlah Penduduk	Jiwa	418.326	420.603	437.607	440.090	443.292
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,67	2,66	2,55	2,91	2,60

Sumber: Sekretariat Daerah, Kemenang, BPS Kabupaten Bulukumba, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

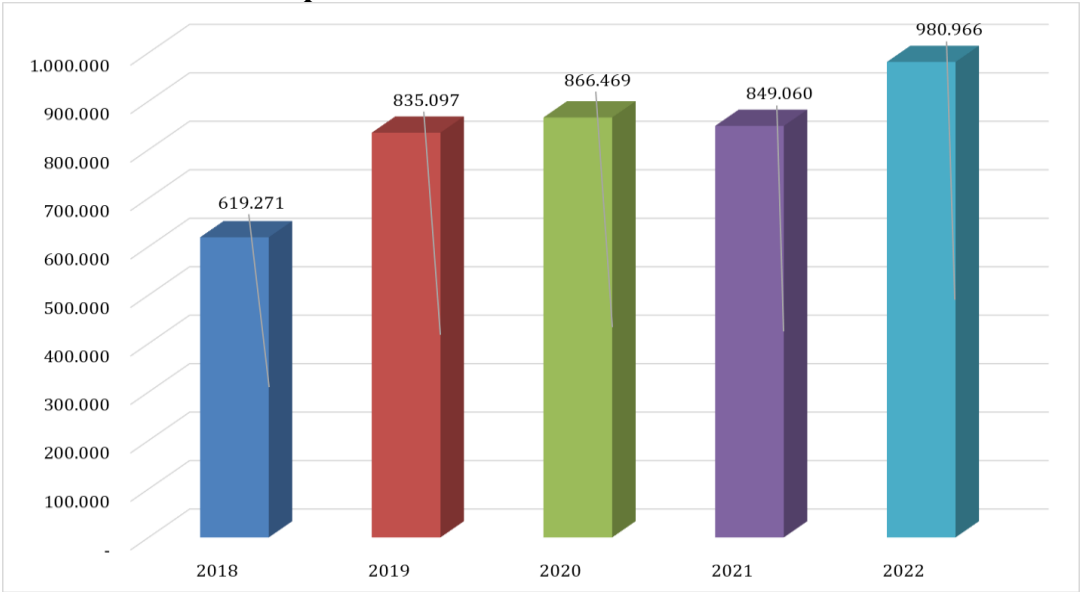
Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mengalami tren fluktuasi di Kabupaten Bulukumba pada 2018-2022, pada tahun 2018 mencapai rata-rata 619.271 Rupiah/Bulan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi rata-rata 980.966 Rupiah/Bulan. sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik II-25
Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

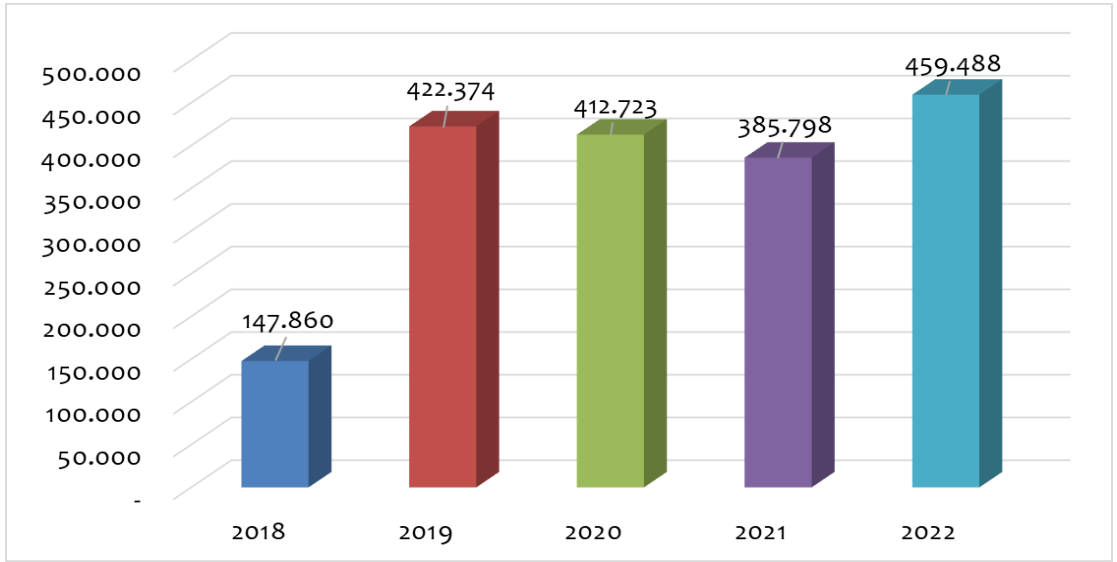


Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Konsumsi non pangan Bulukumba Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurut kelompok makanan sebesar 521.478 rupiah dan non makanan sebesar 459.488 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pangan semakin menjadi bukan konsumsi utama masyarakat sebagaimana gambar dibawah ini

Grafik II-26
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Bulukumba 2018 – 2022



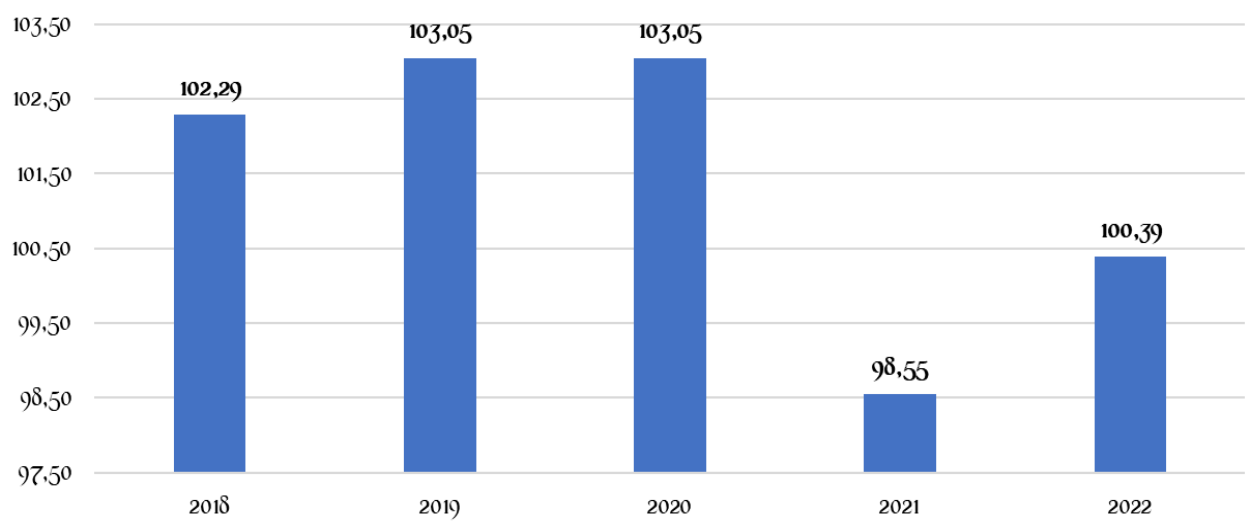
Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

3) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor petanian. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat pendapatan petani dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha tani. Angka 100 merupakan tingkat impas antara pendapatan dan pengeluaran.

Sementara itu, untuk Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2021 tingkat kemampuan/daya beli petani menurun menjadi 98,55 persen diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dikarenakan terjadinya pembatasan transaksi berskala besar namun pada tahun 2022 meningkat kembali atau sudah berada di atas 100 yang menandakan bahwa yang diterima oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibayarkan.

Tabel II-262
Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022



Sumber Data : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4 2019-2022

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bulukumba menargetkan sebanyak 65% ruang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruang. dan realisasinya sudah sesuai dengan target. Realisasi ini masih belum optimal menunjukkan adanya pencapaian pada tahun 2019 karena realisasi pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

masih sebesar 80%. Artinya hingga tahun 2019 baru 80% ruang yang sesuai RTRW dan di tahun 2021 sebesar 81 % dan pada tahun 2022 menjadi

Tabel II-263
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang		65	70	80	81	100

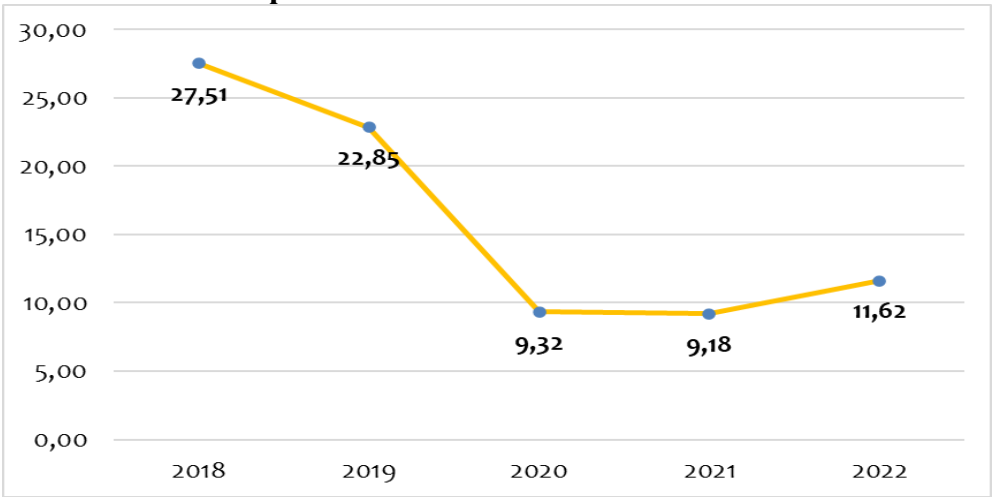
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2023

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi Jumlah Tindak Pidana ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah Angka Kriminalitas Tertangani dengan membandingkan jumlah penduduk dengan Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun di Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik II-27
Angka Kriminalitas yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022



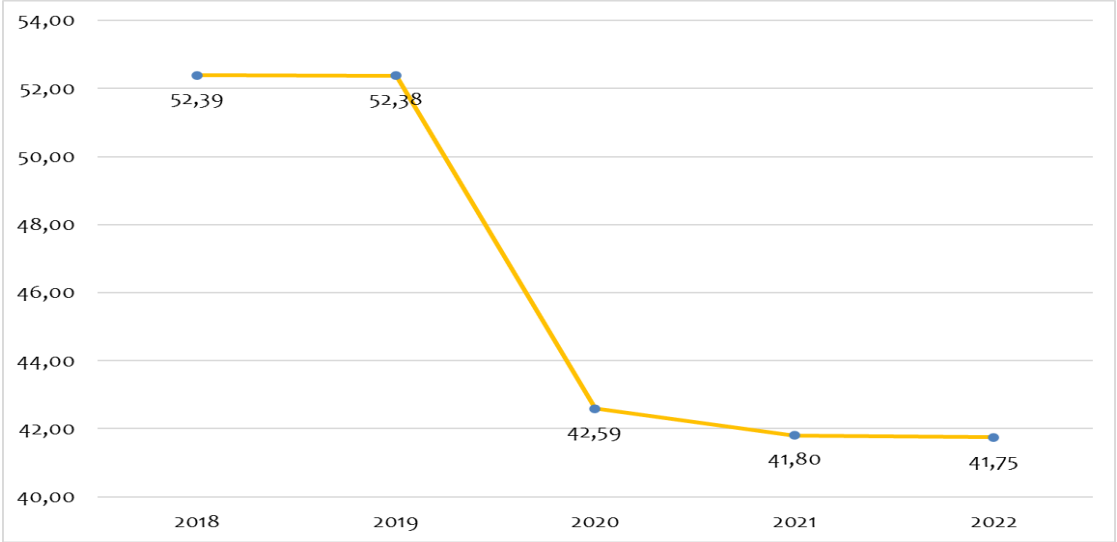
Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1) Rasio Ketergantungan

Semakin tingginya persentase *dependency ratio*/ rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan di Bulukumba mengalami peningkatan pada tahun 2018 namun turun pada tahun 2022 menjadi 41,75. Dari Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 41,75 artinya setiap 100 orang yang produktif (berusia kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (yang belum produktif dan atau tidak produktif lagi).

Grafik II-28
Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023, diolah

2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Daerah sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-264
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1			INDIKATOR KIERJA KUNCI (IKK)				
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1			Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,81	3,85	<
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.357,11	8.944,66	>
1	1	3	Laju inflasi	%	4,12	2,62	<
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	38,88	39,15	<
1	1	5	Gini Ratio	%	0,361	0,367	>
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,39	6,61	<
1			Kesejahteraan sosial				
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,34	70,11	>
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	68,51	68,82	<
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,42	13,84	>
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,01	7,84	>
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Juta Rupiah	10,94	10,61	>
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,27	70,16	>
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,26	3,47	>

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	=
1			Seni Budaya Dan Olahraga				
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	<
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	3,13	<
2			ASPEK PELAYANAN UMUM				
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
			SD	%	113,27	114,15	<
			SMP	%	86,46	94,86	<
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)				
			SD	%	99,55	98,67	>
			SMP	%	83,05	84,47	<
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
			7-12 Tahun	%	99,55	98,87	>
			14-15 Tahun	%	92,72	92,27	>
			16-18 Tahun	%	74,39	75,58	<
2	1	4	Angka Putus Sekolah				
			SD	%	0,57	0,00	<
			SMP	%	0,15	0,00	<
2	1	5	Angka Kelulusan				
			SD	%	99,55	100	<
			SMP	%	92,72	100	<
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	98,68	100	<
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	85,15	1:9	>
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:13	1:8	=
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	1:9	91,57	<
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		5,24	5,24	=
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		9,99	9,99	=
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		0	0,00	=
2	2	4	Angka Kematian Ibu		137,99	52,32	>
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		22,65	27,14	<
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,17	0,19	<
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,004	0,002	=
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	=
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,25	0,094	>
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,33	0,234	>
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90,44	85,45	>
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	=
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	=
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	64	44,2	>
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	165,31	101,325	>

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	8,41	3,23	>
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	=
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	4,96	1,46	>
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	13,79	0,009	>
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	8,27	8,27	=
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	70,21	73,55	<
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	52,65	52,65	=
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	85,68	85,68	=
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,890	0,639	>
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0030	0,0032	=
2	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	%	98,97	98,93	>
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	81,16	80,79	>
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,49	0,21	>
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,434	0,248	>
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	58,83	71,57	<
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9,41	11,61	<
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,54	93,76	<
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	64,60	83,34	<
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,48	84,89	>
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	12,02	0,00	>
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		0,42	8,67	<
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
6	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,30	0,31	<
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	=
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00271	0,00303	=
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	=
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	=
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit		13	<
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	=
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100,00	98,42	>
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	57,53	70,80	<
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	91,66	>
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	97,23	82,73	>
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	23,26	0,00	>
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,0	0,15	>
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	97,30	2,76	>
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	66,47	1,94	>
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,24	0,24	=
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,06	0,06	=
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	91,43	0,75	>
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	741,80	741,80	=
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		43,21	78,34	<
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		100	1,01	>
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47	0,47	=
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,40	4,4	>
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,50	24,00	<
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	96,00	83,62	>
2	2	4	Rasio KDRT		0,034	0,002	>
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,00		
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	100	=
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas	%	8,06	77,2511	<

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit				
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100	=
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama		100	444,01	<
2	3	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)		17.766,98	9.844,21	>
2	3	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)		919,76	231,77	>
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)		90	78,39	>
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	26,67	<
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	20,00	68,95	<
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,31	62,91	<
2	5	2	Indeks Kualitas Air	Poin	55,00	58,85	<
2	5	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,13	84,74	>
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	=
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	=
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	=
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	=
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	=
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	=
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	=
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	0	Ada	>
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	=
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	26,03	27,22	<
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	73,13	94,88	<
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	74	25,20	>
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35	38,36	<

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	<
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	32,00	<
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32,36	34,64	<
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	=
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1,095	1	>
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,950	0,8	>
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		1,000	0,5	>
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Ada	100	>
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el	%	109,55	100	>
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	111,06	80	>
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	73,39	100	<
2	7	2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)		100,00	146	<
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	9,09	100	<
2	7	4	Persentase PKK Aktif	%	100,00	100	=
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100,00	100	=
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya			100	<
2	7	7	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK		100,00	93	>
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,63	0,54	>
2	8	2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,130	2,44	<
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	81,48	73,59	>
2	8	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	11,11	14,99	<
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	=
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	=

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	=
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,76	18,19	>
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	13,47	16,92	<
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,97	75,16	<
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		23,5	89,79	>
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,76	4,41	>
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,62	12,48	<
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,77	37,32	<
2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	35,77	46,97	<
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80,95	92,61	<
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber-Kb	%	71,54	74,96	<
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	72,09	81,76	<
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	=
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	2,5	1,39	>
2	8	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdanng Pengendalian Penduduk	%	100	100	=
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	26,00	25,95	>
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	=
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	=
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	86,91	38,85	>
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	=
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,000	0,000	=
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100,00	100	=
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	83,90	38,38	>
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,00	22,64	<

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01	0,01	=
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	=
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	9.125	14.100	<
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,15	1,23	<
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	98,67	92,40	>
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu		0,00	66,01	<
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	3.994.925	26.480	>
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,0005	0,008	<
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		N/A	87	>
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/A	0,76	>
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	N/A	83,90	>
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		N/A	54,87	>
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		N/A	86,90	>
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	67,80	74,73	<
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,99	98,43	<
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	35	66	<
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	54.322	763.915	<
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-79,55	10	<
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	89,29	88,93	>
2	13	2	Persentase wirausaha muda		2,59	3,13	<
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	22,17	>
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	36,20	<
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	73,65	48,43	>
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		3	18	<
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		2	3	<
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	>
2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	>
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	=
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	<
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		58	58	>
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	=
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		6,34	38,52	<
2	17	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		71,54	43,90	>
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,61	1,43	>
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	27.884	63.322	<
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	15.933	11.704	>
2	17	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	53,26	57,21	<
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100.00	100.00	=
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	5,56	1,24	>
2			Urusan Pemerintahan Pilihan				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	92,61	129	<
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	54.911	56.098,1	<
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	168.040	5176	>
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	73,28	70,6	>
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
2	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	373.095	373.095	>
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	=
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	5,37	=
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		25,48*	25,56	>
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	53,35	76,2	<
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak		5.295.632	3.202.906	>
			<i>Sapi Potong</i>	<i>Ekor</i>	71.801	78.729	<
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	<i>Ekor</i>	4.384.830	2.414.546	>
			<i>Ayam Ras Petelur</i>	<i>Ekor</i>	839.001	709.631	>
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral				
2	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	129.572	100.890	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,72	0,72	=
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit	40	43	<
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
2		1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,17	0,17	=
2			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
2	1		Sekretariat Daerah				
2	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,60	2,72	<
2	2		Sekretariat DPRD				
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
2	1		Perencanaan				
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	>
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	=
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	=
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	=
2	2		Keuangan				
2	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	>
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,77	3,25	>
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%		0	=
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	28,05	21,20	>
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,44	19,24	<
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	>
2	2	7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,54	0,42	>
2	2	8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,95	10,81	>

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Target 2022	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2	3		Kepegawaian				
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	=
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	74,53	89,03	<
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	37,73	77,92	<
2	4		Pendidikan Dan Pelatihan				
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	29	>
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	538	1836,64	<
2	5		Penelitian Dan Pengembangan				
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	60	8,53	>
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	11,29	>
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	60,87	>
2	5	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah,		100	100	=
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
2	6		Inspektorat Daerah				
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	68,4	68,40	=
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,246	<
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	7	7	=
2			Unsur Pemerintahan Umum				
2	7		Kesatuan Bangsa dan Politik				
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70	70	=
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	=
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	=
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH				
3			Kemampuan Ekonomi Daerah				
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		980.966	938.435	>
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		459.488	443.080	>
3	3	3	Nilai Tukar Petani		100,39	104,02	<
3			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	100	88	>
3			Iklim Berinvestasi				
3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	11,62	25,37	<
3			Sumberdaya Manusia				
3	1	1	Rasio Ketergantungan		41,75	39,05	>

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dari 259 total indikator terdapat 107 indikator melampaui dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 66 indikator yang telah sesuai dengan target, sedangkan 86 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-265
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM			
			2019	2020	2021	2022
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	93,41	95	82,42	94,6
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional					
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
2	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	94,56	94	7,49	94,2
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional					
1.3	Pendidikan anak usia dini					
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	96,27	67	84,76	83,9
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional					
2	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah					
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	73,31	72,51	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin					
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	85,66	87,12	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	79	87,32	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita					
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	50,02	84,71	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	2,14	19,19	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	4,46	49,94	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	31,41	41,96	67
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi					
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	7,88	13,81	100
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus					
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	79,08	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM			
			2019	2020	2021	2022
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	63,49	90.07	84
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	27,01	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)					
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	40,63	52,12	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	%	83,53	84,4	84,26	90,26
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	75,96	76,12	76,26	97,49
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota;					
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	54	100	1000
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	100	-	-	93
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	71,11	100	96,9	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana					
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM			
			2019	2020	2021	2022
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti					
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	92	89,8	54,55	97,64
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	90	-	90.91	94,20
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	92,8	41,18	67,57	99,13
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	%	86,9	-	100	94,28
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2024

2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pencapaian target indikator berdasarkan bidang urusan dapat dijelaskan bahwa :

1. Bidang Urusan Pendidikan
- Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :
- Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Koordinasi dalam Pelaksanaan Integritas SPM
 - Dari segi pendanaan Pemerintah Pusat sangat mendukung Anggaran untuk pelaksanaan penerapan SPM.

- Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :
- Perubahan RPJMD
 - Koordinasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
 - Perencanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

2. Bidang Urusan Kesehatan
- Target untuk semua indikator adalah 100% namun berdasarkan angka di atas tidak ada indikator yang mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
- Penentuan data sasaran yang merupakan data estimasi yang ditentukan oleh Pusdatin, dimana data tersebut berbeda dan lebih tinggi dari pada data di Kabupaten
 - Adanya mutasi pegawai yang terlalu cepat menyebabkan pergantian pengelola program di puskesmas yang telah terlatih
 - Pospindu di beberapa desa belum aktif, disebabkan belum lengkapnya pospindu kit
 - Buku register penderita di puskesmas belum lengkap.

- Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas/pengelola program di puskesmas, memotivasipetugas untuk melakukan kunjungan rumah

- Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian cakupan
- Target beberapa indikator sebaiknya dibagi per triwulan sehingga mudah pencapaiannya.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah :

- Masih minimnya alokasi anggaran
- Sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kewenangan tidak melekat pada OPD yang bersangkutan sehingga dalam pencapaian target sulit terlaksana dengan baik seperti SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan datanya berada pada OPD tersebut.
- Kurangnya tenaga personil.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk dialokasikan dalam pencapaian SPM
- Mengikuti pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi/ bimbingan teknis pelayanan dalam pekerjaan.
- Mengusulkan agar diadakan perbaikan struktur organisasi serta kewenangannya.
- Serta mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba adalah :

- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Dukungan anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal
- Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat profesi dan bimbingan tehnik serta sarana dan prasarana pendukung

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlu bimbingan tehnik dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol PP dan Damkar
- Perlunya tambahan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Perlunya diklat terkait tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar dalam menunjang penegakan peraturan daerah .

5. Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bulukumba adalah :

- Tidak tersedianya data akurat khususnya data PMKS dan PSKS
- Manajemen dan Jumlah SDM yang belum memadai
- Masih rendahnya alokasi anggaran pada kegiatan penanganan PMKS

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlunya alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan PMKS
- Peningkatan kualitas SDM dan penempatan SDM sesuai bidang tugasnya
- Perlunya pengalokasian anggaran terkait penanganan PMKS

2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi- generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1) Tanpa Kemiskinan;
- 2) Tanpa Kelaparan;
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- 4) Pendidikan Berkualitas;
- 5) Kesetaraan Gender;
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
- 10) Berkurangnya Kesenjangan;
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- 13) Penanganan Perubahan Iklim;
- 14) Ekosistem Lautan;
- 15) Ekosistem Daratan;
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-266
Capaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8	7,86	7,1	7,43	7,39	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	77,5	82,9	82,9	80,9	NA	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,19	5,29	5,37	5,369	NA	Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	214	203	74,1	61,36	97,36	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	13817	13696	13696	15011	14945	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	84,83	79,38	86,4	99,6	99	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	96,19	96,19	96,19	90,2	99	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	64,63	64,63	NA	NA	Dinas PPKB,PPPA
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	89,4	90,2	84,4	63,45	85,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	89,9	90,8	36,9	57,26	76,87	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	107,91	104,81	89,43	88,89	87,53	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	99	98,92	75,47	67,72	84,48	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	65,32%	0,00%	63,94%	98,89%	9829,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	41176	42432	49747	49,74	NA	PLN
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	0	1,18	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	23,07	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	200	345	345	60	26	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	200	345	345		NA	Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)				Na	Na	NA	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp			500.000.000	1,518,000,000	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	23,82	23,4	23,4	Na	NA	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	25,29	25,46	25,46	Na	NA	Dinas Sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0	0	0			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	3,79	2	10,9	4,81	5,96	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0%	0%	0%			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	1,1	1,05	8,27	6,86	5,4	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	2,25	3,06	3,06	Na	5,4	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	25,3	17,4	2,93	5,15	3,17	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	21,17	22,56	16,46	14,86	12	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	64,3		74	Na	54,65	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	80,9	89	74	86,9	88,5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).					NA	NA	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	7	3	4	10	8	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	75,5	79,38	86,4	87,46	99	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	84,83	79,38	85,7	99,6	99	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	5	10,99	7,98	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	6	8,01	6,65	7,29	1,27	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	9	10,05	7,53	0,29	1,27	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	97,72	97,72	97,72	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	16	0,016	0,009	0,33	0,76	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	122,54	122,54	122,54	131,71	NA	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,11	0,11	0,01	0,02	0,05	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	138	138	138	92	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	1,58	0,24	0,24	0,4	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	86,1	75,3	7,46	15,01	16,48	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	11,2	9,8	0,15	2,19	32,24	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0	2		Na	0	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.					Na	0	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.					Na	NA	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.			11,96	39,94	35,05	55,79	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	75,28	74,97	78,62	55,75	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	48,66	33,37	18,51	17,84	10,2	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			89,79	89,79	67,18	23,05	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	6224	2,32	2,318	2,309	2,13	Dinas PPKB,PPPA
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	68,62	-	68,62		NA	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	16,58	15,68	11,74	19,1	NA	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	324287	348767	348767	348767	NA	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	77,5	82,9	71,83	60,3	NA	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		28	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	44,93	44,93	44,93	50,1	23,75	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100	100	100%	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	885	0,001	0,368	2,53	NA	Dinas Kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar	Persen	90	90	90	91	92	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
	kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	80,95	96,75	90,29	100	89,71	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	57,17	58,9	71,43	100	68,11	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	110,78	103,81	112,49	97,29	100,9	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	110,9	102,91	90,74	82,04	92,03	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	12	12	7	7	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	96,75	97,34	31,93	78,51	93,33	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	34,33	16	16	16	32	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	107,91	104,81	104,81	78,37	82	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	92,56	92,9	99,53	97,68	92,56	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	92,56	92,9	92,9	90,63	92,56	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, © air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Persen	90	90	90	92	91	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	65	65	46,8	58,75	47,05	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	4	4	4	4	Dinas PPKB,PPPA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	38	31	21,74	22	9,3	Dinas PPKB,PPPA
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	85	71	71	17	23	Dinas PPKB,PPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	13	22	22	NA	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	65	56	56	100	100	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	3	1	1	NA	27	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.			NA	NA	NA	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			89,79	89,79	67,18	23,5	Dinas PPKB,PPPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	17,5	20	20	20	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	18,4	18,4	18,4	18,4	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen	NA	NA	NA	NA		Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	16,58	15,68	11,74	10,78	28,49	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	4,2	4,28	4,25	4,23	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	91,83	92,46	92,46	0	84,46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,4	90,2	88,9	84,61	92,43	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA			NA	NA	92,43	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	89,4	90,2	88,9	63,46	85,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.					85,41	97,88	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	89,9	90,8	36,9	75,35	136	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	136	136	136	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	52,2	64,71	136	136	NA	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	0,79	1,13	1,13	74,71	74,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	75	19	19	19	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			NA	NA	NA	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	60	65	65	65	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	15	18	2	NA	55	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.					NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada		30	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			42432	49747	NA	NA	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
7.3.1*	Intensitas energi primer.					NA	NA	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
								Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	5,05	5,49	0,43	5,49	0,43	Bappelitbangda
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	31,55	33,8	34,43	33,80	34,43	Bappelitbangda
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	51,73	51,95	0,22	0,22	0,22	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,47	44,75	44,75	21,68	21,68	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	55,12	35,26	35,26	35,26	35,26	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	7,74	10,68	10,68	29,97	61,33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	Rp86.000	Rp90.000	Rp34.143	Rp34.143	Rp34.143	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	4,12	4,35	0,03	0,03	0,03	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	31,82	32,08	0,1	0,1	0,1	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	37,33	38,09	38,09	58,3	58,3	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.					NA	38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	3555	2260	293	60		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	262741	278330	278330	326993		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp				NA		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.					38		Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	3	1	1	1	1	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).					2,5	2,5	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	21,05	33,61	33,61	29,23	45,38	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	2	2	3	3	Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	7,35	7,47	7,47	6,48	6,68	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	0,74	1,2	5,4	5,72	5,72	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.					Na		Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.					9,9		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.					NA		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	25	50	50	50		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	91,83	92,46	94,46	0	84,46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	42	43	43	43	57,91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,354	0,377	0,371	Na	NA	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,48	7,26	7,1	7,43	7,39	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	5	0	0	109	109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	15	11	11	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	104	109	109	6	14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Desa			74,40%	80,20%	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	8,06	7,86	7,86	Na	NA	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.					NA	NA	Dinas Sosial
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					NA	NA	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,194	5,289	5,369	NA	NA	Dinas Sosial
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	92,09	92,33	92,35	92,35	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.							Bappelitbangda
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang		1,18	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp			500.000.000	1,518,000,000	500000000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	90,22	92,45	73,56	86,63	94,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	2,557	2,557	25,13	35	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	4,8	3,747	62,769	24,95	24,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Ton			14,33	14,33	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang		1,18	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	53455,6	52651,6	53.860,10	53.830,30	55.522,60	Dinas Perikanan
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	838	867	867	867	NA	Dinas Perikanan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	5		29,86	29,86	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0,002		32,29	32,29	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	ada	ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	4	2	7	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus			7	3	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen			100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	3	1	1	Na		Dinas PPKB,PPPA
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	148	128	128	19		Dinas PPKB,PPPA
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	29	517	517	19		Dinas PPKB,PPPA
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			Na	Na	Na		Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	94,29	90,3	91,51	93,64	85,12	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP (100%)	WTP (100%)	WDP (50%)	wtp	WTP (100%)	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	60,02	61,14	61,14	Na	B	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	16,79	90	97,16	90%	97%	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	54,11	55,15	55,71	55,71	68,91	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		0	0	0			Bappelitbangda
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	17,5	20	20	20	20	Dinas PPKB,PPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	18,4	18,4	15	Na	0,2	Dinas PPKB,PPPA
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		73,4	73,4	75,12	78,59	97,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.					Na	97,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	65,32	65,32	78	Na	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1	1	1	80	98,29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							Setda, Bagian Hukum dan HAM
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	130.060.914.218	1.487.677.783.317	1.478.492.269.014	1.369.367.217.359	1.375.869.878.068	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0,38	0,37	0,36	NA		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,958	0,958	0,958	0,95	2,43	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.					NA	50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	25	50	50	50	NA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	42	43	43	50	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							Bappelitbangda
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							Bappelitbangda
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	80	97,73	100		100	Bappelitbangda
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	80	66,67	66,67		100	Bappelitbangda
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		80	6	6		NA	Bappelitbangda
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.							Bappelitbangda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	4000	7996	7996		NA	Bappelitbangda
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100	100			Bappelitbangda

2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan daerah, adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan SDGs dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-267
Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
1	Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba salah satunya dengan semakin banyaknya bantuan yang berperan membantu pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada bulan maret 2020 sebesar 7,10 % atau menurun dibandingkan bulan maret 2019 sebesar 0,16 % poin. Jumlah penduduk miskin Kab.Bulukumba. Pada bulan maret 2020 sebesar 30 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu jiwa dibandingkan maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa, namun pada tahun 2021 7,43%. Secara umum selama 5 Tahun terakhir,tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk namun pada tahun 2021 meningkat diakibat covid-19 dan tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 7,39% .	
2	Sosial	Realisasi capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI dalam rangka penanganan dampak Covid- 19.	
3	Bencana	Terjadinya peningkatan korban meninggal, hilang dan terkena dampak diakibatkan kondisi anomali cuaca yang lebih ekstrem.	
4	Kesehatan	Pengaruh sosial budaya masih sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan sehingga masih sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, intervensi pelacakan untuk kasus kekurangan gizi telah dilakukan secara maksimal dan surveilans gizi melalui E- PPBGM sudah dimonitor secara berkesinambungan, Pembatasan kegiatan sebagai dampak pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pencapaian program	
5	Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari hasil perhitungan survei konsumsi pangan pada 9 kelompok pangan meliputi : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang- kacangan, gula, sayuran dan buah. Selama 5 tahun terakhir capainnya fluktuatif disebabkan karena masih rendahnya daya konsumsi pada kelompok pangan tertentu misalnya buah dan sayuran, pangan hewani yang dipengaruhi oleh daya beli dan kesadaran pola konsumsi masyarakat yang masih rendah.	
6	Kuangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif, Masih kurangnya alokasi anggaran terkait genderAlokasi anggaran yang masih rendah pada sektor pengelolaan air bersih dan sanitasi sehat, Refocusing anggaran sehingga	

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
		beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakanTerbatasnya anggaran pengelolaan lingkungan, Terbatasnya anggaran pengelolaan lingkunganKepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016,2017,2018 dan 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah per 31 desember berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintah. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2020 memperoleh opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pada 2021 kembali menjadi WTP.Terbatasnya anggaran dan Pada tahun 2016 Rasio Pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB memberikan kontribusi 0,327, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,383.Tahun 2018 Nikai tersebut mengalami penurunan menjadi 0,382 selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,372 dan pada tahun 2020 turun menjadi0,362. Tren penurunan rasio pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB tahun 2018 sampai tahun 2020 bukanlah penurunan secara nilai karena jumlah pajak daerah yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hanya saja nilai PDRB yang merupakan nilai pembai juga mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu tersebut. Sementara itu untuk tahun 2020 dan tahun 2021, penurunan terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sampai kedaerah dan pada tahun 2022 memperoleh penilaian Opini BPK menjadi WTP	
7	Operasional	PMT yang diberikan kepada Bumil KEK tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh ibu hamil, masih ada bayi balita yang tidak mendapat ASI Eksklusif, Capaian ini mengalami penurunan disebabkan jumlah guru sertifikasi yang pensiun cukup banyak dibanding jumlah lulusan baru. Hasil ini juga disebabkan guru yang baru diangkat baik cpns maupun honorer belum bersertifikast pendidik.Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunanPenerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu , pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan,;	
8	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil; ; Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluargaPenempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaanCakupan Perempuan dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 semua kasus terlayani 100% oleh pelayanan terpaduMasih kurangnya kualitas SDM sehingga kurang mampu bersaing dalam dunia kerjaRendahnya kulaitas SDM masyarakat didesaBelum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian BencanaTerbatasnya SDM dan sarana prasaranaMasih terbatasnya kualitas SDM pengelola Data dan Informasi	
9	Kelembagaan	Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam menurunkan angka kematian ibu, Anak balita dan bayi Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 19 orang, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan terhadap perempuanKurang optimalnya kelembagaan pengelola air bersih dan	

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
		sanitasi sehat Kurangnya kelembagaan pengelolaan lingkungan Kurangnya kelembagaan mitigasi bencana	
9		Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD di karenakan masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar	
10	Regulasi	Tahun 2017 : RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG, Tahun 2018 : 1.SK Bupati No.188.45.463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pokja Plus, 2. SK Bupati No.188.45.464 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, 3. SK Bupati No.188.45.465 tentang pembentukan tim teknis anggaran responsif gender. Tahun 2019 : Perda No.1 Tahun 2019 penyelenggaraan Kabupaten Layak anak dan masih berlangsung pada tahun 2021.Kebijakan belum fokus pemerataan wilayahMasih kurangnya regulasi tata kelola lingkunganMasih kurangnya regulasi mitigasi bencana	
11	Politik	Jumlah kursi di keanggotaan DPRD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 jumlah kursi yang diduduki perempuan sebanyak 7 kursi dari total kursi 40 dengan presentase sebesar 17,50% dan pada Tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan kursi perempuan menjadi 8 kursi dengan presentase 20%.Proporsi kursi yang diduduki perempuan DPRD kabupaten bulukumba, jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari Tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar 40 total kursi.Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba sebesar 7 Kursi jika dipersentasekan hanya 17,50% namun pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tahun 2021-2022 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba meningkat dari 17,50% menjadi 20% salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung pemberdayaan perempuan.	
12	Air Minum layak	Tidak tersedia data karena berdasarkan Rumah tangga sanitasi Kab.Bulukumba masih berada pada level “Layak”	
13	ODF/ sanitasi	Desa/Kelurahan yang ODF dengan kategori akses jamban di Masyarakat	
14	Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat tidak ada peningkatan untuk tahun 2020	
15	Lainya	Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian.	
16	Pertumbuhan ekonomi Desa Tertinggal;	Di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal	
17	Desa Mandiri	Alokasi Anggaran untuk tahun 2021, ditetapkan 6 desa di Kab.Bulukumba sebagai desa Mandiri dengan kriteria syarat dipilihnya 6 desa : IDM (Indeks Desa Membangun) sudah mencapai nilai lebih besar 0,8 IDM, Indeks Sosial, Indeks Kebutuhan ekonomi, indeks kebutuhan ekologi ini merupakan validasi mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.	
18	Penataann kota	Untuk jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP belum ada di Kab.Bulukumba	
19	Transportasi	Berkurangnya jumlah ketersediaan kendaraan angkutan umum sehingga capaian realisasi berkurang. Kemudian juga dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.	
20	Kebencanaan	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana dan Dokumen regulasi SPM kebencanaan di tingkat daerah hanya terwujud di tahun 2019 di akibatkan alokasi anggaran yang tidang mendukung	

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

- a. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II-268
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8	6	6	6	6	6	4	4	2	-	-	2
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	11	6	6	6	6	6	1	1	5	-	-	5
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	9	9	9	9	9	8	8	1	-	-	1
13	Dinas Perhubungan	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	1
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	10	8	8	8	8	8	6	6	2	-	-	2
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	5	3	3	3	3	3	1	1	2	-	-	2
17	Dinas Perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-
21	Sekertariat Daerah	4	3	3	3	3	3	2	2	1	-	-	1
22	Sekertariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	4	2	2	2	2	2	-	-	2	-	-	2
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	1
31	Kantor Kecamatan Gantarang	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	1
32	Kantor Kecamatan Kindang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
33	Kantor Kecamatan Herlang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
36	Kantor Kecamatan Kajang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaranprogram RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
- a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 184 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2022 juga berjumlah 166 program (jumlah pada kolom 4).

b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 18 program diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
- a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 166 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 166 program (jumlah pada kolom 5).

b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
- a. Kesesuaian program RKPD dan APBD

a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 166 program (jumlahpada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 166 program (jumlah pada kolom 6).

b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.

b. Kesesuaian program RPJMD dan APBD

a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 184 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 166 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 18 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom14).

b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadikegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:
- Tabel II-269
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD
- | No. | Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan | | | Kegiatan Yang Sama | | | Kegiatan Tidak Sama | | |
|-----|--|-----------------|------------|------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | RKPD | Renja - PD | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
| 3 | RSUD H.A. Sultan Dg. Radja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

II-168

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
	Kebakaran Dan Penyelamatan									
8	Dinas Sosial	15	15	15	15	15	15	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	19	19	19	19	19	19	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	14	14	14	14	14	14	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	9	9	9	9	9	9	-	-	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24	24	24	24	24	24	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	9	9	9	9	9	9	-	-	-
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	10	10	10	10	10	10	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	16	16	16	16	16	16	-	-	-
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	10	10	10	10	10	10	-	-	-
17	Dinas Perikanan	12	12	12	12	12	12	-	-	-
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	18	18	18	18	18	18	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	26	26	26	26	26	26	-	-	-
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	23	23	23	23	23	23	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	18	18	18	18	18	18	-	-	-
22	Sekretariat DPRD	14	14	14	14	14	14	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	16	16	16	16	16	16	-	-	-
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	14	14	14	14	14	14	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	12	12	12	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	11	-	-	-
27	Kecamatan Ujung Bulu	7	7	7	7	7	7	-	-	-
28	Kecamatan Ujung Loe	6	6	6	6	6	6	-	-	-
29	Kecamatan Bulukumpa	8	8	8	8	8	8	-	-	-
30	Kecamatan Rilau Ale	6	6	6	6	6	6	-	-	-
31	Kecamatan Gantarang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
32	Kecamatan Kindang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
33	Kecamatan Herlang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
34	Kecamatan Bonto Tiro	7	7	7	7	7	7	-	-	-
35	Kecamatan Bonto Bahari	6	6	6	6	6	6	-	-	-
36	Kecamatan Kajang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	12	12	12	12	12	-	-	-

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
- a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 448 kegiatan. (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).

b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai. C.Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
- a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 448 (jumlah pada kolom 7),sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom10).

b. Dari 3 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD demikian pula sebaliknya. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkanantara lain dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2022 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-270
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	44	44	43	43	43	43	1	1	1
2	Dinas Kesehatan	77	77	75	75	75	75	2	2	2
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	2	2	2	2	2	2	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	45	45	45	45	45	45	-	-	-
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	27	27	27	27	27	27	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	14	14	14	14	14	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	20	20	20	20	20	20	-	-	-
8	Dinas Sosial	40	40	39	39	39	39	1	1	1
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	36	36	36	36	36	36	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	40	40	40	40	40	40	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21	21	21	21	21	21	-	-	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	64	64	63	63	63	63	1	1	1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
	Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
13	Dinas Perhubungan	22	22	22	22	22	22	-	-	-
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	24	24	24	24	24	24	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	29	29	29	29	29	29	-	-	-
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	27	27	26	26	26	26	1	1	1
17	Dinas Perikanan	33	33	32	32	32	32	1	1	1
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	26	26	26	26	26	26	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	58	58	58	58	58	58	-	-	-
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	45	45	45	45	45	45	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	54	54	54	54	54	54	-	-	-
22	Sekretariat DPRD	46	46	45	45	45	45	1	1	1
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	52	52	52	52	52	52	-	-	-
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	97	97	97	97	97	97	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	25	25	25	25	25	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	29	29	29	29	29	29	-	-	-
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	17	17	17	17	17	17	-	-	-
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	18	18	18	18	18	18	-	-	-
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	18	18	18	18	18	18	-	-	-
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	17	17	17	17	17	17	-	-	-
31	Kantor Kecamatan Gantarang	14	14	13	13	13	13	1	1	1
32	Kantor Kecamatan Kindang	11	11	11	11	11	11	-	-	-
33	Kantor Kecamatan Herlang	12	12	12	12	12	12	-	-	-
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	14	14	14	14	14	14	-	-	-
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	15	15	15	15	15	15	-	-	-
36	Kantor Kecamatan Kajang	16	16	16	16	16	16	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28	28	26	26	26	26	2	2	2

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

- 1. RKPD dan Renja-PD.
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 1.177 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah padakolom 9).
 - b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
- 2. RKPD dan APBD.
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3)dan APBD adalah sejumlah 1.166 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.166 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
 - b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran disebabkan perubahan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,07%..
- 3. Renja-PD dan APBD
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3)dan APBD adalah sejumlah 1.166 (jumlah pada kolom 5). Jumlah subkegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.166 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
 - b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran

3. Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2022

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-271
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	427.683.353.105,00	398.676.424.175,00	93,22
2	Dinas Kesehatan	171.613.468.624,00	141.994.974.607,00	82,74
3	Rsud H.A. Sultan Dg. Radja	124.134.979.399,00	107.826.499.464,20	86,86
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	206.336.501.284,00	173.577.235.634,00	84,12
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	22.861.398.926,00	18.580.925.367,80	81,28
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.159.830.304,00	15.975.354.331,00	98,86
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11.621.183.946,00	11.157.026.574,00	96,01
8	Dinas Sosial	5.306.671.798,00	5.148.048.061,00	97,01
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	16.183.976.308,00	14.895.002.560,00	92,04

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	%
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	4.809.331.841,00	4.295.038.999,00	89,31
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	6.475.987.985,00	6.185.106.639,00	95,51
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA	12.849.260.230,00	10.137.205.644,00	78,89
13	Dinas Perhubungan	19.804.277.131,00	18.606.623.051,00	93,95
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.362.786.856,00	4.038.860.269,00	92,58
15	Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja	6.759.878.536,00	5.908.918.483,00	87,41
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	4.801.622.700,00	3.752.466.617,00	78,15
17	Dinas Perikanan	13.434.084.936,00	11.618.926.219,00	86,49
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	14.650.043.863,00	12.885.446.511,00	87,96
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	37.028.331.603,00	31.704.889.732,00	85,62
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM	90.582.643.262,00	13.669.664.385,00	15,09
21	Sekretariat Daerah	24.874.889.058,00	22.902.476.661,00	92,07
22	Sekretariat DPRD	40.460.773.518,00	36.662.086.085,00	90,61
23	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.254.518.497,00	7.934.561.504,00	85,74
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	212.136.647.686,00	195.792.039.610,00	92,30
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	5.936.506.696,00	5.574.213.047,00	93,90
26	Inspektorat Daerah	11.053.246.905,00	9.005.802.020,00	81,48
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	15.096.339.561,00	14.607.148.015,00	96,76
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	3.120.079.462,00	2.536.070.453,00	81,28
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	5.830.343.788,00	5.485.379.381,00	94,08
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	4.248.837.190,00	3.953.151.576,00	93,04
31	Kantor Kecamatan Gantarang	6.513.965.312,00	5.926.385.268,00	90,98
32	Kantor Kecamatan Kindang	2.718.453.956,00	2.433.440.538,00	89,52
33	Kantor Kecamatan Herlang	3.870.570.718,00	3.661.444.490,00	94,60
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	3.396.788.161,00	3.306.560.864,00	97,34
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	7.110.641.893,00	6.181.505.568,00	86,93
36	Kantor Kecamatan Kajang	4.834.273.166,00	4.555.162.859,00	94,23
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.506.117.166,00	3.015.208.714,00	86,00
	Jumlah Belanja	1.581.422.605.370,00	1.344.167.273.976,00	85,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2022 adalah Rp.1.581.422.605.370,00,- anggaran tersebut terbagi atas 37 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 sebesar 85,00%, Pengukuran capaian target kinerja outcome/output pada Program/kegiatan/sub kegiatan yang diakumulasi berdasarkan urusan dan penyerapan dana Program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, adapaun Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-272
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	ST
2	76% ≤ 90%	TINGGI	T
3	66% ≤ 75%	SEDANG	S
4	51% ≤ 65%	RENDAH	R
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dari 37 perangkat daerah hanya 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (15,09%) ini dikarenakan ada belanja transfer yang tidak sempat dibayarkan, kategori Tinggi berjumlah 19 Perangkat Daerah dan Kategori sangat tinggi berjumlah 17.

Tabel II-273
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	60,24	R	56,11	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	80,50	T	72,00	S
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	83,46	T	67,82	S
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	88,24	T	75,16	S
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	96,74	ST	96,00	ST
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	96,57	ST	95,24	ST
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	67,20	S	68,07	S
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	62,51	R	62,42	R
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	77,78	T	72,92	S
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	90,00	T	78,59	T
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	98,68	ST	96,70	ST
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	98,94	ST	96,24	ST
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	95,14	ST	91,47	ST
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	85,31	T	86,23	T
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	94,25	ST	82,58	T
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	88,09	T	85,20	T
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	88,27	T	82,25	T
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	99,02	ST	98,09	ST
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	98,95	ST	98,56	ST
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100,00	ST	100,00	ST

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100,00	ST	100,00	ST
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	69,61	S	69,60	S
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	99,19	ST	92,58	ST
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100,00	ST	99,66	ST
	Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	93,27	ST	76,48	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	86,93	T	83,43	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	91,43	ST	82,96	T
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	99,67	ST	93,39	ST
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	82,06	T	82,18	T
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	99,33	ST	92,75	ST
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah	98,96	ST	93,45	ST
2	Sekretariat DPRD	93,39	ST	76,04	T
	Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang				
1	Perencanaan	78,83	T	76,40	T
2	Keuangan	86,98	T	76,38	T
3	Kepegawaian,	94,69	ST	86,47	T
4	Pendidikan Dan Pelatihan	100,00	ST	99,00	ST
5	Penelitian Dan Pengembangan	77,20	T	72,36	S
	Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan				
1	Pengawasan	89,66	T	73,33	S
	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan	98,36	ST	92,60	ST
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	90,94	T	73,34	S
	RKPD Kabupaten Bulukumba	89,51	T	83,85	T

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- a) Adanya pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebesar 75 Milyar yang tidak masuk ke dalam kas daerah. Sehingga realisasinya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah rendah.
- b) Adanya PNS yang pensiun di bulan Februari dan Mei 2022, adanya penganggaran untuk honararium sebanyak 2 org yang terealisasi hanya 1 org serta ada sisa tender dari belanja modal yaitu pengadaan sarana dan prasarana, rehabilitasi gedung kantor, tender website, dan sisa pengawasan.
- c) Kurangnya jumlah kasus terhadap perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik perlindungan perempuan dan anak dan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tpp, serta kelebihan pembayaran listrik dan wifi.
- d) Adanya klaim ganda atas lokasi tanah untuk Perluasan Pasar Tanete dan tidak didapatkan kesepakatan harga tanah lokasi TPA Borong Manempa Desa Polewali antara pemilik lahan dan tim pengadaan tanah kabupaten.
- e) Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan bersamaan namun penugasan yg dapat dibayarkan hanya satu dan banyaknya perubahan jadwal bimtek dan jadwal bimtek yg bertepatan dengan penugasan yang penting dan mendesak (hps, penanganan inflasi, reuiu parsial)
- f) Beberapa paket infrastruktur gagal tender diantaranya Pembangunan Lanjutan Mall Pelayanan Publik.

- g) Penetapan Perubahan APBD 2022 tidak terjadi kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bulukumba sehingga beberapa kegiatan yang akan mengalami pergeseran dan tambah kurang anggaran serta penyesuaian nomenklatur tidak dapat direalisasikan.

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

- 1) Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- 2) Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
- 3) Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- 4) Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 5) Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
- 6) Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
- 7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

- 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
- 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan ahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
- 3) Pengelolaan data yang baik. Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada berikut:

Tabel II-258
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba
Tahun Anggaran 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)																			
1	1	2	0																						
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase bangunan kondisi baik																			
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB	Paket	60,00				2,00	390.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah	5,00				11,00	1.172.858,05	522.231,50	10,01	478.317,79	91,00	40,78	91,59	10,01	478.318	200,20	0,00		
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	60,00				23,00	1.390.488,90	231.808,85	21,85	221.172,25	95,00	15,91	95,41	21,85	221.172	36,42	0,00		
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Sekolah	60,00				11,00	1.410.031,90	788.267,60	7,62	544.718,14	69,25	38,63	69,10	7,62	544.718	12,70	0,00		
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	61,00				42,00	6.147.078,60	1.356.395,65	40,32	1.257.331,20	96,00	20,45	92,70	40,32	1.257.331	66,10	0,00		
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Paket	5,00				2,00	1.798.000,00	192.850,00	1,02	97.740,00	50,78	5,44	50,68	1,02	97.740	20,31	0,00		
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		%					#####	1.000.000,00	-											
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		%					#####	500.000,00	-											
1	1	2	2.01	26	Pengadaan Mebel Sekolah		%					#####	100.000,00	-											
1	1	2	2.01	27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Sekolah	349,00				55,00	7.148.879,55	2.342.568	54,40	2.316.210,94	98,90	32,40	98,87	54,40	2.316.211	15,59	0,00		
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Kegiatan	349,00				1,00	640.000,00	117.207,00	0,31	35.946,00	30,68	5,62	30,67	0,31	35.946	0,09	0,00		
1	1	2	2.01	29	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PTK	12,00				5,00	50.000,00	489.445,200	0,02	1.500,00	0,40	3,00	0,31	0,02	1.500	0,17	0,00		
1	1	2	2.01	29	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah	12,00				#####	25.693.374,30	42.416.291,225	350,00	39.340.297,47	100,00	153,11	92,75	350,00	39.340.297	2916,67	0,00		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS	Sekolah	12,00				#####	50.000,00	112.185,000	278,01	89.005,05	79,43	178,01	79,34	278,01	89.005	2316,71	0,00		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase bangunan kondisi baik															-	0,00	0,00		
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Paket	90,00				5,00	1.000.000,00	95.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	1	2	2.02	14	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	30,00				5,00	1.000.000,00	796.410,00	4,15	661.226,17	83,05	66,12	83,03	4,15	661.226	13,84	0,00	
1	1	2	2.02	15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Paket	5,00				5,00	1.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.02	17	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Labolatorium	Paket	5,00				5,00	1.000.000,00	1.244.762,00	3,91	973.133,31	78,20	97,31	78,18	3,91	973.133	78,20	0,00	
1	1	2	2.02	18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah	5,00				10,00	1.522.500,00	5.355.777,86	9,03	4.831.885,93	90,27	317,37	90,22	9,03	4.831.886	180,54	0,00	
1	1	2	2.02	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Paket	70,00				12,00	3.560.331,95	1.194.954,00	9,15	911.068,64	76,25	25,59	76,24	9,15	911.069	13,07	0,00	
1	1	2	2.02	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Paket	1,00				19,00	3.266.904,10	331.936,00	15,10	263.834,91	79,49	8,08	79,48	15,10	263.835	1510,31	0,00	
1	1	2	2.02	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	1,00				4,00	173.264,80	47.420,00	3,39	40.156,36	84,69	23,18	84,68	3,39	40.156	338,76	0,00	
1	1	2	2.02	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Paket	95,00				7,00	1.131.473,85	331.936,00	5,04	239.033,98	72,05	21,13	72,01	5,04	239.034	5,31	0,00	
1	1	2	2.02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Labolatorium	Paket	70,00				14,00	3.775.564,50	373.428,00	10,50	279.203,48	75,00	7,40	74,77	10,50	279.203	15,00	0,00	
1	1	2	2.02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	100,00				19,00	2.535.404,80	982.555,60	17,53	889.957,46	92,25	35,10	90,58	17,53	889.957	17,53	0,00	
1	1	2	2.02	42	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah	Paket	100,00				1,00	150.000,00	50.000,00	1,00	49.950,00	100,00	33,30	99,90	1,00	49.950	1,00	0,00	
1	1	2	2.02	42	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	100,00				14,00	1.075.904,00	1.078.127,00	14,00	1.077.940,00	100,00	100,19	99,98	14,00	1.077.940	14,00	0,00	
1	1	2	2.02	42	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Kegiatan	100,00				1,00	390.000,00	117.309,00	0,60	70.617,70	60,21	18,11	60,20	0,60	70.618	0,60	0,00	
1	1	2	2.02	42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	Sekolah	100,00				70,00	11.160.218,00	17.131.177,05	70,00	15.734.102,22	100,00	140,98	91,84	70,00	15.734.102	70,00	0,00	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	100,00				70,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sekolah	3,00	-			3,00	1.340.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah	3,00				1,00	396.012,00	629.598,05	1,00	426.897,00	100,00	107,80	67,80	1,00	426.897	33,33	0,00	
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sekolah	4,00				1,00	3.520.295,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah	100,00				15,00	329.010,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sekolah	3,00				1,00	80.000,00	36.820,95	1,00	16.676,00	100,00	20,85	45,29	1,00	16.676	33,33	0,00	
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Sekolah	174,00				2,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP PAUD	Sekolah	358,00				#####	8.232.200,00	8.365.800,00	368,00	6.715.289,00	100,00	81,57	80,27	368,00	6.715.289	102,79	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													-	0,00	0,00				
1	1	2	2.04	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Sekolah					2,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Sekolah	1,00				1,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan	Sekolah	1,00				24,00	4.240.000,00		2.337.700,00	24,00	2.605.617,25	100,00	61,45	111,46	24,00	2.605.617	2400,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																78,68	59,25	74,55				713,01	0,00		
Predikat Kinerja																T	R	S				ST	SR		
1	1	4	0.00		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru																			
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	PTK	1,00	-	0,00	#####	105,00	1.570.000,00		79.977,00	73,50	48.882,80	70,00	3,11	61,12	73,50	1.200.566	7350,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																70,00	1,56	61,12				918,75	0,00		
Predikat Kinerja																S	SR	R				ST	SR		
1	1	5	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan																			
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar																			
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kegiatan	100,00				1,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Predikat Kinerja																SR	SR	SR				SR	SR		
1	1	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu																			
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	1,00	-	0,00	-	2,00	6.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	1,00	-	0,00	-	2,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen					1,00	25.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen					5,00	25000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu																			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	381.429.405,58		336.372.581,25	12,00	316.711.846,81	100,00	83,03	94,16	12,00	316.711.847	20,00	0,00	
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan ASN	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	16.320,00		1.248.000,00	12,00	1.207.550,00	100,00	7399,20	96,76	12,00	1.207.550	20,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	1.383.027,00	39.000,00	12,00	39.000,00	100,00	2,82	100,00	12,00	39.000	20,00	0,00	
1	1	1	2.02	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	60,00	-	0,00	-	1,00	25.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN																		
1	1	1	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang					2,00	75.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Mahasiswa S1 Berprestasi yang Menerima Bantuan	Orang	0,00	-	0,00	-	130,00	550.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor																		
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket					180,00	-	2.059,00	180,00	2.059,00	100,00	0,00	100,00	180,00	2.059	0,00	0,00	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket					180,00	2.962,50	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket					1,00	45.000,00	47.808,97	1,00	47.808,97	100,00	106,24	100,00	1,00	47.809	0,00	0,00	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Lembar				#####	10.000,00	5.012,70	28571,00	5.012,70	100,00	50,13	100,00	#####	5.013	0,00	0,00		
1	1	1	2.06	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Orang	0,00	-	0,00	-	786,00	33.000,00	4.764,00	786,00	4.764,00	100,00	14,44	100,00	786,00	4.764	0,00	0,00	
1	1	1	2.06	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Kegiatan	0,00	-	0,00	-	13,00	93.798,00	7.800,00	10,99	6.593,00	84,54	7,03	84,53	10,99	6.593	0,00	0,00	
1	1	1	2.06	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Kegiatan	0,00	-	0,00	-	13,00	13.260,00	15.480,00	13,00	15.404,10	100,00	116,17	99,51	13,00	15.404	0,00	0,00	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan																		
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	144.270,26	20.545,95	12,00	14.525,28	100,00	10,07	70,70	12,00	14.525	0,00	0,00	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	17.757,00	115.468,98	12,00	99.635,02	100,00	561,10	86,29	12,00	99.635	0,00	0,00	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	48.000,00	5.595,00	12,00	5.595,00	100,00	11,66	100,00	12,00	5.595	0,00	0,00	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	39.800,00	166.247,78	12,00	166.021,78	100,00	417,14	99,86	12,00	166.022	0,00	0,00	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelkihara dalam kondisi baik																		
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	%	0,00	-	0,00	-	100,00	1.200,00	18.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		bulan					12,00	15.000,00			8.762,47	0,00	58,42	0,00					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik																		
1	1	1	2.09	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik	Unit					37,00	58.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	15.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		%					100,00	3.200,50											
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik	Paket	0,00	-	0,00	-	5,00	1.696.900,00	16.445,00	5,00	16.445,00	100,00	0,97	100,00	5,00	16.445	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	92,30	589,23	88,79			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													486.011.695,141	427.234.747,105		398.568.734,18								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	60,24	162,51	56,11			407,94	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	R	ST	R			ST	SR	
2	2	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	2	2	0.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hml y dpt ply ksht str, %ib hml y dpt fshts ply ksht, %byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str, %Blit y brmr 0-59 bln y dpt ply ksht, %nkn usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str, %org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str, %org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str, %org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str, %ODG brt y dpt ply ksht str, %org trdg TBCy dpt ply ksht str, %prslin difshts ply ksht, %Blit y dpt ply ksht ssi str, Rso pksms trhd p jml pddk %org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhd p jml pddk																			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan																			
	2	2	2	2.01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan penunjang puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	200.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya rumah dinas bagi tenaga kesehatan di puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	2,00	919.477,47	14.993,00	2,00	14.993,00	100,00	1,63	100,00	2,00	14.993	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengembangan Rumah Sakit	tersedianya rumah sakit yang memadai	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya BLUD Puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	5,00	246.638,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	tersedianya rumah sakit yang memadai	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya rehab puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	17,00	34.010.565,61	2.269.886,56	16,94	2.203.234,59	99,67	6,48	97,06	16,94	2.203.235	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung PSC dan Pustu	paket	0,00	-	0,00	-	2,00	750.932,00	231.697,01	2,00	231.656,498	100,00	30,85	99,98	2,00	231.656	0,00	0,00	
1	2	2	2	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	500.000,00											
	2	2	2	2.01	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya sarana fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu dan poskesdes	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	1.234.184,99	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana kantor pelayanan yang memadai sesuai SPM, Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	6.970.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana kantor pelayanan yang memadai sesuai SPM, Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk puskesmas	paket	0,00	-	0,00	-	3,00	492.998,52	7.126.486,23	2,00	4.023.868,59	66,67	816,20	56,46	2,00	4.023.869	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan alkes sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	70,00	7.398.085,50	10.426.585,87	70,00	9.590.501,41	100,00	129,63	91,98	70,00	9.590.501	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	8.900.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	93.646,32	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	1.505.128,68	3.990.564,73	89,25	3.803.606,90	99,17	252,71	95,32	89,25	3.803.607	743,78	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	1.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	90,00	2.289.874,39	5.009.205,00	90,00	3.217.331,05	100,00	140,50	64,23	90,00	3.217.331	0,00	0,00	
	2	2	2	2.01	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	%	12,00	-	0,00	-	90,00	3.800.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	90,00	208.950,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat , upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit																				
2	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase bumil anemi, persentase bumil kek, persentase bumil yang memiliki calon pendonor, Persentasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC terpadu minimal 4 kali	%					39	48.980,71	83.926,90	21,32	43.124,90	54,67	88,04	51,38	21,32	43.125	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	%	0,00	-	0,00	-	30,00	500.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	%	0,00	-	0,00	-	30,00	500.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas	%	0,00	-	0,00	-	76,00	1.863.393,95	313.118,00	4,35	11.900,00	5,73	0,64	3,80	4,35	11.900	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	%	0,00	-	0,00	-	30,00	500.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	%					62	29.081,33	11.391,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	75,00	31.499,86	24.682,00	68,63	21.027,00	91,50	66,75	85,19	68,63	21.027	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan anak sekolah kelas 1 dan kelas 7	%	0,00	-	0,00	-	92,00	19.426,58	8.476,70	69,00	4.568,00	75,00	23,51	53,89	69,00	4.568	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkti	%					30,00	31.499,57	19.954,00	10,00	3.979,00	33,33	12,63	19,94	10,00	3.979	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	0,00	-	0,00	-	55,00	11.821,43	9.375,52	45,83	6.094,20	83,33	51,55	65,00	45,83	6.094	0,00	0,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%					20,00	120.998,53	19.999,88		3.979,00										
2	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	0,00	-	0,00	-	20,00	30.210,62	19.983,50	10,00	3.904,00	50,00	12,92	19,54	10,00	3.904	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan pelayanan kesehatan DM sesuai standar	%					75	30.210,62	19.999,70	66,25	11.889,00	88,33	39,35	59,45	66,25	11.889	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	75,00	41.999,90	19.999,80	71,25	16.604,80	95,00	39,54	83,02	71,25	16.605	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB Paru	%	0,00	-	0,00	-	80,00	42.000,00	99.883,71	80,00	99.081,10	100,00	235,91	99,20	80,00	99.081	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS	%	0,00	-	0,00	-	92,00	24.232,52	9.375,72	23,00	2.174,00	25,00	8,97	23,19	23,00	2.174	0,00	0,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase tanggap darurat pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana cakupan pemberian asi eksklusif	%					100,00	30.000,00	68.882,30	93,04	45.435,30	93,04	151,45	65,96	93,04	45.435	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	cakupan pemberian asi eksklusif	%	0,00	-	0,00	-	50,00	588.859,47	1.086.725,70	45,24	862.247,18	90,48	146,43	79,34	45,24	862.247	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	%	0,00	-	0,00	-	100,00	26.249,76	18.699,99	90,29	16.354,00	90,29	62,30	87,45	90,29	16.354	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	%	0,00	-	0,00	-	10,00	222.310,05	176.399,91	9,40	154.228,26	93,98	69,38	87,43	9,40	154.228	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase keluarga/ rumah tangga ber PHBS	%	0,00	-	0,00	-	61,00	99.749,85	18.751,86	60,99	18.449,37	99,99	18,50	98,39	60,99	18.449	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentaase kelompok yang memanfaatkan TOGA dan akupresure	%	0,00	-	0,00	-	50,00	68.960,77	9.375,93	50,00	9.374,93	100,00	13,59	99,99	50,00	9.375	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentasi peringatan dini KLB yang di respon	%	0,00	-	0,00	-	92,00	35.553,13	5.592,00	91,51	4.416,00	99,47	12,42	78,97	91,51	4.416	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengendalian penyakit jiwa bagi ODMK	%	0,00	-	0,00	-	20,00	29.586,34	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	%	0,00	-	0,00	-	30,00	77.700,16	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	persentase kelompok yang melaksanakan UKGS dan UKGM	%	0,00	-	0,00	-	60,00	56.886,40	69.950,00	50,00	50.717,00	83,33	89,15	72,50	50,00	50.717	0,00	0,00			
2	2	2	2.02	22	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentasi upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	19.500,00	54.990,00	0,00	6.272,00	0,00	32,16	11,41	0,00	6.272	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	2	2	2.02	23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	367.499,55	-	72,63	45.932,00	87,50	12,50	0,00	72,63	45.932	0,00	0,00	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasi Universal Health Coverage - jaminan kesehatan masyarakat (UHC- JKM)	%	0,00	-	0,00	-	80,00	61.736.532,40	63.101.631,01	64,48	50.782.674,10	80,60	82,26	80,48	64,48	50.782.674	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	25	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentasi penemuan kasus penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan sekolah	%					30	36.749,48	4.999,83	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentasi peringatan dini KLB yang di respon	%	0,00	-	0,00	-	92,00	20.033,77	5.460,00	88,94	4.998,00	96,67	24,95	91,54	88,94	4.998	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	27	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase pokja desa/ kelurahan sehat yang aktif	%	0,00	-	0,00	-	71,00	236.250,27	100.000,23	70,64	84.525,05	99,49	35,78	84,52	70,64	84.525	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas	%					100	16.789.296,25	17.239.475,72	61,20	10.547.292,28	61,20	62,82	61,18	61,20	10.547.292	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	7.500.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase penerapan manajemen puskesmas sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	80,00	25.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang terakreditasi utama	%					63	1.349.545,94	570.803,93	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase pemberian imunisasi dasar lengkap	%	0,00	-	0,00	-	95,00	535.499,84	26.399,92	90,25	18.483,20	95,00	3,45	70,01	90,25	18.483	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	33	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase penemuan kasus new emerging disease (COVID-19)	%	0,00	-	0,00	-	2,00	36.749,69	10.976,00	1,50	7.217,00	75,00	19,64	65,75	1,50	7.217	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	500.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	persentase respon cepat layanan darurat (PSC)	%	0,00	-	0,00	-	2,00	368.178,90	217.282,98	2,00	210.235,80	100,00	57,10	96,76	2,00	210.236	0,00	0,00	
2	2	2	2.02	35	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)																		
2	2	2	2.03		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT	%					100,00	711.254,29	4.225,21	100,00	4.205,21	100,00	0,59	99,53	100,00	4.205	0,00	0,00	
2	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	800.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	250.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT	%	0,00	-	0,00	-	50,00	48.265,95	53.519,91	50,00	53.519,91	100,00	110,89	100,00	50,00	53.520	0,00	0,00	
2	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	83,00	380.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT	%	0,00	-	0,00	-	50,00	5.000.000,00	250.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	2	2.03	3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan																		
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pengelolaan rumah sakit dan faskes lainnya sesuai standar	puskesmas	0,00	-	0,00	-	20,00	15.995,60	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat/indeks kepuasan layanan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	339.706,57	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	terlaksananya pelayanan rujukan kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	339.706,57	139.554,39	88,33	117.391,30	88,33	34,56	84,12	88,33	117.391	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	73,85	71,37	63,90		86.236.115	15,83	0,00	
Predikat Kinerja																	S	S	R			SR	SR	
2	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar																		
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar																		
2	2	3	2.02																					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	85,00	11.767,98	9.375,83	85,00	8.757,80	100,00	74,42	93,41	85,00	8.758	0,00	0,00			
2	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	85,00	4.053.491,50	2.908.424,81	49,30	1.578.274,81	58,00	38,94	54,27	49,30	1.578.275	0,00	0,00			
2	2	3	2.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	85,00	23.904,20	14.999,90	85,00	14.709,87	100,00	61,54	98,07	85,00	14.710	0,00	0,00			
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi																				
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase praktik tenaga kesehatan yang dibina dan di awasi sesuai standar	%					40,00	10.500,00													
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	%					80,00	12.500,00													
2	2	3	2.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya																				
2	2	3	2.02	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	75,00	311.716,41	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	86,00	58,30	81,91			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	T	R	T			SR	SR			
2	2	4	0.00		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar																				
2	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin																				
2	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan)	%	0,00	-	0,00	-	60,00	20.999,78	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan)	%	0,00	-	0,00	-	80,00	21.471,03	38.959,90	80,00	38.902,90	100,00	181,19	99,85	80,00	38.903	0,00	0,00			
2	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangea	Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik																				
2	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pengawasan toko alkes dan optic di kabupaten bulukumba	%	0,00	-	0,00	-	50,00	24.611,97		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik																				
2	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	0,00	-	0,00	-	50,00	122.559,08	121.390,10	46,91	103.436,10	93,81	84,40	0,00	46,91	103.436	0,00	0,00			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
												Rp (000)	Rp (000)											
2	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik																			
2	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi sarana air minum yang di periksa sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	94,00	15.749,83	13.015,99	92,29	12.722,90	98,18	80,78	97,75	92,29	12.723	0,00	0,00	
2	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker																			
2	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	0,00	-	0,00	-	44,00	7.348,63	7.342,50	44,00	5.393,00	100,00	73,39	73,45	44,00	5.393	0,00	0,00	
2	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT																			
2	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentasi pangan IRT yang memenuhi syarat	%					100	77.986,56	292.287,50	100,00	268.241,80	100,00	343,96	91,77	100,00	268.242	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,40	152,74	72,56			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	S			SR	SR		
2	2	5	0.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Ber PHBS persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan																			
2	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentasi desa kelurahan panrita siaga aktif purnama atau mandiri	desa/kel				136	560.025,62	79.890,02	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS																		
2	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk ber PHBS	%	0,00	-	0,00	-	39,00	141.750,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri																		
2	2	5	2.02	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentasi posyandu purnama dan mandiri	%	0,00	-	0,00	-	20,00	75.850,00	9.999,90	20,00	9.909,00	100,00	13,06	99,09	20,00	9.909	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																50,00	6,53	49,55			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																SR	SR	SR			SR	SR		
2	2	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan) % Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu																			
2	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumrn	0,00	-	0,00	-	3,00	35.444,07	12.299,76	3,00	12.299,76	100,00	34,70	100,00	3,00	12.300	0,00	0,00	
2	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumrn	0,00	-	0,00	-	1,00	5.909,81	4.999,98	0,75	2.310,00	75,00	39,09	46,20	0,75	2.310	0,00	0,00	
2	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumrn				10	38.321,54	1.378,41	10,00	1.378,20	100,00	3,60	99,98	10,00	1.378	0,00	0,00		
2	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	bulan	0,00	-	0,00	-	12	47.849.404,26	52.285.789,74	12,00	50.989.724,29	100,00	106,56	97,52	12,00	50.989.724	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	bulan	0,00	-	0,00	-	12	21.965.757,00	24.134.979,40	3,00	22.572.537,39	25,00	102,76	93,53	3,00	22.572.537	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	0,00	-	0,00	-	100,00	642.468,75	563.579,97	100,00	538.198,35	100,00	83,77	95,50	100,00	538.198	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi; Jumlah jenis penatausahaan,	bulan					12	97.650,00	90.000,00	12,00	90.000,00	100,00	92,17	100,00	12,00	90.000	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	Laporan	0,00	-	0,00	-	1	7.349,30	9.155,46	1,00	9.155,40	100,00	124,58	100,00	1,00	9.155	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan Dinas	Dokumrn	0,00	-	0,00	-	1	1.108,80	1.089,00	1,00	1.089,00	100,00	98,21	100,00	1,00	1.089	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	Laporan					18	13.311,46	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.02	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Laporan	0,00	-	0,00	-	4	8.312,22	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.04	1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya																		
2	2	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke kas Daerah	%					100	383.673,94	377.687,43	100,00	344.635,68	100,00	89,83	91,25	100,00	344.636	0,00	0,00	
2	2	1	2.05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar																		
2	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan adaministrasi kepegawaian	%	0,00	-	0,00	-	100	7.075,64	1.396,23	100,00	1.396,20	100,00	19,73	100,00	100,00	1.396	0,00	0,00	
2	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	bulan	0,00	-	0,00	-	12	10.596,60	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	bulan					10	10.279,06	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya																		
2	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada dinas kesehatan dan UPT	Paket	0,00	-	0,00	-	24	10.499,75	11.287,10	24,00	11.287,10	100,00	107,50	100,00	24,00	11.287	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan	Paket	0,00	-	0,00	-	1	24.854,66	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Paket	0,00	-	0,00	-	1	6.180,18	8.585,01	1,00	8.573,00	100,00	138,72	99,86	1,00	8.573	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Paket					1	43.663,05	38.028,65	1,00	38.010,84	100,00	87,05	99,95	1,00	38.011	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dinas	Paket	0,00	-	0,00	-	1	8.303,40	6.340,95	1,00	6.340,50	100,00	76,36	99,99	1,00	6.341	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	terpenuhinya kebutuhan makan minum tamu dinas kesehatan	Paket					1	7.836,36	10.559,00	1,00	9.479,00	100,00	120,96	89,77	1,00	9.479	0,00	0,00	
2	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan					40	122.866,44	80.714,00	40,00	80.713,919	100,00	65,69	100,00	40,00	80.714	0,00	0,00	
2	2	1	2.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan puskk keliling serta ambulans																		
2	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan dan operasional	unit	0,00	-	0,00	-	3	986.477,27	490.000,00	3,00	489.150,90	100,00	49,59	99,83	3,00	489.151	0,00	0,00	
2	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan																		
2	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sarana telpon air dan listrik dilingkup dinas kesehatan dan UPT	Paket	0,00	-	0,00	-	24	586.024,98	319.255,98	23,80	312.222,35	99,17	53,28	97,80	23,80	312.222	0,00	0,00	
2	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dinas kesehatan	Paket	0,00	-	0,00	-	1	8.704,50	8.704,30	1,00	8.704,30	100,00	100,00	100,00	1,00	8.704	0,00	0,00	
2	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa kebersihan dan administrasi kantor dinas kesehstan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12	604.642,50	579.000,00	12,00	424.950,00	100,00	70,28	73,39	12,00	424.950	0,00	0,00	
2	2	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan kepala dinas kesehatan sehingga tetap layak pakai	%	0,00	-	0,00	-	100	12.075,00	13.988,78	100,00	9.898,75	100,00	81,98	70,76	100,00	9.899	0,00	0,00	
2	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan sehingga tetap layak pakai	%	0,00	-	0,00	-	100	161.534,57	165.703,25	100,00	164.978,02	100,00	102,13	99,56	100,00	164.978	0,00	0,00	
2	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD															0,00	-	0,00	0,00	
2	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	86.000.000,00	100.000.000,00	0,86	85.253.962,08	86,00	99,13	85,25	0,86	85.253.962	0,00	0,00	
2	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	40.262,96	74.957,53	0,72	46.624,95	71,67	115,80	62,20	0,72	46.625	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	94,27	82,54	92,09			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	T	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													356.180.278,5	295.748.448,0		249.825.453,071								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																	80,50	74,30	72,00			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																	T	S	S			SR	SR	
2	3	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
2	3	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																		
2	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan																		
2	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA, laporan realiasi fisik dan keuangan, laporan evaluasi, laporan kinerja serta laporan keuangan Perangkat Daerah	%	0,00	-	0,00	-	100,00	221.594,42	77.394,00	98,82	76.353,00	98,82	34,46	98,65	98,82	76.353	0,00	0,00	
2	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	%	0,00	-	0,00	-	100,00	134.099,89	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				Ket	
								K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)		K	Rp (000)		
2	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Daerah																														
2	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	7.888.730,03	7.513.364,42	12,00	7.145.526,48	100,00	90,58	95,10	12,00	7.145.526	0,00		0,00										
2	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	160.000,00	424.460,00	12,00	423.070,00	100,00	264,42	99,67	12,00	423.070	0,00		0,00										
2	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	190.593,20	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00									
2	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	0,00		-	0,00		-	1,00	20.035,00	8.253,30	1,00	8.253,20	100,00	41,19	100,00	1,00	8.253	0,00		0,00										
2	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan																														
2	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Latpim III	orang						2	147.295,00	20.230,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan ASN DPUPTR	orang	0,00		-	0,00		-	20,00	196.074,89	14.760,00	20,00	12.024,75	100,00	6,13	81,47	20,00	12.025	0,00		0,00										
2	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara																														
2	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik kantor	item	0,00		-	0,00		-	8,00	10.953,35	3.410,00	8,00	3.410,00	100,00	31,13	100,00	8,00	3.410	0,00		0,00										
2	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum		0,00		-	0,00		-	1,00	166.017,54	10.224,00	1,00	10.224,00	100,00	6,16	100,00	1,00	10.224	0,00		0,00										
2	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan						12,00	48.906,00	9.000,00	12,00	9.000,00	100,00	18,40	100,00	12,00	9.000	0,00		0,00											
2	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab sedang/Berat Gedung kantor	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	6.523,76	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	292.298,28	161.450,00	12,00	156.206,40	100,00	53,44	96,75	12,00	156.206	0,00		0,00										
2	3	1	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																														
2	3	1	2.08	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	40.194,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.08	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan						12,00	20.125,20	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara																														
2	3	1	2.08	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia	unit	0,00		-	0,00		-	1,00	364.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.08	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang tersedia	unit						20,00	26.670,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.08	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	unit						3,00	50.116,70	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00										
2	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara																														
2	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya wifi dan listrik	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	192.057,90	126.412,20	12,00	107.744,08	100,00	56,10	85,23	12,00	107.744	0,00		0,00										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan	kegiatan					1,00	70.702,54	39.630,00	1,00	27.130,00	100,00	38,37	68,46	1,00	27.130	0,00	0,00			
2	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara																				
2	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Terpeliharanya mobil jabatan	%					100,00	147.291,57	51.670,00	100,00	19.560,35	100,00	13,28	37,86	100,00	19.560	0,00	0,00			
2	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Trbayarnya STNK Kendaraan Dinas/Operasional dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	%	0,00	-	0,00	-	100,00	124.466,85	118.720,00	91,67	83.767,32	91,67	67,30	70,56	91,67	83.767	0,00	0,00			
2	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	33.436,76	115.000,00	100,00	114.717,50	100,00	343,09	99,75	100,00	114.718	0,00	0,00			
2	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangun gedung kantor	%					100,00	31.830,00	13.200,00	80,00	10.360,00	80,00	32,55	78,48	80,00	10.360	0,00	0,00			
2	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan pendukung gedung kantor	%					100,00	5.368,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	91,44	70,81	80,89			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	S	T			SR	SR			
3	0.0.0	2	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya penanganan terhadap bangunan SDA berupa Pengendali Banjir, Saluran pembawa, Irigasi, Embung serta Normalisasi Saluran Sungai																				
3	0.0.0	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi																				
3	0.0.0	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan pola rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	%	448,00	-	0,00	-	100,00	519.633,86	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Embung dan bangunan penampung air lainnya	%	448,00	-	0,00	-	100,00	390.984,22	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan Tanggul sungai	%	448,00	-	0,00	-	100,00	250.000,00	972.537,55	100,00	850.904,45	100,00	340,36	87,49	100,00	850.904	22,32	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	%	0,00	-	0,00	-	100,00	207.182,80	343.572,66	100,00	272.635,00	100,00	131,59	79,35	100,00	272.635	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Perentase terlaksananya kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	%	448,00	-	0,00	-	100,00	16.800.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Perentase terlaksananya kegiatan	%	448,00	-	0,00	-	100,00	1.258.100,70	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Perentase terlaksananya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	%	0,00	-	0,00	-	100,00	1.017.224,66	916.096,52	100,00	870.514,47	100,00	85,58	95,02	100,00	870.514	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,00	-	0,00	-	100,00	178.199,70	229.690,00	100,00	110.492,00	100,00	62,00	48,10	100,00	110.492	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Trbgannya & Trplihnya Embng Penampung Air Lainnya Kwsan Kritis daerah Tangkapan sungai,danau serta keg reboisasi & revegetasi trlksananya Pemb pengend banjir trlksananya pmbersihn pngrukan sungai,terlaksananya pemb prasarana pngman pantai tanggul pmcah ombak terssnya DED lar Irigasi	%					100,00	32.999,79	23.820,00	100,00	7.235,80	100,00	21,93	30,38	100,00	7.236	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mempertahankan Fungsi dan Kondisi serta Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi																				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
3	0.0.0	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Perentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	1.878.143,56	1.806.010,00	100,00	869.414,60	100,00	46,29	48,14	100,00	869.415	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Perentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	%					100,00	7.457.607,69	6.601.488,47	100,00	5.385.096,60	100,00	72,21	81,57	100,00	5.385.097	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase terlaksananaya operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	1.000.000,00	968.226,00	100,00	968.226,00	100,00	96,82	100,00	100,00	968.226	0,00	0,00			
3	0.0.0	2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	%					100,00	103.454,96	40.420,00	100,00	34.191,00	100,00	33,05	84,59	100,00	34.191	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	98,87	72,74			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	S			SR	SR			
3	0.1.0	3	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih																				
3	0.1.0	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																				
3	0.1.0	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perkotaan	Unit	0,00	-	0,00	-	90,00	9.250.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	0.1.0	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perdesaan	Unit	0,00	-	0,00	-	90,00	5.435.917,01		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	0.1.0	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	9.000.000,00	542.820,00	1,00	489.750,50	100,00	5,44	0,00	1,00	489.751	0,00	0,00			
3	0.1.0	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	5.502.622,00	8.237.038,44	1,00	5.289.492,62	100,00	96,13	64,22	1,00	5.289.493	0,00	0,00			
3	0.1.0	3	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Derah dan Kelompok Maskavarakat (BOP PAMSIMAS)	SR	0,00	-	0,00	-	150,00	750.000,00	487.780,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	66,67	33,86	21,41			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	S	SR	SR			SR	SR			
3	0.1.0	5	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																				
3	0.1.0	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
3	0.1.0	5	2.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada kawasan perkotaan	%					80,35	1.691.087,00	4.829.108,00	80,35	4.494.748,00	100,00	265,79	93,08	80,35	4.494.748	0,00	0,00			
3	0.1.0	5	2.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	umlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan	Unit					2,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	0.1.0	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman	Unit					2,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket					
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K		Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
3	0.1.4	5	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman	Unit					5,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	265,79	93,08			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR					
3	5.0.4	6	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik																						
3	5.0.4	6	2.01			Penjang Talud yang terbangun																						
3	5.0.4	6	2.01	1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana sistem drainase	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
3	5.0.4	6	2.01	5		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang terbangun	m	0,00	-	0,00	-	3000,00	12.872.250,01	17.307.756,04	1599,90	8.697.384,85	53,33	67,57	50,25	#####	8.697.385	0,00	0,00				
3	5.0.4	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang terbangun	m	0,00	-	0,00	-	200,00	1.100.000,00	1.046.204,85	200,00	594.295,00	100,00	54,03	56,80	200,00	594.295	0,00	0,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	76,67	60,80	53,53			22,32	0,00					
Predikat Kinerja																	T	R	R			SR	SR					
3	5.0.4	6	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik																						
3	5.0.4	6	2.01			Penjang Talud yang terbangun																						
3	5.0.4	6	2.01	1		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	paket	0,00	-	0,00	-	195,00	35.369.872,99	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00			44,64	0,00					
Predikat Kinerja																	SR	SR	SR			SR	SR					
3	0.1.4	8	0.00		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Rumah yang ber IMB																						
3	0.1.4	8	2.01			Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota																						
3	0.1.4	8	2.01	1		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit (BOP IMB)	bulan					12,00	213.779,40	79.760,00	12,00	77.983,95	100,00	36,48	97,77	12,00	77.984	0,00	0,00				
3	0.1.4	8	2.01	2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun	Unit	0,00	-	0,00	-	10,00	51.846.240,00	41.373.945,34	9,00	32.326.328,99	90,00	62,35	78,13	9,00	32.326.329	0,00	0,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	95,00	49,41	87,95			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																	ST	SR	T			SR	SR					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
3	5.0.4	10	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik																		
3	5.0.4	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Leger jalan																		
3	5.0.4	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	450.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen survey kondisi jalan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	850.000,00	362.040,00	2,00	303.740,00	100,00	35,73	83,90	2,00	303.740	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun	KM	0,00	-	0,00	-	13,00	22.275.011,74	3.806.688,22	12,00	3.340.281,56	92,31	15,00	87,75	12,00	3.340.282	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	KM	0,00	-	0,00	-	8,00	12.475.494,00	19.923.472,79	7,27	17.979.617,82	90,91	144,12	90,24	7,27	17.979.618	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	0,00	-	0,00	-	7,00	10.955.000,00	7.019.241,64	6,30	5.686.142,02	90,00	51,90	81,01	6,30	5.686.142	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	KM	0,00	-	0,00	-	7,00	11.000.000,00	78.147.345,60	6,80	74.840.301,86	97,14	680,37	95,77	6,80	74.840.302	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	%	0,00	-	0,00	-	27,00	3.500.000,00	1.015.186,97	24,00	893.914,17	88,89	25,54	88,05	24,00	893.914	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Unit	0,00	-	0,00	-	10,00	6.773.662,39	459.370,00	5,00	221.882,50	50,00	3,28	48,30	5,00	221.883	0,00	0,00
3	5.0.4	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	Unit	0,00	-	0,00	-	3,00	1.800.000,00	860.775,00	3,00	613.650,00	100,00	34,09	71,29	3,00	613.650	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															88,66	123,75	80,79				0,00	0,00	
Predikat Kinerja															T	ST	T				SR	SR	
3	5.0.4	11	0.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan																		
3	5.0.4	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruk yang diberdayakan																		
3	5.0.4	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil yang tersedia,Jumlah tenaga trampil yang sertifikasi	orang	0,00	-	0,00	-	100,00	50.000,00	25.235,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3	5.0.4	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat dan bahan yang dibeli serta jumlah dok uji bahan dan material yang dihasilkan																		
3	5.0.4	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Terbelinya alat uji beton,Terbitnya dokumen uji material	%	0,00	-	0,00	-	61,00	47.000,00	74.946,30	53,68	65.654,00	88,00	139,69	87,60	53,68	65.654	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															44,00	34,92	43,80				0,00	0,00	
Predikat Kinerja															SR	SR	SR				SR	SR	
3	5.0.4	12	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio RTH per satuan luas luas wilayah perkotaan																		
3	5.0.4	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dok Kebijakan penataan ruang																		
3	5.0.4	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	tersedianya dokumen Kebijakan penataan ruang,Tersedianya persetujuan subtansi RTRW	%	0,00	-	0,00	-	100,00	377.697,00	96.262,00	100,00	56.084,62	100,00	14,85	58,26	100,00	56.085	0,00	0,00
3	5.0.4	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen Kebijakan penataan ruang,Tersedianya persetujuan subtansi RTRW																		
3	5.0.4	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan	kali					12	55.960,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3	5.0.4	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan	kali					12	41.960,00	32.486,00	12,00	29.926,19	100,00	71,32	92,12	12,00	29.926	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	43,08	75,19				0,00	0,00	
Predikat Kinerja															ST	SR	S				SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												245.446.466,37	206.336.501,28		173.577.235,634								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)															83,46	72,04	67,82				3,72	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)															T	S	S				SR	SR	
4	0.1.03.01.00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
4	0.1.4	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																		
4	0.1.4	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, SAKIP, LAKIP. Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, LPPD, Laporan Triwulan. Laporan Realisasi.																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD	K		Rp (000)	
													Rp (000)	Rp (000)					Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)
4	0.1.0	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	penyusunan Renja, Renstra, SAKIP, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Laporan SPM, Laporan SPIP, LPPD dan LKPj, Laporan Realisasi serta Program Kerja dan Money OPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	30,00	58.439,284	41.254,00	30,00	41.019,20	100,00	70,19	99,43	30,00	41.019	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKASKPD, DPA-SKPD, RKA-SKPD Perubahan, dan DPA-SKPD Perubahan	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	64.909,400	38.050,11	4,00	36.722,00	100,00	56,57	96,51	4,00	36.722	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun																			
4	0.1.0	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12	4.061.079,919	3.181.315,66	9,24	2.388.440,36	77,00	58,81	75,08	9,24	2.388.440	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan ASN yang Terbavarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12	268.949,250	145.170,00	12,00	132.240,00	100,00	49,17	91,09	12,00	132.240	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12	189.630,000	103.740,00	12,00	100.560,00	100,00	53,03	96,93	12,00	100.560	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1	5.448,800	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis																			
4	0.1.0	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Latpim	orang					3	52.386,000	22.125,00	3,00	22.125,00	100,00	42,23	100,00	3,00	22.125	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	orang					3	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum																			
4	0.1.0	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.968,850	5.055,50	12,00	5.045,25	100,00	84,53	99,80	12,00	5.045	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	417.950,000	49.761,10	7,20	16.960,00	60,00	4,06	34,08	7,20	16.960	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	26.000,000	4.998,65	12,00	4.984,40	100,00	19,17	99,71	12,00	4.984	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan dan Minum Tamu Serta Rapat yang Tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	100.000,000	64.734,00	12,00	64.604,10	100,00	64,60	99,80	12,00	64.604	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Penggandaan yang Tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	11.348,410	10.000,32	12,00	9.975,00	100,00	87,90	99,75	12,00	9.975	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Terlaksananakan	kali	0,00	-	0,00	-	32,00	200.000,000	96.166,00	32,00	95.954,85	100,00	47,98	99,78	32,00	95.955	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum																			
4	0.1.0	1	2.08	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Unit	0,00	-	0,00	-	1,00	513.850,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.08	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	500.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum																			
4	0.1.0	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	71.700,000	71.700,00	12,00	46.190,13	100,00	64,42	64,42	12,00	46.190	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor,Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	24.000,000	24.000,00	11,04	22.000,00	92,00	91,67	91,67	11,04	22.000	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum																			
4	0.1.0	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	70.049,150	41.444,00	12,00	41.192,73	100,00	58,81	99,39	12,00	41.193	0,00	0,00		
4	0.1.0	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	24.200,000	24.200,00	12,00	23.640,00	100,00	97,69	97,69	12,00	23.640	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	95,56	59,43	90,32			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	R	T			SR	SR		
4	0.1.0	2	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh																			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
4	0.1.0	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
4	0.1.0	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi	Dokumen				1,00	99.299,750	98.049,98	1,00	91.509,75	100,00	92,16	93,33	1,00	91.510	0,00	0,00		
4	0.1.0	2	2.01		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
4	0.1.0	2	2.01	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhab	Dokumen				1,00	5.000,000	142.690,40	0,33	3.839,90	33,33	76,80	2,69	0,33	3.840	0,00	0,00		
4	0.1.0	2	2.01	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlad Dokumen/DED rumah korban bencana dan yang terkena relokasi	Dokumen				1,00	5.000,000	45.060,00	0,75	7.750,05	75,00	155,00	17,20	0,75	7.750	0,00	0,00		
4	0.1.0	2	2.01	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah Bagi Korban Bencana yang Terbangun	Dokumen				1,00	5.000,000	140.000,80	0,50	3.600,00	50,00	72,00	2,57	0,50	3.600	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																64,58	98,99	28,95			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																R	ST	SR			SR	SR		
4	0.1.0	3	0.00		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh																		
4	0.1.0	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh																		
4	0.1.0	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	99.008,800	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	0.1.0	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	48.928,950	587.020,00	1,00	583.109,10	100,00	1191,75	99,33	1,00	583.109	0,00	0,00	
4	0.1.0	3	2.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	0.1.0	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani																		
4	0.1.0	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Database Rumah Layah huni,Tersedianya Rumah Layak huni untuk pencegahan tumbuh kembang permukiman Kumuh(100 Unit)	Unit	0,00	-	0,00	-	100,00	1.834.570,000	2.489.711,20	87,50	2.394.593,20	87,50	130,53	96,18	87,50	2.394.593	0,00	0,00	
4	0.1.0	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh	paket	0,00	-	0,00	-	25,00	11.712.180,000	10.000.613,79	24,44	8.500.627,43	97,75	72,58	85,00	24,44	8.500.627	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																95,08	464,95	93,50			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR		
4	0.1.0	5	0.00		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum																		
4	0.1.0	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan																		
4	0.1.0	5	2.01	2	Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Tersedianya Prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	364.797,000	297.797,10	11,73	261.612,30	97,75	71,71	87,85	11,73	261.612	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																97,75	71,71	87,85			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	S	T			SR	SR		
												20.866.693,563	17.724.657,61		14.898.294,747									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																88,24	173,77	75,16			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																T	ST	S			SR	SR		
1	5	0.0.	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
	1	5	0.0.	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																			
	1	5	0.0.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	1	5	0.0.	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja,Renja Perubahan,Renstra RKA, DPA dan Honorarium Operator	bulan					12	35.680,000	40.822,000	12,00	37.821,94	100,00	106,00	92,65	12,00	37.822	0,00	0,00		
	1	5	0.0.	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV dan Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan	dokumen	0,00	-	0,00	-	4	16.104,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan adanya Transparansi dan AKuntabilitas Satpol.PP dan Damkar Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrtasi Umum Satpol.PP dan Damkar																			
	1	5	0.0.	2.02																					
	1	5	0.0.	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan					12	6.282.207,785	4.672.432,966	12,00	4.243.413,80	100,00	67,55	90,82	12,00	4.243.414	0,00	0,00		
	5	0.0.	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.423.768,283	1.226.201,654	12,00	1.078.643,15	100,00	75,76	87,97	12,00	1.078.643	0,00	0,00	
	5	0.0.	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan pengujian verufikasi SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	168.220,000	147.710,000	12,00	144.810,00	100,00	86,08	98,04	12,00	144.810	0,00	0,00	
	1	5	0.0.	2.02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12	102.800,000	68.280,000	12,00	65.939,00	100,00	64,14	96,57	12,00	65.939	0,00	0,00	
	1	5	0.0.	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1	4.923,000	4.921,000	1,00	4.921,00	100,00	99,96	100,00	1,00	4.921	0,00	0,00	
					Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan adanya Transparansi dan AKuntabilitas Satpol.PP dan Damkar Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrtasi Umum Satpol.PP dan Damkar																			
	1	5	0.0.	2.02																					
	1	5	0.0.	2.02		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan					12	11.460,000	11.460,000	12,00	11.460,00	100,00	100,00	100,00	12,00	11.460	0,00	0,00	
	5	0.0.	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnva																		
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan bencana,Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang					5	22.990,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrtasi Umum Satpol.PP dan Damkar																		
	1	5	1	2.06																					
	5	0.0.	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	3.496,049	971,250	1,00	971,25	100,00	27,78	100,00	1,00	971	0,00	0,00	
	5	0.0.	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu,Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	58.242,750	31.137,650	12,00	31.137,65	100,00	53,46	100,00	12,00	31.138	0,00	0,00	
	1	5	1	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Satpol.PP dan Damkar	Bulan	0,00	-	0,00	-	12	28.495,600	28.913,600	12,00	28.912,20	100,00	101,46	100,00	12,00	28.912	0,00	0,00	
	1	5	1	2.06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Satpol.PP dan Damkar	Bulan					12	9.498,730	9.525,010	12,00	9.524,81	100,00	100,27	100,00	12,00	9.525	0,00	0,00	
	1	5	1	2.06		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedainya makan minum tamu Satpol.PP dan Damkar	Bulan	0,00	-	0,00	-	12	3.386,000	3.317,100	12,00	3.317,10	100,00	97,97	100,00	12,00	3.317	0,00	0,00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	180.866,000	64.573,000	12,00	64.155,45	100,00	35,47	99,35	12,00	64.155	0,00	0,00	
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi tingkat Provinsi dan Pusat	Bulan	0,00	-	0,00	-	12	77.900,000	43.540,000	12,00	43.540,00	100,00	55,89	100,00	12,00	43.540	0,00	0,00	
	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrtasi Umum Satpol.PP dan Damkar																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
	1	5	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	unit	0,00		0,00	3	31.538,430	9.839,500	3,00	9.839,50	100,00	31,20	100,00	3,00	9.840	0,00				
	1	5	1	2.07		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Satpol.PP dan Damkar Kursi dan Meja	unit	0,00	-	0,00	-	7	11.979,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	5	0.00	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit				3	27.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Satpol.PP dan Damkar	bulan				12	47.613,600	43.457,760	12,00	41.308,18	100,00	86,76	95,05	12,00	41.308	0,00	0,00			
	5	0.00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan				12,00	32.688,000	32.328,000	12,00	25.096,51	100,00	76,78	77,63	12,00	25.097	0,00	0,00			
	5	0.00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya barang dan jasa kebersihan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	32.659,250	20.659,250	12,00	20.659,25	100,00	63,26	100,00	12,00	20.659	0,00	0,00		
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan dan alat kebersihan dan bahan pembersih serta Honoaraium PPTK dan Staf PPTK	bulan	0,00	-	0,00	-	12	11.394,000	1.845,600	12,00	1.845,60	100,00	16,20	100,00	12,00	1.846	0,00	0,00		
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Pelayanan Adminsitasi Umum Satpol.PP dan Damkar																			
	1	5	1	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit				1	10.000,000	7.500,000	1,00	7.500,00	100,00	75,00	100,00	1,00	7.500	0,00	0,00			
	1	5	1	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasinal dan terbayarnya STNK	unit	0,00	-	0,00	-	12	64.250,000	295.310,000	12,00	295.304,50	100,00	459,62	100,00	12,00	295.305	0,00	0,00		
	5	0.00	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	0,00	-	0,00	-	13,00	97.080,000	49.930,000	13,00	49.433,50	100,00	50,92	99,01	13,00	49.434	0,00	0,00		
	5	0.00	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	4.990,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	5	0.00	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	5	0.00	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	3.660,000	5.280,000	1,00	5.280,00	100,00	144,26	100,00	1,00	5.280	0,00	0,00		
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset tetap Satpol.PP dan Damkar Printer,AC dan Komputer/Laptop	unit				6	3.450,000	4.790,000	6,00	4.790,00	100,00	138,84	100,00	6,00	4.790	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	92,28	97,38			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR			
	1	5	0.00	0.00		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
	1	5	0.00	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya situasi yang aman dan tentram serta kondusif																			
	1	5	0.00	2.01		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi yang kondusif atas gangguan ketertiban umum, terbayarnya Gaji Non PNS Anggota Satpol PP dan Honorarium PPTK dan Sataf PPTK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.565.720,000	2.655.660,000	12,00	2.646.660,00	100,00	103,15	99,66	12,00	2.646.660	0,00	0,00		
	1	5	0.00	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya sinkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui HUT Satpol PP tingkat Provinsi	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	53.920,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	1	5	0.00	2.01		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Adanya singkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui HUT Satpol PP tingkat Provinsi	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
1	5	0.04	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya masyarakat yang taat aturan kawasan tanpa rokok																			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Operasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan makan minum Operasi Penegakan Perda Lainnya, Operasi Trantibum, dan Pengamanan Lainnya.	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	54.816,000	52.758,110	12,00	50.924,30	100,00	92,90	96,52	12,00	50.924	0,00	0,00		
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Operasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan makan minum Operasi Penegakan Perda Lainnya, Operasi Trantibum, dan Pengamanan Lainnya.	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	383.724,570	407.481,300	12,00	401.814,65	100,00	104,71	98,61	12,00	401.815	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	100,26	98,26			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
5	0.004	3	0.00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah aparaturnya yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)																			
5	0.004	3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana																			
5	0.004	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Fasilitasi Petugas Reviter dan sunami	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	80.000,000	29.700,000	12,00	28.779,50	100,00	35,97	96,90	12,00	28.780	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana																			
5	5.004	3	2.02	1	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	fasilitasi petugas reviter dan sunami	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	427.500,000	283.160,000	9,00	282.987,00	75,00	66,20	99,94	9,00	282.987	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	15.000,000	69.478,500	8,44	58.605,75	84,35	390,71	84,35	8,44	58.606	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana	set	0,00	-	0,00	-	8,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	327.321,288	14.031.144,000	12,00	14.027.920,07	100,00	4285,67	99,98	12,00	14.027.920	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC dan Relawan Bencana						-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	0.004	3	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rasio ketersediaan peralatan dan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana																			
5	0.004	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pos siaga dan tanggap darurat bencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	678.917,700	431.936,000	12,00	421.969,25	100,00	62,15	97,69	12,00	421.969	0,00	0,00	
5	0.004	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	40.684,500	18.781,000	12,00	17.893,00	100,00	43,98	95,27	12,00	17.893	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	93,23	814,11	95,69			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
1	5	0.04	0.00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
1	5	0.0.	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang siap Pakai Terpenuhinya pelayanan pencegahan, pengendalian kebakaran																		
1	5	0.0.	2.01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaskanayan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dan tersedianya makan minum Posko Damkar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	698.610,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1	5	1.0.	2.01		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terakomodirnya penanganan kebakaran dalam daerah/kabupaten/kota serta terbayarnya Gaji Non PNS Petugas Pemadam Kebakaran dan Tersedianya Honor PPTK/Staf PPTK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.893.320,000	3.213.660,000	12,00	3.209.160,00	100,00	110,92	99,86	12,00	3.209.160	0,00	0,00	
1	5	0.0.	2.01		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	buah	0,00	-	0,00	-	20,00	45.870,000	45.670,000	17,50	39.030,00	87,50	85,09	85,46	17,50	39.030	0,00	0,00	
1	5	0.0.	2.01		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	%	0,00	-	0,00	-	100,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1	5	0.0.	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang siap Pakai																		
1	5	0.0.	2.02		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedainya sarana dan prasarana Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	225.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																93,75	98,00	92,66				0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	ST	ST				SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													17.343.744,54	28.064.174,25		27.415.367,905								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																96,74	276,16	96,00				0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																ST	ST	ST				SR	SR	
1	6	0.0.	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1	6	0.0.	0.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan																		
1	6	0.0.	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Potensi Pengetahuan dan Keterampilan sera Jumlah Kelembagaan Sosial yang mendapatkan bantuan UEP																		
1	6	0.0.	2.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif	bulan					12	277.846,000	154.779,900	12,00	154.779,55	100,00	55,71	100,00	12,00	154.780	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi	orang	0,00	-	0,00	-	100	40.000,000	38.500,000	100,00	38.500,00	100,00	96,25	100,00	100,00	38.500	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Bantuan UEPjumlah karang taruna yang mendapatkan peningkatan potensijumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Mendapatkan Bantuan UEP	orang					130	45.069,000	50.664,800	129,95	50.645,80	99,96	112,37	99,96	129,95	50.646	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.03		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home)	orang					10	12.000,000	7.740,000	9,67	7.441,94	96,67	62,02	96,15	9,67	7.442	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,16	81,59	99,03				0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	T	ST				SR	SR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
1	6	0.0	0.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)																			
1	6	0.0	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial																			
1	6	0.0	2.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Gelandangan Pengemis Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Permakanan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	60.000,000	270.116,100	12,00	269.433,10	100,00	449,06	99,75	12,00	269.433	0,00	0,00		
1	6	0.0	2.01	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian	orang	0,00	-	0,00	-	100,00	55.290,900	8.512,400	77,84	6.625,80	77,84	11,98	77,84	77,84	6.626	0,00	0,00		
1	6	4	2,01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Laansia Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Perbaikan rumahJumlah Lanjut Usia Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah Penyandang Disabilitas Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu (Kursi Roda Alat Bantu Dengar, Tonekat dll)	orang				130,00	75.000,000	198.283,900	129,97	198.121,40	99,98	264,16	99,92	129,97	198.121	0,00	0,00		
1	6	0.0	2.01		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pendamping Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan	orang	0,00	-	0,00	-	10,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	6	0.0	2.01		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial	bulan				12	30.000,000	9.850,000	12,00	9.814,75	100,00	32,72	99,64	12,00	9.815	0,00	0,00		
1	6	0.0	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tersedianya bantuan alat bantu usaha berupa bantuan UEP dan KUBE bagi PMKS (fakir miskin, korban perdagangan perempuan dan ABH, dan eks penyandang penyakit sosial) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																		
1	6	0.0	2.02		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah Wanita Rawan sosial yang Menerima Bantuan UEP	orang	0,00	-	0,00	-	10,00	45.000,000	49.950,000	10,00	49.937,55	99,98	110,97	99,98	10,00	49.938	0,00	0,00	
1	6	0.0	2.02		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Masyarakat anak berhadapan dengan hukum pelajar wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimbingan fisik mental spritual dan sosial teraklit penanggulangan napza	orang	0,00	-	0,00	-	15,00	30.000,000	14.999,500	12,39	12.393,00	82,62	41,31	82,62	12,39	12.393	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
1	6	0.0.	2.02		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial	bulan					12	32.000,000	14.631,000	12,00	13.923,30	100,00	43,51	95,16	12,00	13.923	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	82,55	119,21	81,86			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	T	ST	T			SR	SR	
1	6	0.0.	0.00		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan penanganan anak terlantar dan pembinaan panti asuhan																		
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah layanan penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar yang tersedia																		
1	6	0.0.	2.01																					
1	6	0.0.	2.01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak Terlantar yang Mendapatkan Penjangkauan dan Pemeliharaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.000,000	15.000,000	12,00	14.947,60	100,00	99,65	99,65	12,00	14.948	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang Valid dan Jumlah Pemberian Bantuan Sosial yang diberikan pada PMKS/PPKS										-								
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping dan Operator yang Memperoleh Biaya Operasional Pendataan dan Pengelolaan Data (validasi Data DTKSPMKSPBI BPJS Kesehatan) dan Pelabelan Penerimaan BantuanJumlah Pendamping dan Operator yang Mendapatkan Bimbingan Tehknis																		
1	6	0.0.	2.02				Paket	0,00	-	0,00	-	2,00	230.000,000	69.383,925	1,96	67.893,53	97,85	29,52	97,85	1,96	67.894	0,00	0,00	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)																		
1	6	5	2,02	3			Paket					3,00	110.000,000	289.767,000	2,98	288.065,10	99,41	261,88	99,41	2,98	288.065	0,00	0,00	
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)																		
1	6	5	2,02	4			paket					50,00	50.000,000	1.073.960,000	49,63	1.066.023,77	99,26	2132,05	99,26	49,63	1.066.024	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,13	630,77	99,04			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
1	6	0.0.	0.00		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)																		
1	6	0.0.	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial																		
1	6	0.0.	2.01		Penyediaan Makanan	Jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	30.000,000	30.000,000	12,00	29.729,50	100,00	99,10	99,10	12,00	29.730	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.01		Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang tanggap darurat dan pasca bencana alam Kab/Kota	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	6	0.0.	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	#REF!																		
1	6	0.0.	2.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	#REF!	bulan					12	620.307,000	342.620,000	12,00	325.122,70	100,00	52,41	94,89	12,00	325.123	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	75,76	97,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	S	ST			SR	SR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)
1	6	0.00	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara																		
					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dan Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Kejuangan Keperintisan dan KSN																		
1	6	0.00	2.01																				
1	6	0.00	2.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi	paket	0,00		0,00		1,00	75.000,000	110.000,000	1,00	109.900,00	100,00	146,53	99,91	1,00	109.900	0,00	0,00	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan Kejuangan Keperintisan dan KSNJumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan																		
1	6	0.00	2.01			paket	0,00		0,00		2,00	157.462,300	92.847,750	1,98	91.722,69	98,78	58,25	98,79	1,98	91.723	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,39	102,39	99,35			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR	
1	6	0.00	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)																		
					Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA, DPA Pokok dan Perubahan, RENJA, dan RENSTRA), Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SAKIP, Laporan Tahunan, LKJ, LKPJ, LKPD yang tersedia																		
1	6	0.00	2.01																				
1	6	0.00	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	8,00	57.981,000	46.020,000	7,94	45.689,13	99,29	78,80	99,28	7,94	45.689	0,00	0,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	20.701,000	15.601,000	2,00	15.586,00	99,90	75,29	99,90	2,00	15.586	0,00	0,00	
1	6	0.00	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan tahunan,LKJ , LKPJ, LPPD , dan lakip yang tersedia	dokumen	0,00	-	0,00	-	5,00	27.683,000	23.101,000	5,00	23.091,60	99,96	83,41	99,96	5,00	23.092	0,00	0,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan Keuangan dan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia																		
1	6	0.00	2.02																				
1	6	0.00	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	orang	0,00	-	0,00	-	23,00	2.532.126,558	1.951.905,118	21,90	1.858.750,49	95,23	73,41	95,23	21,90	1.858.750	0,00	0,00	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	0,00	-	0,00	-	12,00	120.000,000	136.600,000	11,76	134.580,00	98,00	112,15	98,52	11,76	134.580	0,00	0,00	
1	6	0.00	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Bulan					12	2.500,000	1.650,000	12,00	1.650,00	100,00	66,00	100,00	12,00	1.650	0,00	0,00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan serta Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang diimplementasikan.																		
1	6	0.00	2.05																				
1	6	0.00	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	50.000,000		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	6	0.00	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-Undangan yang diimplementasikan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	12.520,000	22.125,000	12,00	17.000,00	100,00	135,78	76,84	12,00	17.000	0,00	0,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Alat Listrik dan Penerangan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Makan-Minum Rapat dan Biaya Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang Tersedia																		
1	6	0.00	2.06																				
1	6	0.00	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	1.747,570	1.746,200	0,97	1.698,30	97,26	97,18	97,26	0,97	1.698	0,00	0,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	17.000,000	35.460,480	2,99	35.300,00	99,55	207,65	99,55	2,99	35.300	0,00	0,00	
1	6	0.00	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	1.000,000	1.000,000	1,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1.000	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
1	6	0.0.0	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik (Alat Tulis Kantor) yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	19.320,514	12.003,675	1,00	12.000,20	99,97	62,11	99,97	1,00	12.000	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang digandakan	Bulan					12	2.284,000	1.742,950	12,00	1.682,95	100,00	73,68	96,56	12,00	1.683	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungann tamu yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	4.027,000	4.021,300	14,40	4.020,30	120,00	99,83	99,98	14,40	4.020	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	126.787,000	94.224,000	12,00	94.222,59	100,00	74,32	100,00	12,00	94.223	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional Mebel Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia																			
1	6	0.0.0	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	Unit	0,00	-	0,00	-	2,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opsional atau lapangan yang tersedia	Unit	0,00	-	0,00	-	10,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit					4,00	6.138,000	9.955,000	4,00	9.955,00	100,00	162,19	100,00	4,00	9.955	0,00	0,00		
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit					1,00	-	-											
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit					1,00	-	-											
1	6	0.0.0	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Pelayanan Umum Kantor) Yang Tersedia										-									
1	6	0.0.0	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	bulan					12,00	10.800,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	59.169,300	53.689,800	12,00	37.820,83	100,00	63,92	70,44	12,00	37.821	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	bulan					12,00	12.000,000	12.000,000	12,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	12,00	12.000	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (Kendaraan Gedung Peralatan dan Mesin) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara																			
1	6	0.0.0	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	36.130,000	20.000,000	12,00	14.985,59	100,00	41,48	74,93	12,00	14.986	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.030,000	2.640,000	12,00	2.514,00	100,00	123,84	95,23	12,00	2.514	0,00	0,00		
1	6	0.0.0	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	3.582,000	19.580,000	9,00	19.480,00	75,00	543,83	99,49	9,00	19.480	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,21	118,74	95,16			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																5.145.502,14	5.306.671,80			5.148.048,061				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																96,57	188,08	95,24			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																ST	ST	ST			SR	SR		
7	0.7	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
7	0.0.0	3	0.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertama																			
7	0.0.0	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro																			
7	0.0.0	3	2.01	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	0.0.0	3	2.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																SR	SR	SR			SR	SR		
7	0.0.0	3	0.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba,Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru																			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
7	0.0.4	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat																			
7	0.0.4	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	200.000,000	328.278,40	0,98	320.262,04	97,92	160,13	97,56	0,98	320.262	0,00	0,00		
7	0.0.4	3	2.01	1	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan peserta Pelatihan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	0.0.4	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi																			
7	0.0.4	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pelatihan/sosialisasi yang terlaksana	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	12.500,000	12.500,00	0,92	11.444,85	92,00	91,56	91,56	0,92	11.445	0,00	0,00		
7	0.0.4	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	terlaksananya kompetensi produktifitas tenaga kerja																			
7	0.0.4	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	tercapainya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	bulan					12,00	130.000,000	196.746,00	9,00	164.725,85	75,00	126,71	83,73	9,00	164.726	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															88,31	126,13	90,95			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															T	ST	T			SR	SR				
7	0.0.4	4	0.00		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Angka pengangguran terbuka																			
7	0.0.4	4	2.03		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja																			
7	0.0.4	4	2.03	2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	15.902,521	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	0.0.4	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja																			
7	0.0.4	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	36.900,000	13.797,00	12,00	13.751,30	100,00	37,27	99,67	12,00	13.751	0,00	0,00		
7	0.0.4	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja																			
7	0.0.4	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulungan pekerja migran di Indonesia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	30.808,000	16.510,00	12,00	15.159,00	100,00	49,20	91,82	12,00	15.159	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	43,24	95,74			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															ST	SR	ST			SR	SR				
7	0.0.4	5	0.00		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun																			
7	0.0.4	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan																			
7	0.0.4	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	bulan				12	25.000,000	13.278,30	9,00	11.358,80	75,00	45,44	85,54	9,00	11.359	0,00	0,00			
7	0.0.4	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksananya sosialisasi bipartit dan tripartit pada bidang hubungan indutrial																			
7	0.0.4	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Perselisihan Hubungan Industrial)	%	0,00	-	0,00	-	100,00	15.244,000	13.648,00	86,00	11.691,50	86,00	76,70	85,66	86,00	11.692	0,00	0,00		
7	0.0.4	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana	%	0,00	-	0,00	-	100,00	19.147,700	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															80,50	61,07	85,60			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															T	R	T			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													495.502,22	594.757,70		548.393,342									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)															67,20	57,61	68,07			0,00	0,00				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	S	R	S			SR	SR	
2	08	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
2	08	2	0.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan, Pelatihan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Kelompok PK Remaja yang terbina dan terbentuk disekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi)																			
2	08	2	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan serta Terciptanya anggaran yang responsif gender melalui PPRG																			
2	08	2	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jml dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di Kab. Bulukumba	Kebijaka	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	08	2	2.01	4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Focal Point OPD dan Perencana terlatih PPRG	Orang	0,00	-	0,00	-	40,00	30.000,000	29.999,60	37,84	28.004,60	94,59	93,35	93,35	37,84	28.005	0,00	0,00		
2	08	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan																			
2	08	2	2.02	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi / acara (Hari Ibu dan Sosialisasi)	Orang	0,00	-	0,00	-	300,00	30.000,000	170.000,00	300,00	170.000,00	100,00	566,67	100,00	300,00	170.000	0,00	0,00		
2	08	2	2.02	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yg diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi Jumlah perempuan yg mendapatkan peningkatan kapasitas bidang politik	Orang	0,00	-	0,00	-	500,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	08	2	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan																			
2	08	2	2.02	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml calon fasilitator yg terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/ politik/ hukum/sosial	Orang	0,00	-	0,00	-	5,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,30	330,01	96,67			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
2	08	3	0.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan																			
2	08	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, serta pendampingannya																			
2	08	3	2.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif	%	0,00	-	0,00	-	80,00	52.000,000	48.000,00	80,00	45.600,00	100,00	87,69	95,00	80,00	45.600	0,00	0,00		
2	8	3	0	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif	%					80,00	202.229,000	100.019,00	40,00	18.214,75	50,00	9,01	18,21						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan						1,00	-	40.000,00	0,55	35.100,00	55,00	0,00	87,75						
2	08	3	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok PATBM yang terbentuk, dan jejaring lainnya																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	08	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A kab/kota yg terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	0,00	-	0,00	-	25,00	26.265,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	08	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	68,33	32,23	66,99			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	S	SR	S			SR	SR			
2	08	4	0.00		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Reguasi terkait PUG dan Perindungan Anak dan Kelompok UPPKS yang terbentuk dan terbina di Tingkat Kecamatan																				
2	08	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan ketahanan keluarga																				
2	08	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sTerlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tanggaosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangge	orang	0,00	-	0,00	-	50,00	100.000,000	80.000,00	45,00	71.027,09	90,00	71,03	88,78	45,00	71.027	0,00	0,00			
2	08	4	2.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
2	08	4	2.01	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader lembaga/ ormas yg difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan berkesetaraan gender	orang					30	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	08	4	2.01		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
2	08	4	2.01	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	lembaga					1	100.000,000	72.000,00	1,00	71.709,38	100,00	71,71	99,60	1,00	71.709	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	95,00	71,37	94,19			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	S	ST			SR	SR			
2	08	6	0.00		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase penambahan Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan, dan Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2TP2A																				
2	08	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemenuhan hak anak																				
2	08	6	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah	orang	0,00	-	0,00	-	68,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	08	6	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	SR	SR	SR			SR	SR			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	08	6	0.00		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase penambahan Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan, dan Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2TP2A																		
2	08	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemenuhan hak anak																		
2	08	6	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Desa/Kelurahan Layak Anak,	ecamata	0,00	-	0,00	-	10	30.000,000	120.000,00	10,00	118.563,38	100,00	395,21	98,80	10,00	118.563	0,00	0,00	
2	08	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemenuhan hak anak																		
2	08	6	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelibatan anak dalam pembangunan, Jumlah Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan	ecamata	0,00	-	0,00	-	10	200.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket					
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	Rp (000)	APBD	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	Rp (000)	APBD	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	395,21	98,80			0,00	0,00													
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR													
2	08	7	0.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	"Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak serta Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS terhadap HIV/AIDS																														
2	08	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya upaya perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus																														
2	08	7	2.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Kekerasan thd AMPK	desa/ke	0,00	-	0,00	-	5,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00												
2	08	7	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan penanganan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	72.950,00	12,00	72.950,00	100,00	0,00	100,00	12,00	72.950	0,00	0,00													
2	8	7	0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																														
2	8	7	0	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan n peningkatan kualitas hidup anak	%					100,00	211.689,000	161.979,00	41,18	66.468,75	41,18	31,40	41,04																	
2	8	7	0	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya jejaring lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%					100,00	25.000,000	50.000,00	100,00	49.723,75	100,00	198,90	99,45																	
2	8	7	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																														
2	8	7	0	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan anak	%					100,00	26.265,000	76.806,00	66,67	62.043,63	66,67	236,22	80,78																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																76,96	116,63	80,32			0,00	0,00													
Predikat Kinerja																T	ST	T			SR	SR													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																	1.258.448,000	1.021.753,600		809.405,317															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																62,51	135,06	62,42			0,00	0,00													
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																R	ST	R			SR	SR													
2	09	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																															
2	09	2	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan																														
2	09	2	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lumpung Pangan dan sarana pendukungnya																														
2	09	2	2.01	1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	unit					1,00	175.000,000	3.015.358,00	1,00	3.008.492,50	100,00	1719,14	99,77	1,00	3.008.493	0,00	0,00													
2	09	2	2.01	2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	unit					1,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00													
2	09	2	2.01	3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Mesin RMU	unit					1,00	300.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00													
2	09	2	2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan	Bulan					12,00	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00													
2	09	2	2.01	5 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Dokumen					1,00	4.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	1719,14	99,77			0,00	0,00													
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR													

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	Rp (000)		APBD	K	Rp (000)		K	Rp (000)		K	Rp (000)		
2	09	3	0.00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% pningktn PDRB sktor pertanian umum ADHB, areal kmditi unggln pkbunn, rhbilitsi htan&lhan kritis, Pngmbngan kwsan rmh pngan Istari, Prmosi prcpatan pngankrgaman&knsumsi pngan, pmbinaan klp wnita tani, Lmba cipta menu tngkt kabupaten, prov.& nas., Ssialis	Persen						100																
2	09	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga dan kelembagaan tani	Persen						100,00																
2	09	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen	Dokumen					1	10.000,000	46.950,00	1,00	34.950,00	100,00	349,50	74,44	1,00	34.950	0,00	0,00					
2	09	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stock dan Hasil Analisis Pasokan dan Harga Pangan Pokok	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
2	09	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang dibina	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	9.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
2	09	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) yang dibina	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.000,000	20.945,00	12,00	17.945,00	100,00	179,45	85,68	12,00	17.945	0,00	0,00					
2	09	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan	Bulan																					
2	09	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	8.000,000	7.432,80	12,00	7.432,80	100,00	92,91	100,00	12,00	7.433	0,00	0,00					
2	09	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	kg	0,00	-	0,00	-	#####	225.000,000	24.000,00	15000,00	21.718,00	100,00	9,65	90,49	#####	21.718	0,00	0,00					
2	09	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah yang terpelihara	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
2	09	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Demplot , Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, pembinaan Desa Mandiri Pangan, serta Promosi Konsumsi pangan Beragam, Bergizi dan Aman (B2SA)																						
2	09	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi Pola Pangan Harapan (PPH)	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
2	09	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang bina	tani	0,00	-	0,00	-	5,00	350.000,000	684.434,90	5,00	677.797,00	100,00	193,66	99,03	5,00	677.797	0,00	0,00					
2	09	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun	orang	0,00	-	0,00	-	5,00	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	165,03	89,93			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR					
2	09	4	0.00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terkendalnya kondisi ketersediaan dan kerawanan pangan																							
2	09	4	2.02	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persen						100,00																
2	09	4	2.02	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan sosialisasi FSVA	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
2	09	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	Persen					100,00																
2	09	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000,000	14.322,00	1,00	11.425,00	100,00	228,50	79,77	1,00	11.425	0,00	0,00					
2	09	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	Kg	0,00	-	0,00	-	#####	250.000,000	125.376,00	30000,00	125.269,00	100,00	50,11	99,91	#####	125.269	0,00	0,00					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)				Satuan		Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				Ket																		
														K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												100,00	139,30	89,84				0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																												ST	ST	T																											
2	09	5	0.00		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	100							Persen																																											
2	09	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100							Persen																																											
2	09	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan dan perlindungan masyarakat terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	10,00	-	0,00	-	100	15.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																
2	09	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan produk pangan segar asal tumbuhan dari produsen	%	10,00	-	0,00	-	100	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																
2	09	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan mutu dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan	%	10,00	-	0,00	-	100	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																
2	09	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Sertifikat Prima Sebagai Syarat Produk yang dihasilkan Aman Dikonsumsi	%	10,00	-	0,00	-	100	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																
2	09	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan	%	10,00	-	0,00	-	90	25.000,000	44.446,00	80,00	37.793,80	88,89	151,18	85,03	80,00	37.794	800,01	0,00																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												88,89	151,18	85,03				0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																												T	ST	T				SR	SR																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN														1.517.000,00	3.983.264,70		3.942.823,100																																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)														77,78	434,93	72,92				0,00	0,00																																				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)														T	ST	S				SR	SR																																				
2	10	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																																																				
2	10	4	0.00		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah																																																			
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah																																																			
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	konflik	0,00	-	0,00	-	5,00	50.000,000	45.739,86	5,00	39.266,50	100,00	78,53	85,85	5,00	39.267	0,00	0,00																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												100,00	78,53	85,85				0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																												ST	T	T				SR	SR																						
2	10	5	0.00		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																																																				
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																																																				
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	persil	0,00	-	0,00	-	32,00	50.000,000	4.957.690,37	25,60	3.538.660,70	80,00	7077,32	71,38	25,60	3.538.661	0,00	0,00																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												80,00	7077	71,38				0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																												T	ST	S				SR	SR																						
2	10	9	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi																																																			
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi																																																			
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terwujudnya Pemberian izin Lokasi Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	persil	0,00	-	0,00	-	10,00	60.000,00	133.311,08	9,00	104.703,42	90,00	174,51	78,54	9,00	104.703	0,00	0,00																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												90,00	174,51	78,54				0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																												T	ST	T				SR	SR																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN														160.000,000	5.136.741,31		3.682.630,620																																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)														90,00	2443	78,59				0,00	0,00																																				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
							K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																T	ST	T			SR	SR								
2	11	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																										
2	11	2	0.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan																									
2	11	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH dan D2DTKH																									
2	11	2	2.01	1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	750.000,000	425.300,20	2,00	423.061,20	100,00	56,41	99,47	2,00	423.061	0,00	0,00								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	56,41	99,47			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																ST	R	ST			SR	SR								
2	11	3	0.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	"Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota"																									
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kampung Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup																									
2	11	3	2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	140.961,700	52.950,20	12,00	52.931,20	100,00	37,55	99,96	12,00	52.931	0,00	0,00								
2	11	3	2.01	3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian limbah air dan udara di laboratorium,terlaksananya IHT bagi personil laboratorium,tersedianya bahan kimia,terpeliharanya alat laboratorium	lokasi	0,00	-	0,00	-	11,00	165.394,716	165.394,63	10,89	161.144,20	99,00	97,43	97,43	10,89	161.144	0,00	0,00								
2	11	3	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kualitas Air Sungai dan Data Kulitas Air Limbah																									
2	11	3	2.02	1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya data kualitas air sungai pada 6 sungai di Kabupaten Bulukumba serta tersedianya data kualitas air limbah pada 5 sumber pencemar	lokasi	0,00	-	0,00	-	11,00	24.604,000	24.603,90	11,00	24.603,10	100,00	100,00	100,00	11,00	24.603	0,00	0,00								
2	11	3	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persen Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove																									
2	11	3	2.03	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Penanaman Mangrove	Batang	0,00	-	0,00	-	#####	100.180,000	47.898,00	19998,00	47.853,00	99,99	47,77	99,91	#####	47.853	0,00	0,00								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,75	70,69	99,32			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																ST	S	ST			SR	SR								
2	11	4	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari																									
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan																									
2	11	4	2.01	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan	%					20	1.414.184,216	475.796,00	18,40	419.139,23	92,00	29,64	88,09	18,40	419.139	0,00	0,00								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																92,00	29,64	88,09			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																ST	SR	T			SR	SR								
2	11	5	0.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	"Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus"																									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
2	11	5	2.01	K				Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3																		
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3	lokasi	0,00	-	0,00	-	48,00	47.994,800	51.005,50	48,00	51.005,50	100,00	106,27	100,00	48,00	51.006	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	106,27	100,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
2	11	6	0.00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3, Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup, Persentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun																		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba																		
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Kegiatan	0,00	-	0,00	-	30,00	42.385,751	20.556,60	30,00	20.556,60	100,00	48,50	100,00	30,00	20.557	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	48,50	100,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	"Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional"																		
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup																		
					Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	tlompok					1	70.000	33.714	25,00	31.414,30	10,00	2,34	10,84	25,00	0,00	0,00	DLHK	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	10,00	2,34	10,84			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																								
2	11	9	0.00		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat																		
2	11	9	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah																		
2	11	9	2.01	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah	sekolah	0,00	-	0,00	-	250,00	250.000,000	53.952,70	247,50	52.252,60	99,00	20,90	96,85	247,50	52.253	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,00	20,90	96,85			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
2	11	10	0.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	"Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota."																			
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota																			
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	engadua	0,00	-	0,00	-	20	28.848,600	14.730,60	20,00	14.730,60	100,00	51,06	100,00	20,00	14.731	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	51,06	100,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	R	ST			SR	SR	
2	11	11	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Terkelolah																			
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan																			
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Persampahan	paket					1,00	100.000,000												
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan TPA 1 Ha , Biaya Operasioanl Operator Motor,Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operaional Persampahan honor Petugas Kebersihan Luar kantor	paket					1,00	7.688.756,896	6.027.652,37	0,99	5.907.238,73	99,00	76,83	98,00	0,99	5.907.239				
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura	Lokasi					10,00	179.264,600	61.243,00	9,90	53.743,00	99,00	29,98	87,75	9,90	53.743				
2	11	11	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Saran dan Prasarana Persampahan 1 Paket mesin Pencuci Mobil/Motor dan Mesin Chaisaw	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	145.143,800	3.270.652,90	0,94	2.894.472,40	94,25	1994,21	88,50	0,94	2.894.472	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	150.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,42	700,34	91,42			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
2	11	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)																			
2	11	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja DLHK																			
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	8,00	36.621	35.642,00	8,00	35.608,00	100,00	97,23	99,90	8,00	35.608	0,00	0,00	
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan evaluasiJumlah Laporan kinerja OPDJumlah Laporan Realisasi fisik dan keuangan	dokumen	0,00	-	0,00	-	30,00	3.993,900	3.993,90	30,00	3.990,90	100,00	99,92	99,92	30,00	3.991	0,00	0,00	
2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana																			
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	bulan					12	5.572.515,139	4.563.369,14	12,00	3.904.258,26	100,00	70,06	85,56	12,00	3.904.258	0,00	0,00	
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya jasa pelayanan administrasi keuangan, honor operator,arsipatoris,sopir dan tenaga kebersihan	bulan					12	252.720,000	242.760,00	12,00	223.320,00	100,00	88,37	91,99	12,00	223.320	0,00	0,00	
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	17.107,200	10.040,00	4,00	10.040,00	100,00	58,69	100,00	4,00	10.040	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fugsinya																			
2	11	1	2.06	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	44.250,000	22.125,00	2,00	17.000,00	100,00	38,42	76,84	2,00	17.000	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPd Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPd Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur																		
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	6.496,930	4.951,75	1,00	4.951,75	100,00	76,22	100,00	1,00	4.952	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor DLHK	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	7.259,770	3.973,10	1,00	3.973,10	100,00	54,73	100,00	1,00	3.973	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat staf dan tamu	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	78.489,350	65.405,60	12,00	65.344,00	100,00	83,25	99,91	12,00	65.344	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.425,000	4.964,20	12,00	4.964,00	100,00	91,50	100,00	12,00	4.964	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.220,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	bulan					12,00	208.783,000	185.677,00	12,00	185.630,28	100,00	88,91	99,97	12,00	185.630	0,00	0,00	
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional																		
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	550.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi dan Meja Kerja	set	0,00	-	0,00	-	4,00	20.000,000	4.620,00	4,00	4.620,00	100,00	23,10	100,00	4,00	4.620	0,00	0,00	
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	111.248,460	13.852,58	10,00	12.852,58	100,00	11,55	92,78	10,00	12.853	0,00	0,00	
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang DLHK																		
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat dan materai 10000	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.500,000	2.000,00	12,00	2.000,00	100,00	80,00	100,00	12,00	2.000	0,00	0,00	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan Wifi	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	254.599,383	132.193,49	12,00	107.834,93	100,00	42,35	81,57	12,00	107.835	0,00	0,00	
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor DLHK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.000,000	4.270,00	12,00	4.270,00	100,00	42,70	100,00	12,00	4.270	0,00	0,00	
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkup DLHK Kab. Bulukumba																		
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 ,Roda 3 dan roda 2 yang terbayarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	92.045,503	94.618,83	12,00	91.189,49	100,00	99,07	96,38	12,00	91.189	0,00	0,00	
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.790,000	6.490,00	0,99	5.516,40	99,00	51,13	85,00	0,99	5.516	0,00	0,00	
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor terpelihara	unit					1	187.569,425	7.839,23	1,00	7.724,23	100,00	4,12	98,53	1,00	7.724	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,95	63,23	95,18			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	R	ST			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													18.772.352,87	16.134.236,71		14.849.233,560								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																98,68	127,45	96,70			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																ST	ST	ST			SR	SR		
2	12	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
2	12	2	0.00		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK) dan KTP-el																		
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan, Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil, Terwujudnya pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kecamatan	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	13.119,500	13.119,34	100,00	13.051,50	100,00	99,48	99,48	100,00	13.052	0,00	0,00	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	13.570,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang diselesaikan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	7.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persen dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) yang diterbitkan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	535.800,000	531.087,00	12,00	508.083,00	100,00	94,83	95,67	12,00	508.083	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan dilaporkan	persen					100,00	11.256,000	9.639,92	100,00	9.639,80	100,00	85,64	100,00	100,00	11	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah peristiwa kependudukan yang tercatat dan dilaporkan	persen					100,00	8.600,000	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan	persen					100,00	12.000,000	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	8	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik	persen					100,00	6.770,000	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	2	2.01		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen data pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	persen					100,00	8.199,790	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	2	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	data pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan	persen					100,00	9.999,900	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	2	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang dibina terkait pendaftaran penduduk	persen					100,00	8.399,000	-			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	93,32	98,38			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR		
2	12	3	0.00		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kematian, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk serta Rasio bayi berakta Kelahiran																			
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil serta Tertatnya Administrasi Kependudukan																			
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan Yang diterbitkan terkait dengan pencatatan sipil	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	181.800,000	188.143,80	100,00	188.143,50	100,00	103,49	100,00	100,00	188.144	0,00	0,00		
2	12	3	2.01	3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.190,000	3.977,00	12,00	3.954,00	100,00	76,18	99,42	12,00	3.954	0,00	0,00		
2	12	3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.277.288,000	185.851,17	12,00	185.596,40	100,00	14,53	99,86	12,00	185.596	0,00	0,00		
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan																			
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi terkait dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	bulan					12	8.420,000	8.420,00	12,00	8.351,00	100,00	99,18	99,18	12,00	8.351	0,00	0,00		
2	12	3	2.02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelavanoan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	6.999,500	6.966,00	100,00	6.817,00	100,00	97,39	97,86	100,00	6.817	0,00	0,00		
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terwujudnya Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K
2	12	3	2.03	3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil supervisi bersama	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	9.999,700	165,00	100,00	165,00	100,00	1,65	100,00	100,00	165	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	65,40	99,39			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															ST	R	ST			SR	SR			
2	12	4	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi kebijakan penduduk																		
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan																		
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan	persen	-	-	0,00	-	100,00	2.312,900	3.630,00	100,00	3.480,00	100,00	150,46	95,87	100,00	3.480	0,00	0,00	
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama yang dihasilkan	persen	-	-	0,00	-	100,00	4.999,800	4.383,00	100,00	4.349,00	100,00	86,98	99,22	100,00	4.349	0,00	0,00	
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	persen	-	-	0,00	-	100,00	4.999,900	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	4	2.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
2	12	4	2.01	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	"Jumlah kunjungan ke kecamatan dan OPD yang bekerjasama dengan Dukcapil, jumlah dokumen yang tersedia "	persen	-	-	0,00	-	100,00	9.999,800	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan																		
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi, Jumlah Kecamatan yang dikunjungi	persen	-	-	0,00	-	100,00	12.986,600	9.263,50	91,67	8.281,00	91,67	63,77	89,39	91,67	8.281	0,00	0,00	
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama, jumlah kecamatan yang dikunjungi	persen	-	-	0,00	-	100,00	9.999,990	1.098,90	100,00	1.098,90	100,00	10,99	100,00	100,00	1.099	0,00	0,00	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persen	-	-	0,00	-	100,00	119.150,000	17.656,80	91,67	15.918,00	91,67	13,36	90,15	91,67	15.918	0,00	0,00	
2	12	4	2.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama yang tersedia	Persen	-	-	0,00	-	100,00	5.000,000	4.755,00	100,00	4.741,18	100,00	94,82	99,71	100,00	4.741	0,00	0,00	
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	persen	-	-	0,00	-	100,00	5.000,000	495,00	100,00	495,00	100,00	9,90	100,00	100,00	495	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															97,62	61,47	96,34			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															ST	R	ST			SR	SR			
2	12	5	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku argerat kependudukan yang terbitkan per tahun																		
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusnya Profil Kependudukan																		
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	4.999,750	3.465,00	12,00	3.465,00	100,00	69,30	100,00	12,00	3.465	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	69,30	100,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															ST	S	ST			SR	SR			
2	12	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Evaluasi Kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan administrasi umum dan Gaji dan Tunjangan ASN, terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar																			
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	2.799,72	12,00	2.799,42	100,00	55,99	99,99	12,00	2.799	0,00	0,00		
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	1.650,00	12,00	1.650,00	100,00	33,00	100,00	12,00	1.650	0,00	0,00		
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan					12	5.000,000	4.999,77	12,00	4.999,71	100,00	99,99	100,00	12,00	5.000	0,00	0,00		
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	1.942,19	12,00	1.872,19	100,00	37,44	96,40	12,00	1.872	0,00	0,00		
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Renstra, Renja dan Evaluasi Kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan administrasi umum dan Gaji dan Tunjangan ASN, terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi																			
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	3.472.582,399	2.865.523,82	12,00	2.521.449,22	100,00	72,61	87,99	12,00	2.521.449	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	5.000,000	3.079,28	91,00	2.816,77	91,00	56,34	91,47	91,00	2.817	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	4.999,95	12,00	499,50	100,00	9,99	9,99	12,00	500	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	-	6,00	-	50,00	0,00	0,00	6,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	5.000,000	3.158,48	100,00	3.158,30	100,00	63,17	99,99	100,00	3.158	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan keuangan	persen					100	5.000,000	4.999,83	100,00	4.967,40	100,00	99,35	99,35	100,00	4.967	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	frekuensi koordinasi dan jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan	persen					100	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Realisasi Keuangan	persen					100	4.999,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat																			
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persen					100	22.125,000	22.125,00	83,33	17.000,00	83,33	76,84	76,84	83,33	17.000	0,00	0,00		
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persen					100	5.000,000		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta dan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	bulan					12	5.000,000		3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.000,000	1.720,68	12,00	1.719,00	100,00	85,95	99,90	12,00	1.719	0,00	0,00		
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.000,000	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	2.000,000	1.999,91	100,00	1.994,40	100,00	99,72	99,72	100,00	1.994	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	104.829,491	332.797,26	91,67	295.043,25	91,67	281,45	88,66	91,67	295.043	0,00	0,00	
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	3.657,50	12,00	3.655,00	100,00	73,10	99,93	12,00	3.655	0,00	0,00	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa dan perialanan dinas dalam kota	persen					100	34.775,000	91.323,00	100,00	91.303,78	100,00	262,56	99,98	100,00	91.304	0,00	0,00	
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0,00	-	0,00	-	100,00	32.999,896	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	%	0,00	-	0,00	-	100,00	20.000,000	28.534,83	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	125.000,000	221.850,46	100,00	183.423,00	100,00	146,74	82,68	100,00	183.423	0,00	0,00	
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	140.000,000	139.953,00	12,00	115.080,96	100,00	82,20	82,23	12,00	115.081	0,00	0,00	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang ada	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	24.000,000	24.000,00	12,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00	12,00	24.000	0,00	0,00	
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya.	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	40.000,000	39.994,25	91,67	35.916,32	91,67	89,79	89,80	91,67	35.916	0,00	0,00	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya.	Bulan					12	2.999,000	1.935,00	9,00	1.900,00	75,00	63,35	98,19	9,00	1.900	0,00	0,00	
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	20.998,700	13.000,00	100,00	12.990,00	100,00	61,86	99,92	100,00	12.990	0,00	0,00	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	persen					100	20.000,000	1.171,50	100,00	1.171,50	100,00	5,86	100,00	100,00	1.172	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,07	65,24	87,09			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	R	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												6.450.169,12	4.809.331,84		4.295.038,999									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)												98,94	70,95	96,24			0,00	0,00						
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)												ST	S	ST			SR	SR						
2	13	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
2	13	2	0.00		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik																		
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang terlaksana																		
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	25.750,000	79.830,00	12,00	79.654,04	100,00	309,34	99,78	12,00	79.654	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	309,34	99,78			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
2	13	3	0.00		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik																		
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama antar Desa yang terlaksana																		
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	58.000,000	23.824,00	99,92	19.920,00	91,67	34,34	83,61	99,92	19.920	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	91,67	34,34	83,61			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	T			SR	SR	
2	13	4	0.00		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik																		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Pesrta yang Mampu Menyusun Produk Hukum Desa	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	25.480,000	11.508,00	109,00	11.508,00	100,00	45,16	100,00	109,00	11.508	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta yang mampu mengelola keuangan desa	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	100.000,000	55.385,00	90,83	44.360,00	83,33	44,36	80,09	90,83	44.360	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	125.563,000	100.000,00	109,00	95.125,00	100,00	75,76	95,13	109,00	95.125	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Keria sama antar Desa	Jumlah Bumdes Berstatus Produktif terfasilitasi	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	100.000,000	97.249,80	109,00	91.607,30	100,00	91,61	94,20	109,00	91.607	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa	Desa	0,00	-	0,00	-	31,00	1.200.000,000	891.843,60	31,00	848.394,32	100,00	70,70	95,13	31,00	848.394	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Evaluasi Status Desa (Desa Sangat Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri) Jumlah peserta mampu mnyusun Profil Desa dan Kelurahan	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	40.038,000	18.075,00	109,00	17.914,00	100,00	44,74	99,11	109,00	17.914	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD meningkat kapasitasnya	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	30.963,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penetapan dan penegasan Batas Desa	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	30.963,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumah Desa ikut Perlombaan	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	50.834,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	97,22	62,06	93,94			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	R	ST			SR	SR			
2	13	5	0.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan status desa mandiri																				
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentae 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang terlaksana																				
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat	Jumlah data kelembagaan Masyarakat tersedia (LKD,LPM,LSM,PKK, Posyandu dst.) Jumlah Pengelola Kelembagaan Masyarakat Meningkatkan Kapasitasnya.	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	100.000,000	23.470,00	99,92	19.734,00	91,67	19,73	84,08	99,92	19.734	0,00	0,00			
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	30.255,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Juara Lomba Inovasi TTG Perdesaan	Desa	0,00	-	0,00	-	109,00	25.188,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Ikut Partisipasi	Desa	0,00	-	0,00	-	12,00	25.570,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader yang mampu menyusun Perencanaan dan pembangunan partisipasi mayarakat, Jumlah kader memahami pengelolaan sumber pangan alternatif bagi keluarga.	%	0,00	-	0,00	-	100,00	200.000,000	250.000,00	100,00	246.010,00	100,00	123,01	98,40	100,00	246.010	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	95,84	28,55	91,24			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
2	13	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PMD)																			
2	13	1	2.01		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	%	0,00	-	0,00	-	100,00	57.656,000	19.697,00	100,00	18.797,00	100,00	32,60	95,43	100,00	18.797	0,00	0,00	
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	0,00	-	0,00	-	30,00	3.227,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	13	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.02		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	3.061.159,326	2.719.647,43	100,00	2.670.504,45	100,00	87,24	98,19	100,00	2.670.504	0,00	0,00
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	%	0,00	-	0,00	-	100,00	70.211,200	33.962,00	100,00	33.361,00	100,00	47,52	98,23	100,00	33.361	0,00	0,00	
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang Disusun	%	0,00	-	0,00	-	100,00	5.759,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	13	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.03		6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	%	0,00	-	0,00	-	100,00	10.387,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	13	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.05		9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	13	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.06		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	6.000,000	232.976,90	100,00	229.028,35	100,00	3817,14	98,31	100,00	229.028	0,00	0,00
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	%	0,00	-	0,00	-	100,00	9.677,000	2.427,63	100,00	2.427,29	100,00	25,08	99,99	100,00	2.427	0,00	0,00	
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100% ketersediaan logistik kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	80.870,000	38.035,07	100,00	36.697,83	100,00	45,38	96,48	100,00	36.698	0,00	0,00	
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	0,00	-	0,00	-	100,00	97.298,000	40.480,00	100,00	40.340,00	100,00	41,46	99,65	100,00	40.340	0,00	0,00	
2	13	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana											-								
2	13	1	2.07		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	13	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan	buah	0,00	-	0,00	-	1,00	18.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	13	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana																			
2	13	1	2.08		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	46.110,079	56.718,00	12,00	56.518,16	100,00	122,57	99,65	12,00	56.518	0,00	0,00
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non-ASN Pada kantor Dinas	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	21.600,000	1.758.200,00	12,00	1.602.399,38	100,00	7418,52	91,14	12,00	1.602.399	0,00	0,00	
2	13	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan baik guna menunjang terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dalam OPD																			
2	13	1	2.09		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	%	0,00	-	0,00	-	100,00	47.410,400	15.838,56	91,67	13.986,52	91,67	29,50	88,31	91,67	13.987	0,00	0,00
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	9.060,000	6.820,00	100,00	6.820,00	100,00	75,28	100,00	100,00	6.820	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)				Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				Ket			
													K		RKPD		APBD		K		RKPD		APBD		K	RKPD	APBD	K		Rp (000)		Rp (000)		K	RKPD	APBD	K		Rp (000)		Rp (000)		
															Rp (000)		Rp (000)				Rp (000)		Rp (000)							Rp (000)		Rp (000)							Rp (000)		Rp (000)		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												90,97	903,25	88,78			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																												T	ST	T			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												5.718.029,01		6.475.987,99				6.185.106,639		95,14	267,51	91,47			0,00	0,00																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																												95,14	267,51	91,47			0,00	0,00									
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																												ST	ST	ST			SR	SR									
2	14	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																						
2	14	2	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																																					
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya pelaksanaan program KKBPK dan terbentuknya SSK																																					
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	terlaksananya Penyerasian Program KKBPK di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	40.000,400	14.680,73	8,00	12.274,50	80,00	30,69	83,61	8,00	12.275	0,00	0,00																				
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang Terlaksana	sekolah	0,00	-	0,00	-	5,00	14.999,800	35.128,00	4,00	32.848,30	80,00	218,99	93,51	4,00	32.848	0,00	0,00																				
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat																																					
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang terbentuk dan terbina	ecamata	0,00	-	0,00	-	1,00	9.999,670	9.801,70	1,00	9.801,70	100,00	98,02	100,00	1,00	9.802	0,00	0,00																				
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.999,440	11.970,00	12,00	11.970,00	100,00	59,85	100,00	12,00	11.970	0,00	0,00																				
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	bulan					12,00	12.310,540	46.662,30	12,00	45.330,26	100,00	368,22	97,15	12,00	45.330	0,00	0,00																				
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersusun	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.949,900	108.000,00	12,00	74.693,26	100,00	374,40	69,16	12,00	74.693	0,00	0,00																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												93,33	191,70	90,57			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																												ST	ST	T			SR	SR									
2	14	3	0.00		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.dengan menggunakan MKJP, Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok atau Keluarga, Pelatihan Te																																					
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya pencapaian peserta KB																																					
2	14	3	2.01	2	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	4.411,00	12,00	4.411,00	100,00	0,00	100,00	12,00	4.411	0,00	0,00																				
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyuluhan dan Pelayanan KIE yang Terlaksana	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	19.999,520	25.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																				
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	60.316,000	70.604,00	0,66	46.380,00	66,00	76,90	65,69	0,66	46.380	0,00	0,00																				
2	14	3	2.01	7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Biaya Operasional bagi PPKBD dan SUB PPKBD yang tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	652.800,000	157.030,00	12,00	156.600,00	100,00	23,99	99,73	12,00	156.600	0,00	0,00																				
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	405.000,00	12,00	261.600,00	100,00	0,00	64,59	12,00	261.600	0,00	0,00																				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	14	3	2.01	7	Pengendalian Program KKBPK		bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	39.060,00	12,00	34.860,00	100,00	0,00	89,25	12,00	34.860	0,00	0,00			
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, PMS dan HIV/ AIDS di Sekolah																				
2	14	3	2.02	3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK yang Terlaksana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.529.965,800	652.800,00	12,00	652.800,00	100,00	25,80	100,00	12,00	652.800	0,00	0,00			
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian peserta KB baru																				
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Ieja ringnya	Cakupan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke faskes	paket					1	49.915,800	9.765,00	0,80	8.850,00	80,00	17,73	90,63	0,80	8.850	0,00	0,00			
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	471.600,00	91,67	351.052,00	91,67	0,00	74,44	91,67	351.052	0,00	0,00			
2	14	3	2.03	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	kebutuhan Alat Kontrasepsi berupa Side Efek yang Tersedia	%	0,00	-	0,00	-	100,00	60.002,600	62.402,42	80,00	58.986,95	80,00	98,31	94,53	80,00	58.987	0,00	0,00			
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	7,00	860.026,000	831.824,91	6,86	825.374,63	98,00	95,97	99,22	6,86	825.375	0,00	0,00			
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Akseptor KB	Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB	%	0,00	-	0,00	-	100,00	19.999,240	19.999,10	83,33	16.996,10	83,33	84,98	84,98	83,33	16.996	0,00	0,00			
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Ieja ringnya	Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9.600	0,00	0,00			
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya jumlah peserta KB baru dan aktif																				
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelayanan KB Melalui Kegiatan TNI Manunggal KB-KES, Kegiatan Bulan Bhakti Bhayangkara, Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - KES, kegiatan bulan bhakti KB-IBI dan Pelayanan KB Mobile yang Terlaksana	momen	0,00	-	0,00	-	5,00	132.022,590	134.422,60	2,50	127.314,10	50,00	96,43	94,71	2,50	127.314	0,00	0,00			
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB yang Terlaksana	ecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	102.209,400	379.500,00	10,00	329.175,00	100,00	322,06	86,74	10,00	329.175	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	83,27	56,14	82,97			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	T	R	T			SR	SR			
2	14	4	0.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya orientasi PIK KRR																				
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pecapaian peserta KB,Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan dan kader kelompok bina keluarga																				
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	set	0,00	-	0,00	-	3,00	627.000,000	637.008,00	3,00	627.079,13	99,98	100,01	98,44	3,00	627.079	0,00	0,00			
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelatihan Kelompok UPPKS bagi Keluarga Miskin	orang	0,00	-	0,00	-	5,00	34.999,700	34.999,50	3,00	33.639,65	60,00	96,11	96,11	3,00	33.640	0,00	0,00			
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlakananya Pembentukan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok (BKB, BKR dan BKL),Terlaksananya Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Klp	0,00	-	0,00	-	5,00	38.345,300	31.443,30	3,00	28.689,85	60,00	74,82	91,24	3,00	28.690	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	2.048.250,00	91,67	743.370,00	91,67	0,00	36,29	91,67	743.370	0,00	0,00		
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Advokasi dan KIE tetang kesehatan Reproduksi Remaja	Klp	0,00	-	0,00	-	5,00	42.499,500	42.499,30	3,00	38.542,55	60,00	90,69	90,69	3,00	38.543	0,00	0,00		
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Klp	0,00	-	0,00	-	5,00	34.871,800	67.960,90	2,00	39.804,15	40,00	114,14	58,57	2,00	39.804	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		68,61	79,30	78,56			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																		S	T	T			SR	SR	
2	14	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																			
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD,Tertibnya laporan LKIP, Laporan OPD dan Laporan Akhir Tahun																			
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen					1	41.479,590	6.769,90	1,00	6.674,00	100,00	16,09	98,58	1,00	6.674	0,00	0,00		
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	31.083,050	32.439,50	2,00	32.369,50	100,00	104,14	99,78	2,00	32.370	0,00	0,00		
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	4.200,000	4.717,80	12,00	4.398,00	100,00	104,71	93,22	12,00	4.398	0,00	0,00		
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan					3	3.699,850	1.810,60	3,00	1.810,60	100,00	48,94	100,00	3,00	1.811	0,00	0,00		
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	30.500,000	500,00	1,00	500,00	100,00	1,64	100,00	1,00	500	0,00	0,00		
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran,Tertibnya laporan LKIP, Laporan OPD dan Laporan Akhir Tahun																			
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai menerima gaji dan tunjangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.300.712,214	5.006.638,00	12,00	4.342.883,35	100,00	68,93	86,74	12,00	4.342.883	0,00	0,00		
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	bulan					12	119.059,800	78.739,80	12,00	78.718,00	100,00	66,12	99,97	12,00	78.718	0,00	0,00		
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	3.640,000	2.388,98	1,00	2.388,90	100,00	65,63	100,00	1,00	2.389	0,00	0,00		
2	14	1	2.06		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
2	14	1	2.06	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuat	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	1.500,000	1.499,90	2,00	1.499,90	100,00	99,99	100,00	2,00	1.500	0,00	0,00		
2	14	1	2.06		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
2	14	1	2.06	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang diikuti	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	33.690,876	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	14	1	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	11.211,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran																			
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	2.662,175	2.650,04	1,00	2.650,04	100,00	99,54	100,00	1,00	2.650	0,00	0,00		
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bahan pembersih yang tersedia	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	24.560,505	2.801,70	1,00	2.801,70	100,00	11,41	100,00	1,00	2.802	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				Ket	
								K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan makan minum yang tersedia	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	76.569,700	43.984,73	12,00	43.947,59	100,00	57,40	99,92	12,00	43.948	0,00	0,00											
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	paket	0,00		-	0,00		-	1,00	11.500,000	3.979,91	1,00	3.979,90	100,00	34,61	100,00	1,00	3.980	0,00	0,00											
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	unit	0,00		-	0,00		-	10,00	8.241,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00										
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	157.080,592	55.677,00	12,00	55.623,00	100,00	35,41	99,90	12,00	55.623	0,00	0,00											
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran																														
2	14	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Sarana Kerja pada Kantor DPPKB	paket	0,00		-	0,00		-	1,00	10.000,000	2.420,00	1,00	2.420,00	100,00	24,20	100,00	1,00	2.420	0,00	0,00											
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	unit	0,00		-	0,00		-	4,00	35.681,800	9.273,49	4,00	9.273,49	100,00	25,99	100,00	4,00	9.273	0,00	0,00											
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung DPPKB yang tersedia	unit	0,00		-	0,00		-	2,00	9.240,000	4.290,00	2,00	4.290,00	100,00	46,43	100,00	2,00	4.290	0,00	0,00											
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran																														
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pembiayaan tagihan telepon, air dan listrik	bulan	0,00		-	0,00		-	12,00	77.812,800	73.812,80	12,00	43.172,46	100,00	55,48	58,49	12,00	43.172	0,00	0,00											
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga Non PNS dan Tenaga Kebersihan	bulan							12	64.800,000	57.600,00	12,00	57.600,00	100,00	88,89	100,00	12,00	57.600	0,00	0,00											
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran																														
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan pajak kendaraan dinas jabatan roda 4	unit	0,00		-	0,00		-	1,00	30.000,000	20.000,00	0,50	979,89	50,00	3,27	4,90	0,50	980	0,00	0,00											
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	unit	0,00		-	0,00		-	4,00	45.622,328	45.620,73	2,20	39.307,89	55,00	86,16	86,16	2,20	39.308	0,00	0,00											
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	0,00		-	0,00		-	1,00	4.927,500	4.884,00	1,00	4.884,00	100,00	99,12	100,00	1,00	4.884	0,00	0,00											
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit							3	7.440,000	2.365,00	3,00	2.365,00	100,00	31,79	100,00	3,00	2.365	0,00	0,00											
2	14	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit							2	1.220,000	1.220,00	2,00	1.220,00	100,00	100,00	100,00	2,00	1.220	0,00	0,00											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			96,04	57,33	92,82			0,00	0,00											
Predikat Kinerja																			ST	R	ST			SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																			12.530.367,78	11.827.506,63	9.327.800,327															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																			85,31	96,12	86,23			0,00	0,00											
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																			T	ST	T			SR	SR											
2	15	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																															
2	15	2	0.00		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C																														
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan																														
2	15	2	2.03		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik PJU yang dibangun	titik						50,00	1.625.000,000	585.620,30	50,00	583.632,80	100,00	35,92	99,66																
2	15	2	2.03	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah titik PJU yang dipelihara	titik	0,00		-	0,00		-	150,00	156.704,712	102.950,00	150,00	102.050,00	100,00	65,12	99,13	150,00	102.050	0,00	0,00											
2	15	2	2.05		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C di Kabupaten bulukumba																														
2	15	2	2.05	1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Fasilitas Jasa Petugas parkir, terminal dan di tepi jalan	bulan						12	445.858,083	329.400,00	10,80	313.800,00	90,00	70,38	95,26																
2	15	2	2.05	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji																														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	15	2	2.05	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Trafic Light dan Warning Light	unit	0,00	-	0,00	-	6,00	20.000,000	72.200,00	6,00	600,00	100,00	3,00	0,83	6,00	600	0,00	0,00			
2	15	2	2.05	7	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Fasilitas Jasa petugas Jasa Narasumber untuk kegiatan sosiliasi pengujian kendaraan masyarakat, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengujian sosialisasi pengujian kendaraan masyarakat	kali	0,00	-	0,00	-	4,00	7.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	15	2	2.09	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Fasilitas Jasa Petugas Operator Pengujian Kendaraan Bermotor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	20.000,000	415.660,90	12,00	411.031,00	100,00	2055,16	98,89	12,00	411.031	0,00	0,00			
2	15	2	2.09	2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalu lintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalu lintas		0,00	-	0,00	-															
2	15	2	2.09	2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya jasa biaya operasional kendaraan bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya fasilitas jasa petugas bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya jumlah petugas angkutan bus sekolah dan bus nariwisata	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	138.833,500	283.079,60	0,90	225.303,00	90,00	162,28	79,59	0,90	225.303	0,00	0,00			
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas jasa pengendalian dan pengawasan lalu lintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalu lintas	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	165.980,000	204.696,00	12,00	185.813,40	100,00	111,95	90,78	12,00	185.813	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																97,14	357,69	80,59			0,00	0,00				
Predikat Kinerja																ST	ST	T			SR	SR				
2	15	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perhubungan)																				
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Petugas Reviter dan sunami	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	50.000,000	50.522,60	12,00	24.474,60	100,00	48,95	48,44	12,00	24.475	0,00	0,00			
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.075.252,725	4.188.296,96	12,00	3.532.733,48	100,00	69,61	84,35	12,00	3.532.733	0,00	0,00			
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Belanja Jasa Admnistrasi Keuangan	bulan					12	21.129,900	32.380,70	12,00	29.380,60	100,00	139,05	90,73	12,00	29.381	0,00	0,00			
2	15	1	2.02	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan SKPD	bulan					12	10.000,000	53.950,00	12,00	53.950,00	100,00	539,50	100,00	12,00	53.950	0,00	0,00			
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksana Latpim 3	orang	0,00	-	0,00	-	1,00	22.125,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran komunikasi, air, listrik, dan Internet, penerangan bangunan kantor	bulan					12	3.500,000	3.500,00	12,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	12,00	3.500	0,00	0,00			
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Kantor Lingkup Sekda	paket	0,00	-	0,00	-	5,00	2.500,000	2.357,50	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	15	1	2.06	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan penyediaan belanja ATK dan penggandaan serta makan dan minum penyediaan makan dan minum tamu	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	68.525,600	94.293,08	12,00	84.358,28	100,00	123,10	89,46	12,00	84.358	0,00	0,00			
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	60.000,000	59.999,80	12,00	59.987,26	100,00	99,98	99,98	12,00	59.987	0,00	0,00			
2	15	1	2.06	9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	15	1	2.06	9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan																				
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	12.550.000,000	12.963.816,29	12,00	12.637.306,51	100,00	100,70	97,48	12,00	12.637.307	0,00	0,00			
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	30.000,000	4.580,00	89,00	4.060,00	89,00	13,53	88,65	89,00	4.060	0,00	0,00			
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas pembayaran jasa kebersihan kantor (petugas Cining Service) penyedian perlatan jasa kebersihan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	25.000,000	26.034,90	12,00	26.033,65	100,00	104,13	100,00	12,00	26.034	0,00	0,00			
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan									0,00	-										
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil Jalan	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	-	11.860,63	0,90	10.360,63	90,00	0,00	87,35	0,90	10.361	0,00	0,00			
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas operasional mobil dan motor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	25.917,88	12,00	25.260,85	100,00	0,00	97,46	12,00	25.261	0,00	0,00			
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan					12	-	10.000,00	12,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	12,00	10.000	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	91,36	95,61	84,56			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													20.497.409,52	19.521.117,13		18.323.636,051										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	94,25	226,65	82,58			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	ST	T			SR	SR			
2	16	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
2	16	2	0.00		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah																				
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik																				
2	16	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rumusan Kebijakan berupa Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis mengenai layanan infomasi (Perda/Perbub/SK Bupati)	buah					2	23.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	3	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi SP4N Lapor sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat, laporan pengelolaan SP4N dan Lapor	kali	0,00	-	0,00	-	2,00	112.800,000	27.910,00	2,00	27.178,75	100,00	24,09	97,38	2,00	27.179	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	5	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan diskusi publik dengan pemangku kepentingan dengan media informasi menanggapi aduan dan isu publik	kali	0,00	-	0,00	-	10,00	78.600,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	6	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembuatan dan pengelolaan konten dan materi Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Komunikasi	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	100.000,000	26.350,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan pengelolaan Informasi Publik Melalui Radio SPL FM dan TV Lokal	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.265.100,000	298.160,00	12,00	292.498,61	100,00	23,12	98,10	12,00	292.499	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penguatan PPID	kali	0,00	-	0,00	-	2,00	89.100,000	44.040,00	2,00	40.908,97	100,00	45,91	92,89	2,00	40.909	0,00	0,00			
2	16	2	2.01	6	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah	nis med	0,00	-	0,00	-	3,00	282.993,200	319.662,00	3,00	315.310,00	100,00	111,42	98,64	3,00	315.310	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	16	2	2.01	7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan talkshow dan rapat kerja dengan organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat mengenai layanan informasi publik	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	2	2.01	1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	kelompo	0,00	-	0,00	-	10,00	107.035,850	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi komisi informasi sebagai lembaga informasi publik	bulan					12,00	276.641,000	184.950,00	12,00	183.750,00	100,00	66,42	99,35	12,00	183.750	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	83,33	45,16	81,06			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	T	SR	T			SR	SR	
2	16	3	0.00		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persetase perangkat daerah yag terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo																		
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah																		
2	16	3	2.01	2	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Nama Domain dan Sub Domain Terdaftar	Domain					1	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	3	2.01	3	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan penataan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah	Aplikasi					4	130.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	3	2.02		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan jaringan internet pemerintah bagi OPD	Bulan					12	2.000.000,000	314.290,00	12,00	309.712,72	100,00	15,49	98,54	12,00	309.713	0,00	0,00	
2	16	3	2.02	1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem																		
2	16	3	2.02	3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	bulan					12	200.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	3	2.02	3	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	bulan					12	150.000,000	294.000,00	12,00	282.273,69	100,00	188,18	96,01	12,00	282.274	0,00	0,00	
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peralatan dan perangkat elektronik di pusat data dan command center dapat di maintenance dan dipelihara	bulan					12	150.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	3	2.02	3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	sistem komunikasi intra pemerintah daerah/radio komunikasi pemkab dapat dilaksanakan	bulan					12	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	3	2.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan informasi dengan instansi Pembina ditingkat Pemerintah pusat dan propinsi dapat terlaksana	bulan					12	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	16	3	2.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dalam lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana.	bulan					12	100.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	3	2.02	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SPBE yang telah tersusun	bulan					12	250.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	3	2.02	3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	bulan					12	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	3	2.02	3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas (Pembangunan War Room)	bulan					12	1.500.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	3	2.02	3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	bulan					12	75.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Government Chief Information Officer	bulan					12	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	101,83	97,28			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR		
2	16	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik																			
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja																			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	dokumen					58,00	27.013,500	17.639,90	58,00	17.638,70	100,00	65,30	99,99	58,00	17.639	0,00	0,00		
2	16	1	2.01	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi yang telah disusun dan diserahkan ke OPD yang menangani	dokumen	0,00	-	0,00	-	58,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah																			
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.776.755,969	2.197.783,34	12,00	1.945.833,75	100,00	70,08	88,54	12,00	1.945.834	0,00	0,00		
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan dan kesekretariatan yang dilaksanakan di Kominfo.	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	93.770,000	82.868,50	12,00	79.358,50	100,00	84,63	95,76	12,00	79.359	0,00	0,00		
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran, Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	bulan					12,00	76.362,818	89.460,00	12,00	87.360,00	100,00	114,40	97,65	12,00	87.360	0,00	0,00		
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibutuhkan.	Dokumen	0,00	-	0,00	-	5,00	11.419,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah																			
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III	orang	0,00	-	0,00	-	1,00	22.125,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum																			
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	unit					30	25.000,000	7.348,80	30,00	7.340,00	100,00	29,36	99,88	30,00	7.340	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan.	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan.	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman yang disediakan.	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	100.000,000	89.755,50	12,00	89.705,48	100,00	89,71	99,94	12,00	89.705	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	kali	0,00	-	0,00	-	55,00	179.943,000	94.098,00	55,00	94.098,00	100,00	52,29	100,00	55,00	94.098	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan administrasi pengelolaan yang mendorong peningkatan pencapaian Nilai SPBE	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah																		
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibutuhkan.	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	250.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang akan dibutuhkan.	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya yang akan dibutuhkan	paket					1,00	25.043,996											
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi layanan dan atau jaringan yang akan dibuat	Aplikasi					1,00	10.000,000											
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	gedung					1,00	20.000,000											
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan.	unit					2,00	10.000,000											
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan					12	85.000,000	83.995,32	12,00	76.845,66	100,00	90,41	91,49	12,00	76.846	0,00	0,00	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	80.000,000	67.945,00	12,00	67.811,00	100,00	84,76	99,80	12,00	67.811	0,00	0,00	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Diskominfo	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	40.000,000	26.545,00	12,00	26.530,70	100,00	66,33	99,95	12,00	26.531	0,00	0,00	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara																		
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000	15.343,50	1,00	15.219,60	100,00	76,10	99,19	1,00	15.220	0,00	0,00	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	13,00	40.000,000	43.458,00	12,96	43.341,50	99,73	108,35	99,73	12,96	43.342	0,00	0,00	
2	16	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Diskominfo yang memiliki izin	unit	0,00	-	0,00	-	14,00	5.765,755	4.900,00	14,00	3.879,64	100,00	67,29	79,18	14,00	3.880	0,00	0,00	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah layanan aplikasi yang terpelihara	Aplikasi					2	10.000,000											
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	paket					1	10.000,000	5.269,00	1,00	5.250,00	100,00	52,50	99,64					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															92,84	70,44	89,34				0,00	0,00		
Predikat Kinerja															ST	S	T				SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												11.118.469,59	4.335.771,86		4.006.595,269									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															88,09	57,80	85,20				0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															T	R	T				SR	SR		
2	17	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
2	17	2	0.00		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	%				100													
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penrtbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam	%				100													
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	31.200,000	28.721,80	12,00	28.498,30	100,00	91,34	99,22	12,00	28.498	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	91,34	99,22				0,00	0,00		
Predikat Kinerja															ST	ST	ST				SR	SR		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	17	3	0.00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koperasi Yang Tertib Adminstrasi	%					100														
2	17	3	2.01		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota vane terlaksana	%					100														
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	koperasi					290	72.500,000	24.883,00	219,99	18.817,00	75,86	25,95	75,62	219,99	18.817	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															75,86	25,95	75,62			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															S	SR	S			SR	SR				
2	17	4	0.00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Kategori Sehat	%					723,00														
2	17	4	2.01		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%					100														
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperas	0,00	-	0,00	-	145,00	36.250,000	13.067,76	145,00	11.825,40	100,00	32,62	90,49	145,00	11.825	0,00	0,00			
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi					6	100.000,000	67.157,98	2,00	15.477,30	33,33	15,48	23,05	2,00	15.477	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															66,67	24,05	56,77			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															S	SR	R			SR	SR				
2	17	5	0.00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	%					100,00														
2	17	5	2.01		Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%					100,00														
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	orang					100	390.304,000	404.200,00	93,00	374.173,00	93,00	95,87	92,57	93,00	374.173	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															93,00	95,87	92,57			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															ST	ST	ST			SR	SR				
2	17	6	0.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi																				
2	17	6	2.01		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana																				
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperas	0,00	-	0,00	-	3,00	415.000,000	37.422,00	3,00	27.575,94	100,00	6,64	73,69	3,00	27.576	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	6,64	73,69			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															ST	SR	S			SR	SR				
2	17	7	0.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM Yang Diberdayakan																				
2	17	7	2.01		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																				
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	150.000,000	43.512,00	1,00	37.307,55	100,00	24,87	85,74	1,00	37.308	0,00	0,00			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	Rp (000)	K		Rp (000)	K
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra	usaha	0,00	-	0,00	-	250,00	87.500,000	26.312,00	238,00	25.046,00	95,20	28,62	95,19	238,00	25.046	0,00	0,00	
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang terlaksana	%	0,00	-	0,00	-	80,00	50.000,000	52.512,00	79,96	52.480,00	99,95	104,96	99,94	79,96	52.480	0,00	0,00	
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk	usaha	0,00	-	0,00	-	21,00	290.544,126	527.965,58	18,00	431.179,17	85,71	148,40	81,67	18,00	431.179	0,00	0,00	
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	usaha					31178	50.000,000	32.895,00	25285,36	26.678,40	81,10	53,36	81,10	#####	26.678	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	92,39	72,04	88,73			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	S	T			SR	SR	
2	17	8	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha																		
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi																		
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	usaha	0,00	-	0,00	-	40,00	1.730.000,000	1.264.055,00	36,00	1.126.682,50	90,00	65,13	89,13	36,00	1.126.683	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	90,00	65,13	89,13			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	T	R	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													3.403.298,13	2.522.704,12			2.175.740,563							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	88,27	54,43	82,25			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	T	R	T			SR	SR	
2	18	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
2	18	2	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMA																		
2	18	2	2.02		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana																		
2	18	2	2.02	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	buku	0,00	-	0,00	-	150,00	24.300,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian informasi penanaman modal																		
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba	buku	0,00	-	0,00	-	150,00	30.464,600	8.120,60	150,00	8.094,60	100,00	26,57	99,68	150,00	8.095	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	26,57	99,68			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	
2	18	3	0.00		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMDN																		
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi Perencanaan dan Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba																		
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	2,00	13.262,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ikut sertanya Dalam Pameran Kab, Prop, dan Nasinal serta Rapat Koordinasi	kegiatan	0,00	-	0,00	-	2,00	66.568,000	15.197,00	2,00	15.179,00	100,00	22,80	99,88	2,00	15.179	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	22,80	99,88			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	
2	18	4	0.00		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan perizinan																		
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi pelayanan perizinan																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	jenis	0,00	-	0,00	-	23,00	214.559,500	132.995,00	22,99	132.699,75	99,96	61,85	99,78	22,99	132.700	0,00	0,00		
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	9.228,665	96.805,00	12,00	94.857,00	100,00	1027,85	97,99	12,00	94.857	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,98	544,85	98,88			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR		
2	18	5	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana																			
2	18	5	2.01																						
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM	semester	0,00	-	0,00	-	2,00	64.843,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi tata cara pengisian LKPM yang terlaksana	ecamata	0,00	-	0,00	-	5,00	210.290,500	170.575,07	5,00	170.474,91	100,00	81,07	99,94	5,00	170.475	0,00	0,00		
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	MA/PMD	0,00	-	0,00	-	100,00	99.512,000	165.994,93	100,00	165.994,93	100,00	166,81	100,00	100,00	165.995	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	123,94	99,97			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR		
2	18	5	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA																			
2	18	5	2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana																	
2	18	5	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah buku Data Base Perizinan	semester	0,00	-	0,00	-	2,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	SR	SR	SR			SR	SR		
2	18	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																			
2	18	1	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan																	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah dokumen Renstra dan Renja	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	47.629,970	18.689,10	2,00	18.468,40	100,00	38,77	98,82	2,00	18.468	0,00	0,00		
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah dokumen RKA dan RKAP	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	23.160,000	13.506,93	2,00	13.442,50	100,00	58,04	99,52	2,00	13.443	0,00	0,00		
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumah dokumen DPA dan DPAP	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	10.955,700	5.610,00	2,00	5.609,90	100,00	51,21	100,00	2,00	5.610	0,00	0,00		
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah dokumen Lakip	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.799,690	800,00	1,00	800,00	100,00	13,79	100,00	1,00	800	0,00	0,00		
2	18	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah dokumen evaluasi	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	14.772,740	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor,Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan																			
2	18	1	2.02	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.389.663,097	5.183.803,77	12,00	4.393.337,82	100,00	68,76	84,75	12,00	4.393.338	0,00	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PersentasePelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	0,00	-	0,00	-	100,00	172.402,450	54.757,50	100,00	54.757,50	100,00	31,76	100,00	100,00	54.758	0,00	0,00		
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen					1,00	6.025,070	1.044,67	1,00	1.044,67	100,00	17,34	100,00	1,00	1.045	0,00	0,00		
2	18	1	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	18	1	2.06	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar	orang					1,00	22.125,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	1	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar	orang					1,00	1.950,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana																			
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	bulan					12,00	1.242,500	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	bulan					12,00	65.591,525	39.981,65	12,00	39.977,85	100,00	60,95	99,99	12,00	39.978	0,00	0,00		
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.377,400	5.622,00	12,00	5.622,00	100,00	88,16	100,00	12,00	5.622	0,00	0,00		
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	12.178,000	4.826,90	12,00	4.824,07	100,00	39,61	99,94	12,00	4.824	0,00	0,00		
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	176.766,917	35.481,32	12,00	35.469,02	100,00	20,07	99,97	12,00	35.469	0,00	0,00		
2	18	1	2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																			
2	18	1	2.09	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	18	1	2.09	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	18	1	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	18	1	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																				
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	115.313,556	104.224,06	12,00	98.390,85	100,00	85,32	94,40	12,00	98.391	0,00	0,00			
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor	orang	0,00	-	0,00	-	5,00	89.136,000	57.540,00	5,00	57.539,00	100,00	64,55	100,00	5,00	57.539	0,00	0,00			
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																				
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Adm. STNK Mobil dan Motor dan Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 dan 2	unit	0,00	-	0,00	-	8,00	44.638,965	44.265,34	7,33	38.661,37	91,67	86,61	87,34	7,33	38.661	0,00	0,00			
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja DPMPTSP	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	7.100,000	2.840,00	10,00	2.840,00	100,00	40,00	100,00	10,00	2.840	0,00	0,00			
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan perlengkapan kerja DPMPTSP	unit	0,00	-	0,00	-	8,00	5.610,000	2.440,00	8,00	2.440,00	100,00	43,49	100,00	8,00	2.440	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	95,10	47,56	92,04			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													8.011.466,85	6.165.120,84		5.360.525,14										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	99,02	153,14	98,09			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	ST	ST			SR	SR			
2	19	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
2	19	2	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi Olahraga dan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan																				
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Lancarnya pelaksanaan paskibraka,Meningkatnya prestasi pemuda																				
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	orang	0,00	-	0,00	-	1,00	35.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha muda yang dibina	orang	0,00	-	0,00	-	50,00	27.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	orang	0,00	-	0,00	-	5,00	148.430,000	180.801,00	5,00	180.800,70	100,00	121,81	100,00	5,00	180.801	0,00	0,00			
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah okp yang diberi dana hibah	OKP	0,00	-	0,00	-	1,00	100.000,000	100.000,00	1,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100.000	0,00	0,00			
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pelajar yang lolos paskibra	orang	0,00	-	0,00	-	72,00	431.030,300	431.274,70	72,00	430.782,80	100,00	99,94	99,89	72,00	430.783	0,00	0,00			
2	19	2	2.01		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah okp yang diberi dana hibah																				
2	19	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang di bina	OKP	0,00	-	0,00	-	1,00	35.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	107,25	99,96			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR			
2	19	3	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan																				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga																		
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	paket	0,00	-	0,00	-	7,00	5.502.850,000	911.295,00	6,29	818.421,80	89,81	14,87	89,81	6,29	818.422	0,00	0,00
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi olahraga																	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya lomba lari 10K dan kejuaran piala menpora	event	0,00	-	0,00	-	1,00	62.127,312	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang di bina	cabor	0,00	-	0,00	-	28,00	2.360.619,811	2.133.232,18	28,00	2.133.200,00	100,00	90,37	100,00	28,00	2.133.200	0,00	0,00
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut kejuaraan-kejuaraan	atlet	0,00	-	0,00	-	25,00	35.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi atlet usia dini																	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet usia dini yang ikut kejuaraan	atlet	0,00	-	0,00	-	30,00	104.127,750	58.408,25	30,00	56.638,25	100,00	54,39	96,97	30,00	56.638	0,00	0,00
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah klub olahraga yang di bina	klub	0,00	-	0,00	-	2,00	78.622,000	80.244,00	1,89	73.722,00	94,44	93,77	91,87	1,89	73.722	0,00	0,00
2	19	3	2.03	3	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan penghargaan	orang	0,00	-	0,00	-	25,00	37.925,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga																	
2	19	3	2.05	3	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih dan wasit yang mendapatkan lisensi	Lokasi	0,00	-	0,00	-	2,00	48.940,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga																	
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	2,00	59.850,000	48.300,00	2,00	48.300,00	100,00	80,70	100,00	2,00	48.300	0,00	0,00
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,85	66,82	95,73			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja		ST	S	ST			SR	SR	
2	19	4	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas organisasi Kepramukaan																	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya kegiatan kepramukaan di setiap kecamatan																	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwartir pramuka yang mendapatkan pembinaan	kwarcab	0,00	-	0,00	-	1,00	100.000,000	100.000,00	1,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100.000	0,00	0,00
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	100,00	100,00			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja		ST	ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												9.167.022,17	4.043.555,13		3.941.865,552								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)												98,95	91,36	98,56			#REF!	#REF!					
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)												ST	ST	ST			#REF!	#REF!					
2	20	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2	20	2	0.00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi																	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah																	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	kali	0,00	-	0,00	-	5,00	10.000,000	13.340,00	5,00	13.340,00	100,00	133,40	100,00	5,00	13.340	0,00	0,00
2	20	2	2.01	1	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	kali	0,00	-	0,00	-	5,00	15.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	133,40	100,00			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja		ST	ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												25.000,000	13.340,00		13.340,000								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)												100,00	133,40	100,00			0,00	0,00					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															ST	ST	ST			SR	SR			
2	21	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
2	21	2	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah																			
2	21	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian																			
2	21	2	2.01	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.000,000	13.675,00	12,00	13.675,00	100,00	136,75	100,00	12,00	13.675	0,00	0,00		
2	21	2	2.01	3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dapat tersedia	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	21	2	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
2	21	2	2.02	1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	136,75	100,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															ST	ST	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												20.000,000	13.675,00		13.675,000									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															100,00	136,75	100,00			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															ST	ST	ST			SR	SR			
2	22	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
2	22	2	0.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi																			
2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pemajuan Tradisi Budaya																			
2	22	2	2.01	2 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan iinventarisasi	kegiatan	1,00	-	0,00	-	1,00	100.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	100,00	50,00	100,00	1,00	50.000	100,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	50,00	100,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															ST	SR	ST			SR	SR			
2	22	2	0.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan																			
2	22	2	2.02	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional																			
2	22	2	2.02	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	50.000,00	24.750,00	1,00	24.750,00	100,00	49,50	100,00	1,00	24.750	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	49,50	100,00			33,33	0,00			
Predikat Kinerja															ST	SR	ST			SR	SR			
2	22	5	0.00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten																			
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten																			
2	22	5	2.01	2 Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	%	100,00	-	0,00	-	100,00	200.000,00	373.856,00	8,82	32.940,00	8,82	16,47	8,81	8,82	32.940	8,82	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															8,82	16,47	8,81			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															SR	SR	SR			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												350.000,000	448.606,000		107.690,000									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															69,61	38,66	69,60			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															S	SR	S			SR	SR			
2	23	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)
2	23	2	0.00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun																		
2	23	2	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba																		
2	23	2	2.01	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan E-Book	lembar	0,00	-	0,00	-	100,00	9.000,000	20.000,00	100,00	16.315,00	100,00	181,28	81,58	100,00	16.315	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung perpustakaan	orang	0,00	-	0,00	-	4345,00	8.368,650	22.342,70	4345,00	22.109,700	100,00	264,20	98,96	4345	22.110	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi pengembangan kekhasan perpustakaan	judul	0,00	-	0,00	-	20,00	4.540,374	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibina	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	8.359,200	2.305,00	12,00	2.305,000	100,00	27,57	100,00	12,00	2.305	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang di bina	Perpustakaan Khusus	0,00	-	0,00	-	3,00	4.701,150	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan tenagaPerpustakaan dan Pustakawan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	34.646,760	20.380,10	12,00	20.258,100	100,00	58,47	99,40	12,00	20.258	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	7 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi dalam pengembangan layanan perpustakaan Rujukan	Eksamples	0,00	-	0,00	-	100,00	2.236,500	2.675,00	100,00	2.675,000	100,00	119,61	100,00	100,00	2.675	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	8 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka	Eksamples	0,00	-	0,00	-	1221,00	13.567,950	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka	Eksamples	0,00	-	0,00	-	1221,00	2.610,000	732,40	1221,00	482,400	100,00	18,48	65,87	#####	482	0,00	0,00	
2	23	2	2.01	1 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pustakawan dan Jumlah Profil Perpustakaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	8.992,692	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba																		
2	23	2	2.02	1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi ditingkat pendidikan	orang	0,00	-	0,00	-	90,00	25.879,590	22.517,00	90,00	22.186,000	100,00	85,73	98,53	90,00	22.186	0,00	0,00	
2	23	2	2.02	2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perustakaan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan	unit	0,00	-	0,00	-	2,00	2.138,400	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.02	3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta Penerima Penghargaan gemar membaca	orang					27,00	810,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	23	2	2.02	4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Peserta dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	orang	0,00	-	0,00	-	90,00	41.191,650	29.722,90	90,00	29.722,900	100,00	72,16	100,00	90,00	29.723	0,00	0,00	
2	23	2	2.02	5 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dalam pemilihan Duta Baca tingkat daerah provinsi	orang	0,00	-	0,00	-	70,00	6.628,500	5.535,00	70,00	5.535,00	100,00	83,50	100,00	70,00	5.535	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	101,22	93,81			0,00	0,00		
Predikat Kinerja															ST	ST	ST			SR	SR		
2	23	3	0.00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnya, Persentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasa, Persentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya																		
2	23	3	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/ kota																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	terciptanya peran masyarkat dalam penyimpanan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.799,100	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didavagunakan	Terlaksananya pengembangan dan pengalihmedian naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didavagunakan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	882,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota																				
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	922,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terkelolanya koleksi etnis budaya nusantara	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	495,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	SR	SR	SR			SR	SR			
2	23	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perpustakaan dan Kearsifan)																				
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan	dokumen	0,00	-	0,00	-	7,00	36.498,285	14.034,00	7,00	12.855,940	100,00	35,22	91,61	7,00	12.856	0,00	0,00			
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	dokumen	0,00	-	0,00	-	5,00	6.963,083	8.261,34	5,00	8.261,340	100,00	118,64	100,00	5,00	8.261	0,00	0,00			
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA	dokumen					2	6.396,083	8.762,98	2,00	7.586,960	100,00	118,62	86,58	2,00	7.587	0,00	0,00			
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.262,600	2.700,00	9,72	2.700,000	81,00	119,33	100,00	9,72	2.700	0,00	0,00			
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan kearsipan																				
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.918.219,395	2.282.224,49	9,72	1.606.292,443	81,00	55,04	70,38	9,72	1.606.292	0,00	0,00			
2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	111.439,784	103.540,00	12,12	99.100,000	101,00	88,93	95,71	12,12	99.100	0,00	0,00			
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	2.615,400	3.639,91	1,00	2.967,910	100,00	113,48	81,54	1,00	2.968	0,00	0,00			
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
2	23	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta dalam Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan							9.360,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwudunya Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup dinas Perpustakaan dan Kearsipan																				
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Listrik	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	774,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	unit	0,00	-	0,00	-	4,00	724,050	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	719,145	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	39.645,675	28.100,00	12,12	23.780,000	101,00	59,98	84,63	12,12	23.780	0,00	0,00			
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.939,000	1.999,47	15,00	1.999,470	125,00	29	100,00	15,00	1.999	0,00	0,00			
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	kali	0,00	-	0,00	-	39,00	90.483,300	45.291,00	39,00	45.058,800	100,00	49,80	99,49	39,00	45.059	0,00	0,00			
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di lingkup dinas Perpustakaan dan Kearsifan																				
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	unit	0,00	-	0,00	-	2,00	9.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
2	23	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan parasarana	unit	0,00	-	0,00	-	4,00	40.000,000	13.470,99	4,00	12.100,000	100,00	30,25	89,82	4,00	12.100	0,00	0,00			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
2	23	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																				
2	23	1	2.08			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat Menyurat	bulan			12	270,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	23	1	2.08			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	bulan			12	26.885,970	27.128,66	12,12	26.959,974	101,00	100,28	99,38	12,12	26.960	0,00	0,00		
2	23	1	2.08			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor	orang			2	24.000,000	24.000,00	2,00	24.000,000	100,00	100,00	100,00	2,00	24.000	0,00	0,00		
2	23	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																				
2	23	1	2.09			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang di pelihara	unit	0,00	-	0,00	-	9,00	36.000,000	13.600,00	7,71	12.004,779	85,71	33,35	88,27	7,71	12.005	0,00	0,00
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang dipelihara	paket			1	1.000,000	2.060.000,00	1,00	1.706.687,00	100,00	#####	82,85	1,00	1.706.687	0,00	0,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															98,38	11448,03	91,35			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															ST	ST	ST			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												3.547.965,79	4.762.962,93			3.713.943,716									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															99,19	5774,63	92,58			0,00	0,00				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															ST	ST	ST			SR	SR				
2	24	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pesentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat																			
2	24	2	0.00																						
2	24	2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten bulukumba	Jumlah OPD Yang diawasi	OPD																		
2	24	2	2.01					1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD Yang diawasi	OPD			36	23.150,790	18.569,920	36,00	18.563,640	100,00	80,19	99,97	36,00	18.564	0,00	0,00
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah penciptaan dan penggunaan Arsip	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	16.028,883	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
2	24	2	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten bulukumba																				
2	24	2	2.02			2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Khasanah yang di hasilkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.701,801	20.089,850	12,00	19.959,261	100,00	101,31	99,35	12,00	19.959	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00	90,75	99,66			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															ST	T	ST			SR	SR				
2	24	3	0.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan																				
2	24	3	2.04			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terwujudnya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten Bulukumba																		
2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Jumlah lembar Arsip	bulan					12	21.207,357	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah lembar Arsip	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.305,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															SR	SR	SR			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												90.393,83	38.659,77			38.522,901									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															100,00	90,75	99,66			0,00	0,00				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															ST	T	ST			SR	SR				
3	25	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap																			
3	25	3	0.00																						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
3	25	3	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																			
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen	dokumen				1	50.000,000	30.033,00	1,00	22.641,32	100,00	45,28	75,39	1,00	22.641	0,00	0,00		
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Prasarana	unit				60	2.028.000,000	3.093.803,70	60,00	2.836.496,52	100,00	139,87	91,68	60,00	2.836.497	0,00	0,00		
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	0,00	-	0,00	-	17,00	8.017.100,000	2.537.716,00	15,69	1.990.931,45	92,31	24,83	78,45	15,69	1.990.931	0,00	0,00	
3	25	3	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 satu daerah kabupaten kota																			
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	25.000,000	1.615.530,00	1,00	1.154.074,00	100,00	4616,30	71,44	1,00	1.154.074	0,00	0,00	
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	25	3	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																			
3	25	3	2.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola dengan baik	unit	0,00	-	0,00	-	7,00	13.199.508,612	-	7,00	152.304,00	100,00	1,15	0,00	7,00	152.304	0,00	0,00	
3	25	3	2.03	1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang terselenggara	unit	0,00	-	0,00	-	7,00	35.000,000	254.260,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																82,05	804,57	52,83			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																T	ST	R			SR	SR		
3	25	4	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya																			
3	25	4	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																			
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bibit Ikan	ekot	0,00	-	0,00	-	#####	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali				1	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	58.000,000	70.221,55	1,00	63.034,05	100,00	108,68	89,76	1,00	63.034	0,00	0,00	
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	2,00	125.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan																			
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya	paket	0,00	-	0,00	-	16,00	1.175.000,000	1.061.070,77	14,40	940.783,80	90,00	80,07	88,66	14,40	940.784	0,00	0,00	
3	25			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya	paket					3,00	150.000,000	100.433,56	3,00	98.191,70	100,00	65,46	97,77	3,00	98.192	0,00	0,00		
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																96,67	84,74	92,07			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	T	ST			SR	SR		
3	25	6	0.00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pembudidayaan ikan di darat																			
3	25	6	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
3	25				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	kali					1	28.867,604	59.374,60	1,00	46.254,50	100,00	160,23	77,90	1,00	46.255	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	160,23	77,90			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR			
3	25	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)																				
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran																				
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	dokumen					2	27.749,662	6.719,15	2,00	6.469,00	100,00	23,31	96,28	2,00	6.469	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.249,738	4.999,75	1,00	3.049,75	100,00	58,09	61,00	1,00	3.050	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00		0,00		1,00	5.249,738	4.999,75	1,00	4.341,75	100,00	82,70	86,84	1,00	4.342	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.249,738	4.999,75	1,00	3.049,75	100,00	58,09	61,00	1,00	3.050	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen					1,00	5.249,738	4.999,75	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	13.098,750	6.745,00	1,00	6.491,00	100,00	49,55	96,23	1,00	6.491	0,00	0,00			
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	0,00	-	0,00	-	12,00	26.110,350	14.967,00	12,00	14.200,75	100,00	54,39	94,88	12,00	14.201	0,00	0,00			
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Daerah																				
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan	bulan					12,00	4.661.668,384	3.964.236,17	12,00	3.757.246,07	100,00	80,60	94,78	12,00	3.757.246	0,00	0,00			
3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	bulan					12,00	259.067,353	108.166,05	12,00	108.166,05	100,00	41,75	100,00	12,00	108.166	0,00	0,00			
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.391,750	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pejabat yang Mengikuti Latpim																				
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	orang					1,00	34.975,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran																				
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan	unit	0,00	-	0,00	-	25,00	3.280,613	2.982,38	25,00	2.982,38	100,00	90,91	100,00	25	2.982	0,00	0,00			
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	unit	0,00	-	0,00	-	800,00	31.744,350	20.332,95	800,00	20.332,95	100,00	64,05	100,00	800	20.333	0,00	0,00			
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan	lembar					2500,00	17.243,952	10.001,64	2500,00	9.754,14	100,00	56,57	97,53	2500	9.754	0,00	0,00			
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran	koran	0,00	-	0,00	-	3,00	3.178,000	1.980,00	3,00	630,00	100,00	19,82	31,82	3,00	630	0,00	0,00			
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat	unit					320,00	9.042,377	5.444,23	320,00	5.444,23	100,00	60,21	100,00	320,00	5.444	0,00	0,00			
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana	kali	0,00	-	0,00	-	30,00	216.630,900	121.056,00	30,00	120.206,70	100,00	55,49	99,30	30,00	120.207	0,00	0,00			
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor																				
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	unit	0,00	-	0,00	-	5,00	7.865,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kant	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	30.000,000	14.040,24	3,00	8.870,24	100,00	29,57	63,18	3,00	8.870	0,00	0,00			
3	25	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	unit					1,00	5.687,000	5.170,00	1,00	5.170,00	100,00	90,91	100,00	1,00	5.170	0,00	0,00			
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan																				
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar	bulan					12,00	194.937,000	115.814,26	9,60	82.765,21	80,00	42,46	71,46	9,60	82.765	0,00	0,00			
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan	bulan					12,00	100.482,585	85.017,70	10,80	85.017,70	90,00	84,61	100,00	10,80	85.018	0,00	0,00			
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara																				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	0,00	-	0,00	-	40,00	109.300,000	91.550,00	40,00	52.607,22	100,00	48,13	57,46	40,00	52.607	0,00	0,00			
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	unit	0,00	-	0,00	-	5,00	4.642,000	4.220,00	5,00	4.220,00	100,00	90,91	100,00	5,00	4.220	0,00	0,00			
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	9.823,000	8.930,00	1,00	8.930,00	100,00	90,91	100,00	1,00	8.930	0,00	0,00			
3	25	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	4.697,000	4.270,00	1,00	4.270,00	100,00	90,91	100,00	1,00	4.270	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		94,35	59,30	83,12			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																		ST	R	T			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													30.804.090,69	13.434.084,94			11.618.926,219									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																		93,27	277,21	76,48			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																		ST	ST	T			SR	SR		
3	26	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																					
3	26	2	0.00		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	%					80,00														
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan daya tarik wisata	%					60,00														
3	26	2	2.01	7	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek wisata yang dikelola, Jumlah tenaga kebersihan obyek wisata	%	0,00	-	0,00	-	100,00	440.807,857	378.120,00	100,00	377.079,85	100,00	85,54	99,72	100,00	377.080	0,00	0,00			
3	26	2	2.03		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis	%					40,00														
3	26	2	2.03	3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan Kawasan wisata	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	146.181,189	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata	%					40,00														
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata	paket	0,00	-	0,00	-	13,00	3.270.947,776	1.401.473,13	10,15	1.094.220,53	78,09	33,45	78,08	10,15	1.094.221	0,00	0,00			
3	26	2	2.03		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan TDUP	%					5,00														
3	26	2	2.03	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah media informasi yang di sediakan, Jumlah sosialisasi pengendalian yang dilaksanakan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	164.896,600	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		89,05	59,50	88,90			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																		T	R	T			SR	SR		
3	26	3	0.00		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	%					60,00														
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata dalam negeri	%					60,00														
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi yang digunakan	media	0,00	-	0,00	-	3,00	179.185,600	119.376,00	2,44	97.086,00	81,35	54,18	81,33	2,44	97.086	0,00	0,00			
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	event	0,00	-	0,00	-	9,00	754.200,600	903.115,00	7,71	649.403,35	85,71	86,10	71,91	7,71	649.403	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		83,53	70,14	76,62			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																		T	S	T			SR	SR		
3	26	5	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%					1,60														
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan SDM kepariwisataan	%					66														
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan	pelatihan	0,00	-	0,00	-	3,00	545.384,800	364.883,00	3,00	357.327,01	100,00	65,52	97,93	3,00	357.327	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah ajang bakat yang dilaksanakan	ajang	0,00	-	0,00	-	2,00	200.495,137	730.495,00	1,33	465.450,00	66,67	232,15	63,72	1,33	465.450	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	83,34	148,83	80,82			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	T	ST	T			SR	SR		
3	26	1	0.00	##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya																			
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	0,00	-	0,00	-	18,00	176.342,467	94.714,10	18,00	94.228,60	100,00	53,44	99,49	18,00	94.229	0,00	0,00		
3	26	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	17.710,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	14.350,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	dokumen	0,00	-	0,00	-	18,00	6.966,000	5.183,90	24,00	5.176,70	133,33	74,31	99,86	24,00	5.177	0,00	0,00		
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dispora	dokumen	0,00	-	0,00	-	18,00	26.138,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, tersusunnya dokumen LK dan perjanjian kinerja																			
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang di Bayarkan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.870.674,946	5.273.758,19	10,80	4.503.900,70	90,00	65,55	85,40	10,80	4.503.901	0,00	0,00		
3	26	1	2.02	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Operator Komputer Lingkup Keuangan	Orang	0,00	-	0,00	-	1,00	18.010,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Barang	Orang	0,00	-	0,00	-	8,00	223.702,100	132.510,00	8,00	132.460,00	100,00	59,21	99,96	8,00	132.460	0,00	0,00		
3	26	1	2.02	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akutansi Dispora	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.316,900	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dispora	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
3	26	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemantauan PAD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	46.362,800	328.123,30	12,00	326.601,18	100,00	704,45	99,54	12,00	326.601	0,00	0,00		
3	26	1	2.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Diklat Daerah																			
3	26	1	2.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta latpim	Orang	0,00	-	0,00	-	1,00	31.812,330	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah																			
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	buah	0,00	-	0,00	-	64,00	3.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan Perelatan Gedung Kantor yang Tersedia	jenis	0,00	-	0,00	-	12,00	3.207,750	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya atk	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	244.306,204	116.622,99	11,76	116.622,74	98,00	47,74	100,00	11,76	116.623	0,00	0,00		
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barabg yang Cetak dan digandakan	jenis	0,00	-	0,00	-	10,00	5.678,640	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	kali	0,00	-	0,00	-	10,00	16.155,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas	kali	0,00	-	0,00	-	40,00	368.747,036	228.013,00	39,96	227.766,41	99,89	61,77	99,89	39,96	227.766	0,00	0,00		
3	26	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah																			
3	26	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang adakan	Unit	0,00	-	0,00	-	3,00	143.906,200	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	tersedianya aset lainnya	Unit	0,00	-	0,00	-	11,00	193.718,096	10.687,99	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Unit	0,00	-	0,00	-	3,00	9.504,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah																			
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	buah	0,00	-	0,00	-	300,00	1.650,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K		Rp (000)
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan telepon, listrik, dan air	%	0,00	-	0,00	-	100,00	234.541,644	130.575,00	100,00	121.185,13	100,00	51,67	92,81	100,00	121.185	0,00	0,00	
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih	%	0,00	-	0,00	-	100,00	462.536,000	340.450,00	100,00	333.400,00	100,00	72,08	97,93	100,00	333.400	0,00	0,00	
3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah																		
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak yang disediakan	unit	0,00	-	0,00	-	7,00	61.648,134	48.388,15	6,22	41.672,77	88,89	67,60	86,12	6,22	41.673	0,00	0,00	
3	26	1	2.09	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	26	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	63.030,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	26	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	unit	0,00	-	0,00	-	12,00	7.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	91,83	114,35	87,36			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												14.974.613,81	10.606.488,74		8.943.580,959									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	86,93	98,21	83,43			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	T	ST	T			SR	SR	
3	27	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
3	27	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Ketahanan Pangan)	100					Persen												
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100					Persen												
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	65.177,000	15.930,00	1,00	15.930,00	100,00	24,44	100,00	1,00	15.930	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen					1,00	8.900,000	3.960,00	1,00	3.942,00	100,00	44,29	99,55	1,00	3.942	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	dokumen					1,00	3.400,000	4.092,00	1,00	3.960,00	100,00	116,47	96,77	1,00	3.960	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen					1,00	7.467,115	4.023,03	1,00	3.987,03	100,00	53,39	99,11	1,00	3.987	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	dokumen					1,00	1.967,455	3.960,00	1,00	3.930,00	100,00	199,75	99,24	1,00	3.930	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	15.000,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	65.421,080	12.891,00	10,00	11.951,00	100,00	18,27	92,71	10,00	11.951	0,00	0,00	
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	22.452.215,130	17.809.346,56	12,00	16.146.290,27	100,00	71,91	90,66	12,00	16.146.290	0,00	0,00	
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Admisnistrasi ASN Yang disediakan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	80.242,500	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	269.712,900	188.370,00	12,00	180.120,00	100,00	66,78	95,62	12,00	180.120	0,00	0,00	
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	13.327,284	3.700,00	1,00	3.700,00	100,00	27,76	100,00	1,00	3.700	0,00	0,00	
3	27	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya money dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah	Persen					100,00												
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	3.577,640	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya money dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	3.077,640	2.988,00	10,00	2.747,00	100,00	89,26	91,93	10,00	2.747	0,00	0,00	
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang pengguna semesteran	laporan	0,00	-	0,00	-	2,00	3.477,640	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas disiplin dan SDM aparatur sipil negara semakin meningkat																		
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Sumberdaya Aparatur	orang	0,00	-	0,00	-	1,00	72.125,000	22.125,00	1,00	17.000,00	100,00	23,57	76,84	1,00	17.000	0,00	0,00	
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																		
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	paket					1,00	4.444,994	3.841,20	1,00	3.841,20	100,00	86,42	100,00	1,00	3.841	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya ATK	paket					1,00	9.217,557	8.221,42	1,00	8.221,42	100,00	89,19	100,00	1,00	8.221	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Bulan					12,00	249.390,441	161.310,42	12,00	161.140,00	100,00	64,61	99,89	12,00	161.140	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Bulan					12,00	53.599,233	68.362,20	9,60	63.749,70	80,00	118,94	93,25	9,60	63.750	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan berlangganan koran	Bulan					12,00	960,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat	Bulan					12,00	25.351,700	19.967,40	9,24	15.467,40	77,00	61,01	77,46	9,24	15.467	0,00	0,00	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	588.445,765	186.243,00	12,60	186.243,00	105,00	31,65	100,00	12,60	186.243	0,00	0,00	
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																		
3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4 DTPHP Kab. Bulukumba	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	90.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeluer	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	14.360,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelataran pendukung gedung kantor yang diadakan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	125.000,000	61.244,21	1,00	53.634,70	100,00	42,91	87,58	1,00	53.635	0,00	0,00	
3	27	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aplikasi untuk CP/CL tingkat Kabupaten DTPHP Kab. Bulukumba	unit	0,00	-	0,00	-	2,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																		
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	178.562,232	107.529,60	11,40	105.377,16	95,00	59,01	98,00	11,40	105.377	0,00	0,00	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	101.040,000	48.000,00	12,60	48.000,00	105,00	47,51	100,00	12,60	48.000	0,00	0,00	
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																		
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	0,00	-	0,00	-	80,00	78.608,000	50.600,00	64,00	40.443,44	80,00	51,45	79,93	64,00	40.443	0,00	0,00	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional Yang Dipelihara dan Diperbaharui pajaknya	unit					34,00	25.600,000	-	26,45	-	77,78	0,00	0,00	26,45	-	0,00	0,00	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tepeliharanya peralatan gedung kantor, Tepeliharanya perlengkapan gedung kantor, Tepeliharanya kendaraan dinas,Tepeliharanya kendaraan dinas/mobil labatan	unit					3,00	64.682,466	27.000,00	1,35	20.058,46	45,00	31,01	74,29	1,35	20.058	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehab	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	126.010,754	11.320,00	1,00	9.602,00	100,00	7,62	84,82	1,00	9.602	0,00	0,00	
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	paket					1,00	25.903,613	9.950,00	1,00	9.941,00	100,00	38,38	99,91	1,00	9.941	0,00	0,00	
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab	unit					1,00	10.840,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,57	61,07	93,23			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	R	ST			SR	SR	
3	27	2	0.00		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pertanian mendukung produksi dan produktivitas	4E+05					ton												
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Yang terlaksana	100					Persen												
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang terdampingi sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	kelompok					142,00	71.000,000	1.710.000,00	142,00	1.617.512,00	100,00	2278,19	94,59	142,00	1.617.512	0,00	0,00	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Paket					1,00	3.705.202,206	1.644.232,00	1,00	1.567.494,00	100,00	42,31	95,33	1,00	1.567.494	0,00	0,00	
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan produksi dan mutu pangan sektor pertanian																		
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya produksi tanaman komoditi aneka kacang dan umbi	paket					1,00	100.000,000	151.606,00	1,00	147.326,00	100,00	147,33	97,18	1,00	147.326	0,00	0,00	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hewan yang ditingkatkan kualitasnya	Ekor					5000,00	10.346.500,000	1.124.268,00	5000,00	979.331,01	100,00	9,47	87,11	#####	979.331	0,00	0,00	
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah ternak yang mendapatkan identitas	Ekor					#####	530.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten																		
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan dalam daerah	Persen					85,00	50.000,000	176.699,00	85,00	136.167,00	100,00	272,33	77,06	85,00	136.167	0,00	0,00	
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pemberian bibit HPT yang berkualitas, bantuan ternak kepada masyarakat, Pelaksanaan IB dan Pengkartuan Ternak																		
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	ekor	0,00	-	0,00	-	300,00	3.158.384,075	2.162.968,75	15,00	69.700,00	5,00	2,21	3,22	15,00	69.700	0,00	0,00	
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak	ekor	0,00	-	0,00	-	#####	350.000,000	63.501,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	72,14	393,12	64,93			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	S	ST	R			SR	SR	
3	27	3	0.00		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% ptumbhn PDRB ptnian umum ADHK, pbinaan Kp.tani,ppulsi trnak,areal kom.prkbunan,Ktrsdiaan Air u/Lhn ptnian Msy.,pnrpn tknolgi ptnian,Klhirn insemm.buatn,kwsn pnydia pkan&air bg tnak,Adpsi tknlgi bid.ptnrkn,pmnfaatn biogs&ppuk orgnk dr lmbah ptnkan,pmnuhn	Persen					100,00												
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persen					100,00												
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Biogas asal ternak yang dibangun	unit	0,00	-	0,00	-	12,00	180.000,000	2.721.692,00	11,85	2.672.210,60	98,75	1484,56	98,18	11,85	2.672.211	0,00	0,00	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya dokumen action plan pembangunan pertanian kabupaten Bulukumba (dokumen)	Dok	0,00	-	0,00	-	1,00	200.000,000	2.176.248,00	0,86	1.795.526,70	86,11	897,76	82,51	0,86	1.795.527	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (dokumen)	Dok	0,00	-	0,00	-	1,00	130.000,000	600.000,00	0,35	177.349,00	35,00	136,42	29,56	0,35	177.349	0,00	0,00		
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunnya prasarana pertanian lainnya (unit)	paket					1,00	300.000,000	405.000,00	1,00	389.452,00	100,00	129,82	96,16	1,00	389.452	0,00	0,00		
3	27	3	2.01		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Yang terlaksana	Persen					100,00													
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan embung	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	360.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	unit	0,00	-	0,00	-	4,00	800.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	360.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh Pertanian	unit					1,00	219.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani/sumur bor/Irigasi Tersier	unit					5,00	1.425.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	79,97	882,85	76,60			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	T	ST	T			SR	SR		
3	27	4	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persen peningkatan penanganan penyakit ternak, penanganan hewan yang mengalami gangguan reproduksi, keamanan dan pengendalian penyakit hewan strategis, kualitas sarana dan prasarana RPH, serta pertumbuhan usaha-usaha dibidang peternakan, dan pengendalian																			
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya penyakit hewan zoonosis																			
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	terlaksananya penanggulangan penyakit hewan zoonoisi	ekor	0,00	-	0,00	-	8000,00	400.000,000	76.074,38	8000	71.211,08	100,00	17,80	93,61	8000	71.211	0,00	0,00		
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peredaran ternak dan bahan asal hewan di perbatasan																			
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terkontrolnya Peredaran Ternak dan Bahan Asal Hewan di Perbatasan Kabupaten	ekor	0,00	-	0,00	-	350,00	50.000,000	30.613,00	350,00	24.556,00	100,00	49,11	80,21	350,00	24.556	0,00	0,00		
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya jasa laboratorium dan jasa medik dan paramedik veteriner																			
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jasa laboraorium yang dsediakan	Orang	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	6.000,00	1,00	6.000,00	100,00	60,00	100,00	1,00	6.000	0,00	0,00		
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa medik dan paramedik veteriner yang disediakan	Orang	0,00	-	0,00	-	8,00	90.000,000	213.260,00	8,00	149.969,72	100,00	166,63	70,32	8,00	149.970	0,00	0,00		
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Peredaran Produk Hewan																			
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	210.000,000	65.800,00	12,00	53.200,00	100,00	25,33	80,85	12,00	53.200	0,00	0,00		
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	50.000,000	55.259,00	12,00	55.219,00	100,00	110,44	99,93	12,00	55.219	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	71,55	87,49			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	S	T			SR	SR		
3	27	5	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tersedianya pengendaliandan penanggulan bencana pertanian	4E+05					ton													
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah petani yang mengalami kerugian akibat dampak perubahan iklim di Kab. Bulukumba	100					Persen													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPDP Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPDP Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Menurunnya jumlah kasus serangan OPT pada tanaman pangan	kasus	0,00	-	0,00	-	3,00	200.000,000	317.108,50	3,00	273.793,50	100,00	136,90	86,34	3,00	273.794	0,00	0,00	
3	27			2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama dan Penyakit	keg	60,00		0,00		12,00	60.000,000	10.076,00	12,00	10.069,00	100,00	16,78	99,93	12,00	10.069	20,00	0,00	
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan mitigasi pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pertanian	pelatih	####		0,00		10	35.000,000	13.390,25	10,00	13.281,25	100,00	37,95	99,19	10,00	13.281	10,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	63,87	95,15			6,67	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	R	ST			SR	SR	
3	27	6	0.00		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tertibnya Pemberian Izin Usaha dibidang peternakan																		
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Usaha Sektter Peternakan Yang Berizin																		
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah usaha sub sektor peternakan yang dilakukan penilaian kelayakan	Usaha	0,00	-	0,00	-	30,00	30.000,000	7.976,00	23,00	5.166,00	76,67	17,22	64,77	23,00	5.166	0,00	0,00	
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah unit usaha sub sektor peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Usaha					120,00	70.000,000	24.313,00	120,00	16.904,00	100,00	24,15	69,53	120,00	16.904	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	88,34	20,68	67,15			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	T	SR	S			SR	SR	
3	27	7	0.00		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Produktivitas Pertanian	Ton/Ha					6,21												
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Yang terlaksana	Persen					100												
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikut	orang	0,00	-	0,00	-	15,00	470.000,000	376.985,00	15,00	334.394,00	100,00	71,15	88,70	15,00	334.394	0,00	0,00	
3	27	7	2.01	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami pe	Jumlah	0,00	-	0,00	-	140,00	70.000,000	3.098,00	140,00	3.096,00	100,00	4,42	99,94	140,00	3.096	0,00	0,00	
3	27	7	2.01	1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarana penyuluhan pertania	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	102.500,000	73.924,00	1,00	73.862,00	100,00	72,06	99,92	1,00	73.862	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	49,21	96,18			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													49.025.691,92	33.045.066,90		27.762.066,632								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	91,43	220,34	82,96			#REF!	#REF!	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	ST	T			#REF!	#REF!	
3	28	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																			
3	28	4	0.00		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana																		
3	28	4	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengelolaan/Rehabilitasi TAHURA																		
3	28	4	2.01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	"Jumlah patroli bersama masyarakat mitra polhut secara berkala, papan informasi dan bahan penyuluhan dan Study Kerja ditaman Hutan Raya juanda Jawa Barat Tersedianya papan informasi"	orang	0,00	-	0,00	-	25,00	723.249,699	16.167,50	25,00	16.166,90	100,00	2,24	100,00	25,00	16.167	0,00	0,00	
3	28	4	2.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	Ha	0,00	-	0,00	-	25,00	105.711,400	20.017,10	24,75	16.047,10	99,00	15,18	80,17	24,75	16.047	0,00	0,00	
3	28	4	2.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	"Jumlah Pelaksanaan Best practice di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan masyarakat TAHURA,Terlaksananya studi banding di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan Workshop pengembangan masyarakat TAHURA Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA"	Kelompo	0,00	-	0,00	-	3,00	52.422,700	13.555,00	3,00	13.555,00	100,00	25,86	100,00	3,00	13.555	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,67	14,42	93,39			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket																
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																			881.383,80	49.739,60	45.769,000														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																			99,67	14,42	93,39					0,00	0,00								
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																			ST	SR	ST					SR	SR								
3	30	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																															
3	30	3	0.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%					100,00																								
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	%					100,00																								
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	pasar	0,00	-	0,00	-	10,00	83.096.800,000	79.783.727,65	0,50	3.991.690,78	5,00	4,80	5,00	0,50	3.991.691	0,00	0,00												
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola																													
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.635.088,980	1.688.830,55	10,80	1.685.207,70	90,00	103,07	99,79	10,80	1.685.208	0,00	0,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			47,50	53,93	52,39					0,00	0,00								
Predikat Kinerja																			SR	R	R					SR	SR								
3	30	4	0.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	%					100,00																								
3	30	4	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%					100,00																								
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	bulan					12,00	194.110,000	255.121,00	12,00	254.995,00	100,00	131,37	99,95	12,00	254.995	0,00	0,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	131,37	99,95					0,00	0,00								
Predikat Kinerja																			ST	ST	ST					SR	SR								
3	30	5	0.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional	%					100,00																								
3	30	5	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional	%					100,00																								
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kali	0,00	-	0,00	-	1,00	112.278,000	39.085,00	1,00	39.085,00	100,00	34,81	100,00	1,00	39.085	0,00	0,00												
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kali					1,00	69.400,000	19.400,00	1,00	19.396,00	100,00	27,95	99,98	1,00	19.396	0,00	0,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	31,38	99,99					0,00	0,00								
Predikat Kinerja																			ST	SR	ST					SR	SR								
3	30	6	0.00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdagangan Barang Dan Jasa	%					100,00																								
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Meterologi Legal	%					100,00																								
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP dan Perlengkapannya yang di Tera dan Tera Ulang	%					30	184.195,950	141.514,50	10,50	47.269,90	35,00	25,66	33,40	10,50	47.270	0,00	0,00												
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan Alat UTTP dan BDKT	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	152.921,000	45.973,00	10,00	45.318,00	100,00	29,63	98,58	10,00	45.318	0,00	0,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			67,50	27,65	65,99					0,00	0,00								
Predikat Kinerja																			S	SR	R					SR	SR								
3	30	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	%					100,00																								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN.	%				100,00													
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen				2,00	75.069,550	31.741,60	2,00	31.570,70	100,00	42,06	99,46	2,00	31.571	0,00	0,00		
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	23.831,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	16.760,800	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	27.674,800	3.418,00	1,00	3.409,00	100,00	12,32	99,74	1,00	3.409	0,00	0,00	
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	32.894,190	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium	%																	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.490.037,196	4.742.543,60	12,00	4.122.267,14	100,00	75,09	86,92	12,00	4.122.267	0,00	0,00	
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	294.586,050	48.840,00	12,00	33.140,00	100,00	11,25	67,85	12,00	33.140	0,00	0,00	
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	202.650,000	113.580,00	1,00	113.580,00	100,00	56,05	100,00	1,00	113.580	0,00	0,00	
3	30	1	2.02	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	10.442,168	3.534,00	1,00	3.526,00	99,78	33,77	99,77	1,00	3.526	0,00	0,00	
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	32.355,493	3.025,90	1,00	2.954,90	100,00	9,13	97,65	1,00	2.955	0,00	0,00	
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan Daerah	%				100,00													
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	OK	0,00	-	0,00	-	5,00	236.357,000	44.250,00	5,00	44.250,00	100,00	18,72	100,00	5,00	44.250	0,00	0,00	
3	30	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	OK	0,00	-	0,00	-	3,00	80.926,000	10.030,00	2,82	9.193,00	94,00	11,36	91,66	2,82	9.193	0,00	0,00	
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor	%				100,00													
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	42.197,637	1.685,00	12,00	1.685,00	100,00	3,99	100,00	12,00	1.685	0,00	0,00	
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0,00	-	0,00	-	3,00	215.121,800	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	peralatan	0,00	-	0,00	-	50,00	41.166,956	3.431,35	50,00	3.431,35	100,00	8,34	100,00	50,00	3.431	0,00	0,00	
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	bulan				12,00	109.245,418	30.666,00	12,00	30.666,00	100,00	28,07	100,00	12,00	30.666	0,00	0,00		
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggadaan	lembar	0,00	-	0,00	-	6000,00	51.212,688	13.654,50	6000,00	13.654,50	100,00	26,66	100,00	#####	13.655	0,00	0,00	
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis	0,00	-	0,00	-	5,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Provinsi	kali	0,00	0,00	-	24,00	305.017,338	75.987,00	24,00	75.918,97	100,00	24,89	99,91	24,00	75.919	0,00	0,00		
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%				100,00													
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	kendaraan	0,00	-	0,00	-	2,00	128.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	buah	0,00	-	0,00	-	18,00	146.054,227	4.400,00	18,00	4.400,00	100,00	3,01	100,00	18,00	4.400	0,00	0,00	
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	125.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.07	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	5,00	347.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.07	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	46.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor	%				100,00													
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dalam Dokumen Persuratan	materai	0,00	-	0,00	-	800,00	13.000,000	1.500,00	800,00	1.500,00	100,00	11,54	100,00	800	1.500	0,00	0,00	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan TV Kabel	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	103.779,824	108.225,60	12,00	102.072,92	100,00	98,36	94,31	12,00	102.073	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
																								K
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Pelrlengkapan Kantor	kali	0,00	-	0,00	-	20,00	29.820,000	7.390,00	20,00	7.390,00	100,00	24,78	100,00	20,00	7.390	0,00	0,00	
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan					12,00	164.437,600	120.600,00	12,36	120.600,00	103,00	73,34	100,00	12,36	120.600	0,00	0,00	
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan BMD	%					100,00												
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara Perpanjangan STNK	kali	0,00	-	0,00	-	34,00	100.000,000	75.000,00	34,00	74.975,18	100,00	74,98	99,97	34,00	74.975	0,00	0,00	
3	30	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Rehabilitasi	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	7.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	80.450,132	40.000,00	1,00	39.950,00	100,00	49,66	99,88	1,00	39.950	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																95,31	31,70	92,60			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	SR	ST			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												94.028.881,80	87.457.154,25		10.923.097,038									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																82,06	55,21	82,18			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																T	R	T			SR	SR		
3	31	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tercapainya peningkatan omset IKM	%					100,00												
3	31	2	0.00		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan	%					100,00												
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Temu Usaha	IKM	0,00	-	0,00	-	2,00	160.000,000	36.186,00	2,00	34.495,00	100,00	21,56	95,33	2,00	34.495	0,00	0,00	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Sarana/Peralatan IKM	IKM	0,00	-	0,00	-	40,00	637.340,710	414.039,20	38,40	396.063,53	96,00	62,14	95,66	38,40	396.064	0,00	0,00	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sertifikat Halal	IKM					2	70.000,000	13.908,00	2,00	11.740,25	100,00	16,77	84,41	2,00	11.740	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,67	33,49	91,80			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	SR	ST			SR	SR		
3	31	4	0.00		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Izin Usaha Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)																		
3	31	4	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi																		
3	31	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi	ecamata	0,00	-	0,00	-	10,00	50.000,000	17.206,70	9,00	14.734,50	90,00	29,47	85,63	9,00	14.735	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																90,00	29,47	85,63			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																T	SR	T			SR	SR		
3	31	4	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Serta Publikasi Industri Daerah Melalui Sistem Informasi Industr																		
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran																		
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Pelaksanaan Pameran	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	76.687,000	121.445,00	1,00	113.793,50	100,00	148,39	93,70	1,00	113.794	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	148,39	93,70			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												994.027,71	602.784,90		570.826,784									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																99,33	90,94	92,75			0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																ST	T	ST			SR	SR			
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																				
4	01	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)																			
4	01	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP, lingkup Sekretariat Daerah																			
4	01	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Pengendalian dan Pelaksanaan Keuangan Sekretariat Daerah	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	105.000,000	61.141,54	12,00	60.580,20	100,00	57,70	99,08	12,00	60.580	20,00	0,00		
4	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Gaji dan Tunjangan, Administrasi Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelanoran SKPD																			
4	01	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	12.765.683,896	10.025.941,75	12,00	9.885.853,24	100,00	77,44	98,60	12,00	9.885.853	20,00	0,00		
4	01	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan dan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	bulan	60,00	-	0,00	-	12,00	239.236,590	196.246,33	12,00	189.383,22	100,00	79,16	96,50	12,00	189.383	20,00	0,00		
4	01	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran lingkup Setda, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran /Prognosis per 6 Bulan	Dokumen				15	61.502,150	60.088,10	15,00	60.021,60	100,00	97,59	99,89	15,00	60.022	0,00	0,00			
4	01	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada lingkup Sekretariat Daerah																			
4	01	1	2.03	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	25.000,000	28.230,00	1,00	19.039,68	100,00	76,16	67,44	1,00	19.040	0,00	0,00		
4	01	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Latihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural dan Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.																			
4	01	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-hari tertentu beserta Atribut Kelengkapannya	pasang	0,00	-	0,00	-	51,00	87.600,000	115.720,00	32,79	62.400,00	64,29	71,23	53,92	32,79	62.400	0,00	0,00		
4	01	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan ASN lingkup Setda	otang	0,00	-	0,00	-	2,00	52.386,000	52.386,00	2,00	39.945,00	100,00	76,25	76,25	2,00	39.945	0,00	0,00		
4	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum lingkup Sekretariat Daerah																			
4	01	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	gedung	0,00	-	0,00	-	3,00	50.877,650	65.373,94	3,00	65.367,40	100,00	128,48	99,99	3,00	65.367	0,00	0,00		
4	01	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup Setda	jenis	0,00	-	0,00	-	4,00	51.011,950	83.352,50	4,00	66.562,50	100,00	130,48	79,86	4,00	66.563	0,00	0,00		
4	01	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Pelayanan dan tugas kedinasan lingkup Setda, serta tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	447.552,740	148.865,50	12,00	148.651,20	100,00	33,21	99,86	12,00	148.651	0,00	0,00		
4	01	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran, Tabloid, Majalah serta Sarana Prasarana Komunikasi dan Terjalinnya Kerjasama Media Massa di Kab. Bulukumba	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	251.650,000	119.664,00	12,00	118.609,00	100,00	47,13	99,12	12,00	118.609	0,00	0,00		
4	01	1	2.06	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu Pejabat Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Terlaksananya dialog audiens dan tokoh masvarakat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	617.000,000	529.020,05	12,00	507.271,85	100,00	82,22	95,89	12,00	507.272	0,00	0,00		
4	01	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	847.382,000	746.385,00	12,00	746.363,62	100,00	88,08	100,00	12,00	746.364	0,00	0,00		
4	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
4	01	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	263.683,349	39.673,48	1,00	35.750,00	100,00	13,56	90,11	1,00	35.750	0,00	0,00	
4	01	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	paket					1	153.091,757	117.293,00	1,00	103.243,00	100,00	67,44	88,02	1,00	103.243	0,00	0,00	
4	01	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan dan Aset lainnya	jenis	0,00	-	0,00	-	5,00	38.458,750	53.641,54	5,00	52.610,19	100,00	136,80	98,08	5,00	52.610	0,00	0,00	
4	01	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0,00	-	0,00	-	5,00	174.374,695	315.347,56	5,00	301.144,00	100,00	172,70	95,50	5,00	301.144	0,00	0,00	
4	01	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jenis	0,00	-	0,00	-	6,00	106.727,500	201.120,15	6,00	195.443,88	100,00	183,12	97,18	6,00	195.444	0,00	0,00	
4	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	01	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	858.107,760	740.070,00	12,00	598.465,02	100,00	69,74	80,87	12,00	598.465	0,00	0,00	
4	01	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	7.450,000	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	
4	01	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.360.213,540	1.171.813,54	12,00	1.098.000,00	100,00	80,72	93,70	12,00	1.098.000	0,00	0,00	
4	01	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah																		
4	01	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten	unit	0,00	-	0,00	-	9,00	109.340,000	253.874,00	9,00	231.795,57	100,00	212,00	91,30	9,00	231.796	0,00	0,00	
4	01	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	unit	0,00	-	0,00	-	25,00	243.458,000	230.345,20	25,00	194.052,80	100,00	79,71	84,24	25,00	194.053	0,00	0,00	
4	01	1	2.09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan, Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Bupati	paket				4,00	910.690,000	2.946.770,00	2,70	1.936.443,30	67,50	212,63	65,71	2,70	1.936.443	0,00	0,00		
4	01	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Gedung Kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	74.659,678	84.996,58	0,90	65.098,02	90,00	87,19	76,59	0,90	65.098	0,00	0,00	
4	01	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.																		
4	01	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	174.125,420	178.478,75	12,00	168.726,20	100,00	96,90	94,54	12,00	168.726	0,00	0,00	
4	01	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	600.000,000	600.000,00	12,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00	12,00	600.000	0,00	0,00	
4	01	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
4	01	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	371.277,420	837.526,50	12,00	811.005,30	100,00	218,44	96,83	12,00	811.005	0,00	0,00	
4	01	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	263.222,410	716.047,75	12,00	618.921,55	100,00	235,13	86,44	12,00	618.922	0,00	0,00	
4	01	1	2.13		Penataan Organisasi	Meningkatnya konsistensi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar, Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPP, Terciptanya pemerintahan yang Bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
4	01	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Evaluasi Jabatan, Dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS dan Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah serta tersusunnya Ranperda dan Ranperbub	Perang kat Daerah	0,00	-	0,00	-	36,00	76.069,020	63.030,09	36,00	62.527,90	100,00	82,20	99,20	36,00	62.528	0,00	0,00	
4	01	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya pada Unit Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SKPD	0,00	-	0,00	-	5,00	36.654,700	12.648,47	5,00	12.314,20	100,00	33,60	97,36	5,00	12.314	0,00	0,00	
4	01	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Reformasi Birokrasi	Dokumen	0,00	-	0,00	-	6,00	36.999,690	16.052,36	6,00	15.829,75	100,00	42,78	98,61	6,00	15.830	0,00	0,00	
4	01	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis	Perang kat Daerah	0,00	-	0,00	-	36,00	43.084,760	15.274,58	36,00	14.675,95	100,00	34,06	96,08	36,00	14.676	0,00	0,00	
4	01	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	54.990,890	32.908,98	1,00	31.392,49	100,00	57,09	95,39	1,00	31.392	0,00	0,00	
4	01	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tercapainya kualitas pelayanan ketersediaan informasi publik melalui PPID																		
4	01	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tersedianya Sarana Penunjang Keprotokolan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	210.063,480	68.602,16	12,00	68.445,55	100,00	32,58	99,77	12,00	68.446	0,00	0,00	
4	01	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Jumpa Pers dan Dialog Publik, Pembuatan Press Rilis Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	77.626,000	29.865,00	12,00	19.148,00	100,00	24,67	64,12	12,00	19.148	0,00	0,00	
4	01	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan, Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan berdasarkan program kerja yang ditetapkan, Meningkatkan kualitas pendokumentasian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	73.919,730	59.498,69	12,00	50.722,40	100,00	68,62	85,25	12,00	50.722	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,52	94,08	90,04			1,82	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	T			SR	SR		
4	01	2	0.00		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga keagamaan dan peneingkatan kesadaran toleransi beragama,Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi,Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu																		
4	01	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya penyusunan dokumen LKPJ, LPPD, RLPPD serta memori serah terima jabatan dan terfasilitasinya pelaksanaan otonomi daerah serta tersedianya laporan pemerintahan yang baik di Kecamatan dan Kelurahan.																		
4	01	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen LKPJ,LPPD, RLPPD,Memori Serah Terima Jabatan dan Terfasilitasinya Pengurusan Surat Keputusan Gubernur/Surat Izin Pejabat Negara	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	243.333,940	116.801,94	4,00	112.879,24	100,00	46,39	96,64	4,00	112.879	0,00	0,00	
4	01	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, 2.Rapat Koordinasi terkait Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi dan Pusat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	49.599,790	36.654,62	12,00	36.615,29	100,00	73,82	99,89	12,00	36.615	0,00	0,00	
4	01	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Terlaksananya Penegasan Tapal Batas Daerah, 2. Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal, 3. Tersusunnya Nama-Nama Rupa Bumi, 4. Tersusunnya Naskah Kerjasama Daerah	segmen	0,00	-	0,00	-	4,00	99.999,870	59.145,87	3,93	54.891,52	98,33	54,89	92,81	3,93	54.892	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
4	01	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatan pada program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial serta Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat.																			
4	01	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Jumlah Guru Kontrak TKA/TPA Penerima Honor/Gaji2. Jumlah Tahapan Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ dan Lasqi3. Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual melalui Pengajian Rutin4.Terlaksananya Bantuan/Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan	g, kali, B	0,00	-	0,00	-	57,00	2.092.944,852	2.704.417,02	57,00	2.534.220,10	100,00	121,08	93,71	57,00	2.534.220	0,00	0,00		
4	01	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Terlaksananya Bantuan/Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan2. Terlaksananya Koordinasi Penanganan di Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan	ulan, ka	0,00	-	0,00	-	12,00	65.000,000	30.910,00	10,20	28.635,13	85,00	44,05	92,64	10,20	28.635	0,00	0,00		
4	01	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Calon/Jamaah Haji yang mendapatkan Pelayanan2. Jumlah Kecamatan yang di kunjungi dalam Safari Ramadhan3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Seleksi Pimpinan BAZNAS	kali, bula	0,00	-	0,00	-	3,00	65.000,000	30.159,87	3,00	25.617,90	100,00	39,41	84,94	3,00	25.618	0,00	0,00		
4	01	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan kasus di Pemerintah Kabupaten, Terseselaikannya Draft Rancangan Peraturan Daerah.																			
4	01	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah2. Tercapainya Pembangunan di Bidang Hukum melalui Koordinasi dan Kerjasama	%	0,00	-	0,00	-	100,00	126.762,240	63.125,34	100,00	62.968,90	100,00	49,67	99,75	100,00	62.969	0,00	0,00		
4	01	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum2. Tercapainya Kabupaten Peduli HAM3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum dan terwujudnya generasi sadar hukum yang dapat menginformasikan hukum kepada masyarakat4. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum, Penanganan kasus dan adanya pertimbangan hukum pada pemerintah daerah.	dokumen	0,00	-	0,00	-	19,00	217.789,000	113.029,76	19,00	107.113,11	100,00	49,18	94,77	19,00	107.113	0,00	0,00		
4	01	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum2. Terpublikasinya produk hukum daerah3. Terwujudnya Penataan Perundang- undangan dan Peraturan Desa dalam bentuk dokumen dan terdistribusinya produk hukum daerah ke provinsi, SKPD dan masyarakat	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	227.994,820	135.062,94	3,00	124.669,15	100,00	54,68	92,30	3,00	124.669	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	98,15	59,24	94,16			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	ST	R	ST			SR	SR		
4	01	3	0.00		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab /Kota yang berdaya saing., Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu,Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.																			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
4	01	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase ketersediaan Informasi Produksi Daerah untuk Promosi dan Investasi, Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat wilayah terpencil, Tersedianya Data Potensi Panas Bumi, Meningkatnya kemampuan modal kelompok-kelompok usaha dimasyarakat dan Tersusunnya Laporan Tingkat Inflasi di Kab. Bulukumba																			
4	01	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	15.000,000	6.230,21	4,00	6.003,00	100,00	40,02	96,35	4,00	6.003	0,00	0,00	
4	01	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersedianya laporan Inflasi dan terkoordinasikannya kegiatan pengendalian Inflasi daerah dengan Tim TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional	laporan	0,00	-	0,00	-	12,00	32.914,390	71.284,66	12,00	68.033,34	100,00	206,70	95,44	12,00	68.033	0,00	0,00	
4	01	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersedianya data Produksi, Promosi dan Informasi Potensi Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000,000	8.530,25	1,00	7.805,70	100,00	39,03	91,51	1,00	7.806	0,00	0,00	
4	01	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dan Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan serta Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
4	01	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1. Terlaksananya Penyusunan Renja/ Renstra Sekretariat Daerah2. Tersedianya Data Laporan Hasil Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	8,00	118.407,980	41.562,35	8,00	40.595,08	100,00	34,28	97,67	8,00	40.595	0,00	0,00	
4	01	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terwujudnya Penyajian Informasi Laporan TEpra dan Laporan APBD secara berkala	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	36.890,420	22.310,16	12,00	21.775,95	100,00	59,03	97,61	12,00	21.776	0,00	0,00	
4	01	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data Laporan dan Pengadaan Pemerintah secara berkala serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi, Tersedianya Dokumen Data Laporan Data Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	53.881,300	15.421,30	12,00	14.505,40	100,00	26,92	94,06	12,00	14.505	0,00	0,00	
4	01	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terbentuknya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik, Tersedianya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Meningkatnya Kapasitas SDM, Asosiasi/Penyedia/Aparatur yang mengikuti pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIRUP																			
4	01	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Proses Barang dan Jasa2. Tersusunnya Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	49.999,710	17.307,71	10,68	16.494,20	89,00	32,99	95,30	10,68	16.494	0,00	0,00	
4	01	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	orang	0,00	-	0,00	-	150,00	371.892,100	352.521,90	150,00	351.465,35	100,00	94,51	99,70	150,00	351.465	0,00	0,00	
4	01	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE bagi ASN dan Asosiasi/Penyedia2. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	54.046,200	33.120,08	13,56	32.384,73	113,00	59,92	97,78	13,56	32.385	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,22	65,93	96,16				0,00	0,00		
Predikat Kinerja															ST	R	ST				SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												25.861.628,14	24.874.889,06		22.902.476,66									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															98,96	73,08	93,45				0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															ST	S	ST				SR	SR		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD																				
4	01	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																			
4	01	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaporan keuangan Akhir Tahun, Tertibnya administrasi pembukuan keuangan Setda, Tersusunnya dokumen anggaran setda, administrasi perbendaharaan Setda, Meningkatnya wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan Terlaksananya TPTGR																			
4	02	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen					100,00	100.000,00	74.998,40	91,67	68.945,54	91,67	68,95	91,93	91,67	68.946	0,00	0,00		
4	02	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000,00	4.391,00	0,99	1.929,00	99,00	38,58	43,93	0,99	1.929	0,00	0,00		
4	02	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Bulan					12,00	35.000,00	24.959,90	12,00	16.988,00	100,00	48,54	68,06	12,00	16.988	0,00	0,00		
4	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan admistrasi keuangan																			
4	02	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	4.073.762,41	3.259.964,58	100,00	3.153.000,42	100,00	77,40	96,72	100,00	3.153.000	0,00	0,00		
4	02	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	180.000,00	100.000,00	12,00	90.134,20	100,00	50,07	90,13	12,00	90.134	0,00	0,00		
4	02	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	60.944,50	34.736,00	12,00	28.499,44	100,00	46,76	82,05	12,00	28.499	0,00	0,00		
4	02	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	7.002,96	3.999,80	1,00	3.997,40	100,00	57,08	99,94	1,00	3.997	0,00	0,00		
4	02	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyipapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen					2,00	20.000,00	20.000,00	1,00	8.406,00	50,00	42,03	42,03	1,00	8.406	0,00	0,00		
4	01	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah																			
4	02	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	9.174,00	5.592,45	91,67	5.412,60	91,67	59,00	96,78	91,67	5.413	0,00	0,00		
4	01	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan bahan rumah tangga,Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannva																			
4	02	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD	Pasang	0,00	-	0,00	-	80,00	200.000,00	176.000,00	80,00	176.000,00	100,00	88,00	100,00	80,00	176.000	0,00	0,00		
4	02	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	500.000,00	2.503.200,00	99,00	2.081.410,60	99,00	416,28	83,15	99,00	2.081.411	0,00	0,00		
4	02	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	100.000,00	79.999,90	12,00	56.775,32	100,00	56,78	70,97	12,00	56.775	0,00	0,00		
4	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan bahan rumah tangga,Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah																			
4	02	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.800,64	4.998,55	15,00	4.998,55	125,00	31,64	100,00	15,00	4.999	0,00	0,00		
4	02	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	10.429,53	53.620,88	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	02	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.000.000,00	2.297.501,16	12,00	1.171.254,80	100,00	117,13	50,98	12,00	1.171.255	0,00	0,00		
4	02	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	90.000,00	89.990,00	90,00	38.400,00	90,00	42,67	42,67	90,00	38.400	0,00	0,00		
4	02	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	300.000,00	248.858,30	12,00	247.681,82	100,00	82,56	99,53	12,00	247.682	0,00	0,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
4	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah									0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
4	02	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang disediakan	Unit				1	300.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	02	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	persen				100	27.000,00	191.537,50	80,00	2.530,00	80,00	9,37	1,32	80,00	2.530	0,00	0,00		
4	02	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persen				100	500.000,00	820.603,08	98,33	787.968,35	98,33	157,59	96,02	98,33	787.968	0,00	0,00		
4	02	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	50.000,00	266.034,45	95,00	56.354,90	95,00	112,71	21,18	95,00	56.355	0,00	0,00	
4	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	02	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan Surat Menyurat	macamata	0,00	-	0,00	-	10,00	1.956,00	1.956,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	02	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan Jasa internet, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	522.428,75	384.593,01	12,00	280.390,24	100,00	53,67	72,91	12,00	280.390	0,00	0,00	
4	02	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat	Buah	0,00	-	0,00	-	19,00	4.000,00	4.000,00	19,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	19,00	4.000	0,00	0,00	
4	02	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, Terbayarnya Gaji supporting staf Sekretariat DPRD	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	605.850,00	654.201,40	12,00	647.378,21	100,00	106,85	98,96	12,00	647.378	0,00	0,00	
4	01	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah																		
4	02	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0,00	-	0,00	-	4,00	150.000,00	48.634,00	3,70	27.444,54	92,50	18,30	56,43	3,70	27.445	0,00	0,00	
4	02	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	Unit	0,00	-	0,00	-	16,00	144.775,00	100.000,00	15,60	94.922,00	97,50	65,57	94,92	15,60	94.922	0,00	0,00	
4	02	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	3.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	02	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	50.000,00	1.529.998,67	12,00	1.250.655,07	100,00	2501,31	81,74	12,00	1.250.655	0,00	0,00	
4	02	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	40.008,80	20.005,30	12,00	17.556,00	100,00	43,88	87,76	12,00	17.556	0,00	0,00	
4	02	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persen	0,00	-	0,00	-	100,00	40.325,00	15.250,00	99,17	15.105,00	99,17	37,46	99,05	99,17	15.105	0,00	0,00	
4	01	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpeliharanya dan Terlaksananya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD, pengendalian anggaran kas lingkup sekretariat DPRD																		
4	02	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.260.168,44	19.136.600,00	12,36	18.545.030,13	103,00	96,29	96,91	12,36	18.545.030	0,00	0,00	
4	02	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	kali				1,00	100.000,00	100.000,00	0,99	40.121,70	99,00	40,12	40,12	0,99	40.122	0,00	0,00		
4	01	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD																		
4	02	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	150.879,59	99.933,30	12,00	98.175,00	100,00	65,07	98,24	12,00	98.175	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															88,21	143,38	69,83				0,00	0,00		
Predikat Kinerja															T	ST	S				SR	SR		
4	02	2	0.00		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi ke Tingkat Pusat dan Provinsi																		
4	02	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terciptanya Produk Hukum Daerah																		
4	02	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terciptanya Produk Hukuim Daerah	Ranperda	0,00	-	0,00	-	19,00	698.206,742	377.830,70	17,42	306.786,10	91,67	43,94	81,20	17,42	306.786	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	Rp (000)		K	Rp (000)
4	02	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat paripurna	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	400.000,000	399.993,70	12,00	397.780,20	100,00	99,45	99,45	12,00	397.780	0,00	0,00	
4	02	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Sinkronisasi Produk Hukum DPRD	Kali	0,00	-	0,00	-	19,00	34.947,539	24.978,00	17,42	20.334,44	91,67	58,19	81,41	17,42	20.334	0,00	0,00	
4	02	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	150.000,000	100.000,00	12,00	99.900,00	100,00	66,60	99,90	12,00	99.900	0,00	0,00	
4	02	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terciptanya dan meningkatnya Produk Hukum Daerah jasa Kelompok pakar dan tim ahli Jasa tenaga ahli Fraksi Bimbingan Teknis DPRD untuk peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD publikasi dan informasi DPRD																		
4	02	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	bulan					12,00	1.753.403,168	999.999,90	12,00	784.501,28	100,00	44,74	78,45	12,00	784.501	0,00	0,00	
4	02	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan, Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah	bulan					12,00	693.736,781	447.803,20	12,00	437.628,20	100,00	63,08	97,73	12,00	437.628	0,00	0,00	
4	02	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	bulan					12,00	283.800,000	195.000,00	12,00	107.500,00	100,00	37,88	55,13	12,00	107.500	0,00	0,00	
4	02	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	bulan					12,00	369.706,722	336.000,00	12,00	336.000,00	100,00	90,88	100,00	12,00	336.000	0,00	0,00	
4	02	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya dan tersusunnya Penyerapan aspirasi Masyarakat kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan Pokok - pokok Pikiran DPRD																		
4	02	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	20.000,000	19.994,30	12,00	1.418,00	100,00	7,09	7,09	12,00	1.418	0,00	0,00	
4	02	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penerimaan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Bulan					12,00	70.000,000	54.979,50	12,00	48.743,50	100,00	69,63	88,66	12,00	48.744	0,00	0,00	
4	02	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Kali	0,00	-	0,00	-	2,00	1.282.050,869	1.823.199,20	1,99	1.796.120,50	99,50	140,10	98,51	1,99	1.796.121	0,00	0,00	
4	02	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									0,00	-	0,00	0,00	0,00					
4	02	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	4.905.073,702	3.322.837,40	12,00	3.303.909,05	100,00	67,36	99,43	12,00	3.303.909	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	98,57	65,74	82,25			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	R	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													39.318.431,13	40.460.773,52		36.662.086,09								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	93,39	104,56	76,04			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	ST	T			SR	SR	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%					100,00												
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan lingkup Bappeda	%					100,00												
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	0,00	-	0,00	-	7,00	110.730,000	110.337,73	7,00	109.323,58	100,00	98,73	99,08	7,00	109.324	0,00	0,00	
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang tersusun	Dok	0,00	-	0,00	-	2,00	40.362,050	14.290,41	2,00	14.223,41	100,00	35,24	99,53	2,00	14.223	0,00	0,00	
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPAP yang Tersusun	Dok	0,00	-	0,00	-	2,00	98.186,650	8.034,69	1,65	6.527,69	82,25	6,65	81,24	1,65	6.528	0,00	0,00	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik/ Keuangan, Lakip dan LPPD yang Tersusun	Dok	0,00	-	0,00	-	14,00	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Dok	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	29.413,46	1,00	29.395,31	100,00	293,95	99,94	1,00	29.395	0,00	0,00	
5	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan serta administrasi perkantoran Lingkup Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00												
5	01	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dalam pelayanan Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.078.918,898	4.917.748,48	12,00	4.217.816,92	100,00	69,38	85,77	12,00	4.217.817	0,00	0,00	
5	01	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	132.000,000	119.100,77	12,00	110.690,77	100,00	83,86	92,94	12,00	110.691	0,00	0,00	
5	01	1	2.02	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rekapitulasi hasil tanggapan inspektorat ASN	%	0,00	-	0,00	-	100,00	78.750,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
5	01	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	11.300,000	7.071,58	1,00	7.065,58	100,00	62,53	99,92	1,00	7.066	0,00	0,00		
5	01	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rekapitulasi hasil tanggapan inspektorat	%	0,00	-	0,00	-	100,00	3.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bappeda di bidang administrasi,teknis dan fungsional terutama pada sistem Perencanaan pembangunan	%					100,00													
5	01	1	2.03	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dilatih	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	44.250,000	44.250,00	1,90	39.125,00	95,00	88,42	88,42	1,90	39.125	0,00	0,00		
5	01	1	2.03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/Ka	0,00	-	0,00	-	150,00	339.905,000	87.567,73	134,70	77.743,73	89,80	22,87	88,78	134,70	77.744	0,00	0,00		
5	01	3	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00													
5	01	3	2.04	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket					1,00	10.080,000	5.516,50	1,00	5.516,50	100,00	54,73	100,00	1,00	5.516	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	53.219,856	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	13.787,000	10.735,84	1,00	10.735,84	100,00	77,87	100,00	1,00	10.736	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor,Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	209.725,025	108.499,90	1,00	108.327,00	100,00	51,65	99,84	1,00	108.327	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	17.400,000	12.114,19	1,00	12.114,19	100,00	69,62	100,00	1,00	12.114	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	16.498,900	14.710,85	12,00	14.697,65	100,00	89,08	99,91	12,00	14.698	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	0,00	-	0,00	-	98,00	386.206,149	130.146,00	98,00	130.126,73	100,00	33,69	99,99	98,00	130.127	0,00	0,00		
5	01	3	2.04	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persen penerapan SPBE dalam Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah	%	0,00	-	0,00	-	10,00	125.363,895	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	3	2.05		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00													
5	01	1	2.05	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	72.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.05	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas Eselon III dan Motor Dinas Eselon IV	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	318.200,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.05	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	74.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.05	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	9.238,900	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.05	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	150.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.05	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	7.500,000	30.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
5	01	1	2.06	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	134.998,405	94.198,88	11,76	90.545,30	98,00	67,07	96,12	11,76	90.545	0,00	0,00		
5	01	1	2.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	bulan					12	166.899,000	89.932,50	11,76	86.549,00	98,00	51,86	96,24	11,76	86.549	0,00	0,00		
5	01	1	2.07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00													
5	01	1	2.07	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional,Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	73.475,063	57.200,00	1,00	53.846,35	100,00	73,29	94,14	1,00	53.846	0,00	0,00		
5	01	1	2.07	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit					1,00	38.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	1	2.07	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit					1,00	16.467,000	14.905,00	1,00	14.875,00	100,00	90,33	99,80	1,00	14.875	0,00	0,00		
5	01	1	2.07	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	11.411,770	14.662,75	1,00	14.662,75	100,00	128,49	100,00	1,00	14.663	0,00	0,00		
5	01	1	2.07	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	56.786,000	13.420,00	1,00	13.414,00	100,00	23,62	99,96	1,00	13.414	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	85,96	65,54	84,23			0,00	0,00		

5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%					100,00												
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terciptanya sinergi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan OPD	%					100,00												
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnva	kali					20,00	210.000,000	73.466,96	20,00	69.429,13	100,00	33,06	94,50	20,00	69.429	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)	kali					1,00	30.000,000	17.288,07	0,96	15.613,67	95,50	52,05	90,31	0,96	15.614	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RENSTRA dan RENJA	kali					1,00	150.000,000	28.400,18	1,00	27.687,46	100,00	18,46	97,49	1,00	27.687	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	kali					1,00	75.000,000	18.000,13	1,00	14.766,13	100,00	19,69	82,03	1,00	14.766	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan	ecamatan					10,00	227.910,120	44.512,23	7,30	32.445,23	73,00	14,24	72,89	7,30	32.445	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	dokumen					1,00	200.000,000	100.927,84	0,99	99.327,84	99,10	49,66	98,41	0,99	99.328	0,00	0,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya akurasi, efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan dukungan basis data yang akurat guna peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program-program Pembangunan Daerah	%				100,00												
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis terhadap data dan informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	dokumen				1,00	416.468,910	102.336,92	0,94	95.279,44	94,02	22,88	93,10	0,94	95.279	0,00	0,00	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Matriks RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan RKPD-P yang dihasilkan.	dokumen				4,00	348.140,000	188.582,62	3,84	180.398,29	96,00	51,82	95,66	3,84	180.398	0,00	0,00	
5	01	02	1.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Daerah yang dilengkapi dengan Video Explainer / Video Penjelasan lengkap tentang Kabupaten Bulukumba.	dokumen				1,00	183.377,705	78.550,51	0,94	73.133,02	94,00	39,88	93,10	0,94	73.133	0,00	0,00	
5	01	02	103		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah	%				100,00												
5	01	02	103	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD	dokumen				3,00	121.799,500	247.604,52	2,28	187.912,41	76,10	154,28	75,89	2,28	187.912	0,00	0,00	
5	01	02	103	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen				4,00	120.000,000	106.289,95	3,60	94.730,40	90,00	78,94	89,12	3,60	94.730	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																92,52	48,63	89,32			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	SR	T			SR	SR	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang sosbud yang berkualitas	%				18,00												
5	01	03	101		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Trwjdnnya rapat,asistensi,sosialisasi,konsultasi, monev peny. dok kemiskinan(RPKD&LP2KD),terbentuknya tim koor pnnnggulangan kmisknan&tim penye revisi RPJMDDes perenc pnnnggulngan kmisknan sub bid. pmrinthn kpndudukan capil&pemb desa,Koordinasi bid KFSOS PPPA	%				100,00												
5	01	03	101	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	paket				18,00	130.000,000	117.931,11	17,64	114.642,45	98,00	88,19	97,21	17,64	114.642	0,00	0,00	
5	01	03	101	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	dok				4,00	60.000,000	61.427,73	3,84	58.916,33	96,00	98,19	95,91	3,84	58.916	0,00	0,00	
5	01	03	101	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	kali				4,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	03	101	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan,Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	paket				1,00	150.000,000	175.538,00	0,69	120.710,88	69,00	80,47	68,77	0,69	120.711	0,00	0,00	
5	01	03	101	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	paket				15,00	105.000,000	59.090,18	15,00	58.796,18	100,00	56,00	99,50	15,00	58.796	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
5	01	03	101	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dok					4,00	95.000,000	73.403,73	3,96	72.161,48	99,00	75,96	98,31	3,96	72.161	0,00	0,00	
5	01	03	101	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali					4,00	110.000,000	169.829,85	3,48	146.363,06	87,00	133,06	86,18	3,48	146.363	0,00	0,00	
5	01	03	101	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali					24,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	03	102		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	terlaksananya keg Koordinasi, rapat koordinasi, Asistensi, Monev Penyusunan dok Pere Pembangunan Bid pnnamn modal&tenaga ,perindustrian &perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil & menengah ,Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terhadap OPD Tehnis terkait	%					100,00												
5	01	03	102	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	kali	0,00	-	0,00	-	29,00	133.000,000	86.922,07	18,85	55.780,04	65,00	41,94	64,17	18,85	55.780	0,00	0,00	
5	01	03	102	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dok	0,00	-	0,00	-	4,00	103.000,000	38.725,00	3,96	38.100,11	99,00	36,99	98,39	3,96	38.100	0,00	0,00	
5	01	03	102	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dok	0,00	-	0,00	-	4,00	80.000,000	110.777,68	1,96	53.228,22	49,00	66,54	48,05	1,96	53.228	0,00	0,00	
5	01	03	102	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dok					24,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	03	102	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	kali					19,00	100.000,000	78.198,24	15,58	63.362,17	82,00	63,36	81,03	15,58	63.362	0,00	0,00	
5	01	03	102	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	dok	0,00	-	0,00	-	4,00	30.000,000	35.347,76	3,88	34.071,56	97,00	113,57	96,39	3,88	34.072	0,00	0,00	
5	01	03	102	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	dok	0,00	-	0,00	-	4,00	29.000,000	44.292,00	3,96	43.735,38	99,08	150,81	98,74	3,96	43.735	0,00	0,00	
5	01	03	102	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	"Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA"	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	25.000,000	-	0,44	-	44,07	0,00	0,00	0,44	-	0,00	0,00	
5	01	03	103		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan kualitas,kuantitas bidang infrastruktur dan kewilavahan	%					100,00												
5	01	03	103	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kali	0,00	-	0,00	-	27,00	125.000,000	285.754,93	26,73	282.121,66	99,00	225,70	98,73	26,73	282.122	0,00	0,00	
5	01	03	103	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	75.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	03	103	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
5	01	03	103	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinkronisasi,Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang infrastuktur	Dokumen	0,00	-	0,00	-	23,00	100.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	03	103	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kali	0,00	-	0,00	-	27,00	125.000,000	274.460,52	25,12	255.209,36	93,04	204,17	92,99	25,12	255.209	0,00	0,00		
5	01	03	103	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	75.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	03	103	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	01	03	103	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kali	0,00	-	0,00	-	31,00	100.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																58,01	65,22	55,65			58,01	65,22			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													13.021.856,30	8.551.515,99		7.455.244,156	Predikat Kinerja	R	R	R			R	R	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	78,83	59,80	76,40			0,00	8,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	T	R	T			SR	SR		
5	02				KEUANGAN																				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Dokumen RENJA, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Dokumen Laporan Realisasi Fisik Keuangan dan Daftar Gaji Bulanan, Gaji terusan, daftar Kekurangan Gaji, TPP,Administrasi Tugas ASN, LKIP, Penyusunan BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, SPJ Adminitratif, dan R																			
5	02	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen					2,00	43.808,450	37.339,74	2,00	35.670,10	100,00	81,42	95,53	2,00	35.670	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen					1,00	9.483,580	8.534,94	1,00	8.510,90	100,00	89,74	99,72	1,00	8.511	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1,00	9.483,690	8.535,27	1,00	7.773,20	100,00	81,96	91,07	1,00	7.773	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran	Dokumen					1,00	8.438,580	7.594,44	1,00	6.078,40	100,00	72,03	80,04	1,00	6.078	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	Dokumen					1,00	8.438,580	8.535,27	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)	Dokumen					1,00	6.009,000	5.408,90	1,00	4.763,90	100,00	79,28	88,08	1,00	4.764	0,00	0,00		
5	02	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan					12,00	158.427,310	139.838,59	12,00	127.109,55	100,00	80,23	90,90	12,00	127.110	0,00	0,00		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0,00	0,00	0,00						
5	02	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Daerah	bulan					12,00	10.994.494,727	8.869.974,58	12,00	7.833.567,86	100,00	71,25	88,32	12,00	7.833.568	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pembayaran Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga	bulan					12,00	136.315,250	89.950,29	12,00	34.250,20	100,00	25,13	38,08	12,00	34.250	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga	Dokumen					1,00	421.500,790	266.395,90	1,00	233.955,80	100,00	55,51	87,82	1,00	233.956	0,00	0,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
5	02	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen				1,00	11.512,600	10.361,25	1,00	10.359,00	100,00	89,98	99,98	1,00	10.359	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	semester				1,00	3.000,030	1.799,90	1,00	1.799,40	100,00	59,98	99,97	1,00	1.799	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	semester				1,00	1.000,000	900,00	1,00	899,70	100,00	89,97	99,97	1,00	900	0,00	0,00		
5	02	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran										0,00	0,00	0,00						
5	02	01	2.02	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian	bulan				12,00	11.130,000	10.800,00	12,00	3.600,00	100,00	32,35	33,33	12,00	3.600	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kedisiplinan dan Peningkatan kualitas SDM bagi ASN yang mengikuti DIKLAT Kepemimpinan	orang				1,00	52.125,000	44.250,00	1,00	44.250,00	100,00	84,89	100,00	1,00	44.250	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi	orang				6,00	8.797,520	6.770,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	01	2.02	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi	orang				6,00	31.590,000	15.416,10	6,00	13.967,00	100,00	44,21	90,60	6,00	13.967	0,00	0,00		
5	02	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du										0,00	0,00	0,00						
5	02	01	2.03	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	18.798,700	9.200,13	1,00	5.085,00	100,00	27,05	55,27	1,00	5.085	0,00	0,00	
5	02	01	2.03	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	27.020,000	16.950,00	12,00	16.950,00	100,00	62,73	100,00	12,00	16.950	0,00	0,00	
5	02	01	2.03	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Paket				1,00	10.292,700	7.403,55	1,00	6.955,00	100,00	67,57	93,94	1,00	6.955	0,00	0,00		
5	02	01	2.03	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor BPKD yang tersedia	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	411.670,650	438.055,42	12,00	405.720,75	100,00	98,55	92,62	12,00	405.721	0,00	0,00	
5	02	01	2.03	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar Spanduk dan Penggandaan yang disiapkan	Bulan				12,00	256.489,100	132.229,54	12,00	132.229,40	100,00	51,55	100,00	12,00	132.229	0,00	0,00		
5	02	01	2.03	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah lembar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	3.330,000	1.927,50	12,00	1.080,00	100,00	32,43	56,03	12,00	1.080	0,00	0,00	
5	02	01	2.03	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia	Bulan				12,00	46.873,040	37.004,97	12,00	37.003,00	100,00	78,94	99,99	12,00	37.003	0,00	0,00		
5	02	01	2.03	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Bulan				12,00	285.605,210	158.026,17	12,00	156.986,26	100,00	54,97	99,34	12,00	156.986	0,00	0,00		
5	02	01	2.04		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																		
5	02	01	2.04	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	Unit				1,00	924.030,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua)	Unit				2,00	50.000,000	102.842,96	1,95	99.178,00	97,67	198,36	96,44	1,95	99.178	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur seperti Meja/Kursi kerja BPKD	Buah				25,00	169.445,000	46.970,00	25,00	40.030,00	100,00	23,62	85,22	25,00	40.030	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor BPKD	Unit				5,00	35.000,000	623.811,16	5,00	622.903,35	100,00	1779,72	99,85	5,00	622.903	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor	Paket				1,00	45.000,000	14.998,60	0,80	11.373,88	80,00	25,28	75,83	0,80	11.374	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	Buah				40,00	384.177,990	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	01	2.04	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung yang tersedia	Buah				5,00	25.463,750	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
5	02	01	2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																			
5	02	01	2.05	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan	bulan					12,00	258.440,724	302.011,34	9,96	241.706,36	83,00	93,52	80,03	9,96	241.706	0,00	0,00	
5	02	01	2.05	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPKD	bulan					12,00	354.780,547	277.988,00	12,00	231.085,00	100,00	65,13	83,13	12,00	231.085	0,00	0,00	
5	02	01	2.06		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																		
5	02	01	2.06	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan Eselon II BPKD dan STNK yang dipelihara	Unit					1,00	30.000,000	13.500,00	1,00	13.433,56	100,00	44,78	99,51	1,00	13.434	0,00	0,00	
5	02	01	2.06	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional baik Roda Dua maupun Roda 4 yang dipelihara dan jumlah pajak	Unit					23,00	107.050,000	91.900,00	15,92	61.021,01	69,23	57,00	66,40	15,92	61.021	0,00	0,00	
5	02	01	2.06	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara	Buah					5,00	2.000,000	1.981,50	5,00	1.299,00	100,00	64,95	65,56	5,00	1.299	0,00	0,00	
5	02	01	2.06	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Bulan					12,00	112.315,242	74.624,68	12,00	74.276,18	100,00	66,13	99,53	12,00	74.276	0,00	0,00	
5	02	01	2.06	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	buah					12,00	16.240,000	17.990,00	12,00	17.980,00	100,00	110,71	99,94	12,00	17.980	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															66,60	80,82	58,64			0,00	0,00			
Predikat Kinerja															S	T	R			SR	SR			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah, evaluasi dokumen keuangan, serta pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP, Perda APBD , Perda APBDP, Perbup Penjabaran APBD, Perbup Penjabaran Perubahan APBD, Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran, Perbup Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, Sisdur Pedoman Penyusunan APBD, Data Potensi Pendapa																		
5	02	02	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen					2	165.230,760	162.460,76	1,70	135.293,25	85,00	81,88	83,28	1,70	135.293	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen					2	145.169,760	70.800,00	2,00	69.825,90	100,00	48,10	98,62	2,00	69.826	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	OPD					46	208.066,000	133.985,86	43,81	126.122,80	95,24	60,62	94,13	43,81	126.123	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	OPD					46	158.755,000	56.894,72	32,66	37.149,00	71,00	23,40	65,29	32,66	37.149	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	OPD					46	53.779,700	47.570,08	41,62	42.469,00	90,48	78,97	89,28	41,62	42.469	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	OPD					46	53.779,700	30.876,95	13,14	5.947,00	28,57	11,06	19,26	13,14	5.947	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan		Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
5	02	02	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	dokumen					2	393.485,500	354.136,54	1,80	308.928,86	90,00	78,51	87,23	1,80	308.929	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	dokumen					2	424.203,500	332.075,23	1,70	276.229,60	85,00	65,12	83,18	1,70	276.230	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisdir keuangan tentang pedoman penyusunan APBD	dokumen					2	89.325,000	53.134,81	1,20	28.736,72	60,00	32,17	54,08	1,20	28.737	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang disusun	bulan					12	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah perencanaan anggaran belanja yang dikoordinasikan	bulan					12	442.741,000	330.203,00	12,00	292.566,66	100,00	66,08	88,60	12,00	292.567	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan	bulan					12	85.150,000	85.149,99	12,00	84.548,80	100,00	99,29	99,29	12,00	84.549	0,00	0,00		
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah	bulan					12	118.870,000	79.470,00	12,00	75.694,59	100,00	63,68	95,25	12,00	75.695	0,00	0,00		
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peny. Laporan Dana Transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, DAU Tambahan Kelurahan, Dokumen Penerbitan SP2D, Daftar Penguji ke Bank Sulselbar, Data Administrasi Gaji PNS dan Data TPG, Data Rekonsiliasi Pemun																			
5	02	02	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang terkelola dengan baik	Bulan					12	75.000,000	36.175,95	12,00	36.175,65	100,00	48,23	100,00	12,00	36.176	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Bulan					12	30.000,000	13.499,91	12,00	13.499,91	100,00	45,00	100,00	12,00	13.500	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan	OPD					48	71.000,000	46.826,56	48,00	46.689,56	100,00	65,76	99,71	48,00	46.690	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah alokasi dana pembiayaan	Tahun					1	20.000,000	13.500,00	1,00	12.925,15	100,00	64,63	95,74	1,00	12.925	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnva	Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnva yang dibuat	Dokumen					4	205.000,000	193.182,07	3,80	176.811,63	95,00	86,25	91,53	3,80	176.812	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD kerjasama pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	OPD					48	20.000,000	13.499,87	48,00	13.497,87	100,00	67,49	99,99	48,00	13.498	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	Laporan					3	20.000,000	13.499,79	3,00	13.444,34	100,00	67,22	99,59	3,00	13.444	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun	Laporan					2	20.000,000	8.999,87	2,00	8.804,87	100,00	44,02	97,83	2,00	8.805	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dibuat	Bulan					12	213.251,950	130.691,45	12,00	130.672,65	100,00	61,28	99,99	12,00	130.673	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tersusun	Pedoman					1	20.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pada pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	OPD					48	129.936,490	141.626,36	30,86	81.025,40	64,29	62,36	57,21	30,86	81.025	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya data Rekonsiliasi Pendapatan Penerimaan BUD, Non BUD, Penatausahaan Akuntansi, Rancangan Perda, dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD, Laporan Semester Pemda, Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD, data rekonsiliasi pelaporan, Kebijakan Akunta																		
5	02	02	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun	Bulan					12	132.899,000	132.544,06	12,00	131.683,40	100,00	99,09	99,35	12,00	131.683	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan yang dievaluasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen					2	86.169,520	34.383,00	2,00	34.213,00	100,00	39,70	99,51	2,00	34.213	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Dokumen					3	53.999,990	30.514,46	3,00	30.433,76	100,00	56,36	99,74	3,00	30.434	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Dokumen					2	69.438,020	55.616,74	2,00	55.428,32	100,00	79,82	99,66	2,00	55.428	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah buku rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	Buku					55	112.851,020	67.712,46	55,00	67.663,09	100,00	59,96	99,93	55,00	67.663	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibuat	Dokumen					1	21.863,620	15.299,80	1,00	14.636,65	100,00	66,95	95,67	1,00	14.637	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah TPTGR	Dokumen					1	27.420,000	24.677,71	1,00	19.875,95	100,00	72,49	80,54	1,00	19.876	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Dokumen					2	74.189,920	40.716,79	2,00	40.532,68	100,00	54,63	99,55	2,00	40.533	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah buku Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Dokumen					1	62.753,000	38.475,68	1,00	35.623,35	100,00	56,77	92,59	1,00	35.623	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	Dokumen					1	20.000,000	39.440,70	1,00	39.020,70	100,00	195,10	98,94	1,00	39.021	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten	OPD					48	90.786,190	72.492,30	48,00	71.317,09	100,00	78,55	98,38	48,00	71.317	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	OPD					1	44.550,000	28.215,67	0,86	23.775,15	86,00	53,37	84,26	0,86	23.775	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen					1	48.459,660	17.999,74	1,00	17.926,00	100,00	36,99	99,59	1,00	17.926	0,00	0,00	
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran ADD, BDD, BTT, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	%					95												
				3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan					1	20.000,000	156.749,70	1,00	152.662,60	100,00	763,31	97,39	1,00	152.663	0,00	0,00	
				8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapat Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Desa					110	178.848.524,546	171.281.379,64	110,00	171.280.342,66	100,00	95,77	100,00	110,00	171.280.343	0,00	0,00	
				9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang tersalur	Bulan					12	12.862.301,207	10.631.393,29	12,00	658.045,60	100,00	5,12	6,19	12,00	658.046	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
				10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Desa					110	6.464.907,880	8.957.831,55	90,00	6.834.570,85	81,82	105,72	76,30	90,00	6.834.571	0,00	0,00	
5	02	02	2.03		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya penatausahaan akuntansi pelaporan keuangan daerah	%					95												
5	02	02	2.03	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah terpelihara	Aplikasi					4	99.923,000	118.410,79	3,70	107.510,00	92,50	107,59	90,79	3,70	107.510	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	OPD					48	216.260,000	122.845,23	27,43	66.000,00	57,14	30,52	53,73	27,43	66.000	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																92,24	82,41	87,10			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	T	T			SR	SR		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah							-											
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	tersedianya standar harga, RKBMD, Pedoman Standar Kebutuhan BMD, Data BMD, Dokumen Pengguna BMD, Dokumen Penghapusan BMD, Dokumen Hibah BMD, Data Rekonsiliasi BMD, Laporan Akhir Tahun BMD, Materi Sosialisasi BMD.							0,00											
5	02	03	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	buku					1	99.871,010	59.026,90	1,00	55.844,41	100,00	55,92	94,61	1,00	55.844	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	dokumen					1	14.399,690	18.195,86	1,00	18.087,70	100,00	125,61	99,41	1,00	18.088	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	dokumen					2	117.798,150	88.518,52	1,80	76.205,44	90,00	64,69	86,09	1,80	76.205	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	dokumen					1	25.000,000	22.499,91	0,90	19.697,65	90,00	78,79	87,55	0,90	19.698	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	dokumen					3	90.876,230	39.486,00	3,00	39.302,40	100,00	43,25	99,54	3,00	39.302	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	dokumen					2	133.590,540	69.909,61	2,00	69.773,60	100,00	52,23	99,81	2,00	69.774	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	dokumen					1	38.710,730	24.718,20	1,00	22.328,05	100,00	57,68	90,33	1,00	22.328	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	dokumen					1	37.974,020	28.832,00	1,00	26.904,00	100,00	70,85	93,31	1,00	26.904	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen, pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba	dokumen					1	151.496,000	99.814,70	1,00	91.501,84	100,00	60,40	91,67	1,00	91.502	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	laporan					1	17.488,440	15.739,55	1,00	15.547,40	100,00	88,90	98,78	1,00	15.547	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	laporan					1	66.320,460	50.795,00	1,00	50.273,50	100,00	75,80	98,97	1,00	50.274	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	peserta					150	55.355,840	26.999,77	150,00	26.971,75	100,00	48,72	99,90	150,00	26.972	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,33	68,57	95,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	S	ST			SR	SR		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang berkelanjutan																		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penerimaan PAD																		
5	02	04	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Perumusan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah	bulan					12	139.649,850	347.313,20	11,00	116.160,40	91,67	83,18	33,45	11,00	116.160	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah (PBB) yang berbasis Teknologi Informasi	bulan					12	400.000,000	400.000,00	12,00	377.755,29	100,00	94,44	94,44	12,00	377.755	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
5	02	04	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak dan Retribusi Daerah yang Optima	bulan					12	375.219,000	795.142,00	12,00	250.766,10	100,00	66,83	31,54	12,00	250.766	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Basis Data Pajak Daerah Yang Up to Date	bulan					12	438.917,000	334.623,80	12,00	324.360,30	100,00	73,90	96,93	12,00	324.360	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan dan Tersusunnya Surat Ketetapan	bulan					12	126.605,800	109.530,90	12,00	66.352,90	100,00	52,41	60,58	12,00	66.353	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terwujudnya Penatausahaan,pembukuan,pelaporan dan rekonsiliasi PAD Sesuai Standar Akuntansi	bulan					12	165.275,000	84.647,00	12,00	58.383,90	100,00	35,33	68,97	12,00	58.384	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Perumusan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah	bulan					12	1.669.933,148	3.031.425,10	12,00	1.540.438,76	100,00	92,25	50,82	12,00	1.540.439	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Paiaj Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan pajak dan Uii Petik	bulan					12	243.582,850	372.649,90	12,00	304.213,40	100,00	124,89	81,64	12,00	304.213	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan kegiatan retribusi daerah	bulan					12	348.377,250	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															90,74	69,25	64,79			0,00	0,00				
Predikat Kinerja															T	S	R			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN															222.796.060	212.136.648		195.792.040							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															86,98	75,26	76,38			0,00	0,00				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)															T	S	T			SR	SR				
5	03				KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba																			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN																			
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi dan Pelamar ASN dan PPPK	fornasi		1	358.500,000	55.000,00	1,00	54.368,30	100,00	15,17	98,85	1,00	54.368	0,00	0,00					
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	kali		1	50.000,000	53.179,90	0,99	43.127,00	99,00	86,25	81,10	0,99	43.127	0,00	0,00					
5	03	02	2.01	10	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN	kegiatan		1	15.000,000	-	1,00	-	100,00	0,00	0,00	1,00	-	0,00	0,00					
5	03	02	2.01	12	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan/data kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	laporan		1	44.000,000	114.260,00	1,00	103.749,00	100,00	235,79	90,80	1,00	103.749	0,00	0,00					
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diremajakan dengan sistem informasi kepegawaian(SAPK)	ASN		1	180.000,000	28.999,81	1,00	28.979,85	100,00	16,10	99,93	1,00	28.980	0,00	0,00					
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase ASN yang menduduki jabatan dan ASN yang memenuhi kenaikan pangkat serta pensiun			100																
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menduduki jabatan admisnistarsi berdasarkan kompetensi	jabatan		866	250.000,000	84.547,00	866,00	79.599,04	100,00	31,84	94,15	866,00	79.599	0,00	0,00					
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kenaikan pangkat periode april dan oktober serta Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	jabatan		2	220.000,000	109.843,96	2,00	108.333,35	100,00	49,24	98,62	2,00	108.333	0,00	0,00					
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti Pengembangan komptensi Aparatur	%		100																
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assessment	paket		1	100.000,000	223.780,00	0,92	202.419,46	92,00	202,42	90,45	0,92	202.419	0,00	0,00					
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Bantuan melanjutkan pendidikan S1,S2,S3	paket		1	180.000,000	101.000,00	0,92	87.000,00	91,67	48,33	86,14	0,92	87.000	0,00	0,00					
5	03	02	2.03	04	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang akan mengikuti diklat jabatan Fungsional	paket		1	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	66.983	0,00	0,00					
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase penilaian,evaluasi dan terukurnya kinerja ASN kabupaten bulukumba																			
5	03	02	2.01	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dengan berdasarkan prestasi kerja	ASN		6031	60.000,000	21.940,00	6031,00	17.220,00	100,00	28,70	78,49	#####	17.220	0,00	0,00					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya	ASN					300	50.000,000	16.786,00	300,00	16.664,20	100,00	33,33	99,27	300,00	16.664	0,00	0,00		
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kasus					30	201.500,000	50.000,20	29,90	47.750,20	99,67	23,70	95,50						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	90,22	62,26	76,48			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																	T	R	T			SR	SR		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BKPSDM)	%					100													
5	03	02	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi kinerjayang dihasilkan	%					100													
5	03	02			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen					3	19.811,800	10.395,36	3,00	10.395,20	100,00	52,47	100,00	3,00	10.395	0,00	0,00		
5	03	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-RKAP BKPSDM	dokumen					2	2.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-DPAP BKPSDM	dokumen					2	2.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd	laporan					12	2.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji ,Tunjangan dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	%					100													
5	03	02			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur sipil negara BKPSDM yang menerima gaji dan tunjangan ASN	ASN					43	3.863.447,735	3.322.426,55	43,00	3.057.891,22	100,00	79,15	92,04	43,00	3.057.891	0,00	0,00		
5	03	02			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima Honorarium penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	bulan					12	72.000,000	34.127,50	12,00	33.867,50	100,00	47,04	99,24	12,00	33.868	0,00	0,00		
5	03	02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	laporan					1	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	presentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	%					100													
5	03	02			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	kegiatan					1	50.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	ASN					50	30.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan,Perlengkapan,bahan logistik,cetak,penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.	%					100													
5	03	02			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	buah					1	2.438,000	500,00	1,00	500,00	100,00	20,51	100,00	1,00	500	0,00	0,00		
5	03	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	unit					7	15.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	03	02			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat Tulis kantor,makan minum rapat dan tamu BKPSDM	buah					12	65.000,000	22.165,92	12,00	22.132,87	100,00	34,05	99,85	12,00	22.133	0,00	0,00		
5	03	02			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	persen					100	4.200,000	3.724,80	99,80	3.499,80	99,80	83,33	93,96	99,80	3.500	0,00	0,00		
5	03	02			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang/kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	orang/kali					1	220.000,000	50.000,00	1,00	49.997,80	100,00	22,73	100,00	1,00	49.998	0,00	0,00		
5	03	02			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang layak pakai	%					100													
5	03	02			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit					10	65.000,000	18.722,00	10,00	18.722,00	100,00	28,80	100,00	10,00	18.722	0,00	0,00		
5	03	02			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%					100													
5	03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya dan listrik yang terbayar	bulan					12	154.953,560	131.996,70	12,00	126.007,80	100,00	81,32	95,46	12,00	126.008	0,00	0,00		
5	03	02			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	orang					2	24.000,000	129.600,00	2,00	129.200,00	100,00	538,33	99,69	2,00	129.200	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
5	03	02			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik dan layak pakai	%					100														
5	03	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit					1	42493	7.500,00	1,00	7.300,22	100,00	17,18	97,34	1,00	7.300	0,00	0,00			
5	03	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	unit					10	23.100,000	2.600,00	9,00	2.076,34	90,00	8,99	79,86	9,00	2.076	0,00	0,00			
5	03	02			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara	unit					24	2.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
5	03	02			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit					30	5.269,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
5	03	02			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit					1	8.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,15	84,49	96,45			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	T	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													6.437.213,10	4.593.095,70		4.250.801,146										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	94,69	73,38	86,47			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	S	T			SR	SR			
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	orang					1513														
5	04	02			Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang mengikuti diklat Pengembangan kompetensi teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan adminstrasi penyelenggara urusan pemerintahan	%					100														
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan diklat penegmbangan kompetensi teknis umum,inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	paket					1,00	60.000,000	17.180,00	1,00	17.096,00	100,00	28,49	99,51	1,00	17.096	0,00	0,00			
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial, jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional , pelatihan prajabatan(LATSAR) dan pelatihan teknis lainnva	%					100														
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan fungsional,kepemimpinan dan Calon ASN(LATSAR)	angkatan					6,00	4.150.000,000	1.326.231,00	6,00	1.306.315,90	100,00	31,48	98,50	6,00	1.306.316	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	29,99	99,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													4.210.000,00	1.343.411,00		1.323.411,901										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	100,00	58,91	99,00			0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	R	ST			SR	SR			
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pengetahuan terhadap prospek pembangunan daerah pada masing-masing sektor	%					12,00														
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terwujudnya Kualitas Kehidupan dibidang aspek sosial	dokumen					1,00														
5	05	02	2.01	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Kajian dan Pengembangan Pariwisata	bulan					12,00	60.000,000	152.720,00	12,00	47.347,00	100,00	78,91	31,00	12,00	47.347	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
5	05	02	2.01	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan	dokumen					1,00	60.000,000	117.630,00	1,00	117.529,21	100,00	195,88	99,91	1,00	117.529	0,00	0,00	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan	dokumen					4,00												
5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan	dokumen					1,00	120.000,000	106.274,00	0,12	105.675,28	12,00	88,06	99,44	0,12	105.675	0,00	0,00	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Kajian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	dokumen					6,00	-	200.000,00	6,00	115.885,35	100,00	0,00	57,94	6,00	115.885	0,00	0,00	
5	05	02	2.02		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		dokumen					4,00												
5	05	02	2.02	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		dokumen					1,00	15.000,000	126.378,51	0,74	92.880,51	74,00	619,20	73,49	0,74	92.881	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	77,20	196,41	72,36			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	T	ST	S			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													255.000,00	703.002,51		479.317,35								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																	77,20	196,41	72,36			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																	T	ST	S			SR	SR	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6	1	2	0.00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK, Persentase Pelanggaran Pegawai	%					100												
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda	%					100												
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah	%					100	349.518,400	227.344,00	100,00	159.300,00	100,00	45,58	70,07	100,00	159.300	0,00	0,00	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan dana BOS, pemeriksaan fisik dan keuangan OPD, audit operasional OPD serta penutupan kas dan stock opname	%					100	1.248.000,000	1.220.460,00	100,00	1.141.860,00	100,00	91,50	93,56	100,00	1.141.860	0,00	0,00	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu laporan kinerja Pemda	%					100	108.900,000	137.100,00	100,00	97.000,00	100,00	89,07	70,75	100,00	97.000	0,00	0,00	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	%					100	287.364,000	325.460,00	100,00	217.954,00	100,00	75,85	66,97	100,00	217.954	0,00	0,00	
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan dana desa	%					100	326.700,000	502.800,00	100,00	487.500,00	100,00	149,22	96,96	100,00	487.500	0,00	0,00	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya movev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP serta pemutakhiran data tindak lanjut temuan	%					100	233.806,100	407.149,00	95,00	385.742,87	95,00	164,98	94,74	95,00	385.743	0,00	0,00	
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda	%					100												
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	dokumen					15	540.000,000	445.800,00	9,00	240.570,00	60,00	44,55	53,96	9,00	240.570	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	93,57	94,39	78,14			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	T			SR	SR	
6	1	3	0.00		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persenatse Tindak Lanjut Temuan						15												
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan						12												
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya fasilitasi manajemen risiko, SPIP dan Pendampingan FCP	%					100	169.334,000	232.230,00	30,00	35.993,50	30,00	21,26	15,50	30,00	35.994	0,00	0,00	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	%					100												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	%					100	78.672,000	77.580,00	100,00	77.580,00	100,00	98,61	100,00	100,00	77.580	0,00	0,00	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tercapainya indeks PMPRB	%					100	131.200,000	108.280,00	100,00	92.842,07	100,00	70,76	85,74	100,00	92.842	0,00	0,00	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi APIP, APH dan Tim Saber pungli atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan pungli serta terlaksananya pendampingan Monitoring Of Control Plan (MCP)	%					100	683.848,000	714.648,00	100,00	636.579,62	100,00	93,09	89,08	100,00	636.580	0,00	0,00	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya kegiatan survei penilaian integritas KPK dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN	%					100	200.824,800	43.500,00	100,00	29.400,00	100,00	14,64	67,59	100,00	29.400	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																86,00	59,67	71,58			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																T	R	S			SR	SR		
6	1	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)	%					100												
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah	%					100												
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					6	5.726,050	1.345,50	6,00	1.088,00	100,00	19,00	80,86	6,00	1.088	0,00	0,00	
6	1	1	2.01	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen					2	6.500,000		2,00	-	100,00	0,00	0,00	2,00	-	0,00	0,00	
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan	%					100												
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan					12	4.688.619,474	3.595.340,00	12,00	3.473.882,39	100,00	74,09	96,62	12,00	3.473.882	0,00	0,00	
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD	bulan					12	93.621,000	85.110,00	12,00	85.020,00	100,00	90,81	99,89	12,00	85.020	0,00	0,00	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD	laporan					2	4.290,000	669,60	2,00	-	100,00	0,00	0,00	2,00	-	0,00	0,00	
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	laporan					12	3.469,180	824,80	12,00	656,00	100,00	18,91	79,53	12,00	656	0,00	0,00	
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	orang					49												
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	orang					33	1.311.561,000	1.785.055,00	16,50	856.431,65	50,00	65,30	47,98	16,50	856.432	0,00	0,00	
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam Hal Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	%					100												
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%					100	2.729,237	2.481,13	100,00	986,00	100,00	36,13	39,74	100,00	986	0,00	0,00	
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	%					100	115.581,752	104.076,39	100,00	99.135,30	100,00	85,77	95,25	100,00	99.135	0,00	0,00	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan					12	45.454,596	46.626,33	11,16	46.626,05	93,00	102,58	100,00	11,16	46.626	0,00	0,00	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ng/kegiatan					66	343.110,900	311.919,00	55,00	257.277,17	83,33	74,98	82,48	55,00	257.277	0,00	0,00	
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100												
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit					2	466.400,000											
					Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan meubel	%					100	84.062,500											
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana gedung kantor	%					100	81.092,080	282.938,67	100,00	277.484,00	100,00	342,18	98,07	100,00	277.484	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
6	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	%					100	70.529,875		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listri	%					100														
6	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	%					100	48.999,390	43.824,60	100,00	37.484,03	100,00	76,50	85,53	100,00	37.484	0,00	0,00			
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	%					100	100.000,000	117.953,40	82,00	95.511,00	82,00	95,51	80,97	82,00	95.511	0,00	0,00			
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa anggaran pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	%					100														
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	%					100	38.630,000	18.859,38	25,00	4.399,12	25,00	11,39	23,33	25,00	4.399	0,00	0,00			
6	1	1	2.09	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	%					100	158.369,750	81.578,13	62,00	49.354,37	62,00	31,16	60,50	62,00	49.354	0,00	0,00			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	%					100	14.931,400	21.109,00	35,00	7.315,00	35,00	48,99	34,65	35,00	7.315	0,00	0,00			
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket					1	1.615.014,406	111.185,00	1,00	110.829,90	100,00	6,86	99,68	1,00	110.830	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	89,40	32,80	70,26				0,00	0,00		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													13.656.859,89	11.053.246,91			Predikat Kinerja	T	SR	S				SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	9.005.802,020									
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	89,66	62,29	73,33				0,00	0,00		
																	T	R	S				SR	SR		
7	7	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																					
7	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																				
7	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan,terbayarnya honor pengelola keuangan																				
7	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun,Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan,Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	bulan					12,00	153.382,000	190.754,00	12,00	182.336,81	100,00	118,88	95,59	12,00	182.337	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji ASN,terwujudnya kegiatan perkatoran																				
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	7.486.046,163	6.175.723,02	12,00	5.695.280,64	100,00	76,08	92,22	12,00	5.695.281	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	bulan					12,00	3.823.137,075	2.924.488,52	12,00	2.589.544,52	100,00	67,73	88,55	12,00	2.589.545	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	2.519.312,991	2.024.043,47	12,00	1.871.586,63	100,00	74,29	92,47	12,00	1.871.587	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Tunjangan Penghasilan Pegawai	bulan					12,00	3.940.902,463	3.156.252,53	12,00	2.926.771,66	100,00	74,27	92,73	12,00	2.926.772	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	4.529.037,130	3.607.268,18	12,00	3.161.692,94	100,00	69,81	87,65	12,00	3.161.693	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Kecamatan Kindang	%					100,00	2.079.155,420	1.670.330,51	55,16	1.517.245,43	55,16	72,97	90,84	55,16	1.517.245	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianyan biaya gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	2.374.972,119	1.970.220,52	12,00	1.775.305,69	100,00	74,75	90,11	12,00	1.775.306	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya administrasi Pemerintahan yang tertib	bulan					12,00	2.997.999,750	2.318.245,63	12,00	2.236.251,70	100,00	74,59	96,46	12,00	2.236.252	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Kecamatan Bontobahari	bulan					12,00	4.246.880,541	3.422.919,57	12,00	2.855.848,33	100,00	67,25	83,43	12,00	2.855.848	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan					12,00	3.607.609,616	2.877.103,17	12,00	2.624.202,50	100,00	72,74	91,21	12,00	2.624.203	0,00	0,00			
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianyan pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	bulan					12,00	59.220,000	45.590,00	12,00	45.590,00	100,00	76,98	100,00	12,00	45.590	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	APBD	K	Rp (000)	K		Rp (000)	
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan					12,00	421.600,000	299.370,00	12,00	299.370,00	100,00	71,01	100,00	12,00	299.370	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	bulan					12,00	89.180,000	82.150,00	12,00	82.150,00	100,00	92,12	100,00	12,00	82.150	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan pengujian keuangan SKPD	bulan					12,00	90.410,000	59.760,00	12,00	59.760,00	100,00	66,10	100,00	12,00	59.760	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	lancarnya Administrasi Keuangan	bulan					12,00	311.280,000	307.170,00	12,00	306.937,50	100,00	98,60	99,92	12,00	306.938	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan					12,00	192.320,000	96.520,00	12,00	96.520,00	100,00	50,19	100,00	12,00	96.520	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan					12,00	173.490,000	126.490,00	12,00	126.490,00	100,00	72,91	100,00	12,00	126.490	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	%					100,00	4.644,000	63.870,00	0,00	56.133,00	0,00	1208,72	87,89	0,00	56.133	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan	bulan					12,00	180.750,000	113.640,00	12,00	112.080,00	100,00	62,01	98,63	12,00	112.080	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan	bulan					12,00	4.848,000	4.848,00	12,00	-	100,00	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	dokumen					1,00	4.932,000	3.105,00	1,00	3.105,00	100,00	62,96	100,00	1,00	3.105	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhith tahun	dokumen					1,00	862,500	862,40	0,99	784,00	99,00	90,90	90,91	0,99	784	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	bulan					12,00	4.748,000	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,02	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	bulan					12,00	-	42.355,00	12,00	42.355,00	100,00	0,00	100,00	12,00	42.355	0,00	0,00		
7	1	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan																			
7	1	1	2,03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan					12,00	15.511,900	13.688,04	12,00	13.347,45	100,00	86,05	97,51	12,00	13.347	0,00	0,00		
7	1	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terwujudnya kegiatan perkatoran																			
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan kantor	bulan					12,00	6.064,500	4.176,90	12,00	4.176,90	100,00	68,87	100,00	12,00	4.177	0,00	0,00		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit					8,00	30.166,174	12.600,00	8,00	12.600,00	100,00	41,77	100,00	8,00	12.600	0,00	0,00		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	jenis					3,00	23.000,000	28.422,02	3,00	28.422,02	100,00	123,57	100,00	3,00	28.422	0,00	0,00		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Kantor	unit					8,00	8.730,693	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Kantor	unit					8,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Kantor	unit					8,00	7.350,000	4.057,40	8,00	4.036,35	100,00	54,92	99,48	8,00	4.036	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan					12,00	27.020,900	2.015,00	12,00	2.015,00	100,00	7,46	100,00	12,00	2.015	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan					12,00	7.070,803	1.231,30	12,00	1.231,20	100,00	17,41	99,99	12,00	1.231	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bulan					12,00	27.377,025	21.902,35	12,00	19.910,88	100,00	72,73	90,91	12,00	19.911	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	bulan					12,00	21.491,384	15.894,73	12,00	15.799,15	100,00	73,51	99,40	12,00	15.799	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan Ujung Bulu	bulan					12,00	88.161,350	69.185,75	12,00	69.168,75	100,00	78,46	99,98	12,00	69.169	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan					12,00	70.332,089	40.376,25	12,00	40.375,89	100,00	57,41	100,00	12,00	40.376	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Makanan Minuman	bulan					12,00	170.120,801	105.973,88	12,00	105.704,88	100,00	62,14	99,75	12,00	105.705	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec.Kindang	bulan					12,00	70.000,000	46.302,85	10,56	46.189,97	88,00	65,99	99,76	10,56	46.190	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja ATK	bulan					12,00	117.654,914	44.356,08	12,00	40.978,25	100,00	34,83	92,38	12,00	40.978	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan					12,00	16.881,630	18.537,03	12,00	17.938,05	100,00	106,26	96,77	12,00	17.938	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Pengadaan PeralatanGedung Kantor	kegiatan					1,00	10.000,000	9.790,45	1,00	9.790,45	100,00	97,90	100,00	1,00	9.790	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Pengadaan PeralatanGedung Kantor	kegiatan					1,00	162.202,128	165.388,85	1,00	134.481,00	100,00	82,91	81,31	1,00	134.481	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan					12,00	35.000,000	29.370,20	12,00	29.370,20	100,00	83,91	100,00	12,00	29.370	0,00	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan					12,00	5.442,041	3.362,10	12,00	3.362,10	100,00	61,78	100,00	12,00	3.362	0,00	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
													Rp (000)	Rp (000)										
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan					12,00	6.000,000	6.001,27	12,00	5.981,00	100,00	99,68	99,66	12,00	5.981	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan					12,00	3.729,000	2.406,60	12,00	2.235,00	100,00	59,94	92,87	12,00	2.235	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya belanja penggandaan	bulan					12,00	4.751,890	3.002,70	12,00	3.002,70	100,00	63,19	100,00	12,00	3.003	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan					12,00	8.150,000	2.541,00	6,00	2.510,00	50,00	30,80	98,78	6,00	2.510	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan					12,00	13.804,336	11.044,18	12,00	11.037,10	100,00	79,95	99,94	12,00	11.037	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan					12,00	5.070,000	5.047,02	12,00	5.046,76	100,00	99,54	99,99	12,00	5.047	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya belanja cetak dan penggandaan	bulan					12,00	18.449,200	18.446,40	12,00	18.446,35	100,00	99,98	100,00	12,00	18.446	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang penggandaan	bulan					12,00	4.142,478	2.217,16	12,00	1.442,77	100,00	34,83	65,07	12,00	1.443	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan					12,00	2.721,300	2.739,90	12,00	2.739,90	100,00	100,68	100,00	12,00	2.740	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianyan makan minum kantor	bulan					12,00	37.200,000	26.261,00	12,00	25.830,00	100,00	69,44	98,36	12,00	25.830	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan					12,00	60.888,260	60.285,01	12,00	60.151,52	100,00	98,79	99,78	12,00	60.152	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan					12,00	123.438,000	64.080,00	12,00	64.080,00	100,00	51,91	100,00	12,00	64.080	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman	bulan					12,00	54.538,000	31.374,00	12,00	30.534,00	100,00	55,99	97,32	12,00	30.534	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan					12,00	51.019,000	25.032,00	12,00	25.032,00	100,00	49,06	100,00	12,00	25.032	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan					12,00	50.000,000	63.210,00	12,00	63.210,00	100,00	126,42	100,00	12,00	63.210	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan					12,00	96.704,000	99.794,00	12,00	99.394,40	100,00	102,78	99,60	12,00	99.394	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	kali					26,00	33.600,000	15.345,00	26,00	15.287,00	100,00	45,50	99,62	26,00	15.287	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan dan kelurahan	paket					20,00	82.785,702	25.370,00	11,09	21.190,00	55,44	25,60	83,52	11,09	21.190	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan					12,00	90.469,000	70.883,00	12,00	67.960,58	100,00	75,12	95,88	12,00	67.961	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	kali					339,00	112.600,000	66.335,00	334,76	58.724,00	98,75	52,15	88,53	334,76	58.724	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan					12,00	124.445,000	121.962,00	12,00	106.412,31	100,00	85,51	87,25	12,00	106.412	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	bulan					12,00	100.478,000	63.765,00	12,00	55.481,81	100,00	55,22	87,01	12,00	55.482	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teralaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	bulan					12,00	86.276,000	19.712,00	12,00	19.697,80	100,00	22,83	99,93	12,00	19.698	0,00	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan					12,00	181.383,000	142.287,00	12,00	142.287,00	100,00	78,45	100,00	12,00	142.287	0,00	0,00	
7	1	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan					12,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan					12,00	-	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan					12,00	1.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	bulan					12,00	22.125,000	22.125,00	12,00	17.000,00	100,00	0,00	76,84	12,00	17.000	0,00	0,00	
7	1	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terwujudnya kegiatan perkatoran																		
7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitas kantor	unit					1,00	42.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitas kantor	unit					1,00	35.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitas kantor	unit					1,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitas kantor	unit					1,00	25.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitas kantor	unit					1,00	1.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	kegiatan					1,00	15.000,000	3.080,00	1,00	3.080,00	100,00	12,32	100,00	1,00	3.080	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Peningkatan kinerja pimpinan	jenis					8,00	10.000,000	2.200,00	8,00	2.200,00	100,00	22,00	100,00	8,00	2.200	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	unit					9,00	28.316,999	440,00	9,00	-	100,00	0,00	0,00	9,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	bulan					12,00	16.765,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	bulan					12,00	9.273,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terciptanya kenyamanan kerja	buah					4,00	23.329,500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terciptanya kenyamanan kerja	buah					4,00	10.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	tersedianya peralatan kantor	bulan					12	25.000,000	68.370,00	12,00	56.670,00	100,00	80,96	82,89	12,00	56.670	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Unit					10	70.000,000	27.481,55	10,00	27.481,55	100,00	34,79	100,00	10,00	27.482	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	unit					4,00	26.799,081	11.446,99	4,00	11.446,99	100,00	42,71	100,00	4,00	11.447	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan					12,00	64.225,136	181.322,80	12,00	180.885,85	100,00	281,64	99,76	12,00	180.886	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terciptanya kenyamanan kerja	unit					13,00	40.000,000	8.094,74	13,00	8.094,74	100,00	0,00	100,00	13,00	8.095	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	unit					5,00	48.000,000	46.815,01	3,45	33.214,20	68,95	69,20	70,95	3,45	33.214	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit					5,00	10.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit					5,00	3.080,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit					5,00	25.244,790	16.045,26	5,00	15.280,93	100,00	60,53	95,24	5,00	15.281	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya saran dan prasarana gedung kantor lainnya	bulan					12,00	20.000,000	11.446,99	12,00	10.000,00	100,00	50,00	87,36	12,00	10.000	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan rumah tangga	bulan					12,00	25.000,000	16.189,47	12,00	16.150,00	100,00	0,00	99,76	12,00	16.150	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Unit					10	79.000,000	40.850,00	10,00	40.850,00	100,00	0,00	100,00	10,00	40.850	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya kegiatan perkatoran																			
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran	bulan					12,00	6.000,000	3.580,00	12,00	3.580,00	100,00	59,67	100,00	12,00	3.580	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan					12,00	97.308,379	95.022,80	12,00	92.115,69	100,00	94,66	96,94	12,00	92.116	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan jasa komunikasi, sumbaer daya air dan listrik	bulan					12,00	22.346,872	22.306,87	12,00	19.417,01	100,00	86,89	87,04	12,00	19.417	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan					12,00	35.058,864	36.431,48	12,00	28.590,95	100,00	81,55	78,48	12,00	28.591	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan jasa komunikasi, sumbaer daya air dan listrik	bulan					12,00	10.330,200	9.477,18	12,00	7.923,26	100,00	9,17	83,60	12,00	7.923	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit					4,00	3.820,000	2.720,00	4,00	2.720,00	100,00	71,20	100,00	4,00	2.720	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	bulan					12,00	86.400,000	64.500,00	12,00	64.500,00	100,00	0,00	100,00	12,00	64.500	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan					12,00	179.800,000	130.800,00	12,00	118.800,00	100,00	66,07	90,83	12,00	118.800	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	bulan					12,00	5.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	bulan					12,00	113.340,000	102.000,00	12,00	102.000,00	100,00	89,99	100,00	12,00	102.000	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan					12,00	482.400,000	244.800,00	12,00	244.500,00	100,00	50,68	99,88	12,00	244.500	0,00	0,00		
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	unit					8,00	23.459,541	3.850,00	8,00	3.850,00	100,00	16,41	100,00	8,00	3.850	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan																			
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan					12,00	33.613,620	13.749,84	12,00	13.484,21	100,00	40,12	98,07	12,00	13.484	0,00	0,00		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	bulan					12,00	14.338,584	14.337,96	12,00	10.890,44	100,00	75,95	75,96	12,00	10.890	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan					12,00	6.241,728	5.745,00	12,00	4.625,80	100,00	74,11	80,52	12,00	4.626	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Struk/Bukti Pembayaran Rekening Listrik	kali					12,00	35.482,284	35.182,28	12,00	30.661,16	100,00	23,99	87,15	12,00	30.661	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan					12,00	20.313,396	17.245,66	12,00	16.510,56	100,00	81,28	95,74	12,00	16.511	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan					12	18.000,000	15.063,29	12,00	4.253,26	100,00	11,81	28,24	12,00	4.253	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya tugas pelayanan masyarakat	bulan					12,00	2.250,000	2.250,00	12,00	2.250,00	100,00	100,00	100,00	12,00	2.250	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan	kali					12,00	127.800,000	150.000,00	12,00	150.000,00	100,00	0,00	100,00	12,00	150.000	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan					12	36.000,000	36.000,00	12,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00	12,00	36.000	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan					12,00	139.200,000	91.200,00	12,00	91.200,00	100,00	65,52	100,00	12,00	91.200	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan					12,00	74.196,000	47.400,00	12,00	47.400,00	100,00	63,88	100,00	12,00	47.400	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	bulan					12,00	30.000,000	22.500,00	12,00	22.500,00	100,00	75,00	100,00	12,00	22.500	0,00	0,00			
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan					12,00	24.420,000	18.000,00	12,00	18.000,00	100,00	73,71	100,00	12,00	18.000	0,00	0,00			
7	1	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya kegiatan perkatoran																				
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	lancarnya kegiatan operasional	bulan					12,00	28.998,760	15.745,80	12,00	13.856,57	100,00	47,78	88,00	12,00	13.857	0,00	0,00			
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Terpeliharanyan kendaraan dinas mobil jabatan	unit					1,00	20.256,033	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanyan kendaraan dinas mobil jabatan	unit					1,00	10.500,000	7.678,60	0,99	5.951,63	99,00	56,68	77,51	0,99	5.952	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional,Terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK	unit					4,00	6.600,000	600,00	3,90	489,87	97,50	7,42	81,65	3,90	490	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	unit					2,00	1.500,000	1.250,00	2,00	1.104,45	100,00	73,63	88,36	2,00	1.104	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya perizinan dan terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	paket					1,00	12.189,860	12.181,76	1,00	10.752,69	100,00	88,21	88,27	1,00	10.753	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit					2,00	15.365,760	6.854,34	1,99	6.143,54	99,50	39,98	89,63	1,99	6.144	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	paket					1,00	20.000,000	9.334,17	0,58	9.125,39	57,71	45,63	97,76	0,58	9.125	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit					8,00	-	6.268,52	8,00	5.411,27	100,00	0,00	86,32	8,00	5.411	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit					7,00	23.445,760	11.858,26	6,99	11.760,55	99,86	50,16	99,18	6,99	11.761	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Bukti pembayaran pajak STNK Mobil, Motor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	kali					1,00	12.287,000	5.100,00	0,90	4.301,32	90,00	35,01	84,34	0,90	4.301	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tersedianya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	paket					1	30.000,000	25.261,60	1,00	25.261,60	100,00	84,21	100,00	1,00	25.262	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia Sesuai Kebutuhan	Unit					32,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia Sesuai Kebutuhan	Unit					32,00	40.450,000	-	3,00	-	9,38	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	bulan					12	11.372,000	1.555,05	12,00	1.555,05	100,00	13,67	100,00	12,00	1.555	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan rutin peralatan kantor	bulan					12	10.000,000	8.160,00	12,00	8.160,00	100,00	81,60	100,00	12,00	8.160	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit					15,00	4.990,000	2.840,00	15,00	2.840,00	100,00	56,91	100,00	15,00	2.840	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	jenis					10,00	3.760,000	2.030,00	10,00	2.030,00	100,00	53,99	100,00	10,00	2.030	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pihak ketiga	bulan					12,00	35.259,000	15.340,00	12,00	15.340,00	100,00	43,51	100,00	12,00	15.340	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	unit					4,00	6.780,000	4.060,00	3,74	3.800,00	93,60	56,05	93,60	3,74	3.800	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	bulan					12	20.393,385	133.802,35	12,00	133.577,00	100,00	655,00	99,83	12,00	133.577	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya pemeliharaan Ged. Kantor	bulan					12	20.000,000	15.750,00	12,00	12.450,00	100,00	62,25	79,05	12,00	12.450	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit					1,00	12.092,000	6.667,00	1,00	6.667,00	100,00	55,14	100,00	1,00	6.667	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana perkantoran	kali					1,00	14.000,000	1.615,00	1,00	1.615,00	100,00	11,54	100,00	1,00	1.615	0,00	0,00		
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	bulan					12,00	30.000,000	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket			
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	bulan					12,00	8.100,000	8.040,00	13,80	8.040,00	115,00	99,26	100,00	13,80	8.040	0,00	0,00			
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit					4,00	15.080,375	10.150,00	4,00	10.150,00	100,00	67,31	100,00	4,00	10.150	0,00	0,00			
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit					8,00	6.240,000	1.380,00	8,00	1.380,00	100,00	22,12	100,00	8,00	1.380	0,00	0,00			
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan					12,00	16.577,000	459.052,00	12,00	456.841,76	100,00	2755,88	99,52	12,00	456.842	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	98,85	95,08	93,78			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR			
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan																				
7	1	3	2,02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase ketersediaan sarana dan prasarana																				
7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	bulan					12,00	45.000,000	15.994,18	19,80	15.994,18	165,00	35,54	100,00	19,80	15.994	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan saran dan prasarana lingkungan pemukiman , transportasi, kesehatan dan pendidikan	bulan					12,00	569.621,000	569.621,00	12,00	202.088,00	100,00	35,48	35,48	12,00	202.088	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	bulan					12,00	6.228.871,380	4.640.181,00	12,00	4.640.174,90	100,00	74,49	100,00	12,00	4.640.175	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan	paket					18,00	1.681.566,600	1.681.538,92	18,00	1.681.538,92	100,00	100,00	100,00	18,00	1.681.539	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bertambahnya bangunan sarana dan prasarana kelurahan	paket					6,00	542.746,000	467.746,00	5,97	465.121,00	99,44	85,70	99,44	5,97	465.121	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket					16,00	1.879.570,500	1.774.916,90	15,47	1.671.069,83	96,67	88,91	94,15	15,47	1.671.070	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket					6,00	642.746,000	576.480,00	4,20	576.480,00	70,00	89,69	100,00	4,20	576.480	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana transportasi, pemukiman dan pelayanan kesehatan di Kelurahan	bulan					12,00	1.286.492,000	1.286.468,00	12,00	1.286.468,00	100,00	408,40	100,00	12,00	1.286.468	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	%					100,00	512.746,000	452.746,00	100,00	452.746,00	100,00	157,20	100,00	100,00	452.746	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman , Transportasi, Kesehatan dan Pendidikan	paket					12,00	2.583.984,000	2.191.020,00	11,25	1.975.200,00	93,75	319,10	90,15	11,25	1.975.200	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bertambahnya bangunan sarana dan prasarana	paket					4,00	1.326.995,161	1.175.127,25	4,00	1.175.127,25	100,00	2350,25	100,00	4,00	1.175.127	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masvarakat	paket					5,00	50.000,000	50.000,00	5,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00	5,00	50.000	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan, Pelatihan pendidkkan, Kesehatan, kelembagaan, pengelolaan kegiatan Masyarakat di Kelurahan	paket					12,00	619.000,000	857.480,00	11,00	769.480,00	91,67	0,00	89,74	11,00	769.480	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	paket					1,00	288.000,000	348.000,00	1,00	348.000,00	100,00	120,83	100,00	1,00	348.000	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	bulan					12,00	315.000,000	315.000,00	12,00	309.500,00	100,00	0,00	98,25	12,00	309.500	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masvarakat di Kelurahan	bulan					12,00	150.000,000	224.265,43	9,00	119.326,75	75,00	0,00	53,21	9,00	119.327	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan					12,00	522.667,500	627.321,10	12,00	618.366,10	100,00	118,31	98,57	12,00	618.366	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	paket					6,00	258.000,000	333.000,00	5,15	285.750,00	85,81	110,76	85,81	5,15	285.750	0,00	0,00			
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	paket					19,00	720.671,400	720.684,50	19,00	720.653,57	100,00	100,00	100,00	19,00	720.654	0,00	0,00			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	K		Rp (000)	K
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan keehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan dan terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	bulan				12,00		231.125,000	231.173,44	9,36	173.196,39	78,00	74,94	74,92	9,36	173.196	0,00	0,00	
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	bulan				12,00		2.129.148,000	2.620.033,00	12,00	2.619.283,00	100,00	123,02	99,97	12,00	2.619.283	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																97,87	209,17	91,41			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	ST	ST			SR	SR		
8	01	2	0.00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kali				5,00													
8	01	2	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penanganan Covid 19	bulan				12,00													
8	01	2	2.01	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan	kali				2,00		21.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	01	2	2.01	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan	kali				2,00		1.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	01	2	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan	kali				2,00		8.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																SR	SR	SR			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												66.982.405,71	56.740.293,21		52.646.249,012									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																98,36	152,13	92,60			0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																ST	ST	ST			SR	SR		
8	0.0.0	0	0.00		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8	01	2	0.00		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi	kali				5,00													
8	01	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bulan				12,00													
8	01	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	100.000,000	34.195,00	12,00	32.439,00	100,00	32,44	94,86	12,00	32.439	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	32,44	94,86			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	SR	ST			SR	SR		
8	01	3	0.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi																		
8	01	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
8	01	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan				12,00		250.000,000	89.598,00	12,00	14.598,00	100,00	5,84	16,29	12,00	14.598	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	5,84	16,29			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																ST	SR	SR			SR	SR		
8	01	3	0.00		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dan jumlah Desk Pemilu																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
8	01	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhinya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan ke																		
8	01	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhinya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik,	bulan					12,00	1.030.000,000	989.278,84	12,00	989.278,84	100,00	96,05	100,00	12,00	989.279	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	96,05	100,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	ST	ST			SR	SR	
8	01	5	0.00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	%	0,00	-	0,00														
8	01	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	bulan	0,00	-	0,00														
8	01	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	270.000,000	133.463,50	12,00	133.215,50	100,00	49,34	99,81	12,00	133.216	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	49,34	99,81			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	ST	SR	ST			SR	SR	
8	01	6	0.00		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	%					66.36												
8	01	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00												
8	01	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	185.000,000	-	3,00	-	25,00	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)
8	01	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.000,000	136.276,00	12,00	129.818,00	100,00	865,45	95,26	12,00	129.818	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	62,50	432,73	47,63			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																	R	ST	SR			SR	SR	
8	01	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kesbangpol)	%					100												
8	01	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00												
8	01	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	30.000,000	9.528,11	2,00	9.464,11	100,00	157,74	99,33	2,00	9.464	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen					1,00	6.000,000	2.617,00	1,00	2.617,00	100,00	43,62	100,00	1,00	2.617	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	6.000,000	2.333,87	1,00	2.333,87	100,00	38,90	100,00	1,00	2.334	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	6.000,000	2.311,21	1,00	2.311,21	100,00	38,52	100,00	1,00	2.311	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	6.000,000	2.333,87	1,00	2.333,87	100,00	0,00	100,00	1,00	2.334	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	01	1	2.01	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	6.000,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00												
8	01	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	laporan	0,00	-	0,00	-	14,00	1.319.011,318	1.763.711,86	14,00	1.364.321,28	100,00	103,44	77,36	14,00	1.364.321	0,00	0,00	
8	01	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	bulan					12,00	47.000,000	46.380,00	12,00	46.380,00	100,00	98,68	100,00	12,00	46.380	0,00	0,00	
8	01	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	15.000,000	6.704,00	0,99	6.622,00	99,00	44,15	98,78	0,99	6.622	0,00	0,00	
8	01	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan					18,00	25.000,000	5.247,00	18,00	4.906,00	100,00	19,62	93,50	18,00	4.906	0,00	0,00	
8	01	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00												
8	01	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	12.500,000	8.823,00	12,12	8.823,00	101,00	70,58	100,00	12,12	8.823	0,00	0,00	
8	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	bulan					12,00												
8	01	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	0,00	-	0,00	-	1,00	2.500,000	1.760,00	1,00	1.760,00	100,00	70,40	100,00	1,00	1.760	0,00	0,00	
8	01	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan	jenis	0,00	-	0,00	-	1,00	2.500,000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	01	1	2.06	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	jenis					12,00	2.500,000	2.496,23	12,00	2.496,23	100,00	99,85	100,00	12,00	2.496	0,00	0,00	
8	01	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	jenis	0,00	-	0,00	-	12,00	36.951,580	26.978,11	12,00	26.978,11	100,00	73,01	100,00	12,00	26.978	0,00	0,00	
8	01	1	2.06	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	jenis					12,00	9.677,030	9.671,53	12,00	9.671,53	100,00	99,94	100,00	12,00	9.672	0,00	0,00	
8	01	1	2.06	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	jenis					12,00	15.700,000	13.226,90	12,00	13.196,90	100,00	84,06	99,77	12,00	13.197	0,00	0,00	

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi
2. Belum optimalnya Sistem kesehatan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat
5. Belum optimalnya SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Masih rendahnya nilai tambah komoditas unggulan
7. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisipasi dalam Pendidikan (SPM)
- b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
- c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
- d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya presenatse balita gizi buruk .
- b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
- c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
- d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh.

- f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik (PUTR)
- b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air (PUTR)
- c. Belum tersedianya data base talud/drainase (PUTR)
- d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (PUTR)
- e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilakukan setelah masa panen (PSDA)
- f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan (PSDA)
- g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi (PSDA)
- h. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran (PSDA)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
- b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
- c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
- d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Cakupan petugas perlindungan masyarakat masih kurang
- b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
- c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
- d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
- e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Sosial

- a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah Daerah
- b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
- c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
- b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- c. Rendahnya tingkat pendidikan
- d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
- e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
- f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
- b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
- d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
- e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

3. Pangan

- a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
- b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
- c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangan

4. Pertanahan

- a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
- b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
- b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana Tahura Bontobahari sehingga Lokasi Tahura Bonto Bahari banyak diklain oleh Masyarakat Bonto Bahari.
- c. Permasalahan dal am mengurangi dan menangani persampahan :
 - SDM Pengelola belum memenuhi Standar
 - Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
 - Prilaku dan Paitisipasi Masyarakat Masih rendah
- d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 M2 dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota Bulukumba sampai dengan jangka waku _+ 6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
- e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
- f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
- g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
- h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
- i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
- j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
- k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
- l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
- b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
- d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.

- b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
- d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

- a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR elektronik
- b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
- c. Masih kurangnya rambu-rambu di kabupaten Bulukumba
- d. Masih kurangnya pengawasan sehingga izin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di kabupaten Bulukumba
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
- c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
- d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
- e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assessment.

11. Koperasi dan UKM

- a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
- b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
- c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
- d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

- a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
- b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahaan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
- c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
- d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

- a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
- c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

- a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
- b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

16. Kebudayaan

- a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah

- b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
- c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
- b. Belum optimalnya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
- c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
- d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

- a. Belum mencukupinya arsip arsip di daerah
- b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
- c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal retensi arsip (JRA)
- d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
- e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi” untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

2.5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
- b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlidungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
- c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
- d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat
- e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
- f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
- g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
- h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut
- i. Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
- j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
- k. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

- a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
- b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
- c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
- d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

- a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
- b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
- c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
- d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
- e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
- f. Pertumbuhan populasi ternak rendah (Kesehatan Hewan)
- g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal (Kesehatan Hewan)
- h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal (Kesehatan Hewan)
- i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang

(Kesehatan Hewan)

- j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana (Kesehatan Hewan)
- k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali (Kesehatan Hewan)
- l. Belum optimalnya produksi ternak (Kesehatan Hewan)

4. Kehutanan

- a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
- b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karna luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
- c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak Ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20 % , sesuai perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. Karena tanaman pelindung sudah mengawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum

5. Perdagangan

- a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
- c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
- b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
- c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

2.5.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
- c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
- d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

- a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS

dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

- b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah

5. Pengawasan

- a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
- b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
- c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

6. Sekretariat DPRD

- a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi(IT).

7. Sekretariat Daerah

- a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
- c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
- d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

2.6 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. Maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

2.6.1 Isu Strategis Global

2.6.1.1 Pemenuhan Ekonomi Global

Sebagaimana diketahui, terdapat lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini yaitu: (1) bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan; (2) bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif; (3) bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi; (4) bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta bagaimana meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif; dan (5) bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju *net zero carbon emissions*.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan *inward looking*, khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud.

Pemulihan ekonomi global melalui jalur keuangan menjadi lebih kuat dengan merespons 5 (lima) isu strategis global sebagaimana dikemukakan dalam Gala Seminar “Monetary and Financial Sector Policy to Support Stability and Recovery”, sebagai side event yang menutup seluruh rangkaian side event G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (17/7/2022).

Kelima Respon dari Isu strategis tersebut yaitu 1) Pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) 2) menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan 3) penguatan kebijakan moneter serta makroprudensial yang didukung koordinasi melalui reformasi struktural 4) rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas, serta 5) mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju *net zero emission*.

Respon pertama terkait *food insecurity* dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (*Global Collaboration and Cooperation*) untuk mengatasi

tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (*affordability*) dan kemudahan perolehan (*accessibility*) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (*Financial Intermediary Fund*) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), dan penanggulangan (*response*) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US\$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dengan kebijakan yaitu: (1) fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik; (2) kebijakan moneter yang *pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve*. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah; dan (3) memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan yang terdiri atas : (1) kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara *pre-emptive* dan *forward-looking* untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam; (2) pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan; (3) mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan *Integrated Policy Framework* (IPF) dari IMF dengan *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (*cross-border payments*). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut *stablecoin*, dengan menerapkan prinsip '*same activity, same risk, same regulation*'. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut,

dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju *net zero emission*.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (*scaring effect*) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (*orderly*), adil (*just*), dan terjangkau

2.6.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi. Serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, Adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ditahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif. Aman. Tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan

17)Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Muatan KLHS yang telah disesuaikan dengan Analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan. Adapun Rekomendasi Muatan KLHS yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian maka disarankan untuk menerapkan pendekatan intensifikasi pertanian dikarenakan kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbatas.
- 2) Pangan merupakan kebutuhan primer untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan tata guna lahan untuk kawasan pertanian dapat menghilangkan potensi pertanian. Sehingga, perencanaan pusat kegiatan dapat diletakkan pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.
- 3) Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun perlu diperhatikan bahwa pada area yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan tinggi perlu tetap perlu dipertahankan eksistensinya sehingga ketersediaan air tetap *sustain*.
- 4) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik, sehingga rencana pembangunan dapat diarah ke daerah tersebut untuk menghindari terendahnya permukiman dari bencana banjir.
- 5) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan nilai tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik. Sehingga rencana kegiatan pembangunan harus menghindari area jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencanaalam dari sangat rendah hingga rendah.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
- 7) Sebagai upaya menghadapi resiko bencana maka perlu dilakukan :
 - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 - Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

2.6.1.3 Perubahan Iklim

Secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya:

- a. Efek gas rumah kaca
- b. Pemanasan Global
- c. Kerusakan lapisan ozon
- d. Kerusakan fungsi hutan
- e. Penggunaan Cloro Flour Carbon (CFC) yang tidak terkontrol
- f. Gas buang industri

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi kondisi alam antara lain:

- a. Curah hujan tinggi
- b. Musim kemarau yang berkepanjangan
- c. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub
- d. Terjadinya bencana alam angin puting beliung

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

2.6.1.4 Revolusi Industri 4.0

Secara ringkas, terdapat 6 fase dalam sejarah revolusi industri, yaitu Revolusi Industri 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada mekanisasi; Revolusi Industri 2.0 pada 1870 fokus pada elektrifikasi; Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1970 untuk otomatisasi; Revolusi Industri 3.5 pada 1980 tentang globalisasi; Revolusi Industri 4.0 yang sedang terjadi sekarang yaitu digitalisasi; serta Revolusi Industri 5.0 di masa depan yang akan fokus pada personalisasi.

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri di setiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner. Analis big data. Ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif. Era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dunia akan segera memasuki Era Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 yang disebut Revolusi Personalisation menjadi fokus utama terhadap pengalaman konsumen yang hendak dicapai. Kustomisasi yang tinggi menjadi salah satu karakteristiknya. Selain itu, Era 5.0 menuntut untuk pasokan yang responsif dan terdistribusi, pengalaman interaktif produk, serta kembalinya sistem ke tenaga kerja.

Untuk bisa menghadapi Era 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar yaitu:

1. Technical competency, yaitu berhubungan dengan hard skills yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru, contohnya kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya.
2. Critical competency, sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan tugas, contohnya kreativitas, entrepreneurship, dan analisis.
3. Personal competency, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif, contohnya kegesitan, kemauan untuk terus belajar, dan daya tahan mental yang kuat.
4. Social competency, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka dan peka untuk bekerja bersama, contohnya kecerdasan emosional, teamwork and cooperation, serta kemampuan interkultural.

Agar bisa memiliki semua kemampuan, ada beberapa hal yang saling berkaitan dan membawa efek domino kepada satu sama lain. Misalnya, kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur terkadang tidak merata karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut kemudian akan berhubungan dengan otonomi daerah yang juga berimbas pada kebijakan industri.

2.6.2 Isu Straegis Nasional

2.6.2.1 Transformasi Ekonomi

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa, maka perlu disusun strategi-strategi nasional.

Transformasi ekonomi harus kita lakukan. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 6 (enam) Strategi besar Transformasi Ekonomi sebagai “Game Changer” dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 adalah:

Strategi 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, dengan memperhatikan: (1) Sistem Kesehatan; (2) Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter; (3) Perlindungan Sosial; (4) Riset dan Inovasi.

Strategi 2 Produktivitas Sektor Ekonomi, dengan memperhatikan: (1) Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Modernisasi Pertanian; (3) Industrialisasi; (4) Promosi UMKM; (5) Modernisasi Sektor Jasa.

Strategi 3 Ekonomi Hijau, dengan memperhatikan: (1) Bauran Kebijakan Energi; (2) Transfortasi Bersih; (3) Pengelolaan Sampah; (4) Blue Economy; (5) Transisi Energi.

Strategi 4 Transformasi Digital, dengan memperhatikan: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Infrastruktur Digital; (3) Digitalisasi; (4) Pemanfaatan Digital.

Strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, dengan memperhatikan: (1) Infrastruktur Konektivitas (superhubungan, Hubungan Laut, Hubungan Udara); (2) Koridor Ekonomi/Wilayah Pembangunan; (3) Domestic Value Chain.

Strategi 6 Pemindahan Ibukota Negara (IKN), dengan memperhatikan: (1) Sumber Pertumbuhan Baru; (2) Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Keenam strategi di atas juga disertai perbaikan enabling environment yaitu reformasi birokrasi, reformasi fiskal, dan reformasi sektor keuangan.

2.6.2.2 Pengembangan Wilayah

Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional 2 di tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis dalam pengembangan wilayah yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)) dengan meningkatkan peran badan pengelola kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perotaan yang lebih holistik dan trans – sektor.
4. Penyelesaian Rencana Tata Ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk penyediaan pelayanan dasar.

2.6.2.3 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap

indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

2.6.2.4 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 65 tahun sebesar 94,12 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2.6.3 Isu Strategis Daerah

2.6.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustainable*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi.

Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberipelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumahsakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung

Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.

Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.

Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agar dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 59,66 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 55,68 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan karena tingkat rasio ketimpangan masih berada pada angka 0,377. Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,53 % pada tahun 2021.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,78 Juta, atau 49% dari total warga Sulawesi Selatan, sementara untuk tahun 2021 terjadi peningkatan angka usia produktif menjadi 6,2 juta jiwa atau 52% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia,

jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun demikian dari segi kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM, Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berada di angka 72,24 atau masih berada di peringkat 11 nasional. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah 8,46 tahun yang berarti rata-rata lama sekolah hanya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP.

6. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan dayadukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendorong daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti *shortsea shipping* untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan dan modernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan. Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39% dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

2.6.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal

Dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya angka kesenjangan (Indeks Gini) serta penurunan rasio ketergantungan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sumber daya manusia, yang diharapkan akan meningkat baik pada pendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju Bulukumba yang bermartabat, maju dan sejahtera

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pemantapan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang majud dan sejahtera. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat. Kualitas sumber daya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastruktur konektivitas yang telah lancar antar kawasan.

4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan

Peningkatan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bulukumba. Penguatan lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta mendorong peningkatan produktifitas dan jiwa wirausaha (*enterprenuership*) generasi muda yang berbasis pada UMKM (*Start Up*) sehingga sub sektor perekonomian semakin maju.

5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah

Pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali akibat dari pandemi Covid-19. Difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan sebagai penopang utama terhadap pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah dengan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi.

6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

2.7 Inovasi Daerah

Seiring dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana akan dilakukan pada tahun 2023. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-275
Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
1	GELIAT (Gerakan Literasi Berbasis Digital)	Kurangnya Minat Baca Siswa	Gerakan literasi berbasis digital diharapkan Agar siswa memiliki minat baca.	Gerakan Minat Baca Siswa	literasi digital	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd
2	Passapu (Pengelohan Sampah Terpadu)	Banyaknya sampah plastik	Pemanfaatan sampah Peastik dalam pembuatan Batako bertujuan untuk mengurangi penggunaan semen	Pengelohan sampah plastik	Batako dari limbah plastik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd
3	Salassae Ri MangEi (Sarana Pengelolaan Sampah Organik Non Kimia untuk merawat Ekosistem)	Kurangnya pengelolaan sampah organik	Pengelolaan sampah dengan bekerjasama dengan masyarakat khususnya KSPS (Komunitas Swabina Petani Salassae) untuk mengelolah sampah organik dengan menggunakan zat pengurai non kimia .	mengelolah sampah organic dengan menggunakan zat pengurai non kimia.	Pengelah Sampah Organik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd
4	5 G-Gerakan Sabtu Menyapa (GSM) - Gerakan Guru Berbagi (GGB)- Gerakan Selasa Digital (GSD) - Gerakan Selasa Digital (GSD)- Gerakan Pagi Mengaji (GPM)- Gerakan Da'i Muda (GDM)	Kurangnya kapasitas Jaringan	5 G merupakan generasi kelima dari teknologi nirkabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dari jaringan sebelumnya.Brand 5 G dengan harapan dan tujuan agar SMPN 17 Bulukumba mencetak generasi yang mumpuni dalam teknologi.	Peningkatan Kapasitas jaringan	5 G Nirkabel				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd
5	STROBERI (Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah)	Kurangnya pemilahan Sampah	Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah. Warga sekolah memilah sampah/ barang bekas untuk keperluan	Warga sekolah memilah sampah	Sistem Hidroponik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Zainuddin, S. Pd., M. Pd.
6	(SIMANIS8)Sekolah Inovasi Mandiri Wirausaha SMPN 8	Belum termanfaatkan produksi lokal	Berinisiatif untuk membantu masyarakat sekolah dan masyarakat umum bagaimana	memanfaatkan hasil bumi	Pemanfatan hasil bumi				SK Bupati Bulukumba,	Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			cara memanfaatkan hasil bumi seperti ubi jalar membuat makanan.						No.188.45-216 Tahun 2023	
7	Tabarat Literasi Milenia (Tabungan Akhirat Literasi Minggu Libur Ceria)	Belum adanya literasi berinfaq	Mewujudkan sekolah yang agamis ,beriman dan bertaqwa.Program Tabarat Literasi Milenia yaitu mengajak kepada segenap warga sekolah serta masyarakat untuk belajar berinfaq.	Literasi Melenia	Sekolah berinfaq				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd.
8	AKSIPA (Akses Informasi Terpadu)	Kurangnya informasi anak ke orang tua	Media yang digunakan orang tua peserta didik, untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Penyampaian informasi kepada orang tua peserta didik.	informasi ke orang tua siswa	Media Informasi Orang tua siswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Sahrul, S.Pd.,M.Pd & Andi Murdhana Baeda, S.Pd. Gr
9	SIKAPAL (Sikolana Ana Pa,Rumpu Laue)	Kurangnya kehadiran disekolah	Siswa yang orang tuanya adalah nelayan atau petani rumput laut yang seringkali kehadirannya sangat kurang karena membantu orang tuanya bekerja atau bertani rumput laut.	memfasilitasi siswa yang membantu orang tuanya sebagai nelayan	Mengatasi ketidak hadiran diisekola				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ichtiar Akmal, S.Pd. & Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
10	SIKOLA GAE (Sarana Informasi Komunikasi Orang Tua Lewat Layanan Guru	Kurangnya kehadiran disekolah	SIKOLA GAE dalam dialek konjo berarti Sekolah Pagae artinya sekolah bagi anak nelayan. SIKOLA GAE menjadi Sarana	sekolah nelayan	anak bersekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Umar Tawakkal, S. Ag.,M.Pd.I & Hasriani, S. Pd
11	DASI 18 (Daur Ulang Sampah Plastik SMP 18)	Sampah plastik	Mengumpulkan sampah plastik dari lingkungan sekitar sekolah untuk di daur ulang sehingga lingkungan sekitar bebas sampah plastik. Bank sampah.	pengolahan sampah plastik	Daur Ulang Sampah Plastik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Amir Alif,S.Pd& Andi Nurhayati Hafid, S.Si., Gr

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
12	SALAM SOBAT (Sekolah Alam Solusi Tuntaskan Wajib Belajar)	kurangnya layanan belajar	Sekolah berbasis alam semesta anak belajar dan menerima materi di tempat yang dikelilingi alam.	Sekolah alam	Belajar diluar kelas				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Syuaib, S. Pd. I. M. Si & Herlinah, S.Pd., Gr.
13	LAKMUS (Lempar Ke Jaring dan Kumpulkan Sampahmu)	kurangnya pengelohan sampah	Sarana yang digunakan oleh peserta didik dalam memungut dan membuang sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat.	kebersihan lingkungan sekolah	Menciptakan lingkungan bersih				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I
14	PERAK DI TAS (Peningkatan Karakter Peserta Didik dengan Pendekatan Masjid)	Adanya siswa yang melakukan pelanggaran	Kunjungan rumah terhadap peserta didik yang seringmembuat pelanggaran dan berkonsultasi dengan orang tua peserta didik mengenai perilaku anaknya. sertapersetujuan bahwa anaknya siap untuk diikuti dalamkegiatan pendekatan Masjid.	Kunjungan Rumah	Mengatasi pelanggaran siswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I
15	PUTSAL (Pungut Sampah, Kelola)	Banyaknya sampah plastik	PUTSAL (Pungut,Sampah, Kelola) merupakan kegiatan daur ulang seperti kerajinan tangan dan pupuk komposdan ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi.	daur ulang sampah	Daur Ulang Sampah Plastik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd
16	SAPIHI (Satu Apotik Hidup) tiap Kelas	Belum adanya apotik hidup di setiap kelas	Satu Apotik Hidup) tiap kelas merupakan kegiatan layanan masyarakat sekolah yang bersifat edukatif, akan obat-obatan herbal.	Apotik Hidup	Edukasi apotik hidup				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd
17	Penerapan Supervisi Berbasis Coaching	kurangnya supervisi	Penerapan Supervisi Berbasis Coaching	supervisi	supervisi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Aminuddin, S.Pd.,M.Si

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
18	PUSAKA (Pungut Sampah, Kantongi)	kurangnyapengolaan limbah	Kegiatan penanggulangan sampah di lingkungan sekolah dengan menggunakan kantong dari limbah tekstil.	penanggulanagn sampah	penanggulaagn sampah dari limbah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dra. A. Ratnawati,M.Pd & Abdul Rahman, S.Pd
19	ASSIKOLAKI (Akses Kondisi Sekolah Terkini)	Kurannya informasi orang tua	Akses informasi untuk seluruh Warga Sekolah dan Orang Tua/wali Peserta didik untuk mengetahui perkembangan peserta didik.	informasi perkembangan anak	akses informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	ST. Haena, S.Pd.,M.Pd & Amiruddin, S.Pd.
20	SIPETTAKI (Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif)	Kurang peduli lingkungan sekolah	Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif.	tatakrama	tata lingkunga sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asri Ali,S.Pd.,M.Pd
21	FA DEWAN (Fasilitasi Desa Swasembada Air Minum)		Kolaborasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusda dan Lembaga Masyarakat Desa dalam penyediaan air minum layak konsumsi.	Kolaborasi Prusda	Penyediaan Air Minum layak Konsumsi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si
22	Kembang Desa (Kerjasama Antar Desa Membangun Desa Cerdas)	program yang tidak berkelanjutan	Program Desa yang berkesinambungan, sebagai tindak lanjut dari program Kementrian Desa.	Program Berkelanjutan	Tindak Lanjut Program Kemendes				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si
23	SAPA (Sahabat Pegawai Bulukumba)	Pegawai yang tidak mempertahankan Rumah tangga	Edukasi dan fasilitas mediasi kepada pasangan pegawai agar tetap mempertahankan rumah tangga.	pembinaan pasangan Rumah tangga Pegawai	Pembinaan Rumah tangga Pegawai				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Andi Dewi Ratu, S.STP,MAP
24	KADO PERNIKAHAN DUKCAPIL	Optimalisi layanan KTP-e	Kado yang diberikan oleh pihak Dukcapil berupa Kartu Keluarga,KTP-el sepasang pengantin dengan perubahan status.	KTP-e bagi pengantin dengan perubahan status	KTP-e				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
25	LOKET MU (Layanan Oline Kependudukan Terpadu Masyarakat Umum)	Layanan online jasa kependudukan	Inovasi Loker-MU Layanan Online Kependudukan dan jasa antar dokumen kependudukan	Layanan antar Dokumen Kependudukan	Jasa Antar Dokumen Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	ENDANG MULIANI,S.Sos

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
									462Tahun 2022	
26	PINISI DUKCAPIL (Pusat Informasi Inovasi DUKCAPIL)	Tidaknya Wadah berhimpun Inovasi Dukcapil	PINISI DUKCAPIL adalah pusat informasi Inovasi Dukcapil yang merupakan sebuah wadah untuk menghimpun semua Inovasi Dukcapil.	Wadah berhimpun Inovasi	Kumpulan Inovasi Dukcapil				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
27	SEKOLAH SADAR ADMINDUK	belum tersosialisasinya tertib administrasi kependudukan	Pelayanan dan sosialisasi disekolah terkait tertib administrasi kependudukan.	Layanan tertib administrasi kependudukan	Tertib administrasi Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
28	GAMMARA (Gerakan Masyarakat Menuju Sadar ADMINDUK)	belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Pelayan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan	optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Dokumen Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
29	LORONG JELITA (Layanan Jemput Bola Identitas Anak dari Lorong Ke Lorong)	belum dilakukan jemput KIA	Layanan jemput bola kepemilikan Kartu Identitas Anak "KIA" dari lorong ke lorong.	Jemput KIA	Masyarakat Memiliki KIA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
30	MY KTP-EL, MY DREAM	wajib KTP-e	Pelayanan jemput bola yang diberikan kepada anak usia 17 tahun yang wajib KTP-EL.	KTP-e	Masyarakat Memiliki KTP-e				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
31	FOTOKU ONLINE (Formulir Persyaratan Dokumen Kependudukan) Online	Foto online Barcode	Fotoku online adalah pelayanan persyaratan dan formulir melalui link pelayanan dan barcode.	Pengisian formulir link layanan barcode	Barcode layanan Link				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	NURAFIAH,S.KOM
32	Go Panrita (Pelayanan Kartu Identitas Anak)	Melibatkan forum anak KIA	Layanan berupa ajakan/edukasi Forum Anak dalam kepemilikan KIA.	Edukasi forum Anak kepemilikan KIA	Anak Memiliki Kepemilikan KIA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
33	MAWAR (Ramah Warga)	layanan Rumah	Memberikan pelayanan yang Ramah dari petugas Dukcapil.	layanan Rumah	mempermudah layanan dokumen				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
34	LANIKAJI (Layanan Penelitian Dan Pengkajian)	Optimalisasi Kelitbangan	layanan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) bagi SKPD/OPD di Kabupaten Bulukumba.	Layanan Kelitbangan	Kelitbangan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Dr.Drs.Baharuddin Patangngai,SE.,Msi
35	NILAN (Klinik Laboratorium Inovasi)	belum optimalnya layanan inovator dalam rancang bangun inovasi	Melayani Inovator OPD dalam rancang bangun Inovasi Daerah	rancang bangun Inovasi Daerah	Inovator terlayani membuat rancang bangun Inovasi daerah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	A.Wahyudin. K, SE
36	E-MONEV SIPAKATAU	Belum optimalnya perencanaan pengimputan dokumen RPJMD	Proses awal adalah penginputan dokumen RPJMD pada aplikasi e-Planning di menu e-RPJMD pada halaman ini berisi informasi mengenai executive summary pencapaian program dan kegiatan selama 5 tahun (periode RPJMD) dsb.	e-Planning RPJMD	e-Planning RPJMD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	AHRIYANI HAKIM, ST, MT
37	KOMPETISI INOVASI	Belum dilakukan kompetisi	Kompetisi inovasi untuk mengukur tingkat kualitas dan keterjangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui inovasi daerah Dan pemberian penghargaan bagi inovator	Mmengukur tingkat kematangan Inovasi daerah	Komepetisi Inovasi daerah Sinopan			V	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	BASO S, S.Pd, M.Kes
38	WORKSHOP CHAMPION INOVASI	belum optimal pembekalan terhadap inovator daerah	Pembekalan dan penataan pengelolaan inovasi daerah bagi inovator OPD dan Badan untuk menghadapi lomba tingkat regional maupun nasional di bidang inovasi	Pembekalan Inovator Daerah	Optimalisasi Inovator Daerah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Rakhmat Riswan, SKM,M.Kes

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
39	ONE BASE, ONE MAP, ONE POLICY (Satu Data, Satu Peta, Satu Regulasi)	Belum optimalnya tata kelola data	Peraturan Presiden No 39 tentang " Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Data yang di hasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan"	Tata kelola data bahan perencanaan	Tata kelola data				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC
40	LEGO LEGO SI CANTIK	Belum optimalnya kualitas data	Menerapkan standar data yang telah ditetapkan untuk menghasilkan data yang berkualitasMelalui regulasi Lego Lego si CANTIK's.	Data Yang berkualitas dalam Perencanaan	Data Perencanaan Yang Berkualitas				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC
41	Peduli Bijangta (Peduli Keluarga)	Belum optimal dokumen ODGJ	Mengunjungi pasien ODGJ, membantu pengobatan dan mengurus dokumen kependudukan. Pasien yang telah sembuh diberikan pembinaan dan keterampilan.	Kunjungan Pasien ODGJ	Layanan ODGJ				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Hj. Jawadwipa & Drs. A. MAPPIWALI
42	Gadis Manis (Gerakan Validasi Pemutahiran Data Penerima Layanan Sosial)	Belum akuratnya data	Gerakan validasi data yang akurat bagi penerima layanan sosial dengan cara mendatangi rumah (door to door).	Data akurat	Data Akurat layanan sosial				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Drs. A. MAPPIWALI
43	Sistem Aspirasi Online	Optimalisasi layanan aspirasi	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat dan dapat langsung direspon.	penyampaian aspirasi DPRD	Aplikasi Layanan Aspirasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Kamarudin
44	Go Asesment { Goment}	Belum adanya layanan cepat bagi layanan pendidikan	Go Asesment mengarahkan para siswa lebih aktif dan kreatif Hari ini selesai jangan tunggu sampai besok: perlunya pelayanan yang prima dalam pendidikan.	asesment siswa dengan cepat	Layanan Cepat				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	A.Syahrul Alam, SE
45	Lisua Massikola (Gerakan Kembali Bersekolah)	Belum meningkatnya	Meningkatkan semangat belajar anak serta	Semangat belajar siswa	meningkatkan semangat belajar				SK Bupati Bulukumba,	A.Syahrul Alam, SE

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		semangat belajar siswa	meminimalisir angka putus sekolah di Kab.Bulukumba.						No.188.45-462Tahun 2022	
46	MERAPAT (Media Pelaporan Cepat)	Belum adanya sistem pelaporan	Suatu sistem pelaporan kasus yang dibuat secara online, dapat di akses melalui media sosial DPPPA.	pelaporan Online	Media Sosial DPPPA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Andi Farah Fekicia, S.Psi
47	GERAKAN 1000 AKSEPTOR	Belum adanya ruangan layanan akseptor	Menyediakan ruangan layanan bagi akseptor/masyarakat yang ingin ber KB.	Penyediaan ruangan akseptor	Layanan Akseptor				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
48	GALERI UPPKS	Belum adanya Konsep Galeri UPPKA	Galeri UPPKA adalah bangunan dengan konsep mini market sebagai pusat penjualan bagi hasil produksi usaha kelompok-kelompok UPPKA.	Konsep UPPKA	Galeri UPPKA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
49	DAHSAT (Dapur Sehat)	Belum optimalnya edukasi perbaikan gizi	Sosialisasi dan edukasi perbaikan gizi bagi ibu hamil, balita dan ibu menyusui.	edukasi Perbaikan Gizi	Perbaikan Gizi Anak				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
50	PLUIT AKU (Pelayanan Langsung Izin Trayek Angkutan Umum)	Belum optimalnya garai layanan izin trayek	Gerai layanan pengurusan izin trayek di dalam kawasan terminal induk untuk memudahkan pegusaha/sopir angkutan umum.	Optimalnya garai Izin trayek	Izin Trayek				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Drs.MUHAMMAD AMRY
51	TERONG PUSTAKA (Teras Dongeng Perpustakaan)	rendahnya minat baca	Sarana pelayanan untuk membangkikan minat baca masyarakat khususnya bagi anak usia dini atau usia Taman Kanak-kanak.	meningkatkan minat baca	Minat baca bagi anak usia dini				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Armawati S.Sos
52	Pena (Perpustakaan Untuk Anak)	belum adanya literasi pustaka	literasi dan mensosialisasikan perpustakaan pada anak yang dalam perawatan di Rumah Sakit / klinik maupun pada	Literasi Pustaka bagi perawatan rumah sakit	Literasi Pustaka di Rumah sakit dan klinik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	ANDI ELIZ INDAYANI,SE

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kegiatan lainnya seperti kelas balita.						462Tahun 2022	
53	WISATA PUSTAKA	belum Optimalisasi pengenalan Perpustakaan	Kegiatan memperkenalkan perpustakaan kepada anak, agar mereka dapat mengetahui perpustakaan sejak dini.	Pengenalan Perpustakaan sejak dini	sosialisasi Perpustakaan sejak dini				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Armawati S.Sos & Rismayani,S.Sos.MM
54	Tasbih Pustaka (Disabilitas Bisa Perpustakaan Peduli)	belum optimalnya perpuustakaan inklusif	Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan	layanan perpustakaan inklusif				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Rismayani,S.Sos.MM
55	Smart Laperjadin Smart Laporan Perjalan Dinas)	Bellum optimalnya laporan Pengelolaan keuangan	Laporan pengelolaan keuangan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan yang profesional	Pengelolaan keuangan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ubayd Mantsur, A.Md
56	SIAP (Sistem Aplikasi Perizinan)	Belum menggunakan sistem layanan cepat	Sisten layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu.	layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu.	Pelayanan cepat				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	SUFIRMAN,SE, IBU MALA, MAULANA
57	GARDU KENCAN SI PTM (Gerakan Terpadu Kenali, Cegah dan Atasi Penyakit Tidak Menular)	belum dilakukan pengendalian deteksi dini	Mengendalikan penyakit tidak menular dimasyarakat dengan kegiatan deteksi dini.	Pengendalian Penyakit	Deteksi penyakit tidak menular di masyarakt				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	WIDYASTUTI, S.Kep.,Ns
58	SISKA CANTIK (Sistem Informasi dan Edukasi Cara Siswa Memantau Jentik)	belum adanya edukasi anak	Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD.	edukasi anak mencegah DBD	Pencegahan DBD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	MUH. YUSRAN YUNUS, SKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
									462Tahun 2022	
59	Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD.	kurangnya pelayanan penyuluhan	Informasi dan penyuluhan di ruang pelayanan puskesmas.	Pelayanan Penyuluhan di Puskesmas	Penyuluhan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM
60	Digital Kobotoolbox (Efisiensi Pengumpulan Data Digital Kobotoolbox)	Belum tersedia pusat penyedia	Pusat penyedia, pemrosesan & analisis dari tally sheet/kuisisioner dan sebagai penyimpanan utama data.	Tersedia pusat penyedia pemrosesan dan analisis dari tally sheet	Tally Sheet				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	AHMAD ARFAN, S.IP, MT
61	KAMPUNG SAPI(Kawasan Pengembangan Bibit Unggul Sapi Potong	belum optimalnya pembibitan sapi unggul	Kawasan ini akan menghasilkan bibit unggul hasil persilangan antara sapi Bali dan sapi Wagyu.	kawasan pemabibitan sapi	Sapi Unggul				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. Suriya Darma, S.Pt, M.Si, IPM
62	RETRIBUSI PASAR NON TUNAI	masih sulitnya penarikan retribusi dan realisasi PAD	Memudahkan dalam penarikan retribusi dan laporan realisasi serta mampu meningkatkan PAD.	Memper muda Penarikan Retribusi PAD	Meningkatkan PAD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Munthasir Nawir, S.STP,M,Si.
63	ALASAN LIHAI (Aplikasi Layanan Pengawasan Lingkungan Hidup Akurat dan Terintegrasi)	sulitnya pengelolaan LH	Sistem yang dibangun untuk memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH bagi pelaku usaha dan kegiatan.	memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH	Pengelolaan LH				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si
64	PANDU BERSOLEK (Pengarsipan Dokumen Berbasis Elektronik)	sulitnya tools administrasi kepegawaian	Aplikasi pelayanan ini menjadi tools mempermudah administrasi kepegawaian	pelayanan mempermudah administrasi Kepegawaian	akses informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si
65	SI PAPA LH(Sistem Informasi Pelayanan Persampahan dan Lingkungan Hidup)	belum adanya layanan LH	layanan Bidang LH mengenai berbagai layanan persampahan.	adanya layanan LH	Layanan LH				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
66	SIMPEDA (SIMPATIK PENEGAKAN PERDA)	Belum optimalnya Penegakan perda	Sistem Penanganan Penegakan Perda dan Perbup di Wilayah Kabupaten Bulukumba	Optimalnya pengekan Perda dan Perbub	Penegakan Perda dan Perbub				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	HJ. AHRYANTI, SP
67	SIMDA (SIAP MEMBANTU DAMKAR)	belum terbentuknya relawan SIMDA di desa	Relawan SIMDA di beberapa desa mengurangi tingkat kerugian masyarakat yang berada disektar kebakaran.	terbentuknya Relawan SIMDA di desa	SIMDA di Desa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
68	ASAP PAK (AKSI CEPAT, TEPAT PEMADAM KEBAKARAN)	Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran	Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android.	Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran	pelaporan aplikasi Android				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
69	PELAYANAN DASAR KORBAN KEBAKARAN	Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran	Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android.	Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran	pelaporan aplikasi Android				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
70	POJOK BACA DIGITAL	Belum dilakukan kegiatan Pojok baca Digital	Dengan mengusung judul kegiatan yaitu "POJOK BACA DIGITAL" untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mendapatkan suasana baru serta meningkatnya ilmu pengetahuan guna mendukung dan membantu upaya pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat bulukumpa.	Dilaksanakan kegiatan Pojok Baca Digital	Dilaksanakan kegiatan Pojok Baca Digital	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A. RIDWAN M, S.Sos
71	MARIKI' TERTIB	Belum dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah	MARIKI' TERTIB di inspirasi atas kondisi yang terjadi pada kantor kecamatan Bontobahari dimana seluruh proses	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah			(√)	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	EKA ARGIAN SAMPARADJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			pelayanan masyarakat selama ini dilaksanakan secara cepat dan mudah di ruangan pelayanan, namun proses layanan tersebut mengabaikan tupoksi dari masing-masing seksi dan pengarsipan hasil dokumen layanan.							
72	Ruangan Pelayanan Yang Nyaman Dan Wifi Gratis	Belum Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Dengan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecatan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC, kemudian pemanfaatan wifi yang telah tersedia bagi masyarakat terutama siswa/siswi yang akan mengerjakan tugas dan keperluan lainnya.	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecatan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC,	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecatan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC,			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	H.ANDI RAHMAT SYAERI P.S.IP.,M.Adm.,KP
73	Sistem Administrasi Pelayanan Kecamatan berbasis Online	Belum Akurat aplikasi pengurusan terkait kependudukan	Aplikasi ini dibuat untuk membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya. Website Profile dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran	Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya.	Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya.	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI MUH. ARFAH AP, S.STP.,M.AP

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			tentang potensi Kecamatan Kindang, seperti menampilkan info wisata, usaha, data statistik Penduduk, Kesehatan, Pendidikan dan Statistik lainnya secara online.							
74	Datata Tepat, Mudah dan Aman (Datata TEMAN)	Belum Akurat data terkait pelayanan dan perizinan	Data-data terkait pelayanan dan perizinan masih sangat susah untuk diakses dikecamatan hal ini dibuktikan dengan dibutuhkannya waktu yang lama untuk memperoleh segelintir data dimaksud, hal ini mungkin disebabkan karena pengimputan data yang masih secara manual menggunakan buku register sehingga membutuhkan waktu dalam hal perekapan ataupun besar kemungkinan terjadi kehilangan data.	Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan	Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI ASHADI, SE,MM
75	SI BANDUL (Sistem Informasi Bank Data Ujung Loe)	Belum akurat pelayanan Data	Pelayanan data kantor Kecamatan Ujung Loe	Hasil Akurat Pelayanan Data	Hasil Akurat Pelayanan Data	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	AKHMAD IHWAN NOOR, S.Pd, M. Adm. Pemb.
76	TERAS PELAYANAN (Terpusat, Ramah, dan Puas Pelayanan Kantor Kecamatan Rilau Ale)	Belum akurat pelayanan administrasi dan konsultasi	Membuat tempat Pelayanan Administrasi dan konsultasi di Halaman Kantor Kecamatan Rilau Ale.	Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi	Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A.Asdar Alif, S.Sos.,M.A.P
77	PETIR (Penyelenggaraan Pemerintahan terintegrasi)	Belum terlaksana pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan, untuk meningkatkan SDM yang ada di kelurahan maupun di desa.	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ISWANDY BADDU, S.SOS
78	POLWAN (POS LAYANAN MALAM WARGA HERLANG)	Belum meningkatkan kualitas layanan	Meningkatkan kualitas layanan warga Kecamatan Herlang yang efektif dan efesien	Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan	√			SK Bupati Bulukumba,	ASRAENI, SH

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			melalui POLWAN (Pos Layanan Malam Warga Herlang).	Herlang yang efektif dan efisien	Herlang yang efektif dan efisien				No.188.45-462 Tahun 2022	
79	PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Belum Akurat Administrasi	Pelayanan administrasi di kecamatan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan.	Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen	Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	HARIS. H, SE
80	BANG JAKA BER TUDANG SIPULUNG (Bangkitkan Jalinan Komunikasi Bersama Tudang Sipulung)	Belum Tercapai mengenai informasi perkembangan proses pembelajaran	Sarana orang tua peserta didik mengenai informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah.	Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran	Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
81	UDY BER JAS (Outdoor Study dengan Ber Jelajah Alam Sekitar)	Belum adanya media pembelajaran bagi peserta didik	Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house, dapur hidup, apotik hidup dan taman-taman sekolah.	Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house	Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
82	HARUS PINTAR (Hafal Rumus melalui Pintu dan Tangga Rumus)	Belum Adanya media pembelajaran	Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik mengingat rumus-rumus Matematika dan IPA.	Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik	Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
83	PUISI KELAS (Penggunaan Kartu Siswa Izin Keluar Kelas)	Belum terlaksana penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	Penggunaan kartu siswa Izin keluar kelas, meminimalisir keluar kelas tanpa tujuan yang jelas.	Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd
84	Ratu dan Raja BaCA GaungKaN LiTERASi (ATUR ACAK TERAS)	Belum dilaksanakan seleksi tertulis,wawancara dan penyuluhan literasi	• Diawali dengan seleksi tertulis, wawancara, dan penyuluhan literasi di apel pagi,penghitungan tingkat intensitas kunjung ke perpustakaan • Melibatkan pegawai perpustakaan sebagai tim seleksi/juri pada ATUR ACAK	terlaksananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi	terlaksananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			TERAS Figur dalam membaca dan tindak lanjutnya berupa pojok-pojok baca, lorong-lorong baca, taman baca, donator buku.							
85	SAKOSAGU (Satu Komik Satu Guru)	Belum akurat guru membuat media pembelajaran berbasis IT	Guru membuat media pembelajaran berbasis IT dalam bentuk komik.	Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT	Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, S.Pd
86	SALAM BERKAH (Program Siswa Belajar Sambil Bersedekah)	Belum terlaksana menyisihkan sebagian uang jajan	Menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan hemat dan gemar menabung.	Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan	Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, S.Pd
87	SAGU (Satu Buku Satu Minggu)	Belum meningkatnya minat baca peserta didik	Meningkatkan minat baca peserta didik, menamatkan buku tersebut selama kurang waktu 1 minggu.	Meningkatnya minat baca peserta didik	Meningkatnya minat baca peserta didik			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, Hajraeni, & Andi Rahmiati
88	CARADDE (Cara Cepat , Ramah Dan Terdepan)	Belum Akurat Aplikasi untuk guru	Aplikasi yang dibuat untuk guru dalam menginput nilai dan identitas siswa.	Hasil Akurat Aplikasi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa	Hasil Akurat Aplikasi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SUWARDI,S.Pd.,M.Si
89	LEGO-LEGO LAMACCA	Belum tersedia ruang khusus dan layanan belajar	Tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas (Lego-Lego Lamacca) tempat Belajar secara terbuka.	hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas	hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MULIATI NUR,S.Pd.,M.Si
90	GETAR BELUT (Gerakan Tabur Benih Dilaut)	Belum terlaksananyakegiatan gerakan tabur benih di laut	Getar Belut adalah gerakan tabur benih di laut sebagai upaya memulihkan ekosistem laut.	Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut	Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	YUSLI SANDI S.Kel,M.Si
91	PROMINA (Proposal Masyarakat Interaktif untuk Nelayan)	Belum adanya media interaktif secara online	Media interaktif secara online bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sektor perikanan.	Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat	Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	YUSLI SANDI S.Kel,M.Si
92	Well Come Snack dan Drink	Belum tersedia pangan dan	Pangan dan Minuman Lokal Khas Bulukumba.	Tersedianya Pangan dan	Tersedianya Pangan dan	√			SK Bupati Bulukumba,	HANDARIAH.S.Sos

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	“ SEDAPKEPUNCAK ” (Selamat Datang Di Bulukumba Kusapa Engkau Dengan Kue Dan MinumanKu)	minuman lokal khas bulukumba		minuman lokas khas bulukumba	minuman lokas khas bulukumba				No.188.45-462 Tahun 2022	
93	E-OFFICE TERMINI (TERTIB ADMINISTRASI)	Belum meningkatkan kualitas layanan administrasi	Peningkatan kualitas layanan administrasi dengan cepat.	Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat	Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A.NIRWANA, S.Sos
94	SINTA CALA (Sistem Informasi dan Data Kecamatan-Kelurahan)	Belum akurat data kecamatan-kelurahan	Layanan informasi dan data Kecamatan-Kelurahan terintegrasi serta terkini yang ada di Kab.Bulukumba	Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan	Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A. TENRI OLLE
95	MEDIASI (Media Daring Informasi dan Konsultasi)	Belum akurat layanan aparatur sipil negara	Layanan Aparatur Sipil Negara pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan hukum, dan atau permohonan mediasi secara daring.	Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi	Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD RESKI ISMAIL, SH.
96	GO TAHFIDZ (Penyediaan layanan Karantina Tahfidz)	Belum adanya pembinaan dan pelatihan belajar seni baca tulis	Pusat pembinaan dan pelatihan bagi qari-qariah dan hafidz-hafidzah belajar seni baca tulis Al Qur’annya.	Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran	Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SALMAH, SE., MM
97	KLINIK PEPES YANLIK (Klinik Pelayanan Pendampingan Supervisi Pelayanan Publik Perangkat Daerah)	Belum adanya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	Membantu OPD untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat.	terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	TENRI SARI MM
98	SILA JATI (Sistem Layanan Jadwal Tentative)	Belum akurat layanan aplikasipermohonan kehadiran	Tersedianya layanan aplikasi permohonan kehadiran / undangan kepada pimpinan sesuai jadwal, waktu dan tempat rencana kegiatan.	Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran	Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	DANI SUSANTO, S,Pi

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
99	DIKERJA (APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN ABSENSI BERBASIS ANDROID)	Belum akurat data absensi berbasis android	Absensi berbasis Android dengan menggunakan sistem GPS dan Sensor Wajah.	Hasil akurat data absensi android dengan menggunakan sistem gps dan sensor wajah	Hasil akurat data absensi android dengan menggunakan sistem gps dan sensor wajah	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb
100	POT SIANA (Pembentukan Posko Terpadu Siaga Bencana)	Belum tersedia ruang atau tempat layanan online	Tersedianya ruang atau tempat dan layanan Online sebagai tempat pengaduan dan laporan pada saat tanggap darurat bencana.	Tersedianya ruangan atau tempat layanan online	Tersedianya ruangan atau tempat layanan online	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SYAMSUDDIN, S.AP
101	APPTI (Aplikasi Pemantauan dan Pemeriksaan Tindaklanjut)	Belum akurat notifikasi melalui perangkat android	Menyediakan fitur notifikasi melalui perangkat android mengenai penugasan, permintaan dokumen maupun informasi.	Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android	Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ARFIANTI ADHIYATI SAIRA
102	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi)	Belum akurat pusat data dan informasi	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi) adalah Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu yang merupakan node (simpul) strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.	Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu	Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	RUDY RAMLAN, SSTP
103	SI KASPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman)	Belum akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	Menyediakan data tentang Kawasan permukiman yang berbasis GIS untuk pengembangan Kawasan Permukiman di Kab.Bulukumba.	Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUNASIB, ST & HENDRI PRASETYAWAN, ST
104	RINDU JAKI-PR (Ruang Informasi, Pengaduan dan	Belum tersedia layanan ruang informasi	Inovasi Penyediaan layanan Ruang Informasi Pengaduan dan pembinaan disesuaikan dengan Kebutuhan yang	Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan	Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUH.ASDAR,ST.,MT./ A. ROMY, SH.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Pembinaan Jasa Konstruksi)	pengaduan dan pembinaan	merupakan Ruang khusus dan layanan secara online yang disediakan untuk informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat secara umum di kab.Bulukumba	pembinaan disesuaikan dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online	pembinaan disesuaikan dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online					
105	SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah)	Belum tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	Informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat umum.	Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI NURHIDAYAT, SE.,MM
106	SIGAP BIRA (Siap Tanggap Bira)	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	Layanan Kesehatan wisata di Bira	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
107	Gardu Kencang si PTM Poli	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
108	Poli Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
109	Pasta GigiMu (Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan Gigi dan mulut melalui media Vidio dan leaflet	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
110	SESI SADUL SAKAN (Setiap Siswa Wajib Membaca Satu Judul Buku Dalam Satu Pekan)	Pertemuan Orang Tua dan siswa	Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencana	Pertemuan dengan orang tua siswa	Layanan Pendidikan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Rosmini, S.Pd / Sulfiana, S. Pd

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			danpelaksanaan program termasuk meminta sumbangan buku bekas dari orang tua peserta didik ataumasyarakat.							
111	POLISI SAMPAH (Pungut Olah Jual Hasil Limbah Sampah)	Kerjasama kebersihan sekolah	Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencanadan pelaksanaan program POLISI SAMPAH	Kebersihan sekolah	Kebersihan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Amrullah, S.Pd / A. Harmawati, S. Pd
112	PELAJU MACCA (Petik Olah Jual Merica)	Belum adanya pengolahan merica	Kecamatan Rilau Ale dan Bulukumpa adalah daerah penghasil merica terbesar di KabupatenBulukumba, bahkan merica yang berasal dari 2 kecamatan ini mencapai 70% (hasil sensus)	pengolahan merica	pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Idaharyani, S. Pd, M. Pd / Yulianti,S.Pd
113	SESI SAPON (Setiap Siswa Menanam Minimal Satu Pohon Produktif)	kerja sama	Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk membahas rencana aksi	Kerja Sama	Kerja sama				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Firmansyah, S. Pd / A.Asrayani AS, S. Pd
114	VICON OIL 42 (Virgin Coconut Oil SMPN 42 Bulukumba	Belum produksi Vicon Oil	Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk ikut serta mengolahVicon Oil 42	Produksi Vicon Oil	Vicon Oil				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Diana Rista, S. Pd /Ernawati, S. Pd
115	GSB (Giat Shalat Berjamaah)	Penjadwalan	Pada jam pelajaran dibuat jadwal pelaksanaan shalat berjamaah dari pukul 11,50 – 12,30. Kemudian diisi dengan literasi keagamaan berupa membaca Al.quran.kultum dan kegiatan ibadah lainnya Akan dibuat group link dengan orang tua peserta didik tentang informasi pelaksanaan shalat berjammah pserta didik dirumah.	Sholat berjamaah	Informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nurhalim, S.Pd, /Arman,S.Pd

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
116	LAMPU (Pengolahan Sampah Terpadu)	Belum adanya pengolahan sampah	Inovasi Lampu (Pengolahan Sampah Terpadu) sampah daun merupakan langka dalam menanggulangi sampah yang ada dilingkungan sekolah danmegolahnya menjadi pupuk kompos yang sangat berguna bagi tanaman tentunya bagi warga sekitar sekolah termasuk juga untuk tanaman dalam lingkungan sekolah tersebut. Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam lingkungan sekolah, sehingga generasi selanjutnya tetap dapat menikmati keindahan alam.	pengolahan sampah plastik	Pelestarian lingkungan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Drs. H. SYARIFUDDIN, M.S
117	PESOHOR 25 (Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Holtikultura	Beelum adanya pengolahan komoditas	Salah satunya dengan menyiapkan pangan segar yang bisa dinikmati dari perkebunan SMP Negeri 25 Bulukumba, kegiatan PESOHOR 25 kedepannya diharapkan mampu memberikan hasil berupa komoditas-komoditas harian yang sifatnya segar. Dalam artian tanaman yang ditanam dilahan kosong 25 di konsumsi secara langsung setelah di panen langsung.	Pengolahan komoditas	Pengolahan produk				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Drs. Muhammad Jusman dan Nurasma Hasni, S.Pd.I
118	BCA (Bell Cinta Al-Qur'an	Belum adanya bell baca Quran	Inovasi Bell Cinta Alquran (BCA) adalah Inovasi yang dilator belakangi oleh kondisi ,	Belll Baca Quran	Tanda Bell				SK Bupati Bulukumba,	Danial,S.Pd,M.M dan Muhammad Yamin,S.Pd

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Masih kurangnya komunikasi atau perhatian orang tua dengan pihak sekolah dalam memantau						No.188.45-216 Tahun 2023	
119	INOVASI TTG (Teknologi Tepat Guna) VCO	Belum ada penerapan tepat guna	Inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) UPT SPF SMPN 13 Bulukumba merupakan suatu Langkah nyata yangdilakukan oleh pihak sekolah dan masyarakat dalam rangka penerapan Ilmu Pengetahuan yang tepat guna	Penerapan tepat guna	TTG				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	ACI,S.Pd, M.Pd. /FACHMY KHARTADYNATA, S.Pd
120	PATRIOT MAS 28 (Pusat Informasi Terpadu & Layanan Komunikasi Orang Tua,Masyarakat Dan Warga Sekolah 28)	Belum adanya Website	Inovasi PATRIOT 28 ini berupa website layanan terpadu yang dapat diakses langsung oleh orang tua dan masyarakat. Layanan ini berisi berbagai informasi terkait perkembangan sekolah, informasi perkembangan peserta didik,	adanya Website	Jaringan Website				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Sudirman, S.Pd., & Sella Arzyta AS, S.Pd
121	KONEKSITAS DACIL (Koneksitas Data Dapodik Dan Capil)	Kerja sama	Koneksitas DACIL (Koneksitas Data DAPODIK dan DUKCAPIL) merupakan layanan yang di gunakan untuk mengkoneksikan data DAPODIK dan DUKCAPIL	Kerjasama	Replikasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd.,M.Pd
122	MELATIKU (Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun	Belum memanfaatkan lahan	Melatiku Singkatan Dari Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun Sekolah Inovasi Ini	Pemafaatan lahan	Pemanfaatan lahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.SUARNI AZIS
123	PANAIK (Pengolahan Ikan Menjadi Abon Ikan)	Belum ada pengolahan Ikan	Ikan merupakan salah satu hasil laut yang dikonsumsi masyarakat karena merupakan sumber protein yang mudah dicerna dan kadar lemak relatif	adanya pengolahan ikan	Pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	H. Syahrir, S.Pd, M.Si. dan Nurfalah Sari, S.Pd.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			rendah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan							
124	MA'SIFA (Mengolah Sardine Produktif)	Belum ada pengolahan sardine	Inovasi Mengolah Sardine Produktif (MA'SIFA) adalah ide/gagasan baru	adanya pengolaha sardine	Pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	MUHAMMAD YUSUF
125	WALASUJI (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji)	Perilaku siswa	Walasuji (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji) dimaksudkan untuk mengantisipasi perilaku negative danperundungan melalui penerapan disiplin positif	berperilaku	Berperilaku baik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
126	SI KOIN EMAS (Sistem Komunikasi, Informasi Edukasi Masyarakat)	Belum ada sistem Komunikasi	Si Koin Emas (Sistem Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat) merupakan Sistem Informasi ManajemenSekolah yang berbasis Teknologi. Melalui media ini orang tua dan masyarakat mendapatkan informasi seputarpendidikan secara umum serta satuan pendidikan secara khusus	Sistem Komunikasi	Sistem Informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
127	BATU AMBAR (Membuat Penatausahaan Administrasi Menggunakan Barcode)	Belum ada barcode	Batu Ambar (Membuat Penaatausahaan Administrasi menggunakan <i>Barcode</i>)	Barcode	Penatausahaan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
128	MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk di sekitar Sekolah)	Tanaman diekitar sekolah	MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk Sekitar Sekolah) merupakan inovasi yang dilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan berkurangnya	pemanfaatan tanaman	pemanfaatan lingkungan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Marasiah, S.Pd dan Ristawadi, S.S.
129	PEMUDA BERKARYA (Pengembangan Pemasaran Usaha Kue Khas Daerah)	Belum adanya sistem pengembangan	Pemuda Berkarya (pengembangan pemasaran usaha kue khas Daerah) adalah inovasi yang dilatarbelakangi	ada sistem pemasaran	Pemasaran kue tradional				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	HJ. ANDI ARIDAH MALIK, S.Pd.M.M dan ANDI RAHMAT, SE

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		pemasaran kue khas	oleh belum Adanya sistem pengembangan pemasaran usaha kue khas Bontobahari, masihRendahnya kuaitas Kue Khas							
130	BAJABU TA'(Pengembangan	Pengolahan hasil bumi	BAJABUTA' merupakan inovasi yangilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil bumi yang sangat melimpah di daerah sekitar SMP Negeri 35 Bulukumba, yaitu Buah Kelapa	Pengolahan	Pengolhan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Juhaedah
131	PALLABA (Pallapi Babua) Pelapis Perut'	Mengatasi tidak sarapan	Meminimalisir peserta didik yang sakit akibat tidak sarapan,sehingga pembelajaran dapat berjalan	Saapan	dapat mengikuti kegiatan disekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Rosmayani, S. Pd ,M.Pi. &Nurlaela,S.Pd
132	SATU REGU (Hari Sabtu Refleksi Guru)	Belum diprogramkan	rogram rutin kepala sekolah yang dilaksanakan setiap hari sabtu. Kegiatan ini dikemas dalam rapat rutin sekola	diprogramkan	Tindak Lanjut Program Kemendes				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Muhammad Arfin, S.Pd., M.Pd.
133	TARSIH (Duta Kebersihan Sekolah)	Belum ada model informasi	eserta didik yang menjadi model atau contoh menyampaikan informasi tentang kebersihan sekolah.	ada model informasi	informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Sitti Nurbaya,S.Pd
134	KAMEKAMEHA (Kami Mengaji, Kami Menghafal Al-Qur'an Juz Amma)		Meningkatkan literasi al-Qur'an di sekolah. Agar murid-murid terbiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Diharapkan dapat membentuk karakter murid yang religius.						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Sitti Nurbaya,S.Pd
135	SI KOCAK Sikola Cakka (Sekolah Bersih)	Belum menajaga kebersihan kelas	Sosialisasi pembiasaanpeserta didik di setiap kelas, menjaga kebersihan dari sampah.	Kebersihan kelas	Kebersihan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Eka Fausiah Azzahrah,S.Pd

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
136	RUMAH KACA (Rutinitas Jumat Harus Membacakan Cerita)	Belum lancar membaca	Guru memilih secara acak siswa setiap hari jumat untuk membacakan sebuah cerita	lancar membaca	Membaca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.Hasmiati,S.Pd.,MM &Pratiwi Risnaeni, S.Pd
137	S2R (Sehat Segar ala Risma)	Mengatasi Lingkungan	Mengatasi masalah lingkungan dimana wabah virus mudah menyerang bagi yang memiliki imun tubuh rendah.	Lingkungan	Kekebalan tubuh				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
138	QuKi (Quizizz	Belum metode quiss	Pembelajaranberbasis permainan aplikasi Quizizz	Metode	Metode				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
139	Program “Sami Sar”(Satu Minggu Satu Karya)	Belum minat baca	Program yang dapat membangkitkanminat baca peserta didik serta menghasilkan	membangkitkan minat baca	Minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
140	Nilaru (Klinik layanan Guru		Inovasi Pembelajaran Berbasis Permainan dengan menggunakan metode Treasure Hunt(mencari topik pembelajaran)						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
141	Trans GB (Treasure Hunt yang di aplikasikan dengan Gaya Belajar)		Inovasi Penyediaan layanan untuk para guru menyampaikan masalah dan kebutuhan serta tempat pelatihan untuk para guru mengikuti						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
142	SABU PAKET (Satu Bulan Satu Kegiatan)		empat pelatihan untuk para guru mengikutipelatihan/bimbingan						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
143	CURI DAGU (Cukup Sehari Dalam Seminggu	Ketarutan berbelanja	Cukup belanja sehari dalam seminggu dengan membiasakan murid membawa bekal sehat yang dibawa dari rumah dengan menggunakan wadah yang	Berbelanja	Jajanan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Andi Suyatmy, S.Pd.SD, Muh. Arfah, S.Pd,Ramlah Asmadi, S.Pd & Ariyanti, S.PdI

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			tidak menghasilkan sampah di sekolah.							
144	MACCA (Mari Membaca)	Belum da pembimbingan	Bimbingan secara khusus dan bergilir setiap kelasnya di perpustakaan untuk membaca.	ada pembimbingan	pembimbingan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ratih Yulvitasari, S. Pd
145	JUBAH (Jumat Ibadah)		Siswa melakukan shalat duha setiap hari jumat.						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Nahdiah Malik,S.Pd & Dirmawati, S.Pd
146	KURAMPAS (Kurangi Sampah Plastik)	Belum ada kesadaran siswa	meningkatkan kesadaran warga sekolah mengurangi sampah plastik	meningkatkan kesadaran siswa	Perilakusiswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.Roslinah, S.Pd.SD.,M.M
147	PLASTIK (Pojok Baca Kelas Estetik)	Belum minat baca	Upaya terwujudnya peningkatan minat baca murid melalui daya dukung pojok baca atau sudut baca di setiap kelas.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Irman, S.Pd
148	SUKU (Sudut Baca Sahabatku)	Belum minat baca	Untuk meningkatkan minat baca siswa, dilakukan inovasi dengan menyiapkan sudut baca di setiap kelas yang dilengkapi dengan buku bacaan.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusniar, S.Pd
149	SEBAREN (Sekolah Berbasis Pesantren)	Belum minat baca	Model Pendidikan yang mengintegrasikan sistem Pendidikan formal dan pembelajaran pesantren.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusman.M,S.Pd,MM
150	GARASI SEKOLAH (Gerakan Literasi Sebelum Bel Masuk)	Belum minat baca	Meningkatkan minat baca murid setelah sampai di sekolah pada pagi hari sebelum Bel Tanda masuk Berbunyi.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hasrita Anwar, S.Pd
151	Mewujudkan Minat Baca (BELAJAR) Peserta Didik	Belum ada layanan online	Layanan secara online yang disediakan untuk Pengaduan dan Kosultasi terhadap	layaan online	online				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	H. Muhammad Bahri S. Pd

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kurangnya minat baca belajar pada Anak peserta didik.							
152	Menjadikan Desa Batukaropa sebagai Desa Wisata Jambu Air	Belum terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	Inovasi Menjadikan Desa Batukaropa menjadi Desa Wisata Buah Jambu Air dengan memberikan Pengetahuan terhadap Petani Jambu melalui Pelatihan-pelatihan dan memberikan Sarana tempat menjual yang Layak,sehingga dapat membantu mengembangkan usaha warga.	Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Taufik Laenre, S.Sos
153	Merefitalisasi Lapangan Sepak Bola Menjadi Sarana Multi Fungsi	Belum tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	Inovasi Penyediaan sarana multi fungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola selain sebagai sarana olahraga juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata kuliner, dan pendidikan, dengan harapan dapat melahirkan generasi – genearsi berprestasi dibidang olahraga, pendidikan dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha kuliner.	Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Ridwan
154	(Degit) Desa Digital	Belum akurat aplikasi diplaystore	Warga mendownload aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS. Setelah mendapat akun warga bisa masuk diaplikasi dan bisa menggunakan sesuai kebutuhannya. (Kami hanya melayani warga desa Kambuno) yakni bisa	Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS.	Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Akmal Yuhniani.M

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			mengimput data sendiri dan mencetaknya dimana saja							
155	Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital	Belum akurat penggunaan sistem informasi	Layanan Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan administrasi Masyarakat merupakan Layanan administrasi kepada masyarakat menggunakan sistem informasi yang mana sebelumnya dilakukan secara manual yang mana data masyarakat pemohon layanan masih diketik secara manual, dengan adanya penggunaan sistem informasi yang digunakan bisa menekan waktu pengerjaan karena data-data pemohon bisa diambil dari basis data kependudukan tanpa diinput secara manual. Selain itu masyarakat yang ada di tempat lain dan di luar daerah yang merupakan anggota masyarakat desa yang bersangkutan dapat mengurus persuratan dan permohonan lainnya tanpa harus mendatangi kantor desa.	Hasil akurat penggunaan sistem informasi	Hasil akurat penggunaan sistem informasi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jamaluddin
156	PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) dalam rangka pemutakhiran data kependudukan khususnya warga yang meninggaldi Desa Bulo-	Belum tercapainya pemerintah desa datang menyerahkan akte kematian	Inovasi PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) ini dilakukan penyerahan pada saat Takziah terakhir bagi yang meninggal dengan melibatkan Kepala Dusun dan Imam Dusun dan Bekerjasama dengan	Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian	Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Mappilawa,SE

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Bulo Kecamatan Bulukumpa		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam penerbitan akte kematian masyarakat desa Bulo-Bulo, Inovasi ini merupakan replikasi/ pengembangan dari Inovasi PAKU PANRITA yang dicanangkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.							
157	Purwarupa Duwila (Posyandu Wisata Lamanda)	Menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja	Dari Kegiatan ini kami dari tim fasilitator Puskesmas Bontotiro sangat bersyukur karena kami bisa terlibat dan menjadi salah satu garda terdepan dalam membentuk Purwarupa di Posyandu yang mana semua ide yang kita dapat hasil dari apa yang kita pelajari dari Workshop HCD (Human Centered Design). Dari Kegiatan ini kami dapat memberikan pengantar terkait metode HCD untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja UPT Puskesmas Bontotiro yang di implementasikan di Posyandu . Cakupan imunisasi dasar lengkap Puskesmas Bontotiro meningkat setelah adanya Program HCD	Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja	Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Agusman,SKM,M.Kes
158	GaPuRa BuTTaKu (Gerakan Sepuluh Rumah	Kurangnya upaya dalam memutus mata rantai	GaPuRa BuTTaKu adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Inovator dan Tim dalam	Mencegah penularan penyakit	Mencegah penularan penyakit	√			SK Bupati Bulukumba No.	Ahmad, SKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	untuk Bulukumba Tanpa Tuberkulosis dan Kusta)	penularan penyakit tuberculosiis,kusta dan frambusia	rangka memutus mata rantai penularan penyakit Tuberculosis, Kusta dan Frambusia melalui kegiatan deteksi dini dalam lingkup kecil yaitu dalam lingkup per 10 (Sepuluh) rumah. Dengan lingkup kecil ini akan lebih efektif, efisien dalam penemuan terduga dan kasus baru serta mempermudah dalam Pengawasan Minum Obat (PMO).	tuberculosis,kusta dan frambusia	tuberculosis,kusta dan frambusia				188.45-216 Tahun 2023	
159	Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu (BIJANTA)	Kurangnya peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	Inovasi BIJANTA berdampak signifikan pada peningkatan cakupan pelayanan ODGJ, di mana pada tahun 2020 kasus ODGJ yang ditemukan di lokus Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 22 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan cakupan sebanyak 60 orang, dan pada tahun 2022 menjadi 84 orang. Kualitas Layanan ODGJ menjadi lebih efektif dan efisien serta berkurangnya kasus ODGJ yang terpasung, meningkatnya peran keluarga dalam merawat dan memantau minum obat	Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep
160	Aksi Masyarakat Deteksi dan Intervensi Kesehatan Jiwa (ASMARA DI JIWA)	Kurangnya pencatatan pelaporan dan pemantauan	Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi - Pentatatan dan pelaoran - Kordinasi stake holder Kordinasi berkala	Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi	Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
161	Bidan Peduli Dan Lindungi Ibu Hamil (BIDAN PELANGI)	Kurangnya pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih kerap terjadi untuk itu kegiatan inovasi bidan Puskesmas Caile adalah BIDAN PELANGI dalam artiannya bidan peduli dan lindungi ibu hamil, sebagai bentuk sayang pada ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.	Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Susdiana, Amd.Keb
162	Pantau Langsung Minum Obat Kecacingan (PALANG MUKA)	Kurangnya pencegahan anak menderita kecacingan	Inovasi pantau langsung minum obat kecacingan (PALANG MUKA). Penyakit kecacingan merupakan salah satu penyakit terabaikan terkadang belum dianggap penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Namun dampak yang ditimbulkan oleh kondisi dimana anak sekolah yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat apabila anak menderita kecacingan	Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan	Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hj. Masnah, S.Kep, Ns
163	Konseling ASI dan Perawatan Payudara (KASI PEPAYA)	Kurangnya motivasi peningkatan cakupan ASI eksklusif	Angka persalinan relatif banyak di Puskesmas Caile sehingga memotivasi dan mengedukasi ibu-ibu baru dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas. Kegiatan diawali dengan ibu hamil	Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas	Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Marlina, SKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			mendaftarkan diri melalui hotline WA Puskesmas Caile kemudian petugas memberikan jadwal tersedia. Ibu hamil datang ke Puskesmas sesuai jadwal pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu setelahnya akan mendapatkan konseling ASI dan perawatan perawatan dari petugas gizi.							
164	DIOPER LAB (Digitalisasi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium)	Kurangnya digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan	Dengan inovasi digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan akan lebih memudahkan mencari data, mengolah data, merakapitulasi data yang secara berkala dibutuhkan oleh puskesmas, dengan begitu data tersebut tidak lagi ditulis secara manual pada buku	Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan	Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Regina Andini Maulidya, S.Tr.Kes
165	KASITAU (Keluarga Siap Pantau)	Kurangnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	Merupakan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi pendek dan sangat pendek serta pemanfaatan aplikasi primaku dan pojok skrining untuk mendeteksi status gizi pendek dan sangat pendek	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	dr. NURUL HIDAYAH. R
166	MASSEDI (Mari Cegah Stunting Sejak Dini)	Kurangnya menggunakan metode door to door untuk pencapaian posyandu	Merupakan inovasi dengan melibatkan kader-kader kesehatan di desa serta petugas puskesmas melakukan sweeping ibu hamil, bayi dan balita secara rutin menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pencapaian	Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak	Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI MUHAMMAD HAERUL, SKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak bayi/balita mereka ke posyandu, sehingga petugas dapat melakukan pelacakan secara keseluruhan terhadap seluruh kelompok umur bayi-balita serta ibu hamil dalam pencegahan dan penanggulangan stunting	bayi/balita mereka ke posyandu,	bayi/balita mereka ke posyandu,					
167	KADAR MANIS (Peningkatan Kesadaran Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Puskesmas)	Kurangnya alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	1. Membuat alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil 2. Menyiapkan register dan kartu kontrol kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil 3. Membuat leaflet tentang “Pentingnya ibu hamil menjaga kesehatan gigi dan mulut” 4. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil 5. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil	Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan dr. ANDI FIRJATULLAH EL FIRMAN
168	PILAR BERSEPAKAT (Penggunaan Media Sosial Instagram dan Facebook sebagai Media Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat)	Kurangnya mempublikasikan informasi ke media sosial	1. Membuat alur pengiriman dokumentasi media sosial Puskesmas 2. Membuat SK penanggungjawab masing-masing program 3. Menyiapkan link Google Drive 4. Mempublikasikan Informasi Ke Media sosial	Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial	Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Saripa,S.K.M
169	PIKNIK SANTAI (Pojoy Konseling Klinik Sanitasi)	Kurangnya alur pelayanan klinik sanitasi	1. Membuat Alur Pelayanan Klinik Sanitasi 2. Membuat Perencanaan	Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi	Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi	√			SK Bupati Bulukumba No.	Jindasari Said, S.ST dan Intan Rahmawati, SKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Klinik Sanitasi 3. Melakukan Sosialisasi Alur Pelayanan Klinik Sanitasi 4. Melakukan Pelayanan Klinik Sanitasi 5. Melakukan Evaluasi Pelayanan Klinik Sanitasi						188.45-216 Tahun 2023	
170	PESAN GANAS (Penyuluhan dan pemeriksaan gigi geligi anak usia sekolah di wilayah UPT Puskesmas Ujung Loe)	Kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	1. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan 2. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi 3. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak usia sekolah untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut 4. Melakukan rujukan kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan gigi	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Ika Rista Mutmainna, A.Md.Kes
171	PERI SURVEILANS (Optimalisasi Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Melalui Pembentukan Jaringan Surveilans Diwilayah UPT Puskesmas Ujung Loe)	Kurangnya sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	P2 UPDATE (Melakukan sosialisasi dengan petugas Poskesdes dan Pustu) 2. Surveillance Squad (Melakukan pembetulan jaringan surveilans) 3. Weekly Report (Perekapan dan pelaporan mingguan) 4. Monev SKDR (Evaluasi kegiatan Pelaporan KDR)	Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Rahmi, SKM
172	PERI GIGI UTAMA (Pentingnya upaya preventif pada perawatan gigi anak di wilayah puskesmas Ujungloe)	Kurangnya edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	1. Melakukan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga Kesehatan gigi anak. 2. Melakukan penyuluhan tentang masa tanggal dan erupsi gigi 3. Mengenalkan keanak alat	Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan drg. Fitria Sultan

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			alat pemeriksaan gigi agar menghilangkan rasa takut. 4. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut.							
173	EPIN DPT (Edukasi Pemberian Vaksin Dpt)	Kurangnya edukasi pemberian vaksin DPT pada bayi umur 9 bulan	Inovasi berupa edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio agar menarik minat ibu balita yang diharapkan dapat menjadi pengetahuan di masyarakat khususnya di wilayah puskesmas lembanna	Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio	Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sudirman SKM,S.Kep,Ns,M.Kes
174	OPTIMIS (OPTImalisasi penyaMpaian Informasi tentang penderita hipertensi)	Kurangnya pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu di atas kaitkan dengan penerapan manajemen program di puskesmas dimana perlunya pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu memberikan gagasan pemecahan dengan “ OPTIMIS (Optimalisasi penyampaian informasi tentang Hipertensi pada pasien di ruang tunggu pasien Puskesmas Kajang)”	Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	SIRAJUDDIN, SKM, M.Kes
175	TAMAN BUSA UNTUK ELSA (Taman Buah Dan	Kurangnya penyiapan bibit,	Kegiatan inovasi ini diawali dengan penyiapan bibit,	Meningkatkan penyiapan bibit,	Meningkatkan penyiapan bibit,	√			SK Bupati Bulukumba No.	PUTRINI, SKM

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Sayur Untuk Keluarga Sehat)	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat diterapkannya GERMAS dan salah satu indicator PHBS (Makan buah dan sayur setiap hari), serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.				188.45-216 Tahun 2023	
176	Publikasi Informasi Kesehatan Menggunakan Display Screen Ruang Tunggu Puskesmas	Kurangnya display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini	Informasi Kesehatan disajikan dalam bentuk video dan diputar secara terus menerus di display screen ruang tunggu Puskesmas. Video akan diupdate secara continue sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan current issue kesehatan. Dengan pemanfaatan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI ISMAINAR BAHTIAR, S.Kep., Ns
177	SEHARI USIL (Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut)	kurangnya minat ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya	Inovasi Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut (SEHARI USIL) sesuai dengan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya	Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk	Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Dr. BENAWA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		pengetahuan tentang penyakit	dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit degeneratif dimana usila menginginkan konsultasi pskikologis secara langsung dengan dokter.	memeriksa kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit	memeriksa kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit					
178	GEMA SEGAR (Gerakan Masyarakat Sehat Bugar)	Kurangnya hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan diabetes	Inovasi masyarakat wajib olah raga, dicetuskan berdasar hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga dengan melibatkan lintas sektor pemerintahan (Kecamatan, koramil, Polsek, Kel/Desa) dalam hal ini berbentuk edaran masyarakat wajib sehat dengan berolah raga.	Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga	Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ASGOW SYAM
179	EPEK PASAR” Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD)	Kurangnya Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD)	Inovasi “EPEK PASAR” (Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) merupakan inovasi yang perlu diterapkan dan diberlakukan di masyarakat khususnya pada usia anak sekolah dasar, karena 9 dari 20 siswa masi terinfeksi penyakit kecacingan, sehingga perlu perhatian khusus untuk membantu mengobati dan menghindari siswa dari penyakit kecacingan	Meningkatkan Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD)	Meningkatkan Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD)	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ASMAL ARDIANTO, S.S.T
180	FIARA (Festival Imunisasi Anak Rilau Ale)	Kurang melibatkan peran petugas kesehatan	FIARA ini dilaksanakan dengan melibatkan peran petugas kesehatan , pemerintah	Meningkatkan peran petugas kesehatan ,	Meningkatkan peran petugas kesehatan ,	√			SK Bupati Bulukumba No.	YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Bentuk pelaksanaan kegiatan antara lain pemberian reward, penyuluhan tentang imunisasi,dan lomba bertema imunisasi bagi kader dan balita yang disertai dengan pemberian hadiah bagi peserta lomba.	pemerintah kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya.	pemerintah kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya.				188.45-216 Tahun 2023	
181	TABE' MA (Tadarus sebelum Belajar di Hari Jumat)	Kurangnya murid menghafal surah surah pendek	Murid-murid menghafal surah surah pendek dan tadarus sebelum belajar setiap jumat agar literasi baca tulis memiliki ruang di pagi hari.	Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek	Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
182	LENERA (Kaleng Literasi)	Kurangnya minat Baca	Mengajak murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar dan tulisan dalam kaleng kemudian mengamati dan memperhatikan gambar serta tulisan di belakang gambar.	Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar	Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
183	CATUR (Baca Tulis Cerita Gambar)	Kurangnya Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid	Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
184	CARITA (Baca Tulis Cerita)	Kurangnya kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Memenuhi kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
185	GEDHUFAN (Gemar Salat \Dhuha dan Hafalan)	Kurangnya minat baca	Sarana dan prasana meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.	meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.	meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hasni,S.Pd
186	SIDAK (Validasi Data Dapodik)	Kurangnya data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	Inovasi data siswa yang terkoneksi dengan Dukcapil adalah upaya yang dilakukan mengurangi data siswa Dapodik yang tidak singkron.	Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Halija, S.Pd.MM & Ramlia, S.Pd
187	POCAKTIK (Pojok Baca Kelas Estetik)	Kurangnya minat baca	Memilih satu buku fiksi kemudian masing-masing peserta didik Menamatkan buku tersebut selama kurung waktu 1 minggu.	Meningkatkan membaca buku fiksi	Meningkatkan membaca buku fiksi			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hj.Rosmala,S.Pd.SD
188	TERIK (Literasi Asyik)	Kurangnya kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran	Terik (Literasi Asyik) adalah kegiatan yang dilakukan murid sebelum / setelah melakukan pembelajaran melakukan berbagai bentuk literasi.	Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran	Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si
189	TASPEN DATA (Tasbih Peluntur Noda Hitam)	Kurangnya karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	Menumbuhkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan, kegiatan ini dilakukan dengan menuliskan hal baik atau hal buruk yang dilakukan hari ini lalu memasukkan ke dalam toples.	Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si
190	SAKA EMBA (Satu Kata Empat Bahasa)	Kurangnya murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	Setiap murid menuliskan kosa kata dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari bahasa bugis/Makassar, Inggris dan	Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Arab atau bahasa asing untuk kata tersebut.							
191	SISE'BU (Siap Selalu Dengan Buku).	Kurang berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik	Berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan. setelah itu dianjurkan untuk selalu membawa buku untuk dibaca.	meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan.	meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Bahrir
192	BIASBAKU (Membiasakan Baca Buku)	Kurangnya minat baca peserta didik disekolah	Inovasi BIAS BAKU (Membiasakan baca buku) adalah upaya untuk menumbuhkan minat bacapeserta didik di sekolah,	Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah	Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sitti Isramiah, S. Pd
193	PAMESIN ASAM PEKSPA (Pemanfaatan Media Spiritual Kit Dan Aplikasi Sinc Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien)	Kurangnya konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	Kegiatan inovasi ini diawali dengan membuat konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), kemudian dilakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan spiritual kit tersebut serta aplikasi SINC (Spiritual Islamic Nursing Care) dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual kepada perawat yang bertugas di Ruang Rawat Inap Puskesmas Herlang.	Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	A. ALIMIN NOSTIB, S.Kep, Ns, M.Kes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
194	KELABAKAN MAS (Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas)	Kurangnya berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	Inovasi Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas, dimulai dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada beserta dengan latar belakangnya dan kemudian menyampaikan ide atau inovasi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.	Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI NUR SRIMULYA WIDI, S.Tr.Kes
195	RINDU BUMIL (alaRm kalender pengIngat jaDwal kUnjungan iBU haMIL)	Kurangnya layanan alarm kalender ibu hamil	Inovasi Penyediaan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kemudian mengolah data hamil tersebut dengan mengelompokkan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan dan kunjungan keberapa selama masa kehamilannya.	Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas.	Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	dr. DONNA MARISSA & Khaerunnisa', SKM
196	BANK Data GOLDA dan Pendoron Desa	Kurangnya pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	Inovasi Bank Data Golda dan Pendoron desa merupakan inovasi UPT Puskesmas salassae berupa peningkatan pelayanan dari kegiatan penyiapan pendonor bagi Ibu hamil sebanyak 4 orang, dengan melakukan pemeriksaan golongan darah secara masif ke desa-desa sehingga setiap masyarakat desa dapat mengetahui golongan darahnya kemudian untuk orang-orang yang	Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	A.M SURIYADI,M.A S.KM.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			memenuhi syarat untuk melakukan donor darah akan disiapkan sebagai calon pendonor bagi orang yang membutuhkan baik Ibu hamil maupun lainnya dengan dilakukan screening pemeriksaan kesehatan mulai dari Berat badan, tekanan darah , penyakit menular dan cek golongan darah setelah memenuhi syarat dilakukan penandatanganan form persetujuan kesediaan mendonor jika diminta kemudian datanya disimpan dalam bentuk Drive yang dapat diakses oleh pihak puskesmas dan UTD RSUD Dg.Raja Ketika Dibutuhkan							
197	DASTING (Dapur Stunting)	Kurangnya pencegahan angka stunting	Inovasi DASTING (Dapur Stunting) merupakan inovasi untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	MEGAWATI, SKM
198	KONTER PKM (Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular)	Kurangnya konsultasi terpadu penyakit tidak menular	Inovasi Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular merupakan tempat khusus dalam penyediaan layanan Konsultasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Sesuai Indikasi penyakit bagi sasaran usia > 15 tahun, Tim posbindu PTM turun kemasyarakat dengan pelayanan prima yang terdiri	Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular	Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	HISBAIR S.KEP, NS, M.KES & SARWENDI SAIN, S.KEP, NS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			dari multi disiplin profesi yang turun langsung ke masyarakat.							
199	MY GOLDA (Cek dan deteksi golongan darah melalui direct check system dan aplikasi My Golda)	kurangnya tim inovasi membuat pos cek golda	Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis. Setiap masyarakat yang sudah cek Golda akan mendapat kartu (card detection). Card Detection adalah kartu yang memudahkan Tim inovasi untuk mendeteksi Status Golda karena sudah dilengkapi barcode dan tercatat di sistem dan di input di aplikasi My golda	Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis.	Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	BAHARUDDIN, SKM.,M.kes & Nurilma, A.Md.keb
200	POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah)	Kurangnya Program Sejuta Pendonor Darah	POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah) Program Sejuta Pendonor Darah merupakan program inovasi di UPT Puskasmas Manyampa yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan darah melalui calon pendonor yang telah diperiksa golongan darahnya	Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah	Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sukiah Syam,S.Kep.Ns & Muhammad Syahrul Ramadhan, SKM

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2024 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar penduduk serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2024 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
4. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.

3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bulukumba pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan

meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Bulukumba yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Bulukumba merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bulukumba relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Bulukumba dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaras dengan tema pembangunan Tahun 2024, Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nilai-nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Bulukumba terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Bulukumba menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industri maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industri berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat *renewable* lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut

jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Prospek perekonomian global 2023 diramalkan bergerak ke arah stagflasi, yakni perekonomian yang stagnan dibarengi inflasi tinggi. Invasi militer Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah mengganggu rantai pasokan global yang mendorong kenaikan harga di sektor energi dan pangan secara ekstrim. Itulah yang menjadi faktor utama lonjakan inflasi global yang mendorong bank-bank sentral serempak menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk meredamnya. Tak heran jika sentimen negatif terhadap prospek ekonomi global terus mengemuka, yang membuat para pengambil kebijakan dan pucuk pimpinan dunia usaha di muka bumi terus gelisah.

Mereka melihat konflik geopolitik dan inflasi sebagai ancaman ekonomi utama yang paling mendesak selama setahun ke depan, bahkan ke tahun depannya lagi.

Di Eropa, risiko dari harga energi yang fluktuatif telah nyata, menyusul risiko inflasi dan ketidakstabilan geopolitik. Krisis energi telah mendorong inflasi melonjak hingga tembus 10% yang memaksa Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuan (kini di level 2,5%), diikuti bank sentral Inggris (kini di level 3,5%), untuk segera melandaikan inflasi. ECB diperkirakan akan mengerek suku bunga ke level puncak sebesar 3% pada Mei 2023.

Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris. Kenaikan luar biasa harga gas sebagai sumber energi utama telah memiskinkan banyak warga Jerman dan Inggris sehingga menggerus tingkat konsumsi. Pada gilirannya, hal ini menekan pertumbuhan ekonomi. Di Jerman, produk domestik bruto (PDB) 2023 bakal menyusut menjadi sebesar 1%.

Dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif, inflasi memang melandai. Namun, langkah ini dilematis, karena daya dorong ke pertumbuhan ekonomi pupus seiring erosi daya beli masyarakat pada 2023 dan 2024. Tapi, itulah pilihan kebijakan yang ada di tengah berkecamuknya perang di Ukraina. Di AS, pertumbuhan ekonomi sudah melambat sebagai akibat dari pengetatan kebijakan The Fed, yang pada akhirnya diperkirakan akan memicu “resesi ulangan” mulai kuartal II-2023. Pada saat itu PDB diramalkan minus 1,1% dengan tingkat pengangguran 5,5% pada kuartal I-2024.

Sebagai catatan, AS sempat mengalami resesi pada semester I-2022, kemudian tumbuh positif pada kuartal III-2022. Namun, agresivitas bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan (Fed fund rate/FFR) membuat resesi terulang lagi pada kuartal II-2023, sebagai upaya mengarahkan inflasi ke target 2% pada 2025. Sebuah *long journey of recovery* yang harus ditempuh dengan yakin dan teguh. Di Asia-Pasifik, risiko kenaikan suku bunga acuan lebih dikhawatirkan karena efeknya menekan potensi pertumbuhan ekonomi secara nyata. Di kawasan ini, Tiongkok tetap menjadi outlier, sebagai satu-satunya negara yang memandang pandemi Covid-19 sebagai risiko dominan.

Perbaikan ekonomi Tiongkok akan menjadi salah satu kunci utama pemulihan ekonomi global tahun 2023. Namun, perlu dicermati adanya perubahan arah kebijakan ekonomi negara ini yang cukup ekstrim. Model pertumbuhan Tiongkok bergerak dari sebelumnya yang sangat bergantung pada sektor properti, real estat dan infrastruktur, ke model pertumbuhan berbasis ekonomi digital dan hijau yang memainkan peran lebih besar.

Paralel dengan itu, melemahnya permintaan global karena efek perang di Ukraina yang menyebabkan perlambatan ekspor secara cepat juga mengubah orientasi pasar Tiongkok ke pasar domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dengan pelonggaran penguncian, konsumsi domestik akan berperan signifikan untuk pemulihan ekonomi Tiongkok secara berkelanjutan mulai 2023 nanti, di mana penjualan ritel diperkirakan tumbuh 6,8% dengan PDB nasional tumbuh 4,8%. Bahkan jika pengendalian Covid-19 bisa cepat tuntas, ekonomi Tiongkok punya potensi tumbuh 5,2%.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama 2023 menjadi penopang utama kinerja pasar modal. Dampaknya, kinerja reksadana berbasis saham dan obligasi berpeluang positif dan saat ini menjadi momen terbaik untuk mulai membeli reksadana saham dan indeks.

Menurut analisis Bareksa, inflasi yang cukup terjaga pada bulan Desember 2022 sebesar 5,51% secara tahunan membuat Indonesia masih atraktif dari segi fundamental. Inflasi Indonesia diproyeksikan berada pada rentang 4-5% pada tahun ini.

Namun, pada semester pertama 2023, inflasi diperkirakan tetap tinggi di kisaran 5-5,5%. Sebab, ada faktor low base effect, yakni pada semester pertama 2022 tingkat inflasi hanya tercatat naik 2-3%, sehingga ketika dibandingkan secara tahunan akan terjadi lonjakan. Sebaliknya, pada semester kedua 2023, akan ada faktor high base effect sehingga perbandingan secara tahunan akan mengecil.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat menyentuh level 5,1-5,3% untuk tahun 2022. Hal ini seiring optimisme dari Kementerian Keuangan yang menilai tren pemulihan konsumsi masyarakat akan terus berlanjut hingga tahun ini. Di samping itu, masyarakat melihat kenaikan suku bunga acuan tidak merasa khawatir dalam mengambil kredit karena kondisi ekonomi yang cukup baik di dalam negeri.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga, Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen; (2). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27 %; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen; (4). Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, (5). Gini Ratio sebesar 0,374-0,377 nilai; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,99-74,02 Tahun.

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatandiharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya belimasyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,71 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,64 persen pada tahun 2021, mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,10-5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Dibandingkan dengan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan lebih baik sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Tabel III-1
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga inflasi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun laju inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada Desember 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 114,14 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahrag sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat, dan sabun detergen bubuk/cair. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-2
Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Laju Inflasi	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	3,50	2,35	2,04	2,40	5,77
Nasional	%	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir, TPT periode Agustus Sulawesi Selatan terus menurun. Tercatat angka TPT Sulsel ditahun 2020 sebesar 6,31 persen, turun ditahun 2021 menjadi 5,72 persen kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin mencapai 4,51 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,51 persen merupakan pencapaian pertumbuhan negatif tertinggi selama periode 2018 hingga 2022 yaitu sebesar -21,15 persen. Data perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	%	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 8,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,13 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang, bertambah sebanyak 4,9 ribu orang terhadap Maret 2021 dan bertambah sebanyak 16,86 ribu orang terhadap September 2021. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi pada periode September 2018 hingga 2022, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara umum, pada periode September 2018 hingga September 2019, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar -3,49 poin, namun pada tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan kembali mengalami penurunan sebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel III-4
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

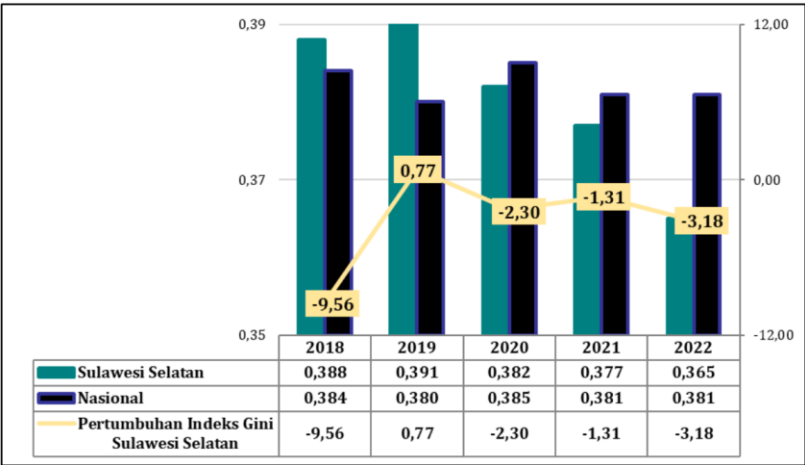
Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	8,87	8,56	8,99	8,53	8,66
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

5. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan Indeks Gini. Sejak September 2019, Indeks Gini Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan hingga September 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Sulawesi Selatan. Indeks Gini pada periode September 2022 sebesar 0,365 menurun sebesar 0,412 poin dibanding Indeks Gini September 2021 serta mengalami persentase penurunan tertinggi selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Selatan serta penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022 capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan lebih baik daripada Indeks Gini Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut

Tabel III-5
Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makroekonomi Sulawesi Selatan 2024 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 mengusung tema **“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,5-5,9 persen, (2). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,59-4,30 persen; (3). Tingkat Kemiskinan 6,7-7,7 persen, (4). Gini Ratio sebesar 0,361-0,363; dan (5). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,02 (6). Pendapatan Perkapita Rp. 70,7 Juta,-

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023 maka ditetapkanlah 5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

6. Pembentukan Karakter Dan Akhlaq Sdm Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional

3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebesar 3,81 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,83 – 5,00 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebanyak 31.290 jiwa (7,39 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2021 yaitu 31.310 jiwa (7,43 persen), atau mengalami penurunan sebesar -0,54 persen. Pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 6,10 persen. Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih lebih rendah yaitu 7,39 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,63 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,57 persen. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu 1,26 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2021 yaitu 3,14 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi 3,23 persen.

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 mengusung **“Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Perwujudan Kawasan Mandiri”**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83-5,00 persen; (2). Inflasi berkisar antara 2,48 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,23 persen; (4). Tingkat Kemiskinan sebesar 6,10 persen (5). Gini Ratio sebesar 0,342 dan (6). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,17 tahun.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2024, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 10 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

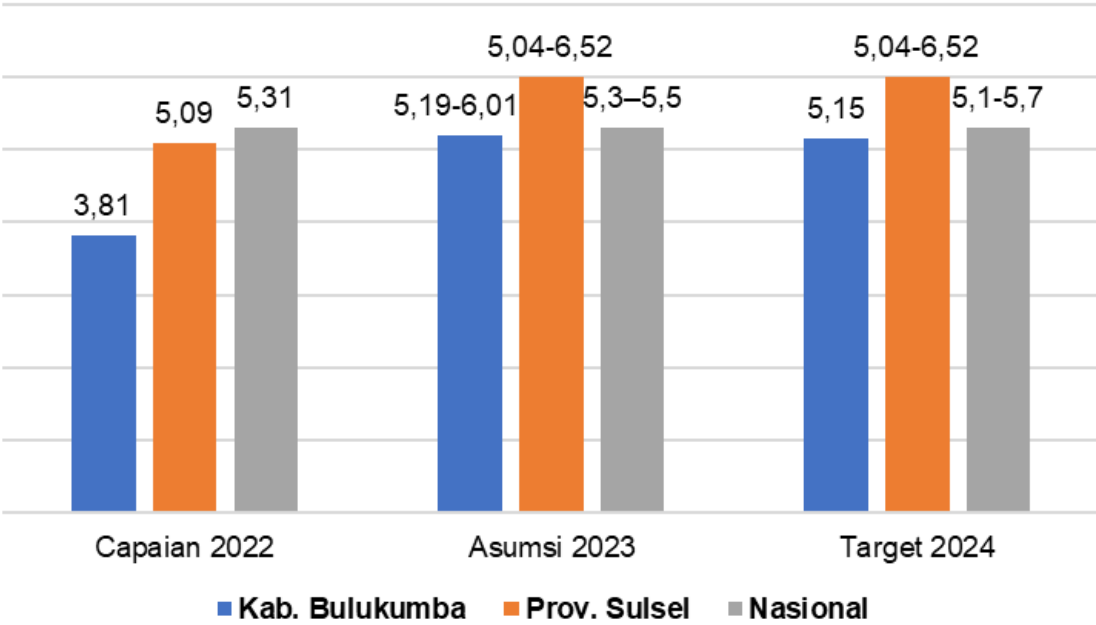
Selain dari pada itu untuk mendorong peningkatan daya saing daerah yang merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 di tegaskan bahwa setiap daerah harus mengembangkan inovasi daerah melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga ke pemerintah pusat.

3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) sebesar 3,91 persen.

Dengan melihat kondisi Kabupaten Bulukumba yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 dalam hal ini sudah memasuki masa endemi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2023 Kabupaten Bulukumba memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19-6,01 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,04-6,52 dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04-6,52 persen. Sementara untuk ditahun 2024 pertumbuhan ekonomi Bulukumba ditargetkan sebesar 5,15 persen

Grafik III-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, Asumsi 2023 dan Target 2024



Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulse Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023

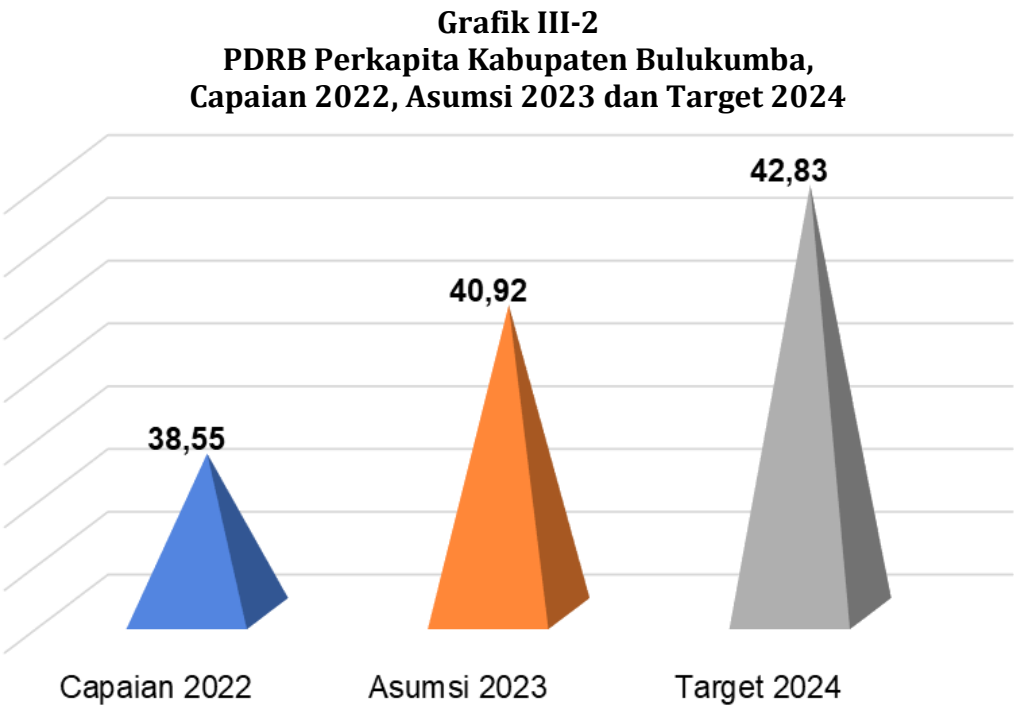
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) trilyun rupiah pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh sangat besar pada aktivifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional.

Tabel III-6
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,12	3,65	0,61	36,86	37,38	37,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2,09	3,06	-2,31	2,75	2,64	2,45
C	Industri Pengolahan	-3,59	5,72	8,41	6,52	6,48	6,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,76	8,90	12,68	0,11	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,11	0,01	9,71	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	5,11	5,12	7,12	10,6	10,65	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,25	6,51	5,37	16,92	16,92	16,96
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,41	5,95	10,17	2,07	2,13	2,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,99	5,88	19,98	0,73	0,72	0,80
J	Informasi dan Komunikasi	11,92	4,42	6,79	3,54	3,47	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,00	7,54	7,80	3,76	3,82	4,05
L	Real Estate	1,03	3,28	6,19	4,3	4,09	4,05
M,N	Jasa Perusahaan	-4,44	6,98	-3,26	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,43	4,36	-0,41	6,31	6,11	5,64
P	Jasa Pendidikan	9,27	4,12	-0,19	3,27	3,19	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,31	6,39	10,07	1,4	1,41	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-1,20	8,81	17,63	0,79	0,82	0,91
	Produk Domestik Regional Bruto	0,43	4,76	3,81	100	100	100

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Bulukumba pada tahun 2022 sebesar Rp. 38,55 juta. Dan pada tahun 2023, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 40,92 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 42,83 Juta.



Sumber : BPS, RPJMD 2021-2026 Kab. Bulukumba, diolah

3.1.1.5.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,57 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,63 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,39 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 berada pada angka 7,39 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

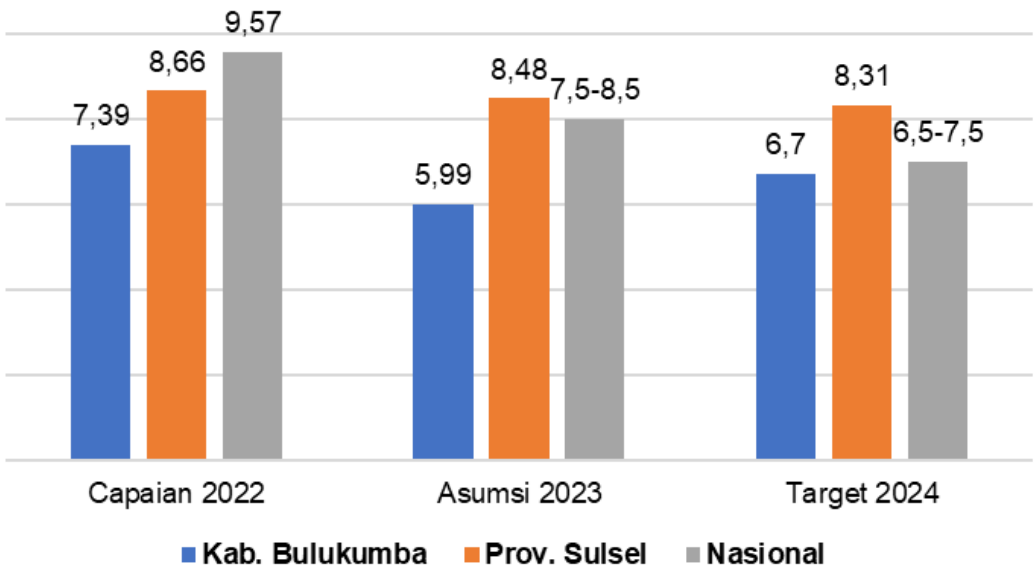
Tabel III-7
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2018	310.753	31.25	7,48
2019	330.161	30.49	7,26
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43
2022	390.040	31,29	7,39

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Penduduk miskin di Bulukumba pada tahun 2023 diprediksi akan mencapai 5,99 persen. Namun pada tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat memasuki dampak dari masa resesi, maka pemerintah Bulukumba menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 6,7 persen, Sulawesi Selatan sebesar 8,31 dan target Nasional yaitu 6,5-7,5 persen.

Grafik III-3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2022, Asumsi 2023 dan Target 2024



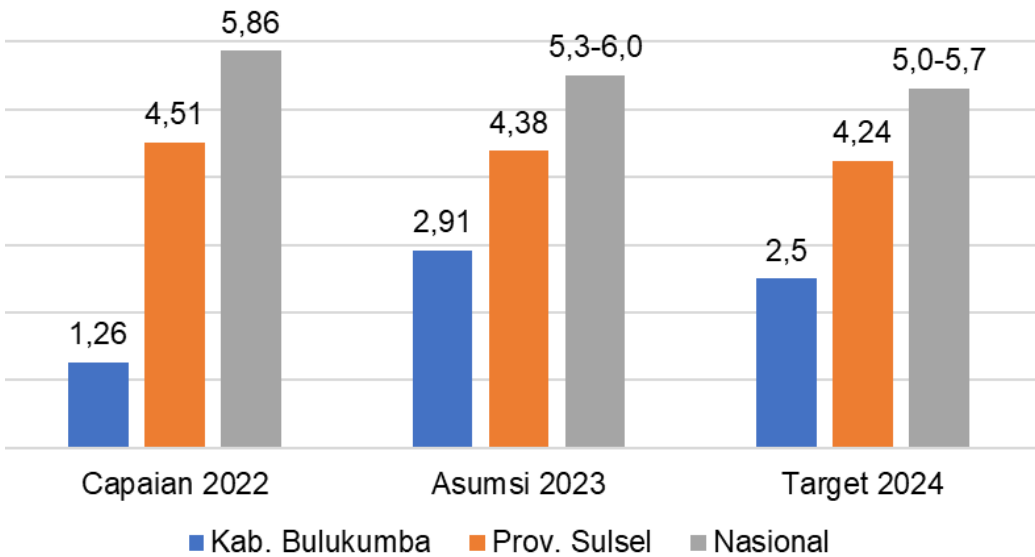
Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulse Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023

3.1.1.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 213.478 jiwa, dimana 210.780 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 1,26. Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Bulukumba pada tahun 2023 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91 persen walaupun capaian sebelumnya masih rendah dari capaian tahun 2022 yang mencapai 1,26 persen dan jika dibandingkan dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang mencapai 4,51 persen dan capaian Nasional sebesar 5,86 persen. Sementara untuk tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di target oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,5 persen, pemerintah sulawesi selatan sebesar 4,24 persen atau target Nasional yaitu 5,0-5,7 persen.

Grafik III-4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



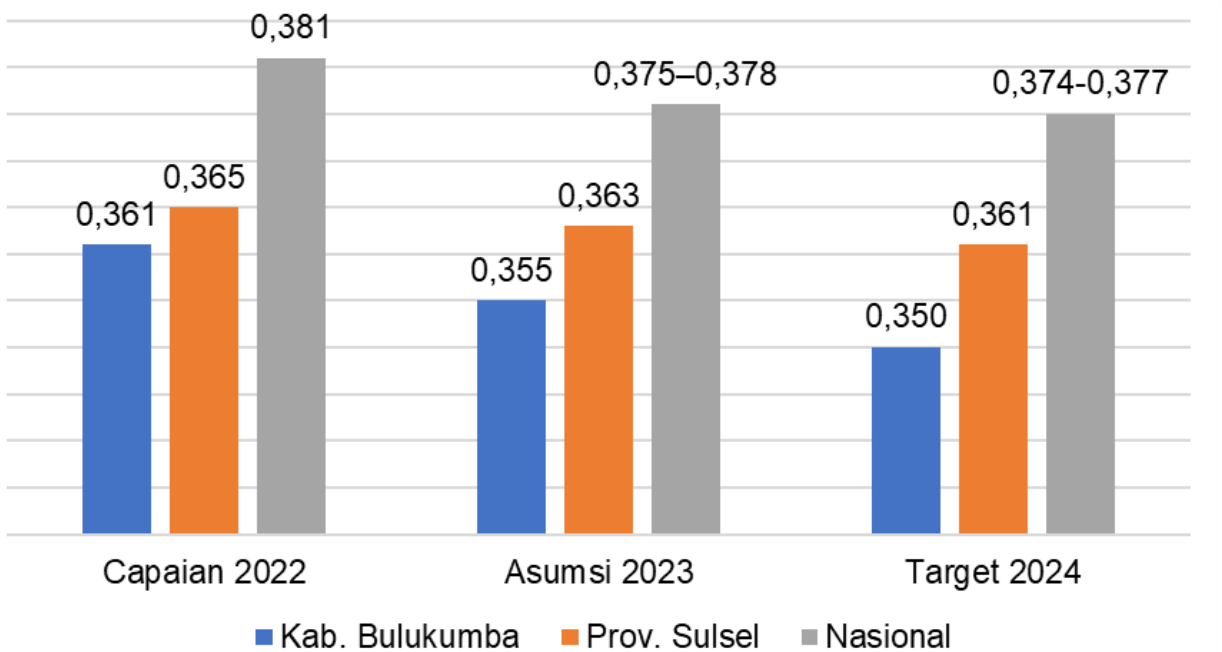
Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulse Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023

3.1.1.5.4 Gini Ratio

Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Gini Ratio Periode September tahun 2022 Kabupaten Bulukumba mencapai 0,361 persen, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai sebesar 0,365, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2023, Gini Ratio di Kabupaten Bulukumba diprediksi mencapai 0,355, Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,363, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375-0,378. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Rasio Bulukumba ditargetkan 0,350, Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,361 sedangkan target Nasional sebesar 0,374-0,377.

Grafik III-5
Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



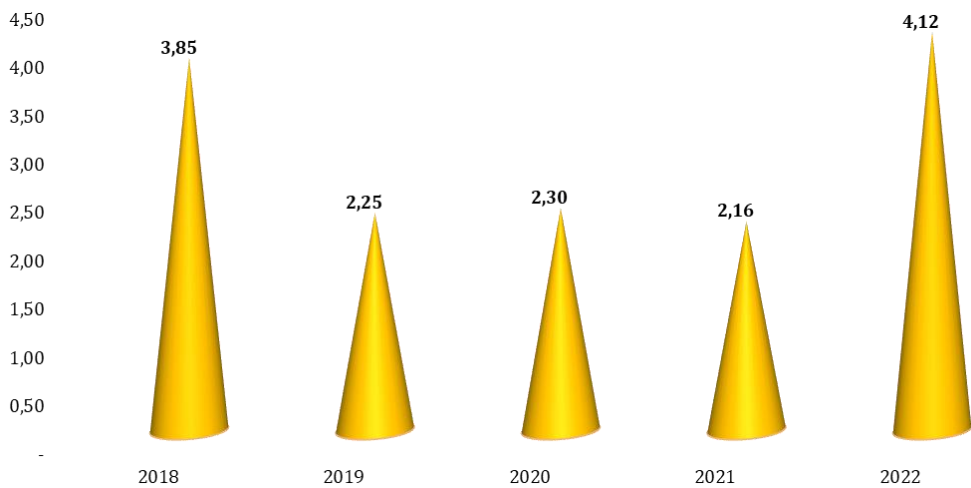
Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulsel diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023

3.1.1.5.5 Inflasi

Desember 2022 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,51. Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 sedangkan untuk inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen dengan IHK sebesar 113,51. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,59 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,17 persen; kelompok transportasi sebesar 12,70 persen; kelompok rekreasi, budaya, dan olahraga sebesar 1,28 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,44 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2022, antara

lainbensin, minyak goreng, telur ayam ras, beras, bawang merah, rokok kretek filter,angkutan dalam kota, bahan bakar rumah tangga, angkutan antar kota, dan emasperhiasan. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 tercatat inflasi sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,12 persen.

Grafik III-6
Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2018-2022



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, diolah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

Kapasitasfiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan”.Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 difokuskan pada:

- 1. mengoptimalkan Pendapatan Daerah dalam upaya pencapaian khususnya Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskal daerah dan Meningkatkan kemandirian Fisikal untuk Kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah

3. upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
4. selain PAD, peningkatan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi perhatian
5. Struktur Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
- b. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.
- c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
- d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Adapun realiasi, asumsi dan target Pendapatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III-8
Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Asumsi 2023	Target 2024
4	PENDAPATAN	1.375.869.878.068	1.530.079.311.810	1.555.095.998.416,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.419.982.131	239.750.000.000,00	205.011.753.056,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.584.791.931	74.320.354.000,00	74.320.354.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.634.455.280	29.229.646.000,00	29.229.646.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.732.616.722	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.468.118.198	131.200.000.000,00	96.461.753.056,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.183.153.841.810,00	1.272.162.151.543,00	1.330.634.245.360,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.109.782.847.000,00	1.165.945.802.500,00	1.237.263.250.550,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	113.765.625.000,00	113.765.625.000,00	93.370.994.810,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	600.000.000,00	19.450.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
4.1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	18.850.000.000,00

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.2.2.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 4 (Empat) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada “pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”. Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel III-9
Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Asumsi 2023	Target 2024
5	BELANJA	1.344.292.311.324,50	1.574.476.303.296,00	1.555.095.998.416,00
5.1	BELANJA OPERASI	911.207.258.499,88	1.056.825.399.504,00	1.057.929.130.567,00
5.1.1	Belanja Pegawai	590.003.633.511,00	663.130.464.185,00	656.851.649.309,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	302.352.451.730,00	375.503.928.906,00	355.636.435.966,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	2.200.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	15.176.910.936,00	15.112.015.638,00	44.828.703.964,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.674.262.320,00	878.990.775,00	612.341.328,00
5.2	BELANJA MODAL	255.053.250.411,62	338.110.970.014,00	317.435.393.474,00
5.2.1	Belanja Tanah	3.557.175.720,00	3.645.900.000,00	402.978.850,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.855.480.239,00	46.245.431.004,00	42.332.123.266,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	66.510.041.402,80	156.509.116.684,00	113.916.971.935,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.633.846.899,00	125.545.058.043,00	155.429.037.567,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.615.382.400,00	4.563.813.400,00	5.137.281.856,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	1.601.650.883,00	217.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.798.855.700,00	3.069.234.832,00	1.439.629.972,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.798.855.700,00	3.069.234.832,00	1.439.629.972,00
5.4	BELANJA TRANSFER	178.031.802.413,00	176.470.698.946,00	178.291.844.403,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	6.834.570.852,00	8.312.174.942,00	8.312.174.942,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.197.231.561,00	168.158.524.004,00	169.979.669.461,00

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2024 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada *“efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”*. Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Tabel III-10
Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN DAERAH	59.392.217.227,39	58.146.991.485	0,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		3.146.991.485	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah		55.000.000.000	0,00
6.2	PENGELUARAN DAERAH		13.749.999.999	0,00
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang		13.749.999.999	0,00

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba,2023

3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bulukumba selain bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-11
Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022

No	Kementerian / SKPD	Pagu (Rp)				2022
		2018	2019	2020	2021	
1	Kementerian Pertanian : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.369.103.000	4.336.389.000	-	4.358.413.000	2.220.436.000
2	Kementerian Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.000.000.000	4.000.000.000	-	-	-
3	Kementerian PU Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	3.955.000.000	-	2.085.000.000	-	-
Jumlah Total		22.324.103.000	8.336.389.000	2.085.000.000	4.358.413.000	2.220.436.000

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023

3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam

mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2024 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, capaian target pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumberdaya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya

manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI	PENJELASAN VISI	
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA”	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. Sosial kemasyarakatan. Lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat. Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat / penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik baik bagi perempuan maupun laki-laki

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel Tabel IV.2

Tabel IV-2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukuba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima. Transparan. Akuntabel. Efektif. Dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam peningkatkan tata Kelola pemerintah dan layanag publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten

NO	MISI	PENJELASAN MISI
	Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional	Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang Kelautan dan Perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
10	Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan Profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu Desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan

perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV-3
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat					
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70	71	71
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik					
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	3 Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (59,46)	CC	B
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a	3,526	3,5415
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,26-4,00	3,26-4,00
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor					
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,42	22,28	22,04
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	3,81	4,37	8,14
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional					
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,57	13,21	13,55
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-0,31	6,75	7,66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal					
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	10 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,34	71,09	71,69
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	63,98	65,13	66,21
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat					
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	74,63	75,62	76,36
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	69,15	69,63
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara					
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	4,47	3,05	3,26
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	22,48	6,11	6,76
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat					
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	16 Gini Ratio	Angka	0,361	0,349	0,350
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	80	90	92
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah					
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,12	24,91	25,36
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	6,68	10,84	10,63
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme					
Tujuan 10 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	20 Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	68,86	58,38	59,94
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	18	27	27
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	22 Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,76	0,78
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	1,83	2,75	4,59
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	24 Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	58,46	89,11	89,66

Berdasarkan Tabel IV – 3 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran yang terdapat pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025 serta Sasaran RPJMN 2020-2024. Berdasarkan analisis yang dilakukan keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2024 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-4
Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026	Sasaran RPJMN 2020-2024
Meningkatnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan melalui kegiatan industri yang berbasis pada potensi unggulan daerah berupa pertanian (agroindustri), jasa (agribisnis), dan pariwisata (agrowisata);	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;	Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya penyuluhan kepada para petani dalam peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya, meningkatkan kreativitas petani, serta peningkatan adopsi teknologi bidang pertanian.;	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;	
Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian dan Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya diversifikasi dan integrasi usaha secara berkelanjutan melalui sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan;	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;	
	Meningkatnya nilai guna lahan melalui peningkatan pola usaha tani.	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;	
Meningkatnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Meningkatnya kemandirian masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026	Sasaran RPJMN 2020-2024
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang serta berdaya saing dengan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Bulukumba yang memegang prinsip mali siparappe tallang sipahua. Secara umum, peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya IPM	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;	
Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunansehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai kaidah pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;	
		Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja aparaturn pemerintah yang bersih, berakhlak mulia, jujur dan adil, sejahtera, profesional, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat yang dilayani;	Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta Kualitas Pelayanan Publik;	Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangankerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dinamis, mengikuti tuntutan kebutuhan dan perubahan internal maupun eksternal;	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparaturn serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;	
	Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya tertib masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum		
	Terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi		
Meningkatnya Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya fungsi penataan ruang dan pertanahan melalui konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan	Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026	Sasaran RPJMN 2020-2024
		mitigasi terhadap perubahan iklim.	tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
	Meningkatnya aksesibilitas, pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan;		
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;		
	Terwujudnya keindahan daerah melalui budaya bersih, budaya malu dan penghijauan desa serta penghijauan skala rumah tangga;		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk kepada perlindungan masyarakat dari bencana serta meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan;		
	Berkurangnya daerah-daerah terisolir dan terpencil dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dan penguatan kegiatan ekonomi dengan daerah yang lebih strategis dan cepat tumbuh		
Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Terjalinnnya kerjasama pengembangan dibidang agroindustri dengan daerah kabupaten terdekat;	Meningkatnya Produktivitas kualitas dan daya saing produk unggulan dan sarana/ prasarana produksi dan nilai tambah produk serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untukmenghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
	Meningkatnya perdagangan dengan kabupaten, provinsi terdekat yang ditandai dengan meningkatnya arus barang dan jasa melalui perbaikan kualitas sarana prasarana jalan, jembatan dan penyeberangan;	Meningkatkan iklim investasi dan usaha;	
	Terciptanya iklim investasi yang sehat dengan kepastian usaha, layanan efisien untuk memperkuat daya saing pada zona pasar terbuka;		
	Meningkatnya promosi Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata sejarah, seni dengan manajemen pengelolaan yang profesional.		

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 untuk Periode *RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2021-2026* maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya yang telah dilaksanakan dandicapai Kabupaten Bulukumba pada RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua,RPJMD Tahap Ketiga, RPJMD Tahap Keempat diarahkan untuk melanjutkan danmenyempurnakan pembangunan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya padaberbagai bidang pembangunan. RPJMD Tahap Keempat ditujukan untuk mewujudkanmasyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustrimelalui percepatan pembangunan di segala bidang.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tingginyatingkat pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Paritas Daya Beli pada IPM Bulukumba, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing,meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien danefektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan statusgizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan dayasaing perekonomiayang kompetitif dan bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasadengan tetap berbasis pada pertanian tanpa mengabaikan keterpaduan antar sektor.Lembaga perekonomian berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing antara lain dengan dititikberatkan pada upaya pencapaian sumberdaya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan nilai-nilai religius yang dicirikandengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat indonesia yang beragama, beriman,dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai orang bugis.

Pembangunan aspek pemerintahan telah mencapai hal yang diinginkan yakni telahmemahami dan menerapkan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance) yakni partisipasi; penegakan hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap;wawasan ke depan; akuntabilitas; pengawasan; efisiensi dan efektivitas; danprofesionalisme, peningkatan kondisi keamanan yang telah dicapai, peningkatankemampuan dan kapasitas aparatur, serta aspek keuangan daerah sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2024 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, kebijakan pembangunan tahun 2024, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”



Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional adapun sasaran pembangunan tahun 2024 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi,(b) tingkat pengangguran terbuka, (c) Gini Ratio, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Gambar IV-2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024,ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV-3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024



4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat.Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Pemerintah mengusung tema pembangunan “**Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif**” dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2024, lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel:

Tabel IV-5
Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Kabupaten Tahun 2024
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	4.Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	10.Peningkatan Produktifitas generasi muda
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5.Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6.Pelestarian lingkungan hidup
	7.Kesiap siagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	3.Pemantapan reformasi birokrasi
	8.Peningkatan kemitraan antar institusi
	9.Peningkatan kemandirian desa

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**, dengan 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024,yaitu:

- 1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif
- 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata
- 3. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
- 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata
- 5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- 6. Pembentukan Karakter Dan Akhlaq Sdm Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPd Prov. Sulawesi Selatan 2024, RKPd Kab. Bulukumba 2024 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-6

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
1.Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif	3. Pemantapan reformasi birokrasi,
	8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
	9. Peningkatan kemandirian desa
2.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
	7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
3.Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
	10. Peningkatan produktifitas generasi muda
4.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
	5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
5.Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	6. Pelestarian lingkungan hidup.
6.Pembentukan Karakter Dan Akhlaq SDM Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Prioritas tahun 2024 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bulukumba juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2024 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu guna menyongsong era baru pasca pandemi *Covid-19*.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, mengusung tema pembangunan **“Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”**, dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 difokuskan pada indikator Tujuan dan sasaran namun terdapat 2 indikator yakni IPM dan Gini Ratio mengalami penyesuaian untuk pencapaian prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta berdasarkan evaluasi pada capaian tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-7
Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2024	RKPD Tahun 2024
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71	71
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,81	71,69
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	66,21	66,21
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio	Angka	0,366	0,350
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92	92
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B	B
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5415	3,5415
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26-4,00	3,26-4,00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,04	22,04
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	8,14	8,14
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,55	13,55
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	7,66	7,66
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,26	3,26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2024	RKPD Tahun 2024
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,76	6,76
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	25,36	25,36
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,63	10,63
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	76,36	76,36
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,63	69,63
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio	Angka	0,366	0,350
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92	92
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	89,66	89,66
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,78	0,78
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	4,59	4,59
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59,94	59,94
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27	27

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023, sebagai mana tabel sebagai berikut:

Tabel IV-8
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	Transformasi Digital		Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
					Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
						Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
							Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
						Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
							Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
2	Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim	Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
3	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
4	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran				Peningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
							Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
							Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
							Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
							Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
							Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
							Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
5	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi	Pandemi Covid-19		Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan (5)	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
							Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Masi Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan sumber daya manusia (1)	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
				Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal			Indeks Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan			Indeks Pendidikan	
7	Adanya Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)	Pengelolaan dan produktifitas sumber daya alam	Peningkatan produktifitas generasi muda (10)	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
							Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi
8	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Perubahan Iklim		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.	Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

Prioritas Pembangunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagai mana pada tabel yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel IV-9
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
4	Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
			Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
			Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
7	Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
		Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
9	Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
			Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri
10	Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
			Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi
11	Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
			Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
12	Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

4.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-10
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Perangkat Daerah Penanggung
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrng ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung
				(SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	BPBD
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Perangkat Daerah Penanggung
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.2.3.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan Tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel IV-11
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,69
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	66,21
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini	Angka	0,350
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5415
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26-4,00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,04
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	8,14
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,55
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	7,66

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,26
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,76
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	25,36
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,63
5	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	76,36
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,63
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini	Angka	0,350
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	89,66
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,78
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	4,59
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59,94
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

4.2.4.1 Strategi Pembangunan Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Bulukumba, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Bulukumba tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bulukumba Tahun 2024. Strategi pembangunan daerah Bulukumba meliputi:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya Angka Kesenjangan/Indeks Gini serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah secara merata serta Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

4.2.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD
untuk Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024
1.	Pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan Insentif Imam Masjid
		Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dasar dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar
		Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman
2.	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024
		Peningkatan kualitas dankemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman
3.	Pemantapan reformasi birokrasi	Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik
4.	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Penguatan SDM pelaku usahadan dukungan sarana prasarana, teknologi, di bidang pertanian
		Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan
		peningkatan promosi investasi sektor perikanan
		Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial
5.	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Akselerasi pembangunan rumah sakit Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga
6	Pelestarian lingkungan hidup	Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan danantar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS)
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan Peningkatan kualitas dankemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	peningkatan koordinasi antar instansi terkait
		Terwujudnya kesadaran saling melindungi dalam masyarakat
9	Peningkatan kemandirian desa	Peningkatan produktivitasmelalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian,perikanan, dan peternakan
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Peningkatan peran pemuda dalam pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan

4.3 Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

4.3.1 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan
Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut

Tabel IV-13
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
							Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa
							Penetapan APBD (Tepat Waktu)
							Persentase SILPA terhadap APBD
							Persentase Belanja Pendidikan (20%)
							Persentase Belanja Kesehatan (10%)
							Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan
						Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)
							Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)
							Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)
							Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
						Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
						Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.
						Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah
						Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
				Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)
				Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
							Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
						Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
				Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik
					Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
						Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembangan permukiman
							Persentase Pemukiman Yang Tertata
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
							(Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina
					Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian
							Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh
							Persentase Kelompok Tani yang dibina
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan
					Meningkatnya Produksi hasil Perikanan		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan
							Produksi Perikanan Tangkap
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya
							Cakupan Bina Kelompok Perikanan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan
					Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
					Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
					Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada
						Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan
						Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku						
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan (5)	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM)
							Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)
							Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
		Meningkatnya Kualitas SDM yang	IPM				Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
		Kompetitif dan Inklusif					
							Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
							Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
							Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
							Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
							Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama.
						Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
							Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	IKLH	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
						Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman
							Persentase Pemukiman Yang Tertata
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari

4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut:

Tabel IV-14
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
1	PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan		Pangan	
				Pertanian	
				Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
				Perdagangan	
				Perikanan	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PP	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)		
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)		
	PP	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
	PP	Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman (persen)
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Kkal)
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)		Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Gram)
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)		Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
	PP	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)		
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PRDB sektor perikanan (persen)
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (persen)
					Produksi Perikanan Tangkap (persen)
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (persen)
					Cakupan Bina Kelompok Perikanan (persen)
	PP	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm), Dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan (persen)
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha (persen)
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)		
	PP	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdagangan Barang Dan Jasa (persen)
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (persen)
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (persen)
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (persen)
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)		
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)		
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)		
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)		
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)		
	PP	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	Pengembangan Ekspor	Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional (Persen)
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)		
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)		
2	PN2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Perikanan	
				Pangan	
				Kesehatan	
				Pertanian	
				Pendidikan	
	PP	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan (persen)
			Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina (persen)
			IPM Wilayah Sulawesi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen)
			Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen)
					Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen)
					Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen)
					Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)
					Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
				Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
				Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
					Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
3	PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kesehatan	
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Sosial	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
				Tenaga Kerja	
				Pendidikan	
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Kepemudaan dan Olahraga	
				Penanaman Modal	
	PP	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen)
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) (persen)
	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)
				Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen)
	PP	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen)
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen)
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)		Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)		Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)		Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)		Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi hepatitis B (persen)		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen)
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)		Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
			Persentase tekanan darah tinggi		
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi		
			Persentase rumah sakit terakreditasi		
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (persen)
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD (persen)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga (persen)
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah (persen)
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator (persen)
				Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional (persen)
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada (persen)
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan (persen)
				Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi(persen)
				Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (persen)
				Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (persen)
					PMA (investor)
					PMDN (investor)
				Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan (persen)
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana(persen)
			Bidang tanah yang didistribusi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
			Bidang tanah yang dilegalisasi	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
				Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			a. Top 200		
			b. Top 300		
			c. Top 500		
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (persen)
4	PN4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan		Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Komunikasi dan Informatika	
				Sekretariat Daerah	
				Pendidikan	
				Kebudayaan	
	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi (persen)
				Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
				Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
					Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah (persen)
				Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (persen)
				Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan (persen)
	PP	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)
				Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama. (persen)
	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
5	PN5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perumahan dan Permukiman	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Pertanian	
				Perhubungan	
				Komunikasi dan Informatika	
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (persen)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)		
			Persentase rumah tangga yangmemiliki sertifikat hak atas tanahuntuk perumahan (%)	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)		
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman(%)	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (persen)
			Persentase rumah tangga yang masihmempraktikkan buang air besarsembarangan (%)		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan aksessampah yang terkelola dengan baik(%)	Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum layak (%)		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum aman (%)	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen)
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen)
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektare)		
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana		
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)		
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)		
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik (persen)
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan (persen)
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)		
	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
				Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C (persen)
	PP	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)		
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)		
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)		
	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)		
			Persentase pengguna internet (Persentase)	Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo (persen)
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah (persen)
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)		
6	PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
				Lingkungan Hidup	
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari (persen)
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Terkelolah (persen)
	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (persen)
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (persen)
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (persen)
	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)		
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)		
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)		
7	PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
				Sekretariat Daerah	
				Perencanaan	
				Kepegawaian	
				Keuangan	
				Inspektorat Daerah	
				Pendidikan dan Pelatihan	
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PP	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (persen)
	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (persen)
	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) (persen)
			Global Terrorism Index		
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian		
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional		
	PP	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*		
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*		
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu (persen)
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan (persen)
				Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (persen)
					Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa (persen)
					Penetapan APBD (Tepat Waktu) (persen)
					Persentase SILPA terhadap APBD (persen)
					Persentase Belanja Pendidikan (20persen) (persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Persentase Belanja Kesehatan (10persen) (persen)
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ()
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)
				Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (persen)
				Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya (persen)
				Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK (persen)
					Persentase Pelanggaran Pegawai (persen)
				Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut Temuan (persen)
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (persen)
				Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (persen)
				Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. (persen)

Adapun target Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-15
Indikator Kinerja Makro Nasional,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Bulukumba	Prov. Sulawesi Selatan	Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	71,69	73,99	73,31–73,49
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,70	8,31	7,5–8,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,50	4,24	5,3–6,0
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,04-6,52	5,1-5,7
5	Gini Ratio	Angka	0,350	0,361	0,375–0,378

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba

Ada beberapa gagasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

4.4.1 Bidang Pemerintahan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Kabupaten Bulukumba dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep *Good Governance*. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan konsep good governance tersebut.

Menempatkan desa sebagai pertumbuhan juga sangat penting mengingat desa mempunyai modal pembangunan cukup besar dan kontinyu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentu saja membutuhkan kajian-kajian baru yang kemudian di implementasikan dengan berbagai kebijakan daerah untuk mengatur beberapa kewenangan-kewenangan yang terbagi menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa.

Penataan SDM dalam pemerintahan, baik Pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan menjadi penting. Terlebih banyak anggota DPRD yang baru dan menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah daerah. Terlebih menyikapi UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintah desa, dan beberapa perubahan UU lainnya membutuhkan banyak peningkatan kapasitas dan pengetahuan DPRD maupun pemerintah daerah.

4.4.2 Bidang Ekonomi dan Keuangan

Urusan bidang ekonomi dan keuangan mempunyai beberapa sub bidang yang terkait dengan program–program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan aset daerah. Bidang–bidang dibawah ekonomi disajikan sebagai berikut :

A. Urusan Pariwisata

Visi Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang ingin menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata terkemuka di Sulawesi Selatan tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan usaha-usaha yang normatif saja. Kabupaten Bulukumba dengan potensi khas budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional yang membedakan dengan daerah lainnya.

Namun dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bulukumba, apabila tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional.

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas yaitu:

- 1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
- 2. Pengembangan Promosi Pariwisata, Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata
- 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan

B. Urusan Perikanan dan Kelautan

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas perikanan dan kelautan adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya

C. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya Hijau dan subur menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif.

Dalam menyikapi kebutuhan pangan di Kabupaten Bulukumba yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri perhotelan yang pesat menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kabupaten Bulukumba untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan di Kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan pangan yang baik.

Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bulukumba ini. Usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

1. Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
2. Pengembangan Prasarana Pertanian/Peternakan
3. Pengembangan Keamanan Pangan
4. Peningkatan pengawasan jejaring keamanan pangan

D. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kabupaten Bulukumba selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kabupaten Bulukumba ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya.

Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian di daerah kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di mata nasional. Oleh karena itu, pembinaan usaha kecil dan menengah di kabupaten Bulukumba mutlak diperlukan sehingga usaha kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.

E. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi harus dikembangkan dengan kerjasama dari segala pihak. Momentum seperti ini mampu memberikan penjelasan dan jaminan kepada investor asing untuk melirik Daerah kabupaten Bulukumba sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi datangnya penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini, untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Bulukumba. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini upaya peningkatan penanaman modal merupakan cermin dari keterbukaan daerah didalam bermitra dan bekerjasama dengan para investor dalam rangka mengakselerasi kemajuan dan pembangunan daerah.

4.4.3 Bidang Pembangunan

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud.

Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa. Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga miskin harus dilakukan.

Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun air untuk keperluan usaha pertanian (irigasi) haruslah direncanakan secara komprehensif, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan sebagainya.

Adapun usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Drainase Perkotaan
2. Peningkatan Jalan
3. Optimalisasi jaringan irigasi (PSDA)
4. Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
5. Peningkatan sarana dan Prasarana Air Bersih/ Air Minum
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
7. Pengembangan dan Penataan Taman Milik Daerah
8. Penataan Tata Kawasan Perkotaan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
10. Penataan Tata Kawasan Perumahan Tidak Layak Huni
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pengaman Jalan

4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun berjalan. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Urusan kesejahteraan rakyat merupakan gabungan dari beberapa bidang gerak pembangunan. Fungsi dari bidang komisi ini lebih fokus pada kesejahteraan rakyat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas dalam bidang komisi ini Adalah :

A. Urusan Pendidikan :

Berikut usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas pendidikan yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

B. *Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak*

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

C. *Urusan Budaya*

Beberapa prioritas program budaya, yaitu Permasalahan Terkait Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

D. *Urusan Agama*

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru atau pelosok desa di daerah kabupaten Bulukumba.

Dalam kondisi yang mengedepankan sikap Budaya Sipaka Tau menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda. Toleransi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba harus tetap lestari dan berkembang maju sehingga mampu menjadi salah satu ciri khas Bulukumba.

Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu :

1. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
5. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
6. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
7. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri khas Kabupaten Bulukumba.

Secara khusus DPRD sebagai refresentasi masyarakat lembaga kontrol dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi atensi khusus pemerintah daerah sebagaimana yang banyak menjadi fokus perhatian masyarakat dewasa ini yakni

1. Perlunya pemerintah daerah untuk secara serius melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pejabat atau mutas dalam konteks untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih optimal sehingga kompetensi menjadi pertimbangan utama selain disiplin dan loyalitas, tentu dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada.
2. Perlunya memperhatikan hal-hal penting terutama pada proses rekrutmen pada lembaga-lembaga pelayanan publik yang tentu sangat bersentuhan dengan ranah masyarakat. Dalam konteks ini kami ingin mengambil contoh pelayanan rumah sakit yang masih banyak disorot berbagai kalangan, baik Ormas, OKP maupun lembaga Kontrol di bidang pelayanan publik.

4.5 **Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Suistainable Development Goals (SDGs)* dengan RKPD Tahun 2024**

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah barudalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahandunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yangtertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030*

Agenda for Sustainable Development berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negaradan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs. “Sesuai peraturan itu, presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif”.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkandimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Tujuh belas tujuan SDG’s tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpakelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraangender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhanekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yangbertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten diyakini akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dekat dengan warga, memiliki kewenangan dan dana, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program pemerintah, menjadipertimbangan pentingnya peran Pemda. Beragam keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kegagalan MDGs yang tidak mampu mengoptimalkan peran Pemda tidak boleh terulang.

Seluruh Tujuan dan Target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten. Meningkatkan pengetahuan Pemda dan kemudian mengajak untuk melaksanakan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih untuk negara seperti Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, yang masing-masing memiliki situasi yang berbeda baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu pertama adanya komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi di tingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan ketiga adanya kelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. RKPD Bulukumba Tahun 2023 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, sebagaimana pada Tabel IV – 5 berikut:

Tabel IV-16
Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	
	INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
1	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Program 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program 3 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
4	Program 4 : Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Ekonomi Pembangunan, Setda
5	Program 5 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
6	Program 6 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
7	Program 7 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
8	Program 8 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketapan
9	Program 9 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
10	Program 10: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
11	Program 11: ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12	Program 12 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPK
13	Program 13 : ProgramPenyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPK
14	Program 14 : Program Perizinan Usaha Pertanian	DPK
15	Program 15 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
16	Program 16 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
17	Program 17 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator SDGs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
18	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 1.3.1(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
19	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator SDGs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
20	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial
21	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan
22	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 1.4.1.(C) Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	DPPKBP3A
23	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
24	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
25	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
26	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(F) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	DPPP
27	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI – SMP/MTs Sederajat.	Dinas Dikbud
28	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.	Disdukcapil
29	Program 1 : Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
30	Program 2 : Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
	Indikator SDGs: 1.5.1* Jumlah Korban Meninggal, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
31	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	BPBD
32	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(B) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	BPBD, Dinas Sosial
33	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	BPBD, Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(C) Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial
34	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi.	BPBD
35	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	BPBD
36	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah.	BPBD
37	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.A.1* Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Bappelitbangda, BPKPD
38	Program 1 : Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketapan
39	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
40	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Kanwil Agama, BPOM
41	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
42	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
43	Program 3 : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
44	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2* Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian dan Ketapan
45	Program 1 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.	Dinas Pertanian dan Ketapan
46	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita.	Dinas Pertanian dan Ketapan
47	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
48	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1.(A) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
49	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
50	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
51	Program 3 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
52	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.2.* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
53	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
54	Program 2 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(A) Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Biro

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
		Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
55	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(B) Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif.	Dinas Kesehatan
56	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia	
	INDIKATOR TUJUAN 3 : Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	
	<i>3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).</i>	
	<i>3.1.2.(A) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan</i>	
	<i>3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2.(A) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2.(B) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.</i>	Dinas Kesehatan
57	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria Per 1000 Orang	Dinas Kesehatan, Bagian Kesra
	<i>3.3.1.(A) Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.</i>	
	<i>3.3.2.(A) Insiden Tuberkulosis (Ith) Per 100.000 Penduduk.</i>	
	<i>3.3.3.(A) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria</i>	
	<i>3.3.4.(A) Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.</i>	
	<i>3.3.5* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).</i>	
	<i>3.3.5.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Eliminasi Kusta</i>	
	<i>3.3.5.(B) Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).</i>	
58	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(A) Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun.	Dinas Kesehatan
59	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
60	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(B) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.	Dinas Kesehatan
61	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
62	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(C) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun	Dinas Kesehatan
63	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
64	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2* Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan
65	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 3.4.2.(A) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan
66	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.5.1.(E) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Kesehatan & Biro Kesra
	3.5.2* Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.	Dinas Kesehatan, Biro Kesra
67	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	3.7.1.(A) Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
	3.7.1.(B) Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern.	
	3.7.2* Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	
	3.7.2.(A) Total Fertility Rate (TFR)	
68	Program 1 : Program Keluarga Berencana	
	Indikator SDGs: 3.8.2* Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan, Disdukcapil
69	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).	Dinas Kesehatan
70	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.A.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Kesehatan
71	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
72	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	Dinas Kesehatan
73	Program 1 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.C.1* Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
74	Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan,
	TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;	
	INDIKATOR TUJUAN 4. Persentase SD/MI-SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	
75	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(d/e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI – SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(G) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun.	
	Indikator SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) Sd/Mi/Sederajat; (2) Smp/Mts/Sederajat; (3) Sma/Smk/Ma/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi.	
76	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.6.1.(B) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun	Dinas Dikbud
77	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash)).	Dinas Dikbud
78	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan
79	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud,DPPKBP3A
80	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
81	Program 4 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 4.C.1* Persentase Guru TK, SS, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik	Dinas Dikbud
82	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan;	
	INDIKATOR TUJUAN 5 Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	
83	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
84	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
85	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
86	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SdDGs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Dinas DPPKBP3A
87	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Dinas DPPKBP3A
88	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
89	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun	Dinas DPPKBP3A
90	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
91	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1.(C) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
92	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah	Dinas DPPKBP3A
93	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial	Dinas DPPKBP3A
94	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi).	DPPKBP3A
95	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBP3A

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern	Disdukcapil, DPPKBP3A
96	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.B.1* Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.	Diskominfo, Persandian
97	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 6 : Air Bersih Dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	
98	Program 1 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
99	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
100	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 6.1.1.(B) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku untuk Pulau-Pulau.	DPPP, Dinas PUTR, Dinkes
101	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
102	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
103	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Amandan Berkelanjutan	DPPP, Dinkes
104	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
105	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
106	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.2.1.(A) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air	DPPP, Dinkes
107	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(C) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPPP, Dinkes
108	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(D) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPPP, Dinkes
109	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SdGs: 6.3.2.(B) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	DLHK
110	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 6.5.1.(C) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk.	DLHK, Dinas PUTR
111	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK, Dinas PUTR
112	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
113	Program 3 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator Sdgs: 6.5.1.(G) Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air.	Dinas PUTR
114	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 6.6.1.(D) Luas Lahan Kritis Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Yang Direhabilitasi.	DLHK
115	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 8 : Pertumbuhan PDRB	Bagian Ekonomi pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker dan BPS
	INDIKATOR TUJUAN 8. PDRB Per Kapita	
116	Program 1 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(A) Persentase Tenaga Kerja Formal.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(B) Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
117	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2.(A) Persentase Setengah Pengangguran	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
118	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Pdrb	Dinas Pariwisata
119	Program 1 : Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;	
	INDIKATOR TUJUAN 9. Panjang Pembangunan Jalan Tol	
	Indikator Sdgs: 9.1.1.(C) Panjang Jalur Kereta Api	Dishub
120	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator Sdgs: 9.1.2.(B) Jumlah Dermaga Penyeberangan	Dishub
121	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 9.1.2.(C) Jumlah Pelabuhan Strategis	Dishub
122	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pdb Dan Per Kapita	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 9.4.1* Rasio Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.4.1(A) Persentase Perubahan Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLHK
123	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	DLHK
	INDIKATOR TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur	
124	Program 1 : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(A) Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Diskominfo, Persandian
125	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(B) Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet	Diskominfo, Persandian
126	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;	
	INDIKATOR TUJUAN 10. Indeks Gini	
	Indikator Sdgs: 10.1.1.(B) Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan.	DPMD
127	Program 1 : Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
128	Program 2 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
129	Program 3 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
130	Program 4 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
131	Program 5 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
132	Program 6 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
133	Program 7 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
134	Program 8: Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 10.4.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
135	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 11. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).	
	Indikator SDGs: 11.2(A) Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan.	Dishub
136	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 11.3.2.(B) Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.	Dinas PUTR, DPPP
137	Program 1 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.4.1.(A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil.	Dinas Pariwisata
138	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
139	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
140	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator Sdgs: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
141	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
142	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan.	BPBD
143	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	BPBD
144	Program 1 : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	Indikator SDGs: 11.B.2* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah.	BPBD
145	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.6.1.(A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.	DLHK, DPPP

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
146	Program 1 : Program Pengelolaan Persampahan	DLHK, DPPP
	Indikator SDGs: 11.6.1.(B) Jumlah Kota Hijau Yang Mengembangkan Dan Menerapkan Green Waste Di Kawasan Perkotaan Metropolitan.	DLHK
147	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 11.7.1.(A) Jumlah Kota Hijau Yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang	DLHK
148	Program 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
	TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	
	INDIKATOR TUJUAN 12. Umlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	
149	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.6.1.(A) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	DLHK, Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
150	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.7.1.(A) Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister	DLHK
151	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	TUJUAN 13 : Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	
	INDIKATOR TUJUAN 13. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.	
152	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
153	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.2.1.(A) Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Bappelitbangda (KLHS)
154	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
155	Program 2 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	TUJUAN 14 : Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 14. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	
156	Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
157	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1* Ketersediaan Kerangka Hukum/ Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil	Dinas Perikanan
158	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
159	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Dinas Perikanan
160	Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
161	Program 2 : Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(B) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi.	Dinas Perikanan
162	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
163	Program 2 : ProgramPengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	TUJUAN 15 : Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
	INDIKATOR TUJUAN 15. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	
	Indikator SDGs: 15.1.1.(A) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	DLHK
164	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(A) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya	DLHK
165	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(B) Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	
166	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(D) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DLHK
167	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.3.1.(A) Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
168	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.6.1* Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata	DLHK
169	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.9.1.(A) Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	DLHK
170	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkat	
	INDIKATOR TUJUAN 16. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	
	Indikator SDGs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.	DP3A
	Indikator SDGs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan.	DP3A
171	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
	Indikator SDGs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappelitbangda, Bagian Ortala Setda
172	Program 2 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Organisasi Dan Tata Laksana
173	Program 3 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator SDGs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Ortala, Setda
174	Program 1 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Ortala, Setda

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 16.10.2.(C) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Diskominfo, Persandian
175	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan	
	INDIKATOR TUJUAN 17. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.	
	Indikator SDGs: 17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet.	Diskominfo, Persandian
176	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator SDGs: 17.8.1.(A) Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet.	Diskominfo, Persandian
177	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(A) Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik.	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(B) Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama.	BPS
178	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(C) Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa).	BPS
179	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
180	Program 2 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(D) Persentase Indikator SDGs Terpilah Yang Relevan Dengan Target.	Bappelitbangda / BPS
181	Program 1 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda / BPS
	Indikator SDGs: 17.19.2.(C) Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website.	Diskominfo, Persandian
182	Program 1 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.1.555.095.998.416,00** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 205.011.753.056** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 1.330.634.245.360**, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 19.450.000.000**. Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2024, dengan jumlah belanja **Rp. 1.555.095.998.416**.

Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024.

Tabel V-1
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2024

Kode	Uraian	Belanja 2024
5	BELANJA	1.555.095.998.416,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.057.929.130.567,00
5.1.1	Belanja Pegawai	656.851.649.309,00
5.1.2	Belanja Barang	355.636.435.966,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	44.828.703.964,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	612.341.328,00
5.2	BELANJA MODAL	317.435.393.474,00
5.2.1	Belanja Tanah	402.978.850,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	42.332.123.266,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	113.916.971.935,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.429.037.567,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.137.281.856,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	217.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.439.629.972,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.439.629.972,00
5.4	BELANJA TRANSFER	178.291.844.403,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	8.312.174.942,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	169.979.669.461,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2023

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan

dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan.

Tabel V-2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	75 %	101.050.000	75 %	145.149.869	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	163.590.500	15 %	124.025.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.380.853.150	100%	2.709.783.015	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)	100 %	105.326.470.418	100 %	145.538.992.590	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100 %	39.452.000	100 %	85.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan	100 %	4.159.856.190	100 %	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	akselerasi pertumbuhan	Infrastruktur Wilayah		Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)					Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.877.312.378	100 %	131.038.228.303	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82.61 %	32.956.291.549	84.43 %	87.038.565.547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	93 %	1.747.216.875	94 %	27.996.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	92%	14.698.438.100	94,66%	18.170.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	85 %	257.450.150	100 %	3.699.299.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	84 %	5.441.680.220	88 %	13.002.805.310	Dinas Pekerjaan Umum dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	11.443.269.526	100 %	15.740.704.992	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	90 %	210.480.000	100 %	3.040.700.116	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.380.853.150	100%	2.709.783.015	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100 %	912.274.950	100 %	2.231.564.718	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD,	95 %	181.834.768.175	95 %	203.876.170.456	BPKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan					
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	100 %	1.658.199.650	100 %	2.516.227.383	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	55 %	874.962.350	60 %	2.167.000.000	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	72 %	91.485.000	80 %	3.497.021.000	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	57 %	3.168.823.000	55 %	3.910.105.079	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	60 %	1.951.424.000	65 %	1.690.202.083	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	219.090.175	100 %	448.261.000	Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				(SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)					
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	495.873.500	100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	90 %	200.307.000	95 %	90 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	100 %	482.200.000	100 %	1.321.704.516	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi jaringan intra pemerintah atau penggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100 %	321.260.000	100 %	3.300.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	76 Investor	80.351.750	76 Investor	87.813.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100 %	269.602.650	100 %	356.166.982	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		100 %	7.266.000	100 %	66.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	76 %	8.728.842.000	80 %	15.878.507.369	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	90 %	19.235.445.000	90 %	6.843.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	45 %	22.950.000	45 %	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	59 %	391.817.090	61 %	679.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	100 %	7.343.250	100 %	16.155.150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan	60 Persen 54247 Ton	26.890.383.200	60 Persen 55337,50 To	25.484.360.000	Dinas Perikanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap					
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	188.903 Ton	3.298.815.078	192.700 Ton 100 %	5.650.568.000	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	94 %	636.725.500	91%	618.750.000	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	7 Objek 90 %	3.101.829.400	7 Objek 100 %	5.978.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	11 event 90 %	819.400.000	13 event 100 %	3.070.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 kali 1,66 %	555.322.000	1,70 % 12 kali	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	44.624.150	100 %	65.330.870	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	7.343.250	100 %	16.155.150	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	75,1 %	4.629.000	76,8 % 76,8 %	22.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	76,3 %	24.859.200	80,3 %	34.648.295	Dinas Perdagangan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50 %	46.677.898.350	50 %	10.583.255.114	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	40 %	151.572.400	50 %	246.655.640	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	100 Persen	100.879.421.946	100 Persen	120.098.591.458	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	85 Persen	7.205.059.900	95 Persen	8.125.506.932	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	85 Persen	340.849.250	95 Persen	303.735.855	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	71 Persen	250.349.900	82 Persen	284.142.998	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	93 %	1.747.216.875	94 %	27.996.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.877.312.378	100 %	131.038.228.303	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82.61 %	32.956.291.549	84.43 %	87.038.565.547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	93 %	1.747.216.875	94 %	27.996.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	92%	14.698.438.100	94,66%	18.170.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	85 %	257.450.150	100 %	3.699.299.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	84 %	5.441.680.220	88 %	13.002.805.310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	11.443.269.526	100 %	15.740.704.992	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman	90 %	210.480.000	100 %	3.040.700.116	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari					
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	840.581.700	100 %	1.488.685.041	BPBD
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 %	2.955.796.550	100 %	3.449.290.900	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	32.103.061.546	75 %	34.842.698.847	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	116.680.350	100 %	131.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	80 %	50.000.000	90 %	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	95.468.000	100 %	50.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	60 %	58.709.850	80 %	66.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100 %	99.999.800	100 %	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	1.365.393.200	100 %	984.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	629.397.300	100 %	522.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	5 orang 100 %	375.582.000	100 % 5 orang	720.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	2 orang 100 %	1.880.775.150	2 orang 100 %	5.300.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	287.060.000	100 %	3.718.940.001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-3
Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba

No	OPD	Pagu RKPD Tahun 2024 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	468.232.122.318
2	Dinas Kesehatan	155.434.879.194
3	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja	126.363.379.297
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	156.548.420.550
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.993.474.762
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.395.925.062
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.055.927.704
8	Dinas Sosial	3.633.815.091
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.402.275.775
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.612.640.241
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.563.086.912
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.410.842.623
13	Dinas Perhubungan	19.742.246.030
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.423.320.813
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.486.966.564
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.381.884.511
17	Dinas Perikanan	35.684.106.731
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	14.459.942.966
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49.128.047.366
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65.541.847.740
21	Sekretariat Daerah	22.658.107.508
22	Sekretariat DPRD	40.722.607.786
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.602.860.157
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	201.885.312.379
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.330.592.955
26	Inspektorat Daerah	12.171.473.210
27	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	11.604.419.570
28	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	3.052.770.954
29	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	5.037.565.920
30	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	3.644.655.392
31	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	5.371.691.752
32	KANTOR KECAMATAN KINDANG	2.293.812.300
33	KANTOR KECAMATAN HERLANG	2.946.396.506
34	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	2.943.666.764
35	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	5.616.814.800
36	KANTOR KECAMATAN KAJANG	3.820.582.743
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.897.515.470
	Total Anggaran	1.555.095.998.416

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak

akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ke tiga periode Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2024 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2024, serta target tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V-4
Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BULUKUMBA				468.139.029.209					554.789.436.516	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				467.925.561.409					552.924.436.516	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				467.925.561.409					552.924.436.516	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)		100 %	362.464.624.991				100 %	406.670.443.926	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi		100 %	198.572.000				100 %	250.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	16 Dokumen	198.572.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		16 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	5 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Laporan	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan		100 %	360.912.773.801				100 %	402.905.053.664	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2839 Orang/ bulan	359.657.323.801	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD		2839 Orang/ bulan	401.402.353.664	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	1.213.440.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.452.700.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	42.010.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-				100 %	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	15.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM		100 %	51.000.000				100 %	525.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	3 Orang	51.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Orang	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	30 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Orang	300.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	359 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		359 Orang	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100 %	292.012.600				100 %	905.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	4 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Paket	45.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	10 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Paket	170.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	3.964.750	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	180 Paket	129.983.350	Ujung Bulu, Caile	DAU		180 Paket	120.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	40 Paket	54.395.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		40 Paket	85.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Caile	800 Laporan	28.800.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		800 Laporan	35.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	30 Laporan	74.869.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Laporan	250.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	397.502.765				100 %	795.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	215.129.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	300 Unit	43.700.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		300 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	138.673.465	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	125.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan		1 Tahun	431.432.420				1 Tahun	444.390.262	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	139.182.420	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	144.390.262	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	292.250.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	300.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik		60 %	181.331.405				70 %	821.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	32.541.405	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit	80.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	85 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		85 Unit	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	50 Unit	12.790.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		50 Unit	16.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	24.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit	500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	112.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)		100 %	105.326.470.418				100 %	145.538.992.590	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase bangunan kondisi baik		60 %	58.262.815.750				80 %	74.214.895.840	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	5 Ruang	800.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		11 Ruang	3.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	531.608.500	Ujung Bulu, Caile	DAK		23 Ruang	2.126.435.840	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	3 Ruang	620.007.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		11 Ruang	2.066.690.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	10 Unit	1.340.020.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		42 Unit	3.350.050.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	10 Ruang	1.920.030.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		10 Ruang	2.560.040.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	15 Ruang	702.015.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		15 Ruang	936.020.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	1.833.015.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		8 Ruang	2.444.020.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah										
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	8 Paket	1.000.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		8 Paket	2.500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	10 Paket	200.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		10 Paket	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	8 Paket	1.250.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		55 Paket	2.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Ujung Bulu, Caile	180 Peserta Didik	94.936.750	Ujung Bulu, Caile	DAU		150 Peserta Didik	375.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	38.651.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Orang	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Ujung Bulu, Caile	350 Satuan Pendidikan	40.991.380.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		350 Satuan Pendidikan	40.991.380.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Ujung Bulu, Caile	350 Satuan Pendidikan	38.561.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		50 Satuan Pendidikan	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Ujung Bulu, Caile	350 Orang	46.813.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		350 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar										
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	10 Ruang	2.233.360.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		10 Ruang	4.466.720.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	9.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	15.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	1.200.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		11 Ruang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	20 Unit	2.206.800.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		20 Unit	2.758.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	15 Ruang	1.206.018.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		2 Ruang	2.680.040.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		95 %	34.421.771.150				98 %	56.177.487.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	2.400.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		8 Ruang	3.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	2.143.369.200	Ujung Bulu, Caile	DAK		5 Ruang	2.679.211.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	2.400.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		5 Ruang	3.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium										
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	2.299.723.200	Ujung Bulu, Caile	DAK		5 Ruang	5.749.308.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir										
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Unit	200.446.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		8 Unit	2.004.460.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	8 Unit	200.446.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		10 Unit	2.004.460.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	1.500.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		12 Ruang	6.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	187.488.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		4 Ruang	468.720.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	488.804.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		7 Ruang	1.222.010.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium										
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	4 Ruang	1.080.240.750	Ujung Bulu, Caile	DAK		14 Ruang	5.401.204.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Unit	200.446.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		19 Unit	1.103.400.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah										
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	4 Paket	108.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Paket	270.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	4 Paket	108.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		4 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	4 Paket	400.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		14 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Ujung Bulu, Caile	1632 Peserta Didik	205.840.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Peserta Didik	650.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Ujung Bulu, Caile	10 Orang	38.280.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		7 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Ujung Bulu, Caile	69 Satuan Pendidikan	15.864.760.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		70 Satuan Pendidikan	15.864.760.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Ujung Bulu, Caile	69 Satuan Pendidikan	26.685.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		70 Satuan Pendidikan	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Ujung Bulu, Caile	69 Orang	28.912.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Orang	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah										
		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	1 Ruang	1.194.954.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Ruang	1.194.954.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	5.376.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ujung Bulu, Caile	5 Ruang	2.800.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		5 Ruang	3.500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	8 Ruang	540.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		8 Ruang	675.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		80 %	8.512.253.350				90 %	10.698.713.250	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	485.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Unit	825.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	326.942.350	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Unit	659.668.250	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	352.707.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		15 Unit	587.845.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD										
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	5 Paket	100.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		5 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD										
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	2 Paket	60.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	36.925.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Orang	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD										
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Ujung Bulu, Caile	429 Satuan Pendidikan	6.724.800.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		368 Satuan Pendidikan	6.481.200.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD										
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Ujung Bulu, Caile	429 Satuan Pendidikan	75.879.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Satuan Pendidikan	85.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ujung Bulu, Caile	3 Ruang	350.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK, DAU		3 Ruang	1.750.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		87 %	4.129.630.168				95 %	4.447.896.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan										
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	240.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Unit	240.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	24.644.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Orang	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
		<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	Ujung Bulu, Caile	32 Satuan Pendidikan	3.551.000.918	Ujung Bulu, Caile	DAK		32 Satuan Pendidikan	3.647.896.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
		<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	Ujung Bulu, Caile	32 Satuan Pendidikan	42.611.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		32 Satuan Pendidikan	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
		<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	Ujung Bulu, Caile	32 Orang	26.050.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		32 Orang	75.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
		<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	Ujung Bulu, Caile	3 Paket	60.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		3 Paket	60.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
		<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	Ujung Bulu, Caile	1 Ruang	150.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		1 Ruang	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
		<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	Ujung Bulu, Caile	2000 Peserta Didik	35.324.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		2000 Peserta Didik	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-		-	-				-	440.000.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>		-	-				-	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar										
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		-	-				-	420.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	300.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		100 %	39.452.000				100 %	85.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi		30 PTK	39.452.000				30 PTK	85.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	39.452.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	85.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan		75 %	95.014.000				90 %	190.000.000	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah		100 %	19.660.000				100 %	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	19.660.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal		100 %	75.354.000				100 %	140.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	50.852.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	90.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	24.502.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				213.467.800					1.865.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				213.467.800					1.865.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		70 %	97.820.000				75 %	825.000.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah		1 Kegiatan	-				1 Kegiatan	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Ujung Bulu, Caile	3 Objek	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Objek	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	77.820.000				1 Kegiatan	525.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Ujung Bulu, Caile	4 Objek	30.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Objek	250.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional										
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	42.830.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	250.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Sertifikat	4.990.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Sertifikat	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan		100 %	20.000.000				100 %	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat										
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Ujung Bulu, Caile	1 Orang	20.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan		50 %	42.779.800				60 %	200.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian		1 Kegiatan	42.779.800				1 Kegiatan	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional										
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Ujung Bulu, Caile	30 Orang	42.779.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Orang	200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-		-	-				-	100.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-				-	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota										
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Ujung Bulu, Caile	1 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan		50 %	72.868.000				65 %	740.000.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang di Tetapkan		100 %	22.868.000				100 %	240.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya										
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Ujung Bulu, Caile	5 Objek	22.868.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Objek	240.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peresentase Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu		100 %	50.000.000				100 %	500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya										
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Ujung Bulu, Caile	1 Objek	50.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Objek	500.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)				93.093.109					141.500.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				76.293.250					106.500.000	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				76.293.250					106.500.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)		100 %	76.293.250				100 %	106.500.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan		100 %	-				100 %	50.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	50.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100 %	31.688.500				100 %	32.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	3.868.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	5.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	1.690.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	2.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	26.130.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	25.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan		1 Tahun	36.000.000				1 Tahun	12.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	36.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	12.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik		60 %	8.604.750				70 %	12.500.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	2.500.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	8.604.750	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	10.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.799.859					35.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				16.799.859					35.000.000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan		1 Tahun	16.799.859				1 Tahun	35.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	16.799.859	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	35.000.000	Sanggar Kegiatan Belajar (Skb)
	DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA				155.434.879.194					200.438.763.904	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				155.434.879.194					200.438.763.904	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				154.591.747.644					186.324.427.068	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)		100 %	65.606.573.198				100 %	75.957.262.707	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	150.075.250				100 %	147.390.193	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	50.280.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Dokumen	41.030.933	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	53.058.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen	52.155.950	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	9.515.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	9.841.343	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	37.220.250	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	44.361.967	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)		100 %	60.850.990.696				100 %	66.626.736.226	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	14000 Orang/ bulan	59.814.922.996	Ujung Bulu, Loka	DAU		14000 Orang/ bulan	65.535.132.842	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	711.890.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	743.737.887	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	82.800.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	113.042.081	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	6 Laporan	114.370.250	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Laporan	88.507.729	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	75.079.200	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen	81.283.575	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Loka	18 Laporan	22.440.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		18 Laporan	35.409.678	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	29.487.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	29.622.434	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya		100 %	355.673.450				100 %	494.150.542	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	355.673.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	494.150.542	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar		100 %	29.774.450				100 %	32.357.117	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	8.849.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen	8.190.932	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ujung Bulu, Loka	21 Dokumen	11.476.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		21 Dokumen	12.266.889	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Loka	112 Orang	9.448.950	Ujung Bulu, Loka	DAU		112 Orang	11.899.296	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya		100 %	1.062.514.900				100 %	1.094.681.187	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	31.564.670	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	32.154.783	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	473.256.930	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Paket	528.772.368	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	58.810.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	32.291.543	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	75.772.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	80.545.430	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	59.154.150	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	59.612.223	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	28.634.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	19.071.586	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	335.321.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	342.233.254	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta ambulans		100 %	336.000.000				100 %	3.116.419.707	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bulukumpa, Tanete Ujung Bulu, Loka	2 Unit	336.000.000	Bulukumpa, Tanete Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Unit	3.116.419.707	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan		100 %	2.377.462.192				100 %	3.983.219.776	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	935.712.192	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	1.675.600.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.750.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	20.076.547	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.422.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	2.287.543.229	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan		100 %	292.336.510				100 %	302.974.769	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	14.468.760	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	15.978.322	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	277.867.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		35 Unit	286.996.447	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas		100 %	151.745.750				100 %	159.333.190	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Kerja	151.745.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit Kerja	159.333.190	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0-59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk		100 Persen	81.188.915.396				100 Persen	101.653.778.576	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan		100 %	10.241.597.375				100 %	13.622.730.397	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	635.568.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	328.754.322	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	211.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	1.555.307.014	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.750.304.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	4.509.256.278	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	953.440.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	1.750.604.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	211.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	600.604.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	230.367.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	241.885.744	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.183.990.875	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		1 Paket	4.563.799.999	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	65.926.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	72.519.040	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan		100 %	70.429.305.671				100 %	87.652.276.475	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5738 Orang	54.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		5738 Orang	56.701.288	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5470 Orang	79.999.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		6790 Orang	157.111.416	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5210 Orang	52.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		6000 Orang		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25899 Orang	54.728.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		33670 Orang		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4639 Orang	21.428.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5535 Orang		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	34.711.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1200 Orang		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	47.266.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1200 Orang		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19034 Orang	99.999.450	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		21000 Orang	140.070.917	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7820 Orang	33.287.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8020 Orang	34.972.558	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818 Orang	31.463.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		950 Orang	33.036.718	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7036 Orang	46.294.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7600 Orang	48.620.128	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9094 Orang	46.316.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		9400 Orang	48.620.250	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	26.716.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		2 Dokumen	28.052.170	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	31.630.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	31.250.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	333.945.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK		4 Dokumen	481.678.440	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	28.940.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		12 Dokumen	30.387.377	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	224.771.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		12 Dokumen	257.351.675	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	109.974.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		12 Dokumen	115.472.911	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	385.701.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	79.830.707	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	39.185.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	41.157.187	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818 Orang	32.618.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1600 Orang	34.294.879	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1025 Orang	85.664.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2000 Orang	89.947.645	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.369.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		21 Dokumen	22.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	405.168.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		21 Dokumen	425.426.665	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	55.220.596.405	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		22 Dokumen	63.316.735.400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah										
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104028 Orang	40.516.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		300000 Orang	42.542.111	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	22.087.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		96 Paket	23.191.592	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	260.465.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	273.489.210	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Dokumen	11.219.857.425	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		252 Dokumen	20.287.543.229	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Dokumen	27.000.050	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		21 Dokumen	28.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	750.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		21 Unit	822.268.110	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	115.369.925	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		4 Laporan	81.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.516.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Dokumen	42.542.354	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	405.916.866	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	426.213.097	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)		100 %	86.731.350				100 %	95.873.869	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	86.731.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	95.873.869	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan		68 %	431.281.000				71 %	282.897.835	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya										
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	72.049.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	24.254.193	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	21.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	11.125.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	35.732.050	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		22 Unit	37.518.642	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Dokumen	302.499.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		24 Dokumen	210.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar		85 Persen	7.205.059.900				95 Persen	8.125.506.932	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi		80 %	34.499.100				100 %	25.150.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	11.499.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Dokumen	12.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22.999.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	13.150.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar		91 %	4.553.813.600				100 %	4.739.506.225	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.972.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	13.622.908	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	4.514.486.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5000 Orang	4.698.211.223	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	26.354.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	27.672.094	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya		85 %	2.616.747.200				95 %	3.360.850.707	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	2.616.747.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		500 Orang	3.360.850.707	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar		85 Persen	340.849.250				95 Persen	303.735.855	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin		85 %	46.823.900				100 %	24.855.401	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 Dokumen	46.823.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	24.855.401	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik		60 %	27.134.450				70 %	28.491.430	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga										
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.134.450	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	28.491.430	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik		60 %	135.121.225				70 %	141.877.451	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	135.121.225	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		4 Dokumen	141.877.451	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik		96 %	27.359.800				98 %	18.232.387	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.359.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	18.232.387	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker		56 %	18.430.000				88 %	-	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.430.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT		60 %	85.979.875				65 %	90.279.186	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan										
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	85.979.875	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		65 Unit	90.279.186	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Ber PHBS		71 Persen	250.349.900				82 Persen	284.142.998	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan		23 %	70.000.000				25 %	88.299.654	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	70.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		4 Dokumen	88.299.654	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS		44 %	94.999.950				53 %	110.093.344	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	94.999.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.093.344	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri		30 %	85.349.950				40 %	85.750.000	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	85.349.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		40 Dokumen	85.750.000	Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				843.131.550					14.114.336.836	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0-59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk		100 Persen	843.131.550				100 Persen	14.114.336.836	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan		100 %	843.131.550				100 %	14.114.336.836	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	1.434.856.850	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	1.150.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	843.131.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		10 Unit	11.529.479.986	Dinas Kesehatan
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA				126.363.379.297					148.825.823.328	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				126.363.379.297					148.825.823.328	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				126.363.379.297					148.825.823.328	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)		100 %	107.516.004.297				100 %	124.030.484.102	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)		100 %	23.654.251.241				100 %	27.430.484.102	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	362 Orang/ bulan	23.654.251.241	Ujung Bulu, Caile	DAU		14000 Orang/ bulan	27.430.484.102	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas		100 %	83.861.753.056				100 %	96.600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit Kerja	83.861.753.056	Ujung Bulu, Caile	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		20 Unit Kerja	96.600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0-59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk		100 Persen	18.847.375.000				100 Persen	24.795.339.226	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan		100 %	18.847.375.000				100 %	24.795.339.226	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Unit	18.847.375.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		10 Unit	24.795.339.226	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit										
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Ujung Bulu, Caile	0 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAK		3 Unit	-	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. BULUKUMBA				156.548.420.550					278.084.957.834	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				156.548.420.550					278.084.957.834	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				156.548.420.550					278.084.957.834	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		100 %	11.046.409.154				100 %	12.403.626.674	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi		63 Dokumen	182.160.800				66 Dokumen	190.629.560	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Dokumen	182.160.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Dokumen	190.629.560	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	7.894.686.254				100 %	8.578.127.814	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	7.647.986.254	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		98 Orang/bulan	8.315.513.814	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	246.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	262.614.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	64.780.000				100 %	71.212.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40.460.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	44.460.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	15 Orang	24.320.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Orang	26.752.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 %	143.222.700				100 %	156.629.220	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	34 Paket	1.756.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		34 Paket	1.016.620	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	500 Paket	9.907.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		400 Paket	10.897.700	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Laporan	131.559.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Laporan	144.714.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan		27 Unit	146.705.400				27 Unit	637.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	460.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	24.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	27.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	122.205.400	Ujung Bulu, Caile Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor		24 Orang / Bulan	2.345.274.000				24 Orang / Bulan	2.464.740.080	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	152.574.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	187.119.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.192.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	2.277.620.180	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara		104 Unit	269.580.000				104 Unit	304.788.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	35.630.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	39.193.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	4 Unit	78.250.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Unit	86.075.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	142.500.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	165.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	20 Unit	13.200.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Unit	14.520.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi		82.61 %	32.956.291.549				84.43 %	87.038.565.547	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai		350 Satuan	1.903.169.150				100 Persen	3.553.503.360	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31.839.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		28 Dokumen	252.659.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir										
		Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 KM	34.100.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		49 KM	1.007.705.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai										
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 KM	150.840.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		17 KM	330.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir										
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	125.274.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		21 Unit	313.138.760	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya										
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kindang, Kahayya	1 Dokumen	1.561.115.000	Kindang, Kahayya	DAU		1 Dokumen	1.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi kondisi baik		83 %	31.053.122.399				100 %	83.485.062.187	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan										
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KM	1.068.430	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		0 KM	34.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan										
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 KM	13.187.829.568	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		41 KM	23.874.235.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 KM	17.672.635.401	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		29 KM	25.471.646.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 KM	191.589.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		85 KM	139.180.987	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)		93 %	1.747.216.875				94 %	27.996.320.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		245 Unit	1.747.216.875				180 Unit	27.996.320.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Liter/ Detik	997.165.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		75 Liter/ Detik	27.971.020.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa										
		Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Desa	750.051.875	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		10 Desa	25.300.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)		100 %	816.576.684				100 %	1.991.000.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	816.576.684				100 %	1.991.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan										
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Unit	10.106.684	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1000 Unit	11.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan										
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 M³/ Hari	806.470.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		100 M³/ Hari	1.980.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)		100 %	4.159.856.190				100 %	3.300.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Talud/drainase yang baik		32.02 Km	4.159.856.190				32.02 Km	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Sistem Drainase Perkotaan	1.904.628.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		60 Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.707 Sistem Drainase Perkotaan	2.255.228.190	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		60 Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit		84 %	5.441.680.220				88 %	13.002.805.310	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit		416 Unit	5.441.680.220				419 Unit	13.002.805.310	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	5.230.148.120	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		19 Dokumen	12.760.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Ujung Bulu, Caile	400 Dokumen	211.532.100	Ujung Bulu, Caile	DAU		400 Dokumen	242.805.310	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan		100 %	99.877.312.378				100 %	131.038.228.303	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik		101 km	99.877.312.378				190 km	131.038.228.303	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan										
		Panjang Jalan yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250 KM	1.051.407.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 KM	3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan										
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.606 KM	43.467.437.141	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL, DAK, DAU		26 KM	26.582.646.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan										
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.100 KM	48.789.178.537	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		25 KM	36.735.228.303	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan										
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	3.706.960.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Jembatan	53.145.353.800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	229.135.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 KM	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan										
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670 KM	2.633.193.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 KM	11.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat		100 %	70.232.500				100 %	216.700.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih		100 orang	49.255.500				100 orang	165.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Ujung Bulu, Caile	100 Orang	49.255.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Orang	165.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji		7 Unit	20.977.000				7 Unit	51.700.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	20.977.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Dokumen	51.700.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan		100 %	432.845.000				100 %	1.097.712.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan		3 Dokumen	432.845.000				3 Dokumen	1.051.556.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang										
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	3 Dokumen	422.082.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Dokumen	990.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang										
		Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Ujung Bulu, Caile	3 Publikasi	10.763.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Publikasi	61.556.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan		24 Kali	-				24 Kali	46.156.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Ujung Bulu, Caile	3 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	46.156.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULUKUMBA				19.993.474.762					31.956.837.845	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.317.217.912					27.537.897.844	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				19.317.217.912					27.537.897.844	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"		100 %	4.227.679.862				100 %	4.903.801.094	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"		34 Dokumen	41.139.000				34 Dokumen	123.348.684	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	30 Dokumen	23.699.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Dokumen	58.439.284	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	4 Dokumen	17.440.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Dokumen	64.909.400	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun		12 Bulan	2.585.229.689				12 Bulan	2.798.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	30 Orang/ bulan	2.461.829.689	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Orang/ bulan	2.575.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	15.960.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	175.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	97.440.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	23.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	10.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	25.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis		2 Orang	58.275.000				2 Orang	67.386.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	2 Orang	26.025.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Orang	52.386.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	3 Orang	32.250.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Orang	15.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	462.135.603				12 Bulan	493.317.260	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	5.952.900	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Paket	5.968.850	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	95.944.063	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Paket	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	14.997.090	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Paket	26.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	75.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	11.750.550	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	11.348.410	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	258.491.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15 Unit	22.350.000				15 Unit	330.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	100.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	30.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	15 Unit	22.250.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		15 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	590.760.570				12 Bulan	721.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	60.000.570	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	71.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	530.760.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	650.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	467.790.000				12 Bulan	370.049.150	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	12 Unit	92.860.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	70.049.150	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	20 Unit	374.930.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh		85 %	257.450.150				100 %	3.699.299.750	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota"		1 Dokumen	5.349.000				1 Dokumen	99.299.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	5.349.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	99.299.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah		1 Paket	252.101.150				1 Paket	3.600.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana										
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Ujung Bulu, Caile	20 Unit Rumah	251.896.150	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Unit Rumah	1.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana										
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Ujung Bulu, Caile	15 Unit Rumah	105.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		15 Unit Rumah	1.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	1 Unit Rumah	100.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit Rumah	600.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		92%	14.698.438.100				94,66%	18.170.000.000	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pencegahan Timbulnya Kawasan Kumuh Baru		1 Dokumen	155.130.000				1 Dokumen	500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik										
		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	154.999.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	130.200	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh		1 Dokumen	50.949.750				1 Dokumen	170.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP										
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	19.949.950	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	50.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh										
		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Ujung Bulu, Caile	12 Kelompok Masyarakat	30.999.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Kelompok Masyarakat	20.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh										
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani		80 %	14.492.358.350				92 %	17.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Ujung Bulu, Caile	40 Unit Rumah	141.599.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		40 Unit Rumah	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh										
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ujung Bulu, Caile	10 Ha	14.350.759.350	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Ha	15.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum		100 %	133.649.800				100 %	764.797.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan		100 %	133.649.800				100 %	764.797.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Ujung Bulu, Caile	7 Lokasi	133.649.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Lokasi	764.797.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				676.256.850					4.418.940.001	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				676.256.850					4.418.940.001	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah		100 %	95.468.000				100 %	50.000.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah		100 %	95.468.000				100 %	50.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Ujung Bulu, Caile	8 Dokumen	95.468.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		15 Dokumen	50.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum</i>		100 %	287.060.000				100 %	3.718.940.001	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum</i>		15 Persil	287.060.000				15 Persil	3.718.940.001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Ujung Bulu, Caile	14 Dokumen	287.060.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		14 Dokumen	3.718.940.001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	<i>Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi</i>		95 %	293.728.850				100 %	650.000.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>"Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi"</i>		100 %	293.728.850				100 %	650.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara										
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	Ujung Bulu, Caile	200 Dokumen	293.728.850	Ujung Bulu, Caile	DAU		40 Dokumen	650.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BULUKUMBA				2.395.925.062					3.742.002.103	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.395.925.062					3.742.002.103	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.395.925.062					3.742.002.103	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)		100 %	1.555.343.362				100%	2.253.317.063	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan		100 %	1.255.885.842				100 %	1.716.987.107	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	1.101.612.092	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang/ bulan	1.515.726.510	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	154.273.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	201.260.597	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	8.160.000				12 Bulan	55.437.083	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Loka	12 Orang	8.160.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang	55.437.083	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum		100 %	125.233.520				100 %	213.712.648	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Paket	5.117.798	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Paket	30.280.270	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Paket	73.476.139	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	94.953.250	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	135.118.710	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	44.417.700				100 %	77.554.595	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	44.417.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	77.554.595	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	47.151.900				100 %	79.469.772	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	26.090.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	36.279.642	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	21.061.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	43.190.129	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	74.494.400				100 %	110.155.859	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	70.434.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	102.850.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	4.060.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	7.305.859	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan danksesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)		100 %	840.581.700				100 %	1.488.685.041	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	71.532.400				100 %	121.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Ujung Bulu, Loka	10 Orang	71.532.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Orang	121.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100% %	121.081.000				100 %	244.970.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Ujung Bulu, Loka	100 Orang	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Orang	88.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi										
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	70.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	770.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	95.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Ujung Bulu, Loka	10 Unit	51.081.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Unit	60.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	548.564.900				100 %	813.444.248	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	548.564.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	736.164.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang	77.280.248	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 %	99.403.400				100 %	309.270.793	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan										
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	33.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Ujung Bulu, Loka	1 Kegiatan	99.403.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Kegiatan	276.270.793	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BULUKUMBA				11.055.927.704					15.589.538.459	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.055.927.704					15.589.538.459	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.055.927.704					15.589.538.459	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)		100 %	5.059.431.154				100%	7.902.442.559	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar		100 %	63.566.000				100 %	55.825.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	6 Dokumen	63.566.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	29.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	11.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar		100 %	4.615.554.064				100 %	6.428.740.659	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	14 Orang/ bulan	4.565.082.764	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Orang/ bulan	6.348.990.659	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	33.810.000	Ujung Bulu, Caile	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU		12 Dokumen	63.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	4.921.300	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	5.775.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	11.740.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	4.675.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	11.930.000				100 %	14.850.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	3.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	8.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	1.925.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	11.930.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	1.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	31.643.000				100 %	355.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Caile	382 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		536 Paket	294.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	2.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	31.643.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		7 Orang	18.975.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	12 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Orang	20.075.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	12 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		7 Orang	18.975.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar		100 %	61.670.990				100 %	238.425.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	5.775.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Paket	7.975.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	11.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	23.684.400	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Paket	30.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	4.859.350	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Paket	8.525.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	2.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	1.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	3.411.240	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	29.716.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	165.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	34.287.100				100 %	618.176.900	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	368.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	185.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	8.759.400	Ujung Bulu, Caile	DAU		9 Unit	13.176.900	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Unit	12.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	25.527.700	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Unit	22.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU		1 Unit	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	11.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	46.740.000				100 %	74.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	2.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	46.740.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	51.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	1.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	19.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	194.040.000				100 %	117.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	7.500.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	13.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	28 Unit	166.430.000	Ujung Bulu, Caile	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		18 Unit	79.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	7 Unit	7.430.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		8 Unit	3.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	7 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		15 Unit	4.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	12.680.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	15.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	1.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)		100 %	2.955.796.550				100 %	3.449.290.900	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba		100 %	2.467.920.000				100 %	3.050.100.900	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	27.650.000	Ujung Bulu, Caile	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU		1 Dokumen	30.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum										
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia										
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ujung Bulu, Caile	60 laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 laporan	18.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Ujung Bulu, Caile	60 Laporan	2.440.270.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	2.956.600.900	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah										
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	6.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	23.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba		100 %	487.876.550				100 %	371.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	29.385.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU		2 Laporan	10.890.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	313.154.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	348.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	145.336.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Laporan	12.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100 %	-				100 %	27.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	27.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100 %	3.040.700.000				100 %	4.237.805.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba		100 %	3.040.700.000				100 %	4.021.380.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	765.908.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.005.852.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.173.060.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	10.912.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	11.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran										
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Ujung Bulu, Caile	10 Unit	34.848.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	49.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran		100 %	-				100 %	182.404.024	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	16.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		14 Dokumen	165.904.024	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran		100 %	-				100 %	3.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran										
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100 %	-				100 %	18.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	6.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran										
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Desa/ Kelurahan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Desa/ Kelurahan	6.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana										
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	5.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlakssananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100 %	-				100 %	12.020.976	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	12.020.976	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	DINAS SOSIAL KAB. BULUKUMBA				3.633.815.091					7.536.115.125	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.633.815.091					7.536.115.125	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.633.815.091					7.536.115.125	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)		100 %	2.321.845.916				100 %	4.391.614.095	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	58.965.000				100 %	141.432.888	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	4 Dokumen	30.749.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		8 Dokumen	63.779.100	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	12.085.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		6 Laporan	32.553.788	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	5 Laporan	16.131.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	45.100.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan		100 %	2.001.876.972				100 %	3.137.131.981	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	22 Orang/bulan	1.912.126.972	Ujung Bulu, Caile	DAU		22 Orang/bulan	2.977.631.981	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	88.100.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		410 Dokumen	148.500.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	1.650.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	11.000.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN		100 %	17.000.000				100 %	72.952.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	2 Orang	17.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Orang	47.300.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		18 Orang	25.652.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	110.969.700				100 %	235.042.096	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	1.102.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	1.922.327	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	6 Paket	22.387.600	Ujung Bulu, Caile	DAU		8 Paket	45.373.969	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	681.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	1.100.000	Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	7 Paket	14.750.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	22.000.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	1.565.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	2.512.400	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Caile	6 Laporan	7.380.900	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	4.429.700	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	40 Laporan	63.101.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		53 Laporan	157.703.700	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleur kantor		100 %	-				100 %	601.652.700	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		- Unit	535.652.700	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		- Unit	55.000.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Unit	11.000.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	83.054.244				100 %	78.286.230	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	40.214.244	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	65.086.230	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	42.840.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	13.200.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah		100 %	49.980.000				100 %	125.116.200	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	13 Unit	46.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		13 Unit	94.743.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	15 Unit	3.980.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		18 Unit	2.233.000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	28.140.200	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		96 %	332.214.000				100%	453.546.500	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial		100 %	332.214.000				100 %	453.546.500	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	53 Orang	277.249.650	Ujung Bulu, Caile	DAU		53 Orang	357.770.600	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	36.719.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	44.000.000	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	12.685.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		17 Lembaga	38.575.900	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)										
		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Sertifikat	5.559.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Sertifikat	13.200.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)		100 %	219.090.175				100 %	448.261.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.		97 %	178.200.725				100 %	321.506.900	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	94.898.325	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	110.780.010	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang										
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	19.413.450	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		220 Orang	44.319.990	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	55.089.450	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	110.000.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	33.000.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan										
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	8.799.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Orang	23.406.900	Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial		97 %	40.889.450				100 %	126.754.100	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	22.649.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		65 Orang	72.270.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	7.499.050	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		25 Orang	37.984.100	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan										
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	10.740.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		15 Orang	16.500.000	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial		97 %	240.082.750				100 %	1.292.500.000	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100 %	9.999.600				100 %	27.500.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar										
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	9.999.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Orang	27.500.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS		96 %	230.083.150				100 %	1.265.000.000	Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	24.623.650	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		30 Keluarga	165.000.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Keluarga	167.926.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	352.000.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat										
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	37.532.650	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		70 Orang	748.000.000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100 %	472.170.750				100 %	732.985.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial		100 %	15.800.700				100 %	49.720.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	15.800.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		60 Orang	49.500.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang										
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		60 Orang	220.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial		100 %	456.370.050				100 %	683.265.000	Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	70 Orang	456.370.050	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Orang	683.265.000	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara		100 %	48.411.500				100 %	217.208.530	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keuangan, Keberintisan dan KSN		3 Buah	48.411.500				4 Buah	217.208.530	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Gantorang, Semua Kel/Desa	3 Makam	48.411.500	Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU		4 Makam	217.208.530	Dinas Sosial
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. BULUKUMBA				18.402.275.775					32.638.738.285	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.402.275.775					31.380.355.975	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				18.402.275.775					31.380.355.975	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)		100 %	4.999.030.462				100 %	9.575.350.150	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		38 Dokumen 38 Dokumen	20.642.000				38 Dokumen	53.861.677	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	20.642.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Dokumen	48.565.109	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		30 Laporan	5.296.568	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 % 100 %	4.642.529.630				100 %	7.747.906.423	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	54 Orang/ bulan	4.298.011.380	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	7.390.071.196	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	335.250.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	335.148.267	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	5 Laporan	9.268.250	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	22.686.960	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0 Orang 0 %	-				0 %	82.500.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	4 Orang	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	82.500.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum Pemenuhan Administrasi Umum		100 % 100 %	99.641.000				100 %	409.352.537	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Paket	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	8.615.998	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Paket	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	9.627.649	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Paket	60.550.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	104.089.781	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	7.194.442	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	240 Dokumen	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		24 Dokumen	2.944.085	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	45 Laporan	34.091.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	276.880.582	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100 % 100 %	-				100 %	779.057.035	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	605.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	26.523.288	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	7 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	147.533.747	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	131.957.832				100 %	354.217.694	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.220.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.315.411	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	129.737.832	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	337.640.639	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	13.261.644	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 12 Bulan	104.260.000				100 %	148.454.784	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	40 Unit	104.260.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		9 Unit	122.067.470	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	22 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	14.309.314	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	12.078.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		90 %	304.651.787				100 %	420.407.665	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH		2 Dokumen	-				2 Dokumen	86.346.700	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota										
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokuman	86.346.700	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		2 Dokumen	304.651.787				0 Dokumen	334.060.965	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	304.651.787	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	334.060.965	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota		23,51 %	1.444.844.000				22,16 %	2.121.491.471	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim		23 Lokasi	1.444.844.000				23 Lokasi	1.956.007.372	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	1.408.844.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		12 Dokumen	1.549.728.400	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		6 Dokumen	186.938.388	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	36.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		11 Dokumen	219.340.584	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba		6 Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar	-				6 Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar	32.628.949	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		11 Laporan	32.628.949	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Terahibilitasnya kawasan Pantai Lahan Kritis		20000 Batang	-				20000 Batan g	132.855.150	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi										
		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Kegiatan	132.855.150	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari		90 %	210.480.000				100 %	3.040.700.116	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelolah dengan baik		90 %	210.480.000				100 %	3.040.700.116	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384,70 Ha	210.480.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		25 Ha	3.040.700.116	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		100 %	-				100 %	63.648.995	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase limbah B3 yang dkendalikan dengan baik		48 Pasyankes dan Perbengkelan	-				48 Pasyankes dan Perbengkelan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3										
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		48 Laporan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun		90 %	-				100 %		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		90 %	-				100 %		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH										
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	<i>Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>		100 %	-				100 %	92.831.519	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	<i>Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH</i>		100 %	-				100 %	92.831.519	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH										
		<i>Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	92.831.519	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat</i>		100 %	-				100 %	198.924.660	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>		30 Sekolah	-				30 Sekolah	198.924.660	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
		<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		30 Dokumen	198.924.660	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>		100 %	-				100 %	38.257.987	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Presetase Tindak lanjut Pengaduan</i>		20 Pengaduan	-				20 Pengadu an	38.257.987	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Pengaduan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Pengaduan	38.257.987	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Terkelolah		100 %	11.443.269.526				100 %	15.740.704.992	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	% Pemenuhan Sampah yang terkelolah		100 %	11.443.269.526				100 %	15.740.704.992	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Kelompok	25.663.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Kelompok	237.723.331	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	335.484.541	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah										
		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Ton	1.603.320.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		47.756,60 Ton	1.763.652.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.304 Ton	9.814.286.526	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		47.756,60 Ton	13.403.845.120	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-					1.258.382.310	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				-					1.258.382.310	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana		100 %	-				100 %	1.258.382.310	
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari		100 %	-				100 %	1.258.382.310	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota										
		Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3475 Ha	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3475 Ha	1.188.861.191	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota										
		Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Desa	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Desa	69.521.119	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BULUKUMBA				4.612.640.241					7.844.685.625	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.612.640.241					7.844.685.625	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.612.640.241					7.844.685.625	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		100 %	3.877.704.791				100 %	6.706.985.625	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, dan IKU.Tersusunnya RKATersusunnya RKA-PTersusunnya DPATersusunnya DPA-PTersusunnya Laporan KinerjaTersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semester serta laporan evaluasi renja, LPPD dan Sensus BMD		100 %	18.459.500				100 %	23.199.255	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	10 Dokumen	6.300.050	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Dokumen	7.944.255	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	3.195.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	305.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	1.740.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	2.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	1.537.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	10.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	1.114.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Laporan	1.950.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lancarnya administrasi pelaksanaan Tugas ASN Lancarnya penatausahaan keuangan SKPD Lancarnya penyusunan akuntansi SKPD Tersusunnya laporan akhir tahun Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan. Tersusunnya laporan keuangan secara berjenjang Tersusunnya laporan akhir tahun		100 %	2.800.655.833				100 %	3.887.231.157	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	29 Orang/ bulan	2.744.670.383	Ujung Bulu, Caile	DAU		33 Orang/ bulan	3.783.281.157	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	53.130.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	93.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	2.090.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	5.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	765.450	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	4.950.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sapras kedisiplinan pegawai, Tersedianya pakaian dinas, Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, Terlaksananya sistem informasi kepegawaian, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi, terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		100 %	72.616.000				100 %	82.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	3 Orang	72.616.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Orang	82.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, Tersedianya bahan logistik kantor., tersedianya barang cetak dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan, Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis, Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik		100 %	377.030.768				100 %	664.455.213	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	5.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	17.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	1.623.050	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	7.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	217.830.218	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	465.055.213	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	3.847.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	7.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	15.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	148.730.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	152.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Kendaraan dinas operasional/ lapangan, Tersedianya Mebel, Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya aset tetap lainnya, Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya"		100 %	364.229.250				100 %	1.644.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	49.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	45.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	10 Unit	364.229.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Unit	550.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	1.000.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tersedianya Jasa Surat menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa pelayanan umum kantor"		100 %	181.663.440				100 %	230.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	126.463.440	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	165.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	55.200.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	65.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya, Terpeliharanya mebel kantor., Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	63.050.000				100 %	175.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	29.100.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	47.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	9 Unit	10.810.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		9 Unit	46.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	20 Unit	23.140.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Unit	33.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	34.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	14.600.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk		100 %	495.873.500				100 %	581.200.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kecamatan yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100 %	495.873.500				100 %	570.200.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	13.956.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	59.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Ujung Bulu, Caile	150 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	-		150 Orang	5.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	481.917.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	505.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	terbinanya dan diawasinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		12 Bulan	-				12 Bulan	11.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk										
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	-		12 Laporan	11.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.		90 %	200.307.000				95 %	350.000.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan, analisis dokumen kependudukan		100 %	200.307.000				100 %	311.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil										
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Ujung Bulu, Caile	12 Layanan	193.740.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Layanan	275.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	6.567.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	36.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.		100 %	-				100 %	27.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam										
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	11.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil										
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Ujung Bulu, Caile	10 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Laporan	16.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.		100 %	-				100 %	11.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	11.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil		3 Buah	38.754.950				4 Buah	187.800.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan		100 %	25.623.400				100 %	61.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Ujung Bulu, Caile	10 Dokumen	12.396.400	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Dokumen	26.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	13.227.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	35.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.		100 %	13.131.550				100 %	126.300.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	16.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	35.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ujung Bulu, Caile	4 Laporan	8.381.850	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	62.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi										
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	6.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	4.749.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	5.800.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun		100 %	-				100 %	18.700.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya dokumen Profil Kependudukan		100 %	-				100 %	18.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain										
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	18.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BULUKUMBA				5.563.086.912					5.881.742.824	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.563.086.912					5.881.742.824	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.563.086.912					5.881.742.824	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		100 %	3.409.586.762				100 %	4.143.742.824	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	49.731.250				100 %	66.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	9 Dokumen	45.081.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		9 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	4.649.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	2.868.077.611				100 %	3.123.492.824	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	33 Orang/ bulan	2.792.912.111	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		33 Orang/ bulan	3.025.045.406	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	70.669.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	88.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	6 Laporan	4.496.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Laporan	4.950.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		18 Laporan	5.497.418	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100 %	9.914.000				100 %	16.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	9.914.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Laporan	16.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	20.230.000				100 %	74.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Loka	35 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		35 Paket	19.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	2 Orang	20.230.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Orang	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	168.764.680				100 %	319.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	25 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAK		25 Paket	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	3 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Paket	16.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	3.108.280	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	5 Paket	65.844.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Paket	71.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	2 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Paket	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	22.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	99.812.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	107.158.328				100 %	236.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	23.543.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	33.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	18 Unit	17.700.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		18 Unit	33.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	16 Unit	65.915.028	Ujung Bulu, Loka	DAU		16 Unit	170.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	145.337.856				100 %	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	64.717.920	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	77.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	80.619.936	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	88.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan		100 %	40.373.037				100 %	143.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Unit	9.255.281	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	6 Unit	9.268.956	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Unit	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Loka	68 Unit	16.080.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		68 Unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	5.768.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	2 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik		60 %	58.709.850				80 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik		60 %	58.709.850				80 %		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa										
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Ujung Bulu, Loka	90 Desa	58.709.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		90 Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Adanya kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa		100 %	99.999.800				100 %	165.000.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi		109 Desa	99.999.800				109 Desa	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ujung Bulu, Loka	54 Dokumen	99.999.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		54 Dokumen	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		100 %	1.365.393.200				100 %	984.500.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		100 %	1.365.393.200				100 %	984.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Ujung Bulu, Loka	109 Dokumen	60.985.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	109 Dokumen	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		109 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	958.350.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Dokumen	495.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Ujung Bulu, Loka	109 Orang	29.041.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Orang	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	149.996.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		80 Dokumen	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	34.972.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	38.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Ujung Bulu, Loka	109 Dokumen	49.020.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD										
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Ujung Bulu, Loka	109 Orang	18.145.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Orang	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	25 Desa	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		25 Desa	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	Ujung Bulu, Loka	109 Dokumen	64.881.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan provinsi</i>		100 %	629.397.300				100 %	522.500.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		100 %	629.397.300				100 %	522.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</i>	Ujung Bulu, Loka	109 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Dokumen	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Ujung Bulu, Loka	50 Dokumen	25.687.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		50 Dokumen	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Ujung Bulu, Loka	654 Lembaga	67.649.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		654 Lembaga	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	10 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Ujung Bulu, Loka	109 Laporan	99.999.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		109 Laporan	137.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Ujung Bulu, Loka	30 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		30 Laporan	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Ujung Bulu, Loka	10 Dokumen	436.060.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Dokumen	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	109 Keluarga	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		109 Keluarga	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BULUKUMBA				12.410.842.623					14.039.376.159	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.410.842.623					14.039.376.159	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				779.490.385					896.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD		55 %	62.793.275				65 % 65 %	75.000.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Daerah		60 %	32.793.500				65 %	40.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	27 Perangkat Daerah	32.793.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		30 Perangkat Daerah	40.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial		60 %	29.999.775				65 %	35.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen	29.999.775	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Dokumen	35.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100 %	116.680.350				100 %	131.000.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		45 %	57.139.000				-	65.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen	57.139.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		5 Dokumen	65.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komrehensif		50 %	49.542.000				-	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	16 Layanan	49.542.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		16 Layanan	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi		50 %	9.999.350				-	11.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Ujung Bulu, Loka	6 Orang	9.999.350	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		6 Orang	11.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga		30 %	217.836.860				40%	250.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		35 % 40 %	199.996.700				40 %	220.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Ujung Bulu, Loka	6 Dokumen	199.996.700	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		12 Dokumen	220.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak		35 % 6 layanan	17.840.160				40 % 10 layanan	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Layanan	17.840.160	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		25 Layanan	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak		700 Nilai	332.179.900				800 Nilai	385.000.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha		700 Nilai 40 %	249.999.900				60 % 800 Nilai	275.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>	Ujung Bulu, Loka	2 Organisasi	199.999.900	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		14 Organisasi	220.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	50.000.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		2 Dokumen	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</i>		10 lembaga	82.180.000				14 lembaga	110.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Ujung Bulu, Loka	20 Layanan	42.950.000	Ujung Bulu, Loka	DAK		20 Dokumen	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	39.230.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		8 Dokumen	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		80 %	50.000.000				90 %	55.000.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak		80 %	50.000.000				-	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Ujung Bulu, Loka	75 Orang	50.000.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		75 Orang	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.273.752.238					12.750.016.159	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)		100 %	5.435.314.388				100 %	6.509.490.681	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, peganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	169.712.850				100 %	306.824.999	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	102.068.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen	121.825.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	9.999.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Laporan	109.999.999	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	57.645.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Laporan	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100 %	4.572.893.223				100 %	4.972.782.932	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	4.462.893.223	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	4.856.782.932	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	105.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun		3 Laporan	14.999.600				3 Laporan	16.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	7.499.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	8.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	7.499.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Laporan	8.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-				-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		2 Orang	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	154.670.125				100 %	298.188.670	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	7.801.825	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	7.358.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	20.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	73.275.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	123.188.670	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	5.617.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	24 Laporan	60.617.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		24 Laporan	125.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	70.123.700				100 %	210.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Unit	20.628.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		115 Unit	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	49.495.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	365.794.890				100 %	386.194.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	73.794.890	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	81.194.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	292.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	305.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/ direhabilitasi		100 %	87.120.000				100 %	319.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	16.500.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	27.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	5 Unit	50.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Unit	77.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	160.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	20 Unit	20.620.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		20 Unit	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)		100 %	531.890.650				100 %	586.086.380	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantias penduduk		10 Kecamatan 10 kecamatan	315.358.350				10 Kecamat an 10 kecamatan	347.900.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Satuan Pendidikan	49.085.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Satuan Pendidikan	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	106.272.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		10 Dokumen	116.900.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana										
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	160.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		10 Kegiatan	176.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia Bahan-bahan dan data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia		12 Bulan 12 bulan	216.532.300				12 Bulan 12 bulan	238.186.300	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga										
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.970.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		12 Dokumen	13.167.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga										
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	46.662.150	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		12 Laporan	51.328.530	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	107.999.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		12 Dokumen	118.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain										
		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	49.900.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	54.890.770	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB		100 %	2.600.967.800				100 %	2.855.491.807	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan		10 Kecamatan 10 Kecamatan	936.499.700				10 Kecamatan an 10 Kecamat an	1.030.150.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	481.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		10 Laporan	529.650.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	130.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		10 Laporan	143.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	149.999.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		2 Dokumen	165.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal										
		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		10 Dokumen	27.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Organisasi	149.999.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		10 Organisasi	165.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang teregister yang mendapat ketersediaan alat kontrasepsi MKJP		21 Faskes	1.120.975.800				21 Faskes	1.195.049.926	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	18.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		21 Laporan	20.790.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	697.840.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		21 Orang	767.624.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	390.235.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		7 Unit	391.235.926	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	14.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		900 Laporan	15.400.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pelayanan KB dan KR bergerak/bakti sosial diwilayah dan sasaran khusus		10 kecamatan	543.492.300				10 kecamatan	630.291.881	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Organisasi	193.492.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		5 Organisasi	212.841.881	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kampung	350.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		20 Kampung	417.450.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)		100 %	2.705.579.400				100 %	2.798.947.291	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana		10 kecamatan 10 Kecamatan	2.682.376.450				10 kecamatan 10 Kecamatan	2.743.947.291	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	365.704.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		19 Unit	402.275.060	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	153.572.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		20 Orang	158.572.281	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	39.999.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	2.123.099.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		20 Orang	2.128.099.950	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		4 organisasi	23.202.950				4 organisasi	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Organisasi	23.202.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Organisasi	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				357.600.000					393.360.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB		100 %	357.600.000				100 %	393.360.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus		10 Kecamatan	357.600.000				10 Kecamatan	393.360.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ujung Bulu, Loka	68 Orang	357.600.000	Ujung Bulu, Loka	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		12 Orang	393.360.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BULUKUMBA				19.742.246.030					21.868.075.574	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.723.800					16.500.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.723.800					16.500.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)		90 %	6.723.800				100 %	16.500.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana		12 Bulan	6.723.800				100 %	16.500.000	Dinas Perhubungan
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.723.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	16.500.000	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.735.522.230					21.851.575.574	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				19.735.522.230					21.851.575.574	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan)		100 %	16.978.875.830				100 %	19.337.055.968	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip.Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD melalui Uji Petik.		5 Dok	15.667.000				100 %	55.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	15.667.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Dokumen	55.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan		12 Bulan	3.855.503.062				100 %	4.592.109.968	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	51 Orang/ bulan	3.777.730.362	Ujung Bulu, Caile	DAU		51 Orang/ bulan	4.482.777.998	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	31.127.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	34.240.470	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	46.645.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	75.091.500	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Orang	14.643.000				100 %	61.259.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	3 Orang	14.643.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Orang	61.259.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	207.668.150				100 %	235.092.523	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	70 Paket	3.871.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		70 Paket	3.850.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	4 Paket	108.653.050	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Paket	18.671.400	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	40.133.100	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Paket	47.049.723	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	34 Laporan	55.011.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		34 Laporan	165.521.400	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	29.192.240				100 %	990.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	29.192.240	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	990.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Umum		12 Bulan	12.728.232.378				100 %	13.176.211.805	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	12.590.044.728	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	12.307.885.390	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	6 Laporan	4.060.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	4.466.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	134.127.650	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	863.860.415	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan adminitrasi umum		12 Bulan	127.970.000				100 %	227.382.672	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	20.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	16.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	0 Unit	97.380.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	172.382.672	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	10.590.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit	38.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C		85 % 100 %	2.756.646.400				95 % 100 %	2.514.519.606	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten/Kota yang tersedia		12 Bulan	654.833.100				100 %	1.773.477.924	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	40 Unit	38.223.700	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		50 Unit	40.656.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	120 Unit	450.389.400	Ujung Bulu, Caile	DAU		150 Unit	1.550.804.924	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Ujung Bulu, Caile	16 Unit	166.220.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	182.017.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C		100 %	334.230.000				100 %	110.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C										
		Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Ujung Bulu, Caile	83 Orang	334.230.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Orang	110.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terlaksanya pengujian kendaraan bermotor Uji kear		12 Bulan	138.770.650				100 %	220.034.767	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	2 Unit	111.628.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	109.442.967	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ujung Bulu, Caile	4 Laporan	5.803.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	33.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Ujung Bulu, Caile	7 Unit	21.339.400	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	77.591.800	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan		100 % 12 Bulan	1.628.812.650				100 %	411.006.915	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	287.600.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	252.340.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Ujung Bulu, Caile	12 Unit	1.341.212.650	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Unit	158.666.915	Dinas Perhubungan
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BULUKUMBA				3.423.320.813					8.878.032.515	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.423.320.813					8.878.032.515	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.391.460.813					8.797.471.266	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)		100 %	2.588.000.813				100 %	4.175.766.750	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		64 Dokumen	2.050.000				64 Dokumen	63.079.372	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	2.050.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	32.760.622	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	30.318.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	2.201.698.193				100 %	3.232.057.025	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	2.087.201.893	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	3.036.203.577	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	110.750.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	28.757.941	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.746.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	153.246.508	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	13.848.999	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	-				100 %	30.723.328	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang	30.723.328	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	196.549.050				100 %	454.781.250	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	1.963.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	30.318.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	36.382.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	70.153.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	121.275.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	124.432.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	242.550.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100 %	-				100 %	30.372.106	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	30.372.106	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	137.823.570				100 %	248.613.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	77.995.320	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	103.083.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.340.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	97.020.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	44.488.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	48.510.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	49.880.000				100 %	116.139.919	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	23.080.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	24.255.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	48.510.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.16.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	6.992.419	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah		100 %	482.200.000				100 %	1.321.704.516	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik Terlaksananya pengelolaan informasi publik dan terkelolanya opini dan informasi publik melalui media informasi		100 % 100 %	482.200.000				100 %	1.321.704.516	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik										
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	12.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	136.798.200	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	95.322.150	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	66.150.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	96.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	184.503.900	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	108.056.025	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media										
		Jumlah Layanan Hubungan Media	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Layanan	233.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Layanan	227.966.857	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan										
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	60.636.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik										
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang	106.774.511	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	140.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	335.496.373	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo		100 %	321.260.000				100 %	3.300.000.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersenggaranya sistem dan aplikasi dalam kerangka SPBE Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah		100 % 36 Domain	321.260.000				100 %	2.348.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Domain	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Domain	5.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	143.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah										
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	321.260.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	2.200.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem		100 %	-				100 %	951.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik										
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah										
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	165.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Perangkat Daerah	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Perangkat Daerah	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik										
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah										
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Layanan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Layanan	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas										
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah										
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		12 Dokumen	82.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				21.060.000						
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 %	21.060.000				100 %		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan terlaksananya pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya data statistik sektoral dengan terselenggaranya pengumpulan data dan statistik daerah		100 % 100 %	21.060.000				100 %		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.060.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi										
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				10.800.000						
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah		100 % 36 OPD	10.800.000				36 OPD 100 %	24.255.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi		100 % 100 %	10.800.000				100 %	18.191.250	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	12.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	6.063.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	-				-	6.063.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Perangkat Daerah	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Perangkat Daerah	6.063.750	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. BULUKUMBA				6.486.966.564					10.397.499.447	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.486.966.564					10.397.499.447	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				322.588.700					990.552.443	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Tahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Tahun		50.00 % 100 Persen	-				50.00 % 100 Persen 50.00 %	11.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro		100 %	-				100 %	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro										
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Ujung Bulu, Loka	1 Orang	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Orang	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0,83 %	219.115.150				0,87 % 0,87 %	822.250.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		12 Bulan	189.115.400				12 Bulan	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Ujung Bulu, Loka	120 Orang	189.115.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi		1 Kegiatan	9.999.850				1 Kegiatan	13.750.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Ujung Bulu, Loka	1 Lembaga	9.999.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Lembaga	13.750.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan		Kelompok	19.999.900				Kelompok	588.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil										
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Ujung Bulu, Loka	12 Perusahaan	19.999.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Perusahaan	588.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		2,24 %	58.849.400				2,47 % 2,47 %	91.971.573	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas		1 Kegiatan	14.999.900				1 kegiatan	17.492.773	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Ujung Bulu, Loka	16 Orang	14.999.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Orang	17.492.773	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan informasi pasar kerja online		12 Bulan	-				12 Bulan	40.590.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Ujung Bulu, Loka	30 Orang	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang	40.590.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia		12 Bulan	43.849.500				12 Bulan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)										
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Ujung Bulu, Loka	16 Orang	43.849.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		100 %	44.624.150				100 %		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)		12 Bulan	-				1 Bulan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan										
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Ujung Bulu, Loka	1 Perusahaan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Perusahaan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan		1 Kegiatan	44.624.150				1 Kegiatan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Ujung Bulu, Loka	1 Perkara	44.624.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Perkara	16.768.400	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Ujung Bulu, Loka	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	21.062.470	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.164.377.864					9.406.947.004	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)		100 %	5.399.177.914				100 %	8.488.759.112	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	98.798.750				100 %	104.395.100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	65.691.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	47.629.970	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	16.579.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	29.156.690	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	15.728.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	26.728.440	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	800.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	880.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	4.822.944.095				100 %	7.698.692.911	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	4.733.934.545	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang/ bulan	7.498.094.062	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	79.049.550	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	189.642.695	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	9.960.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Laporan	10.956.154	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya sumber daya manusia dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		100 %	22.125.000				100 %	48.675.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	1 Orang	22.125.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Orang	48.675.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia		100 %	166.170.100				100 %	283.017.727	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	5.240.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	1.366.750	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	0 Paket	60.656.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		0 Paket	72.150.678	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	10.274.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	1.660.890	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	10.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	13.395.800	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	79.998.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	194.443.609	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jumlah Sarana dan Pra sarana Yang tersedia		100 % 100 %	-				100 %	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	2 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Unit	22.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	22.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia		100 %	223.650.200				100 %	224.894.512	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	115.315.200	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	126.844.912	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	108.335.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	98.049.600	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan		100 %	65.489.769				100 %	74.083.862	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	44.869.769	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	49.102.862	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	6.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	5 Unit	14.620.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Unit	6.171.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	10 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Unit	7.810.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		20 %	18.633.900				20 %	60.241.060	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan Kebijakan Invertaris Penanaman Modal		1 peraturan	1.089.900				1 peraturan	26.730.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	1.089.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	26.730.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyajian informasi penanaman Modal		125 Buku	17.544.000				125 Buku	33.511.060	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	17.544.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		25 Dokumen	33.511.060	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		76 Investor	80.351.750				76 Investor	87.813.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Terlaksananya Promosi Pontensi Unggulan Daerah Kab.Bulukumba		76 Investor	80.351.750				76 Investor	87.813.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	66.641.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	73.224.800	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	13.710.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	14.588.200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan		100 %	269.602.650				100 %	356.166.982	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi Pelayanan Perizinan		12 Bulan	269.602.650				12 Bulan	356.166.982	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah										
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Ujung Bulu, Loka	23 Pelaku Usaha	257.558.950	Ujung Bulu, Loka	DAU		23 Pelaku Usaha	346.015.450	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko										
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Ujung Bulu, Loka	1 Pelaku Usaha	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Pelaku Usaha	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko										
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Ujung Bulu, Loka	5 Kegiatan Usaha	12.043.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Kegiatan Usaha	10.151.532	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	391.611.650				500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	402.966.850	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib administrasi pelayanan Invertasi		76 Investor	391.611.650				76 Investor	402.966.850	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Ujung Bulu, Loka	2 Kegiatan Usaha.	9.086.800	Ujung Bulu, Loka	DAK		2 Kegiatan Usaha.	71.327.300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Ujung Bulu, Loka	0 Pelaku Usaha	188.162.050	Ujung Bulu, Loka	DAK		0 Pelaku Usaha	231.319.550	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal										
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Ujung Bulu, Loka	100 Kegiatan Usaha	194.362.800	Ujung Bulu, Loka	DAK		100 Kegiatan Usaha	100.320.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu		100 %	5.000.000				100 %	11.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penyajian Informasi data base Perizinan		1 Buku	5.000.000				1 Buku	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	5.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BULUKUMBA				2.381.884.511					2.873.370.513	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.381.884.511					2.873.370.513	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2.321.884.361					2.755.239.313	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)		100 %	2.261.884.511				100 %	2.638.655.373	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	41.644.000				100 %	64.661.905	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	25.348.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Dokumen	38.326.200	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	6.380.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	10.087.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	6.380.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	10.087.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	3.536.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	6.161.705	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD		100 Persen	1.886.974.115				100 %	2.091.716.127	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	1.822.659.115	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang/ bulan	2.004.925.027	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	62.857.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	84.994.800	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	1.458.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	1.796.300	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi umum		100 Persen	60.740.950				100 %	153.937.410	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	6.029.200	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	4.994.770	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	3 Paket	22.391.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Paket	40.909.990	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	1.998.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	4.646.950	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	11 Laporan	30.321.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		43 Laporan	103.385.700	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah		100 Persen	22.430.750				100 %	33.251.075	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	5 Unit	5.330.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Unit	16.029.200	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	7 Unit	17.100.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		8 Unit	17.221.875	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	231.869.696				100 %	251.294.666	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	57.189.696	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	58.156.666	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	168 Laporan	174.680.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		14 Laporan	193.138.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah		100 Persen	18.225.000				100 %	43.794.190	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	7 Unit	16.100.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		9 Unit	28.820.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	2.125.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	14.974.190	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun		98 %	54.812.150				98 %	105.621.615	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perpustakaan		98 %	19.618.750				98 %	39.619.085	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perpustakaan	5.662.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		30 Perpustakaan	5.500.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Perpustakaan	3.665.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		38 Perpustakaan	6.672.710	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	5.750.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		365 Orang	18.645.550	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka										
		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Ujung Bulu, Loka	58 Eksemplar	2.617.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1448 Eksemplar	3.284.325	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	1.922.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		100 Dokumen	5.516.500	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca		98 %	35.193.400				100 %	66.002.530	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat										
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lokus	28.228.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		450 Lokus	55.002.585	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perpustakaan	6.964.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		90 Perpustakaan	10.999.945	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya		100 %	5.187.700				100 %	10.962.325	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan naskah kunomilik daerah kabupaten/kota		100 %	2.289.700				100 %	5.499.725	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno										
		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	2.289.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	5.499.725	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara		100 %	2.898.000				100 %	5.462.600	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Ujung Bulu, Loka	15 Eksemplar	2.898.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Eksemplar	5.462.600	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				60.000.150					118.131.200	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Pengumpulan data arsip yang mempunyai nilai informasi, pengolahan dan penyimpanan data base arsip		100 %	46.124.550				100 %		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis		100 %	46.124.550				100 %		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis										
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Berkas	25.625.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Berkas		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis										
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Berkas	20.498.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Berkas		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan		100 %	13.875.600				100 %		
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang di kelola		100 %	13.875.600				100 %		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Arsip	13.875.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Arsip		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
	DINAS PERIKANAN KAB. BULUKUMBA				35.684.106.731					37.494.252.968	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				35.684.106.731					37.494.252.968	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				35.684.106.731					37.494.252.968	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)		100 %	4.858.182.953				100 %	5.740.574.968	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen		19 Dokumen 19 Dokumen	72.810.000				19 Dokumen	84.150.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.743.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	8.250.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.500.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.600.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.500.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.600.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.000.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.600.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.000.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.600.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.179.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	16.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.886.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	33.000.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan Jumlah Gaji Tunjangan yang dibayarkan		12 Bulan 12 Bulan	4.308.199.235				12 Bulan	4.674.642.632	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Orang/ bulan	4.197.239.235	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	4.542.642.632	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	110.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	126.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan		1 Orang	6.810.000				1 Orang	82.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	6.810.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	82.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum		12 Bulan	189.251.240				12 Bulan	311.571.492	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.498.690	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	3.850.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	35.003.650	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	38.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.017.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	27.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	2.280.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	4.400.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.226.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	16.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	117.225.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	220.821.492	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		12 Unit	-				8 Unit	81.950.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	10.450.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	16.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	197.892.478				12 Bulan	308.530.844	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	81.174.478	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	198.000.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	116.718.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	110.530.844	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		53 Unit	83.220.000				53 Unit	197.230.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	65.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		40 Unit	120.230.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	4.220.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.930.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	66.000.000	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	4.270.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Produksi Perikanan Tangkap		60 Persen 54247 Ton	26.890.383.200				60 Persen 55337,50 To	25.484.360.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikan		1 dok 37 Unit	21.528.826.700				2 dok 56167.56 to n	7.856.860.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.194.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	17.659.592.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		55 Unit	4.308.700.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292 Unit	3.853.040.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		250 Unit	3.493.160.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan		3 Paket	5.343.439.000				3 Paket	6.336.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	5.343.439.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		20 Orang	6.281.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Kelompok	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Kelompok	55.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang operasional (%) Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap		100 % 100 %	-				100 %	11.258.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Dokumen	38.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Layanan	11.220.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan		2 Rekomendasi	18.117.500				120 Rekomendasi	11.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.117.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Dokumen	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT										
		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapal		2 Rekomendasi	-				2 Rekomendasi	11.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT										
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT										
		Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang terdaftar		2 Rekomendasi	-				120 Rekomendasi	11.000.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT										
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Dokumen	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT										
		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya		188.903 Ton	3.298.815.078				192.700 Ton 100 %	5.650.568.000	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		2 Rekomendasi	-				2 Rekomendasi	11.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Saprodi Budidaya		120 Orang 1 Paket	27.728.500				100 Orang 1 Paket	165.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Kelompok	27.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Kelompok	27.500.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	27.728.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Kelompok	110.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)		2 Rekomendasi	-				2 Rekomendasi	11.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya		60 Orang 29 Paket	3.271.086.578				3 kali 6 Kelompok	5.463.568.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	554.067.578	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		3 Unit	3.509.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	2.696.905.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		3 Unit	1.833.568.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.849.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	33.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat										
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	9.265.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		60 Orang	33.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat										
		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Ha	55.000.000	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan		94 %	636.725.500				91%	618.750.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Usaha Mikro		1 kali	9.929.000				1 kali	66.000.000	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Usaha	9.929.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Usaha	66.000.000	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Promosi Hasil Perikanan Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan		1 kali 1 kali	626.796.500				1 kali 1 kali	552.750.000	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pelaku Usaha	626.796.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		1 Pelaku Usaha	552.750.000	Dinas Perikanan
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. BULUKUMBA				14.459.942.966					26.135.144.894	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.356.357.150					6.130.500.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.356.357.150					6.130.500.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Inovator Persentase Jumlah Pemuda Inovator		5 orang 100 %	375.582.000				100 % 5 orang	720.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah presentase pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan		82,5 %	375.582.000				87,5 %	720.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor										
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	30.046.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Orang	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	245.617.300	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Orang	308.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	49.918.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Dokumen	82.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda										
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Ujung Bulu, Caile	3 Orang	50.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Orang	220.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Pemuda inovator Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional		2 orang 100 %	1.880.775.150				2 orang 100 %	5.300.000.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun		5 pkt	475.440.400				5 pkt	1.650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	475.440.400	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	1.650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan yang pertandingan		5 event	630.000.000				5 event	2.550.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	330.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	630.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Dokumen	2.220.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah atlet berprestase yang mendapat pembinaan		25 atlet	225.334.750				25 atlet	550.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah										
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	100.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		50 Orang	165.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota										
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Ujung Bulu, Caile	2 Orang	125.334.750	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Orang	275.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Ujung Bulu, Caile	20 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		25 Orang	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang dibina		2 Cabor	550.000.000				2 Cabor	550.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	550.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		0 Dokumen	550.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah gusus pramuka yang berprestasi tingkat Nasional Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional		2 Orang 100 %	100.000.000				2 Orang 100 %	110.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah gugus pramuka yang berprestasi tingkat nasional		2 Gudep	100.000.000				2 Gudep	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Ujung Bulu, Caile	1 Organisasi	100.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Organisasi	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.103.585.816					20.004.644.894	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12.103.585.816					20.004.644.894	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan		100 %	7.627.034.416				100 %	9.856.144.894	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun		20 dok	333.868.450				20 dok	337.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	20 Dokumen	208.560.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Dokumen	265.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	51.092.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	17.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	6 Laporan	74.215.150	Ujung Bulu, Caile	DAU		20 Laporan	55.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasi keuangan		100 %	4.932.659.524				100 %	5.232.144.894	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	4.810.879.524	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		32 Orang/ bulan	5.039.644.894	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	100 Dokumen	121.780.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		8 Dokumen	192.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pencapaian PAD		100 %	526.645.000				100 %	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Ujung Bulu, Caile	100 Dokumen	526.645.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Dokumen	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100 %	62.585.000				100 %	121.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	4 Orang	62.585.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		0 Orang	121.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administasi umum		100 %	400.979.750				100 %	800.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	50 Paket	148.094.450	Ujung Bulu, Caile	DAU		44 Paket	150.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	100 Laporan	252.885.300	Ujung Bulu, Caile	DAU		40 Laporan	650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumaah pengadaan barang milik daerah		5 unit	412.303.850				5 unit	175.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	174.635.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Unit	-	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	237.668.850	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	175.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang		100 %	638.598.800				100 %	770.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	100 Laporan	172.168.800	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Laporan	275.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	100 Laporan	466.430.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Laporan	495.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD yang dipelihara		18 unit	319.394.042				20 unit	1.320.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	20 Unit	118.549.042	Ujung Bulu, Caile	DAU		7 Unit	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	200.845.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		0 Unit	1.210.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata yang dikelola Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)		7 Objek 90 %	3.101.829.400				7 Objek 100 %	5.978.500.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengambangan kawasan wisata		3 Dok	1.050.000.000				3 Dok	3.850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	4 Dokumen	1.050.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Dokumen	3.850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/dipelihara		15 Pkt	2.051.829.400				17 Pkt	2.128.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Ujung Bulu, Caile	5 Lokasi	549.999.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Lokasi	1.402.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	12 Unit	1.241.830.850	Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAK		12 Unit	456.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	259.998.850	Ujung Bulu, Caile	DAK		2 Laporan	270.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)		11 event 90 %	819.400.000				13 event 100 %	3.070.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event pariwisata yang diselenggarakan		10 Event	819.400.000				10 Event	3.070.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Ujung Bulu, Caile	2 Kegiatan	609.400.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		10 Kegiatan	2.420.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Ujung Bulu, Caile	3 Promosi	210.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Promosi	650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah peletihan kewirausahaan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		10 kali 1,66 %	555.322.000				1,70 % 12 kali	1.100.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan		7 Pkt	555.322.000				7 Pkt	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata										
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Ujung Bulu, Caile	5 Orang	555.322.000	Ujung Bulu, Caile	DAK		2 Orang	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BULUKUMBA				49.128.047.366					44.997.160.590	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				579.953.500					1.364.600.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				579.953.500					1.364.600.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina		100 %	7.266.000				100 %	66.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah		2 Paket	7.266.000				2 Paket	66.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya										
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik										
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.266.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	11.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita		4.291,72/102,70 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	409.907.500				4.465,11/106,85 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	959.300.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan		12 Laporan	82.870.500				12 Laporan	52.800.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya										
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	43.387.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.400.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	11.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota										
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	9.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota										
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan										
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.883.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	16.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten		100 %	177.811.000				15.000 Kg	286.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal										
		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	2.200.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Ton	120.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		15000 Ton	247.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Ton	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		12 Ton	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota										
		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ton	57.811.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Ton	8.800.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam, bergizi, seimbang dan aman</i>		100 %	149.226.000				12 Bulan	620.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun										
		<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	10.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										
		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	143.026.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		15 Laporan	605.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun										
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	5.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</i>		100 %	139.830.000				100 %	289.300.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Tersedianya dokumen peta rawan pangan</i>		100 %	8.992.000				1 Dokumen	9.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.992.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	9.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan daerah		100 %	130.838.000				1 Laporan	279.400.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	130.838.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		30000 Dokumen	275.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.400.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman		45 %	22.950.000				45 %	50.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah kabupaten		100 %	22.950.000				100 %	50.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		100 Dokumen	6.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	22.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		90 Dokumen	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		100 Dokuman	16.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				48.548.093.866					43.632.560.590	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				48.548.093.866					43.632.560.590	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		100 %	19.243.532.626				100%	19.288.406.841	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	76.624.850				24 Dokumen	119.928.578	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	21.785.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Dokumen	23.898.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	4.450.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Dokumen	4.895.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	3.599.850	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Dokumen	3.960.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	6.200.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Dokumen	8.415.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	3.575.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Dokumen	3.960.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		6 Laporan	17.325.578	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	37.015.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	57.475.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kegiatan perangkat daerah		100 %	17.306.594.916				12 bulan	16.836.384.332	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Bintarore	191 Orang/ bulan	17.107.755.116	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Orang/ bulan	16.626.284.332	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	12 Dokumen	194.840.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Dokumen	205.600.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	3.999.800	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Laporan	4.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	9.231.600				3 Laporan	10.480.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	2.399.900	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Dokumen	3.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Dokumen	3.232.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Dokumen	3.520.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	3.599.700	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Laporan	3.960.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah		100 %	68.720.000				2 bulan	62.700.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Bintarore	5 Orang	68.720.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Orang	56.650.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Bintarore	3 Orang	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Orang	6.050.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penadministrasian umum perangkat daerah		100 %	686.370.940				12 Bulan	842.196.207	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	8.194.290	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	12.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	10.014.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Paket	11.577.500	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	152.909.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	280.012.708	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	46.637.450	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	57.285.999	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	145.469.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	1.320.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	9.549.200	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	30.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	2 Laporan	313.598.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	450.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor OPD		100 %	124.390.800				43 Unit	722.980.179	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	20 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	267.308.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	5 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		5 Unit	38.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	20 Unit	107.500.800	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Unit	88.480.675	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Unit	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	11 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		5 Unit	36.670.137	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	16.890.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		0 Unit	264.521.367	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum OPD		100 %	231.904.520				12 Bulan	300.912.440	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	12 Laporan	172.744.520	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	188.136.920	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	12 Laporan	59.160.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		5 Laporan	112.775.520	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset OPD		100 %	739.695.000				375 Unit	392.825.105	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Bintarore	5 Unit	26.500.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		351 Unit	65.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Bintarore	265 Unit	66.100.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		265 Unit	60.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Ujung Bulu, Bintarore	10 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Bintarore	25 Unit	47.500.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	75.350.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	570.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Unit	2.456.300	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	29.595.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Unit	40.018.805	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Produksi Pertanian Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan		76 % 22 %	8.728.842.000				80 % 28 %	15.878.507.369	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rasio kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran		19.6 %	5.901.524.000				33 %	5.303.107.369	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	5.085.976.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		568 Laporan	4.000.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	815.548.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.303.107.369	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu produksi pertanian		100 %	2.284.629.500				18.500 Pohon/ Ha	8.717.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	1.723.044.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		83300 Dokumen	5.692.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		75000 Dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman										
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	561.585.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	3.000.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota		100 %	-				10.500 Ekor	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil										
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10500 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak										
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terlaksananya pengawasan obat hewan ditingkat pengecer		100 %	-				0 Kali	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan										
		Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Kasus	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Kasus	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan terhadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak		100 %	206.596.000				6.000 Kg/ Ek or	110.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak										
		Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2000 Dokumen		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan										
		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak										
		Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1000 Laporan		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak										
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2000 Laporan		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	206.596.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	16.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan		100 %	336.092.500				86 %	1.747.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton	67.612.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		150000 Ton	262.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ekor	268.480.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		210 Ekor	1.485.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia		90 %	19.235.445.000				90 % 90 %	6.843.900.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas		3 Dokumen 100 %	-				2 Dokumen	575.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota										
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	375.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota										
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	200.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian										
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian		100 %	19.235.445.000				0 Unit	6.268.900.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian										
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		4 Unit	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	6.086.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		4 Unit	880.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit										
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	995.485.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		3 Unit	924.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya										
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.143.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		1 Unit	715.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3.984.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		5 Unit	1.433.300.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	7.026.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		9 Unit	2.316.600.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		12.44 %	598.985.650				9.44 %	413.600.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan		14 %	319.963.750				14 persen	220.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264 Laporan	319.963.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5000 Laporan	220.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan		60 %	28.048.000				60 Persen	28.600.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)										
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182 laporan	28.048.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		700 laporan	28.600.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM										
		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aparatur petugas pelayanan medik dan paramedik veteriner		100 %	150.575.000				100 persen	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium										
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	150.575.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Laporan	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pendampingan dan pengawasan masyarakat veteriner veteriner		100 %	100.398.900				100 persen	137.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan										
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		15 Laporan	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner										
		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		300 Dokumen	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Unit Usaha	100.398.900	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit Usaha	82.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	<i>Terlaksananya penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesejahteraan hewan</i>		100 %	-				100 persen	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha										
		<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		6500 Unit	27.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi</i>		87 %	319.719.500				90 %	324.500.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Menurunnya Kasus serangan OPT</i>		295.000.000 Kasus	319.719.500				295.000.000 Kasus	324.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
		<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5000 Ha	297.117.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Ha	220.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
		<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ha	6.017.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Ha	66.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
		<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10000 Ha	16.584.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Ha	38.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin</i>		50 %	29.752.000				50 %	204.396.380	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian dalam daerah		100 %	29.752.000					120 Unit Usaha	159.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian											
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	29.752.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU			60 Dokumen	110.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian											
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU			250 Laporan	49.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan/pasar hewan rumah potong hewan		100 %	-					0 Unit Usaha	11.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan											
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU			0 Dokumen	2.750.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan											
		Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU			0 Laporan	2.750.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	2.750.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan										
		Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	2.750.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya pengawasan perijinan usaha pengecer		100 %	-				0 Kali	33.896.380	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan										
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	28.396.380	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan										
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	5.500.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh		59 % 19.00 %	391.817.090				19.00 % 61 %	679.250.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian		100 %	391.817.090				100 %	679.250.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	276.318.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		15 Unit	297.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	35.490.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		140 Unit	77.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	80.009.090	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAU		1 Unit	305.250.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BULUKUMBA				65.541.847.740					34.047.138.667	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.733.874.590					12.127.790.708	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.733.874.590					12.127.790.708	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100 %	7.871.279.790				100 %	10.714.189.607	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		100 %	88.272.400				100 %	121.313.280	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	55.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	60.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.050.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	26.050.090	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.776.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.493.670	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.071.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	7.778.540	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.373.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	16.490.980	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium		100 %	4.584.914.244				100 %	5.350.905.917	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang/ bulan	4.440.991.644	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		56 Orang/ bulan	5.168.912.292	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.840.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	16.956.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	108.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	140.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.460.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	13.301.090	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.441.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	11.486.035	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan		100 %	199.509.000				100 %	173.727.400	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	42.355.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	44.506.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	10.568.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	10.991.200	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	146.586.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	118.230.200	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor		100 %	672.796.860				100 %	1.139.980.903	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.544.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	82.846.143	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.539.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	11.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.547.560	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	14.905.605	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	122.138.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	164.997.910	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	36.340.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	72.973.945	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	43.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	47.630.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Laporan	380.386.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		65 Laporan	745.627.300	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor		100 %	1.058.841.000				100 %	1.661.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	900.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	1.430.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	9.850.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	11.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	98.991.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	165.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor		100 %	680.574.800				100 %	856.525.307	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.400.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185.433.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	187.989.307	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.760.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	32.736.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	461.381.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	631.400.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	586.371.486				100 %	1.410.736.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	112.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		43 Unit	82.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	8.236.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	468.371.486	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	1.320.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada		100 %	7.343.250				100 %	16.155.150	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota		2 Ijin	7.343.250				100 %	16.155.150	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Usaha	7.343.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit Usaha	16.155.150	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan		75,1 %	4.629.000				76,8 % 76,8 %	22.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	4.629.000				100 %	22.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290 Unit Usaha	4.629.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		290 Unit Usaha	22.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat		76,3 %	24.859.200				80,3 %	34.648.295	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100 %	24.859.200				100 %	34.648.295	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267 Unit Usaha	6.639.250	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		267 Unit Usaha	14.606.350	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan										
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit Usaha	18.219.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit Usaha	20.041.945	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan		65 %	369.370.000				85 %	480.322.986	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotan dalam daerah Kabupaten/Kota		50 %	369.370.000				75 %	480.322.986	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	369.370.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK		100 Orang	480.322.986	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi		99,0 %	10.357.950				99,5 %		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)		100 %	10.357.950				100 %		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Usaha	10.357.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit Usaha		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan		3,2 %	324.520.400				4,2 %		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.		100 %	324.520.400				100 %		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro										
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3330 Unit Usaha	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3330 Unit Usaha		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro										
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Unit Usaha	6.139.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		500 Unit Usaha	13.507.890	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit Usaha	300.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		21 Unit Usaha	16.446.045	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro										
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33178 Orang	2.550.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		33178 Orang	11.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan										
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	5.830.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	12.827.760	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		100 %	121.515.000				100 %	784.299.175	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		2 %	121.515.000				3,24 %	784.299.175	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro										
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	121.515.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU		40 Unit Usaha	784.299.175	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				56.807.973.150					21.919.347.959	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				47.092.141.750					11.058.678.854	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		50 %	46.677.898.350				50 %	10.583.255.114	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi		100 %	45.042.490.000				100 %	8.777.509.524	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	45.042.490.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	8.777.509.524	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola		100 %	1.635.408.350				100 %	1.805.745.590	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.635.408.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	1.805.745.590	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok		27.90 %	41.771.000				32.23 %	80.268.100	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100 %	41.771.000				100 %	80.268.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	41.771.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	80.268.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Komoditi Ekspor		100 %	220.900.000				100 %	148.500.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran		4 Klai	220.900.000				4 Kali	148.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional										
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelaku Usaha	168.110.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Pelaku Usaha	110.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal										
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelaku Usaha	52.790.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Pelaku Usaha	38.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku		40 %	151.572.400				50 %	246.655.640	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku		40 %	151.572.400				50 %	246.655.640	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Unit	105.202.400	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		250 Unit	153.342.640	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	46.370.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	93.313.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				9.715.831.400					10.860.669.105	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi		8.03 %	9.690.835.300				9.15 %	10.822.172.900	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu		100 %	9.690.835.300				100 %	10.822.172.900	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.186.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	42.004.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.352.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	384.114.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.655.297.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK, DAK		1 Dokumen	10.396.053.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		90 %	9.996.550				95 %	10.996.205	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi		100 %	9.996.550				100 %	10.996.205	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.996.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.996.205	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		83.33 %	14.999.550				83.33 %	27.500.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		83,33% %	14.999.550				100 %	27.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas										
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.999.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA				22.658.107.508					30.310.367.193	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				22.658.107.508					30.310.367.193	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				22.658.107.508					30.310.367.193	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)		100 %	19.745.261.158				100 %	26.948.336.813	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan [deleted] Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 % 100 %	144.516.650				100 %	180.112.295	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	144.516.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	180.112.295	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya Administrasi keuangan dan Perangkat daerah		100 % 100 %	10.583.104.173				100 %	13.874.254.999	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	10.306.175.823	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang/ bulan	13.569.023.149	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	206.926.500	Ujung Bulu, Loka Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	228.229.870	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	70.001.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	77.001.980	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100 % 1 Dokumen	74.729.150				1 Dokumen	81.432.450	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	74.729.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	81.432.450	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.		100 % 100 %	139.638.000				100 %	177.939.300	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	139.638.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	153.601.800	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	1 Orang	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Orang	24.337.500	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi umum Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 % 100 %	1.973.635.590				100 %	2.429.783.458	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	65.388.550	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	71.927.405	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	83.683.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	92.062.300	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Paket	133.267.190	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Paket	163.751.379	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	93.240.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	131.076.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	775.755.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	872.196.435	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	822.301.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	1.098.769.939	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- <i>Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan</i>		100 % 100 %	340.172.053				100 %	1.948.839.258	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	-	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Ujung Bulu, Loka	3 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Unit	984.459.355	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	23.944.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	85.219.200	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	56.902.090	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	65.882.234	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	69.177.463	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	595.602.329	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	190.148.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	217.676.140	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 % 100 %	2.119.236.001				100 %	2.331.159.601	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	867.622.460	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	954.384.706	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	-	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	1.251.613.541	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	1.376.774.895	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan -		100 % 100 %	1.161.154.800				100 %	2.244.772.607	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Loka - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	340.780.000	Ujung Bulu, Loka - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	374.858.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	24 Unit	353.760.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		24 Unit	321.046.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	-	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	395.900.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	1.448.780.432	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	2 Unit	70.714.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Unit	100.088.175	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.		100 % 100 %	774.875.641				100 %	889.863.200	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Orang/ Bulan	174.875.641	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Orang/ Bulan	192.363.200	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ujung Bulu, Bentengnge	2 Orang	-	Ujung Bulu, Bentengnge	DAU		2 Orang	37.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Orang/ Bulan	600.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Orang/ Bulan	660.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 % 100 %	1.612.889.350				100 %	1.776.055.105	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	100 Paket	918.305.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Paket	1.008.500.570	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Ujung Bulu, Kasimpureng	70 Paket	694.583.850	Ujung Bulu, Kasimpureng	DAU		70 Paket	767.554.535	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	- Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah		100 % 100 %	431.946.700				100 %	529.316.645	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	82.739.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	130.142.320	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	46.653.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	101.001.065	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	70.653.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	90.511.740	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	175.808.350	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	102.639.515	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	56.092.550	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	105.022.005	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.		100 % 100 %	389.363.050				100 %	484.807.895	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	167.512.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	200.270.345	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	78.947.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	127.343.920	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	142.903.050	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	157.193.630	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu		100 %	2.380.853.150				100%	2.709.783.015	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan.		100 %	398.273.650				100 %	476.033.360	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	73.519.100	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	87.701.955	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	110.256.350	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	124.923.040	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	214.498.200	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	263.408.365	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta Pengajian Rutin.		100 %	1.662.909.750				100 %	1.858.852.655	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	1.570.311.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	1.756.994.690	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	51.916.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	57.108.205	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	40.681.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	44.749.760	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananaya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perdan serta kajian produk hukum daerah.		5 Dokumen 100 %	319.669.750				5 Dokumen 100 %	374.897.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	117.806.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	129.587.260	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum										
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Ujung Bulu, Loka	1 Kasus	91.800.550	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Kasus	124.240.770	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum										
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	110.062.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	121.068.970	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.		100 %	531.993.200				100 %	652.247.365	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		100 % 4 Dokumen	254.202.900				100 % 4 Dokumen	250.167.390	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	129.574.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	145.073.335	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian										
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	101.244.050	Ujung Bulu, Loka	DAU, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		1 Laporan	79.371.765	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil										
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	23.384.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	25.722.290	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan sekertariat Daerah,jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitirin pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.		100 %	98.266.500				100 %	114.241.820	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	52.485.350	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	61.737.885	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	22.310.250	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	24.540.945	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	23.470.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	27.962.990	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa.		100 %	179.523.800				100 %	287.838.155	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	40.828.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	83.827.150	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	76.854.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	117.899.980	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Ujung Bulu, Loka	1 Orang	61.841.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Orang	86.111.025	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD KAB. BULUKUMBA				40.722.607.786					43.380.345.526	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.722.607.786					43.380.345.526	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				40.722.607.786					43.380.345.526	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)		100 %	30.817.597.886				100%	32.346.308.799	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu		100 %	35.838.350				100 %	41.764.686	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	5 Dokumen	14.007.050	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		5 Dokumen	17.689.062	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	13.499.900	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Laporan	14.384.453	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	10 Laporan	8.331.400	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	9.691.171	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan		100 %	3.464.775.026				100 %	4.318.648.826	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Bintarore	44 Orang/ bulan	3.326.965.426	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		44 Orang/ bulan	4.175.606.467	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	10 Dokumen	117.180.700	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Dokumen	119.625.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	11 Dokumen	7.842.300	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		11 Dokumen	8.630.559	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	1 Laporan	3.999.550	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Laporan	4.999.550	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ujung Bulu, Bintarore	2 Dokumen	8.787.050	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Dokumen	9.787.250	Sekretariat Dprd

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya		100 %	9.539.850				100 %	9.879.397	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	2 Laporan	9.539.850	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Laporan	9.879.397	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	512.769.800				100 %	557.688.880	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	400.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		85 Paket	440.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Bintarore	85 Orang	99.999.800	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		85 Orang	99.999.800	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Bintarore	44 Orang	12.770.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		44 Orang	17.689.080	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	979.823.020				100 %	1.084.707.070	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	15.060.640	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	17.015.570	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	5.762.700	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	6.231.500	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	527.999.680	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		1 Paket	628.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	40 Dokumen	25.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Dokumen	27.000.000	Sekretariat Dprd

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Bintarore	44 Laporan	406.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		44 Laporan	406.460.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	121.642.600				100 %	133.987.600	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3.850.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	4.850.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	7 Unit	17.792.600	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		7 Unit	19.137.600	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	10 Unit	100.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	110.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1.633.918.240				100 %	1.858.876.400	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ujung Bulu, Bintarore	10 Laporan	1.908.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Laporan	2.106.500	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	12 Laporan	419.939.040	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	554.398.700	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	19 Laporan	-	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		19 Laporan	1.100.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Bintarore	12 Laporan	1.212.071.200	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		12 Laporan	1.301.271.200	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	462.731.500				100 %	732.066.240	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Bintarore	4 Unit	33.885.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		4 Unit	200.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	83.220.000	Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		16 Unit	170.000.000	Sekretariat Dprd
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	83.220.000	Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		16 Unit	170.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	1.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	1.100.000	Sekretariat Dprd
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	1.100.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	2 Unit	150.019.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		2 Unit	155.076.120	Sekretariat Dprd

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	10 Unit	44.367.500	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	45.100.120	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	10 Unit	150.240.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		10 Unit	160.790.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	23.501.000.000				100 %	23.508.689.700	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	40 Orang/ Bulan	23.401.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Orang/ Bulan	23.401.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	40 Orang	100.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Orang	107.689.700	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD			95.559.500				-	100.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	4 Laporan	95.559.500	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		4 Laporan	100.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisir, "Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya		100 %	9.905.009.900				100 %	11.034.036.727	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya		100 %	790.337.600				100 %	884.894.637	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	20 Dokumen	200.311.300	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		19 Dokumen	218.488.387	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ujung Bulu, Bintarore	4 Dokumen	279.401.300	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		4 Dokumen	302.781.250	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Bintarore	20 Dokumen	110.625.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		19 Dokumen	113.625.000	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Ujung Bulu, Bintarore	4 Dokumen	200.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		4 Dokumen	250.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya		100 %	2.387.089.050				100 %	3.316.098.221	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	40 Dokumen	359.748.800	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Dokumen	625.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD										
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	200 Dokumen	1.325.154.450	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		200 Dokumen	1.960.485.992	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli										
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Ujung Bulu, Bintarore	5 Orang	37.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		5 Orang	36.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi										
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Ujung Bulu, Bintarore	8 Orang	336.000.000	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		8 Orang	336.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	40 Dokumen	329.185.800	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Dokumen	358.612.229	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	2.758.951.400				100 %	2.764.411.790	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	24.910.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		40 Laporan	27.537.813	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Ujung Bulu, Bintarore	40 Dokumen	32.563.300	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		40 Dokumen	35.382.344	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses										
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	2.701.478.100	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		120 Dokumen	2.701.491.633	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		100 %	3.968.631.850				100 %	4.068.632.079	Sekretariat Dprd
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ujung Bulu, Bintarore	200 Dokumen	3.968.631.850	Ujung Bulu, Bintarore	DAU		200 Dokumen	4.068.632.079	Sekretariat Dprd
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. BULUKUMBA				9.602.860.157					14.336.798.213	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.602.860.157					14.336.798.213	
5.01	PERENCANAAN				9.172.872.907					13.766.983.007	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)		100 %	6.993.862.007				100 %	10.022.066.391	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenntase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	214.093.850				100 %	407.250.062	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	11 Dokumen	123.229.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		8 Dokumen	182.804.662	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	15.639.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	55.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	8.357.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	55.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	14 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		14 Laporan	42.218.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	27 Laporan	66.867.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	71.127.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenntase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100 %	4.827.033.607				100 %	5.103.364.292	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	47 Orang/ bulan	4.670.518.057	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Orang/ bulan	4.824.843.466	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	131.225.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	222.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	9.289.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	16.665.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	17.435.826	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	15.999.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	22.220.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	92.116.050				100 %	499.116.750	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	27.775.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Loka	100 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Paket	111.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	7 Orang	42.355.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Orang	49.161.750	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Loka	50 Orang	49.761.050	Ujung Bulu, Loka	DAU		50 Orang	311.080.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan adminstrasi umum kantor		100 %	315.793.110				100 %	834.765.287	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	6.499.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	16.665.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	72.215.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	7.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	16.665.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	109.131.750	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	166.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	12.220.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	12.221.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	9.541.610	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	38.885.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	100 Laporan	171.400.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		98 Laporan	288.860.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ujung Bulu, Loka	50 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		60 Dokumen	83.325.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ujung Bulu, Loka	50 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		85 Dokumen	139.279.287	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	776.216.750				100 %	2.055.350.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	579.180.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	555.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	35.329.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		8 Unit	499.950.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	20.523.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	388.850.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	277.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Unit	120.987.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	222.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	3 Unit	20.196.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	111.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	638.776.140				100 %	555.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	123.016.140	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	166.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		0 Laporan	111.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	515.760.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	277.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	129.832.500				100 %	566.720.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	27.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	77.770.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	9 Unit	56.500.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Unit	166.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Loka	5 Unit	14.400.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	44.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	17.902.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	111.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	14.030.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	166.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD		100 %	1.266.735.950				100 %	1.513.351.898	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah		100 %	572.927.800				100 %	741.642.086	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	189.080.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		20 Dokumen	132.261.886	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik										
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Berita Acara	49.450.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	3 Berita Acara	100.000.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		1 Berita Acara	82.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Loka	1 Berita Acara	41.837.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Berita Acara	82.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan										
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Ujung Bulu, Loka	10 Usulan	30.154.150	Ujung Bulu, Loka	DAU		10 Usulan	86.880.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	162.405.800	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		1 Dokumen	302.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pemenuhan terhadap analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah		100 %	412.443.000				100 %	561.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	83.560.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		1 Dokumen	275.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah										
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Ujung Bulu, Loka	5 Orang	253.767.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		4 Orang	148.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Ujung Bulu, Loka	1 Buku	75.116.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		1 Buku	137.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100 %	281.365.150				100 %	210.709.812	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	281.365.150	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK, DAU		3 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	100.709.812	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan		100 %	912.274.950				100 %	2.231.564.718	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	memenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembanguan manusia		100 %	332.643.700				100 %	728.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	126.780.850	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		18 Dokumen	143.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	135.473.550	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		15 Dokumen	112.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	70.389.300	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		4 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	132.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Ujung Bulu, Loka	24 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		24 Laporan	66.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>pemenuhan terhadap dokumen pertencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>		100 %	264.687.150				100 %	700.364.718	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>	Ujung Bulu, Loka	21 Dokumen	37.324.100	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		29 Dokumen	149.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
		<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Ujung Bulu, Loka	7 Laporan	24.228.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		4 Laporan	132.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Ujung Bulu, Loka	28 Laporan	57.096.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		4 Laporan	89.831.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		24 Laporan	77.731.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	57.820.050	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		19 Dokumen	119.201.718	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ujung Bulu, Loka	16 Laporan	54.109.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Ujung Bulu, Loka	16 Laporan	34.110.000	Ujung Bulu, Loka	PAJAK ROKOK		24 Laporan	44.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100 %	314.944.100				100 %	803.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	161.387.100	Ujung Bulu, Loka	DAU		27 Dokumen	143.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ujung Bulu, Loka	5 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	82.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Ujung Bulu, Loka	30 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		23 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	153.557.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		27 Dokumen	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	82.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Ujung Bulu, Loka	31 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		31 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				429.987.250					569.815.206	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida		100 %	429.987.250				100 %	569.815.206	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	"Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan"		100 %	-				100 %	60.415.040	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan										
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	10.915.040	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan										
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Ujung Bulu, Loka	1 Rekomendasi	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Rekomendasi	22.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan										
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 %	89.272.300				100 %	104.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	89.272.300	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	38.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	38.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100 %	223.213.600				100 %	362.882.782	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	60.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	123.213.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	54.882.782	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	66.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	71.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	100.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100 %	117.501.350				100 %	42.017.384	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	117.501.350	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	27.735.968	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		100 Laporan	14.281.416	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULUKUMBA				201.885.312.379					227.272.474.594	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				201.885.312.379					227.272.474.594	
5.02	KEUANGAN				201.885.312.379					227.272.474.594	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)		100 %	18.007.423.004				100 %	19.924.307.534	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar		100 %	148.921.200				100 %	271.077.605	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	62.260.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	11.533.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	8.242.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Dokumen	12.582.438	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	6.531.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Laporan	4.400.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	60.353.400	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	143.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		100 %	14.560.526.473				100 %	14.157.657.814	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	14.247.434.823	Ujung Bulu, Loka	DAU		101 Orang/ bulan	13.612.831.266	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	22.749.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	110.309.027	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	280.568.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	415.053.782	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	5.773.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	8.463.739	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	2.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	5.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	1.999.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Dokumen	5.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar		100 %	75.870.450				100 %	199.776.974	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ujung Bulu, Loka	98 Dokumen	2.000.250	Ujung Bulu, Loka	DAU		57 Dokumen	8.943.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	5 Orang	62.580.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Orang	134.337.500	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Loka	5 Orang	3.000.200	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Orang	17.377.272	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Loka	5 Orang	8.290.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		11 Orang	39.119.202	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	676.316.590				100 %	1.193.429.031	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	13.150.450	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	20.833.781	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	23.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Paket	33.572.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	5.441.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	17.558.299	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	275.177.440	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Paket	417.836.870	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	186.862.800	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Paket	290.382.335	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	2.000.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	3.741.257	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	50.588.900	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	79.335.603	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	120.096.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	330.168.886	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor / barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	633.502.275				100 %	1.672.969.760	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	567.050.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	4 Unit	258.649.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Unit	440.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	25 Unit	40.460.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		75 Unit	190.436.045	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	9 Unit	288.132.675	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Unit	258.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	36.150.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	49.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	15 Unit	10.110.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		35 Unit	138.610.932	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	7 Unit	-	Ujung Bulu, Loka	DAU		7 Unit	28.872.783	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa administrasi perkantoran		95 %	1.727.984.516				95 %	1.907.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	288.364.516	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	407.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	1.439.620.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		95 %	184.301.500				95 %	522.396.350	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	13.500.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	52 Unit	118.800.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		52 Unit	197.801.170	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Ujung Bulu, Loka	5 Unit	1.501.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		5 Unit	44.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.080.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Unit	223.656.750	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Loka	24 Unit	25.420.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		24 Unit	23.938.430	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		95 %	181.834.768.175				95 %	203.876.170.456	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun		95 %	1.010.505.450				95 %	2.605.411.512	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	132.920.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	181.753.836	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	65.213.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	159.686.736	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	97.310.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	228.872.600	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	38.720.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	174.630.500	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	24.595.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	59.157.670	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	18.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	59.157.670	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	129.773.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	432.834.050	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	185.685.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	466.623.850	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	42.573.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	98.257.500	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	135.769.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	487.015.100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	77.785.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	93.665.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Orang	61.460.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		36 Orang	130.757.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah		95 %	389.588.300				95 %	1.115.607.284	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	137.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	25.819.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	78.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	120.835.450	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	225.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Dokumen	77.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	6.999.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	77.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	76.797.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Dokumen	256.577.145	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Orang	134.135.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Orang	164.930.139	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)		95 %	621.000.050				95 %	929.917.934	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	70.832.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	146.188.900	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	31.050.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	94.786.472	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	20.430.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	59.399.989	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	132.380.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	76.381.822	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Dokumen	116.364.050	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		55 Dokumen	124.136.122	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	24.049.982	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	72.376.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah										
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Orang	32.470.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		36 Orang	99.864.809	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota										
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	84.388.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga	49.005.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	53.305.626	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		95 %	179.651.949.375				95 %	198.943.432.426	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.530.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109 Laporan	169.900.144.461	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		109 Laporan	175.948.524.546	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.439.629.972	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109 Laporan	8.312.174.942	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		109 Laporan	9.464.907.880	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD		95 %	161.725.000				95 %	281.801.300	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	105.995.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	109.915.300	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Orang	55.730.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		36 Orang	171.886.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset		95 %	384.921.550				95 %	955.769.221	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik		95 %	384.921.550				95 %	955.769.221	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.184.500	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	109.858.111	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.970.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.839.659	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	12.570.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	129.577.965	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	85.561.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	99.963.853	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	13.196.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	146.949.594	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.992.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	42.581.803	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	21.427.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	41.771.422	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	96.726.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Dokumen	166.645.600	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	19.952.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	19.237.284	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	38.105.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Laporan	72.952.506	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521 Orang	20.277.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		521 Orang	60.891.424	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan		100 %	1.658.199.650				100 %	2.516.227.383	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah buku Standar Harga yang disusun		100 %	1.658.199.650				100 %	2.516.227.383	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.949.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	226.931.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	330.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	48.395.650	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	103.345.878	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	351.353.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	440.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	67.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	315.452.531	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	227.100.200	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	354.678.286	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10000 Obyek Pajak	186.641.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10000 Obyek Pajak	27.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	49.790.650	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	128.155.518	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Layanan	5.590.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Layanan	16.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.979.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.401.670	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	223.997.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	320.500.290	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	16.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	229.169.350	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	276.193.210	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BULUKUMBA				5.330.592.955					11.081.444.593	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.330.592.955					11.081.444.593	
5.03	KEPEGAWAIAN				5.239.107.955					7.584.423.593	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyusunan perencanaan,keuangan dan administrasi umum urusan pemerintahan daerah		100 %	4.364.145.605				100 %	5.417.423.593	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 Dok	44.428.500				19 Dokumen	96.042.980	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	6 Dokumen	39.531.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Dokumen	87.792.980	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	1.100.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	4.897.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	5.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.535.584.295				100 %	4.114.128.897	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	39 Orang/ bulan	3.449.544.295	Ujung Bulu, Caile	DAU		45 Orang/ bulan	4.018.384.897	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	86.040.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	94.644.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	1.100.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	-				100 %	44.550.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ujung Bulu, Caile	39 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		45 Paket	550.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	38 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Orang	22.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujung Bulu, Caile	39 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		39 Orang	22.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah		100 %	403.788.910				100 %	519.750.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	3.711.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	7.700.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	4.180.700	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Paket	5.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Paket	91.681.710	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	110.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	5.191.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	8.250.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	6 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		5 Dokumen	3.300.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	97 Laporan	201.024.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Laporan	275.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	98.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.789.900				100 %	221.827.716	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		0 Unit	133.827.716	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	11.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	2.789.900	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit	77.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	302.544.000				100 %	325.424.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	1.100.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	145.584.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	165.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	156.960.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	159.324.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik		100 %	75.010.000				100 %	95.700.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	23.850.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	44.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	11 Unit	42.920.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		11 Unit	33.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	24 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		24 Unit	2.200.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	25 Unit	8.240.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		25 Unit	5.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	11.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, Pengadaan Pegawai yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi Kepegawaian Satu data dengan Sistem yang lain, Meningkatkan Disiplin ASN, Pemberian insentif berdasarkan kinerja ASN		55 %	874.962.350				60 %	2.167.000.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase terlaksananya Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100 %	197.351.000				100 %	737.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Ujung Bulu, Caile	397 Dokumen	81.950.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		321 Dokumen	275.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Ujung Bulu, Caile	250 Dokumen	63.246.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		30 Dokumen	220.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	44.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Ujung Bulu, Caile	5853 Laporan	52.155.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		6031 Laporan	198.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan		100 %	415.520.350				100 %	825.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Ujung Bulu, Caile	868 Dokumen	189.427.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		866 Dokumen	550.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	226.093.350	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Dokumen	275.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis		100 %	48.115.000				100 %	374.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN										
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Ujung Bulu, Caile	200 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		200 Orang	27.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Ujung Bulu, Caile	50 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		50 Dokumen	165.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Ujung Bulu, Caile	12 Orang	48.115.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		35 Orang	165.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Ujung Bulu, Caile	50 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		50 Dokumen	16.500.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penilain dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 %	213.976.000				100 %	231.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Ujung Bulu, Caile	5853 Dokumen	56.710.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		5970 Dokumen	33.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Ujung Bulu, Caile	700 Orang	7.280.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		700 Orang	33.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	149.986.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		50 Laporan	165.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				91.485.000					3.497.021.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural,fungsional serta pelatihan teknis lainnya		72 %	91.485.000				80 %	3.497.021.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	PresentaseAparatur sipil Negara Yang Mengikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis/Fungsional		100 %	46.800.000				100 %	77.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Ujung Bulu, Caile	50 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Orang	22.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	46.800.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	55.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase Aparatur sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Struktural		100 %	44.685.000				100 %	3.420.021.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Ujung Bulu, Caile	200 Orang	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		200 Orang	22.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Ujung Bulu, Caile	200 Laporan	44.685.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		200 Laporan	3.398.021.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BULUKUMBA				12.171.473.210					15.458.686.003	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.171.473.210					15.458.686.003	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				9.912.849.210					13.163.483.920	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)		100 %	6.744.026.210				100 %	9.253.378.841	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	6.504.850				100 %	7.621.373	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Loka	6 Dokumen	6.504.850	Ujung Bulu, Loka	DAU		6 Dokumen	7.621.373	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan		100 %	4.820.696.720				100 %	6.311.602.924	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Loka	40 Orang/ bulan	4.731.998.020	Ujung Bulu, Loka	DAU		40 Orang/ bulan	6.173.243.373	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	85.109.950	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Dokumen	124.609.551	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	1.095.050	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Laporan	7.700.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Loka	17 Laporan	2.493.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		17 Laporan	6.050.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan		100 %	748.867.000				100 %	1.430.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Loka	60 Orang	748.867.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		60 Orang	1.430.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	554.079.190				100 %	685.141.689	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	1 Paket	2.321.910	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Paket	3.302.377	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	2 Paket	146.454.730	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Paket	153.839.312	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	4 Paket	46.003.550	Ujung Bulu, Loka	DAU		4 Paket	66.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Loka	102 Laporan	359.299.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		102 Laporan	462.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	243.647.350				100 %	125.595.575	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	3 Unit	26.140.650	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Unit	66.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	11 Unit	217.506.700	Ujung Bulu, Loka	DAU		11 Unit	59.595.575	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor		100 %	187.512.100				100 %	235.038.200	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	51.684.600	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	68.591.889	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	135.827.500	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 Laporan	166.446.311	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100 %	182.719.000				100 %	458.379.080	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Loka	1 Unit	17.859.375	Ujung Bulu, Loka	DAU		1 Unit	51.416.530	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Loka	13 Unit	120.415.625	Ujung Bulu, Loka	DAU		13 Unit	210.790.137	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Loka	18 Unit	12.340.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		18 Unit	20.973.693	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	1 Unit	32.104.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Unit	175.198.720	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai		57 %	3.168.823.000				55 %	3.910.105.079	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		100 % 100 %	3.168.823.000				100 %	3.910.105.079	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	333.063.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		14 Laporan	543.308.990	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.243.560.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	1.819.331.005	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja										
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	240.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Laporan	223.045.900	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan										
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	413.120.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		25 Laporan	460.581.484	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	381.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		8 Laporan	434.837.700	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	557.380.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	429.000.000	Inspektorat Daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				2.258.624.000					2.295.202.083	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		100 %	307.200.000				100 %	605.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Ujung Bulu, Loka	20 Laporan	307.200.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		20 Laporan	605.000.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persenatse Tindak Lanjut Temuan		60 %	1.951.424.000				65 %	1.690.202.083	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan		100 %	230.005.000				100 %	225.383.554	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Ujung Bulu, Loka	2 Rekomendasi	230.005.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		2 Rekomendasi	225.383.554	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah		100 %	1.721.419.000				100 %	1.464.818.529	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Ujung Bulu, Loka	36 perangkat daerah	150.330.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		36 perangkat daerah	110.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Ujung Bulu, Loka	12 perangkat daerah	127.180.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		12 perangkat daerah	174.520.720	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Ujung Bulu, Loka	3 Kegiatan	1.394.947.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		3 Kegiatan	913.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Ujung Bulu, Loka	36 perangkat daerah	48.962.000	Ujung Bulu, Loka	DAU		36 perangkat daerah	267.297.809	Inspektorat Daerah
	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU				11.604.419.570					19.765.094.011	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				11.604.419.570					19.765.094.011	
7.01	KECAMATAN				11.604.419.570					19.765.094.011	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNGBULU)		100 %	7.971.862.640				100 %	10.206.576.063	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		12 Bulan 100 %	6.860.628.235				100 %	8.696.445.399	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	6.527.358.235	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	8.332.164.427	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	333.270.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	359.313.680	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	4.967.292	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kepegawaian perangkat daerah terlaksana Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 % 100 %	66.874.000				100 %	99.000.000	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	4 Orang	66.874.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		4 Orang	99.000.000	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum kantor terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 % 12 Bulan	383.179.450				100 %	393.954.547	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Paket	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	44.000.000	Kantor Kecamatan Ujungbulu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.059.750	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	18.661.817	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Paket	65.522.500	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	44.000.000	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Paket	18.571.200	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	24.555.885	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	74.970.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	110.033.842	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	219.056.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	152.703.003	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100 % 12 Bulan	207.048.005				100 %	219.056.599	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	-	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	66.000.000	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	84.234.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	55.305.800	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	122.814.005	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	97.750.799	Kantor Kecamatan Ujungbulu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 Bulan 100 %	386.609.950				100 %	697.128.452	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.880.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	21.236.600	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	117.609.950	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	110.817.452	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	264.120.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	565.074.400	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		100 % 12 Bulan	67.523.000				100 %	100.991.066	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	15.672.500	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	35.297.350	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	38.810.000	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	43.629.729	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	12 Unit	13.040.500	Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	22.063.987	Kantor Kecamatan Ujungbulu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNGBULU)		100 %	3.632.556.930				100 %	9.558.517.948	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan		100 % 100 %	3.632.556.930				100 %	9.558.517.948	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.031.614.600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	6.963.136.334	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	2.600.942.330	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Pokmas / Ormas	2.595.381.614	Kantor Kecamatan Ujungbulu
	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE				3.052.770.954					4.408.105.236	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.052.770.954					4.408.105.236	
7.01	KECAMATAN				3.052.770.954					4.408.105.236	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNG LOE)		100 %	2.631.771.154				100 %	3.430.558.761	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	2.301.637.282				100 %	3.011.619.671	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujungloe, Dannuang	12 Orang/ bulan	2.247.937.282	Ujungloe, Dannuang	DAU		100 Orang/ bulan	2.943.181.486	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ujungloe, Dannuang	12 Dokumen	53.700.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		100 Dokumen	68.438.185	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	111.163.400				100 %	208.290.153	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	5 Paket	19.950.200	Ujungloe, Dannuang	DAU		6 Paket	26.876.300	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	1 Paket	1.115.800	Ujungloe, Dannuang	DAU		1 Paket	11.550.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	12 Paket	20.543.950	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Paket	24.530.035	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	12 Paket	2.699.600	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Paket	4.928.097	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujungloe, Dannuang	12 Laporan	26.945.850	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Laporan	42.900.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujungloe, Dannuang	12 Laporan	39.908.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Laporan	97.505.721	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara		100 %	28.513.600				100 %	12.463.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	0 Unit	23.513.600	Ujungloe, Dannuang	DAU		0 Unit	-	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	8 Unit	5.000.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		8 Unit	12.463.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	143.486.872				100 %	157.663.286	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	12 Laporan	20.986.872	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Laporan	25.605.385	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	5 Laporan	6.820.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		5 Laporan	4.457.901	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujungloe, Dannuang	12 Laporan	115.680.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		12 Laporan	127.600.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	46.970.000				100 %	40.522.651	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujungloe, Dannuang	1 Unit	11.000.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		1 Unit	12.253.395	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujungloe, Dannuang	3 Unit	4.600.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		5 Unit	7.702.134	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujungloe, Dannuang	5 Unit	3.370.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		10 Unit	4.387.882	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujungloe, Dannuang	1 Unit	28.000.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		1 Unit	16.179.240	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNG LOE)		100 %	420.999.800				100 %	968.210.555	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan		100 %	420.999.800				100 %	968.210.555	Kantor Kecamatan Ujung Loe

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Ujungloe, Dannuang	1 Lembaga K emasyarak at an	20.999.800	Ujungloe, Dannuang	DAU		1 Lembaga K emasyarak at an	51.700.000	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ujungloe, Dannuang	8 Unit	156.200.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		13 Unit	647.288.192	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ujungloe, Dannuang	1 Pokmas / Ormas	243.800.000	Ujungloe, Dannuang	DAU		1 Pokmas / Ormas	269.222.363	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (UJUNG LOE)		100 %	-				100 %	9.335.920	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang melakukan koordinasi dan asistensi APBDesa di kecamatan Persentase pemenuhan asistensi APBDesa		100 % 100 %	-				100 %	9.335.920	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa										
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ujungloe, Dannuang	2 Dokumen	-	Ujungloe, Dannuang	DAU		2 Dokumen	9.335.920	Kantor Kecamatan Ujung Loe
	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA				5.037.565.920					7.450.252.787	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.037.565.920					7.450.252.787	
7.01	KECAMATAN				5.037.565.920					7.450.252.787	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BULUKUMPA)		100 %	3.837.566.671				100 %	5.048.014.787	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	56.184.850				100 %	55.726.110	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	56.184.850	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	55.726.110	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2.977.192.514				100 %	4.430.143.887	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	37 Orang/ bulan	2.921.005.014	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		37 Orang/ bulan	4.380.308.887	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	56.187.500	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	49.835.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	29.491.760				100 %	29.928.536	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.491.760	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	29.928.536	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	339.323.635				100 %	201.870.592	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.535.955	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	6.367.725	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	5 Paket	85.683.250	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		5 Paket	35.166.174	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	4 Paket	9.119.130	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	7.717.500	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	4 Paket	56.414.850	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	57.166.593	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	4 Paket	18.028.850	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	5.070.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	69.921.600	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	22.748.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	325 Laporan	93.620.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		325 Laporan	67.634.600	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	203.515.144				100 %	105.781.504	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	2 Unit	133.861.144	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	48.575.646	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	6 Unit	24.874.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	30.316.999	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	5 Unit	44.780.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	26.888.859	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	176.603.608				100 %	170.554.301	Kantor Kecamatan Bulukumpa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	35.643.608	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	35.294.301	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.000.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	7.100.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	12 Laporan	132.960.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	128.160.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	55.255.160				100 %	54.009.857	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.500.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	1.540.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	10 Unit	14.610.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	7.830.900	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	4 Unit	39.145.160	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	44.638.957	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BULUKUMPA)		100 %	1.199.999.249				100 %	2.402.238.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	1.199.999.249				100 %	2.402.238.000	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	15 Unit	554.823.249	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	1.681.566.600	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	19 Pokmas / Ormas	645.176.000	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		19 Pokmas / Ormas	720.671.400	Kantor Kecamatan Bulukumpa
	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE				3.644.655.392					5.728.312.903	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.644.655.392					5.728.312.903	
7.01	KECAMATAN				3.644.655.392					5.728.312.903	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (RILAU ALE)		100 %	3.244.655.392				100 %	4.846.378.358	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		100 %	2.960.988.880				100 %	4.613.403.064	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rilauale, Semua Kel/Desa	39 Orang/ bulan	2.863.680.130	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		39 Orang/ bulan	4.383.867.785	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rilauale, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	96.285.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	228.555.846	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rilauale, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.023.750	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	979.433	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan		100 %	-				100 %	1.100.945	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rilauale, Semua Kel/Desa	2 Orang	-	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	1.100.945	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menunjang Administrasi umum perangkat Daerah		100 %	156.994.090				100 %	123.745.192	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	18 Paket	5.283.670	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		18 Paket	7.776.486	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	15 Paket	30.609.320	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		15 Paket	36.007.400	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	2 Paket	3.155.100	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	3.031.379	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rilauale, Semua Kel/Desa	10 Laporan	51.780.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		10 Laporan	66.063.232	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rilauale, Semua Kel/Desa	341 Laporan	66.166.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		341 Laporan	10.866.695	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah		100 %	49.558.700				100 %	19.347.281	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	1 Unit	24.458.500	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	1.103.945	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.700.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	11.390.513	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	3 Unit	15.696.350	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	3.103.602	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	2 Unit	7.703.850	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	3.749.221	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 %	58.137.962				100 %	53.276.129	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	12 Laporan	14.817.962	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	17.033.293	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	2.824.486	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rilauale, Semua Kel/Desa	12 Laporan	43.320.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	33.418.350	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah		100 %	18.975.760				100 %	35.505.747	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rilauale, Semua Kel/Desa	2 Unit	18.975.760	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	14.513.274	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	7.522.650	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rilauale, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	13.469.823	Kantor Kecamatan Rilau Ale

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (RILAU ALE))		100 %	-				100 %	1.113.945	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana		100 %	-				100 %	1.113.945	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rilauale, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	1.113.945	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (RILAU ALE)		100 %	400.000.000				100 %	880.820.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan		100 %	400.000.000				100 %	880.820.600	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rilauale, Semua Kel/Desa	5 Unit	174.402.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	597.020.600	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rilauale, Semua Kel/Desa	6 Pokmas / Ormas	225.598.000	Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU		6 Pokmas / Ormas	283.800.000	Kantor Kecamatan Rilau Ale
	KANTOR KECAMATAN GANTARANG				5.371.691.752					8.941.199.320	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.371.691.752					8.941.199.320	
7.01	KECAMATAN				5.371.691.752					8.941.199.320	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Gantarang)		100 Persen	4.171.563.202				100 Persen	6.113.453.630	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 Persen	3.655.636.988				100 Persen	5.457.152.580	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gantorang, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	3.530.312.988	Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/ bulan	5.248.936.550	Kantor Kecamatan Gantarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gantorang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	120.220.000	Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	202.460.500	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.104.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	5.755.530	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN		100 Persen	-				100 Persen	27.500.000	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	27.500.000	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	274.193.680				100 Persen	295.974.374	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	9.177.750	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Paket	10.188.530	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Jenis Paket	137.840.930	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		26 Jenis Paket	148.269.564	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	14.550.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		15 Paket	16.108.400	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349 Laporan	112.625.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		349 Laporan	121.407.880	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	60.578.950				100 Persen	56.874.895	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	15.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	17.363.500	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	34.928.950	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	27.258.000	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	10.350.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	12.253.395	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang		100 Persen	157.207.824				100 Persen	250.738.112	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	37.207.824	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	40.913.310	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	120.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	209.824.802	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 Persen	23.945.760				100 Persen	25.213.669	Kantor Kecamatan Gantarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	15.015.760	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	17.931.651	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	8.930.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	7.282.018	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (Ujung Loe) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana		0 Persen 100 Persen	-				100 Persen 100 Persen	24.359.500	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	-				100 Persen	24.359.500	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	24.359.500	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Gantarang)		100 Persen	1.200.128.550				100 Persen 100 Persen	2.803.386.190	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100 Persen	1.200.128.550				100 Persen	2.803.386.190	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	641.528.550	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	2.193.438.500	Kantor Kecamatan Gantarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	558.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		12 Pokmas / Ormas	609.947.690	Kantor Kecamatan Gantarang
	KANTOR KECAMATAN KINDANG				2.293.812.300					200.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.293.812.300					200.000.000	
7.01	KECAMATAN				2.293.812.300					200.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)		100 Persen	1.893.812.300				100 Persen	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya pengatministrasian aparatur pemerintah		100 Persen	1.683.156.910				100 Persen	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kindang, Semua Kel/Desa	19 Orang/ bulan	1.623.666.910	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		19 Orang/ bulan	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kindang, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	59.490.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		20 Dokumen	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	89.928.940				100 %	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	3 Paket	-	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	20 Paket	42.002.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		20 Paket	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	20 Paket	2.583.900	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		20 Paket	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kindang, Semua Kel/Desa	100 Laporan	45.343.040	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		100 Laporan	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan aparat		100 %	21.819.850				100 %	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	3 Unit	-	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	5 Unit	21.819.850	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang di kindang		100 %	77.520.000				100 %	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	24 Laporan	10.980.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		24 Laporan	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kindang, Semua Kel/Desa	24 Laporan	66.540.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		24 Laporan	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah		100 %	21.386.600				100 %	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kindang, Semua Kel/Desa	7 Unit	21.386.600	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	-	Kantor Kecamatan Kindang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)		100 Persen	400.000.000				100 Persen	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	diberdayakannya masyarakat di kelurahan		100 %	400.000.000				100 %	200.000.000	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kindang, Semua Kel/Desa	6 Unit	230.000.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	-	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kindang, Semua Kel/Desa	5 Pokmas / Ormas	170.000.000	Kindang, Semua Kel/Desa	DAU		5 Pokmas / Ormas	200.000.000	Kantor Kecamatan Kindang
	KANTOR KECAMATAN HERLANG				2.946.396.506					5.109.998.306	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.946.396.506					5.109.998.306	
7.01	KECAMATAN				2.946.396.506					5.109.998.306	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (HERLANG)		100 %	2.149.761.506				100 %	3.341.899.769	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan perangkat Daerah		100 %	1.950.018.200				100 %	2.828.686.519	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Herlang, Tanuntung	23 Orang/ bulan	1.851.438.200	Herlang, Tanuntung	DAU		23 Orang/ bulan	2.723.623.561	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Herlang, Tanuntung	12 Dokumen	98.580.000	Herlang, Tanuntung	DAU		12 Dokumen	105.062.958	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah		100 %	97.623.110				100 %	251.833.901	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	100 Paket	45.421.410	Herlang, Tanuntung	DAU		100 Paket	138.609.254	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	100 Paket	3.500.700	Herlang, Tanuntung	DAU		100 Paket	5.598.201	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Herlang, Tanuntung	100 Laporan	48.701.000	Herlang, Tanuntung	DAU		100 Laporan	107.626.446	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	5.585.000				100 %	104.248.027	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	1 Unit	-	Herlang, Tanuntung	DAU		1 Unit	29.452.500	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	3 Unit	-	Herlang, Tanuntung	DAU		3 Unit	27.222.727	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	5 Unit	5.585.000	Herlang, Tanuntung	DAU		5 Unit	47.572.800	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	91.613.406				100 %	116.820.811	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	12 Laporan	14.213.406	Herlang, Tanuntung	DAU		12 Laporan	12.050.695	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	1 Laporan	-	Herlang, Tanuntung	DAU		1 Laporan	5.890.500	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Herlang, Tanuntung	12 Laporan	77.400.000	Herlang, Tanuntung	DAU		12 Laporan	98.879.616	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.921.790				100 %	40.310.511	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Herlang, Tanuntung	4 Unit	4.921.790	Herlang, Tanuntung	DAU		4 Unit	23.344.076	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Herlang, Tanuntung	3 Unit	-	Herlang, Tanuntung	DAU		3 Unit	16.966.435	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (HERLANG)		100 %	796.635.000				100 %	1.768.098.537	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	796.635.000				100 Persen	1.768.098.537	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Herlang, Tanuntung	6 Unit	400.635.000	Herlang, Tanuntung	DAU		6 Unit	1.443.585.538	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Herlang, Tanuntung	12 Pokmas / Ormas	396.000.000	Herlang, Tanuntung	DAU		12 Pokmas / Ormas	324.512.999	Kantor Kecamatan Herlang
	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO				2.943.666.764					5.944.514.210	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.943.666.764					5.944.514.210	
7.01	KECAMATAN				2.943.666.764					5.944.514.210	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO TIRO)		100 %	2.543.666.764				100 %	5.063.693.610	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	2.229.339.916				95 %	4.540.313.401	Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	35 Orang/ bulan	2.165.259.916	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		35 Orang/ bulan	3.464.750.836	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	64.080.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		50 Dokumen	1.075.562.565	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN		100 %	-				100 %	22.125.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	1 Orang	-	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	22.125.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 %	129.838.350				100 %	156.117.100	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	50 Paket	26.158.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		50 Paket	22.140.969	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	25 Paket	3.150.350	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		25 Paket	4.522.345	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	25 Laporan	34.860.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		25 Laporan	50.935.500	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	75 Laporan	65.670.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		75 Laporan	78.518.286	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	28.518.850				100 %	90.676.453	Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	45.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	5 Unit	-	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	16.500.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	3 Unit	28.518.850	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	20.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	9.176.453	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang		100 %	137.761.388				100 %	194.976.188	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	36 Laporan	26.161.388	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		36 Laporan	26.161.388	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	24 Laporan	111.600.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		24 Laporan	168.814.800	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	18.208.260				100 %	59.485.468	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	7 Unit	11.798.260	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	28.433.845	Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	9 Unit	6.410.000	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		9 Unit	6.051.623	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	25.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO TIRO)		100 %	400.000.000				100 %	880.820.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100 %	400.000.000				100 %	880.820.600	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bonto Tiro, Eka Tiro	1 Unit	127.600.000	Bonto Tiro, Eka Tiro	DAU		1 Unit	498.020.600	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bonto Tiro, Eka Tiro	4 Pokmas / Ormas	272.400.000	Bonto Tiro, Eka Tiro	DAU		4 Pokmas / Ormas	382.800.000	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI				5.616.814.800					9.314.729.071	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.616.814.800					9.314.729.071	
7.01	KECAMATAN				5.616.814.800					9.314.729.071	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO BAHARI)		100 %	4.025.814.800				100 %	5.624.729.071	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bulan dan 43 ASN		100 Persen 12 Bulan	3.597.995.996				12 Bulan	4.642.957.806	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	43 Orang/ bulan	3.468.845.996	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		43 Orang/ bulan	4.402.379.556	Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	43 Dokumen	129.150.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		43 Dokumen	240.578.250	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kecamatan bonto bahari		100 %	-				100 %	66.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	2 Orang	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		2 Orang	66.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi 27 Paket dan 36 Laporan		100 persen 100 Persen	203.162.340				100 Persen	349.914.745	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	600 Paket	113.859.540	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		600 Paket	165.578.450	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	20000 Paket	10.166.800	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		20000 Paket	18.700.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	400 Laporan	79.136.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		400 Laporan	165.636.295	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Persen 100 Persen	-				100 Persen	135.079.250	Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	1 Unit	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		1 Unit		Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	10 Unit	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		10 Unit		Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	8 Unit	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		8 Unit		Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	10 Unit	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		10 Unit		Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan 12 Bulan	203.301.564				12 Bulan	261.910.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	72 Laporan	31.101.564	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		72 Laporan	55.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	12 Laporan	172.200.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		12 Laporan	206.910.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [deleted]		100 Persen 100 Persen	21.354.900				100 Persen	168.867.270	Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	5 Unit	9.094.900	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		5 Unit	14.867.270	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	1 Unit	-	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		1 Unit	110.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	0 Unit	12.260.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		0 Unit	44.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI) Meningkatnya Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan		100 %	1.591.000.000				100 %	3.690.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2021 Unit dan 2021 Pokmas / Ormas Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 Persen 100 Persen	1.591.000.000				100 Persen	3.690.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	41 Unit	800.000.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		41 Unit	2.750.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	200 Pokmas / Ormas	791.000.000	Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU		200 Pokmas / Ormas	940.000.000	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
	KANTOR KECAMATAN KAJANG				3.820.582.743					6.489.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.820.582.743					6.489.000.000	
7.01	KECAMATAN				3.820.582.743					6.489.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (KAJANG)		100 %	3.083.582.743				100 %	4.839.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan terbayarnya Honorarium PNS		100 %	2.943.239.550				100 %	3.930.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kajang, Semua Kel/Desa	36 Orang/ bulan	2.701.829.550	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		36 Orang/ bulan	3.500.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kajang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	241.410.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	430.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya sumber daya aparatur kecmatan kajang		100 Persen	22.125.000				100 Persen	70.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kajang, Semua Kel/Desa	3 Orang	22.125.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Orang	70.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan minuman serta terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi		100 %	83.832.500				100 %	328.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	3 Paket	17.467.500	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	100.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	3 Paket	-	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	18.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kajang, Semua Kel/Desa	3 Laporan	29.400.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	110.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kajang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36.965.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	100.000.000	Kantor Kecamatan Kajang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebeler Kantor dan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	16.231.250				100 %	355.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	20 Unit	-	Kajang, Semua Kel/Desa	-		20 Unit	75.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	20 Unit	11.981.250	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	160.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	20 Unit	4.250.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	120.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran,terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta terbayarnya jasa pelayanan umum kantor		100 %	6.382.683				100 %	16.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kajang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.382.683	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	16.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan biaya , pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas serta tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	11.771.760				100 %	140.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kajang, Semua Kel/Desa	14 Unit	11.771.760	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		14 Unit	55.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kajang, Semua Kel/Desa	10 Unit	-	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	20.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kajang, Semua Kel/Desa	3 Unit	-	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	65.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KAJANG)		100 %	737.000.000				100 %	1.650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan		100 %	737.000.000				100 %	1.650.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kajang, Semua Kel/Desa	2 Unit	555.200.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	1.500.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kajang, Semua Kel/Desa	2 Pokmas / Ormas	181.800.000	Kajang, Semua Kel/Desa	DAU		2 Pokmas / Ormas	150.000.000	Kantor Kecamatan Kajang
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				34.897.515.470					38.810.653.769	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				34.897.515.470					38.810.653.769	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				34.897.515.470					38.810.653.769	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)		100 %	2.122.738.004				1	2.999.730.053	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 Persen	57.890.000				100 Persen	28.902.060	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	32.361.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	18.012.060	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	8.350.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	4.535.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	6.529.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	6.115.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ujung Bulu, Caile	4 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Laporan	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpoenuhan dokumen laporan administrasi dan keuangan perangkat daerah		100 Persen	1.642.755.557				100 Persen	2.183.942.660	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ujung Bulu, Caile	14 Orang/ bulan	1.570.640.557	Ujung Bulu, Caile	DAU		14 Orang/ bulan	2.106.744.660	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Dokumen	63.120.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Dokumen	73.568.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	5.865.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Laporan	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ujung Bulu, Caile	18 Laporan	3.130.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		18 Laporan	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik		100 Persen	10.040.000				100 Persen	10.623.800	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Dokumen	1.815.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	2 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Laporan	2.420.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	10.040.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	6.388.800	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya administrasi kepegawaian badan kesatuan bangsa dan politik		100 Persen	20.230.000				100 Persen	73.810.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ujung Bulu, Caile	2 Orang	20.230.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Orang	73.810.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	147.501.875				100 Persen	363.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	2.769.450	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	30.250.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	2.751.200	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	27.487.100	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	36.300.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	1 Paket	10.031.250	Ujung Bulu, Caile	DAU		1 Paket	12.100.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	13.418.875	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	36.300.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	91.044.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	242.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		100 Persen	76.208.950				100 Persen		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	40.965.100	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	6 Unit	7.500.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		6 Unit		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	27.743.850	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	2 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		2 Unit		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase terpenuhinya unsur penunjang gedung kantor		100 Persen	112.182.500				100 Persen	179.126.533	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	19.182.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	25.676.533	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	18.150.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	93.000.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	135.300.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 Persen	55.929.122				100 Persen	63.525.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ujung Bulu, Caile	4 Unit	45.779.122	Ujung Bulu, Caile	DAU		4 Unit	36.300.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ujung Bulu, Caile	3 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		3 Unit	9.075.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ujung Bulu, Caile	25 Unit	10.150.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		25 Unit	12.100.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ujung Bulu, Caile	25 Unit	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		25 Unit	6.050.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi		100 %	358.460.420				100 %	124.025.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penyuluhan Seminar dan Sosialisasi		100 Persen	358.460.420				100 Persen	124.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Ujung Bulu, Caile	100 Dokumen	358.460.420	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Dokumen	121.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat		75 %	32.103.061.546				75 %	34.842.698.847	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat		100 Persen	32.103.061.546				100 Persen	34.842.698.847	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ujung Bulu, Caile	150 Orang	32.103.061.546	Ujung Bulu, Caile	DAU		150 Orang	34.839.673.847	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi		85 %	48.615.000				85 %	575.025.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan di awasi		100 Persen	48.615.000				100 Persen	575.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ujung Bulu, Caile	50 Orang	48.615.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Orang	572.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi		75 %	101.050.000				75 %	145.149.869	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kerukunan umat beragama dan kasus intoleransi yang terjadi		100 Persen	101.050.000				100 Persen	145.149.869	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ujung Bulu, Caile	100 Orang	101.050.000	Ujung Bulu, Caile	DAU		100 Orang	121.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	24.149.869	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah		15 %	163.590.500				15 %	124.025.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di daerah		100 Persen	163.590.500				100 Persen	124.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ujung Bulu, Caile	50 Orang	163.590.500	Ujung Bulu, Caile	DAU		150 Orang	121.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	-	Ujung Bulu, Caile	DAU		12 Laporan	3.025.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
JUMLAH					1.555.095.998.416					1.942.202.168.911	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indicator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2. Tingkat Kemiskinan
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 4. Pertumbuhan Ekonomi
- 5. PDRB Perkapita ADHB
- 6. Gini Ratio
- 7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	70,61	71,09	71,69
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,39	5,99	6,70
	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	31.290	27.063	26.152
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,26	2,91	2,50
	Jumlah Penganggur	Orang	2.698	3.540	2.675
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,81	5,19-6,01	5,15
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	38,55	40,92	42,85
6	Gini Ratio	Angka	0,361	0,355	0,350
7	Penurunan Emisi GRK	Gg Co2-Eq	462.952,25	462.026,34	462.026,34

Sumber : BPS, DLHK , Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2023, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70	71	71
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (59,46)	CC	B
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a	3,526	3,5415
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,26-4,00	3,26-4,00
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,42	22,28	22,04
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	3,81	4,37	8,14
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,57	13,21	13,55
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-0,31	6,75	7,66
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,34	71,09	71,69
11	Indeks Pendidikan	Angka	63,98	65,13	66,21
12	Indeks Kesehatan	Angka	74,63	75,62	76,36
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,51	69,15	69,63
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	4,47	3,05	3,26
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	22,48	6,11	6,76
16	Gini Ratio	Angka	0,361	0,349	0,350
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	80	90	92
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,12	24,91	25,36
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	6,68	10,84	10,63
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	68,86	58,38	59,94
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	27	27
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,76	0,78
23	Persentase Desa Mandiri	%	1,83	2,75	4,59
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	58,46	89,11	89,66

Sumber : Bappelitbang Kab. Bulukumba 2023, diolah

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disa

Tabel VI-3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			INDIKATOR KIERJA KUNCI (IKK)					
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1			Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,81	4,25	5,15	
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.357,11	9.065,34	9.267,01	
1	1	3	Laju inflasi	%	4,12	2,55	2,41	
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	38,88	40,92	45,04	
1	1	5	Gini Ratio	%	0,361	0,368	0,35	
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,39	5,99	6,05	
1			Kesejahteraan sosial					
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,34	70,61	71,69	
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	68,51	69,33	70,47	
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,42	14,28	15,37	
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,01	7,89	7,91	
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Juta Rupiah	10,94	10.657	10.725	
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,27	71,50	74,19	
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,26	2,91	2,50	
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,03	Dinas Kesehatan
1			Seni Budaya Dan Olahraga					
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	8	Disparpora
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	3,37	3,85	Disparpora
2			ASPEK PELAYANAN UMUM					
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
			SD	%	113,27	114,54	115,19	Disdikbud
			SMP	%	86,46	97,14	101,72	Disdikbud
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)					

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			SD	%	99,55	98,69	98,72	Disdikbud
			SMP	%	83,05	84,85	85,50	Disdikbud
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
			7-12 Tahun	%	99,55	98,87	98,87	Disdikbud
			14-15 Tahun	%	92,72	92,24	92,21	Disdikbud
			16-18 Tahun	%	74,39	75,85	76,31	Disdikbud
2	1	4	Angka Putus Sekolah					
			SD	%	0,57	0,00	0,00	Disdikbud
			SMP	%	0,15	0,00	0,00	Disdikbud
2	1	5	Angka Kelulusan					
			SD	%	99,55	100	100	Disdikbud
			SMP	%	92,72	100	100	Disdikbud
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	98,68	100	100	Disdikbud
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	85,15	1:8	1:6	Disdikbud
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:13	1:7	1:6	Disdikbud
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	1:9	91,53	91,47	Disdikbud
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		5,24	4,57	3,78	Dinas Kesehatan
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		9,99	9,94	9,84	Dinas Kesehatan
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
2	2	4	Angka Kematian Ibu		137,99	46,71	35,47	Dinas Kesehatan
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		22,65	29,92	35,49	Dinas Kesehatan
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,17	0,19	0,19	Dinas Kesehatan
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,004	0,002	0,002	Dinas Kesehatan
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	0,04	Dinas Kesehatan
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,25	0,095	0,096	Dinas Kesehatan
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,33	0,242	0,258	Dinas Kesehatan
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90,44	86,30	88,59	Dinas Kesehatan
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	64	41,3	35,6	Dinas Kesehatan

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	<i>Per 1000 Penduduk</i>	165,31	93,82	78,81	Dinas Kesehatan
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	<i>Per 1000 Penduduk</i>	8,41	2,56	1,22	Dinas Kesehatan
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	<i>Per 1000 Penduduk</i>	4,96	0,24	0	Dinas Kesehatan
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	13,79	0,005	0	Dinas Kesehatan
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	8,27	10,40	15,97	Dinas Kesehatan
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	70,21	73,17	72,53	Dinas Kesehatan
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	52,65	50,43	46,71	Dinas Kesehatan
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	85,68	89,19	95,37	Dinas Kesehatan
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,890	0,699	0,880	Dinas PUPR
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0030	0,0031	0,0029	Dinas PUPR
2	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	%	98,97	100	100	Dinas PUPR
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	81,16	81,70	83,52	Dinas PUPR
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,49	0,19	0,18	Dinas PUPR
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,434	0,249	0,251	DPKPP
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	58,83	74,46	80,25	DPKPP
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9,41	12,15	13,06	DPKPP
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,54	94,08	94,62	DPKPP
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	64,60	84,74	87,08	DPKPP
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,48	84,96	85,07	DPKPP
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	12,02	0,00	0,00	DPKPP
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		0,42	20,44	59,46	DPKPP

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
6	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,30	0,31	0,30	Satpol PP, PP
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	100	Satpol PP, PP
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00271	0,00305	0,00309	Satpol PP, PP
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100	Satpol PP, PP
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	Satpol PP, PP
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit		12	12	Dinas Sosial
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100	Dinas Sosial
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100,00	99,69	100	Dinas Sosial
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	57,53	65,25	54,15	Dinas Sosial
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	91,82	92,08	Dinas Sosial
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	97,23	81,32	78,96	Dinas Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	23,26	0,00	0,00	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,0	0,02	0,00	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	97,30	3,92	6,95	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	66,47	2,09	2,36	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,24	0,23	0,21	PMPTSP dan Tenaga Keja

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,06	0,05	0,03	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	91,43	0,79	0,87	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	741,80	762,88	798,09	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		43,21	86,22	99,40	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		100	1,05	1,13	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47	0,47	0,51	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,40	4,3	4,2	Dinas PPKB & P3A
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,50	26,36	32,15	Dinas PPKB & P3A
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	96,00	84,52	86,04	Dinas PPKB & P3A
2	2	4	Rasio KDRT		0,034	0,002	0,001	Dinas PPKB & P3A
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,00			Dinas PPKB & P3A
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	8,06	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama		100	465,15	507,44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)		17.766,98	13.353,36	24.676,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	3	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)		919,76	404,03	1.031,60	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)		90	83,09	90,95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	28,06	31,18	DPKPP
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	20,00	88,05	100,00	DPKPP
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,31	63,45	64,53	DLHK
2	5	2	Indeks Kualitas Air	Poin	55,00	58,95	59,15	DLHK
2	5	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,13	84,84	85,04	DLHK
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	DLHK
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	1	DLHK
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1	DLHK
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1	DLHK
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100	DLHK
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100	DLHK
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	1	DLHK
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	Tidak Ada	Ada	Ada	DLHK
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100	DLHK
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	26,03	29,18	32,47	DLHK
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	73,13	100	100	DLHK

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	74	24,30	22,81	DLHK
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35	41,28	46,15	DLHK
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	2	DLHK
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	33,85	36,95	DLHK
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32,36	36,62	39,93	DLHK
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	DLHK
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1,095	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,950	0,8	0,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		1,000	0,5	0,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Ada	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el	%	109,55	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	111,06	80	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	73,39	100	100	DPMD
2	7	2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)		100,00	146	146	DPMD
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	9,09	100	100	DPMD
2	7	4	Persentase PKK Aktif	%	100,00	100	100	DPMD
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100,00	100	100	DPMD
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya			100	100	DPMD

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	7	7	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK		100,00	93	93	DPMD
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,63	0,53	0,52	Dinas PPKB & P3A
2	8	2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,130	2,50	2,61	Dinas PPKB & P3A
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	81,48	78,58	86,92	Dinas PPKB & P3A
2	8	4	Persentase Perangkatat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	11,11	26,42	63,57	Dinas PPKB & P3A
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1	Dinas PPKB & P3A
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	Dinas PPKB & P3A
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	Dinas PPKB & P3A
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,76	16,85	15,37	Dinas PPKB & P3A
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	13,47	18,33	21,60	Dinas PPKB & P3A
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,97	74,86	74,36	Dinas PPKB & P3A
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		23,5	89,79	89,79	Dinas PPKB & P3A
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,76	4,45	4,53	Dinas PPKB & P3A
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,62	11,84	10,57	Dinas PPKB & P3A
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,77	39,09	42,04	Dinas PPKB & P3A
2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	35,77	53,50	66,97	Dinas PPKB & P3A

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80,95	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	71,54	79,78	88,55	Dinas PPKB & P3A
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	72,09	91,16	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	10	Dinas PPKB & P3A
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	2,5	1,03	0,63	Dinas PPKB & P3A
2	8	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	26,00	25,16	23,84	Dinas PPKB & P3A
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	86,91	65,05	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,000	0	0	Dinas PPKB & P3A
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100,00	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	83,90	38,87	39,68	Dinas PPKB & P3A
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,00	22,79	23,05	Dinas PPKB & P3A
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01	0,01	0,01	Dinas PPKB & P3A
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	Dinas Perhubungan

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	9.125	12.911	10.924	Dinas Perhubungan
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,15	1,17	1,07	Dinas Perhubungan
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	98,67	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu		0,00	68,66	74,68	Dinas Perhubungan
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	3.994.925	28.134	28.237	Dinas Perhubungan
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,0005	0,010	0,014	Dinas Perhubungan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		N/A	91	99	Diskominfo
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/A	0,79	0,83	Diskominfo
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	N/A	84,60	86,00	Diskominfo
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		N/A	57,91	63,38	Diskominfo
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		N/A	91,33	98,74	Diskominfo
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	67,80	75,21	76,00	Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,99	98,97	99,65	Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	35	69	74	Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	54.322	780.755	814.435	Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-79,55	25	30	Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga					
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	89,29	90,71	94,28	Disparpora
2	13	2	Persentase wirausaha muda		2,59	3,37	3,85	Disparpora
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	21,57	20,55	Disparpora

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	41,03	50,69	Disparpora
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	73,65	52,30	57,43	Disparpora
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		3	19	19	Disparpora
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		2	3	3	Disparpora
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Statistik
2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Statistik
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100	Diskominfo
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	3	Disdikbud
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		58	59	60	Disdikbud
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	2	Disdikbud
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		6,34	34,67	28,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		71,54	45,16	49,12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,61	1,79	2,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	27.884	69.007	84.714	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	15.933	12.288	13.456	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	53,26	63,78	81,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100.00	100.00	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	5,56	1,39	1,84	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2			Urusan Pemerintahan Pilihan					
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	92,61	130	134	Dinas Perikanan
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	54.911	57.120,4	59.165,0	Dinas Perikanan
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	168.040	5176	5176	Dinas Perikanan
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	73,28	72,2	74,7	Dinas Perikanan
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
2	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	373.095	395.675	460.991	Disparpora
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4	Disparpora
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	6,11	7,34	Disparpora
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		25,48*	25,15	24,46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	53,35	79,42	85,86	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak		5.295.632	3.276.782	3.408.295	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			<i>Sapi Potong</i>	<i>Ekor</i>	71.801	79.324	80.329	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	<i>Ekor</i>	4.384.830	2.445.959	2.499.367	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			<i>Ayam Ras Petelur</i>	<i>Ekor</i>	839.001	751.499	828.599	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral					
2	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	129572	101.663	103.209	PLN
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,72	0,74	0,78	Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit	40	43	43	Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
2		1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,17	0,18	0,21	Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah
2			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
2	1		Sekretariat Daerah					
2	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,60	2,76	2,87	Sekretariad Daerah
2	2		Sekretariat DPRD					
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	DPRD
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	DPRD
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	DPRD
2			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
2	1		Perencanaan					
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100	Bappelitbangda

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	2		Keuangan					
2	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	BPKP
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,77	3,00	2,50	BPKP
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%		0	0	BPKP
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	28,05	21,40	21,80	BPKP
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,44	19,44	19,84	BPKP
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKP
2	2	7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,54	0,62	1,02	BPKP
2	2	8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,95	11,76	11,41	BPKP
2	3		Kepegawaian					
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	BKPSDM
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	74,53	89,35	89,99	BKPSDM
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	37,73	84,94	96,68	BKPSDM
2	4		Pendidikan Dan Pelatihan					
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	29	29	BKPSDM
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	538	1703,112	1440,75968	BKPSDM
2	5		Penelitian Dan Pengembangan					
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	60	9,56	12,55	Bappelitbangda
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	12,06	13,91	Bappelitbangda
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	61,01	61,35	Bappelitbangda
2	5	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah,		100			Bappelitbangda
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
2	6		Inspektorat Daerah					
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	68,4	79,47	100	Inspektorat
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,181	0,000	Inspektorat
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	7	6	4	Inspektorat
2			Unsur Pemerintahan Umum					
2	7		Kesatuan Bangsa dan Politik					

Nomor			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	70,5	71,5	Kesbangpol
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	Kesbangpol
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	Kesbangpol
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH					
3			Kemampuan Ekonomi Daerah					
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		980.966	985.837	1.080.641	BPS
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		459.488	472.763	532.129	BPS
3	3	3	Nilai Tukar Petani		100,39	104,83	107,22	BPS
3			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	100	92	99	PUTR
3			Iklim Berinvestasi					
3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	11,62	25,95	26,92	Polres
3			Sumberdaya Manusia					
3	1	1	Rasio Ketergantungan		41,75	37,22	33,56	BPS

Sumber : Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba 2023, diolah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024
Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	PENDIDIKAN				
1.1	Pendidikan Dasar				
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	94,6	100	100
1.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional			100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan				
2	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	94,2	100	100
2.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional			100	100
1.3	Pendidikan anak usia dini				
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	83,9	100	100
3.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional			100	100
2	KESEHATAN				
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah				
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	100	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita				
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	67	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi				
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus				
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	84	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis				
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficy Virus)				
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	%	90,26	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic				
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97,49	100	100
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;				
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	1000	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	93	100	100
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum				

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadat	%	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana				
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
6	SOSIAL				
6.1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti				
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	97,64	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	94,20	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	99,13	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	94,28	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota				
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2023, diolah

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untukmengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional

dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadiprioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals*(TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Suistainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,39	6,43528304	6,21371072	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	NA	93,51221659	97,04962212	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	NA	12,33081791	14,65142388	Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	97,36	100	100	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	14945	11641,6	10956,8	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	99	89,11724752	90,0229967	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	99	99,0757	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	NA	65,59945	65,9226	Dinas PPKB,PPPA
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	85,46	86,932	87,776	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	76,87	76,752	90,036	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	87,53	100,1616	103,7388	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	84,48	91,3187	96,6016	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	9829,00%	65,87%	66,51%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	NA	32812,44864	27167,59818	PLN
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	4	-	-	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	10	25	30	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	26	449	483	Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	NA	496	547	Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)		NA			Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000	125.000.000	-	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	Ada	Ada	BPBD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	NA	24,17862029	24,43816038	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	NA	27,7514	28,5152	Dinas Sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen		0	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	5,96	5,995	4,36	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen		0	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen		0	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	5,4	5,789	4,962	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	5,4	1,683	1,224	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	3,17	1,172	0,586	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	12	11,522	9,876	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	54,65	83,90926109	87,21234812	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	88,5	82,88	85,84	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		NA	0	0	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	8	2,43	1,91	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	99	89,12	90,02	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Persen	99	87,87	88,59	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	0	6,78	6,38	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	1,27	5,65	5,32	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	1,27	6,40	6,02	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	100	99,19	99,67	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,76	0,01	0,01	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	NA	118,86	117,64	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,05	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	NA	96,60	82,80	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	NA	0,17	0,14	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	16,48	6,83	6,61	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	32,24	-0,07	-0,14	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		NA	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		55,79	0,00	0,00	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	55,75	83,14	85,86	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	10,2	29,04	32,55	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		23,05	0,00	0,00	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,13	1,62	1,39	Dinas PPKB,PPPA
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	NA	77,39	80,31	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	NA	9,98	9,39	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	NA	400128,32	417248,76	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	NA	84,76	89,07	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	23,75	34,77	31,38	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100%	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	NA	1,32	1,63	Dinas Kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	92	95,4	97,2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	89,71	100,0	100,0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	68,11	84,3	88,6	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	100,9	112,8	112,9	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	92,03	104,4	108,9	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	100	9,7	10,6	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	93,33	65,5	76,6	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	32	23,2	25,6	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	82	111,1	113,2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	92,56	99,8	99,9	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	92,56	93,2	93,3	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	91	95,4	97,2	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	47,05	58,0	61,8	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	5,20	5,60	Dinas PPKB,PPPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	9,3	15,22	13,04	Dinas PPKB,PPPA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	23	49,70	42,60	Dinas PPKB,PPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	NA	15,40	13,20	Dinas PPKB,PPPA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100	72,80	78,40	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	27	1,00	1,00	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		NA	0,00	0,00	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		23,5	0,00	0,00	Dinas PPKB,PPPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	NA	22,04	22,72	Dinas PPKB,PPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	NA	19,50	19,87	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen		0,00	0,00	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	28,49	9,98	9,39	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	NA	4,61	4,73	Dinas PPKB,PPPA
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	84,46	96,82	98,27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	92,43	91,57	92,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA	92,43	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	85,46	91,57	92,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		97,88	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	136	54,61	60,52	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	136	144,16	146,88	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	NA	140,08	141,44	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	74,71	2,13	2,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	8	22,78	24,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		NA	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	NA	78,22	82,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	55	5,00	6,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		NA	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua					
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		NA	0,00	0,00	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
7.3.1*	Intensitas energi primer.		NA	0,00	0,00	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	0,43	1,46	1,81	Bappelitbangda
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	34,43	41,88	44,36	Bappelitbangda
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,1	9,09	9,43	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,22	0,35	0,40	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	21,68	45,19	45,33	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,26	36,46	36,86	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	61,33	16,90	18,98	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	Rp34.143	50531,64	55994,52	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,03	0,02	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	0,1	0,09	0,08	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	58,3	49,52	53,33	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		38	0,00	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang		688,55	820,40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang		286679,90	289463,20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp		0,00	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.			0,00	0,00	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	1	1,60	1,80	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		2,5	0,00	0,00	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	45,38	46,12	50,29	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi					
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	3	18,80	24,40	Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	6,68	7,96	8,12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,72	5,56	5,62	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.			0,00	0,00	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			0,00	0,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.			0,00	0,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen		65,00	70,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	84,46	97,29	98,24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	57,91	44,29	44,72	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara					
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	NA	0,36	0,36	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,39	6,38	6,14	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	109	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	0	4,40	2,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	14	121,33	125,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Desa	NA	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	NA	7,71	7,66	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		NA	0,00	0,00	Dinas Sosial
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		NA	0,00	0,00	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	NA	12,33	14,65	Dinas Sosial
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	100	95,04	95,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			0,00	0,00	Bappelitbangda
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	4	0,00	0,00	BPBD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100	70,00	60,00	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		ada	Ada	Ada	BPBD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000	125.000.000	0,00	BPBD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	94,77	77,97	79,44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada	BPBD
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan					
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	35	62,83	75,39	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Ton	24,95	64,64	65,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	2,50	3,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Ton	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		1	Ada	Ada	BPBD

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	4	0,00	0,00	BPBD
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan					
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	55.522,60	56833,05	57824,03	Dinas Perikanan
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	NA	997,05	1040,40	Dinas Perikanan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	2	6,16	5,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus	78	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen	100	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT		1,00	1,00	Dinas PPKB,PPPA
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang		51,20	25,60	Dinas PPKB,PPPA
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang		206,80	103,40	Dinas PPKB,PPPA
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			0,00	0,00	Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	85,12	94,26	95,17	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan		WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persen	B	70,60	73,75	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	97%	98,62	99,10	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persen	68,91	62,40	64,62	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).			0,00	0,00	Bappelitbangda
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20	22,04	22,72	Dinas PPKB,PPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	0,2	46,95	57,60	Dinas PPKB,PPPA
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		97,31	88,64	93,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		97,31	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	NA	80,34	81,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	98,29	2,50	3,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			Ada	Ada	Setda, Bagian Hukum dan HAM
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp (Jt)	1.375.869	1.339.627	1.352.633	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen		0,99	1,20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	2,43	0,99	1,00	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		50	0,00	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	NA	65,00	70,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	100	45,35	46,14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			0,00	0,00	Bappelitbangda
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			0,00	0,00	Bappelitbangda
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	100,00	100,00	Bappelitbangda
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	100	86,67	93,34	Bappelitbangda
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		NA	11,69	13,59	Bappelitbangda
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.			0,00	0,00	Bappelitbangda
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	NA	9781,56	10376,75	Bappelitbangda
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen		100,00	100,00	Bappelitbangda

BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026, serta memperhatikan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dan RKP Tahun 2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2024 ini sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD Tahun 2024 yang mana untuk memastikan APBD Tahun 2024 telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD akan dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang nantinya menjadi harapan untuk pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut :

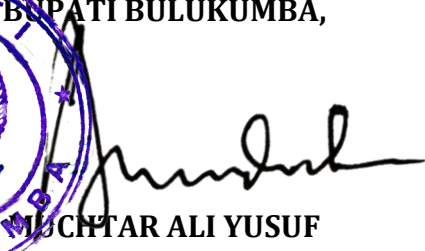
1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJPD dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunanlainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu : ***“Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Perwujudan Kawasan Mandiri”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut

dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

**BUPATI BULUKUMBA,**

MUCHTAR ALI YUSUF



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

Jalan Kenari No.1 Bulukumba Telp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com